

# 2023

Laporan Tahunan  
Annual Report

## Mengintegrasikan Nilai, Pembaharuan Strategi

Integrating Values, Renewing Strategies





# SANGGAHAN DAN BATASAN TANGGUNG JAWAB

## » Disclaimer and Limitation of Liability

Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara IV atau disebut "PTPN IV", "Perusahaan", "Perseroan", menyajikan informasi mengenai kinerja operasional dan kinerja keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022. Laporan Tahunan ini juga memuat informasi-informasi yang mengandung proyeksi, rencana, strategi, dan tujuan, yang bukan merupakan pernyataan data historis dan pada umumnya menggunakan kata seperti "percaya", "mengharapkan", "mengantisipasi", "memperkirakan", "memproyeksikan" atau kata-kata bermakna serupa lainnya, dan dapat dikategorikan sebagai pernyataan yang dapat bersifat pandangan ke depan (*forward-looking statement*) sesuai definisi pada ketentuan yang berlaku.

Pernyataan yang mengandung pandangan ke depan memuat risiko dan ketidakpastian atas hasil dan kejadian yang mungkin berbeda secara material dari apa yang diperkirakan dan disebutkan dalam pernyataan tersebut termasuk yang disebabkan oleh perubahan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial di Indonesia. Penyebutan satuan mata uang Rupiah atau Rp atau IDR merujuk pada mata uang resmi Indonesia, sedangkan "Dolar AS atau USD" merujuk pada mata uang resmi Amerika Serikat. Kecuali jika disebutkan lain, semua informasi keuangan disajikan dalam mata uang Rupiah sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia.

The Annual Report of PT Perkebunan Nusantara IV, also known as "PTPN IV", "the Company", provides information on the operational and financial performance for the years ending on December 31, 2023, and December 31, 2022. This Annual Report also includes projections, plans, strategies, and objectives, which are forward-looking statements and may use terms such as "believe," "to expect," "to anticipate," "to estimate," "to project," or similar expressions, and may be categorized as forward-looking statements according to the definition in the applicable provisions.

These statements involve risks and uncertainties due to potential differences between estimated and actual results, influenced by changes in the economic, political, and social environment in Indonesia. References to the currency unit Rupiah or Rp or IDR denote the official currency of Indonesia, while "US Dollar or USD" refers to the official currency of the United States. Unless specified otherwise, all financial information is presented in Rupiah in line with Indonesian Financial Accounting Standards (SAK).



# 2023

## MENGINTEGRASIKAN NILAI, PEMBAHARUAN STRATEGI

Integrating Values, Renewing Strategies

Tahun 2023 menjadi masa yang penuh tantangan bagi ekonomi global dan dunia bisnis. Perseroan berupaya menjaga dan meningkatkan pertumbuhan yang berkualitas dengan memperkuat fondasi integrasi dan memperkuat strategi pembaharuan. Sebagai perusahaan kelapa sawit, Perseroan mengutamakan kualitas produknya untuk masyarakat dan pemangku kepentingan. Upaya ini sejalan dengan persaingan global yang mendorong terus berinovasi dan memberikan karya terbaik, guna mendapatkan kepercayaan dari para pemangku kepentingan serta berkontribusi pada pertumbuhan berkelanjutan dalam industri kelapa sawit di Indonesia.

The year 2023 has been a challenging period for the global economy and the business world. The Company strives to maintain and enhance quality growth by strengthening its integration foundation and reinforcing renewal strategies. As a palm oil company, the Company prioritizes the quality of its products for the community and stakeholders. This effort aligns with global competition, which continuously drives innovation and the delivery of the best products to earn stakeholders' trust and contribute to sustainable growth in Indonesia's palm oil industry.

## KESINAMBUNGAN TEMA

### » Theme Sustainability

Upaya pemerintah mengarahkan seluruh perusahaan perkebunan sawit dalam satu sinergi akan membawa PTPN IV menuju pertumbuhan yang kuat dan berkelanjutan serta memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan. Pemanfaatan potensi ini akan semakin mengokohkan PTPN IV sebagai lokomotif perusahaan perkebunan kelapa sawit serta menjadi pilihan utama dalam melakukan kerja sama bisnis. Kami terus meningkatkan kolaborasi dengan berbagai pihak di kancah nasional maupun global untuk mendorong portofolio bisnis yang semakin besar dengan menciptakan nilai tambah yang mendukung kesinambungan Perseroan dalam jangka panjang guna menjadikan PTPN IV sebagai perusahaan terpercaya, terdepan, terbesar dan terbaik berkelas dunia.

The government's collaborative efforts to unite all palm oil plantation companies in one synergy are propelling PTPN IV towards solid and sustainable growth, ensuring optimal benefits for all stakeholders. This collective endeavor further strengthens PTPN IV as a driving force for oil palm plantation companies and a preferred choice for business collaborations. We are actively expanding our partnerships with various entities at national and global levels, fostering a diverse business portfolio that creates value and supports the Company's long-term sustainability. We aim to establish PTPN IV as a trusted, leading, largest, and best world-class company.

Komitmen PTPN IV untuk senantiasa memberikan karya terbaik dalam mendukung pembangunan nasional. Dengan segenap kekuatan dan potensi yang dimiliki, PTPN IV terus menguatkan landasan dan fokus memberikan layanan dengan standar mutu dan kualitas terbaik. Dalam rangka mengoptimalkan perjalanan perusahaan ke depan, PTPN IV terus melakukan perbaikan di segala bidang. Menciptakan solusi kreatif untuk segala kendala yang datang; Inovatif dalam menyikapi dunia yang berubah dengan cepat; dan berintegrasi dengan segenap insan perusahaan juga mitra bisnis dalam mewujudkan sinergi positif demi kemajuan bersama.

PTPN IV is committed to always providing the best work to support national development. With all its strengths and potential, PTPN IV continues to strengthen its foundation and focus on providing services with the best quality standards and quality. In order to optimize the company's future journey, PTPN IV continues to make improvements in all areas. Creating creative solutions for all obstacles that come; Innovative in responding to a rapidly changing world; and Integrate with all company personnel as well as business partners in realizing positive synergies for mutual progress.

2022



**Sustainable for  
World Class Company**

2021



**Rising High  
Create, Innovate, Integrate**

# DAFTAR ISI

## » Table of Contents

- 1 Sanggahan dan Batasan Tanggung Jawab  
Disclaimer and Limitation of Liability
- 3 Kestinambungan Tema  
Theme Sustainability
- 4 Daftar Isi  
Table of Contents
- 6 Transformasi BUMN  
SOE Transformation
- 7 Transformasi PTPN  
PTPN Transformation
- 8 Kinerja 2023  
2023 Performance



### IKHTISAR 2023 2023 Highlights

- 14 Ikhtisar Keuangan  
Financial Highlights
- 17 Ikhtisar Kinerja Operasional  
Operational Performance Highlights
- 18 Informasi Harga Saham  
Share Price Information
- 18 Informasi Obligasi, Sukuk, dan Obligasi Konversi  
Information on Bonds, Sukuk, and Convertible Bonds
- 19 Penghargaan  
Awards
- 21 Sertifikasi  
Certifications
- 22 Peristiwa Penting  
Event Highlights



### LAPORAN MANAJEMEN Management Report

- 30 Laporan Dewan Komisaris  
Report of the Board of Commissioners
- 36 Laporan Direksi  
Report of the Board of Directors
- 42 Tanggung Jawab Laporan Tahunan  
Annual Report Responsibility



### PROFIL PERUSAHAAN Company Profile

- 46 Identitas Perusahaan  
Corporate Identity
- 48 Riwayat Perusahaan  
Company History
- 49 Logo PTPN IV  
PTPN IV Logo
- 50 Tonggak Sejarah  
Milestones
- 53 Visi dan Misi Perusahaan  
Corporate Vision and Mission
- 54 Nilai-Nilai Perusahaan  
Corporate Values
- 55 Budaya Perusahaan  
Corporate Culture
- 56 Kegiatan dan Bidang Usaha  
Activities and Line of Business
- 58 Produk dan Jangkauan Pasar  
Products and Market Range
- 60 Wilayah Operasional  
Operational Area
- 62 Struktur Organisasi  
Organization Structure
- 64 Keanggotaan dalam Organisasi  
Membership in Organizations
- 65 Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi  
Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors
- 66 Dewan Komisaris  
Board of Commissioners
- 67 Profil Dewan Komisaris  
Board of Commissioners' Profile
- 73 Direksi  
Board of Directors
- 74 Profil Direksi  
Board of Directors' Profile
- 82 Komposisi Pemegang Saham  
Shareholders' Composition
- 83 Informasi Mengenai Pemegang Saham Utama dan Pengendali  
Information Regarding Major and Controlling Shareholders
- 84 Struktur Grup Perseroan  
Company Group Structure
- 85 Entitas Anak, Perusahaan Asosiasi, dan Perusahaan Ventura Bersama  
Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures
- 87 Kronologi Pencatatan Saham  
Share Listing Chronology

- 87 Kronologi Pencatatan Efek Lainnya  
Other Securities Listing Chronology
- 88 Lembaga atau Profesi Penunjang Perusahaan  
Institutions or Professions Supporting the Company
- 89 Alamat Unit Usaha atau Kantor Perwakilan  
Address of Business Unit or Representative Office
- 100 Situs Resmi Perusahaan  
The Company's Official Website



### SUMBER DAYA MANUSIA Human Resources

- 104 Sumber Daya Manusia  
Human Resources
- 114 Teknologi Informasi (TI)  
Information Technology (IT)



### ANALISIS & PEMBAHASAN MANAJEMEN Management Discussion & Analysis

- 120 Tinjauan Ekonomi Makro  
Macro-Economic Review
- 121 Tinjauan Industri  
Industry Review
- 122 Tinjauan Operasi per Segmen Usaha  
Operational Review by Business Segment
- 128 Tinjauan Kinerja Keuangan  
Financial Performance Review
- 136 Kemampuan Membayar Hutang  
Solvency
- 136 Tingkat Kolektibilitas Piutang  
Receivables Collectibility
- 137 Struktur Modal  
Capital Structure
- 139 Ikatan Material untuk Investasi Barang Modal  
Material Commitments for Capital Goods Investment
- 139 Realisasi Investasi Barang Modal  
Realization of Capital Goods Investment

- 141 Target dan Realisasi Tahun 2023  
Target and Realization in 2023
- 142 Informasi dan Fakta Material yang Terjadi Setelah Tanggal Laporan Akuntan  
Material Information and Facts that Occurred After the Date of the Accountant's Report
- 144 Prospek Usaha  
Business Outlook
- 145 Aspek Pemasaran  
Marketing Aspect
- 146 Kebijakan Dividen  
Dividend Policy
- 146 Program Kepemilikan Saham oleh Karyawan dan/atau Manajemen (ESOP/MSOP)  
Share Ownership Program by Employees and/or Management (ESOP/MSOP)
- 147 Penggunaan Dana Penawaran Umum  
Use of Proceeds
- 147 Informasi Material Terkait Investasi, Ekspansi, Divestasi, Penggabungan atau Peleburan Usaha, Akuisisi, atau Restrukturisasi Utang/Modal  
Material Information Related to Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, or Debt/Capital Restructuring
- 148 Informasi Transaksi Material yang Mengandung Benturan Kepentingan dan Transaksi dengan Afiliasi  
Material Information Containing Conflicts of Interest and Transactions with Affiliates
- 149 Perubahan Peraturan Perundang-Undangan  
Changes in Legislation
- 150 Perubahan Kebijakan Akuntansi  
Changes in Accounting Policy
- 151 Informasi Keuangan yang Telah Dilaporkan yang Mengandung Kejadian yang Sifatnya Luar Biasa dan Jarang Terjadi  
Reported Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events
- 152 Kontribusi Kepada Negara  
Contribution to the Country
- 153 Informasi Kelangsungan Usaha  
Business Continuity Information



## TATA KELOLA PERUSAHAAN

Good Corporate Governance

- 156 Tata Kelola Perusahaan  
Good Corporate Governance

- 156 Komitmen Perusahaan  
Company's Commitment
- 157 Dasar Hukum Penerapan Praktik GCG  
Legal Basis for Implementing GCG Practices
- 158 Kebijakan GCG  
GCG Policies
- 158 Prinsip-Prinsip GCG  
GCG Principles
- 159 Penilaian Penerapan GCG  
GCG Implementation Assessment
- 160 Tindak Lanjut atas Area of Improvement  
Follow-up on Areas of Improvement
- 167 Struktur Tata Kelola Perusahaan  
Corporate Governance Structure
- 167 Praktik *Bad Corporate Governance*  
Bad Corporate Governance Practice
- 168 Rapat Umum Pemegang Saham  
General Meeting of Shareholders
- 173 Dewan Komisaris  
Board of Commissioners
- 183 Komisaris Independen  
Independent Commissioner
- 183 Direksi  
Board of Directors
- 182 Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi  
Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Directors
- 193 Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi  
Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors
- 196 Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan  
Assessment of the Company's Soundness Level
- 196 Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi  
Remuneration of Board of Commissioners and Directors
- 199 Rapat Dewan Komisaris dan Direksi  
Meeting of the Board of Commissioners and Directors
- 203 Hubungan Afiliasi  
Affiliate Relationships
- 204 Organ Pendukung Dewan Komisaris  
Supporting Organs of the Board of Commissioners
- 204 Sekretaris Dewan Komisaris  
Secretary of the Board of Commissioners
- 206 Komite Audit  
Audit Committee
- 212 Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG  
Risk Management and GCG Monitoring Committee
- 219 Fungsi Nominasi dan Remunerasi  
Nomination and Remuneration Functions

- 219 Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary
- 226 Satuan Pengawas Internal  
Internal Supervisory Unit
- 233 Akuntan Publik  
Public Accountant
- 234 Manajemen Risiko  
Risk Management
- 244 Sistem Pengendalian Internal  
Internal Control System
- 246 Kasus Hukum dan Perkara Penting  
Legal Cases and Lawsuits
- 249 Informasi atas Sanksi Administratif  
Information on Administrative Sanctions
- 249 Kepatuhan Terhadap Pajak  
Tax Compliance
- 250 Akses Informasi dan Data Perusahaan  
Access to Company Information and Data
- 252 Kode Etik Perusahaan  
Code of Ethics
- 255 Inisiatif Antikorupsi  
Anti-Corruption Initiatives
- 256 Sistem Pelaporan Pelanggaran  
Whistleblowing System
- 261 Benturan Kepentingan dan Hubungan dengan Pihak Berelasi  
Conflict of Interest and Relationships with Related Parties
- 262 Kebijakan Antigratifikasi  
Anti-Gratification Policy
- 264 Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)  
Management of State Officials' Wealth Reports (LHKPN)



## TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social Responsibility

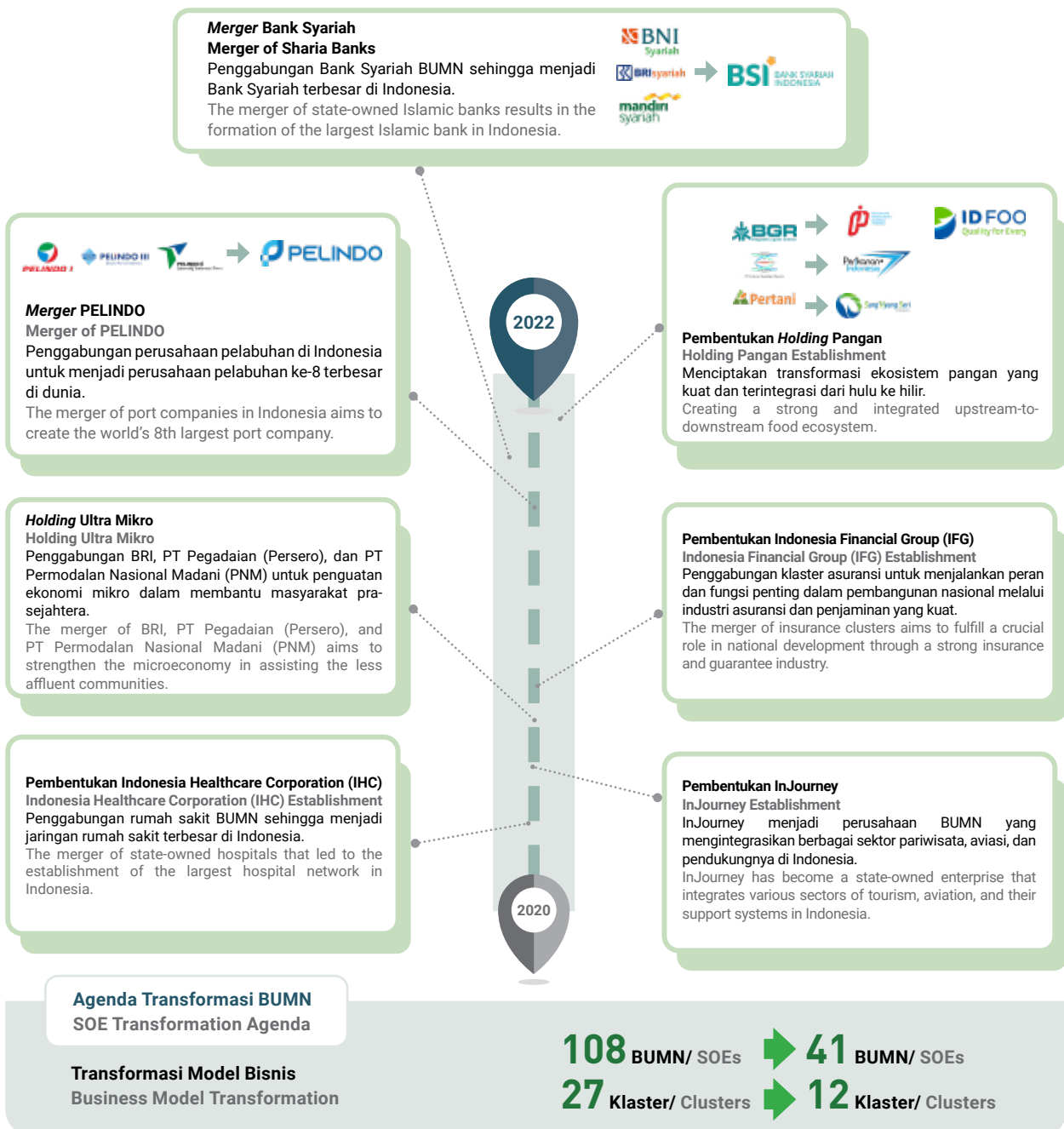
- 268 Laporan Keberlanjutan  
Sustainability Report
- 269 Laporan Keuangan Konsolidasian  
Consolidated Financial Statements

# TRANSFORMASI BUMN

## » SOE Transformation

Sebagai lokomotif perekonomian nasional, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) terus berbenah untuk menghadapi tantangan dan perubahan zaman untuk menjadi entitas bisnis yang kuat dan efisien. Sepanjang 2019-2024, Kementerian BUMN telah melakukan efisiensi dan restrukturisasi BUMN melalui pembentukan *holding*, *merger*, akuisisi, dan likuidasi. Jumlah BUMN yang sebelumnya mencapai 108 perusahaan dipangkas menjadi 41 perusahaan, dan kluster BUMN yang sebelumnya berjumlah 27 kluster dikurangi menjadi 12 kluster, di mana setiap Wakil Menteri BUMN menaungi 6 kluster.

As the locomotive of the national economy, State-Owned Enterprises (SOEs) continue to refine their operations to face the challenges and changes of the times, aiming to become robust and efficient business entities. From 2019 to 2024, the Ministry of SOEs has pursued efficiency and restructuring within SOEs by forming holdings, mergers, acquisitions, and liquidations. The number of SOEs, previously totaling 108 companies, has been reduced to 41, and the clusters of SOEs, previously numbering 27, have been condensed to 12 clusters, with each Deputy Minister of SOEs overseeing 6 clusters.





# TRANSFORMASI PTPN

## » PTPN Transformation



Perkebunan Nusantara

Transformasi PTPN adalah bagian dari transformasi BUMN. Sepanjang tahun 2021-2024, PT Perkebunan Nusantara (Persero) atau PTPN III bertindak sebagai *Holding* BUMN Perkebunan Nusantara, dan telah melakukan berbagai transformasi di tubuh PTPN. Salah satu transformasi yang dilakukan yakni pembentukan *sub-holding*, dimana PTPN III melakukan pembentukan tiga *sub-holding* yakni PTPN IV, PTPN I, dan PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

*Sub-holding* SGN terbentuk sejak tahun 2021, dan merupakan hasil konsolidasi 35 pabrik gula yang sebelumnya dikelola oleh PTPN II, VII, IX, X, XI, XII, dan XIV. SGN bertugas merevitalisasi industri gula nasional dan meningkatkan produksi gula nasional.

Sebagai langkah bersejarah dalam sektor pertanian Indonesia, pada tanggal 1 Desember 2023, PTPN III mengumumkan penggabungan 13 PTPN menjadi dua *sub-holding*, yakni PTPN IV dan PTPN I. Pembentukan dua *sub-holding* ini merupakan implementasi dari Program Strategis Nasional (PSN) yang bertujuan untuk mewujudkan kemandirian, khususnya di bidang ketahanan pangan dan energi.

PTPN transformation is part of the transformation of SOEs. Throughout the years 2021-2024, PT Perkebunan Nusantara (Persero) or PTPN III acted as the holding of the national plantation SOEs (Holding BUMN Perkebunan Nusantara) and has undertaken various transformations within PTPN. One of the transformations carried out is the formation of sub-holdings, where PTPN III established three sub-holdings, namely PTPN IV, PTPN I, and PT Sinergi Gula Nusantara (SGN).

The SGN sub-holding was formed in 2021, resulting from the consolidation of 35 sugar mills previously managed by PTPN II, VII, IX, X, XI, XII, and XIV. SGN is tasked with revitalizing the national sugar industry and increasing national sugar production.

As a historic step in Indonesia's agricultural sector, on December 1, 2023, PTPN III announced the merger of 13 PTPNs into two sub-holdings, PTPN IV and PTPN I. The formation of these two sub-holdings implements the National Strategic Program (PSN) aimed at achieving self-reliance, particularly in food and energy security.



*Sub-holding* PTPN IV dibentuk melalui penggabungan PTPN V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai *surviving entity* dan *spin off* sebagian aset dan liabilitas PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV. PTPN IV diharapkan menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600 ribu hektar pada 2026, dan akan menjadi pemain utama industri sawit dunia. Sehingga, PTPN IV dipercaya mampu berkontribusi meningkatkan produksi CPO nasional dan minyak goreng dalam negeri, yaitu dari 460 ribu ton/tahun pada 2021 menjadi 1,8 juta ton/tahun pada tahun 2026, atau meningkat hingga 4 kali lipatnya dalam waktu 5 tahun.

Sedangkan *sub-holding* PTPN I dibentuk melalui penggabungan PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, dan XIV ke dalam PTPN I. Perannya sangat penting, karena ditunjuk untuk menjadi Perusahaan Manajemen Aset Perkebunan Unggulan. Mandat PTPN I, antara lain untuk mengoptimalkan dan melepaskan aset perkebunan, mengelola tanaman perkebunan, diversifikasi bisnis, dan mengembangkan inisiatif bisnis ramah lingkungan. Kegiatan ini bertujuan untuk menambah nilai Perseroan dan mendukung ketahanan ekonomi Indonesia.

The PTPN IV sub-holding was formed by merging PTPN V, VI, and XIII into PTPN IV as the surviving entity and spin-off of several assets and liabilities of PTPN III (Persero) into PTPN IV. PTPN IV is expected to become the world's largest palm oil company in land area, reaching more than 600 thousand hectares by 2026, and will be a significant player in the global palm oil industry. Therefore, PTPN IV is trusted to contribute to increasing national CPO and domestic cooking oil production, from 460 thousand tons/year in 2021 to 1.8 million tons/year by 2026, or an increase of up to 4 times within 5 years.

Meanwhile, the PTPN I sub-holding was formed by merging PTPN II, VII, VIII, IX, X, XI, XII, and XIV into PTPN I. Its role is crucial, as it is designated the Leading Plantation Asset Management Company. PTPN I's mandate includes optimizing and releasing plantation assets, managing plantation crops, diversifying businesses, and developing environmentally friendly business initiatives. These activities aim to add value to the Company and support Indonesia's economic resilience.

# KINERJA 2023

## » 2023 Performance

**Total areal konsesi kelapa sawit yang dikelola Perseroan pada tahun 2023 mencapai 471.988 ha, terdiri dari:**

**The total oil palm concession area cultivated by the Company in 2023 reached 471,988 ha, consisting of:**

Tanaman Menghasilkan/Yielding Crops:



**338.018** ha

Tanaman Belum Menghasilkan/Unyielding Crops:



**35.134** ha

Tanaman Baru (TB)/Tanaman Ulang (TU)/Tanaman Tahun Ini (TTI)/New Crop/  
Replanted Crops/Current Year Crops:



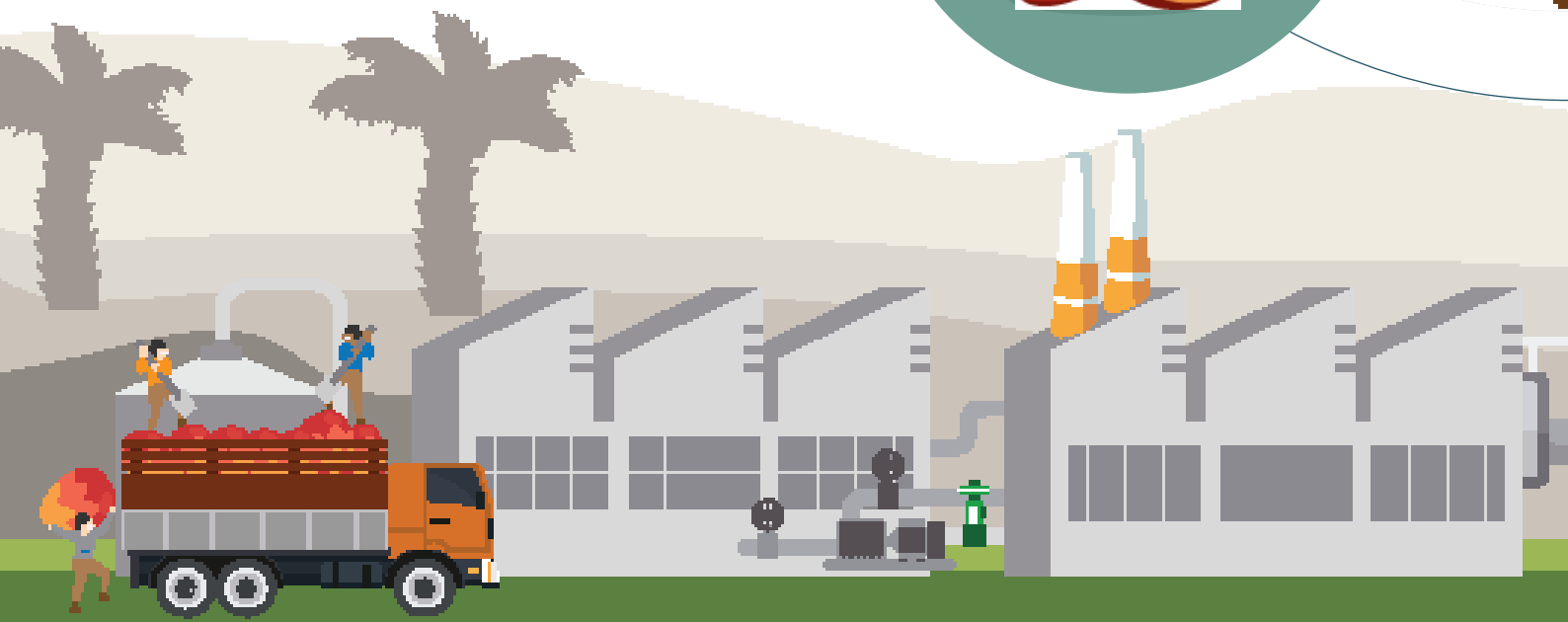
**88.820** ha

Tanaman Tahun Akan Datang/Future Year Crops:



**10.016** ha

**471.988** ha





**Produk utama yang dihasilkan Perseroan adalah:**  
The Company's main products are as follows:

**Minyak Kelapa Sawit (Crude Palm Oil/CPO)**



**Minyak Inti Sawit (Palm Kernel Oil/PKO)**



**Inti Sawit (Palm Kernel/PK)**



**Bungkil Inti Sawit (Palm Kernel Meal/PKM)**



# 239

## Unit Usaha/Business Units

Per 31 Desember 2023, Perseroan memiliki 107 unit perkebunan yang menghasilkan komoditas kelapa sawit, 25 unit perkebunan yang menghasilkan komoditas karet, 3 unit perkebunan yang menghasilkan komoditas teh, serta 70 PKS yang menghasilkan komoditas kelapa sawit dan 5PKO. Selain itu, Perseroan juga memiliki 11 pabrik pengolahan karet dan 4 pabrik teh. Perseroan juga beroperasi dalam 14 distrik.

As of December 31, 2023, the Company operates 107 palm oil plantations, 25 rubber plantations, and 3 tea plantations. In addition, the Company runs 70 palm oil mills (PKS) and 5 palm kernel oil mills (PKO). The Company also owns 11 rubber processing plants and 4 tea processing plants, and operates across 14 districts.



↓ 4,62%

## 9.990.095 ton/tons

Jumlah produksi Tandan Buah Segar (TBS) tahun 2023 dan komparasinya dibandingkan tahun 2022  
Total Fresh Fruit Bunches (FFB) production in 2023 and comparison to 2022

↑ 23,17%

## 99,87%

Rendemen CPO kebun sendiri tahun 2023 dan komparasinya dibandingkan tahun 2022  
CPO's Oil Extraction Rate (OER) from self-owned plantation in 2023 and comparison to 2022

↑ 3,95%

## 98,61%

Rendemen PK kebun sendiri tahun 2023 dan komparasinya dibandingkan tahun 2022  
PK's Oil Extraction Rate (OER) from self-owned plantation in 2023 and comparison to 2022





**Rp30.770**

miliar/billion

Total Pendapatan tahun 2023  
Total Revenue in 2023



**Rp4.364**

miliar/billion

Total Laba Sebelum Pajak  
Penghasilan tahun 2023  
Total Profit Before Income Tax  
in 2023



**Rp4.060**

miliar/billion

Total Penghasilan Komprehensif  
Tahun Berjalan tahun 2023  
Total Comprehensive Income for  
the Year in 2023



**Rp62.662**

miliar/billion

Jumlah Aset tahun 2023  
Total Assets in 2023



**Rp41.468**

miliar/billion

Jumlah Liabilitas tahun 2023  
Total Liabilities in 2023



**Rp21.194**

miliar/billion

Jumlah Ekuitas tahun 2023  
Total Equity in 2023



# IKHTISAR 2023

2023 Highlights





# 01

Perseroan mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya.

The Company operates plantations and processing of oil palm and tea commodities, including area and plant processing, nursery, and yielding plant maintenance, processing of commodities into raw materials for various industries, marketing of the commodities produced, and other supporting activities.



# IKHTISAR KEUANGAN

## » Financial Highlights

Dinyatakan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain  
Stated in million Rupiah unless stated otherwise

Uraian Description	Pertumbuhan Growth (CAGR) %		2022
<b>Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian</b> Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income			
Pendapatan Revenue	(9,02)	30.770.302	33.820.734
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	15,39	(21.365.310)	(18.515.130)
Laba Bruto Gross Profit	(38,55)	9.404.992	15.305.604
Laba Usaha Operating Profit	(41,16)	5.579.192	9.482.121
Laba Sebelum Pajak Penghasilan Profit Before Income Tax	(48,49)	4.364.078	8.472.298
Laba Tahun Berjalan Profit for the Year	(49,26)	3.646.548	7.186.279
Total Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan Total Comprehensive Revenue/(Loss) for the Year	(35,14)	4.060.328	6.260.363
Laba/(Rugi) Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Profit/(Loss) for the Year Attributable To:			
- Pemilik Entitas Induk - Parent Entity Owner	(48,67)	3.701.844	7.212.462
- Kepentingan Nonpengendali - Non-Controlling Interests	111,19	(55.296)	(26.183)
Total	(49,26)	3.646.548	7.186.279
Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan kepada: Comprehensive Profit/(Loss) for the Year Attributable To:			
- Pemilik Entitas Induk - Parent Entity Owner	(34,52)	4.116.326	6.286.075
- Kepentingan Nonpengendali - Non-Controlling Interests	117,79	(55.997)	(25.712)
Total	(35,14)	4.060.328	6.260.363
Laba Per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (Rupiah Penuh) Basic Earnings Per Share Attributable to Owners of the Parent Entity (Full Rupiah)	(40,64)	440.941	742.799
<b>Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian</b> Consolidated Statement of Financial Position			
Aset Lancar Current Assets	(30,41)	11.565.093	16.619.118
Aset Tidak Lancar Non-Current Assets	18,33	51.096.694	43.180.623
Jumlah Aset Total Assets	4,79	62.661.786	59.799.740
Liabilitas Jangka Pendek Short-term Liabilities	6,16	11.400.652	10.739.451
Liabilitas Jangka Panjang Long-term Liabilities	(3,79)	30.067.594	31.253.087
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	(1,25)	41.468.246	41.992.538
Jumlah Ekuitas Total Equity	19,02	21.193.540	17.807.202



Dinyatakan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain  
Stated in million Rupiah unless stated otherwise

Uraian Description	Pertumbuhan Growth (CAGR) %		2022
Modal Kerja Bersih Net Working Capital	(106,02)	441	(2.729.504)
Belanja Modal Capital Expenditure	(99,65)	3.106,19	898.629
<b>Laporan Arus Kas Konsolidasian</b> <b>Consolidated Statement of Cash Flow</b>			
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	(25,74)	4.027.890	5.423.989
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investment Activities	211,31	(7.862.862)	(2.525.770)
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	(135,69)	884.092	(2.477.352)
Keuntungan/ (Kerugian) Efek Selisih Kurs Gain/(Loss) on Currency Mismatch Securities	(118,66)	(9.549)	51.165
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalent at Beginning of the Year	8,31	6.154.237	5.682.205
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalent at End of the Year	(48,10)	3.193.808	6.154.237
<b>Rasio Keuangan</b> <b>Financial Ratios</b>			
Rasio Kas Cash Ratio	(34,26)	31,18	47,43
Rasio Cepat Quick Ratio	(52,95)	62,76	133,39
Rasio Lancar Current Ratio	(34,45)	101,44	154,75
Marjin Laba Kotor Gross Profit Margin	(32,46)	30,57	45,26
Marjin Laba Usaha Operating Profit Margin	(40,33)	18,14	30,40
Marjin Laba Bersih Net Profit Margin	(40,10)	3,85	6,43
Tingkat Pengembalian Modal (ROE) Return on Capital (ROE)	(6,72)	17,21	18,45
Tingkat Pengembalian Investasi (ROI) Return on Investment (ROI)	(45,47)	8,91	16,34
Imbal Hasil Rata-Rata terhadap Aset (ROA) Average Return on Assets (ROA)	(38,48)	5,82	9,46
Rasio Modal Sendiri terhadap Total Aset Ratio of Own Capital to Total Assets	(33,38)	34,15	51,26
Rasio Utang terhadap Aset Debt to Asset Ratio	(5,76)	66,18	70,22
Rasio Utang terhadap Modal Debt to Capital Ratio	108,83	193,80	95,08
Perputaran Persediaan (hari) Inventory Turnover (days)	(79,12)	21,99	105,31
Periode Penagihan (hari) Billing Period (days)	(30,79)	31,40	45,37
Perputaran Aset (%) Asset Turnover (%)	(10,29)	50,25	45,56



Dinyatakan dalam jutaan Rupiah kecuali dinyatakan lain  
Stated in million Rupiah unless stated otherwise

### Pendapatan Revenue



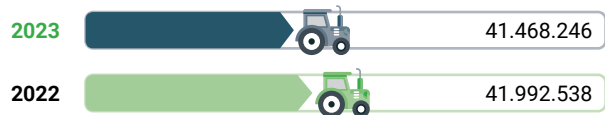
### Laba Tahun Berjalan Profit for the Year



### Jumlah Aset Total Assets



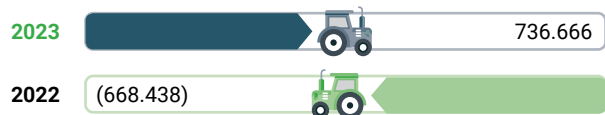
### Jumlah Liabilitas Total Liabilities



### Jumlah Ekuitas Total Equity



### Belanja Modal Capital Expenditure



# IKHTISAR KINERJA OPERASIONAL

## » Operational Performance Highlights

Uraian Description	Pertumbuhan Growth (CAGR) %		2022
<b>Harga Jual (Rp/kg)</b> Selling Price (Rp/kg)			
CPO	11,83	11.052	12.536
PK	39,82	3.924	6.521
PKO	(31,23)	12.658	18.406
PKM	(4,54)	1.663	1.742
<b>Produksi TBS (ton)</b> FFB Production (tons)			
Kebun Sendiri Self-owned Plantation	(6,01)	7.515.795	7.996.312
Pembelian Purchase	0,78	2.474.300	2.455.125
Jumlah Produksi TBS Total FFB Production	(4,41)	9.990.095	10.451.438
<b>Produksi CPO (ton)</b> CPO Production (tons)			
Kebun Sendiri Self-owned Plantation	(4,00)	1.723.214	1.794.957
Pembelian Purchase	(5,21)	453.109	444.920
Jumlah Produksi CPO Total CPO Production	(2,84)	2.176.323	2.239.878
<b>Produksi PK (ton)</b> PK Production (tons)			
Kebun Sendiri Self-owned Plantation	(5,21)	294.023	310.171
Pembelian Purchase	3,39	114.614	110.851
Jumlah Produksi PK Total PK Production	(2,94)	408.638	421.023
<b>Produktivitas Kebun Sendiri (ton/ha)</b> Productivity of Self-Owned Plantation (tons/ha)			
TBS FFB	(1,90)	22,23	22,66
CPO	(2,81)	5,19	5,34
PK	(3,30)	0,88	0,91



## INFORMASI HARGA SAHAM

### » Share Price Information

Modal Dasar Perseroan adalah sejumlah 11.700.000 saham. Modal ditempatkan dan disetor penuh tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp8.395.318.000.000 dengan perincian:

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 593.847 saham atau sebesar Rp593.847.000.000, yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna atau seluruhnya sebesar Rp1.000.000; dan
  - b. 593.846 Saham Seri B atau seluruhnya sebesar Rp593.846.000.000.
2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 7.801.471 Saham Seri B atau sebesar Rp7.801.471.000.000.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan belum melakukan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI). Dengan demikian, tidak terdapat informasi mengenai harga saham, jumlah saham yang beredar, kapitalisasi pasar, harga saham tertinggi dan terendah, harga saham penutupan, dan volume perdagangan saham.

The Company's authorized capital is 11,700,000 shares. As of December 31, 2023, the issued and fully-paid capital amounted to Rp8,395,318,000,000, with the following details:

1. The Republic of Indonesia holds 593,847 shares or Rp593,847,000,000, consisting of:
  - a. 1 (one) Series A Dwiwarna Share totaling Rp1,000,000; and
  - b. 593,846 Series B Shares totaling Rp593,846,000,000.
2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) holds 7,801,471 Series B Shares totaling Rp7,801,471,000,000.

As of December 31, 2023, the Company's shares are not listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX). Therefore, there is no available information regarding share prices, number of shares outstanding, market capitalization, highest and lowest share prices, closing share prices, and share trading volume.

## INFORMASI OBLIGASI, SUKUK, DAN OBLIGASI KONVERSI

### » Information on Bonds, Sukuk, and Convertible Bonds

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perseroan tidak menerbitkan obligasi, sukuk, dan obligasi konversi. Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait hal-hal tersebut yang dapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Until December 31, 2023, the Company did not issue bonds, sukuk, or convertible bonds. Therefore, no information related to these matters can be disclosed in this Annual Report.



# PENGHARGAAN

## » Awards



**1. Nama Penghargaan / Award Type:**

Indonesia Excellence Good Corporate Governance Ethics in Integrating Sustainable Business Through Integrity Commitments

**Tanggal / Date:**

31 Januari 2023  
January 31, 2023

**Penyelenggara / Organizer:**

Warta Ekonomi

**2. Nama Penghargaan / Award Type:**

The Best State-Owned Company in Innovation and Create Appropriate Strategy Plantation Sector of the Year 2023

**Tanggal / Date:**

23 Juni 2023  
June 23, 2023

**Penyelenggara / Organizer:**

5 Pilar Media Communication

**3. Nama Penghargaan / Award Type:**

The Best Performing Company in CSR Contributing of the Year 2023

**Tanggal / Date:**

23 Juni 2023  
June 23, 2023

**Penyelenggara / Organizer:**

5 Pilar Media Communication

**4. Nama Penghargaan / Award Type:**

Sertifikat CSR-SDGs Kategori SDGs #9 untuk Program Peningkatan Infrastruktur di Sekitar Wilayah Kerja PT Perkebunan Nusantara IV dengan Nilai 8,2  
CSR-SDGs Certificate under SDG Category #9 for Infrastructure Enhancement Program in the Working Area of PT Perkebunan Nusantara IV with a Value of 8.2

**Tanggal / Date:**

5 Juli 2023  
July 5, 2023

**Penyelenggara / Organizer:**

La Tofi School of Social Responsibility

**5. Nama Penghargaan / Award Type:**

Sertifikat CSR-SDGs Kategori SDGs #8 untuk Program Peningkatan Pertumbuhan Ekonomi Masyarakat melalui UMKM Berkualitas dan Memiliki Mutu Produk yang Berdaya Saing Go Internasional melalui program TJSL PTPN IV dengan nilai 8,0

CSR-SDGs Certificate under SDG Category #8 for the Program on Improving Community Economic Growth through High-Quality SMEs and Internationally Competitive Product Quality via the CSR Program at PTPN IV with a value of 8.0

**Tanggal / Date:**

5 Juli 2023  
July 5, 2023

**Penyelenggara / Organizer:**

La Tofi School of Social Responsibility



**6. Nama Penghargaan / Award Type:**

SNI Award Peringkat Perak Kategori Sektor Agro dan Pariwisata

SNI Award Silver Rank in the Agro and Tourism Sector Category

**Tanggal / Date:**

16 November 2023

November 16, 2023

**Penyelenggara / Organizer:**

Badan Standardisasi Nasional  
National Standardization Agency

**7. Nama Penghargaan / Award Type:**

Penghargaan 1 Diamond dan 2 Platinum Temu Karya Mutu Produktivitas Nasional

1 Diamond Award and 2 Platinum Awards for National Productivity Quality Workshop.

**Tanggal / Date:**

30 November 2023

November 30, 2023

**Penyelenggara / Organizer:**

Asosiasi Manajemen Mutu & Produktivitas Indonesia  
Association of Quality Management & Productivity Indonesia

**8. Nama Penghargaan / Award Type:**

Penghargaan Kepatuhan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Kota Medan

Compliance Award for Social Security in Employment in Medan City

**Tanggal / Date:**

1 Mei 2023

May 1, 2023

**Penyelenggara / Organizer:**

BPJS Ketenagakerjaan Kota Medan  
Employment Social Security Agency of Medan City

**9. Nama Penghargaan / Award Type:**

Top Digital Implementation 2023 #Star 5

**Tanggal / Date:**

4 Desember 2023

December 4, 2023

**Penyelenggara / Organizer:**

IT Works

# SERTIFIKASI

## » Certifications

Sertifikat Certificate	Pemberi Sertifikasi Certifier	Masa Berlaku Validity Period
SNI ISO 9001:2015	PT TUV Rheinland Indonesia	4 Agustus 2027 August 4, 2027
SNI ISO 14001:2015	PT TUV Rheinland Indonesia	4 Agustus 2027 August 4, 2027
SNI ISO 37001:2016	PT Sucofindo	22 Januari 2027 January 22, 2027
<i>Indonesia Sustainable Palm Oil (ISPO)</i>	PT Sucofindo	28 Desember 2027 December 28, 2027
<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO)</i>	PT TUV Rheinland Indonesia	4 Februari 2029 February 4, 2029
<i>International Sustainability &amp; Carbon Certification</i>	PT Mutuagung Lestari	17 Desember 2024 December 17, 2024
PROPER	Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan The Ministry of Environment and Forestry	30 Juni 2024 June 30, 2024
Sistem Manajemen Keselamatan & Kesehatan Kerja (SMK3)* Occupational Safety & Health Management System (SMK3)*	PT Sucofindo	8 Juni 2026 June 8, 2026
GMP+ FSA 2020	Control Union	29 Desember 2024 December 29, 2024
RSS SNI : 06 0001 1987 SIR : 1903 2017	Badan Standardisasi Nasional	16 November 2023 November 16, 2023
<i>Food Safety System Certification (FSSC) 22000</i>	PT Mutuagung Internasional	12 Januari 2026 January 12, 2026
<i>Rainforest Alliance</i>	PT PCU Indonesia	1 Januari 2024 January 1, 2024

\* Dimiliki oleh PKS Ajamu, Kebun Tonduhan, Kebun Pasir Mandoge, Unit Usaha Sosa, Unit Kebun Ajamu, PKS BAH Jambi, Unit Teh, PKS Pasir Mandoge, Kebun BAH Jambi, PKS/PPIS Pabatu, Kebun Laras, Kebun Pabatu, PKS Sawit Langkat, Kebun Bukit Lima, Kebun Pabatu  
Owned by Ajamu POM, Tonduhan Plantation, Pasir Mandoge Plantation, Sosa Business Unit, Ajamu Plantation Unit, BAH Jambi POM, Tea Unit, Pasir Mandoge POM, Jambi BAH Plantation, POM/PPIS Pabatu, Kebun Laras, Kebun Pabatu, POM Sawit Langkat, Kebun Bukit Lima, Kebun Pabatu



## PERISTIWA PENTING

### » Event Highlights



#### JANUARI / January 2023

##### Persiapan IPO PTPN IV, Direktur PTPN IV dan Konsultan Holding Berkunjung ke Kebun Adolina

Direktur PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV) Sucipto Prayitno mengunjungi Balai Benih Kelapa Sawit dan Kebun Adolina di Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, Jumat (20/1/2023). Kunjungan ini dilakukan untuk mendampingi Konsultan Holding Perkebunan Nusantara, McKinsey Indonesia, menjelang persiapan *Initial Public Offering* (IPO) PTPN IV.

Kebun Adolina merupakan satu dari total 30 unit usaha kelapa sawit PTPN IV. Ia dikelompokkan ke dalam Distrik III bersama 9 kebun PTPN IV lainnya. Tata kelola dan kinerja yang apik menobatkan kebun tersebut sebagai *Center of Excellent Indonesia*.



##### In Preparation of PTPN IV IPO, PTPN IV Director and Holding Consultant Visited Adolina Plantation

Sucipto Prayitno, the Director of PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV), visited the Palm Oil Seed Center and Adolina Plantation in Serdang Bedagai Regency, North Sumatra (20/1/2023). This visit was made to accompany the Holding Consultant of Perkebunan Nusantara, McKinsey Indonesia, in preparation for PTPN IV's Initial Public Offering (IPO).

Adolina Plantation is one of 30 palm oil business units under PTPN IV and is part of District III, which includes 9 other PTPN IV plantations. The plantation has been recognized for its good governance and outstanding performance, earning it the title of the Center of Excellent Indonesia.



#### FEBRUARI / February 2023

##### Laba Holding Perkebunan Nusantara Tembus Rp5,51 Triliun, Tertinggi Sepanjang Sejarah

Holding Perkebunan Nusantara membukukan laba konsolidasi mencapai Rp5,51 triliun pada 2022. Laba ini meningkat 19% secara tahunan (year on year/yoy). Peningkatan didukung oleh kinerja produktivitas dan penjualan. Capaian Holding Perkebunan Nusantara pada 2022 lalu juga tak lepas dari kontribusi besar PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV). Pada rapat *monitoring* dan evaluasi operasional Rabu (25/1/2023), laba konsolidasi PTPN IV diketahui mencapai Rp2,1 triliun pada 2022 atau meningkat dari 2021. Peningkatan ini bahkan memperoleh apresiasi dari Direktur Produksi dan Pengembangan Holding Perkebunan Nusantara, Bapak Mahmudi.

##### Perkebunan Nusantara Holding Profit Reached Rp5.51 Trillion, Highest in History

Perkebunan Nusantara Holding reported a consolidated profit of Rp5.51 trillion in 2022, marking a 19% increase year-over-year. The growth was driven by improved productivity and sales performance. The success of Perkebunan Nusantara Holding in 2022 was largely attributed to the significant contribution of PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV). During the operational monitoring and evaluation meeting on Wednesday (25/1/2023), PTPN IV's consolidated profit was reported to reach Rp2.1 trillion in 2022, demonstrating an increase from the previous year. This achievement was duly acknowledged by Mahmudi, the Director of Production and Development at Perkebunan Nusantara Holding.







## MARET / March 2023

### PTPN IV dan PTPN XIV Jalin Kerja Sama Operasi Kebun dan Pabrik Kelapa

PTPN IV dan PTPN XIV resmi menjalin Kerja Sama Operasi (KSO) dalam jangka waktu 10 tahun. Perjanjian antara kedua pihak ditandatangani oleh Direktur PTPN IV Sucipto Prayitno dan Direktur PTPN XIV Tio Handoko di Medan, Sumatera Utara, pada 24 Maret 2023. Melalui perjanjian ini, PTPN IV dan PTPN XIV membentuk manajemen KSO yang bertugas mengelola kebun dan pabrik kelapa sawit PTPN XIV. Manajemen akan berkantor di Pabrik Kelapa Sawit Luwu, Desa Lagego, Kecamatan Burau, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan.

### PTPN IV and PTPN XIV Established a Joint Cooperation in Coconut Plantation and Mill Operations

PTPN IV and PTPN XIV officially entered into a 10-year Joint Operation (KSO) agreement. The agreement was signed by PTPN IV Director, Sucipto Prayitno, and PTPN XIV Director, Tio Handoko, in Medan, North Sumatra, on March 24, 2023. Under this agreement, PTPN IV and PTPN XIV formed a KSO management to manage PTPN XIV palm oil plantation and mill. THE management will work at the Luwu Palm Oil Mill in Lagego Village, Burau District, East Luwu Regency, South Sulawesi.



## APRIL 2023

### Dubes RI Dukung Upaya PTPN IV Promosikan UMKM di Singapura

Pada sela-sela pameran *Trade Mission MSMEs Go Global Singapore 2023*, Duta Besar Indonesia untuk Singapura Suryopratomo menyempatkan diri berdiskusi dengan rombongan PTPN IV dan Kamar Dagang dan Industri Indonesia (KADIN). Menurutnya, para pelaku UMKM mesti memperoleh pendampingan sekaligus pengawasan agar bisa bersaing di pangsa ekspor.

Menurut Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN IV Riza Fahlevi Naim, Perseroan memboyong dua produk UMKM mitra pada pameran *Trade Mission MSMEs Go Global Singapore 2023*, yakni *Snack Kodita* dan *Cookies Hias B-Brownz*. Selain itu, PTPN IV juga tengah gencar mempromosikan produk asli perusahaan, seperti *Butong Tea* dan *Tobasari Tea*.

### The Indonesian Ambassador Supports PTPN IV's Efforts to Promote MSMEs in Singapore

During the *Trade Mission MSMEs Go Global Singapore 2023* exhibition, the Indonesian Ambassador to Singapore, Suryopratomo, made time to discuss with the group from PTPN IV and the Indonesian Chamber of Commerce and Industry (KADIN). He emphasized the need for support and guidance for MSMEs to enable them to compete in the export market.

Riza Fahlevi Naim, Head of PTPN IV Corporate Secretariat, mentioned that the Company is showcasing two partner MSME products, *Kodita Snacks* and *B-Brownz Decorated Cookies*, at the *Trade Mission MSMEs Go Global Singapore 2023*. Additionally, PTPN IV is actively promoting its original products, including *Butong Tea* and *Tobasari Tea*.





## MEI / May 2023

### Penuhi Standar Berkelanjutan, Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Sosa PTPN IV Raih Sertifikat ISPO

Berkat tata kelola yang baik, Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit Sosa PTPN IV berhasil memperoleh sertifikat *Indonesian Sustainability Palm Oil* (ISPO) dari Control Union. Sertifikat ini merupakan buah dari komitmen dan kerja keras PTPN IV dalam mengedepankan operasional yang memenuhi kriteria 3P, yaitu *Profit, People* dan *Planet*. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Direktur Control Union Jurriaan Boer kepada Manajer Kebun Sosa Sutres yang didampingi Kepala Sub Bagian Perencanaan dan *Sustainability* PTPN IV Mirvan Ariza Siregar di Bogor pada 6 Mei 2023.

Sejauh ini sudah terdapat 27 kebun dan 15 unit pabrik kelapa sawit PTPN IV yang telah mengantongi sertifikat ISPO. Sedangkan beberapa unit kebun dan pabrik lainnya kini sedang dalam proses.



### Fulfilling Sustainable Standards, Sosa PTPN IV Palm Oil Plantation and Mill Receives ISPO Certificate

Due to a good governance implementation, the Sosa Palm Oil Plantation and Mill of PTPN IV have successfully obtained an Indonesian Sustainability Palm Oil (ISPO) certificate from the Control Union. This certificate is the result of PTPN IV's commitment and hard work in prioritizing operations that meet the 3P criteria: Profit, People, and Planet. The symbolic handover was carried out by the Director of Control Union, Jurriaan Boer, to the Sosa Sutres Plantation Manager, accompanied by the Head of the Planning and Sustainability Sub-division of PTPN IV, Mirvan Ariza Siregar in Bogor on May 6, 2023.

So far, 27 plantations and 15 PTPN IV palm oil mill units have obtained ISPO certificates. Meanwhile, several other plantation and factory units are currently in the process.



## JUNI / June 2023

### PTPN IV dan reNIKOLA Jalin Kemitraan Guna Rencana Kembangkan 4 Unit Pabrik CBG Plant di Sumatra Utara

PTPN IV menggandeng reNIKOLA Holdings Sdn Bhd untuk rencana mengembangkan pabrik *Compressed Biomethane Gas* (CBG) di Sumatra Utara. Kemitraan ini dijalin melalui Nota Kesepahaman atau *Memorandum of Understanding* (MoU) yang ditandatangani kedua pihak pada 30 Juni 2023.

Menurut Direktur PTPN IV, Sucipto Prayitno, PTPN IV sebagai salah satu anak perusahaan PTPN Holding yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit, berinisiatif melakukan kerja sama ini, selaras dengan *roadmap* pengurangan Gas Rumah Kaca (GRK) yang dicanangkan PTPN Group untuk melakukan pengurangan emisi dalam *Business As Usual* (BAU) kegiatan perkebunan, juga mendukung program pemerintah terhadap upaya menurunkan emisi GRK sebesar 29% dari kemampuan sendiri atau 41% dengan bantuan internasional pada 2030 sesuai *Nationally Determined Contribution* (NDC). PTPN IV akan mereduksi emisi metana dari limbah cair kelapa sawit dengan memanfaatkannya menjadi energi baru terbarukan sebesar 377.523 tCO<sub>2</sub> sampai dengan tahun 2030.

### PTPN IV and reNIKOLA Established Partnership to Develop 4 Units of CBG Plant in North Sumatra

PTPN IV collaborates with reNIKOLA Holdings Sdn. Bhd. to develop a Compressed Biomethane Gas (CBG) factory in North Sumatra. This collaboration was formalized through a Memorandum of Understanding (MoU) signed by both parties on June 30, 2023.

According to PTPN IV Director, Sucipto Prayitno, PTPN IV, a subsidiary of PTPN Holding operating in the oil palm plantation sector, initiated this collaboration in alignment with the Green House Gas (GHG) reduction roadmap established by the PTPN Group to curb emissions in Business As Usual (BAU) plantation activities. The initiative also supports government programs aiming to reduce GHG emissions by 29% independently or 41% with international support by 2030 based on the Nationally Determined Contribution (NDC). PTPN IV intends to cut methane emissions from liquid palm oil waste by converting it into new, renewable energy, thereby reducing emissions by 377,523 tCO<sub>2</sub> by 2030.





## JULI / July 2023

### Gapai *Operational Excellence*, PTPN IV Resmikan Proyek Standarisasi PKS Bah Jambi

PTPN IV meresmikan proyek standarisasi Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Bah Jambi di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara pada 21 Juli 2023. Acara ini dihadiri oleh Dewan Komisaris, Direktur, *Senior Executive Vice President* (SEVP), Komite Audit dan Komite Pemantau Manajemen Risiko (MR) dan *Good Corporate Governance* (GCG) hingga seluruh Kepala Bagian, Group Manager Unit Group dan Manajer.

Pada 2022 lalu, PTPN IV menetapkan program strategis enam standarisasi mesin instalasi oleh PMT Dolok Ilir demi mendukung *operational excellence*. Program ini dilengkapi dengan platform digital guna mempermudah kelancaran operasional di 16 unit PKS. Satu di antaranya PKS Bah Jambi. Enam standarisasi mesin instalasi yang dimaksud adalah *hydrocyclone*, *polishing drum*, lori buah, *thresher*, *fruit elevator*, dan *cake breaker conveyor*. Informasi produk unggulan enam standarisasi mesin instalasi PKS milik PTPN IV kini bisa diakses melalui website [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id).



### Achieving *Operational Excellence*, PTPN IV Inaugurates the Bah Jambi PKS Standardization Project

PTPN IV officially launched the Bah Jambi Palm Oil Mill (POM) standardization project in Simalungun Regency, North Sumatra, on July 21, 2023. The inauguration was attended by the Board of Commissioners, Directors, Senior Executive Vice President (SEVP), Audit Committee and Risk Management (MR), Good Corporate Governance (GCG) Monitoring Committee, as well as all Heads of Sections, Group Unit Group Managers, and Managers.

Previously in 2022, PTPN IV initiated a strategic program involving the standardization of six machine installations by PMT Dolok Ilir to enhance operational excellence. This program is equipped with a digital platform to facilitate smooth operations in 6 units, including PKS Bah Jambi. The six standard installation machines include the hydrocyclone, polishing drum, fruit truck, thresher, fruit elevator, and cake breaker conveyor. Information about the superior products related to PTPN IV's six PKS installation machine standards is now available on the website [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id).



## AGUSTUS / August 2023

### Resmi Jalin Kerja Sama dengan PT ASJ, PTPN IV Jajaki Bisnis Agrowisata

PTPN IV secara resmi menjalin kerja sama dengan PT Anugerah Sidamanik Jaya (ASJ) dalam pengembangan bisnis agrowisata. Kesepakatan ini ditandai dengan penandatanganan kontrak *Build Operate Transfer* (BOT) yang mencakup pengelolaan lahan Kebun Teh PTPN IV seluas 9 ha, yang dikenal dengan nama Bukit Teletubbies dan Bukit Cinta. Kerja sama ini bertujuan untuk memaksimalkan potensi kawasan tersebut sebagai destinasi wisata unggulan di Sumatra Utara.

Lahan yang terletak di Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara ini menawarkan berbagai fasilitas menarik, seperti vila dan glamping, arena permainan ATV, *outdoor adventure*, restoran, hingga *spot* foto berbayar. Dengan kerja sama ini, diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi perusahaan serta para pemangku kepentingan, sekaligus mendorong pengembangan sektor pariwisata di Sumatra Utara.



### Official Partnership with PT ASJ, PTPN IV Explores Agrotourism Business

PTPN IV officially partnered with PT Anugerah Sidamanik Jaya (ASJ) to develop an agrotourism business. The partnership was solidified with the signing of a *Build Operate Transfer* (BOT) contract for the management of a 9-hectare area of PTPN IV Tea Plantation known as Bukit Teletubbies and Bukit Cinta. This collaboration aims to maximize the potential of the area as a top tourist destination in North Sumatra.

The land, located in Simalungun Regency, North Sumatra, offers various appealing facilities including villas, glamping, ATV game arenas, outdoor adventures, restaurants, and paid photo spots. The collaboration is expected to add value for the Company and stakeholders while also promoting the growth of the tourism sector in North Sumatra.



## SEPTEMBER 2023

### Direktur dan Dewan Komisaris PTPN IV Kunjungi PT INL Sei Mangkei

Direktur PTPN IV, Sucipto Prayitno mengunjungi PT Industri Nabati Lestari (PT INL) di Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Sei Mangkei, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara pada 5 September 2023. Direktur datang bersama Dewan Komisaris Perseroan serta jajaran kepala bagian. Pada kesempatan ini, Sucipto menyampaikan beberapa penjelasan sekaligus mendengar perkembangan terkini tentang bisnis perusahaan.

PT INL merupakan anak perusahaan PTPN IV dan PTPN III yang didirikan pada 23 Desember 2015. Perseroan mengoperasikan pabrik *palm oil refining and fractionation* berkapasitas 600.000 Mt per tahun. Saat ini, PT INL memproduksi produk turunan CPO berkualitas internasional yang telah mengantongi berbagai sertifikat, termasuk Standar Nasional Indonesia (SNI).

### PTPN IV Director and Board of Commissioners Visited PT INL Sei Mangkei

Director of PTPN IV, Sucipto Prayitno, visited PT Industri Nabati Lestari (PT INL) in the Sei Mangkei Special Economic Zone (SEZ), Simalungun Regency, North Sumatra on September 5, 2023. The Director was accompanied by the Company's Board of Commissioners and department heads. During the visit, Sucipto elaborated several explanations and received updates on the company's latest developments.

PT INL, established on December 23, 2015, is a subsidiary of PTPN IV and PTPN III. The company operates a palm oil refining and fractionation factory with an annual capacity of 600,000 Mt. Currently, PT INL produces internationally certified CPO derivative products, including products that have received the Indonesian National Standard (SNI) certification.



## OKTOBER / October 2023

### Dukung Pembangunan Listrik, PTPN IV Lepas Aset Lahan kepada PLN

PTPN IV dan PT PLN (Persero) UIP Sumbagut menandatangani berkas pembayaran ganti rugi lahan gardu induk serta tapak tower listrik. Acara ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan berkas *splitsing* HGU No. 5 Kebun Tonduhan.

PT PLN (Persero) UIP Sumbagut membayar ganti rugi lahan senilai lebih Rp2,6 miliar untuk pembangunan infrastruktur kelistrikan berupa gardu induk kV 150 Tanah Jawa serta Tapak Tower T. 60 dan T. 61 T/L 165 kV Siantar – Tanah Jawa yang berlokasi di Kebun Tonduhan PTPN IV, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara. Guna mendukungnya, PTPN IV akan melepaskan lahan seluas 25,7 ribu meter persegi yang kini ditumbuhi sebanyak 372 batang pohon kelapa sawit.

### Supporting Electricity Development, PTPN IV Released Land Assets to PLN

PTPN IV and PT PLN (Persero) UIP Sumbagut have signed the payment file for land compensation for the substation and the site of the electricity tower. This event was also combined with the signing of the HGU splitsing file No. 5 of Tonduhan Gardens.

PT PLN (Persero) UIP Sumbagut paid land compensation worth more than Rp2.6 billion for the construction of electricity infrastructure. This includes a 150 kV Tanah Jawa substation and T. 60 and T. 61 T/L 165 kV Siantar – Tanah Jawa tower sites located in PTPN IV Tonduhan Gardens, Simalungun Regency, North Sumatra. To support this, PTPN IV will release 25.7 thousand square meters of land, which currently grows 372 oil palm trees.





## NOVEMBER 2023

### Aplikasi MIXN4 Ciptaan PTPN IV, Resmi Digunakan untuk PTPN Group

Sejak beberapa waktu lalu, aplikasi unggulan PTPN IV, Mill Monitoring for Excellence N4 (MIXN4), mulai diimplementasikan oleh *Holding* Perkebunan Nusantara dan resmi berganti nama menjadi Mill Indicator Monitoring System (MIMS). Aplikasi ini kini diadopsi oleh unit usaha PTPN Group di bawah *Holding* Perkebunan Nusantara.

Pada 2020-2021, PTPN IV menggunakan alat penganalisa *oil losses*, FOSS NIRS DA 1650, yang mampu menganalisis dalam waktu kurang dari satu menit. Hasil cepat ini memungkinkan tindakan preventif segera dilakukan, mengurangi *losses* dan kerugian perusahaan. Namun, untuk mengoptimalkan *monitoring*, PTPN IV membutuhkan sistem yang lebih *user-friendly* agar hasil analisis dapat diakses dari mana saja dan kapan saja. Dari kebutuhan ini, MIXN4 diciptakan.



### MIXN4 Application Created by PTPN IV, Officially Used for PTPN Group

Recently, PTPN IV flagship application, Mill Monitoring for Excellence N4 (MIXN4), has been implemented by Holding Perkebunan Nusantara and officially renamed as Mill Indicator Monitoring System (MIMS). This application is now being adopted by the PTPN Group business unit under Perkebunan Nusantara Holding.

In 2020-2021, PTPN IV utilized an oil losses analyzer, FOSS NIRS DA 1650, capable of analyzing in less than one minute, facilitating immediate preventive actions to reduce losses. However, to improve monitoring, PTPN IV requires a more user-friendly system for accessing analysis results from anywhere and at any time. This need led to the development of MIXN4.



## DESEMBER / December 2023

### Pembentukan *Subholding* PTPN IV

Pembentukan *Subholding* PTPN IV melalui penggabungan PTPN V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai *surviving entity* dan *spin off* sebagian aset dan liabilitas PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV pada tanggal 1 Desember 2024.

### Establishment of PTPN IV Subholding

Establishment of PTPN IV Subholding through the merger of PTPN V, VI, and XIII into PTPN IV as the surviving entity and spin-off of several assets and liabilities of PTPN III (Persero) into PTPN IV on December 1, 2023.





# LAPORAN MANAJEMEN

## Management Report





# 02

Kami mengapresiasi bahwa Perseroan mendapatkan peringkat akhir (*final rating*) idA-/Stable atau terkategori "Sehat" berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023 oleh Pefindo sebagaimana tertuang dalam surat Direksi Pefindo No. RTG-257/PEFDIR/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.

We appreciate that the Company received a final rating of idA-/Stable, categorized as "Healthy," based on the audited financial statements as of December 31, 2023, issued by Pefindo, as stated in Pefindo's Directors' letter No. RTG-257/PEFDIR/VI/2024 dated June 21, 2024.

# LAPORAN DEWAN KOMISARIS

» Report of the Board  
of Commissioners



**DAHLAN HARAHAHAP**  
Komisaris Utama  
President Commissioner





**Tahun 2023 menjadi tahun bersejarah dengan terbentuknya subholding PTPN IV. Perusahaan diharapkan dapat bertumbuh menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600 ribu Ha pada tahun 2026 serta memberikan manfaat optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.**

The year 2023 marked a historic milestone with the establishment of PTPN IV's subholding. The company is expected to grow into the world's largest palm oil company in terms of land area, reaching over 600,000 hectares by 2026, while delivering optimal benefits to all stakeholders.



#### **Pemegang Saham yang Terhormat,**

Dalam kesempatan ini, perkenankan kami selaku Dewan Komisaris memaparkan hasil pengawasan kami terhadap jalannya Perusahaan selama tahun 2023.

Walaupun pandemi resmi berakhir pada pertengahan 2023, namun tantangan perekonomian global masih menyelimuti. Tekanan inflasi dan gejolak geopolitik menimbulkan risiko dan tantangan yang tidak mudah untuk dilalui. Namun, kami bersyukur bahwa Indonesia dapat menutup tahun 2023 dengan pertumbuhan ekonomi yang positif serta memperlihatkan resiliensi yang patut diapresiasi.

Tahun 2023 menjadi tahun yang bersejarah bagi Perusahaan. Kami menyambut baik terbentuknya *subholding* PTPN IV melalui penggabungan PTPN V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV (Perusahaan) sebagai *surviving entity*. Perusahaan diharapkan dapat bertumbuh menjadi perusahaan sawit terbesar di dunia dari sisi luas lahan, yaitu mencapai lebih dari 600 ribu hektar pada 2026, dan menjadi pemain utama industri sawit dunia.

#### **Distinguished Shareholders,**

On this occasion, we, the Board of Commissioners, would like to present the results of our supervision of the Company's operations during 2023.

Despite the official end of the pandemic in mid-2023, global economic challenges remain. Inflationary pressures and geopolitical turmoil continue to pose risks and challenges that are not easily overcome. Nevertheless, we are thankful that Indonesia was able to close 2023 with positive economic growth and demonstrate resilience that deserves appreciation.

2023 is a momentous year for the Company. We are pleased to announce the formation of the PTPN IV sub-holding through the merger of PTPN V, VI, and XIII into PTPN IV (the Company) as the surviving entity. The Company is expected to grow into the largest palm oil company in the world in terms of land area, reaching more than 600 thousand hectares in 2026 and becoming a significant player in the world's palm oil industry.

Ke depannya, Perusahaan berharap dapat meningkatkan produksi CPO nasional dan minyak goreng dalam negeri, yaitu dari 460 ribu ton/tahun pada 2021 menjadi 1,8 juta ton/tahun pada tahun 2026, atau meningkat hingga 4 (empat) kali lipat dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.

## Penilaian Terhadap Kinerja Direksi

Salah satu bentuk kegiatan pengawasan Dewan Komisaris adalah memantau dan mengevaluasi kinerja Direksi secara kolektif. Sepanjang tahun 2023, kami menilai bahwa Direksi telah bekerja secara sinergis dan strategis dalam mengelola jalannya Perusahaan.

Dewan Komisaris senantiasa memberikan nasehat atau arahan kepada Direksi terkait berbagai kebijakan strategis/operasional, SOP, dan masalah operasional perusahaan, yang disampaikan melalui forum rapat maupun secara tertulis melalui surat. Rapat Dewan Komisaris umumnya berfokus pada pembahasan kinerja perusahaan dan pencapaian target RKAP serta upaya-upaya perbaikan dan peningkatan kinerja, khususnya di bidang produksi, pemasaran, keuangan, dan SDM di samping pembahasan mengenai RKAP, usulan Direksi yang menurut ketentuan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan maupun tanggapan tertulis Dewan Komisaris, serta permasalahan lain yang memerlukan perhatian khusus.

Berdasarkan penilaian kami, Direksi telah mematuhi seluruh peraturan yang berlaku dan melaksanakan arahan dan rekomendasi yang diberikan oleh Dewan Komisaris dengan tepat. Kami juga melihat bahwa Direksi berhasil merangkul seluruh entitas anak, entitas asosiasi, dan karyawan dengan harmonis, serta membentuk sebuah hubungan yang kolaboratif. Hal ini tentunya berperan penting dalam mendukung pertumbuhan Perusahaan secara jangka panjang.

## Pengawasan Terhadap Pelaksanaan Kinerja Perseroan

Dewan Komisaris melakukan analisis dan pemeriksaan terhadap laporan keuangan dan laporan perkembangan kegiatan perusahaan secara berkala (bulanan, triwulanan, semesteran, maupun tahunan), yang dilakukan bersama Komite Audit dan didalami lebih lanjut dalam rapat Dewan Komisaris. Bila terjadi catatan atau permasalahan yang perlu ditindaklanjuti, Dewan Komisaris memintakan klarifikasi kepada Direksi, baik melalui rapat koordinasi antara Direksi dan Dewan Komisaris maupun disampaikan secara tertulis.

The Company aims to increase national CPO and domestic cooking oil production from 460 thousand tons/year in 2021 to 1.8 million tons/year in 2026, representing a fourfold increase within 5 (five) years.

## Assessment of the Board of Directors' Performance

One of the Board of Commissioners' supervisory activities is monitoring and evaluating the performance of the Board of Directors as a whole. Throughout 2023, we have assessed that the Board of Directors has worked synergistically and strategically to manage the Company's operations.

The Board of Commissioners always advises or directs the Board of Directors regarding various strategic and operational policies, standard operating procedures (SOPs), and company operational issues. This guidance is conveyed through meeting forums or in writing through letters. Board of Commissioners meetings generally focus on discussing the company's performance and achieving the RKAP targets, as well as efforts to improve and enhance performance, particularly in production, marketing, finance, and HR. Additionally, these meetings address the RKAP, proposals from the Board of Directors that, according to the provisions of the Articles of Association, require the approval or written response of the Board of Commissioners, and other issues that require special attention.

Based on our assessment, the Board of Directors has complied with all applicable regulations and appropriately implemented the directions and recommendations the Board of Commissioners gave. We also observe that the Board of Directors has successfully fostered harmonious relationships with all subsidiaries, associated entities, and employees, which supports the Company's long-term growth.

## Supervision of the Implementation of the Company's Performance

The Board of Commissioners regularly reviews the company's financial statements and progress reports on a monthly, quarterly, semi-annual, or annual basis. This process involves collaboration with the Audit Committee and further discussion during the Board of Commissioners meeting. If any issues or concerns require attention, the Board of Commissioners requests clarification from the Board of Directors, either through a coordination meeting or in writing.

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melakukan 14 kali kunjungan ke unit-unit usaha kebun Perusahaan untuk melakukan pengawasan pelaksanaan RKAP, menggali potensi di setiap unit usaha, serta memberikan arahan dan *monitoring* asset. Kami juga melakukan kunjungan ke anak perusahaan dan kantor Direksi, termasuk mengikuti pelatihan.

Pembentukan *subholding* PTPN IV juga meningkatkan perolehan jumlah aset Perusahaan. Tercatat per akhir 2023, jumlah aset Perusahaan mencapai Rp62.662 juta, meningkat 4,79% dari Rp59.800 juta pada 2022. Jumlah ekuitas juga meningkat sebesar 19,02% dari Rp17.807 juta pada 2022 menjadi Rp21.193 juta pada 2023.

Kami juga mengapresiasi bahwa Perusahaan mendapatkan peringkat akhir (*final rating*) *idA-/Stable* atau terkategori "Sehat" berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023 oleh Pefindo sebagaimana tertuang dalam surat Direksi Pefindo No. RTG-257/PEFDIR/VI/2024 tanggal 21 Juni 2024.

## Pandangan Terhadap Prospek Usaha yang Disusun Direksi

Tantangan demi tantangan tentunya akan terus terjadi, baik dalam skala global dan nasional. Kompetisi dunia usaha yang semakin ketat dan dinamika ekonomi yang penuh ketidakpastian menuntut Perusahaan untuk senantiasa bersikap siaga dan waspada dalam menjalankan usahanya. Untuk itu, Perusahaan perlu terus mengasah kompetensi dan kekuatannya serta memanfaatkan peluang-peluang yang terbentang dengan maksimal.

Kami memiliki optimisme bahwa Indonesia, khususnya industri kelapa sawit, dapat terus bertumbuh secara progresif di tahun-tahun mendatang. Konsumsi dalam negeri diperkirakan meningkat seiring dengan kenaikan kebutuhan pangan, industri oleokimia, dan kebutuhan energi (biodiesel) dengan adanya implementasi B35 secara setahun penuh (*fully implemented*).

Dengan penggabungan entitas usaha yang terjadi pada 2023, kami optimis bahwa Perusahaan berpeluang untuk tumbuh secara pesat di tahun-tahun mendatang. Sumber daya dan luas lahan yang sangat besar memberikan Perusahaan ruang untuk berkembang dan memajukan kinerjanya, baik secara operasional dan finansial. Oleh sebab itu, kami memberikan arahan kepada Direksi untuk tetap berfokus pada tujuan dan strategi yang telah ditetapkan, serta adaptif dan solutif terhadap segala dinamika perubahan yang terjadi.

In 2023, the Board of Commissioners conducted 14 visits to the Company's plantation business units to oversee the implementation of the RKAP, assess potential in each unit, and provide guidance while monitoring assets. Additionally, the Board of Commissioners visited subsidiaries and the Board of Directors' office, participating in training sessions.

Establishing the PTPN IV sub-holding contributed to an increase in the acquisition of the Company's assets. By the end of 2023, the Company's total assets had reached Rp62,662 million, marking a 4.79% increase from Rp59,800 million in 2022. The total equity also increased by 19.02%, from Rp17,807 million in 2022 to Rp21,193 million in 2023.

We also appreciate the Company received a final rating of *idA-/Stable* or was categorized as "Healthy" in the Audited Financial Report as of December 31, 2023 by Pefindo, as indicated in the letter from the Pefindo Board of Directors No. RTG-257/PEFDIR/VI/2024 dated June 21, 2024.

## Views on Business Prospects Prepared by the Board of Directors

Challenges are expected to continue occurring globally and nationally. The increasingly tight business competition and uncertain economic dynamics require the Company to remain vigilant in its operations. Therefore, the Company needs to focus on honing its competencies, leveraging its strengths, and taking advantage of upcoming opportunities.

We are optimistic about Indonesia's progressive growth, particularly in the palm oil industry, in the coming years. With the full implementation of B35 for a year, domestic consumption is expected to increase due to rising food needs, the oleochemical industry, and energy demands (biodiesel).

With the upcoming merger of business entities in 2023, we believe the Company has the potential for rapid growth in the coming years. The extensive resources and land area provide ample room for the Company to enhance its operational and financial performance. As a result, we advise the Board of Directors to remain focused on the established goals and strategies while being adaptive and providing solutions to the changing dynamics.

## Pandangan atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan

Dalam membantu kelancaran pelaksanaan tugas pengawasan, Dewan Komisaris memiliki organ pendukung tata kelola seperti Sekretariat Dewan Komisaris, Komite Audit, dan Komite Pemantau Manajemen Risiko & GCG. Berdasarkan penilaian kami, seluruh organ tata kelola ini telah menjalankan peran dan melakukan tugas dengan optimal sesuai dengan fungsi dan tanggung jawabnya.

Kami mengapresiasi upaya Perusahaan untuk terus memperkuat fondasi dan pelaksanaan tata kelola di seluruh lini usaha. Kami memahami bahwa kompleksitas bisnis dan skala perusahaan yang besar tentunya menjadi tantangan tersendiri yang perlu disikapi dengan strategis. Oleh sebab itu, kami menilai pentingnya pengawasan, peninjauan, dan pembaharuan secara rutin terhadap proses pelaksanaan tata kelola secara menyeluruh.

Selama tahun 2023, penerapan tata kelola Perusahaan semakin meningkat, khususnya dalam melakukan penyesuaian dengan sejumlah persyaratan tata kelola untuk perusahaan terbuka, di mana Perusahaan sedang menuju menjadi perusahaan terbuka pada tahun 2023. Oleh karena itu, Perusahaan terus berupaya mematuhi rangkaian pedoman sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

Secara umum, proses penyesuaian dan peningkatan tata kelola di sepanjang tahun 2022 mendapatkan pengakuan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang memberikan skor 92,43 dari total skor 100. Selain itu, sistem manajemen risiko Perusahaan juga mendapat pengakuan dari hasil penentuan tingkat kematangan (*risk management maturity level*) 3 dari lima level.

Ke depannya, Perusahaan tidak sekadar menerapkan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan, namun juga menuju ke arah kepatuhan dan kedisiplinan yang lebih baik. Upaya ini tercermin melalui penerapan *best practices* seperti adanya evaluasi terhadap kecukupan prasarana dan sarana, serta asesmen atas sumber daya dan kompetensi untuk penerapan *Enterprise Risk Management* (ERM). Perusahaan juga memberdayakan Satuan Pengawasan Internal guna mendorong terciptanya mekanisme pengendalian yang akan menjamin penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, dan sesuai standar kepatuhan yang berlaku.

## Views on the Implementation of Corporate Governance

To ensure the smooth implementation of its supervisory duties, the Board of Commissioners is supported by governance organs such as the Board of Commissioners Secretariat, Audit Committee, and Risk Management & GCG Monitoring Committee. Our assessment indicates that all these governance organs have effectively fulfilled their roles and responsibilities.

We commend the Company for strengthening governance across all business lines. We understand that the company's complexity and scale pose strategic challenges that need to be addressed. Therefore, routine supervision, review, and updating the overall governance implementation process are essential.

In 2023, the Company's governance implementation are enhanced, particularly in adjusting to various governance requirements for public companies, as the Company is set to become a public company in 2023. The Company continues to strive for compliance with guidelines set by the Financial Services Authority (OJK).

Overall, the Financial and Development Supervisory Board (FDSB) recognized the Company's efforts to adjust and improve governance in 2022, awarding a score of 92.43 out of 100. The Company's risk management system was also acknowledged as having a 3 out of 5 maturity level.

In the future, the Company aims to apply corporate governance principles and enhance compliance and discipline. This will be achieved through best practices such as evaluating infrastructure and facilities adequacy and assessing resources and competencies for implementing Enterprise Risk Management (ERM). The Company also empowers the Internal Supervisory Unit (SPI) to establish a control mechanism ensuring efficient, effective, and compliant resource utilization.

## Penutup

Dengan terbentuknya Perusahaan sebagai *surviving entity*, Perusahaan memiliki peluang dan potensi yang sangat tinggi untuk meraih kinerja terbaik di masa mendatang. Atas pencapaian Perusahaan selama tahun 2023, kami memberikan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Direksi yang telah memimpin Perusahaan dengan solid dan harmonis. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para pemegang saham, baik Kementerian BUMN RI maupun PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai *holding*.

Di balik itu, kami juga berterima kasih kepada seluruh karyawan yang berperan sebagai ujung tombak terpenting dalam pertumbuhan kinerja perusahaan. Kerja keras, kerja sama, dan kreativitas bersama membuat pengelolaan Perusahaan dapat berjalan dengan efektif dan produktif.

Seluruh kontribusi, kepercayaan, dukungan, dan semangat dari pemegang saham, pimpinan, dan karyawan melebur menjadi satu dan menjadi penggerak utama pertumbuhan Perusahaan. Semoga Perusahaan dapat terus berkembang dan meraih kinerja yang membanggakan serta memberikan manfaat yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.

## Closing

With the formation of the Company as the surviving entity, the Company has a high opportunity and potential to achieve the best performance in the future. We express our utmost appreciation for the Company's achievements during 2023 to the Board of Directors, who have led the Company solidly and harmoniously. We also extend our gratitude to the shareholders, including the Ministry of SOEs of the Republic of Indonesia and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as the holding.

Furthermore, we thank all employees who play the most important role in spearheading the growth of the company's performance. Hard work, cooperation, and joint creativity make the company's management run effectively and productively.

The contributions, trust, support, and enthusiasm from shareholders, leaders, and employees merge and become the main driver of the Company's growth. Hopefully, the Company can continue to grow, achieve proud performance, and provide optimal benefits for all stakeholders.

**DAHLAN HARAHAP**  
Komisaris Utama  
President Commissioner

# LAPORAN DIREKSI

» Report of the Board  
of Directors



**JATMIKO K. SANTOSA**  
Direktur Utama  
Chief Executive Officer



**Perseroan mencatatkan kinerja operasional yang baik sepanjang tahun 2023. Produksi TBS kebun sendiri tercapai sebesar 7,52 juta ton atau 90,4% dari RKAP tahun 2023 sebesar 8,31 juta ton. Produktivitas TBS kebun sendiri tercapai sebesar 22,23 ton/ha atau 93,4% dari RKAP tahun 2023 sebesar 23,82 ton/ha. Produksi CPO kebun sendiri tercapai sebesar 1,72 juta ton atau 89,7% dari RKAP tahun 2023 sebesar 1,92 juta ton.**

The Company recorded solid operational performance throughout 2023. Own plantation FFB production reached 7.52 million tons, or 90.4% of the 2023 RKAP target of 8.31 million tons. Own plantation FFB productivity reached 22.23 tons/ha, or 93.4% of the 2023 RKAP target of 23.82 tons/ha. CPO production from own plantations reached 1.72 million tons, or 89.7% of the 2023 RKAP target of 1.92 million tons.



#### **Pemegang Saham yang Terhormat,**

Tahun 2023 merupakan tahun bersejarah bagi Perusahaan. Sesuai arahan dan mandat dari para pemegang saham, Perusahaan melakukan aksi korporasi yang substansial melalui penggabungan PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII ke dalam PTPN IV dan *spin off* tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV selaku *surviving entity*. Transformasi ini juga menjadi salah satu upaya strategis Perusahaan untuk menjadi sebuah entitas yang lebih berdaya saing dan bernilai tambah tinggi.

Kondisi ekonomi global belum memperlihatkan pemulihan yang diharapkan selama tahun 2023. Sejumlah rintangan dan krisis masih melanda, terutama dalam sektor energi dan pangan. Hambatan ini tentunya memengaruhi pertumbuhan sejumlah negara, baik negara maju dan berkembang. Namun, kami bersyukur atas resiliensi Indonesia yang mampu bertahan dengan baik dan stabil sepanjang tahun 2023. Dengan pencapaian pertumbuhan ekonomi sebesar 5,02% (sumber: BPS), Indonesia berhasil menjaga stabilitas ekonomi dengan positif di tengah hantaman gelombang ketidakpastian ekonomi global.

Industri kelapa sawit nasional mencatatkan kinerja yang baik pada 2023. Produksi CPO tahun 2023 diperkirakan mencapai 50,07 juta ton atau naik sebesar 7,15% dari tahun 2022

#### **Distinguished Shareholders,**

2023 was a momentous year for the Company. In line with the direction and mandate of the shareholders, the Company carried out a substantial corporate action through the merger of PTPN V, PTPN VI, and PTPN XIII into PTPN IV and the non-pure spin-off of PTPN III (Persero) into PTPN IV as the surviving entity. These transformations are part of the Company's strategic efforts to enhance its competitiveness and value.

Global economic conditions have not shown the expected recovery during 2023. Several obstacles and crises are still occurring, especially in the energy and food sectors. These obstacles certainly affect the growth of a number of countries, both developed and developing countries. However, we are grateful for Indonesia's resilience, which has survived well and stably throughout 2023. With an economic growth achievement of 5.02% (source: BPS), Indonesia has maintained positive economic stability amidst the waves of global economic uncertainty.

The national palm oil industry recorded a good performance in 2023. National CPO production in 2023 is estimated to reach 50.07 million tons, an increase of 7.15% from 2022, which

yakni sebesar 46,73 juta ton. Sementara itu, produksi PKO mencapai 4,77 juta ton atau naik 5,66% dari tahun sebelumnya (2022) yakni sebesar 4,52 juta ton. Kenaikan ini kemungkinan disebabkan oleh berbagai hal, antara lain harga minyak sawit menjelang akhir tahun 2021 dan sepanjang tahun 2022 relatif tinggi, adanya perluasan areal yang telah menghasilkan di tahun 2023, dan El Nino yang semula diperkirakan akan melanda Indonesia, ternyata tidak berpengaruh terhadap produksi tanaman kelapa sawit.

Sementara itu, konsumsi dalam negeri memperlihatkan kenaikan sekitar 8,90% dari 21,24 juta ton pada 2022 menjadi 23,13 juta ton pada 2023. Implementasi kebijakan Biodiesel (B35) yang secara efektif dilakukan pada Juli 2022 telah meningkatkan konsumsi minyak sawit sebesar 17,68% yakni dari 9,048 juta ton pada tahun 2022 menjadi 10,65 juta ton di tahun 2023. Melalui penerapan B35, konsumsi biodiesel selama 2023 telah melampaui konsumsi untuk pangan dalam negeri.

## Kebijakan dan Strategi Perusahaan

Pembentukan *sub-holding* PTPN IV tentunya membutuhkan pemetaan rencana dan strategi yang lebih matang. Perusahaan berupaya untuk bertumbuh menjadi perusahaan sawit terbesar dan terdepan di dunia dari sisi luas lahan dan menjadi pemain utama industri sawit dunia.

Dalam hal keuangan, Perusahaan terus melakukan berbagai langkah antisipasi dari berbagai aspek seperti efisiensi yang berkesinambungan sehingga dapat mempertahankan kinerja dan tingkat keuntungan perusahaan dengan mempertimbangkan faktor-faktor eksternal, utamanya terkait harga jual dan gejolak nilai tukar. Selain itu, kami juga meninjau skema restrukturisasi utang anak perusahaan untuk mendukung stabilitas arus kas.

Untuk menghindari terjadinya *carry over* dan guna memperoleh manfaat pelaksanaan investasi pada periode yang bersangkutan, kami mengupayakan langkah-langkah percepatan dalam proses penyelesaian investasi sesuai rencana dalam RKAP. Kami juga melaksanakan transformasi EBITDA sesuai ketentuan dan petunjuk pelaksanaan dari *holding*.

Dalam hal pengembangan SDM, kami terus menginternalisasi dan menumbuhkembangkan nilai AKHLAK di seluruh kegiatan usaha dan aktualisasi karakter karyawan. Secara berkala, Perusahaan melakukan transfer of knowledge, transfer of habit, dan transfer of culture ke semua jenjang jabatan disertai penetapan standar kompetensi SDM yang jelas dan terukur.

Di segi produksi, Perusahaan terus berupaya meningkatkan capaian produksi dan produktivitas agar dapat mencapai target yang diharapkan. Perusahaan juga melakukan perbaikan dan pemeliharaan secara berkesinambungan pada infrastruktur jalan yang rusak sehingga pengangkutan TBS dari lapangan ke PKS dapat berjalan dengan baik. Untuk mendapatkan produksi yang optimal, Perusahaan juga meningkatkan kualitas dan intensitas pengawasan di lapangan termasuk menjalankan prosedur baku dalam pemeliharaan tanaman, agar produktivitas bisnis utama/budidaya kelapa sawit dapat tercapai.

was 46.73 million tons. Meanwhile, national PKO production reached 4.77 million tons, an increase of 5.66% from the previous year (2022) of 4.52 million tons. This increase is likely due to various factors, including the relatively high price of palm oil towards the end of 2021 and throughout 2022, the expansion of production areas in 2023, and El Nino, which was initially predicted to hit Indonesia but had no effect on palm oil production.

Meanwhile, domestic consumption increased by 8.90% from 21.24 million tons in 2022 to 23.13 million tons in 2023. Implementing the Biodiesel (B35) policy, effectively carried out in July 2022, has increased palm oil consumption by 17.68%, from 9.048 million tons in 2022 to 10.65 million tons in 2023. By implementing B35, biodiesel consumption during 2023 has exceeded domestic food consumption.

## Company's Policies and Strategies

Establishing the PTPN IV sub-holding requires a more comprehensive mapping of plans and strategies. The Company aims to become the world's largest and leading palm oil company in terms of land area and to emerge as a significant player in the global palm oil industry.

Regarding finances, the Company is taking various preemptive measures from different angles, such as ongoing efficiency improvements to maintain the company's performance and profit levels, considering external factors, especially those related to selling prices and exchange rate fluctuations. Additionally, we are evaluating the subsidiary's debt restructuring plan to support cash flow stability.

We are taking steps to expedite the investment settlement process as outlined in the RKAP plan to prevent carry over and reap the benefits of implementing investments within the relevant period. We are also implementing EBITDA transformation in line with the provisions and implementation instructions from the holding.

Regarding HR development, we continue to internalize and develop AKHLAK values in all business activities and actualize employee character. Periodically, the Company carries out the transfer of knowledge, transfer habits, and transfer culture to all office levels, accompanied by establishing clear and measurable HR competency standards.

In terms of production, the Company continues to strive to improve production and productivity achievements to achieve the expected targets. The Company also carries out continuous repairs and maintenance on damaged road infrastructure so that the transportation of FFB from the field to the PKS can run smoothly. To obtain optimal production, the Company also improves the quality and intensity of supervision in the field, including implementing standard procedures in plant maintenance, so that the productivity of the primary business/oil palm cultivation can be achieved.



## Kinerja Perusahaan di Tahun 2023

Perseroan mencatatkan kinerja operasional yang baik sepanjang tahun 2023. Produksi TBS kebun sendiri tercapai sebesar 7,52 juta ton atau 90,4% dari RKAP tahun 2023 sebesar 8,31 juta ton. Produktivitas TBS kebun sendiri tercapai sebesar 22,23 ton/ha atau 93,4% dari RKAP tahun 2023 sebesar 23,82 ton/ha. Produksi CPO kebun sendiri tercapai sebesar 1,72 juta ton atau 89,7% dari RKAP tahun 2023 sebesar 1,92 juta ton. Produktivitas CPO kebun sendiri tercapai sebesar 5,19 ton/ha atau 91,4% dari RKAP tahun 2023.

Dari segi keuangan, Perseroan membukukan jumlah aset sebesar Rp62.662 miliar dan pendapatan usaha sebesar Rp30.770 miliar. Penghasilan komprehensif tahun berjalan tercatat sebesar Rp4.060 miliar dan investasi tahun 2023 tercapai sebesar Rp3,11 triliun. Secara umum, kinerja keuangan per regional di tahun 2023, Regional I – IV (eks PTPN III, IV, V, dan VI) berhasil membukukan laba sementara untuk Regional V (eks PTPN XIII), HO PTPN IV (sebagai *cost center*), dan entitas anak Perusahaan masih membukukan kerugian hingga Rp761 miliar. Berdasarkan Laporan Keuangan Audit per 31 Desember 2023, secara konsolidasian laba bersih tahun 2023 adalah Rp1.185.282 juta dan Perusahaan memperoleh Peringkat Akhir (*Final Rating*) idA-/Stable atau terkategori "Sehat".

Selama tahun 2023, Perusahaan terus melakukan pengembangan teknologi informasi dan inisiatif digital sesuai dengan *Plantation Digitalization Roadmap 2021-2025*, antara lain:

1. Menerapkan ERP SAP di seluruh wilayah.
2. Melaksanakan *Rollout Digital Farming* Komoditas Kelapa Sawit yang terdiri dari 20 Kebun Regional III, 14 Kebun Regional V, dan 7 (tujuh) Kebun KSO Jawa Barat/Regional I.
3. Melaksanakan *Rollout Digital Farming* Komoditas Karet yang terdiri dari 4 (empat) Kebun Regional III dan 5 (lima) Kebun Regional V.
4. Mengaplikasikan *Mill Indicator Monitoring System (MIMS)* yang terdiri dari 4 (empat) PKS Regional II, 2 (dua) PKS Regional III, dan 8 (delapan) PKS Regional IV.
5. Melakukan pengambilan foto udara dan data spasial PTPN Group atas 100% area komoditas sawit.
6. Melakukan asesmen *Indonesia Industri 4.0 Readiness Index (INDI 4.0)* dan memperoleh hasil skor 2,40 dari skala 4,00.
7. Mendapatkan skor >3,00 sesuai target RKAP 2023 berdasarkan hasil pengukuran IT Maturity PTPN IV dan seluruh *region*.

## Tantangan Usaha

Sepanjang tahun 2023, Perusahaan juga menghadapi berbagai tantangan yang dipengaruhi oleh ketidakpastian perekonomian global, seperti resesi dan fluktuasi harga komoditas. Untuk menghadapi tantangan tersebut, Perusahaan berupaya meningkatkan produktivitas dan optimalisasi biaya produksi guna memperkuat nilai tambah dan daya saingnya.

## Company Performance in 2023

The Company recorded good operational performance throughout 2023. The production of FFB from its plantation reached 7.52 million tons or 90.4% of the 2023 RKAP of 8.31 million tons. The productivity of FFB from its plantation reached 22.23 tons/ha or 93.4% of the 2023 RKAP of 23.82 tons/ha. The production of CPO from its plantation reached 1.72 million tons or 89.7% of the 2023 RKAP of 1.92 million tons. The productivity of CPO from its plantation reached 5.19 tons/ha or 91.4% of the 2023 RKAP.

In terms of finance, the Company recorded total assets of Rp62,662 billion and operating revenues of Rp30,770 billion. Comprehensive income for the current year was recorded at Rp4,060 billion, and investment in 2023 reached Rp3.11 trillion. In general, the financial performance per region in 2023, Region I - IV (former PTPN III, IV, V, and VI) managed to post a profit, while for Region V (former PTPN XIII), HO PTPN IV (as a cost center), and the Company's subsidiaries still posted a loss of up to Rp761 billion. Based on the audited financial statements as of December 31, 2023, the consolidated net profit for 2023 was Rp1,185,282 million, and the Company received a final rating of idA-/Stable, classified as "Healthy."

In 2023, the Company focused on developing information technology and digital initiatives as part of the *Plantation Digitalization Roadmap 2021-2025* such as:

1. Implemented SAP ERP across the region.
2. Rolled out Digital Farming for Palm Oil Commodities in 20 Regional III Plantations, 14 Regional V Plantations, and 7 West Java/Regional I KSO Plantations.
3. Rolled out Digital Farming for Rubber Commodities in 4 Regional III Plantations and 5 Regional V Plantations.
4. Implemented the Mill Indicator Monitoring System (MIMS) in 4 PKS Regional II, 2 PKS Regional III, and 8 PKS Regional IV.
5. Captured aerial photographs and spatial data of PTPN Group for 100% of the palm oil commodity area.
6. Assessed the Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) and achieved a score of 2.40 on a scale of 4.00.
7. Achieved a score >3.00 based on the 2023 RKAP target from the IT Maturity measurements of PTPN IV and all regions.

## Business Challenges

In 2023, the Company encountered several challenges due to global economic uncertainty, including recession and fluctuations in commodity prices. To address these challenges, the Company is focused on enhancing productivity and optimizing production costs to strengthen its value and competitiveness.

Selain itu, Perusahaan juga terpapar risiko dan tantangan lainnya seperti cuaca ekstrem dan El Nino yang memengaruhi produksi kelapa sawit. Untuk itu, Perusahaan melakukan upaya-upaya pemberian unsur hara tambahan dari *by-product* yang dimiliki, seperti tandan kosong dan limbah cair melalui *land application*.

## Prospek Usaha

Prospek industri sawit nasional tahun 2024 mempunyai kecenderungan sebagai berikut:

- Konsumsi dalam negeri diperkirakan akan meningkat, terutama untuk kebutuhan pangan, industri oleokimia dan kebutuhan energi (biodiesel) dengan adanya implementasi B35 secara setahun penuh (*Fully Implemented*).
- Harga minyak nabati dunia termasuk minyak kelapa sawit tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023.
- Produksi diperkirakan akan stabil.
- Volume ekspor diperkirakan akan mengalami penurunan, terutama karena meningkatnya kebutuhan dalam negeri.

Meskipun terdapat ketidakpastian ekonomi global, kami optimis bahwa pertumbuhan komoditas utama Perusahaan dapat tetap kuat di tahun-tahun mendatang. Dari segi internal, Perusahaan memiliki kekuatan dan nilai tambah di berbagai bidang, seperti operasional, portofolio produk, profitabilitas komoditas, profitabilitas entitas, finansial, organisasi, *people capability*, dan proses & *system*. Untuk itu, Perusahaan terus melakukan perbaikan operasional untuk seluruh komoditas dan melakukan ekspansi di komoditas sawit.

Prospek usaha Perusahaan dengan komoditas utama kelapa sawit tetap akan menarik dan memiliki peluang peningkatan profitabilitas, melalui optimalisasi areal produktif, peningkatan kinerja operasional berbasis digital dan penciptaan nilai tambah dengan penerapan prinsip ESG.

Secara jangka panjang, produk turunan kelapa sawit juga memiliki prospek permintaan yang tinggi dan potensi marjin yang menarik termasuk biofuel seperti biodiesel (yang utamanya didorong oleh mandat pemerintah negara berkembang dan *Sustainable Aviation Fuel* (~13% 2020-2025 CAGR), Oleokimia (potensi marjin 5-15%), dan Makanan (potensi marjin 5-10%).

## Tata Kelola Perusahaan

Dengan menunjung tinggi prinsip dan nilai-nilai AKHLAK, kami terus berupaya meningkatkan kualitas penerapan tata kelola Perusahaan yang berbasis praktik GCG, antara lain:

1. Penguatan Struktur Organisasi: Meninjau kembali dan memperkuat struktur organisasi Perusahaan untuk memastikan bahwa fungsi pengawasan dan akuntabilitas terjamin secara efektif.
2. Penyusunan Kebijakan GCG yang Komprehensif: Mengembangkan atau memperbaharui kebijakan dan pedoman GCG yang komprehensif dan relevan sesuai kondisi Perusahaan serta regulasi yang berlaku.
3. Penguatan Komite-Komite GCG: Memperkuat peran dan fungsi Komite Audit dan Komite Nominasi dan Remunerasi

Additionally, the Company also faced risks from extreme weather and El Nino, which impact palm oil production. Therefore, the Company is working to utilize by-products it owns, such as empty bunches and liquid waste, through land application to provide additional nutrients.

## Business Prospect

The outlook for the national palm oil industry in 2024 is as follows:

- Domestic consumption is projected to increase, particularly for food, the oleochemical industry, and energy needs (biodiesel) with the full-year implementation of B35.
- Global vegetable oil prices, including palm oil, are expected to remain relatively unchanged compared to 2023.
- Production is anticipated to remain stable.
- Export volume is expected to decrease, primarily due to rising domestic demand.

Despite global economic uncertainty, we are optimistic about the continued strong growth of the Company's primary commodities in the coming years. Internally, the Company has strengths and added value in various areas, such as operations, product portfolio, commodity profitability, entity profitability, financials, organization, people capability, and processes & systems. The Company is committed to improving operations for all commodities and expanding in the palm oil sector.

The business prospects for the Company's palm oil commodities remain attractive, and there are opportunities for increased profitability. This will be achieved by optimizing productive areas, improving digital-based operational performance, and creating added value by implementing ESG principles.

In the long term, palm oil derivative products also have high demand prospects and attractive margin potential. This includes biofuels such as biodiesel (driven by government mandates in developing countries) and Sustainable Aviation Fuel (~13% 2020-2025 CAGR), Oleochemicals (margin potential 5-15%), and Food (margin potential 5-10%).

## Corporate Governance

We are dedicated to upholding the principles and values of AKHLAK and are continuously striving to improve our company's governance based on GCG practices, including:

1. Strengthening the Organizational Structure: We will review and strengthen our organizational structure to ensure effective supervisory and accountability functions.
2. Preparation of Comprehensive GCG Policies: We are developing or updating comprehensive and relevant GCG policies and guidelines according to our company's conditions and applicable regulations.
3. Establishment of GCG Committees: We are enhancing the role and function of the Audit Committee and the

untuk memastikan seluruh Komite beroperasi secara efektif dan independen.

4. Peningkatan Transparansi dan Pelaporan: Memperkuat transparansi dalam pelaporan keuangan dan non-keuangan, serta memastikan informasi yang relevan dan akurat tersedia untuk semua pemangku kepentingan.
5. Implementasi Teknologi dan Sistem Informasi: Menggunakan teknologi dan sistem informasi untuk mendukung pelaksanaan GCG, misalnya dengan sistem pelaporan keuangan digital yang terintegrasi atau platform untuk *whistleblowing*.
6. Konsultasi dengan Pihak Eksternal: Melibatkan konsultan atau ahli eksternal yang kompeten dalam bidang GCG untuk memberikan pandangan independen dan rekomendasi untuk perbaikan.
7. Monitoring dan Audit Internal: Melakukan monitoring dan audit internal secara teratur untuk mengevaluasi kepatuhan terhadap kebijakan GCG dan menemukan area yang memerlukan perbaikan.
8. Komitmen dari Manajemen Tertinggi: Memastikan bahwa komitmen dari manajemen tertinggi terhadap penerapan GCG tetap kuat dan terintegrasi dalam strategi bisnis jangka panjang perusahaan.

Ke depannya, Perusahaan akan terus melakukan berbagai inisiatif dan upaya berikut ini untuk memperkuat penerapan praktik GCG:

1. Mengadakan pelatihan dan pendidikan secara berkala kepada seluruh karyawan tentang prinsip-prinsip GCG, termasuk kode etik dan tata kelola perusahaan yang baik.
2. Memperkuat pemanfaatan teknologi dan sistem informasi yang sudah terimplementasi untuk mendukung pelaksanaan GCG dan mendukung operasional di lapangan.
3. Melakukan evaluasi rutin terhadap implementasi GCG dan memberikan penghargaan atau insentif kepada unit atau individu yang berhasil menerapkan praktik GCG dengan baik.
4. Memastikan bahwa komitmen dari manajemen tertinggi terhadap penerapan GCG tetap kuat dan terintegrasi dalam strategi bisnis jangka panjang Perusahaan.

## Apresiasi

Kami menghaturkan rasa syukur dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pemegang saham, Dewan Komisaris, entitas anak, dan seluruh anggota manajemen yang telah bekerja sama dengan sinergis sepanjang tahun 2023. Perusahaan mengapresiasi seluruh karyawan yang telah bahu membahu bekerja dengan optimal dan mendedikasikan tenaganya untuk mendukung kemajuan Perusahaan.

Aksi korporasi dan transformasi besar yang berhasil dilakukan pada tahun 2023 mencerminkan realisasi tekad kuat Perseroan untuk terus bertumbuh lebih pesat di masa depan. Dengan dukungan dari Anda semua, kami optimis Perusahaan dapat terus beradaptasi dan menghadapi segala tantangan dengan tangkas. Semoga kita semua senantiasa dianugerahi kesehatan dan kesejahteraan. Terima kasih.

Nomination and Remuneration Committee to ensure their effective and independent operation.

4. Increasing Transparency and Reporting: We are enhancing transparency in financial and non-financial reporting, and ensuring that relevant and accurate information is available to all stakeholders.
5. Implementation of Technology and Information Systems: We are using technology and information systems to support the implementation of GCG, for example with an integrated digital financial reporting system or a platform for *whistleblowing*.
6. Engaging External Consultants: Involving external consultants or experts competent in GCG to provide independent views and recommendations for improvement.
7. Internal Monitoring and Audit: Conduct internal monitoring and audits regularly to assess compliance with GCG policies and identify areas for improvement.
8. Commitment from Top Management: Ensure strong and integrated commitment from top management to implementing GCG as part of the company's long-term business strategy.

In the future, the company will continue implementing the following initiatives to strengthen GCG practices:

1. Regularly train and educate all employees on GCG principles, including the code of ethics and good corporate governance.
2. Enhance technology and information systems to support GCG implementation and field operations.
3. Conduct regular evaluations of GCG implementation and provide awards or incentives to units or individuals who successfully implement GCG practices.
4. Ensure top management's strong and integrated commitment to implementing GCG, aligning it with the Company's long-term business strategy.

## Appreciation

We would like to express our deepest gratitude and thanks to the shareholders, Board of Commissioners, subsidiaries, and all members of management who have worked together synergistically throughout 2023. The Company appreciates all employees who have worked optimally and dedicated their energy to support the Company's progress.

The corporate actions and major transformations successfully carried out in 2023 portrayed the Company's strong determination to continue growing more rapidly in the future. With the support of all of you, we are optimistic that the Company can continue to adapt and face all challenges agilely. May we all always be blessed with health and prosperity. Thank you.

**JATMIKO K. SANTOSA**  
Direktur Utama  
Chief Executive Officer

## PERNYATAAN ANGGOTA DEWAN KOMISARIS TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023

### » Statement of the Board of Commissioners Regarding Responsibility for the Annual Report 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara IV tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Perkebunan Nusantara IV for the year 2023 has been accurately presented in its entirety, and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 31 Mei 2024  
Jakarta, May 31, 2024

**Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners



**Dahlan Harahap**  
**Komisaris Utama**  
President Commissioner



**Andi Wibisono**  
**Komisaris Independen**  
Independent Commissioner



**Fauzi Yusuf**  
**Komisaris Independen**  
Independent Commissioner



**Arief Budiono**  
**Komisaris**  
Commissioner



**Arie Yuriwin**  
**Komisaris**  
Commissioner



**Andi Nur Alam Syah**  
**Komisaris**  
Commissioner

# PERNYATAAN ANGGOTA DIREKSI TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN TAHUNAN 2023

## » Statement of the Board of Directors Regarding Responsibility for the Annual Report 2023

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa semua informasi dalam Laporan Tahunan PT Perkebunan Nusantara IV tahun 2023 telah dimuat secara lengkap dan bertanggung jawab penuh atas kebenaran isi Laporan Tahunan Perusahaan.

We, the undersigned, hereby declare that all information in the Annual Report of PT Perkebunan Nusantara IV for the year 2023 has been accurately presented in its entirety, and we take full responsibility for the accuracy of the contents of the Company's Annual Report.

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya.

This statement is made truthfully.

Jakarta, 31 Mei 2024  
Jakarta, May 31, 2024

**Direksi**  
Board of Directors

**Jatmiko K. Santosa**  
Direktur Utama  
Chief Executive Officer

**Rizal H. Damanik**  
Direktur Operasional  
Chief Operating Officer

**Ryanto Wisnuardhy**  
Direktur Pemasaran & Komersial  
Chief Marketing & Commercial Officer

**Ugun Untaryo**  
Direktur Strategi & Sustainability  
Chief Strategy & Sustainability Officer

**Hilda Savitri**  
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko  
Chief Financial & Risk Management Officer

**Suhendri**  
Direktur Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi  
Chief Human Resources & Information Technology Officer

**Irwan Perangin-angin**  
Direktur Hubungan Kelembagaan  
Chief Institutional Relations Officer



# PROFIL PERUSAHAAN

Company Profile



# 03

Pada 2023, terjadi pembentukan *Sub Holding* PTPN IV melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai *surviving entity* dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV.

The establishment of SubHolding PTPN IV through the merger of PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI, and XIII into PTPN IV as the surviving entity, and the non-pure separation of PTPN III (Persero) into PTPN IV occurred in 2023.



# IDENTITAS PERUSAHAAN

## » Corporate Identity



### Nama Perusahaan Company Name

PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)



### Status Perusahaan Company Status

Anak Perusahaan dari *Holding* BUMN Perkebunan PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Subsidiary of SOEs Plantation Holding PT Perkebunan Nusantara III (Persero)



### Tanggal Penggabungan Date of Merger

1 Desember 2023  
December 1, 2023



### Dasar Hukum Penggabungan Legal Basis of Merger

Akta Nomor 08 tanggal 1 Desember 2023 yang dibuat oleh Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta Selatan.

Deed Number 08 dated December 1, 2023, drawn up by Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., a Notary in South Jakarta.



### Bidang Usaha Line of Business

Agrobisnis dan Agro Industri  
Agribusiness and Agro Industry



### Produk dan Jasa Products and Services

Crude Palm Oil (CPO), Palm Kernel (PK), Palm Kernel Meal (PKM), Karet, dan Teh / (PKM), Rubber, and Tea



### Modal Dasar Authorized Capital

Rp11.700.000.000.000



### Kepemilikan Ownership



- Pemerintah Republik Indonesia 7,07%  
Government of the Republic of Indonesia 7.07%
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) 92,93%



### Modal Ditempatkan Dan Disetor Penuh Issued and Fully Paid Capital

Rp8.395.318.000.000 terdiri atas:

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 593.847 saham atau sebesar Rp593.847.000.000, yang terdiri dari:
  - a. 1 Saham Seri A Dwiwarna atau seluruhnya sebesar Rp1.000.000; dan
  - b. 593.846 Saham Seri B atau seluruhnya sebesar Rp593.846.000.000.
2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 7.801.471 Saham Seri B atau sebesar Rp7.801.471.000.000.

Rp8,395,318,000,000 consists of:

1. The Republic of Indonesia with 593,847 shares amounting to Rp593,847,000,000, which includes:
  - a. 1 Series A Dwiwarna share valued at Rp1,000,000; and
  - b. 593,846 Series B shares valued at Rp593,846,000,000.
2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) with 7,801,471 Series B shares amounting to Rp7,801,471,000,000.





### Data Jaringan Kantor Office Network Data

- 1 Kantor Pusat/Head Office
- 5 Kantor Regional/Regional Office
- 219 Unit Usaha/Business Units

Mencakup 18 Grup Perusahaan yang terdiri dari:

- Consist of 18 Companies Group:
- 7 Entitas Anak/Subsidiaries
  - 11 Entitas Asosiasi/Associated



### Alamat Perseroan Company Address

Gedung Agro Plaza Lt.8/8th Floor, Agro Plaza Building,  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav.X2 No.1,  
Kuningan Timur, Setiabudi,  
Jakarta Selatan/South Jakarta 12950

(+62-21) 31119000

(+62-21) 31119001



### Sekretaris Perusahaan Corporate Secretary

Bambang Budi Santoso



### Jumlah Karyawan Number of Employees

49.773 Karyawan Tetap/Permanent Employees  
9.759 PKWT & Honorer/Temporary Employees & Honorary



### Kantor Perwakilan Representative Office

#### Kantor Regional 1

Regional Office 1  
Jl. Sei Batanghari  
No. 2 Medan, Sumatra Utara/North Sumatra, 20122

#### Kantor Regional 2

Regional Office 2  
Jl. Letjend Suprpto No.2 Medan,  
Sumatra Utara/North Sumatra, 20151

#### Kantor Regional 3

Regional Office 3  
Jl. Rambutan No. 43 Pekanbaru,  
Riau, 28294

#### Kantor Regional 4

Regional Office 4  
Jl Lingkar Barat Paal 10, Kota Jambi,  
Jambi, 36128

#### Kantor Regional 5

Regional Office 5  
Jl. Sit. Abdurrahman No.11 Pontianak  
Kalimantan Barat/West Kalimantan, 78113



### Kontak Contact

ptpnusantara4@ptpn4.co.id/  
corsecpalmcon4@gmail.com

www.ptpn4.co.id

Ptpn PalmCo

ptpn4\_palmco

ptpn4\_palmco

ptpn4\_palmco

ptpn4\_palmco



### Wilayah Kerja Working Area

51 Kabupaten / Regencies:

- Aceh Tamiang
- Aceh Timur
- Aceh Utara
- Asahan
- Banjar
- Banyuasin
- Batang Hari
- Batubara
- Kabupaten Bogor
- Deli Serdang
- Indragiri Hulu
- Kampar
- Konawe Utara
- Kota Binjai
- Kotabaru
- Labuhan Batu
- Labuhan Batu Selatan
- Labuhan Batu Utara
- Lahat/Empat Lawang
- Lampung Selatan
- Lampung Tengah
- Landak
- Langkat
- Langsa
- Lebak
- Lima Puluh Kota
- Luwu Timur
- Mandailing Natal
- Muara Enim
- Muaro Jambi
- Padang Lawas
- Pandeglang
- Pasaman Barat
- Paser
- Rokan Hilir
- Rokan Hulu
- Sanggau
- Sarolangun
- Seluma
- Serdang Bedagai
- Siak
- Simalungun
- Solok Selatan
- Subang
- Sukabumi
- Tanah Laut
- Tanjung Jabung Barat
- Tanjung Jabung Timur
- Tapanuli Selatan
- Tebo
- Wajo



## RIWAYAT PERUSAHAAN

### » Company History



PTPN IV (Perseroan) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1996, seperti yang dinyatakan dalam Akta Pendirian No. 37 tanggal 11 Maret 1996, yang dibuat di hadapan Notaris Harun Kamil, S.H., dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8332.HT.01.01.Th.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, serta Tambahan Berita Negara No. 8675/1996.

Anggaran Dasar Perseroan telah mengalami beberapa kali perubahan, perubahan terakhir sehubungan dengan persetujuan pemegang saham atas perubahan jenis saham, dan perubahan anggaran dasar sebagaimana tercantum dalam Akta Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.KN., Nomor 08 tanggal 1 Desember 2023. Perubahan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. AHU-0076469.AH.01.02 tanggal 7 Desember 2023.

PTPN IV (the Company) was established based on the Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 12 of 1996, as stated in the Deed of Establishment No. 37 dated March 11, 1996, drawn up before Notary Harun Kamil, S.H., and has been approved by the Minister of Justice of the Republic of Indonesia through Decree No. C2-8332.HT.01.01.Th.96 dated August 8, 1996, and has been announced in the State Gazette Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1996, and Supplement to State Gazette No. 8675/1996.

The Company's Articles of Associations have been amended several times, with the latest amendment related to the approval of shareholders for changes in type of shares, and changes to the articles of association as stated in the Notarial Deed of Nanda Fauz Iwan, S.H, M.KN., No. 08 dated December 1, 2023. The amendment has been approved by the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through Decree No. AHU-0076469.AH.01.02 dated December 7, 2023.

# LOGO PTPN IV

## » PTPN IV Logo

### Bentuk Pohon

Mengartikan gambaran dari pohon/ buah/apapun yang mendekati bentuk tumbuhan, digambarkan dengan tiga pelepah di atas, dua pelepah di bawah.

### Tree Shape

This represents the image of a tree, fruit, or anything that is close to the shape of a plant, depicted with three fronds on top and two fronds on the bottom.

### Pelepah

Mengartikan unit perkebunan kelapa sawit.

### Midrib

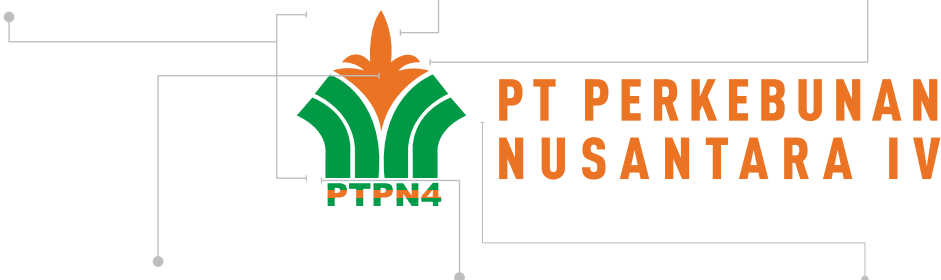
This represents oil palm plantation unit.

### Dua Pelepah di Bawah

Mengartikan wadah yang mengelola unit perkebunan di atasnya, yaitu PTPN IV.

### Two Midribs Below

This represents the container that manages the plantation unit above it, namely PTPN IV.



### Jingga pada Wadah dan Bentuk Tiga Pelepah

Mengartikan semangat membara untuk mempertahankan serta meningkatkan mutu produksi dalam merebut pasar dari para pesaing produk yang dipasarkan. Dengan tangan dingin serta keyakinan dan semangat kerja maka keberhasilan akan tercapai berkat Karunia dan Rahmat dari Tuhan Yang Maha Esa. Semua berasal dari satu titik, yaitu Sang Maha Pencipta maka kita patut untuk mensyukuri.

### Orange on the Container and Formation of Three Fronds

This represents a strong enthusiasm to maintain and enhance production quality in order to capture the market from competitors of the products being marketed. With a composed demeanor, confidence, and enthusiasm, success can be achieved, thanks to the Grace and Mercy of God Almighty. Everything originates from one source, the Almighty Creator, so we should be grateful.

### Warna Jingga

Empat bidang lengkung terletak di bawah merupakan landasan yang menunjang ketiga unit di atasnya. Dibuat secara masif dan kokoh membawa pesan kuat, lengkungan yang mengarah ke kiri dan ke kanan merupakan arah pengembangan atau pemasaran, selain mempresentasikan industri hilir PTPN IV. Empat bidang lengkung menganalogikan angka empat dari PTPN, maka disebutlah PTPN IV.

### Orange Color

The four curved planes located below serve as the foundation that supports the three units above. They are built massively and sturdily to convey a powerful message. The arches pointing to the left and right indicate the direction of development or marketing, besides representing PTPN IV's downstream industry. The four curved planes are symbolically linked to the number four of PTPN, hence the name PTPN IV.

### Warna Hijau

Secara keseluruhan, bentuk logo ini mengarah ke atas kalau diambil garis lurus menuju/memusat ke satu titik, yang berarti ketajaman fokus usaha dalam mencapai tujuan demi kesejahteraan bersama yang berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa. Mengenai warna yang ada pada logo, selain sebagai lambang juga sebagai unsur estetis. Hijau bersifat sejuk, dingin, keyakinan Jingga bersifat panas, semangat, berani. Hijau pada empat bidang lengkung, mengacu pada sifat tangan dingin, serta keyakinan dalam mengelola pekerjaan yang membawa angin segar bagi keuntungan perusahaan dan kesejahteraan karyawannya, juga sejuk dalam kerukunan kerja antar sesama karyawan dan atasan sehingga timbul keakraban timbal balik, dalam hal ini PTPN IV yang jernih dalam pola pikir dan keyakinan dalam hasil kerja.

### Green color

Overall, the shape of this logo points upwards when a straight line is drawn toward one point, signifying a focused effort to achieve goals for mutual prosperity based on the belief in the Almighty God. Regarding the colors in the logo, in addition to being symbolic, they also serve as aesthetic elements. Green represents composure, confidence, and coolness. Orange symbolizes warmth, enthusiasm, and bravery. The green in the four curved areas signifies the cool and composed approach, as well as confidence in managing work to bring about profitability and the welfare of the company's employees. It also signifies working in harmony between colleagues and superiors, fostering mutual familiarity. In this context, PTPN IV is clear in thought patterns and confident in work results.



# TONGGAK SEJARAH

## Milestones

**1911**  
Perkebunan Kelapa Sawit pertama kali dibuka oleh Pemerintah Belanda di Sumatra Utara.  
Oil Palm Plantations were first managed by the Dutch Government in North Sumatra.

**1958**  
Perusahaan Belanda dinasionalisasi oleh Pemerintah Indonesia dan dibentuk PNP kemudian PTP yang menjadi cikal bakal PTPN IV.  
Dutch companies were nationalized by the Government of Indonesia and subsequently formed into PNP, then PTP, which became the precursor to PTPN IV.

**1996-2000**  
PTPN IV (Persero) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1996, merupakan hasil peleburan 3 (tiga) Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yaitu PT Perkebunan VI (Persero), PT Perkebunan VII (Persero), dan PT Perkebunan VIII (Persero).

PTPN IV (Persero) was established based on Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 9 of 1996, which was the result of the fusion of 3 (three) State-Owned Enterprises (SOEs), namely PT Perkebunan VI (Persero), PT Perkebunan VII (Persero), and PT Perkebunan VIII (Persero).

**2000**  
PTPN IV mendirikan anak perusahaan PT Sarana Agro Nusantara bersama dengan PT Perkebunan Nusantara III, dan PT Perkebunan Nusantara V, dengan kepemilikan saham PTPN IV sebesar 50,08%, PTPN III sebesar 39,92%, dan PTPN V sebesar 10,00%.

PT Perkebunan Nusantara IV established a subsidiary company PT Sarana Agro Nusantara together with PT Perkebunan Nusantara III, and PT Perkebunan Nusantara V, with PTPN IV share ownership of 50.08%, PTPN III of 39.92%, and PTPN V of 10.00%.

**2001-2005**  
Merencanakan strategi transformasi bisnis seiring semakin tingginya permintaan kelapa sawit, dengan merencanakan pengembangan areal kelapa sawit dan mulai melaksanakan konversi tanaman teh dan kakao ke kelapa sawit di Unit Balimbingan, Bah Birong Ulu, dan Marjandi.

Planning a business transformation strategy in line with the increasing demand for palm oil, by planning the development of oil palm areas and starting to implement the conversion of tea and cocoa plants to oil palm in the Balimbingan, Bah Birong Ulu, and Marjandi Units.

**2010**  
PTPN IV mendirikan perusahaan asosiasi PT Pupuk Agro Nusantara bersama dengan PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT), dan PT Perkebunan Nusantara V, dengan kepemilikan saham PT PKT sebesar 51,00%, PTPN IV sebesar 34,00%, dan PTPN V sebesar 15,00%.

PT Perkebunan Nusantara IV established an associated company, PT Pupuk Agro Nusantara together with PT Pupuk Kalimantan Timur (PT PKT), and PT Perkebunan Nusantara V, with PT PKT share ownership of 51.00%, PTPN IV of 34.00%, and PTPN V of 15.00%.

**2006-2010**  
Perseroan membentuk Direktorat Perencanaan dan Pengembangan Usaha, dan mengganti Direktorat Pemasaran menjadi Direktorat Keuangan. Perseroan mulai melakukan pengembangan areal kelapa sawit di Kabupaten Labuhan Batu dan Mandailing Natal, dan membentuk Unit Proyek Pengembangan Batang Laping, Timur, dan Panai Jaya.

The Company formed the Directorate of Business Planning and Development and changed the Directorate of Marketing to the Directorate of Finance. The Company began developing oil palm areas in Labuhan Batu and Mandailing Natal Regencies and formed the Batang Laping, East, and Panai Jaya Development Project Units.

**2005**  
PTPN IV mendirikan perusahaan asosiasi PT Environmental Synthetic Wood (ESW) Nusantara Tiga bersama dengan PT Perkebunan Nusantara III, dengan kepemilikan saham PTPN IV sebesar 23,86%, Kopkar Nusa Tiga 2,03% dan PTPN III sebesar 74,11%.

PTPN IV established an associated company PT Environmental Synthetic Wood (ESW) Nusantara Tiga together with PT Perkebunan Nusantara III, with PTPN IV share ownership of 23.86%, Kopkar Nusa Tiga 2.03%, and PTPN III of 74.11%.





2011

PTPN IV mendirikan anak perusahaan PT Sinergi Perkebunan Nusantara bersama dengan PT Perkebunan Nusantara XIV, dengan kepemilikan saham PTPN IV sebesar 71,28% dan PTPN XIV sebesar 28,72%

PTPN IV mendirikan anak perusahaan PT Agro Sinergi Nusantara bersama dengan PT Perkebunan Nusantara I, dengan kepemilikan saham PTPN IV sebesar 64,77%, dan PTPN I sebesar 35,23%.

PTPN IV established a subsidiary company PT Sinergi Perkebunan Nusantara together with PT Perkebunan Nusantara XIV, with PTPN IV holding 71.28% and PTPN XIV holding 28.72%.

PT Perkebunan Nusantara IV established a subsidiary company, PT Agro Sinergi Nusantara, together with PT Perkebunan Nusantara I, with PTPN IV holding 64.77%, and PTPN I holding 35.23%.

2012

PTPN IV mendirikan perusahaan asosiasi PT Industri Nabati Lestari bersama dengan PT Perkebunan Nusantara III, dengan kepemilikan saham PTPN IV sebesar 49,00%, dan PTPN III sebesar 51,00%.

PTPN IV established an associated company, PT Industri Nabati Lestari, together with PT Perkebunan Nusantara III, with PTPN IV holding 49.00%, and PTPN III holding 51.00%.

2011-2013

Perseroan mulai melakukan restrukturisasi organisasi dan SDM dalam rangka menuju perusahaan yang lebih baik. Restrukturisasi organisasi dimulai dengan menyederhanakan proses bisnis dan melakukan penggabungan Grup Unit Usaha yang semula ada 5 GUU menjadi 4 GUU, melakukan penggabungan Unit Usaha PKS Sosa ke Unit Usaha Sosa, serta melakukan *spin-off* rumah sakit dan sekolah.

The Company carried out organizational and human resource restructuring to become a better company. Organizational restructuring started with simplifying business processes and merging Business Unit Groups from 5 GUUs to 4 GUUs, merging Sosa POM Business Units to Sosa Business Units, and spin-off hospitals and schools.

2017

PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) di Sulawesi Tengah mengukir sejarah sebagai anak perusahaan milik PTPN IV yang pertama mendirikan Pabrik Kelapa Sawit (PKS). RUPSLB PT PAN pada tanggal 3 Februari 2017, para Pemegang Saham (PT PKT, PTPN IV, dan PTPNV) sepakat untuk mengambil opsi likuidasi PT PAN.

PT Sinergi Perkebunan Nusantara (SPN) in Central Sulawesi made history as a subsidiary of PTPN IV which was the first to establish a Palm Oil Mill (POM). PT PAN's EGMS on February 3, 2017, the Shareholders (PT PKT, PTPN IV, and PTPN V) agreed to take the option of liquidating PT PAN.

2016

PTPN IV melakukan restrukturisasi organisasi pada bagian kantor pusat yang semula terdiri atas 19 bagian menjadi 14 bagian.

PTPN IV carried out organizational restructuring at the head office which originally consisted of 19 sections to 14 sections.

2015

PTPN IV mendirikan anak perusahaan PT Prima Medica Nusantara bersama dengan Koperasi Karyawan PTPN IV, dengan kepemilikan saham PTPN IV sebesar 99,99% dan Koperasi Karyawan PTPN IV sebesar 0,01%.

PTPN IV established a subsidiary company, PT Prima Medica Nusantara together with PTPN IV Employee Cooperative, with PTPN IV share ownership of 99.99% and PTPN IV Employee Cooperative of 0.01%.

2014

Pada tahun 2014, PTPN IV direstrukturisasi menjadi anak perusahaan *Holding* Perkebunan Nusantara.

In 2014, PTPN IV was restructured to become a subsidiary of the Perkebunan Nusantara Holding.



2019

Pada 30 April 2019, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) bersama anak perusahaannya (PT Perkebunan Nusantara IV, V dan VI) dan Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan Yogyakarta mendirikan perusahaan patungan bernama PT LPP Agro Nusantara yang bergerak dibidang pelayanan jasa pelatihan, konsultasi, *assessment center*, dan sertifikasi.

Pada 6 Maret 2019, Direksi *Holding* PTPN Group resmi menetapkan Corporate Values yang baru yaitu SIPro, yang merupakan akronim dari Sinergi, Integritas, Profesional dan berlaku bagi seluruh PTPN yang tergabung dalam PTPN Group.

On April 30, 2019, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) together with its subsidiaries (PT Perkebunan Nusantara IV, V, and VI) and the Association of Yogyakarta Plantation Education Institutions established a joint venture company named PT LPP Agro Nusantara which is engaged in training, consulting, assessment center, and certification services.

On March 6, 2019, the PTPN Group Holding Board of Directors officially established new Corporate Values, namely SIPro, which is an acronym for Synergy, Integrity, and Professionalism and applies to all PTPNs that are members of the PTPN Group.

2023

**Pembentukan *Subholding* PTPN IV melalui penggabungan PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI dan XIII ke dalam PTPN IV sebagai *surviving entity* dan pemisahan tidak murni PTPN III (Persero) ke dalam PTPN IV.**

The establishment of Subholding PTPN IV through the merger of PT Perkebunan Nusantara (PTPN) V, VI, and XIII into PTPN IV as the surviving entity, and the non-pure separation of PTPN III (Persero) into PTPN IV.

2020

Dengan adanya beberapa perubahan di lingkungan bisnis Perseroan termasuk perubahan nilai-nilai Perseroan (*Core Values*) yang semula "SIPro" berubah menjadi "AKHLAK" AKHLAK merupakan akronim dari Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Berdasarkan Surat Edaran Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SE-7/MBU/Q7/2020 tanggal 1 Juli 2020 Tentang Nilai-Nilai Utama (*Core Values*) Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Perubahan Nomenklatur Direksi (dari 5 Direksi) diubah menjadi 1 Direksi dan 3 SEVP (Senior Eksekutif Vice President).

With several changes in the Company's business environment including changes to the Company's Values (core values) which were originally "SIPro" changed to "AKHLAK" AKHLAK is an acronym for Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptive, Kolaboratif. Based on the Circular of the Minister of State-Owned Enterprises No. SE-7/MBU/Q7/2020 dated July 1, 2020, concerning Core Values of Human Resources of State-Owned Enterprises. Changes in Nomenclature of the Board of Directors (from 5 Directors) changed to 1 Director and 3 SEVP (Senior Executive Vice President).



# VISI DAN MISI PERUSAHAAN

## » Corporate Vision and Mission



## VISI Vision

**Menjadi perusahaan global berbasis agribisnis terintegrasi dan berkelanjutan.**

Become a global company based on integrated and sustainable agribusiness.

## MISI Mission

- |   |   |
|---|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menghasilkan produk yang berkualitas tinggi bagi pelanggan.</li> <li>2. Membentuk kapabilitas proses kerja yang unggul (<i>operational excellence</i>) melalui perbaikan dan inovasi berkelanjutan dengan praktik operasional perkebunan terbaik yang berbasis digital dan menciptakan nilai bagi pemegang saham.</li> <li>3. Mengembangkan organisasi dan budaya yang prima serta SDM yang kompeten dan sejahtera dalam merealisasi potensi setiap insani.</li> <li>4. Turut serta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan menjaga kelestarian lingkungan untuk kebaikan generasi masa depan.</li> <li>5. Mengembangkan bisnis hilir terintegrasi untuk menambah nilai produk agribisnis.</li> <li>6. Berkontribusi aktif dalam inisiatif pemerintah untuk ketahanan pangan dan energi nasional.</li> <li>7. Menjunjung standar etika yang tinggi melalui implementasi dari tata kelola perusahaan yang baik.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Deliver high-quality products to our customer.</li> <li>2. Enhance operational excellence through continuous improvement and innovation with best-in-class digital upstream operations and creating value for our shareholders.</li> <li>3. Foster an outstanding organizational culture and develop competent, prosperous human resources to unlock the potential of every individual.</li> <li>4. Promote community welfare and environmental sustainability for the benefit of future generations.</li> <li>5. Expand integrated downstream businesses to increase the value of agribusiness products.</li> <li>6. Actively support government initiatives to ensure national food and energy security.</li> <li>7. To adhere high ethical standards via implementation of good corporate governance.</li> </ol> |
|---|---|

### Penetapan Visi dan Misi

Visi dan Misi di atas termaktub pada Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP) 2020-2024 selaras dengan RJPP *Holding* Perkebunan berdasarkan Surat No. DRU/PTPN/1366/2021 tanggal 29 April 2021 dan sesuai program prioritas strategis Kementerian BUMN (KBUMN).

### Determination of Vision and Mission

The above Vision and Mission are contained in the Company's Long-Term Plan (RJPP) 2020-2024 in line with the Plantation Holding RJPP based on Letter No. DRU/PTPN/1366/2021 dated April 29, 2021 and following the strategic priority program of the Ministry of BUMN (KBUMN).



# NILAI-NILAI PERUSAHAAN

## » Corporate Values



**AMANAH**  
TRUST

- Memegang teguh kepercayaan yang diberikan
- Memenuhi janji dan komitmen.
  - Bertanggung jawab atas tugas, keputusan, dan tindakan yang dilakukan hingga tuntas.
  - Berpegang teguh kepada nilai moral dan etika.

- Hold fast to the trust given
- Fulfill promises and commitments.
  - Responsible for tasks, decisions, and actions taken to completion.
  - Adhere to moral and ethical values.



**KOMPETEN**  
COMPETENT

- Terus belajar dan mengembangkan kapabilitas
- Meningkatkan kompetensi diri untuk menjawab tantangan yang selalu berubah.
  - Membantu orang lain untuk belajar.
  - Menyelesaikan tugas dengan kualitas terbaik.
  - Berani mengambil keputusan secara cepat dan tepat berdasarkan risiko yang terukur.
  - Mengutamakan Kesehatan dan Keselamatan Kerja serta kepedulian kepada orang lain, lingkungan sosial dan alam sebagai *way of life*.
  - Melayani dengan hati tanpa batas.

- Continue to learn and develop capabilities
- Improve self-competence to respond to ever-changing challenges.
  - Help others to learn.
  - Complete tasks with the best quality.
  - Dare to make quick and appropriate decisions based on measured risks.
  - Prioritize Occupational Health and Safety as well as concern for other people, and the social and natural environment as a way of life.
  - Serve with a heart without limits.



**HARMONIS**  
HARMONIOUS

- Saling peduli dan menghargai perbedaan
- Menghargai setiap orang apapun latar belakangnya.
  - Saling membantu dan mendukung untuk kepentingan Perseroan.
  - Membangun lingkungan kerja yang kondusif.

- Caring for each other and respecting differences
- Respect everyone regardless of background.
  - Help and support each other for the benefit of the Company.
  - Build a conducive work environment.



**LOYAL**  
LOYAL

- Beredikasi dan mengutamakan kepentingan bangsa dan negara
- Menjaga nama baik sesama pekerja, pimpinan, BUMN, dan negara
  - Rela berkorban untuk mencapai tujuan yang lebih besar.
  - Patuh kepada pimpinan sepanjang tidak bertentangan dengan hukum dan etika.
  - Berkontribusi lebih melampaui harapan untuk membangun dan meningkatkan kapasitas nasional.
  - Pantang menyerah menghadapi tantangan dan harapan.

- Dedicated and prioritizing the interests of the nation and country
- Maintain the good name of fellow employees, leaders, SOEs, and the country.
  - Willing to make sacrifices to achieve a greater goal.
  - Obey the leadership as long as it does not conflict with law and ethics.
  - Contribute beyond expectations to build and enhance national capacity.
  - Never give up on facing challenges and hopes.



**ADAPTIF**  
ADAPTIVE

- Terus berinovasi dan antusias dalam menggerakkan ataupun menghadapi perubahan
- Cepat menyesuaikan diri untuk menjadi lebih baik.
  - Terus menerus melakukan perbaikan mengikuti perkembangan teknologi.
  - Bertindak proaktif
  - Kreatif dan inovatif dalam menghasilkan solusi dan nilai tambah.
  - Menunjukkan semangat, antusiasme dan energi positif.

- Continue to innovate and be enthusiastic in moving or dealing with change
- Quickly adjust to become better.
  - Continuously make improvements following technological developments.
  - Act proactively.
  - Creative and innovative in producing solutions and added value.
  - Show passion, enthusiasm, and positive energy.



**KOLABORATIF**  
COLLABORATIVE

- Membangun kerjasama yang sinergis
- Memberikan kesempatan kepada berbagai pihak untuk berkontribusi.
  - Terbuka dalam bekerja sama untuk menghasilkan nilai tambah.
  - Menggerakkan pemanfaatan berbagai sumber daya untuk tujuan Perseroan.
  - Bersinergi secara agresif untuk memberikan nilai tambah sebesar-besarnya untuk perusahaan dan pemangku kepentingan lainnya.

- Build synergistic collaboration
- Provide opportunities for various parties to contribute.
  - Open to working together to produce added value.
  - Drive the utilization of various resources for the Company.
  - Aggressively synergize to provide maximum added value for the Company and other stakeholders.



# BUDAYA PERUSAHAAN

## » Corporate Culture

Memberi, membimbing dan mendorong perilaku seluruh karyawan perusahaan agar dalam melaksanakan tugas selalu:

Providing, guiding, and encouraging the behavior of all company employees so that in carrying out their duties they always:



Berpikir positif untuk dapat menangkap setiap peluang.  
Think positively to be able to catch every opportunity.

Proaktif dalam menghasilkan inovasi dan prestasi.  
Proactive in innovating and thriving.



Kerja sama tim untuk membangun kekuatan.  
Working together to build strength.

Menempatkan kepentingan perusahaan sebagai pertimbangan utama bagi setiap keputusan yang diambil oleh setiap jajaran perusahaan.  
Putting the company's interests as the main consideration in taking every decision by every company's level.



Menempatkan peningkatan kesejahteraan karyawan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari pencapaian sasaran perusahaan.  
Putting employee welfare improvement as an inseparable part of achieving company goals.



## KEGIATAN DAN BIDANG USAHA

### » Activities and Line of Business



#### Kegiatan Usaha Perusahaan Menurut Anggaran Dasar Terakhir

Berdasarkan landasan hukum yang tercantum dalam Anggaran Dasar Perusahaan, fokus utama dan tujuan Perseroan adalah terlibat dalam sektor agro bisnis dan agro industri. Langkah ini diambil untuk mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya perusahaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa berkualitas tinggi yang mampu bersaing di pasar. Tujuan lainnya adalah meningkatkan nilai Perseroan dengan mencapai keuntungan, sejalan dengan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.

#### The Company's Business Activities According to the Latest Article of Association

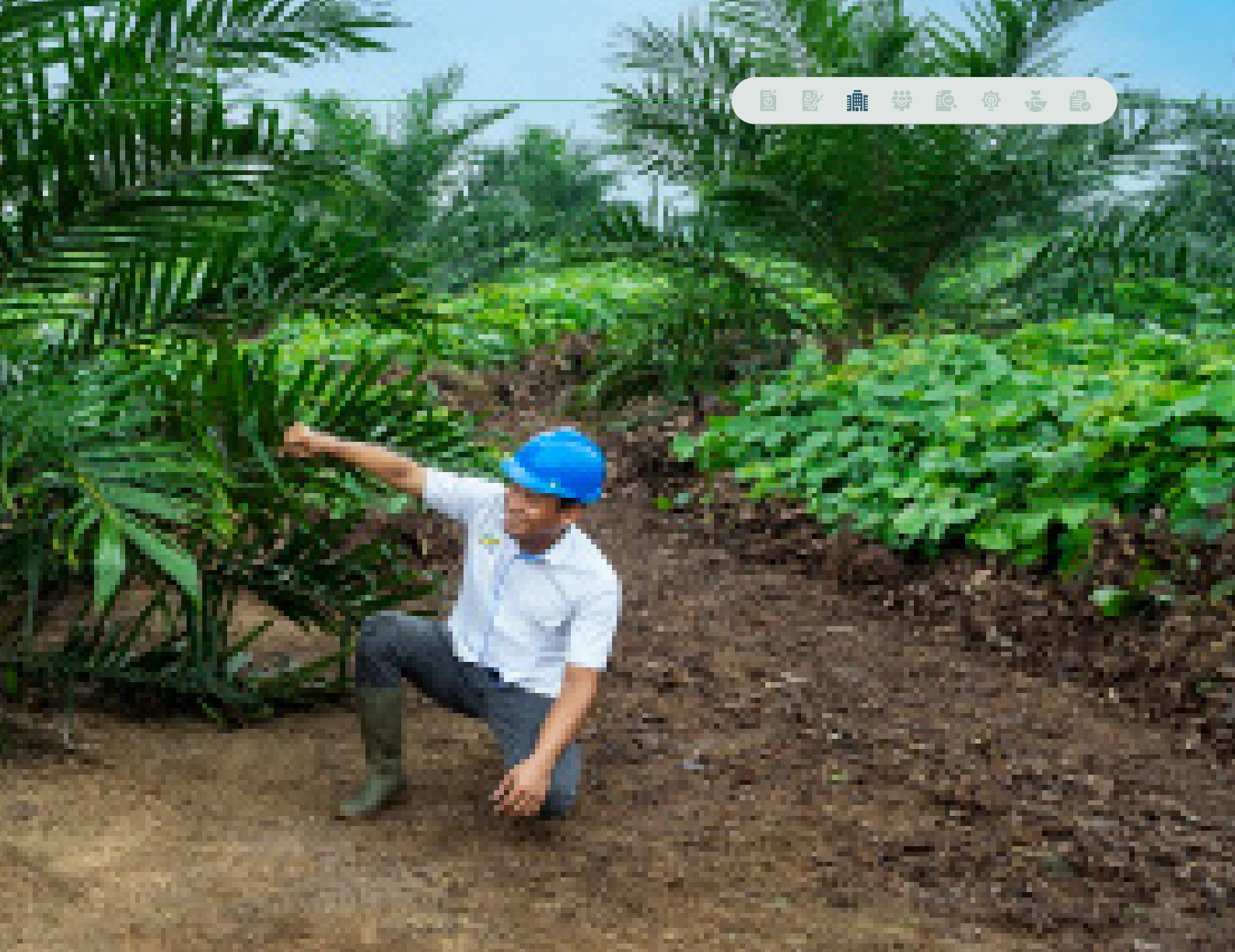
Based on the legal basis stated in the Company's Articles of Association, the Company's main focus and objective is to be involved in the agro-business and agro-industry sectors. This step was taken to optimize the use of company resources to produce high-quality goods and/or services that can compete in the market. Another objective is to increase the Company's value by achieving profits, which aligns with the principles of Limited Liability Companies.

Dalam mencapai bidang usaha tersebut, Perseroan melaksanakan kegiatan utama sebagai berikut:

- Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta pemungutan hasil tanaman dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;

In achieving these business fields, the Company perform major activities, such as:

- Agricultural activities consisting of land clearing and management, seedling, planting and maintenance and harvesting of the plantation result and other activities related to the agriculture;



- Produksi meliputi penerimaan dan pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya;
- Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain;
- Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis, agro industri, dan agro forestry.

- Production covering receiving and processing of own the plantation result or from other parties to become semifinished and or finished goods and its derivative products;
- Trading covering organizing marketing activities of various products and other tradings activities related to the Company's business activities whether its own production result or others production result;
- Business development of agriculture, agrotourism, agrobusiness, agro industry and agro forestry.

### Proses Produksi Benih Unggul Balai Benih

Dengan jumlah pohon induk dura sebanyak 481 pokok dan pohon induk jantan terpilih sebanyak 8 pokok, Balai Benih PTPN IV bisa memproduksi sekitar 3.000.000 benih. Apabila pohon semakin dewasa, perkiraan produksi akan meningkat menjadi 5.000.000 benih.

### Superior Seed Production Process of Seed Centers

With a total of 481 dura main trees and 8 selected male main trees, PTPN IV Seed Center can produce around 3,000,000 seeds. As the trees mature, the estimated production will increase to 5,000,000 seeds.



## PRODUK DAN JANGKAUAN PASAR

### » Products and Market Range



Perseroan mengusahakan perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan dan kegiatan pendukung lainnya.

Areal tanaman kelapa sawit tahun 2023 adalah seluas 471.988 ha, yang terdiri dari:

- Tanaman Menghasilkan: 338.018 Ha
- Tanaman Belum Menghasilkan: 35.134 Ha
- Tanaman Baru (TB)/Tanaman Ulang (TU)/ Tanaman Tahun Ini (TTI): 88.820 Ha
- Tanaman Tahun Akan Datang: 10.016 Ha

Dalam memaksimalkan pemanfaatan lahan, Perseroan juga menanam komoditas selain kelapa sawit, seperti karet, teh, dan kopi dengan luas areal tanaman sebagai berikut:

- Areal Tanaman Karet: 51.115 ha
- Areal Tanaman Teh: 9.053 ha
- Areal Tanaman Kopi: 538 ha

Jangkauan pasar untuk setiap produk yang dihasilkan Perseroan antara lain:

- Minyak Sawit (*Crude Palm Oil/CPO*):
- Inti Sawit (*Palm Kernel/PK*)
- *Palm Kernel Oil (PKO)*
- *Palm Kernel Meal (PKM)*

The Company operates plantations and processing of oil palm and tea commodities, including area and plant processing, nursery, and yielding plant maintenance, processing of commodities into raw materials for various industries, marketing of the commodities produced, and other supporting activities.

The oil palm plantation area in 2023 were 471,988 ha, consisting of:

- Mature Plants: 338,018 Ha
- Immature Plants: 35,134 Ha
- New Plants (TB)/Replants (TU)/This Year's Plants (TTI): 88,820 Ha
- Future Year Crops: 10,016 Ha

In maximizing land utilization, the Company also cultivates commodities other than palm oil, such as rubber, tea, and coffee, with the following plantation areas:

- Rubber Plantation Area: 51,115 ha
- Tea Plantation Area: 9,053 ha
- Coffee Plantation Area: 538 ha

The market reach for each product produced by the Company includes:

- Crude Palm Oil (CPO)
- Palm Kernel (PK)
- Palm Kernel Oil (PKO)
- Palm Kernel Meal (PKM)

	CPO	PK	PKO	PKM
Domestik/Domestic	Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi	Sumatra, Jawa, Kalimantan, Sulawesi Sumatra, Java, Kalimantan, Sulawesi	Sumatra	Sumatra
Ekspor/Export	India, Pakistan, Italia, Spanyol India, Pakistan, Italy, Spain	-	-	Tiongkok & Korea

Terhitung 1 Desember 2023, Perseroan mengoperasikan 95 unit kebun kelapa sawit, 57 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 4 unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS), 3 unit kebun teh, 3 unit pabrik pengolahan teh, 27 unit kebun karet, 12 unit pabrik pengolahan karet, 6 unit proyek pengembangan kebun plasma kelapa sawit, 1 unit kebun benih, 9 unit distrik dan 1 unit perbengkelan. Perseroan mengembangkan dan menerapkan standar nasional dan standar global untuk minyak sawit berkelanjutan.

### Balai Benih Kelapa Sawit

PTPN IV memiliki Balai Benih Kelapa Sawit yang menghasilkan Varietas Avros, Simalungun, Langkat, dan PPKS 540. Dengan jumlah pohon induk dura sebanyak 481 pokok dan pohon induk jantan terpilih sebanyak 8 (delapan) pokok, Balai Benih PTPN IV bisa memproduksi sekitar 3.000.000 benih hingga 5.000.000 benih. Benih kelapa sawit dipasarkan untuk memenuhi kebutuhan internal dan kebutuhan lokal di sekitar wilayah operasional Perseroan.

### Jasa Lainnya

Jasa Teknik, Manufaktur, dan Konstruksi yang dihasilkan dari Unit Usaha PMT Dolok Ilir.



As of December 1, 2023, the Company operates 95 units of palm oil plantations, 57 units of palm oil mills, 4 units of palm kernel mills, 3 units of tea plantations, 3 units tea processing plants, 27 units of rubber plantations, 12 units of rubber processing plants, 6 unit development project of palm oil smallholding, 1 unit seedling plantation, 9 district units and 1 business unit of workshop. The Company develops and implements national and global standards for sustainable palm oil.

### Palm Oil Seed Center

PTPN IV has a Palm Oil Seed Hall which produces the Avros, Simalungun, Langkat, and PPKS 540 varieties. With a total of 481 dura parent trees and 8 (eight) selected male parent trees, the PTPN IV Seed Hall can produce around 3,000,000 to 5,000,000 seeds. Palm oil seeds are marketed to meet internal and local needs in the Company's operational areas.

### Other Services

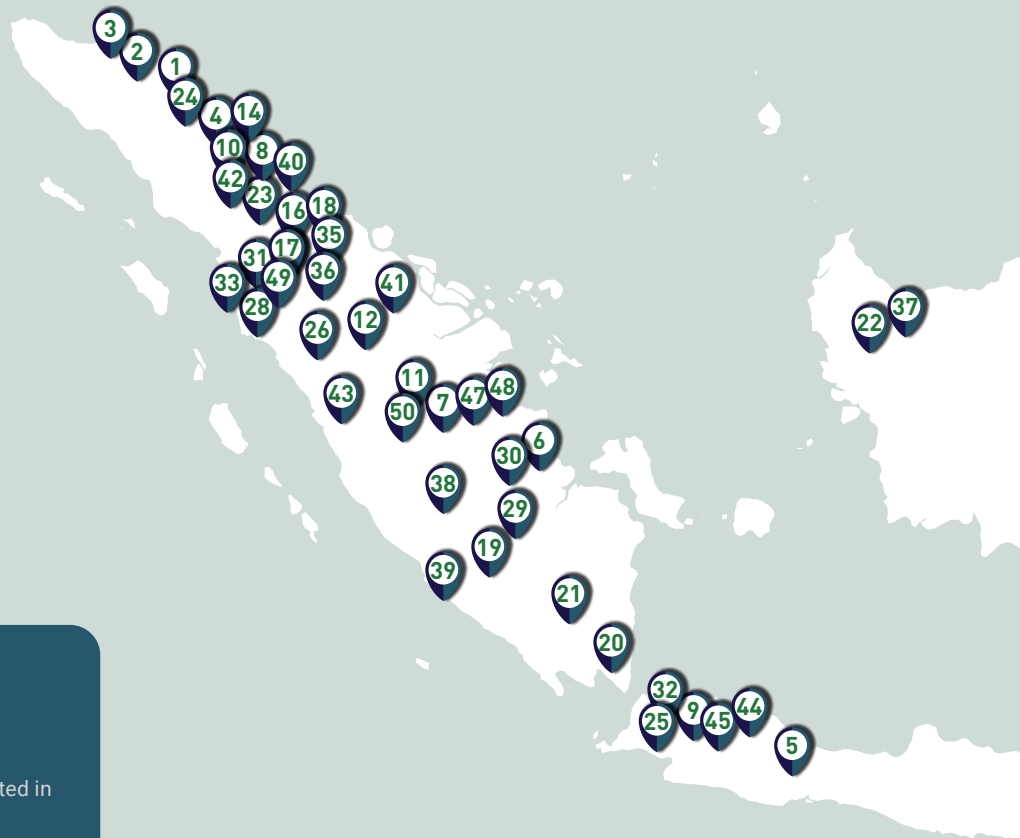
Engineering, Manufacturing, and Construction Services are produced by the PMT Dolok Ilir Business Unit.





# WILAYAH OPERASIONAL

» Operational Area



Lokasi kebun Perseroan berada di  
The Company's plantations are located in

# 51

kabupaten/kota  
regencies/cities

No.	Kabupaten Regency	Kebun Plantation
1	Aceh Tamiang	Pulau Tiga
2	Aceh Timur	Tualang Sawit Julok Rayeuk Utara Karang Inong Julok Rayeuk Selatan
3	Aceh Utara	Cot Girek
4	Asahan	Sei Dadap Pulau Mandi Ambalutu Sei Silau Huta Padang Bandar Selamat Air Batu Pulu Raja
5	Banjar	Danau Salak
6	Banyuasin	Bentayan Betung Betung Krawo
7	Batang Hari	Durian Luncuk
8	Batubara	Dusun Hulu Tanah Itam Ulu
9	Kabupaten Bogor	Cikasungka

No.	Kabupaten Regency	Kebun Plantation
10	Deli Serdang	Sei Putih Limau Mungkur Patumbak Bandar Klippa Tanjung Garbus
11	Indragiri Hulu	Air Molek I Air Molek II
12	Kampar	Sei Berlian Terantam Tandun Sei Kencana Sei Lindai Sei Batu Langkah Tamora Sei Garo Sei Galuh Sei Pagar
13	Konawe Utara	Asera
14	Kota Binjai	Tandem Grup
15	Kotabaru	Pamukan
16	Labuhan Batu	Rantau Prapat Berangir Ajamu Meranti paham Panai Jaya Aek Nabara Selatan

No.	Kabupaten Regency	Kebun Plantation
17	Labuhan Batu Selatan	Sei Daun Torgamba Sei Kebara Aek Torop Aek Raso Sisumut Sei Meranti Bukit Tujuh Aek Nabara Utara Sei Baruhur
18	Labuhan Batu Utara	Membang Muda Labuhan Haji Merbau Selatan
19	Lahat/Empat Lawang	Senabing
20	Lampung Selatan	Rejosari
21	Lampung Tengah	Bekri Padang Ratu
22	Landak	Ngabang
23	Langkat	Sawit Langkat Kwala Sawit Sawit Sebrang Sawit Hulu Batang Serangan Tanjung Jati Grup Air Tenang



No.	Kabupaten Regency	Kebun Plantation
24	Langsa	Lama Baru
25	Lebak	Bojong Datar Cisalak Baru
26	Lima Puluh Kota	Pangkalan Limapuluh Kota
27	Luwu Timur	Luwu I Luwu II
28	Mandailing Natal	Timur Balap
29	Muara Enim	Sungai Lengi
30	Muaro Jambi	Bunut Tanjung Lebar Batang Hari
31	Padang Lawas	Sosa
32	Pandeglang	Kertajaya
33	Pasaman Barat	Ophir
34	Paser	Tabara Tajati Pandawa Longkali
35	Rokan Hilir	Tanjung Medan Tanah Putih
36	Rokan Hulu	Sei Rokan Sei Tapung Sei Intan Sei Siasam

No.	Kabupaten Regency	Kebun Plantation
37	Sanggau	Gunung Meliau Gunung Emas Sungai Dekan Rimba Belian Parindu Kembayan
38	Sarolangun	Bukit Cermin
39	Seluma	Talopino
40	Serdang Bedagai	Gunung Pamela Gunung Monako Gunung Para Tanah Raja Adolina Pabatu Melati Sarang Giting Rambutan
41	Siak	Lubuk Dalam Sei Buatan
42	Simalungun	Bandar Betsy Silau Dunia Bah Jambi Marihat Dolok Sinumbuh Tonduhan Pasir Mandoge Sei Kopas

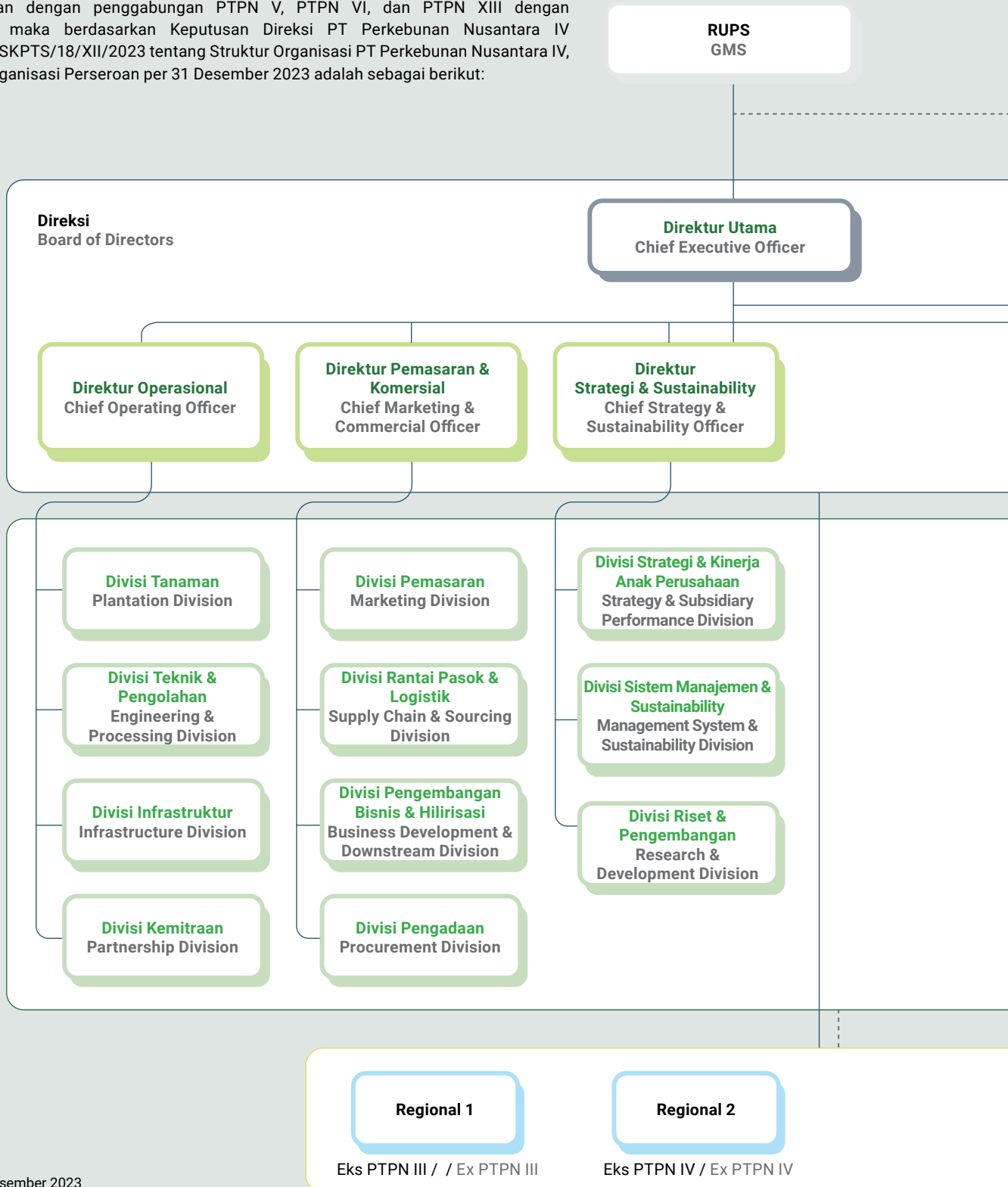
No.	Kabupaten Regency	Kebun Plantation
		Balimbingan Bah Birung Ulu Marjandi Dolok Ilir Laras Gunung Bayu Mayang Bukit Lima Tinjowan Padang Matinggi Bangun
43	Solok Selatan	Solok Selatan
44	Subang	Panglejar
45	Sukabumi	Sukamaju Tjibungur
46	Tanah Laut	Pelaihari
47	Tanjung Jabung Barat	Bukit Kausar
48	Tanjung Jabung Timur	Lagan
49	Tapanuli Selatan	Hapesong Batang Toru
50	Tebo	Rimbo Dua Rimbo Satu
51	Wajo	Keera Maroangin



# STRUKTUR ORGANISASI

## » Organization Structure

Sehubungan dengan penggabungan PTPN V, PTPN VI, dan PTPN XIII dengan PTPN IV, maka berdasarkan Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV No. DPSB/SKPTS/18/XII/2023 tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara IV, struktur organisasi Perseroan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

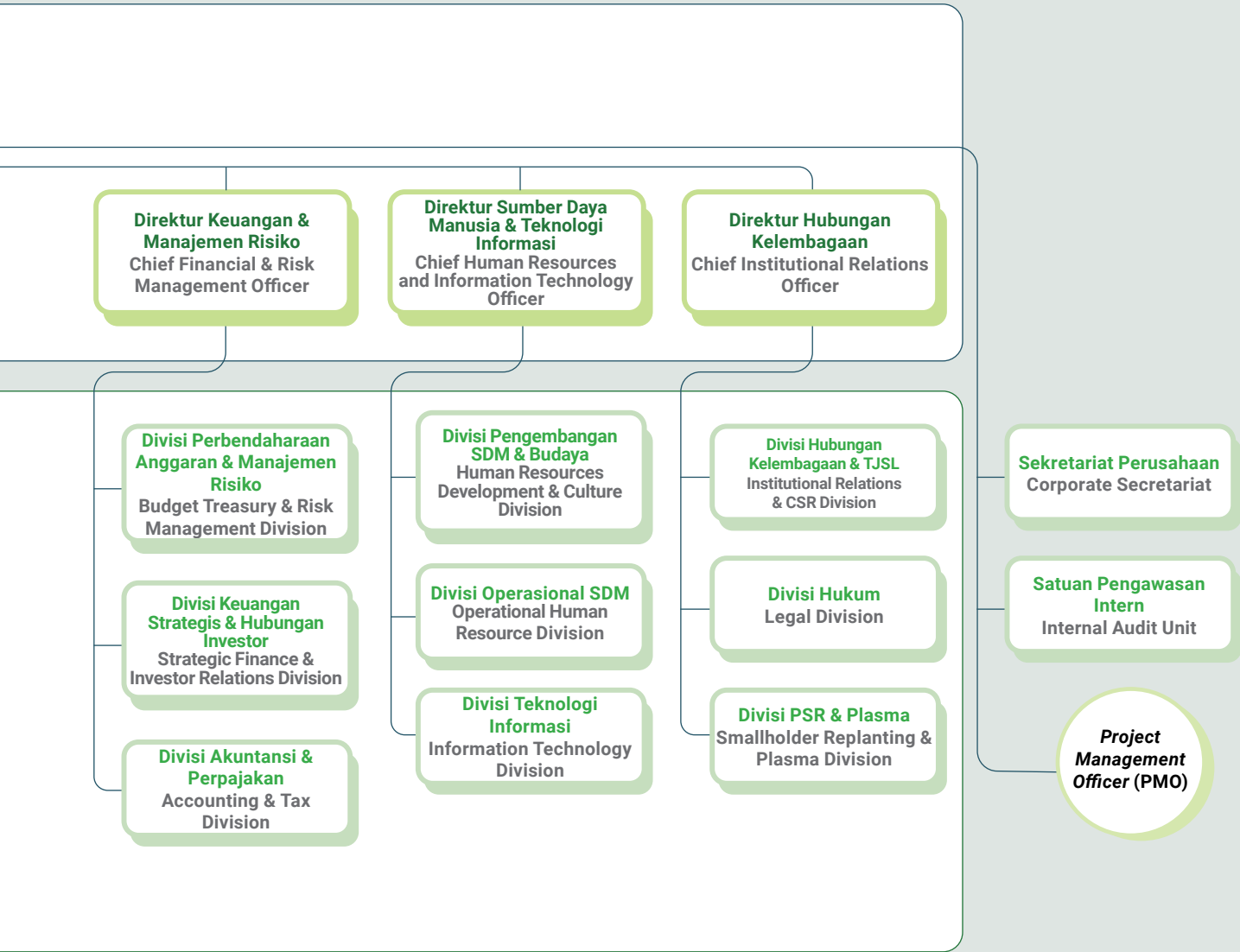


\* Per 16 Desember 2023  
As of 16 December 2023



Regarding the merger of PTPN V, PTPN VI, and PTPN XIII with PTPN IV, and in accordance with the Decision of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara IV No. DPSB/SKPTS/18/XII/2023 concerning the Organizational Structure of PT Perkebunan Nusantara IV, the organizational structure of the Company as of December 31, 2023, is as follows:

**Dewan Komisaris**  
Board of Commissioners



**Regional 3**

Eks PTPN V / Ex PTPN V

**Regional 4**

Eks PTPN VI / Ex PTPN VI








**Regional 5**

Eks PTPN XIII / Ex PTPN XIII



## KEANGGOTAAN DALAM ORGANISASI

### » Membership in Organizations

	Nama Asosiasi Association Name	Peran Role
	Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Indonesian Palm Oil Entrepreneurs Association (GAPKI)	Anggota Member
	Gabungan Pengusaha Karet Indonesia (GAPKINDO) Indonesian Rubber Entrepreneurs Association (GAPKINDO)	Anggota Member
	United Nation Global Compact (UNGC)	Anggota Member
	Roundtable Sustainable Palm Oil (RSPO)	Anggota Member
	Indonesian Sustainable Palm Oil (ISPO)	Anggota Member
	Asosiasi Teh Indonesia (ATI) Indonesia Tea Association (ATI)	Anggota Member
	Dewan Teh Indonesia (DTI) Indonesia Tea Board (DTI)	Anggota Member



## KOMPOSISI DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

### » Composition of the Board of Commissioners and the Board of Directors

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 dan DSDM/SKPTS/R/241/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IV, maka komposisi Dewan Komisaris dan Direksi per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the Chief Executive Officer of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III as Shareholders of PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 and DSDM/SKPTS/R/241/2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara IV, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors as of December 31, 2023 is as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Komisaris Utama	Dahlan Harahap	President Commissioner
Komisaris	Arief Budiono	Commissioner
Komisaris	Arie Yuriwin	Commissioner
Komisaris Independen	Andi Wibisono	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Fauzi Yusuf	Independent Commissioner
Direksi Board of Directors		
Direktur Utama	Jatmiko K. Santosa	Chief Executive Officer
Direktur Operasional	Rizal H. Damanik	Chief Operating Officer
Direktur Pemasaran & Komersial	Ryanto Wisnuardhy	Chief Marketing & Commercial Officer
Direktur Strategi & Sustainability	Ugun Untaryo	Chief Strategy & Sustainability Officer
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	Hilda Savitri	Chief Financial & Risk Management Officer
Direktur Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi	Suhendri	Chief Human Resources & Information Technology Officer
Direktur Hubungan Kelembagaan	Irwan Perangin-angin	Chief Institutional Relations Officer

Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. SK-104/MBU/04/2024 tanggal 26 April 2024 dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. DSDM/SKPTS/R/72/2024 tanggal 3 Mei 2024 selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara, terdapat perubahan komposisi Dewan Komisaris. Oleh sebab itu, komposisi Dewan Komisaris dan Direksi sejak 1 Januari 2024 hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan adalah sebagai berikut:

Based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. SK-104/MBU/04/2024 dated April 26, 2024, and the Chief Executive Officer of the State-Owned Enterprise PT Perkebunan Nusantara III Decree No. DSDM/SKPTS/R/72/2024 dated May 3, 2024, as Shareholders of PT Perkebunan Nusantara, there was a change in the composition of the Board of Commissioners. Therefore, the composition of the Board of Commissioners and Board of Directors since January 1, 2024 until this Annual Report is issued are as follows:

Dewan Komisaris Board of Commissioners		
Komisaris Utama	Dahlan Harahap	President Commissioner
Komisaris	Arief Budiono	Commissioner
Komisaris	Arie Yuriwin	Commissioner
Komisaris	Andi Nur Alam Syah	Commissioner
Komisaris Independen	Andi Wibisono	Independent Commissioner
Komisaris Independen	Fauzi Yusuf	Independent Commissioner
Direksi Board of Directors		
Direktur Utama	Jatmiko K. Santosa	Chief Executive Officer
Direktur Operasional	Rizal H. Damanik	Chief Operating Officer
Direktur Pemasaran & Komersial	Ryanto Wisnuardhy	Chief Marketing & Commercial Officer
Direktur Strategi & Sustainability	Ugun Untaryo	Chief Strategy & Sustainability Officer
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko	Hilda Savitri	Chief Financial & Risk Management Officer
Direktur Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi	Suhendri	Chief Human Resources & Information Technology Officer
Direktur Hubungan Kelembagaan	Irwan Perangin-angin	Chief Institutional Relations Officer



## DEWAN KOMISARIS

» Board of Commissioners



1. **DAHLAN HARAHAHAP**  
**Komisaris Utama**  
President Commissioner

2. **ARIEF BUDIONO**  
**Komisaris**  
Commissioner

3. **ANDI NUR ALAM SYAH**  
**Komisaris**  
Commissioner

4. **ARIE YURIWIN**  
**Komisaris**  
Commissioner

5. **ANDI WIBISONO**  
**Komisaris Independen**  
Independent Commissioner

6. **FAUZI YUSUF**  
**Komisaris Independen**  
Independent Commissioner

# PROFIL DEWAN KOMISARIS

## » Board of Commissioners' Profile



**DAHLAN HARA HAP**

**Komisaris Utama**

President Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Medan. Lahir di Pematang Siantar, Sumatra Utara pada 6 Juni 1953, usia 70 tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Medan. Born in Pematang Siantar, North Sumatra on June 6, 1953, aged 70 as of December 2023.

### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Sumatra Utara pada tahun 1978 dan Magister Manajemen Agribisnis dari Universitas Gadjah Mada tahun 2008.

### Education

Earned a Bachelor of Agriculture from Universitas Sumatra Utara in 1978 and a Master in Agribusiness Management from Universitas Gadjah Mada in 2008.

### Perjalanan Karir

- Direktur SDM/Umum PT Perkebunan Nusantara VI (1998-2001)
- Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IX (2001-2003)
- Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV (2003-2012)
- Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2013-2018)
- Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara IV (2020-sekarang)

### Career Journey

- HR/General Director of PT Perkebunan Nusantara VI (1998-2001)
- President Director of PT Perkebunan Nusantara IX (2001-2003)
- Chief Executive Officer of PT Perkebunan Nusantara IV (2003-2012)
- Independent Commissioner of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2013-2018)
- President Commissioner of PT Perkebunan Nusantara IV (2020-present)

### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Utama PTPN IV berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-185/MBU/06/2020 dan No. DSDM/SKPTS/R/106/2020 tanggal 9 Juni 2020.

### Position and Basis of Appointment

Appointed as President Commissioner of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-185/MBU/06/2020 and No. DSDM/SKPTS/R/106/2020 dated June 9, 2020.

### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

### Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.



## ARIEF BUDIONO

Komisaris  
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Medan.  
Lahir di Medan, Sumatra Utara pada 5 Juni 1974,  
usia 49 tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Medan.  
Born in Medan, North Sumatra on June 5, 1974,  
aged 49 as of December 2023.

### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Sosial dari Universitas Darma Agung pada 1999.

### Education

Obtained a Bachelor of Social degree from Universitas Darma Agung in 1999.

### Perjalanan Karir

- Humas PT Singa Mas Industri Coil (2000-2004)
- Humas PT Singa Mas Makin Sukses (2006-2008)
- Humas PT Singa Mas Jaya Abadi (2008-2010)
- Direktur PT Gunung Aman Sejahtera (2010-2014)
- Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV (2020-sekarang)

### Career Journey

- Public Relations of PT Singa Mas Industri Coil (2000-2004)
- Public Relations of PT Singa Mas Makin Sukses (2006-2008)
- Public Relations of PT Singa Mas Jaya Abadi (2008-2010)
- Director of PT Gunung Aman Sejahtera (2010-2014)
- Commissioner of PT Perkebunan Nusantara IV (2020-present)

### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PTPN IV berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-185/MBU/06/2020 dan No. DSDM/SKPTS/R/106/2020 tanggal 9 Juni 2020.

### Position and Basis of Appointment

Appointed as Commissioner of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-185/MBU/06/2020 and No. DSDM/SKPTS/R/106/2020 dated June 9, 2020.

### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

### Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.



**ANDI NUR ALAM SYAH**  
Komisaris  
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Bogor, Jawa Barat. Lahir di Pinrang, Sulawesi Selatan pada 1 Juli 1975, usia 49 tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Bogor, West Java. Born in Pinrang, South Sulawesi on July 1, 1975, aged 49 as of December 2023.

#### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknologi Pertanian dari Universitas Gadjah Mada pada 1988, Magister Teknik Pertanian dari Institut Teknologi Bandung pada 2002, dan Doktorat Teknik Kimia (tengah proses disertasi).

#### Education

Earned a Bachelor's degree in Agricultural Technology from Universitas Gadjah Mada in 1988, a Master's degree in Agricultural Engineering from Institut Teknologi Bandung in 2002, and a Doctorate in Chemical Engineering (in the process of dissertation).

#### Perjalanan Karir

- Kepala Subbidang Program di Pusat Litbang Perkebunan (2013)
- Kepala Bidang Program dan Evaluasi di Pusat Litbang Perkebunan (2016)
- Kepala Balai di Balai Besar Pengembangan Mekanisasi Pertanian (2016)
- Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Ditjen Prasarana dan Sarana Pertanian, Kementerian Pertanian RI (2018)
- Ditjen Perkebunan, Kementerian Pertanian RI (2022)

#### Career Journey

- Head of the Program Sub-Division at the Plantation Research and Development Center (2013)
- Head of the Program and Evaluation Division at the Plantation Research and Development Center (2016)
- Head of the Center at the Agricultural Mechanization Development Center (2016)
- Director of Agricultural Machinery at the Directorate General of PSP, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia (2018)
- Directorate General of Plantations, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia (2022)

#### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PTPN IV berdasarkan Keputusan Menteri BUMN No. SK-104/MBU/04/2024 tanggal 26 April 2024 dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. DSDM/SKPTS/R/72/2024 tanggal 3 Mei 2024 selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara.

#### Position and Basis of Appointment

Appointed as Commissioner of PTPN IV based on Decree of the Minister of SOEs No. SK-104/MBU/04/2024 dated April 26, 2024, and the President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPTS/R/72/2024 dated May 3, 2024, as the Shareholders of PT Perkebunan Nusantara.

#### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau juga menjabat sebagai Direktur Alat dan Mesin Pertanian di Ditjen PSP, Kementerian Pertanian RI sejak 2022.

#### Concurrent Position

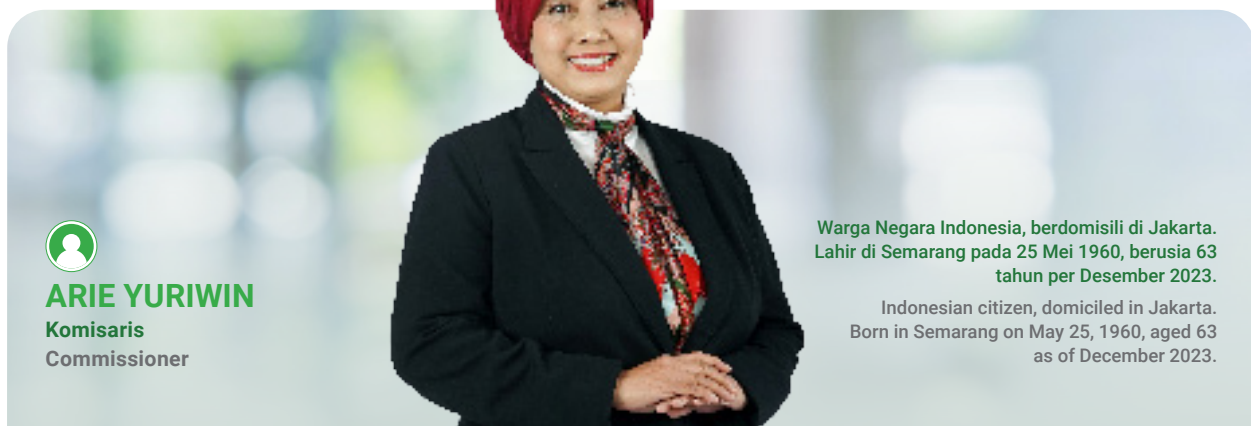
Currently, he also serves as Director of Agricultural Equipment and Machinery at the Directorate General of PSP, Ministry of Agriculture of the Republic of Indonesia since 2022.

#### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi, atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

#### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.



**ARIE YURIWIN**  
Komisaris  
Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.  
Lahir di Semarang pada 25 Mei 1960, berusia 63  
tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta.  
Born in Semarang on May 25, 1960, aged 63  
as of December 2023.

#### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Hukum dari Universitas Gadjah Mada pada 1985 dan Magister Ilmu Administrasi di Universitas Moestopo Beragama pada 2004.

#### Education

Obtained a Bachelor of Law degree from Gadjah Mada University in 1985 and a Master of Administrative Science from Moestopo Beragama University in 2004.

#### Perjalanan Karir

- Direktur Jenderal Pengadaan Tanah Kementerian ATR/BPN (2016 - 2020)
- Komisaris Independen PTPN II (2017 - 2018)
- Komisaris PTPN III (Persero) (2018 - 2023)
- Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Pengadaan Tanah (2020 - 2022)
- Tenaga Ahli Menteri ATR/Kepala BPN Bidang Reforma Agraria (2022 - 2024)
- Komisaris PTPN IV (2023 - Sekarang)
- Staf Khusus Kepala OIKN Bidang Manajemen Kebijakan & Sistem Pertahanan (2024 - Sekarang)

#### Career Journey

- Director General of Land Procurement, Ministry of ATR/BPN (2016–2020)
- Independent Commissioner of PTPN II (2017–2018)
- Commissioner of PTPN III (Persero) (2018–2023)
- Expert Staff to the Minister of ATR/Head of BPN for Land Procurement (2020–2022)
- Expert Staff to the Minister of ATR/Head of BPN for Agrarian Reform (2022–2024)
- Commissioner of PTPN IV (2023–Present)
- Special Staff to the Head of OIKN for Policy Management & Defense Systems (2024–Present)

#### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris PTPN IV berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-344/MBU/12/2023 dan No. DSDM/SKPTS/R/242/2023 tanggal 4 Desember 2023.

#### Position and Basis of Appointment

Appointed as Commissioner of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-344/MBU/12/2023 and No. DSDM/SKPTS/R/242/2023 dated December 4, 2023.

#### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

#### Concurrent Position

Currently, she does not hold concurrent positions in any company.

#### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

#### Affiliate Relations

She has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.





**ANDI WIBISONO**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Medan. Lahir di Cianjur pada 11 November 1960, berusia 63 tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Medan. Born in Cianjur on November 11, 1960, aged 63 as of December 2023.

#### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Pertanian di IPB, Bogor pada 1984 dan Magister Sains UGM, Yogyakarta pada 2008.

#### Education

Obtained Bachelor of Agriculture degree from IPB, Bogor in 1984 and Master of Science UGM, Yogyakarta in 2008.

#### Perjalanan Karir

- Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan PTPN IV, Medan, Sumatra Utara (2010-2012)
- Direktur SDM dan Umum PTPN IV, Medan Sumatra Utara (2012-2016)
- Direktur Utama PTPN VII, Lampung (2016-2017)
- Komisaris Independen PTPN IX (2020-2021)
- Komisaris Independen PTPN IV (2021-sekarang)

#### Career Journey

- Head of Corporate Secretary Section of PTPN IV, Medan, North Sumatra (2010-2012)
- Human Resources and General Affairs Director of PTPN IV, Medan North Sumatra (2012-2016)
- President Director of PTPN VII, Lampung (2016-2017)
- Independent Commissioner of PTPN IX (2020-2021)
- PTPN IV Independent Commissioner (2021-present)

#### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Independen PTPN IV berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-269/MBU/08/2021 dan No. DSDM/SKPTS/R/131/2021 tanggal 2 Agustus 2021.

#### Position and Basis of Appointment

Appointed as Independent Commissioner of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. 269/MBU/08/2021 and No. DSDM/SKPTS/R/131/2021 dated August 2, 2021.

#### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

#### Concurrent Position

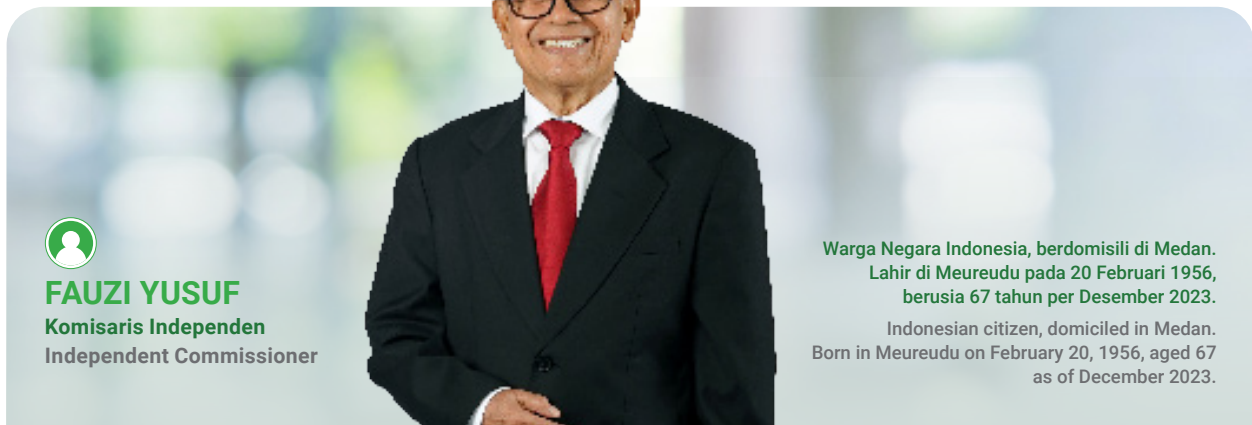
Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

#### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

#### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.



**FAUZI YUSUF**  
Komisaris Independen  
Independent Commissioner

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Medan.  
Lahir di Meureudu pada 20 Februari 1956,  
berusia 67 tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Medan.  
Born in Meureudu on February 20, 1956, aged 67  
as of December 2023.

#### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Pertanian di Universitas Sumatra Utara, Medan pada 1981 dan Magister Manajemen di Institut Pertanian Bogor, Bogor pada 1994.

#### Perjalanan Karir

- Asisten Tanaman PT Perkebunan Nusantara VII (1982-1995)
- Asisten Kepala PT Perkebunan Nusantara VII dan VIII (1995-1998)
- Manager di PT Perkebunan Nusantara XIII (1998-2000)
- Direktur PTP Centramas Nusantara di PTP Centramas (2000-2002)
- Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara V (2009-2014)
- Dewan Pembina LPP di Lembaga Pendidikan Perkebunan (2007-2012)
- Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara V (2022-2023)
- Direktur Utama PT Mopoli Raya (2014-2018)
- Komisaris Utama PT Perkebunan Nusantara V (2022-2023)
- Komisaris Independen PT Perkebunan Nusantara IV tahun (2023-sekarang)

#### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Komisaris Independen PTPN IV berdasarkan SK Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-344/MBU/12/2023 dan No. DSDM/SKPTS/R/242/2023 tanggal 4 Desember 2023.

#### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

#### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

#### Education

Earned a Bachelor of Agriculture degree from the University of North Sumatra, Medan in 1981 and a Master of Management from the Bogor Agricultural Institute, Bogor in 1994.

#### Career Journey

- Plant Assistant PT Perkebunan Nusantara VII (1982-1995)
- Assistant Head of PT Perkebunan Nusantara VII and VIII (1995-1998)
- Manager at PT Perkebunan Nusantara XIII (1998-2000)
- Director of PTP Centramas Nusantara at PTP Centramas (2000-2002)
- President Director of PT Perkebunan Nusantara V (2009-2014)
- Advisory Board of LPP at the Plantation Education Institute (2007-2012)
- President Commissioner of PT Perkebunan Nusantara V (2022-2023)
- President Director of PT Mopoli Raya (2014-2018)
- President Commissioner of PT Perkebunan Nusantara V (2022-2023)
- Commissioner Independent of PT Perkebunan Nusantara IV (2023-present)

#### Position and Basis of Appointment

Appointed as Independent Commissioner of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III No. SK-344/MBU/12/2023 and No. DSDM/SKPTS/R/242/2023 dated December 4, 2023.

#### Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

#### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.

# DIREKSI

## » Board of Directors



1. **JATMIKO K. SANTOSA**  
Direktur Utama  
Chief Executive Officer
2. **RIZAL H. DAMANIK**  
Direktur Operasional  
Chief Operating Officer
3. **RYANTO WISNUARDHY**  
Direktur Pemasaran & Komersial  
Chief Marketing & Commercial Officer
4. **UGUN UNTARYO**  
Direktur Strategi & Sustainability  
Chief Strategy & Sustainability Officer
5. **HILDA SAVITRI**  
Direktur Keuangan & Manajemen Risiko  
Chief Financial & Risk Management Officer
6. **SUHENDRI**  
Direktur Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi  
Chief Human Resources & Information Technology Officer
7. **IRWAN PERANGIN-ANGIN**  
Direktur Hubungan Kelembagaan  
Chief Institutional Relations Officer



# PROFIL DIREKSI

## » Board of Directors' Profile



**JATMIKO K. SANTOSA**

Direktur Utama  
Chief Executive Officer

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.  
Lahir di Blitar pada 5 Juli 1971, berusia 52 tahun  
per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta.  
Born in Blitar on July 5, 1971, aged 52  
as of December 2023.

### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Akuntansi dari Universitas Indonesia pada 1996 dan menyelesaikan Executive Program - Public Private Partnership dari Harvard University pada 2012.

### Education

Obtained his Bachelor of Accounting degree from University of Indonesia in 1996 and completed an Executive Program - Public Private Partnership from the Harvard University in 2012.

### Perjalanan Karir

- Konsultan di Deloitte Corporate Finance (1996-2000)
- Group Head Chairman Office Badan Penyehatan Perbankan Nasional (2000-2005)
- Chief Executive Officer PT Fortius Investment Asia (2005-2007)
- Chief Executive Officer PT Teguhkarsa Wanalestari (2007-2011)
- Head of Advisory and Project Development PT Sarana Multi Infrastruktur (2014-2015)
- Direktur Keuangan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (2015-2017)
- Direktur Strategi dan Keuangan / Wakil Direktur Utama PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (2017-2018)
- Direktur Keuangan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2018-2019)
- Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara V (2019-2020)
- Direktur PT Perkebunan Nusantara V (2020-2023)
- Direktur Utama PT Perkebunan Nusantara IV (2023-sekarang)

### Career Journey

- Consultant at Deloitte Corporate Finance (1996-2000)
- Group Head Chairman Office of the Indonesian Bank Restructuring Agency (2000-2005)
- Chief Executive Officer of PT Fortius Investment Asia (2005-2007)
- Chief Executive Officer of PT Teguhkarsa Wanalestari (2007-2011)
- Head of Advisory and Project Development of PT Sarana Multi Infrastruktur (2014-2015)
- Finance Director of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (2015-2017)
- Strategy and Finance Director / Deputy Director of PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (2017-2018)
- Finance Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (2018-2019)
- President Director of PT Perkebunan Nusantara V (2019-2020)
- Director of PT Perkebunan Nusantara V (2020-2023)
- Chief Executive Officer of PT Perkebunan Nusantara IV (2023-present)

### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Utama PTPN IV berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 dan DSDM/SKPTS/R/241/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IV.

### Position and Basis of Appointment

Appointed as Chief Executive Officer of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III as Shareholders of PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 and DSDM/SKPTS/R/241/2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara IV.

### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

### Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.



## RIZAL H. DAMANIK

Direktur Operasional  
Chief Operating Officer

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.  
Lahir di Dolok Sinumbah pada 7 November 1962,  
berusia 61 tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta.  
Born in Dolok Sinumbah on November 7, 1962,  
aged 61 as of December 2023.

### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Sumatra Utara pada 1986 dan Magister Manajemen dari Universitas Sumatra Utara pada 2007.

### Education

Obtained a Bachelor of Agriculture degree from the University of North Sumatra in 1986 and a Master of Management from the University of North Sumatra in 2007.

### Perjalanan Karir

- Kepala Dinas Tanaman Adolina - PTPN IV (2006-2011)
- Manajer Unit Marihat - PTPN IV (2011-2013)
- Manajer Unit Pabatu - PTPN IV (2013)
- Kepala Bagian Tanaman - PTPN IV (2013-2015)
- Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan - PTPN IV (2015-2017)
- Direktur SDM dan Umum - PTPN IV (2017-2020)
- SEVP Operation I - PTPN IV (2020-2021)
- Direktur PTPN XIII - PTPN XIII (2021-2023)
- Direktur Operasional - PTPN IV (2023-sekarang)

### Career Journey

- Head of Adolina Plantation Department - PTPN IV (2006–2011)
- Manager of Marihat Unit - PTPN IV (2011–2013)
- Manager of Pabatu Unit - PTPN IV (2013)
- Head of Plantation Department - PTPN IV (2013–2015)
- Head of Corporate Secretary Department - PTPN IV (2015–2017)
- Director of Human Resources and General Affairs - PTPN IV (2017–2020)
- SEVP Operation I - PTPN IV (2020–2021)
- Director of PTPN XIII - PTPN XIII (2021–2023)
- Chief Operating Officer - PTPN IV (2023–present)

### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Operasional PTPN IV berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 dan DSDM/SKPTS/R/241/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IV.

### Position and Basis of Appointment

Appointed as Chief Operating Officer of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III as Shareholders of PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 and DSDM/SKPTS/R/241/2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara IV.

### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

### Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.



**RYANTO WISNUARDHY**  
Direktur Pemasaran & Komersial  
Chief Marketing & Commercial Officer

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.  
Lahir di Bandung pada 12 Agustus 1962,  
berusia 61 tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta.  
Born in Bandung on August 12, 1962, aged 61  
as of December 2023.

#### Pendidikan

Meraih Sarjana Hukum dari Universitas Padjajaran pada 1987 dan Magister MBA dari University of Miami pada 1993.

#### Education

Obtained a Bachelor of Law from Padjajaran University in 1987 and an MBA from the University of Miami in 1993.

#### Perjalanan Karir

- Pemimpin Kelompok Pengembangan Jaringan Merchant – BNI (1995–2008)
- Pemimpin Cabang – BNI Tanjung Priok (2008–2009)
- Pemimpin Cabang – BNI Menteng (2009–2010)
- Wakil Pemimpin Wilayah Bidang Consumer Banking – BNI (2010–2014)
- Wakil Pemimpin Wilayah Divisi Jaringan & Layanan – BNI (2014–2015)
- Pemimpin Wilayah 03 – BNI Sumatra Bagian Selatan (2016–2017)
- Direktur Komersial – PTPN VIII (2017–2020)
- SEVP Business Support – PTPN IV (Mei–Juni 2020)
- Direktur – PTPN XIV (2020–2021)
- Direktur – PTPN VII (2021–2023)
- Direktur Pemasaran & Komersial – PTPN IV (2023–sekarang)

#### Career Journey

- Head of Merchant Network Development Group – BNI (1995–2008)
- Branch Manager – BNI Tanjung Priok (2008–2009)
- Branch Manager – BNI Menteng (2009–2010)
- Deputy Regional Head for Consumer Banking – BNI (2010–2014)
- Deputy Regional Head for Network & Services Division – BNI (2014–2015)
- Regional Head 03 – BNI South Sumatra Region (2016–2017)
- Commercial Director – PTPN VIII (2017–2020)
- SEVP Business Support – PTPN IV (May–June 2020)
- Director – PTPN XIV (2020–2021)
- Director – PTPN VII (2021–2023)
- Chief Marketing & Commercial Officer - PTPN IV (2023–present)

#### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Pemasaran & Komersial PTPN IV berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 dan DSDM/SKPTS/R/241/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IV.

#### Position and Basis of Appointment

Appointed as Chief Marketing & Commercial Officer of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III as Shareholders of PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 and DSDM/SKPTS/R/241/2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara IV.

#### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

#### Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

#### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

#### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.



## UGUN UNTARYO

**Direktur Strategi & Sustainability**  
Chief Strategy & Sustainability Officer

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.  
Lahir di Cirebon pada 22 Februari 1971,  
berusia 52 tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta.  
Born in Cirebon on February 22, 1971,  
aged 52 as of December 2023.

### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Teknik Kimia dari Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) pada tahun 1997 dan *Master of Business Administration* dalam Teknologi Industri dari Institut Teknologi Bandung (ITB) pada tahun 2000.

### Perjalanan Karir

- Kepala Bagian Pemasaran - PTPN V (2014-2016)
- Manager Kebun Sei Garo - PTPN V (2016-2017)
- Manager Kebun Sei Siasam - PTPN V (2017)
- Kepala Bagian Perencanaan Strategis - PTPN V (2017-2019)
- Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan - PTPN V (2019-2020)
- Kepala Divisi Transformasi Strategis - PTPN III (Persero) (2020-2021)
- Kepala Divisi Strategi Bisnis dan Sustainability - PTPN III (Persero) (2021-2023)
- SEVP Business Support PT Industri Nabati Lestari (2023)
- Direktur Strategi & Sustainability - PTPN IV (2023-sekarang)

### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Strategi & Sustainability PTPN IV berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 dan DSDM/SKPTS/R/241/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IV.

### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

### Education

Earned a Bachelor's degree in Chemical Engineering from the Sepuluh Nopember Institute of Technology (ITS) in 1997 and a Master of Business Administration in Industrial Technology from the Bandung Institute of Technology (ITB) in 2000.

### Career Journey

- Head of Marketing Department - PTPN V (2014-2016)
- Manager of Sei Garo Plantation - PTPN V (2016-2017)
- Manager of Sei Siasam Plantation - PTPN V (2017)
- Head of Strategic Planning Department - PTPN V (2017-2019)
- Head of Corporate Secretary Department - PTPN V (2019-2020)
- Head of Strategic Transformation Division - PTPN III (Persero) (2020-2021)
- Head of Business Strategy and Sustainability Division - PTPN III (Persero) (2021-2023)
- SEVP Business Support - PT Industri Nabati Lestari (2023)
- Chief Strategy & Sustainability Officer - PTPN IV (2023-present)

### Position and Basis of Appointment

Appointed as Chief Strategy & Sustainability Officer of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III as Shareholders of PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 and DSDM/SKPTS/R/241/2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara IV.

### Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.



## HILDA SAVITRI

Direktur Keuangan & Manajemen Risiko  
Chief Financial & Risk Management Officer

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Jakarta.  
Lahir di Jakarta pada 6 Januari 1971, berusia 52  
tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Jakarta.  
Born in Jakarta on January 6, 1971, aged 52  
as of December 2023.

### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Ekonomi, Akuntansi dari Universitas Indonesia pada 1994 dan gelar Master of Business Administration dari Victoria University of Wellington pada 2001.

### Perjalanan Karir

- Direktur Investasi PT Indonesia Infrastructure Finance (2016-2020)
- Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Utama Karya (Persero) (2020-2022)
- Komisaris Utama PT Utama Karya Infrastruktur (2020-2022)
- Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PT Angkasa Pura II (Persero) (2022-2023)
- Komisaris PT Gapura Angkasa (2022-2023)
- Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTPN IV (2023-sekarang)

### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Keuangan & Manajemen Risiko PTPN IV berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 dan DSDM/SKPTS/R/241/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IV.

### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

### Education

Obtained a Bachelor of Economics, Accounting from the University of Indonesia in 1994 and a Master of Business Administration from Victoria University of Wellington in 2001.

### Career Journey

- Director of Investment of PT Indonesia Infrastructure Finance (2016–2020)
- Director of Finance & Risk Management of PT Utama Karya (Persero) (2020–2022)
- President Commissioner of PT Utama Karya Infrastruktur (2020–2022)
- Director of Finance & Risk Management PT Angkasa Pura II (Persero) (2022–2023)
- Commissioner - PT Gapura Angkasa (2022–2023)
- Chief Financial & Risk Management Officer - PTPN IV (2023–present)

### Position and Basis of Appointment

Appointed as Chief Financial & Risk Management Officer of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III as Shareholders of PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 and DSDM/SKPTS/R/241/2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara IV.

### Concurrent Position

Currently, she does not hold concurrent positions in any company.

### Affiliate Relations

She has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.





## SUHENDRI

**Direktur Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi**  
Chief Human Resources & Information Technology Officer

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Medan.  
Lahir di Talu/Pasaman pada 26 Oktober 1972, berusia 51 tahun per Desember 2023.

Indonesian citizen, domiciled in Medan.  
Born in Talu/Pasaman on October 26, 1972, aged 51 as of December 2023.

### Pendidikan

Meraih gelar Sarjana Manajemen dari Universitas Sumatra Utara (USU) pada 1997, Magister Manajemen Kons. Akuntansi dari USU pada 2005, dan Doktorat bidang Manajemen Konsentrasi SDM dari USU pada 2023.

### Education

Obtained a Bachelor of Management degree from the Universitas Sumatra Utara (USU) in 1997, a Master of Management in Accounting from USU in 2005, and a Doctorate in Management with a Concentration in Human Resources from USU in 2023.

### Perjalanan Karir

- Kepala Divisi Keuangan Holding - PTPN III (Persero) (2015-2017)
- SEVP Bidang Keuangan dan Komersil - PTPN III (Persero) (2017-2018)
- SEVP Koordinator - PTPN III (Persero) (2018-2019)
- SEVP Keuangan & Umum, SEVP Business Support - PTPN III (Persero) (2019-2021)
- Direktur - PTPN XIV (2021-2022)
- Direktur PT SGN (2022-2023)
- Direktur Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi - PTPN IV (2023-Sekarang)

### Career Journey

- Head of Holding Finance Division of PTPN III (Persero) (2015-2017)
- SEVP of Finance and Commercial of PTPN III (Persero) (2017-2018)
- SEVP Coordinator of PTPN III (Persero) (2018-2019)
- SEVP Finance & General, SEVP Business Support of PTPN III (Persero) (2019-2021)
- Director of PTPN XIV (2021-2022)
- Director of PT SGN (2022-2023)
- Chief Human Resources & Information Technology Officer of PTPN IV (2023-present)

### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi PTPN IV berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 dan DSDM/SKPTS/R/241/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IV.

### Position and Basis of Appointment

Appointed as Chief Human Resources & Information Technology Officer of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III as Shareholders of PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 and DSDM/SKPTS/R/241/2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara IV.

### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

### Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.



**IRWAN PERANGIN-ANGIN**  
Direktur Hubungan Kelembagaan  
Chief Institutional Relations Officer

Warga Negara Indonesia, berdomisili di Medan.  
Lahir di Kabanjahe pada 7 Juli 1966,  
berusia 57 tahun per Desember 2023.  
Indonesian citizen, domiciled in Medan.  
Born in Kabanjahe, on July 7, 1966,  
aged 57 as of December 2023.

#### Pendidikan

Memperoleh gelar Sarjana Budidaya Pertanian dari Universitas Islam Sumatra Utara pada 1990.

#### Education

Obtained a Bachelor's degree in Agricultural Cultivation from the Islamic University of North Sumatra in 1990.

#### Perjalanan Karir

- Manajer Kebun Tanjung Keliling PT Langkat Nusantara Kepong (2010-2012)
- Manajer Kebun Bekiun PT Langkat Nusantara Kepong (2012-2014)
- Direktur SDM PT Langkat Nusantara Kepong (2014-2019)
- Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PTPN II (Juni-Agustus 2019)
- Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PTPN III (Persero) (2019-2020)
- SEVP Operation PTPN II (Mei-Oktober 2020)
- Direktur PTPN II (2020-2023)
- Direktur Hubungan Kelembagaan (Desember 2023-Sekarang)

#### Career Journey

- Tanjung Keliling Plantation Manager at PT Langkat Nusantara Kepong (2010-2012)
- Bekiun Plantation Manager at PT Langkat Nusantara Kepong (2012-2014)
- HR Director of PT Langkat Nusantara Kepong (2014-2019)
- Head of Corporate Secretariat Division of PTPN II (June-August 2019)
- Head of Corporate Secretariat Division of PTPN III (Persero) (2019-2020)
- SEVP Operation of PTPN II (May-October 2020)
- Director of PTPN II (2020-2023)
- Chief Institutional Relations Officer (December 2023-present)

#### Jabatan dan Dasar Penunjukan

Menjabat sebagai Direktur Hubungan Kelembagaan PTPN IV berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III selaku Para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 dan DSDM/SKPTS/R/241/2023 tentang Pemberhentian, Perubahan Nomenklatur Jabatan dan Pengangkatan Anggota-Anggota Direksi PT Perkebunan Nusantara IV.

#### Position and Basis of Appointment

Appointed as Chief Institutional Relations Officer of PTPN IV based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of the Limited Liability Company (Persero) PT Perkebunan Nusantara III as Shareholders of PT Perkebunan Nusantara IV No. SK-343/MBU/12/2023 and DSDM/SKPTS/R/241/2023 concerning Dismissal, Changes in Position Nomenclature and Appointment of Members of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara IV.

#### Rangkap Jabatan

Saat ini, beliau tidak merangkap jabatan di perusahaan manapun.

#### Concurrent Position

Currently, he does not hold concurrent positions in any company.

#### Hubungan Afiliasi

Beliau tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota Dewan Komisaris, Direksi atau pemegang saham utama dan/atau pengendali lainnya.

#### Affiliate Relations

He has no affiliation with members of the Board of Commissioners, the Board of Directors, or other major and/or controlling shareholders.





## KOMPOSISI PEMEGANG SAHAM

### » Shareholders' Composition

#### Modal Dasar

Modal Dasar Perseroan adalah sebesar Rp11.700.000.000.000,00 (sebelas triliun tujuh ratus miliar Rupiah) yang terbagi atas 11.700.000 (sebelas juta tujuh ratus ribu) saham, terdiri dari:

- 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna dengan nilai nominal Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah); dan
- 11.699.999 (sebelas juta enam ratus sembilan puluh sembilan ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan). Saham Seri B dengan nilai nominal Rp11.699.999.000.000,00 (sebelas triliun enam ratus sembilan puluh sembilan miliar sembilan ratus sembilan puluh sembilan juta Rupiah).

#### Modal Disetor

Modal disetor Perseroan adalah sebesar Rp8.395.318.00.000 (delapan triliun tiga ratus sembilan puluh lima miliar tiga ratus delapan belas juta Rupiah) dengan perincian:

1. Negara Republik Indonesia sebanyak 593.847 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh tujuh) saham atau sebesar Rp593.847.000.000 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta Rupiah), yang terdiri dari:
  - a. 1 (satu) Saham Seri A Dwiwarna atau seluruhnya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta Rupiah), dan
  - b. 593.846 (lima ratus sembilan puluh tiga ribu delapan ratus empat puluh enam) Saham Seri B atau seluruhnya sebesar Rp593.846.000.000 (lima ratus sembilan puluh tiga miliar delapan ratus empat puluh enam juta Rupiah).
2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 7.801.471 (tujuh juta delapan ratus satu ribu empat ratus tujuh puluh satu) Saham Seri B atau sebesar Rp7.801.471.000.000 (tujuh triliun delapan ratus satu miliar empat ratus tujuh puluh satu juta Rupiah).

#### Authorized Capital

The Company's authorized capital is amounted to Rp11,700,000,000,000 (eleven trillion seven hundred billion Rupiah) divided into 11,700,000 (eleven million seven hundred thousand) shares, which consist of:

- 1 (one) Series A Dwiwarna share with a nominal value of Rp1,000,000 (one million Rupiah); and
- 11,699,999 (eleven million six hundred ninety-nine thousand nine hundred ninety-nine). Series B shares a nominal value of Rp11,699,999,000,000 (eleven trillion six hundred ninety-nine billion nine hundred ninety-nine million Rupiah).

#### Paid-up Capital

The Company's paid-up capital is Rp8,395,318,000,000 (eight trillion three hundred and ninety five billion three hundred and eighteen million Rupiah) with the following details:

1. The Republic of Indonesia in the amount of 593,847 (five hundred ninety-three thousand eight hundred and forty-seven) shares or in the amount of Rp593,847,000,000 (five hundred ninety-three billion eight hundred and forty-seven million Rupiah), consisting of:
  - a. 1 (one) Series A Dwiwarna share or a total of Rp1,000,000 (one million Rupiah), and
  - b. 593,846 (five hundred ninety-three thousand eight hundred and forty-six) shares or in the amount of Rp593,846,000,000 (five hundred ninety-three billion eight hundred and forty-six million Rupiah).
2. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the amount of 7,801,471 (seven million eight hundred and one thousand four hundred and seventy-one) Series B Shares or the amount of Rp7,801,471,000,000 (seven trillion eight hundred and one billion four hundred seventy-one million Rupiah).

Pemegang Saham Shareholders	Jumlah Saham Ditempatkan dan Disetor Penuh Number of Issued and Fully Paid-up Shares	Kepemilikan Saham Share Ownership	Jumlah Total
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	7.801.471	92,93%	Rp7.801.471.000.000
Pemerintah Republik Indonesia Government of the Republic of Indonesia	593.847	7,07%	Rp593.847.000.000

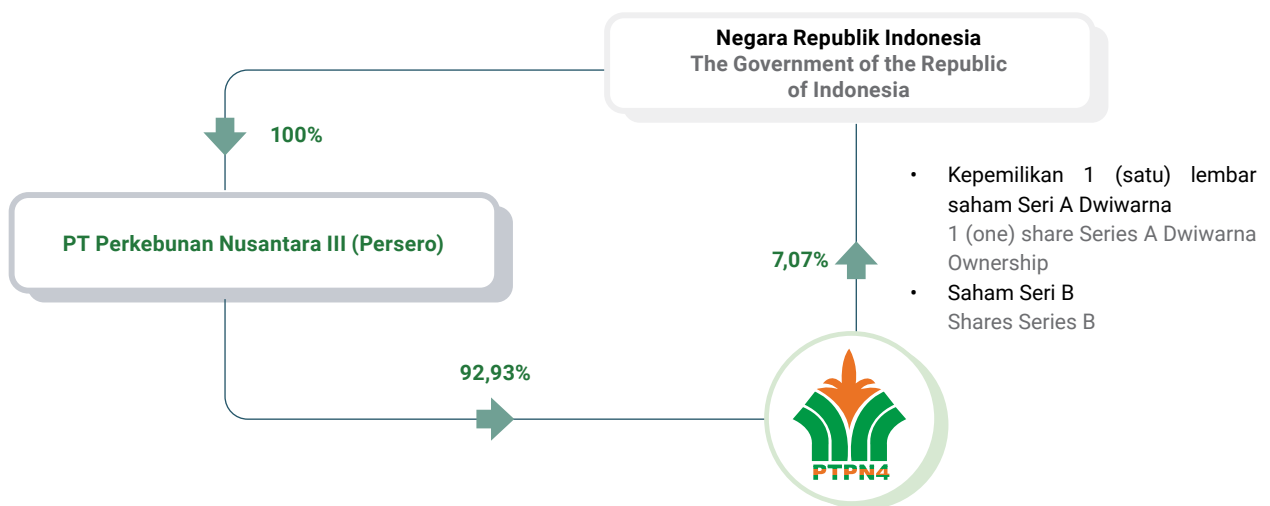
## Kepemilikan Saham Secara Langsung oleh Dewan Komisaris dan Direksi

Per 31 Desember 2023, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang memiliki saham atas Perseroan.

## Direct Share Ownership by the Board of Commissioners and Board of Directors

As of December 31, 2023, no members of the Board of Commissioners and Board of Directors own shares of the Company.

### Struktur Pemegang Saham Shareholders Structure



## INFORMASI MENGENAI PEMEGANG SAHAM UTAMA DAN PENGENDALI

### » Information Regarding Major and Controlling Shareholders

Berdasarkan Anggaran Dasar PTPN IV tahun 2019, saham Perseroan terdiri atas:

1. Saham Seri A Dwiwarna dimiliki Negara Republik Indonesia; dan
2. Saham Seri B yang dapat dimiliki oleh Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

Struktur kepemilikan Saham Seri B PTPN IV dimiliki oleh Pemerintah Republik Indonesia sebesar 7,07% dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar 92,93%.

Based on the Articles of Association of PTPN IV in 2019, the Company's shares consist of:

1. Series A Dwiwarna Shares owned by the Republic of Indonesia; and
2. Series B Shares can be owned by the Republic of Indonesia and PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

The ownership structure of Series B Shares of PTPN IV is owned by the Government of the Republic of Indonesia at 7.07% and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) at 92.93%.



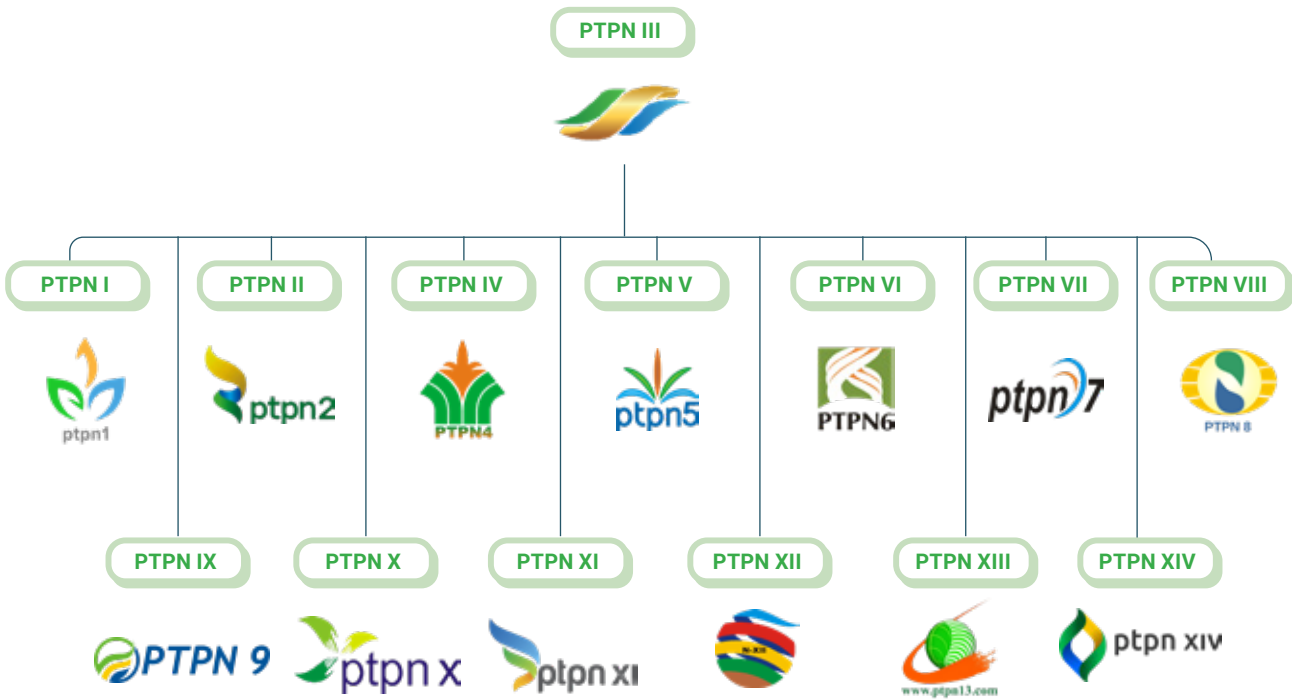
# STRUKTUR GRUP PERSEROAN

## » Company Group Structure

Struktur grup Perseroan terdiri dari 4 (empat) entitas anak, 4 (empat) perusahaan penyertaan modal, dan 2 (dua) perusahaan afiliasi. Berikut adalah struktur grup Perseroan sebelum penggabungan per 31 Desember 2023:

The Company's group structure consists of 4 (four) subsidiaries, 4 (four) equity participating companies, and 2 (two) affiliated companies. The Company group structure before merger as of December 31, 2023 is as follows:

Struktur PTPN Group Sebelum Penggabungan  
PTPN Group Structure Before Merger



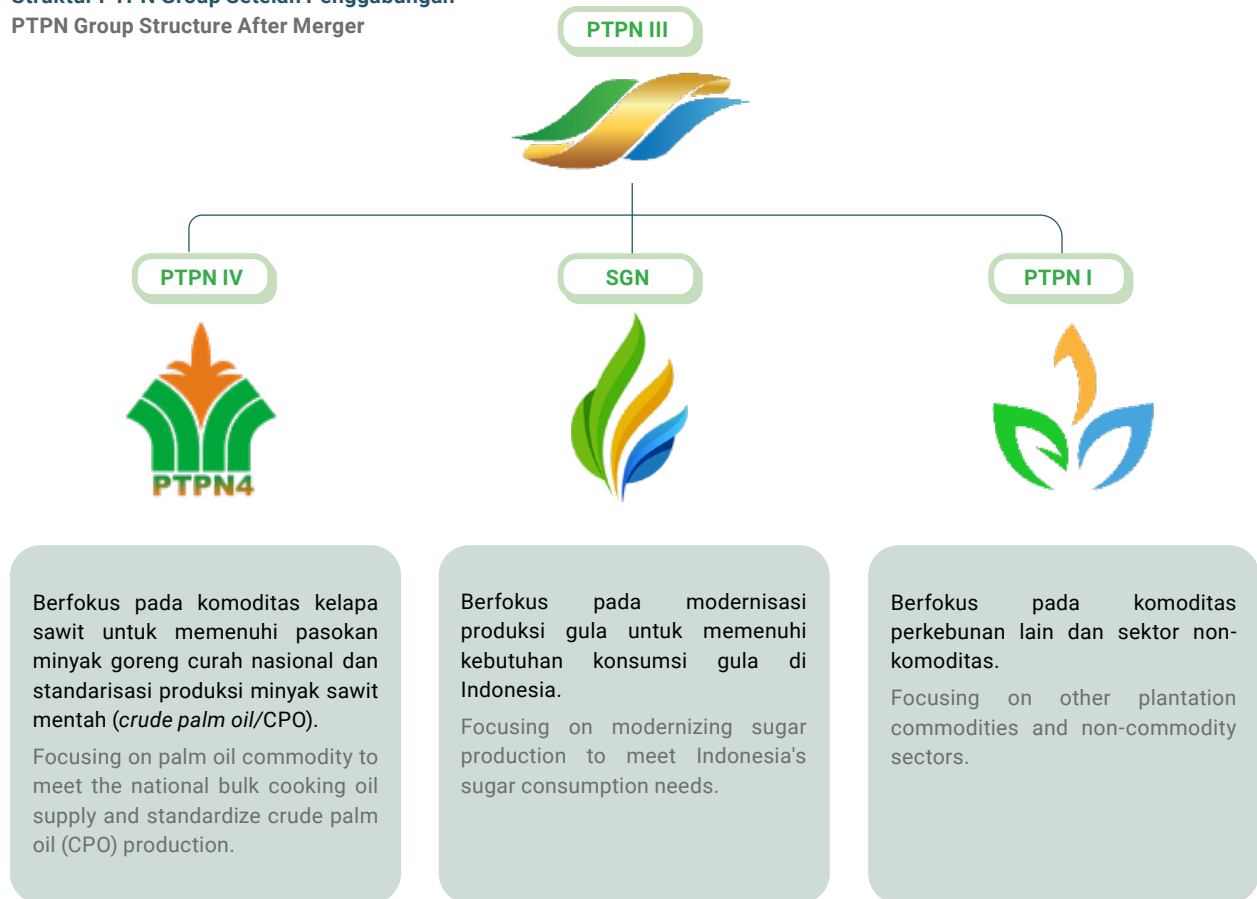
- Disusun berdasarkan wilayah geografis.
- Terdiri dari 14 badan hukum terpisah, masing-masing dipimpin oleh *Board of Management* dan memiliki komoditas yang beragam.

- Organized based on geographical regions.
- Comprised of 14 separate legal entities, each led by a *Board of Management* and involved in diverse commodities.

Setelah penggabungan, terdapat perubahan dalam struktur grup Perseroan sebagai berikut.

The Company's group structure after the merger is as follows:

**Struktur PTPN Group Setelah Penggabungan**  
PTPN Group Structure After Merger



## ENTITAS ANAK, PERUSAHAAN ASOSIASI, DAN PERUSAHAAN VENTURA BERSAMA

### » Subsidiaries, Associates, and Joint Ventures

**Entitas Anak PT Perkebunan Nusantara IV**  
Subsidiaries of PT Perkebunan Nusantara IV

Nama Perusahaan Company Name	Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Line of Business	Tahun Operasional Operating Year	Lokasi Location
PT Nusa Lima Medika ("NLM")	PTPN IV: 99,99% Kopkar Sei Pagar : 0,01%	Jasa pelayanan kesehatan Healthcare services	2015	Pekanbaru, Riau
PT Alam Lestari Nusantara "ALN")	PTPN IV: 83,96% PTPN I : 16,04%	Perkebunan karet Rubber plantation	2010	Sarolangun, Jambi
PT Kalimantan Medika Nusantara "KMN")	PTPN IV: 99,50% Kopkar Sejahtera : 0,50%	Jasa pelayanan kesehatan Healthcare services	2014	Pontianak, Kalimantan Barat Pontianak, West Kalimantan
PT Nusantara Batulicin ("NB")	PTPN IV: 51,00% Pemkab Tanah Bumbu Kalimantan Selatan: 49,00%	Perkebunan karet Rubber plantation	2013	Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan Tanah Bumbu, South Kalimantan



Nama Perusahaan Company Name	Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Line of Business	Tahun Operasional Operating Year	Lokasi Location
PT Prima Medica Nusantara ("PMN")	PTPN IV : 99,99% Kopkar : 0,01%	Jasa pelayanan kesehatan Healthcare services	2015	Medan, Sumatra Utara Medan, North Sumatra
PT Agro Sinergi Nusantara ("ASN")	PTPN IV : 64,77% PTPN I : 35,23%	Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation	2011	Aceh Barat, Meulaboh
PT Sinergi Perkebunan Nusantara ("SPN")	PTPN IV : 71,28% PTPN I : 28,72%	Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation	2012	Morowali Utara, Sulawesi Tengah North Morowali, Central Sulawesi
PT Industri Nabati Lestari ("INL")	PTPN IV : 49% PTPN III : 51%	Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation	2018	Simalungun, Sumatra Utara Simalungun, North Sumatra

**Entitas Asosiasi PT Perkebunan Nusantara IV**  
Associated of PT Perkebunan Nusantara IV

No.	Nama Perusahaan Company Name	Kepemilikan Saham Share Ownership	Bidang Usaha Line of Business	Status Operasional Operating Status	Lokasi Location
1.	PT Lembaga Pendidikan Perkebunan Agro Nusantara	31,60%	Pembelajaran, Asesmen, Konsultasi, Sertifikasi dan Hotel Learning, Assessment, Consultancy, Certification dan Hotel	Beroperasi Operating	DI Yogyakarta
2.	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	15,17%	Pemasaran Komoditas dan Logistik Commodity Trading and Logistics	Beroperasi Operating	Menteng, Jakarta Pusat Menteng, Central Jakarta
3	PT Kalimantan Agro Nusantara	41,07%	Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation	Beroperasi Operating	Sangatta, Kutai Timur Sangatta, East Kutai
4	PT Pupuk Agro Nusantara	49,00%	Pupuk Fertilizer	Tidak Beroperasi Not Operating	Medan, Sumatra Utara Medan, North Sumatra
5	PT Riset Perkebunan Nusantara	10,00%	Penelitian Research	Beroperasi Operating	Bogor
6	PT Bio Industri Nusantara	25,00%	Industri Pupuk Fertilizer Industry	Beroperasi Operating	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
7	PT Padasa Enam Utama	15,00%	Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation	Beroperasi Operating	Menteng, Jakarta Pusat Menteng, Central Jakarta
8	PT Perkebunan Agrintara	45,50%	Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation	Beroperasi Operating	Purwakarta, Jawa Barat Purwakarta, West Java
9	PT Siak Prima Nusalima	15,00%	Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation	Beroperasi Operating	Siak, Riau
10	PT Mardec Nusa Riau	40,00%	Perkebunan Kelapa Sawit Oil Palm Plantation	Tidak Beroperasi Not Operating	Siak, Riau



## KRONOLOGI PENCATATAN SAHAM

### » Share Listing Chronology

Per 31 Desember 2023, Perseroan merupakan perusahaan privat yang belum pernah mencatatkan saham di BEI. Seluruh kepemilikan saham Perseroan dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tidak terdapat informasi terkait kronologi pencatatan saham yang dapat disampaikan.

On December 31, 2023, the Company is a private company that has never listed shares on the IDX. All Company shares are owned by PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, no information regarding the share listing chronology can be provided.

## KRONOLOGI PENCATATAN EFEK LAINNYA

### » Other Securities Listing Chronology

Per 31 Desember 2023, Perseroan merupakan perusahaan privat yang belum pernah mencatatkan saham di BEI. Seluruh kepemilikan saham Perseroan dimiliki oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan Pemerintah Republik Indonesia. Oleh sebab itu, tidak terdapat informasi terkait kronologi pencatatan efek lainnya yang dapat disampaikan.






On December 31, 2023, the Company is a private company that has never listed shares on the IDX. All Company shares are owned by PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and the Government of the Republic of Indonesia. Therefore, no information regarding the other securities listing chronology can be provided.










## LEMBAGA ATAU PROFESI PENUNJANG PERUSAHAAN

### » Institutions or Professions Supporting the Company

	<b>Kantor Akuntan Publik</b> Public Accounting Firm	<b>Purwanto, Sungkoro &amp; Surja</b> (Anggota Firma Ernst & Young Global Limited) (Member of Ernst & Young Global Limited Firm)
	<b>Alamat</b> Address	Gedung Bursa Efek Indonesia Tower 2, Lantai 7 Indonesia Stock Exchange Building Tower 2, 7 <sup>th</sup> Floor Jl. Jend. Sudirman Kav. 52-53, Jakarta Pusat, DKI Jakarta, 12190 Tel: +62 21 5289 5000 Fax: +62 21 5289 4100
	<b>Jasa</b> Services	Melaksanakan audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian, Laporan Keuangan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL), dan Laporan Hasil Evaluasi Kinerja PT Perkebunan Nusantara IV untuk periode tahun buku yang berakhir tanggal 31 Desember 2023 sesuai Surat Perjanjian No. 0096/PSS/02/2024 tanggal 26 February 2024 berdasarkan prosedur yang disepakati atas Laporan Kegiatan Penerapan Prinsip Kehati-hatian (KPPK) sesuai dengan Peraturan dan Surat Edaran Bank Indonesia. Conduct an audit of the Consolidated Financial Statements, Social and Environmental Responsibility (TJSL) Financial Statements, and Performance Evaluation Report of PT Perkebunan Nusantara IV for the fiscal year ending December 31, 2023 following the Agreement Letter No. 0096/PSS/02/2024 dated February 26, 2024 based on the agreed procedures for the Prudential Principle Implementation Activity Report (KPPK) in accordance with Bank Indonesia Regulations and Circulars.
	<b>Biaya</b> Fee	Rp14.354.500.000 termasuk PPN dan tidak termasuk OPE ( <i>Out of Pocket Expenses</i> ). Rp14,354,500,000 included VAT dan excluded OPE ( <i>Out of Pocket Expenses</i> ).
	<b>Periode Penugasan</b> Assignment Period	2023

	<b>Konsultan Hukum</b> Legal Consultant	<b>BGN Law Firm</b>
	<b>Alamat</b> Address	Jl. STM Ujung, Eco Park Residence, Blok B-139 Tel: (62-61) 42773820 Fax: (62-61) 42775479 Email: bgnlawfirm@indosat.net.id
	<b>Jasa</b> Services	Konsultasi dan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi bagi Perseroan dan seluruh karyawannya. Legal consultation and assistance in terms of litigation and non-litigation for the Company and its employees.
	<b>Biaya</b> Fee	Rp300.000.000
	<b>Periode Penugasan</b> Assignment Period	2023

	<b>Kantor Hukum</b> Law Office	<b>Tambunan &amp; Partners</b>
	<b>Alamat</b> Address	Jl. Hindu No. 15 Medan Telp: (061) 4536530 Fax: (061) 4536530 Email: tambunan.rekan@yahoo.com
	<b>Jasa</b> Services	Konsultasi dan bantuan hukum secara litigasi dan nonlitigasi bagi Perseroan dan seluruh karyawannya. Legal consultation and assistance in terms of litigation and non-litigation for the Company and its employees.
	<b>Biaya</b> Fee	Rp300.000.000
	<b>Periode Penugasan</b> Assignment Period	2023

## ALAMAT UNIT USAHA ATAU KANTOR PERWAKILAN

### » Address of Business Unit or Representative Office



**Kantor Perwakilan dan Dewan  
Komisaris di Jakarta**  
Representative and Board of  
Commissioners' Offices in Jakarta

Jl. Wijaya X No. 3; RT 4/RW 4 - Melawai  
Kecamatan Kebayoran Baru  
Jakarta Selatan, DKI Jakarta 12170  
Tel: (021) 72791705

#### Alamat Kebun dan Pabrik Plantation and Mill Address

No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN III (Regional I) Address & Postal Code ex PTPN III (Regional I)
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Simalungun</b> Palm Oil Plantation in Simalungun Regency		
1	Hapesong	Jl. Pantai Barat, Kode Pos: 22738
2	Batangtoru	Lingkungan I, Kode Pos: 22738
3	Tonduhan	Emplasmen Tonduhan Huta II, Kelurahan Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21187 Telp.: (0622) 563122; Fax.: (0622) 563122
4	Dolok Sinumbah	Jl. Dolok Sinumbah, Kelurahan Dolok Sinumbah, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21182 Telp.: (0622) 96415; Fax.: (0622) 96415
5	Marihat	Jl. Huta I Emplasmen Marihat, Kelurahan Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21151 Telp.: (0622) 28771; Fax.: (0622) 28771
6	Marjandi	Jl. Besar Seribu Dolog KM. 15, Kelurahan Marjandi, Kecamatan Panombeian Panei - 21161. Telp.: (0622) 25428; Fax.: (0622)25428
7	Bah Birung Ulu	Jl. Birung Ulu Manriah, Kelurahan Birung Ulu Manriah, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21171 Telp.: (0622) 25466; Fax.: (0622)25466
8	Gunung Bayu	Emplasmen Gunung Bayu, Kelurahan Gunung Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara 21184 Telp.: (0622) 96234; Fax.: (0622)96234
9	Mayang	Emplasmen Mayang, Kelurahan Mayang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21183 Telp.: (0622) 563135; Fax.: (0622) 563135
10	Bukit Lima	Jl. Huta Emplasmen, Kelurahan Marihat Tanjung, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21183 Telp.: (0622) 6115118; Fax.: (0622) 56211
11	Dolok Ilir	Jl. Dolok Tenera, Kelurahan Dolog Tenera, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21155 Telp.: (0622) 64212; Fax.: (0622) 764738
12	Laras	Jl. Nagori Laras, Kelurahan Laras, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21155. Telp.: (0622) 340001; Fax.: (0622) 340001
13	Aek Nauli	Jl. Tinjowan, Kelurahan Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21187 Telp.: (0622) 697384; Fax.: (0622) 697384
14	Padang Matinggi	Jl. Tinjowan, Kelurahan Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21187 Telp.: (0622) 24456; Fax.: (0622) 697553
15	Tinjowan	Jl. Tinjowan, Kelurahan Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21187. Telp.: (0622) 24456; Fax.: (0622) 697553



No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN III (Regional I) Address & Postal Code ex PTPN III (Regional I)
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Batu Bara</b> Palm Oil Plantation in Batu Bara Regency		
1	Tanah Itam Ulu	Dusun I, Kelurahan Perkebunan Tanah Itam Ulu, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, 21155. Telp.: (0622) 563107; Fax.: (0622) 563090
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Asahan</b> Palm Oil Plantation in Asahan Regency		
1	Pasir Mandoge	Kecamatan Bandar Pasir (BP) Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21262. Telp.: (0623) 563111; Fax.: (0623) 7353074
2	Sei Kopas	Jl. Besar Sei Kopas, Kelurahan Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21262. Telp.: (0623) 563145; Fax.: (0623) 563276
3	Pulu Raja	Dusun 3, Kelurahan Orika, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21273 Telp.: (0623) 355018; Fax.: (0623) 355211
4	Air Batu	Jl. Besar, Kelurahan Perkebunan Air Batu I/II, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21722. Telp.: (0623) 41844; Fax.: (0623) 41844
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Serdang Badagai</b> Palm Oil Plantation in Serdang Badagai Regency		
1	Adolina	Jl. Negara Perbaungan, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Badagai, Sumatra Utara, 20986 Telp.: (0621) 7990045; Fax.: (0621) 7991514
2	Pabatu	Jl. Besar T. Tinggi Siantar, Kelurahan Kedai Damar, Kecamatan Tebing tinggi, Kabupaten Serdang Badagai, Sumatra Utara, 20602 Telp.: (0621) 326664; Fax.: (0621) 326664
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Langkat</b> Palm Oil Plantation in Langkat Regency		
1	Sawit Langkat	Dusun XI Pks, Kelurahan Banjar Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara - 20852 Telp.: (0621) 8911474; Fax.: (0621) 8911248
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Mandailing Natal</b> Palm Oil Plantation in Mandailing Natal Regency		
1	Timur	Desa Batu Sondal, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara 22988 Telp.: (0636) 475333; Fax.: (0636) 475333
2	Batang Laping	Desa Kuala Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, 22988. Telp.: (0636) 470290; Fax.: (0636) 470290
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Labuhan Batu</b> Palm Oil Plantation in Labuhan Batu Regency		
1	Ajamu	Jl. Besar Ajamu, Kelurahan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, 21472. Telp.: (0624) 551271; Fax.: (0624) 697553
2	Berangir	Jl. Lintas Perkebunan Berangir, Kelurahan Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, 21452. Telp. : (0624) 23358; Fax.: (0624) 23358
3	Meranti Paham	Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, 21472. Telp.: (0624) 552172; Fax.: (0624) 552100
4	Panai Jaya	Jl. Sei Rakyat, Kelurahan Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, 21472. Telp. : (0624) 552100; Fax.: (0624) 552100

No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN III (Regional I) Address & Postal Code ex PTPN III (Regional I)
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Padang Lawas</b> Palm Oil Plantation in Padang Lawas Regency		
1	Sosa	Jl. Raya Lintas Riau, Kelurahan Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, 22765. Telp. : (0636) 421360; Fax.: (0636) 421555
<b>PKS Wilayah Kabupaten Simalungun</b> POM in Simalungun Regency		
1	Bah Jambi	Emplasmen Bah Jambi, Kelurahan Bah Jambi I, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21174
2	Dolok Sinumbah	Jl. Dolok Sinumbah, Kelurahan Dolok Sinumbah, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21182
3	Dolok Ilir	Jl. Dolok Tenera, Kelurahan Dolog Tenera, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21155
4	Gunung Bayu	Emplasmen Gunung Bayu, Kelurahan Gunung Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21184
5	Mayang	Emplasmen Mayang, Kelurahan Mayang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21183
6	Tinjowan	Jl. Tinjowan, Kelurahan Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21187
<b>PKS Wilayah Kabupaten Asahan</b> POM in Asahan Regency		
1	Pulu Raja	Dusun 3, Kelurahan Orika, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21472
2	Air Batu	Jl. Besar, Kelurahan Perkebunan Air Batu I/II, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21722
3	Pasir Mandoge	Kecamatan Bandar Pasir (BP) Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21262
<b>PKS Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai</b> POM in Serdang Bedagai Regency		
1	Pabatu	Jl. Besar T.Tinggi-Siantar, Kelurahan Kedai Damar, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, 20602
2	Adolina	Jl. Negara Perbaungan, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, 20986
<b>PKS Wilayah Kabupaten Langkat</b> POM in Langkat Regency		
1	Sawit Langkat	Dusun XI Pks, Kelurahan Banjar Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, 20852
<b>PKS Wilayah Kabupaten Mandailing Natal</b> POM in Mandailing Natal Regency		
1	Timur	Desa Batu Sondal, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, 22988
<b>PKS Wilayah Kabupaten Labuhan Batu</b> POM in Labuhan Batu Regency		
1	Ajamu	Jl. Besar Ajamu, Kelurahan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, 21472
2	Berangir	Jl. Lintas Perkebunan Berangir, Kelurahan Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatra Utara, 21262
<b>PKS Wilayah Kabupaten Padang Lawas</b> POM in Padang Lawas Regency		
1	Sosa	Jl. Raya Lintas Riau, Kelurahan Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, 22765



No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN IV (Regional II) Address & Postal Code ex PTPN IV (Regional II)
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Simalungun</b> Palm Oil Plantation in Simalungun Regency		
1	Bah Jambi	Emplasmen Bah Jambi, Kelurahan Bah Jambi I, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21174. Telp.: (0622)563040; Fax.: (0622) 563025
2	Balimbangan	Emplasmen Balimbangan, Tanah Jawa Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara 21181. Telp.: (0622) 25507; Fax.: (0622) 7554218
3	Tonduhan	Emplasmen Tonduhan Huta II, Kelurahan Tonduhan, Kecamatan Hatonduhan, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21187. Telp.: (0622) 563122; Fax.: (0622) 563122
4	Dolok Sinumbah	Jl. Dolok Sinumbah, Kelurahan Dolok Sinumbah, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21182. Telp.: (0622) 96415; Fax.: (0622) 96415
5	Marihat	Jl. Huta I Emplasmen Marihat, Kelurahan Silampuyang, Kecamatan Siantar, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21151. Telp.: (0622) 28771; Fax.: (0622) 28771
6	Marjandi	Jl. Besar Seribu Dolog KM. 15, Kelurahan Marjandi, Kecamatan Panombean Panei - 21161. Telp.: (0622) 25428; Fax.: (0622)25428
7	Bah Birung Ulu	Jl. Birong Ulu Manriah, Kelurahan Birong Ulu Manriah, Kecamatan Sidamanik, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21171. Telp. : (0622) 25466; Fax.: (0622)25466
8	Gunung Bayu	Emplasmen Gunung Bayu, Kelurahan Gunung Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara 21184. Telp.: (0622) 96234; Fax.: (0622)96234
9	Mayang	Emplasmen Mayang, Kelurahan Mayang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun Sumatra Utara, 21183. Telp.: (0622) 563135; Fax.: (0622) 563135
10	Bukit Lima	Jl. Huta Emplasmen, Kelurahan Marihat Tanjung, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21183 Telp.: (0622) 6115118; Fax.: (0622) 56211
11	Dolok Ilir	Jl. Dolok Tenera, Kelurahan Dolog Tenera, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21155 Telp.: (0622) 64212; Fax.: (0622) 764738
12	Laras	Jl. Nagori Laras, Kelurahan Laras, Kecamatan Bandar Hulan, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21155. Telp.: (0622) 340001; Fax.: (0622) 340001
13	Aek Nauli	Jl. Tinjowan, Kelurahan Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21187 Telp.: (0622) 697384; Fax.: (0622) 697384
14	Padang Matinggi	Jl. Tinjowan, Kelurahan Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21187 Telp.: (0622) 24456; Fax.: (0622) 697553
15	Tinjowan	Jl. Tinjowan, Kelurahan Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21187. Telp.: (0622) 24456 Fax.: (0622) 697553
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Batu Bara</b> Palm Oil Plantation in Batu Bara Regency		
1	Tanah Itam Ulu	Dusun I, Kelurahan Perkebunan Tanah Itam Ulu, Kecamatan Limapuluh, Kabupaten Batu Bara, Sumatra Utara, 21155. Telp.: (0622) 563107; Fax.: (0622) 563090

No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN IV (Regional II) Address & Postal Code ex PTPN IV (Regional II)
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Asahan</b> Palm Oil Plantation in Asahan Regency		
1	Pasir Mandoge	Kecamatan Bandar Pasir (BP) Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21262. Telp.: (0623) 563111; Fax.: (0623) 7353074
2	Sei Kopas	Jl. Besar Sei Kopas, Kelurahan Sei Kopas, Kecamatan Bandar Pasir Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21262. Telp.: (0623) 563145; Fax.: (0623) 563276
3	Pulu Raja	Dusun 3, Kelurahan Orika, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21273 Telp.: (0623) 355018; Fax.: (0623) 355211
4	Air Batu	Jl. Besar, Kelurahan Perkebunan Air Batu I/II, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21722. Telp.: (0623) 41844; Fax.: (0623) 41844
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Serdang Badagai</b> Palm Oil Plantation in Serdang Badagai Regency		
1	Adolina	Jl. Negara Perbaungan, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Badagai, Sumatra Utara, 20986 Telp.: (0621) 7990045; Fax.: (0621) 7991514
2	Pabatu	Jl. Besar T. Tinggi Siantar, Kelurahan Kedai Damar, Kecamatan Tebing tinggi, Kabupaten Serdang Badagai, Sumatra Utara, 20602 Telp.: (0621) 326664; Fax.: (0621) 326664
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Langkat</b> Palm Oil Plantation in Langkat Regency		
1	Sawit Langkat	Dusun XI Pks, Kelurahan Banjar Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara - 20852 Telp.: (0621) 8911474; Fax.: (0621) 8911248
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Mandailing Natal</b> Palm Oil Plantation in Mandailing Natal Regency		
1	Timur	Desa Batu Sondal, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara 22988 Telp.: (0636) 475333; Fax.: (0636) 475333
2	Batang Laping	Desa Kuala Batahan, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, 22988. Telp.: (0636) 470290; Fax.: (0636) 470290
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Labuhan Batu</b> Palm Oil Plantation in Labuhan Batu Regency		
1	Ajamu	Jl. Besar Ajamu, Kelurahan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, 21472. Telp.: (0624) 551271; Fax.: (0624) 697553
2	Berangir	Jl. Lintas Perkebunan Berangir, Kelurahan Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, 21452. Telp. : (0624) 23358; Fax.: (0624) 23358
3	Meranti Paham	Desa Selat Beting, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, 21472. Telp.: (0624) 552172; Fax.: (0624) 552100
4	Panai Jaya	Jl. Sei Rakyat, Kelurahan Sei Rakyat, Kecamatan Panai Tengah, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, 21472. Telp. : (0624) 552100; Fax.: (0624) 552100
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Kabupaten Padang Lawas</b> Palm Oil Plantation in Padang Lawas Regency		
1	Sosa	Jl. Raya Lintas Riau, Kelurahan Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, 22765. Telp. : (0636) 421360; Fax.: (0636) 421555



No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN IV (Regional II) Address & Postal Code ex PTPN IV (Regional II)
<b>PKS Wilayah Kabupaten Simalungun</b> POM in Simalungun Regency		
1	Bah Jambi	Emplasmen Bah Jambi, Kelurahan Bah Jambi I, Kecamatan Jawa Maraja Bah Jambi, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21174
2	Dolok Sinumbah	Jl. Dolok Sinumbah, Kelurahan Dolok Sinumbah, Kecamatan Hutabayu Raja, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21182
3	Dolok Ilir	Jl. Dolok Tenera, Kelurahan Dolog Tenera, Kecamatan Dolok Batu Nanggar, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21155
4	Gunung Bayu	Emplasmen Gunung Bayu, Kelurahan Gunung Bayu, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21184
5	Mayang	Emplasmen Mayang, Kelurahan Mayang, Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21183
6	Tinjowan	Jl. Tinjowan, Kelurahan Tinjowan, Kecamatan Ujung Padang, Kabupaten Simalungun, Sumatra Utara, 21187
<b>PKS Wilayah Kabupaten Asahan</b> POM in Asahan Regency		
1	Pulu Raja	Dusun 3, Kelurahan Orika, Kecamatan Pulau Rakyat, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21472
2	Air Batu	Jl. Besar, Kelurahan Perkebunan Air Batu I/II, Kecamatan Air Batu, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21722
3	Pasir Mandoge	Kecamatan Bandar Pasir (BP) Mandoge, Kabupaten Asahan, Sumatra Utara, 21262
<b>PKS Wilayah Kabupaten Serdang Bedagai</b> POM in Serdang Bedagai Regency		
1	Pabatu	Jl. Besar T.Tinggi-Siantar, Kelurahan Kedai Damar, Kecamatan Tebingtinggi, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, 20602
2	Adolina	Jl. Negara Perbaungan, Kelurahan Batang Terab, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatra Utara, 20986
<b>PKS Wilayah Kabupaten Langkat</b> POM in Langkat Regency		
1	Sawit Langkat	Dusun XI Pks, Kelurahan Banjar Raya, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat, Sumatra Utara, 20852
<b>PKS Wilayah Kabupaten Mandailing Natal</b> POM in Mandailing Natal Regency		
1	Timur	Desa Batu Sondal, Kecamatan Batahan, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatra Utara, 22988
<b>PKS Wilayah Kabupaten Labuhan Batu</b> POM in Labuhan Batu Regency		
1	Ajamu	Jl. Besar Ajamu, Kelurahan Ajamu, Kecamatan Panai Hulu, Kabupaten Labuhan Batu, Sumatra Utara, 21472
2	Berangir	Jl. Lintas Perkebunan Berangir, Kelurahan Pulo Bargot, Kecamatan Marbau, Kabupaten Labuhan Batu Utara, Sumatra Utara, 21262
<b>PKS Wilayah Kabupaten Padang Lawas</b> POM in Padang Lawas Regency		
1	Sosa	Jl. Raya Lintas Riau, Kelurahan Lubuk Bunut, Kecamatan Huta Raja Tinggi, Kabupaten Padang Lawas, Sumatra Utara, 22765



No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN V (Regional III) Address & Postal Code ex PTPN V (Regional III)
<b>Kebun Kelapa Sawit</b> Palm Oil Plantation		
1	Air Molek I	Jl. Rengat - Taluk, Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau
2	Air Molek II	Jl. Rengat - Taluk, Desa Air Molek II Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau
3	Sei Pagar	Jl. Lintas Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar
4	Sei Galuh	Jl. Garuda Sakti KM.21, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar - Riau
5	Sei Garo	Jl. Lintas Petapahan- Simpang Gelombang, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar - Riau
6	Terantam	Jl. Raya Kasikan- Sukaramai, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
7	Tamora	Jl. Raya Kasikan- Sukaramai Tamora, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
8	Sei Kencana	Jl. Raya Lindai Sei Kencana, Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
9	Sei Berlian	Jl. Sei Berlian, Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
10	Tandun	Jl. Raya Simpang TB-Kasikan, Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
11	Sei Batu Langkah	Jl. Simpang Rambe Batu Langkah Besar, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu - Riau
12	Sei Tapung	Jl. Simpang Rambe Batu Langkah Besar, Desa Kabun, Kecamatan Kabun, Kabupaten Rokan Hulu - Riau
13	Sei Siasam	Jl. Pendalian, Desa Pendalian, Kecamatan Pendalian IV Koto, Kabupaten Rokan Hulu - Riau
14	Sei Intan	Jl. Kebun dan PKS Sei Intan, Desa Kembang Damai, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu - Riau
15	Sei Rokan	Jl. Kebun Sei Rokan, Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu
16	Tanjung Medan	Jl. Perkebunan PTPN V, Desa Perkebunan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan, Kabupaten Rokan Hilir - Riau
17	Lubuk Dalam	Jl. Pertamina Lubuk Dalam, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kabupaten Siak - Riau
18	Sei Buatan	Jl. Raya Perawang- Siak, Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak - Riau
19	Sei Lindai	Jl. Raya Kasikan - Pekanbaru, Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
20	Itms Siak	Jl. Padat Karya, Desa Benteng Hilir, Kecamatan Mempura, Kabupaten Siak - Riau
21	Sei Lindai	Jl. Raya Kasikan, Desa Senama Nenek Kecamatan Tapung Hulu Kabupaten Kampar -Riau
22	Pesikaian	Jl. Sudirman- lIntas Air Molek Taluk Kuantan, Desa Kompe Berangin Kecamatan Cerenti Kabupaten Kuantan Singingi -Riau
23	Sei Pagar Bibitan li	Jl. Pasir Putih Desa Desa Baru, Kecamatan Siak Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
24	Sei Pagar Bibitan	Jl. Lintas Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar -Riau
25	Air Molek I Bibitan	Jl. Rengat - Taluk, Desa Rimpian, Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu - Riau
26	Sei Rokan Bibitan	Jl. Kebun Sei Rokan, Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam, Kabupaten Rokan Hulu - Riau
27	Tandun Bibitan	Jl. Raya Tandun - Kasikan, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
28	Lubuk Dalam Bibitan	Jl. Pertamina Lubuk Dalam, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam , Kabupaten Siak - Riau



No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN V (Regional III) Address & Postal Code ex PTPN V (Regional III)
29	Tanah Putih Bibitan	Jl. Pasir Putih Utara, Desa Pasir Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir - Riau
30	Bagan Batu Bibitan	Jl. Jendral Sudirman (Lintas Sumatra), Desa Bagan Batu, Kecamatan Bagan Sinembah, Kabupaten Rokan Hilir - Riau
31	Dumai Bibitan	Jl. Mataram, Desa Bukit Kayu, Kecamatan Bukit Kapur, Kota Dumai - Riau

**PKS  
PMO**

1	Sei Pagar	Jl. Lintas Pekanbaru-Taluk Kuantan, Desa Pantai Raja, Kecamatan Perhentian Raja, Kabupaten Kampar - Riau
2	Sei Galuh	Jl. Garuda Sakti KM.21, Desa Pantai Cermin, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar - Riau
3	Sei Garo	Jl. Lintas Petapahan- Simpang Gelombang, Desa Gading Sari, Kecamatan Tapung, Kabupaten Kampar - Riau
4	Terantam	Jl. Raya Kasikan- Sukaramai, Desa Kasikan, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
5	Tandung	Jl. Raya Simpang TB-Kasikan, Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
6	PPKO Tandun	Jl. Raya Simpang TB-Kasikan, Desa Talang Danto, Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar - Riau
7	Lubuk Dalam	Jl. Pertamina Lubuk Dalam, Desa Lubuk Dalam, Kecamatan Lubuk Dalam, Kab Siak - Riau
8	Sei Buatan	Jl. Raya Perawang- Siak, Desa Sawit Permai, Kecamatan Dayun, Kab Siak -Riau
9	Sei Tapung	Jl. Raya Pekanbaru - Ujung Batu, Desa Tandun, Kecamatan Tandun Kabupaten Rokan Hulu- Riau
10	Sei Intan	Jl. Kebun dan PKS Sei Intan, Desa Kembang Damai, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab Rokan Hulu - Riau
11	Sei Rokan	Jl. Kebun Sei Rokan, Desa Pagaran Tapah, Kecamatan Pagaran Tapah Darussalam Kab Rokan Hulu- Riau
12	Tanah Putih	Jl. Pasir Putih Utara, Desa Pasir Utara, Kecamatan Balai Jaya, Kabupaten Rokan Hilir - Riau
13	Tanjung Medan	Jl. Perkebunan PTPN V, Desa Perkebunan Tanjung Medan, Kecamatan Tanjung Medan Kab Rokan Hilir- Riau
14	Karet Lindai	Jl. Raya Kasikan Pekanbaru, Desa Senama Nenek, Kecamatan Tapung Hulu, Kab Kampar-Riau.

No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN 6 (Regional 4) Address & Postal Code ex PTPN 6 (Regional 4)
----	-----------------------	--

**Kebun Kelapa Sawit Wilayah Jambi  
Palm Oil Plantation In Jambi**

1	Batanghari	Desa Muhajirin, Kecamatan Jambi Luar Kota, Kabupaten Muaro Jambi
2	Bunut	Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi
3	Bukit Cermin	Desa Kampung Tujuh, Kecamatan Cermin Nan Gedang, Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi
4	Bukit Kausar	Desa Rantau Benar, Kecamatan Renah Mendaluh, Kabupaten Tanjung Jabung Barat
5	Rimbo Satu	Desa Pematang Sapat, Kecamatan Rimbo Bujang Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi Kode Pos: 37551 Ex PTPN VI
6	Rimbo Dua	Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Kode Pos : 37553, Ex PTPN VI
7	Tanjung Lebar	Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
8	Lagan	Desa Lagan Tengah, Kecamatan Geragai, Kabupaten Tanjung Jabung Timur
9	Durian Luncuk	Desa Jangga Baru Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi

No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN 6 (Regional 4) Address & Postal Code ex PTPN 6 (Regional 4)
<b>Kebun Kelapa Sawit Wilayah Sumbar</b> Palm Oil Plantation In Sumbar		
1	Pangkalan Lima Puluh Kota	Nagari Gunuang Malintang, Kecamatan Pangkalan Koto Baru, Kabupaten Lima Puluh Kota, Provinsi Sumatera Barat
2	Ophir	Nagari Sariak, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat, 26568
3	Solok Selatan	Nagari Sungai Kunyit Kecamatan Sangir Balai Janggo Kabupaten Solok Selatan
<b>Kebun Teh Wilayah Jambi dan Sumbar</b> Tea Plantation In Jambi dan Sumbar		
1	Kayu Aro	Jalan Lintas Sungai Penuh - Padang, Dusun I, Desa Bedeng Delapan, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Prov. Jambi, Kode Pos (37163)
2	Danau Kembar	Desa Batang Barus, Kecamatan Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat
<b>PKS Wilayah Jambi</b> POM In Jambi		
1	Aurgading	Desa Simpang Aurgading, Kecamatan Batin XXIV, Kabupaten Batang Hari, Provinsi Jambi
2	Pinang Tinggi	Desa Pinang Tinggi, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. 36365
3	Tanjung Lebar	Desa Tanjung Lebar, Kecamatan Sungai Bahar, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi
4	Rimbo Dua	Desa Karang Dadi, Kecamatan Rimbo Ilir, Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi, Kode Pos : 37553
5	Bunut	Desa Markanding, Kecamatan Bahar Utara, Kabupaten Muaro Jambi, Provinsi Jambi, Indonesia. 36367
<b>PKS Wilayah Sumatra Barat</b> POM In West Sumatra		
1	Solok Selatan	Nagari Sungai Kunyit, Kecamatan Sangir Balai Janggo, Kabupaten Solok Selatan
2	Ophir	Nagari Sariak, Kecamatan Luhak Nan Duo, Kabupaten Pasaman Barat 26568
<b>Pabrik Teh Wilayah Jambi</b> Tea Mill in Jambi		
1	Kayu Aro	Jalan Lintas Sungai Penuh - Padang, Dusun I, Desa Bedeng Delapan, Kecamatan Kayu Aro Barat, Kabupaten Kerinci, Prov. Jambi, Kode Pos (37163)
<b>Pabrik Teh Wilayah Sumatra Barat</b> Tea Mill in West Sumatra		
1	Danau Kembar	Desa Batang Barus, Kecamatan Gn. Talang, Kabupaten Solok, Sumatra Barat
<b>Kebun Kelapa Sawit Unit Group, Kalimantan Barat</b> Palm Oil Plantation Unit Group, West Kalimantan		
1	Gunung Meliau	Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau 78571
2	Inti Gunung Emas	Desa Sungai Jaman, Kecamatan Meliau Kapuas, Kabupaten Sanggau 78571
3	Inti Sungai Dekan	Desa Kuala Boya Kecamatan Meliau Kabupaten Sanggau 78571
4	Inti Rimba Belian	Desa Semerangkai, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau 78571
5	Parindu	Desa Pasok, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau 78561
6	Kembayan	Desa Kelompu, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau 78553
7	Ngabang	Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357
<b>Kebun Kelapa Sawit Unit Group, Kalimantan Timur</b> Palm Oil Plantation Unit Group, East Kalimantan		
1	Tabara	Jl. Negara Km. 95 Samuntai, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Paser 76282
2	Tajati	Desa Bakoso, Kecamatan Paser Balengkong Kabupaten Paser 76271
3	Longkali	Desa Munggu Kecamatan Long Kali Kabupaten Paser 76283
4	Pandawa	Desa Olong Pinang Kecamatan Paser Belengkong Kabupaten Paser, Kalimantan Timur



No	Uraian Description	Alamat & Kode Pos ex PTPN IV (Regional 5) Address & Postal Code ex PTPN IV (Regional 5)
<b>Kebun Kelapa Sawit Unit Group, Kalimantan Selatan-Tengah</b> Palm Oil Plantation Unit Group, South-Central Kalimantan		
1	Danau Salak (Konversi Karet menjadi Kelapa Sawit)	Desa Bawah Selan, Kecamatan Mataraman, Kabupaten Banjar, 770672 Provinsi Kalimantan Selatan
2	Pelaihari	Jl. Soekarno Hatta, Ds. Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut 70851 Provinsi Kalimantan Selatan
3	Pamakan	Desas. Sukamaju, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
4	Raren Batuah	Desa baruyan Kecamatan Raren batuah Kabupaten Barito Timur KALTENG 73654
<b>Kebun Karet Unit Group, Kalimantan Barat</b> Rubber Plantation Unit Group, West Kalimantan		
1	Sintang	Desa Nanga Jetak, Kecamatan Dedai, Kabupaten Sintang 78691
<b>Kebun Karet Unit Group, Kalimantan Selatan-Tengah</b> Rubber Plantation Unit Group, South-Central Kalimantan		
1	Batulicin	Desa Karangbintang, Kecamatan Batulicin, Kabupaten Tanah Tumbu 72171 Provinsi Kalimantan Selatan
2	Kumai	Desa Pangkalan Banteng, Kecamatan Kumai Kabupaten Kotawaringin Barat 74181 Provinsi Kalimantan Tengah
<b>PKS Unit Group, Kalimantan Barat</b> POM Unit Group, West Kalimantan		
1	Gunung Meliau	Desa Meliau Hilir, Kecamatan Meliau, Kabupaten Sanggau 78571
2	Rimba Belian	Desa Semerangkai, Kecamatan Sanggau Kapuas, Kabupaten Sanggau 78571
3	Parindu/IPP Tayan	Desa Pasok, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau 78561
4	Ngabang	Desa Amboyo Inti, Kecamatan Ngabang Kabupaten Landak 78357
5	Kembayan	Desa Kelompu, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau 78553
<b>PKS Unit Group, Kalimantan Timur</b> POM Unit Group, East Kalimantan		
1	Semuntai	Jl. Negara Km. 95 Samuntai, Kecamatan Long Ikis Kabupaten Pasir 76282
2	Long Pinang	Desa Bakoso, Kecamatan Pasir Balengkong Kabupaten Pasir 76271
3	Longkali	Desa Munggu Kecamatan Long Kali Kabupaten Pasir 76283
<b>PKS Unit Group, Kalimantan Selatan-Tengah</b> POM Unit Group, South-Central Kalimantan		
1	Pelaihari	Jl. Soekarno Hatta, Ds. Pemuda, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut 70851 Provinsi Kalimantan Selatan
2	Pamakan	Desa Sukamaju, Kecamatan Sampanahan, Kabupaten Kotabaru Provinsi Kalimantan Selatan.
<b>Pabrik Karet Unit Group, Kalimantan Selatan-Tengah</b> Rubber Mill Unit Group, South-Central Kalimantan		
1	Tambarangan	Desa Tambarangan, Kecamatan Tapin Selatan Kabupaten Tapin 71181 Provinsi Kalimantan Selatan



### Alamat Entitas Anak Subsidiaries Address

#### PT Sinergi Perkebunan Nusantara

Trans Sulawesi Km 338, Lembontonara,  
Kec. Mori Utara, Kab. Morowali Utara,  
Sulawesi Tengah 94965  
Phone : 0852-5503-0303  
Email : sinergi.perkebunan.nusantara@gmail.com

#### PT Agro Sinergi Nusantara

Jl. Ujong Beurasok No.25, Gampong Lapang,  
Kec. Johan Pahlawan, Meulaboh, Aceh Barat 23651  
Phone : (0655) 8001319.  
Email : asn\_190511@yahoo.co.id

#### PT Prima Medica Nusantara

Jl. Imam Bonjol No.24 A-B, Medan  
Phone : (061) 4254666  
Fax : (061) 5468794  
Email : prima.medica.nusantara@gmail.com

#### PT Nusa Lima Medika

Jl. Ronggowarsito No. 40  
Kota Pekanbaru  
Phone: 081364302646  
Email: nusalimamedika@gmail.com

#### PT Kalimantan Medika Nusantara

Jl. Raya Desa Binjai, Dsn. Dohikempaning  
Kec. Tayan Hulu Kab. Sanggau Kalimantan Barat  
Phone: 082350501355  
Email: rsu.parindu@yahoo.com

#### PT Nusantara Batu Licin

Jl. Transmigrasi KM. 17,6 Desa Karang Bintang, Kec. Karang Bintang,  
Kab. Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan  
Phone: N/A  
Email: nusantara.balin@gmail.com

#### PT Alam Lestari Nusantara

Bukit Meranti, Desa Sepintun, Kec. Pauh, Kab. Sarolangun, Prov. Jambi  
Phone: N/A  
Email: alamlestarinusantara2@gmail.com

#### PT Industri Nabati Lestari

Komp. KEK Sei Mangkei, Kav.2-3, Kec. Bosar Maligas, Kab. Simalungun,  
Sumatra Utara 21184  
Phone: +62 622 7297252  
Email: cs@inl.co.id

### Alamat Entitas Asosiasi Associated Company Address

#### PT Pupuk Agro Nusantara

Jl. Bogor No.41, Ps. Baru, Kec. Medan Kota,  
Kota Medan, Sumatra Utara 20212  
Phone : (061) 45233136

#### PT Industri Nabati Lestari

Sei Mangkei, Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun,  
Sumatra Utara 21184. Jl. Iskandar Muda No.115,  
Petisah Hulu, Kec. Medan. Petisah, Kota Medan,  
Sumatra Utara 20152  
Phone : (061) 4521668

#### PT Padasa Enam Utara

Jl. Mongonsidi No.42, Anggrung,  
Kec. Medan Polonia,  
Kota Medan, Sumatra Utara 20157  
Phone : (061) 4538536

#### PT LPP Agro Nusantara

Jl. LPP No.1, Klitren, Kec. Gondokusuman,  
Kota Yogyakarta,  
Daerah Istimewa Yogyakarta 55222  
Phone : (0274) 586201  
Office : (0274) 586201, (0274) 551927  
Marketing : 08112836567  
Email : info@lpp.co.id

#### PT Kalimantan Agro Nusantara

PT Kalianusa Kompleks Thomas Square, Jalan Yos  
Sudarso II Blok C-5 No 17, Sangatta Utara, Kabupaten  
Kutai Timur Kalimantan Timur  
phone: (0549) 2027833  
(0549) 2027866  
Email: secorp@kalianusa.com

#### PT Bio Industri Nusantara

Jl. Raya Bungursari No. 215 Cibening - Purwakarta 41181  
Phone: 0264-216904  
Email: bionusa@ptbionusa.co.id

#### PT Riset Perkebunan Nusantara

Jl. Salak No. 1A, Bogor 16128  
Phone: 0251-8333382 / 081113803523  
Email: rpn@rpn.co.id

#### PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara

Kantor Pusat: Jl. Taman Cut Mutiah No. 11, Jakarta 10330, Indonesia  
Unit Dumai: Jl. Datuk Laksamana, Komplek Pelabuhan Pelindo,  
Buluh Kasap, Dumai Timur, Dumai, Riau  
Unit Belawan: Jl. Ujung Baru, Belawan I, Kota Medan, Sumatra Utara  
20411  
Kantor SEVP Operation II: Jl. Yos Sudarso No. 9 Lk.XX Belawan Bahagia,  
Medan  
Cabang Medan: Jl. Balai Kota No. 8, Medan 20111, Indonesia  
Phone: 021 3106685, 021 3907554 (hunting)  
Email: humas@inacom.co.id // @kanpus@inacom.co.id

#### PT Merdec Nusa Riau

Desa Tandun, Kab. Kampar  
Phone: N/A  
Email: N/A

#### PT Perkebunan Agrintara

Jl. Raya Cikampek - Cibening KM 11  
Purwakarta.  
Phone: N/A  
Email: N/A

#### PT Siak Prima Nusa Lima

Jl. Datuk Pintal Desa Sungai Limau, Kecamatan Pusako  
Phone: N/A  
Email: siakpriman5@gmail.com

#### PT LPP Agro Nusantara

Jl. LPP No. 1, Klitren, Yogyakarta  
Phone: 0274-551927  
Email: info@lpp.co.id

#### PT Pupuk Agro Nusantara

Jl. Karya Kasih No. 6 Medan Johor, Medan Sumatra Utara  
Phone: (061) 42778029  
Fax: (061) 42778029  
Email: utep\_s@yahoo.com



# SITUS RESMI PERUSAHAAN

## » The Company's Official Website

Perseroan berkomitmen untuk melakukan transparansi informasi dengan menyediakan media komunikasi yang informatif dan dapat diakses secara mudah oleh pemangku kepentingan sesuai koridor hukum dan peraturan yang berlaku, antara lain UU RI No. 14 tahun 2008 tanggal 30 April 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Saat ini, Perseroan memiliki situs resmi yang beralamat di [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id). Situs web ini tersedia dalam dua versi bahasa, yaitu Bahasa Indonesia dan Bahasa Inggris.

The Company is committed to providing transparent information through easily accessible communication channels in compliance with relevant laws and regulations, including Republic of Indonesia Law No. 14 of 2008 dated April 30, 2008 concerning the Public Information Disclosure.

Presently, the Company's official website can be accessed at [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id). The website is available in Indonesian and English.

<p><b>Tentang Kami</b> About Us</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Profil Perusahaan Company Profile</li> <li>» Profil Manajemen Management Profile</li> <li>» Tata Kelola Perusahaan yang Baik Good Corporate Governance</li> <li>» Informasi Perusahaan Company Information</li> <li>» Nilai-Nilai Perusahaan Company Values</li> </ul>	<p><b>Bisnis &amp; Produk</b> Business &amp; Product</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Sawit Palm Oil</li> <li>» Karet Rubber</li> <li>» Teh Tea</li> <li>» Kopi Coffee</li> </ul>	<p><b>Berita &amp; Event</b> News &amp; Event</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Berita Pers Press Releases</li> <li>» Galeri Gallery</li> <li>» Minat Interests</li> </ul>	<p><b>PPID</b> PPID</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Tentang PPID Holding Perkebunan About PPID Plantation Holding</li> <li>» Struktur PPID PPID Structure</li> <li>» Informasi Wajib Berkala Periodic Mandatory Information</li> <li>» Informasi Tersedia Setiap Saat Information Available Anytime</li> <li>» Permohonan Informasi Online Online Information Request</li> </ul>
<p><b>Keberlanjutan</b> Sustainability</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Kebijakan Keberlanjutan Sustainability Policy</li> <li>» Sertifikasi Certification</li> <li>» Laporan Keberlanjutan Sustainability Report</li> <li>» Tata Kelola Keberlanjutan Sustainability Governance</li> <li>» Keberlanjutan Lingkungan Environmental Sustainability</li> <li>» Pelatihan dan Pengembangan Training and Development</li> <li>» Pemberdayaan Masyarakat Community Empowerment</li> <li>» Kualitas Produk &amp; Keamanan Produk Product Quality &amp; Product Safety</li> <li>» Anti Korupsi Anti Corruption</li> <li>» Keluhan &amp; Pelaporan Pelanggaran Complaints &amp; Reporting Violations</li> <li>» Akuntabilitas Rantai Pasokan Supply Chain Accountability</li> </ul>	<p><b>Hubungan Investor</b> Investor Relations</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Informasi Keuangan Financial Information</li> <li>» Prospektus Prospectus</li> <li>» Kepemilikan Saham Shareholding</li> <li>» Rapat Umum Pemegang Saham General Meeting of Shareholders</li> <li>» Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal Capital Market Supporting Institutions and Professions</li> <li>» Informasi Saham Stock Information</li> <li>» Keterbukaan Informasi Disclosure of Information</li> </ul>	<p><b>Layanan Publik</b> Public Services</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» Pengumuman Announcement</li> <li>» Whistleblowing System Whistleblowing System</li> <li>» Laporan Report</li> <li>» Integrated Procurement System Integrated Procurement System</li> <li>» Integrated Procurement System Vendor Integrated Procurement System Vendor</li> <li>» Karir Career</li> <li>» Kontak Kami Contact Us</li> </ul>	<p><b>Links</b> Links</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>» SupportingCo SupportingCo</li> <li>» SGN SGN</li> <li>» Holding Holding</li> <li>» Regional II Regional II</li> <li>» Regional III Regional III</li> <li>» Regional IV Regional IV</li> <li>» Regional V Regional V</li> </ul>





# SUMBER DAYA MANUSIA

Human Resources







# 04

Kami berkomitmen untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif dan konstruktif bagi seluruh karyawan di semua level jabatan, serta memenuhi kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

We are committed to creating a supportive and constructive work environment for all employees, regardless of their position, and to fulfilling our obligations as an employer by complying with all relevant laws and regulations.

## SUMBER DAYA MANUSIA

### » Human Resources

Sebagai perusahaan yang terus berkembang, kami memahami bahwa pertumbuhan sumber daya manusia harus terus diupayakan untuk menggerakkan bisnis secara berkelanjutan. Manusia merupakan aspek paling penting dalam perusahaan kami. Maka, kami membentuk sebuah sistem manajemen sumber daya manusia yang terpadu agar setiap individu yang bekerja di Perseroan dapat memberikan kontribusi dan kinerja yang optimal.

As a company that continues to grow, we understand that human resource development must be pursued to drive sustainable business growth. People are the most important asset in our organization. Therefore, we establish an integrated human resource management system to ensure that every individual working in the Company can make an optimal contribution and achieve high performance.

Perseroan berkomitmen untuk membangun lingkungan kerja yang kondusif dan konstruktif bagi seluruh karyawan di semua level jabatan, serta memenuhi kewajibannya sebagai pemberi kerja dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

We are committed to creating a supportive and constructive work environment for all employees, regardless of their position, and to fulfilling our obligations as an employer by complying with all relevant laws and regulations.

### Komposisi Karyawan

Per 31 Desember 2023, total karyawan Perseroan secara konsolidasi adalah 59.532, menurun sebesar 6,49% dari tahun 2022 yaitu 63.666 orang. Jumlah karyawan saat ini dinilai masih berimbang dengan skala usaha Perseroan. Berikut adalah komposisi karyawan Perseroan berdasarkan beberapa kategori:

### Employee Composition

As of December 31, 2023, the Company had a total of 59,532 employees, representing a 6.49% decrease from 63,666 in 2022. The current number of employees is considered to be in balance with the Company's business scale. Below is the breakdown of the Company's employees across various categories:

#### Komposisi Karyawan berdasarkan Wilayah dan Status Ketenagakerjaan Composition of Employees by Region and Employment Status

Wilayah Region	2023			2022		
	Karyawan Tetap Permanent Employees	Karyawan Kontrak Contract Employees	Jumlah Total	Karyawan Tetap Permanent Employees	Karyawan Kontrak Contract Employees	Jumlah Total
Regional 1 (ex PTPN III)	16.953	2.214	19.167	18.100	2.953	21.053
Regional 2 (ex PTPN IV)	14.178	2.798	16.976	15.392	2.757	18.149
Regional 3 (ex PTPN V)	8.024	1.612	9.636	8.191	1.932	10.123
Regional 4 (ex PTPN VI)	4.195	1.557	5.752	4.378	1.662	6.040
Regional 5 (ex PTPN XIII)	6.423	1.578	8.001	6.801	1.500	8.301
<b>Jumlah Total</b>	<b>49.773</b>	<b>9.759</b>	<b>59.532</b>	<b>52.862</b>	<b>10.804</b>	<b>63.666</b>



#### Komposisi Karyawan berdasarkan Wilayah dan Gender Composition of Employees by Region and Gender

Wilayah Region	2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Regional 1 (ex PTPN III)	18.955	555	19.510	20.442	611	21.053
Regional 2 (ex PTPN IV)	14.891	1.754	16.645	16.093	2.056	18.149
Regional 3 (ex PTPN V)	8.717	905	9.622	9.080	1.043	10.123
Regional 4 (ex PTPN VI)	5.092	660	5.752	5.299	741	6.040
Regional 5 (ex PTPN XIII)	6.746	1.257	8.003	7.016	1.285	8.301
<b>Jumlah Total</b>	<b>54.401</b>	<b>5.131</b>	<b>59.532</b>	<b>57.930</b>	<b>5.736</b>	<b>63.666</b>

#### Komposisi Karyawan berdasarkan Kategori Jabatan Composition of Employees by Position Category

Jenis Karyawan Type of Employees	2023		2022	
	Jumlah Total	%	Jumlah Total	%
Karyawan Pelaksana (BOD-4 - BOD-6) Managing Employees	56.951	95,1	61.121	95,3
Karyawan Pimpinan (BOD-4 - BOD-6) Leading Employees	2.581	4,9	2.545	4,7
<b>Jumlah Total</b>	<b>59.532</b>	<b>100</b>	<b>63.666</b>	<b>100</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Strata dan Gender**  
Employee Composition Based on Level and Gender

Strata Level	2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
BOD-6	33.084	3.251	36.335	37.115	3.925	41.040
BOD-5	15.278	1.228	16.506	14.958	1.305	16.263
BOD-4	3.797	313	4.110	3.463	355	3.818
<b>Karyawan Pelaksana</b> Managing Employees	<b>52.159</b>	<b>4.792</b>	<b>56.951</b>	<b>55.536</b>	<b>5.585</b>	<b>61.121</b>
BOD-3	1.588	165	1.753	1.527	172	1.699
BOD-2	505	57	562	506	54	560
BOD-1	255	11	266	275	11	286
<b>Karyawan Pimpinan</b> Leading Employees	<b>2.348</b>	<b>233</b>	<b>2.581</b>	<b>2.308</b>	<b>237</b>	<b>2.545</b>
<b>Jumlah Total</b>	<b>54.507</b>	<b>5.025</b>	<b>59.532</b>	<b>57.844</b>	<b>5.822</b>	<b>63.666</b>
<b>%</b>	<b>91,56</b>	<b>8,44</b>	<b>100,00</b>	<b>90,86</b>	<b>9,14</b>	<b>100,00</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Status Kepegawaian dan Gender**  
Employee Composition Based on Employment Status and Gender

Status Kepegawaian Employment Status	2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Dewan Komisaris/Direksi/SEVP BOC/BOD/SEVP	25	2	27	40	6	46
Karyawan Tetap Permanent Employees	45.297	4.476	49.773	47.697	5.165	52.862
PKWT dan Honorer Contract Employees and Honorary	9.104	655	9.759	10.233	571	10.804
<b>Jumlah Total</b>	<b>54.426</b>	<b>5.133</b>	<b>59.559</b>	<b>57.970</b>	<b>5.742</b>	<b>63.712</b>

**Komposisi Karyawan Berdasarkan Level Jabatan dan Gender**  
Employee Composition Based on Position Level and Gender

Level Jabatan Position Level	2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Dewan Komisaris Board of Commissioners	4	1	5	19	6	25
Direksi Board of Directors	6	1	7	8	-	8
SEVP SEVP	15	0	15	13	-	13
Karyawan Gol. IIIA s.d. IVD Class IIIA to IVD Employee	2.266	225	2.491	2.225	221	2.446
Cakarpim Cakarpim	147	13	160	107	20	127
Karyawan Gol. IA s.d. IID Employee IA to IID Class	41.427	4.222	45.649	43.980	4.924	48.904
Calon Karyawan Pelaksana Prospective Executive	258	28	286	69	3	72
Konsultan Consultant	3	0	3	3	0	3
Tenaga Honorer Karyawan Pelaksana Honorary Personnel of Executive Employees	826	279	1105	979	235	1214
Tenaga Honor Papam Papam Honorary Staff	79	0	79	96	0	96
PKWT Contract Employee	9.104	655	9.759	10.233	571	10.804
<b>Jumlah Total</b>	<b>54.135</b>	<b>5.424</b>	<b>59.559</b>	<b>57.732</b>	<b>5.980</b>	<b>63.712</b>

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Masa Kerja dan Gender Employee Composition Based on Period of Service and Gender

Masa Kerja* Period of Service	2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
<15 tahun <15 years	22.270	604	22.874	22.336	570	22.906
16-20 tahun 16-20 years	3.868	173	4.041	4.436	212	4.648
>20 tahun >20 years	19.159	3.699	22.858	20.925	4.383	25.308
<b>Jumlah Total</b>	<b>45.297</b>	<b>4.476</b>	<b>49.773</b>	<b>47.697</b>	<b>5.165</b>	<b>52.862</b>

\*) dihitung hanya terhadap jumlah karyawan tetap / calculated only on the number of permanent employees

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Pendidikan dan Gender Employee Composition Based on Education Level and Gender

Jenjang Pendidikan* Education Level	2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
S3 Doctoral Degree	2	0	2	1	2	3
S2 Master Degree	187	35	222	176	34	210
S1 Bachelor Degree	2.949	407	3.356	2.874	391	3.265
SM/D3 Undergraduate	433	228	661	418	243	661
SLTA Senior High School	22.127	1.355	23.482	22.968	1.589	24.557
SLTP Junior High School	9.395	605	10.000	9.789	701	10.490
SD Elementary School	10.204	1.846	12.050	11.471	2.205	13.676
<b>Jumlah Total</b>	<b>45.297</b>	<b>4.476</b>	<b>49.773</b>	<b>47.697</b>	<b>5.165</b>	<b>52.862</b>

\*) dihitung hanya terhadap jumlah karyawan tetap / calculated only on the number of permanent employees

### Komposisi Karyawan Berdasarkan Jenjang Usia dan Gender Employee Composition Based on Age Level and Gender

Jenjang Usia* Age Level	2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
>26 tahun >26 years old	1.181	34	1.215	781	28	809
26-30 tahun 26-30 years old	3.000	90	3.090	2.739	75	2.814
31-35 tahun 31-35 years old	5.283	116	5.399	5.836	141	5.977
36-40 tahun 36-40 years old	8.165	181	8.346	8.570	201	8.771
41-45 tahun 41-45 years old	9.374	522	9.896	9.556	704	10.260
46-50 tahun 46-50 years old	9.040	1.431	10.471	9.694	1.681	11.375
51-55 tahun 51-55 years old	9.211	2.101	11.312	10.21	2.302	12.512
>55 tahun >55 years old	43	1	44	311	33	344
<b>Jumlah Total</b>	<b>45.297</b>	<b>4.476</b>	<b>49.773</b>	<b>47.697</b>	<b>5.165</b>	<b>52.862</b>

\*) dihitung hanya terhadap jumlah karyawan tetap / calculated only on the number of permanent employees

Jenjang Usia* Age Level	2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
>26 tahun >26 years old	2.677	73	2.750	3.128	84	3.212
26-30 tahun 26-30 years old	2.360	59	2.419	2.638	63	2.701
31-35 tahun 31-35 years old	1.644	96	1.740	1.940	85	2.025
36-40 tahun 36-40 years old	1.139	149	1.288	1.320	103	1.423
41-45 tahun 41-45 years old	695	151	846	622	114	736
46-50 tahun 46-50 years old	290	65	355	277	74	351
51-55 tahun 51-55 years old	167	40	207	166	27	193
>55 tahun >55 years old	132	22	154	142	21	163
<b>Jumlah Total</b>	<b>9.104</b>	<b>655</b>	<b>9.759</b>	<b>10.233</b>	<b>571</b>	<b>10.804</b>

\*) dihitung hanya terhadap jumlah karyawan tidak tetap / calculated only on the number of non-permanent employees

## Pelatihan dan Pengembangan Karyawan

Perseroan mengadakan program pengembangan kompetensi karyawan berdasarkan kebijakan, strategi manajemen, dan hasil *training need analysis*. Kondisi ini mencerminkan bahwa setiap karyawan yang memenuhi syarat berkesempatan untuk mengikuti pelatihan. Setelah pelatihan selesai dilakukan, Perseroan mengadakan evaluasi untuk mengukur efektivitas pelaksanaan pelatihan. Hasil evaluasi tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jenjang karir dan tingkat kebutuhan pelatihan lanjutan karyawan.

Selain untuk meningkatkan kompetensi dan mengasah keahlian, pelatihan dan pengembangan kompetensi juga bertujuan untuk mendukung terlaksananya program transformasi kultur bisnis secara berkelanjutan. Berbagai program pengembangan kompetensi yang difasilitasi Perseroan adalah:

1. *Leadership Program (PLDP)*,
2. *Best Practice Program*,
3. *Millenial Leader Program*,
4. *Women Leaders Program*,
5. *Soft & Hard Competency*,
6. *Certification Program*, dan
7. *Induction Program*.

### Leadership Program

Program ini merupakan program kepemimpinan yang didesain dan dilaksanakan oleh PT LPP Agro Nusantara sebagai *corporate university* PTPN Group, dengan nama *Plantation Leadership Development Program* atau PLDP. PLDP dibuat berjenjang berdasarkan level jabatan dari level jabatan satu tingkat sampai empat tingkat dibawah direksi atau regional management. Kurikulum yang dibuat pada program ini meliputi program manajerial dan kepemimpinan. Program ini dibuat untuk memantapkan peserta agar mampu melaksanakan fungsi supervisi, koordinasi, dan integrasi di lingkungan kerja.

## Employee Training and Development

The Company conducts employee competency development programs based on policies, management strategies, and the results of training needs analysis. This reflects that every employee who meets the requirements has the opportunity to participate in training. After the training is completed, the Company conducts an evaluation to measure the effectiveness of the training implementation. The results of this evaluation are used as a basis for determining employee career paths and levels of advanced training needs.

Apart from increasing competence and honing skills, training and competency development also aims to support the implementation of a sustainable business culture transformation program. Various competency development programs facilitated by the Company include:

1. *Leadership Program (PLDP)*,
2. *Best Practice Program*,
3. *Millenial Leader Program*,
4. *Women Leaders Program*,
5. *Soft & Hard Competency*,
6. *Certification Program*, and
7. *Induction Program*.

### Leadership Program

PT LPP Agro Nusantara has designed and established a leadership program called *Plantation Leadership Development Program (PLDP)* as part of the PTPN Group corporate university. PLDP is structured into four levels below the board of directors or regional management, focusing on developing managerial and leadership skills. The program aims to empower participants to effectively supervise, coordinate, and integrate functions within the work environment.

### Soft dan Hard Competency

Program ini mencakup program pelatihan, baik *soft competency*, *hard competency*, maupun pelatihan yang bersifat *mandatory* baik dilaksanakan dalam bentuk *In-House Training* maupun *Public Training* bekerjasama dengan PT LPP Agro Nusantara dan lembaga eksternal lainnya.

### Millennial Leader Program

Program yang didesain khusus bagi karyawan milenial perkebunan baik dalam bentuk *In-House Training* maupun *Public Training* bekerjasama dengan PT LPP Agro Nusantara dan lembaga eksternal lainnya.

### Women Leader Program

Program yang didesain khusus bagi karyawan perempuan perkebunan baik dalam bentuk *In-House Training* maupun *Public Training* bekerjasama dengan PT LPP Agro Nusantara dan lembaga eksternal lainnya.

### Best Practice Program

Program ini berupa bentuk studi banding ke perusahaan *best practice* yang bertujuan untuk melahirkan ide-ide kreatif dan inovatif bagi perusahaan.

### Certification Program

Program ini dilaksanakan bekerjasama dengan Lembaga Sertifikasi Profesi BNSP, PJK3 dan lembaga sertifikasi lainnya sebagai persyaratan pemenuhan kompetensi karyawan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

### Induction Program

Program pelatihan yang dibuat kepada karyawan baru untuk mengenalkan nilai-nilai yang dianut perusahaan, tugas, kewajiban karyawan serta SOP yang berlaku di perusahaan.

### Soft and Hard Competencies

The program covers soft and hard competency training, as well as mandatory training, conducted through both *In-House* and *Public Training* in collaboration with PT LPP Agro Nusantara and external institutions.

### Millennial Leader Program

Specially tailored training programs for millennial plantation employees conducted in collaboration with PT LPP Agro Nusantara and other external institutions.

### Women Leader Program

Tailored training programs for female plantation employees in collaboration with PT LPP Agro Nusantara and external institutions.

### Best Practice Program

This program takes the form of a comparative study to best practice companies which aims to generate creative and innovative ideas for companies.

### Certification Program

Implemented in collaboration with the BNSP Professional Certification Institute, PJK3, and other certification institutions to ensure employee competency aligns with applicable laws and regulations.

### Induction Program

Training programs designed for new employees to familiarize them with the Company's values, employee duties, obligations, and the Company SOPs.

No.	Program Pengembangan Kompetensi Competency Development Program	2023	2022
Karyawan Golongan IIIA-IVD Class IIIA-IVD Employees			
1	CEO Training	47	46
2	PLDP I sd III	123	235
3	Soft & Hard Competency	30.821	32.833
4	Millennial Leader Program	2.023	1.050
5	Women Leader Program	5.163	3.816
6	Best Practice Program	40	930
7	Certification Program	430	823
8	Induction Program	184	202
<b>Sub Total</b>		<b>38.838</b>	<b>39.935</b>
Karyawan Golongan IA-IID Class IA-IID Employees			
1	PLDP IV	32	677
2	Soft & Hard Competency	54.160	14.406
3	Certification Program	1.100	1.029
4	Induction Program	165	15
<b>Sub Total</b>		<b>55.907</b>	<b>16.127</b>
<b>Total</b>		<b>94.745</b>	<b>56.062</b>

Perseroan juga melakukan pemetaan kompetensi karyawan melalui *Assessment Center* sebagai sarana pendukung. Pada tahun 2023, Perseroan telah melakukan pemetaan kompetensi terhadap 4.529 karyawan yang terdiri dari 876 karyawan golongan IIIA dan 3.650 karyawan golongan IA-IID. Guna mendukung program akselerasi golongan karyawan Strata V dan VI yang belum memenuhi golongan minimal jabatan, Perseroan senantiasa melakukan *review* penyusunan pedoman akselerasi golongan, pemetaan karyawan yang belum memenuhi golongan minimal jabatannya, dan selanjutnya mengakselerasi golongan karyawan.

The Company conducts employee competency mapping using the *Assessment Center* as a supporting tool. In 2023, the Company mapped the competencies of 4,529 employees, including 876 class IIIA employees and 3,650 class IA-IID employees. To support the acceleration program for Strata V and VI employee groups who have not met the minimum position requirements, the Company continues to reviewing the preparation of group acceleration guidelines, mapping employees who have not met the minimum position requirements, and then accelerating employee groups.

**Jumlah Peserta Asesmen *Talent Pool* Berdasarkan Gender dan Strata**  
Number of Talent Pool Assessment Participants Based on Gender and Strata

Status Kepegawaian Employment Status	2023			2022		
	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total	Pria Male	Wanita Female	Jumlah Total
Direksi Board of Directors	3	-	3	3	-	3
Golongan IIIA IIIA Class	803	73	876	663	70	733
Golongan IA-IID IA-IID Class	3.114	536	3.650	3.387	603	3.990
<b>Jumlah Total</b>	<b>3.920</b>	<b>609</b>	<b>4.529</b>	<b>4.053</b>	<b>673</b>	<b>4.726</b>

**Sistem Manajemen Kinerja Berbasis Kompetensi (SMK-BK)**

Sejak 2020, Perseroan telah menerapkan SMK-BK (*Competency-Based Performance Management*) sebagai bagian dari Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia Berbasis Kompetensi (*Integrated Competency-Based Human Resources Management System*). SMK-BK secara tegas mengintegrasikan kebutuhan penilaian kinerja dan apresiasi terhadap karyawan yang memiliki kompetensi di atas rata-rata, berkontribusi lebih, termasuk para "*Knowledge Worker*" dan mereka yang berhasil mencapai indikator kinerja (*Performance Indicators*).

**Competency-Based Performance Management System (SMK-BK)**

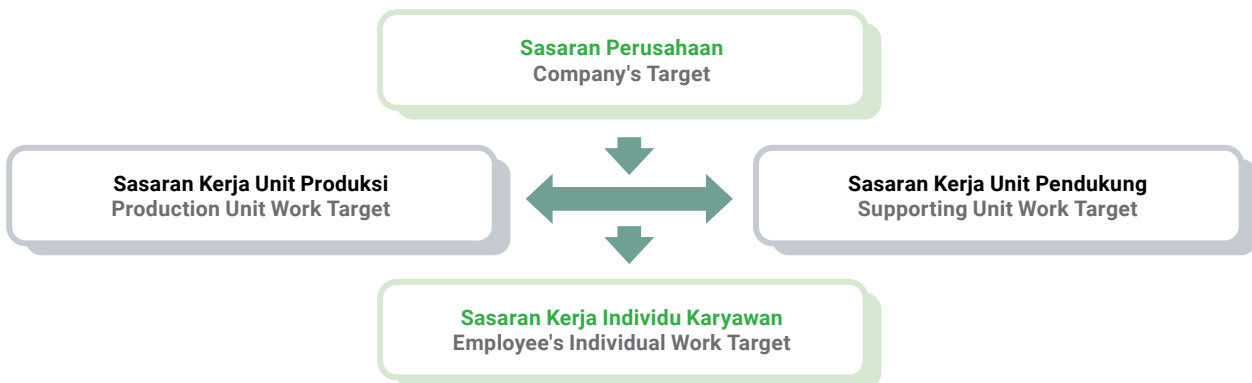
Since 2020, the Company has implemented SMK-BK (*Competency-Based Performance Management*) as part of the *Integrated Competency-Based Human Resources Management System*. SMK-BK integrates the need for performance assessment and appreciation for employees with above-average competence, including "*Knowledge Workers*" and those who have successfully achieved performance indicators.

**Hubungan Tujuan (Sasaran) Perusahaan dan Prestasi Karyawan**

Hubungan sasaran Perseroan dengan pencapaian prestasi/ hasil kerja karyawan (*deployment*) diilustrasikan sebagai berikut:

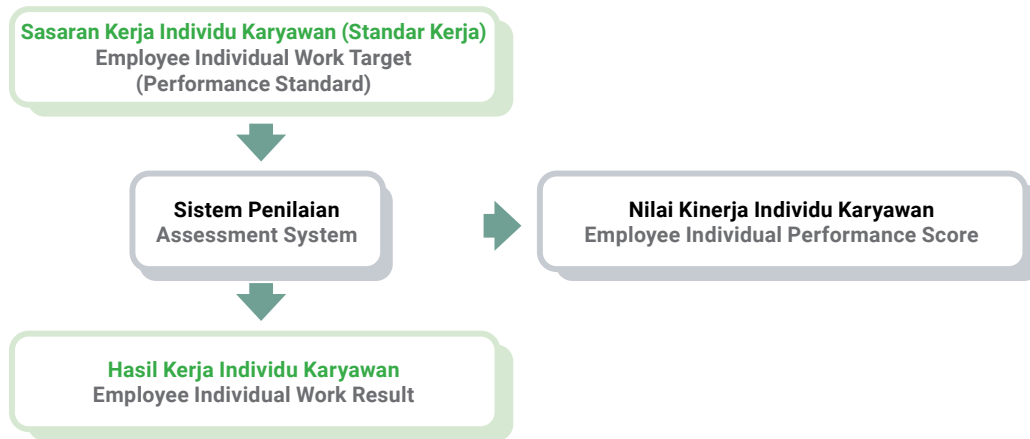
**Relationship between Company Goals (Targets) and Employee Achievement**

The relationship between the Company's goals and employee achievement/work results (*deployment*) is illustrated as follows:





Sasaran kerja individu karyawan menjadi standar kinerja yang harus dicapai oleh setiap karyawan dan menjadi tolok ukur untuk menilai kinerja karyawan melalui penilaian terhadap realisasi kinerja, sebagaimana digambarkan berikut ini:



Individual employee work targets are transformed into performance standards that each employee must achieve, serving as benchmarks for assessing employee performance through performance evaluations.

## Ukuran Kinerja

Ukuran Kinerja terdiri dari 2 (dua) fungsi yaitu Fungsi Utama dan Fungsi Pendukung. Fungsi utama berkaitan langsung dengan ukuran kinerja dari masing-masing pemegang jabatan, sedangkan fungsi pendukung berhubungan dengan besaran kontribusi pemegang jabatan kepada pencapaian ukuran kinerja fungsi utama pemegang jabatan lainnya. Ukuran kinerja terdiri atas:

### Indikator Kinerja (Performance Indicators/PI)

PI mencerminkan pencapaian kinerja yang dihasilkan dari proses kerja. Oleh karena itu, PI dapat digunakan untuk memberi arah bagaimana cara meningkatkan hasil akhir dari proses tersebut dan PI menunjukkan efektivitas kegiatan usaha Perseroan.

### Indikator Kinerja Utama (Key Performance Indicator/KPI)

KPI mencerminkan pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang sangat kritical dalam proses kerja. Apabila kegiatan dikelola dengan benar dan tepat, maka Perseroan dapat meningkatkan hasil akhir secara signifikan. Pada dasarnya, KPI bersifat nonfinansial, dan pengukuran dilakukan dengan periode yang relatif pendek (per hari atau per jam). Apabila ditinjau dengan pendekatan *Balanced Scorecard*, maka KPI pada dasarnya memiliki dampak signifikan dan positif terhadap lebih dari 2 (dua) perspektif *scorecard*.

Pencapaian kinerja yang tercermin melalui PI dan KPI diharapkan dapat bermanfaat secara optimal bagi kelangsungan bisnis Perseroan. Karyawan harus dapat melakukan tindakan korektif pada saat diperlukan. Setiap indikator ukuran kinerja memiliki elemen-elemen sebagai berikut:

## Performance Measures

Performance Measures include 2 (two) functions: the Main Function and the Supporting Function. The main function is directly related to the performance measures of each position holder, while the supporting function is related to the extent of the position holder's contribution to the achievement of performance measures of the main functions of other office holders. Performance measures consist of:

### Performance Indicators (PI)

PI reflects performance achievements resulting from work processes. Consequently, PI can be used to provide direction on how to improve the process's final results and show the effectiveness of the Company's business activities.

### Key Performance Indicator (KPI)

KPI reflects the performance achievements of critical activities in the work process. Proper management of these activities can significantly improve the Company's final results. Basically, KPIs are non-financial in nature and are measured over relatively short periods, such as per day or per hour. When viewed using the *Balanced Scorecard* approach, KPIs have a significant and positive impact on more than 2 (two) *scorecard* perspectives.

It is hoped that performance achievements reflected through PI and KPI will be optimally beneficial for the continuity of the Company's business. Employees must be able to take corrective action when necessary. Each performance measurement indicator has the following elements:

- a. Definisi Operasional: merupakan pengertian dari suatu indikator berdasarkan parameter tertentu yang dapat diukur.
  - b. Satuan Ukuran: yang disesuaikan dengan karakter masing-masing indikator, berdasarkan satuan-satuan yang berlaku umum atau satuan-satuan metrik standar.
  - c. Frekuensi Pelaporan: yang disesuaikan dengan karakter dan tingkat kepentingan masing-masing indikator.
  - d. *Threshold*: ambang batas toleransi pencapaian kinerja bagi setiap indikator yang disesuaikan dengan karakter, tingkat kepentingan, serta kebijakan manajemen. Kinerja yang bersifat "efisiensi", *Threshold* bersifat "toleransi maksimum", sedangkan kinerja yang bersifat "efektivitas, produktivitas, kualitas", *Threshold* bersifat "toleransi minimum". Konteks Manajemen Kinerja, *Threshold* berfungsi sebagai ruang toleransi bagi pencapaian kinerja sebagai akibat lingkungan kerja yang dinamis, sedangkan dalam konteks "pengendalian manajemen", *Threshold* dimaksudkan sebagai alat (*tools*) dalam Sistem Peringatan Dini (*Early Warning System*) bagi adanya permasalahan dalam pencapaian kinerja.
- a. Operational Definition: a definition of an indicator based on certain parameters that can be measured.
  - b. Unit of Measure: adapted to the character of each indicator, based on generally accepted units or standard metric units.
  - c. Reporting Frequency: adjusted to the character and level of importance of each indicator.
  - d. Threshold: the tolerance threshold for achieving performance for each indicator, which is adjusted to the character, level of importance, and management policies. Performance is "efficiency", and Threshold is "maximum tolerance", while performance is "effectiveness, productivity, quality", and Threshold is "minimum tolerance". In the context of Performance Management, Threshold functions as a tolerance space for achieving performance as a result of a dynamic work environment, whereas in the context of "management control", Threshold is intended as a tool in the Early Warning System for problems in achieving performance

## Kerangka Pengembangan SDM

Perseroan senantiasa berupaya memenuhi ekspektasi pasar dan konsumen untuk beradaptasi dengan lingkungan bisnis yang dinamis. Dari waktu ke waktu, Perseroan senantiasa mempersiapkan diri untuk menghadapi berbagai perubahan dengan berkembang dan berinovasi secara berkelanjutan. Hal inilah yang mendorong Perseroan untuk terus mengembangkan kompetensi dan keahlian SDM sesuai kebutuhan organisasi.

### Rekrutmen

Perseroan melakukan pemetaan yang terencana setiap awal tahun terkait jumlah SDM yang diperlukan untuk mencapai tujuan strategisnya. Divisi SDM tidak hanya berfokus pada jumlah SDM yang dibutuhkan oleh organisasi tetapi juga terhadap tingkat kompetensi yang diperlukan. Perencanaan SDM juga meliputi pengembangan dan penempatan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis (*business planning*) Perseroan.

Guna menjangkau dan merekrut kandidat yang berkualitas serta memenuhi kualifikasi yang disyaratkan, Perseroan bekerja sama dengan sejumlah perguruan tinggi ternama untuk mendapatkan potensi-potensi yang unggul dan terbaik. Perseroan juga melakukan perekrutan secara terbuka melalui situs web. Dalam melakukan rekrutmen, Perseroan tidak membedakan latar belakang ras, agama, suku, dan gender.

Perseroan melakukan seleksi karyawan secara profesional yang melibatkan lembaga independen untuk mengukur calon karyawan pimpinan yang kompeten baik secara kapasitas dan perilaku. Pada tahun 2023, Perseroan melaksanakan rekrutmen calon Karyawan Pimpinan sebanyak 120 orang.

## HR Development Framework

The Company always strives to meet market and consumer expectations in order to adapt to a dynamic business environment. Over time, the Company continuously develops and innovates to prepare for various changes. This encourages the Company to develop HR competencies and expertise according to organizational needs.

### Recruitment

At the beginning of each year, the Company conducts planned mapping to determine the number of human resources needed to achieve its strategic goals. The HR division not only focuses on the number of human resources needed but also on the required level of competency. HR planning also includes development and placement tailored to the Company's business planning.

To recruit quality candidates who meet the required qualifications, the Company collaborates with a number of well-known universities to obtain superior potential and also recruits openly through its website. The Company does not differentiate between racial, religious, ethnic, and gender backgrounds in its recruitment process.

The Company conducts professional employee selection involving independent institutions to measure prospective leading employees who are competent in terms of capacity and behavior. In 2023, the Company recruited 120 potential Leading Employees.

**Tabel Rekrutmen dan Perputaran Tenaga Kerja**  
Recruitment and Employee Turnover Table

Keterangan Description	2023		2022	
	Karyawan yang Baru Direkrut New-Recruited Employees	Karyawan yang Mengundurkan Diri Resigned Employees	Karyawan yang Baru Direkrut New-Recruited Employees	Karyawan yang Mengundurkan Diri Resigned Employees
Karyawan Pimpinan Leading Employees	120	14	194	23
Karyawan Pelaksana Managing Employees	2.042	289	935	411

### Manajemen Talenta

Perseroan melakukan manajemen talenta secara terpadu sebagai upaya untuk mendukung keberhasilan Perseroan. Manajemen talenta diperlukan untuk mencari orang-orang yang tepat dengan keterampilan yang tepat untuk posisi yang tepat. Perseroan senantiasa mengidentifikasi dan mengevaluasi kemampuan, bakat, kepribadian, dan karakter setiap individu agar dapat dikembangkan dengan maksimal.

### Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi

Perseroan berupaya mengembangkan potensi dan kompetensi karyawan dengan mengikutsertakan karyawan pada berbagai program pelatihan, seminar, *Sharing knowledge* sesuai jabatan dan kebutuhan organisasi. Selain itu, Perseroan juga memberikan beasiswa kepada karyawan yang memiliki potensi di bidangnya, agar karyawan dapat semakin menguasai tugas dan pekerjaannya serta memberikan kontribusi optimal kepada Perseroan.

### Tunjangan dan Remunerasi

Perseroan berusaha memelihara dan mempertahankan karyawan dengan memberikan fasilitas dan tunjangan yang kompetitif sehingga karyawan termotivasi untuk menghasilkan kinerja yang kontributif, antara lain:

- memberikan imbal jasa yang kompetitif;
- melakukan evaluasi kinerja tahunan;
- memberikan jaminan hari tua berupa dana pensiun sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
- memberikan jaminan sosial tenaga kerja;
- memfasilitasi hubungan industrial yang konstruktif;
- melakukan penyelesaian perselisihan hubungan industrial
- mengutamakan keselamatan dan kesehatan kerja bagi pegawai dan keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.

### Talent Management

The Company implements integrated talent management to support its success. This involves finding the right people with the necessary skills for the available positions. The Company identifies and evaluates the abilities, talents, personality, and character of each individual in order to develop them optimally.

### Competency Training and Development

In terms of competency training and development, the Company aims to enhance employee potential and competence through various training programs, seminars, and knowledge sharing tailored to individual positions and organizational needs. Additionally, the Company offers scholarships to employees with potential in their respective fields to help them better master their duties and provide optimal contributions for the Company.

### Benefits and Remuneration

To maintain and retain employees, the Company provides competitive facilities and benefits to motivate employees to perform well. This includes:

- providing competitive service fees;
- conducting annual performance evaluations;
- offering old-age security in form of pension funds according to prevailing laws;
- offering social security for workers;
- facilitating constructive industrial relations;
- resolving industrial relations disputes; and
- prioritizing occupational safety and health for employees and their families in accordance with applicable regulations.

## TEKNOLOGI INFORMASI (TI)

### » Information Technology (IT)

Dalam mengelola operasional perusahaan di PT Perkebunan Nusantara IV, percepatan pengambilan keputusan yang didasarkan pada fakta dan data menjadi salah satu kebutuhan yang sangat mendasar. Dalam konteks ini, peran teknologi informasi di perusahaan semakin penting sebagai alat strategis untuk memenangkan persaingan di industri perkebunan dan sektor terkait. Teknologi informasi diharapkan dapat memberikan data yang akurat, sehingga setiap keputusan yang diambil dapat didasarkan pada informasi yang tepat dan relevan.

Lebih jauh lagi, teknologi ini diharapkan mampu meningkatkan kecepatan dalam penyampaian informasi, yang sangat penting untuk respons yang cepat dalam situasi yang berubah-ubah. Dengan adanya teknologi yang baik, proses bisnis dapat disederhanakan dan dioptimalkan, mengurangi birokrasi yang tidak perlu dan meningkatkan efisiensi operasional. Selain itu, inovasi akan terus tumbuh berkat pemanfaatan data dan analitik yang lebih baik, memungkinkan perusahaan untuk menciptakan produk dan layanan yang lebih baik serta lebih sesuai dengan kebutuhan pasar. Semua ini pada akhirnya bertujuan untuk menciptakan nilai tambah yang signifikan, baik bagi perusahaan maupun bagi para pemangku kepentingan, sehingga memperkuat posisi perusahaan dalam kompetisi yang semakin ketat.

### Roadmap Teknologi Informasi

Sebagai panduan dalam pengembangan teknologi informasi, *holding* Perkebunan Nusantara telah menyusun *Plantation Digitalization Roadmap 2021-2025*. Rencana ini diselaraskan dengan lima prioritas utama dari Kementerian BUMN, terutama pada aspek Kepemimpinan Teknologi dan *Strategic House* Holding Perkebunan Nusantara beserta anak perusahaannya, dengan penekanan pada *System & Technology Enhancement*, yang bertujuan untuk memanfaatkan digitalisasi dan teknologi dalam operasional dan bisnis.

Dalam konteks ini, terdapat lima tema tahunan yang telah dirumuskan sebagai bagian dari transformasi digital di PT Perkebunan Nusantara IV. Tema-tema ini dirancang untuk mendukung produktivitas bisnis di perusahaan. Setiap tema akan berfokus pada area tertentu yang diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional.

In running the company's operations at PT Perkebunan Nusantara IV, making decisions quickly based on facts and data is essential. In this context, the role of Information Technology in the company is increasingly important as a strategic tool to stay competitive in the plantation industry and related sectors. Information technology is expected to provide accurate data so that every decision can be based on precise and relevant information.

Moreover, this technology is expected to enhance the speed of information delivery, which is crucial for swift responses in changing situations. With reasonable technology, business processes can be simplified and optimized, reducing unnecessary bureaucracy and increasing operational efficiency. Additionally, innovation will continue to flourish due to better use of data and analytics, allowing companies to create superior products and services that better align with market needs. All of this ultimately aims to create significant added value for the company and stakeholders, thereby strengthening the company's position in an increasingly competitive environment.

### Information Technology Roadmap

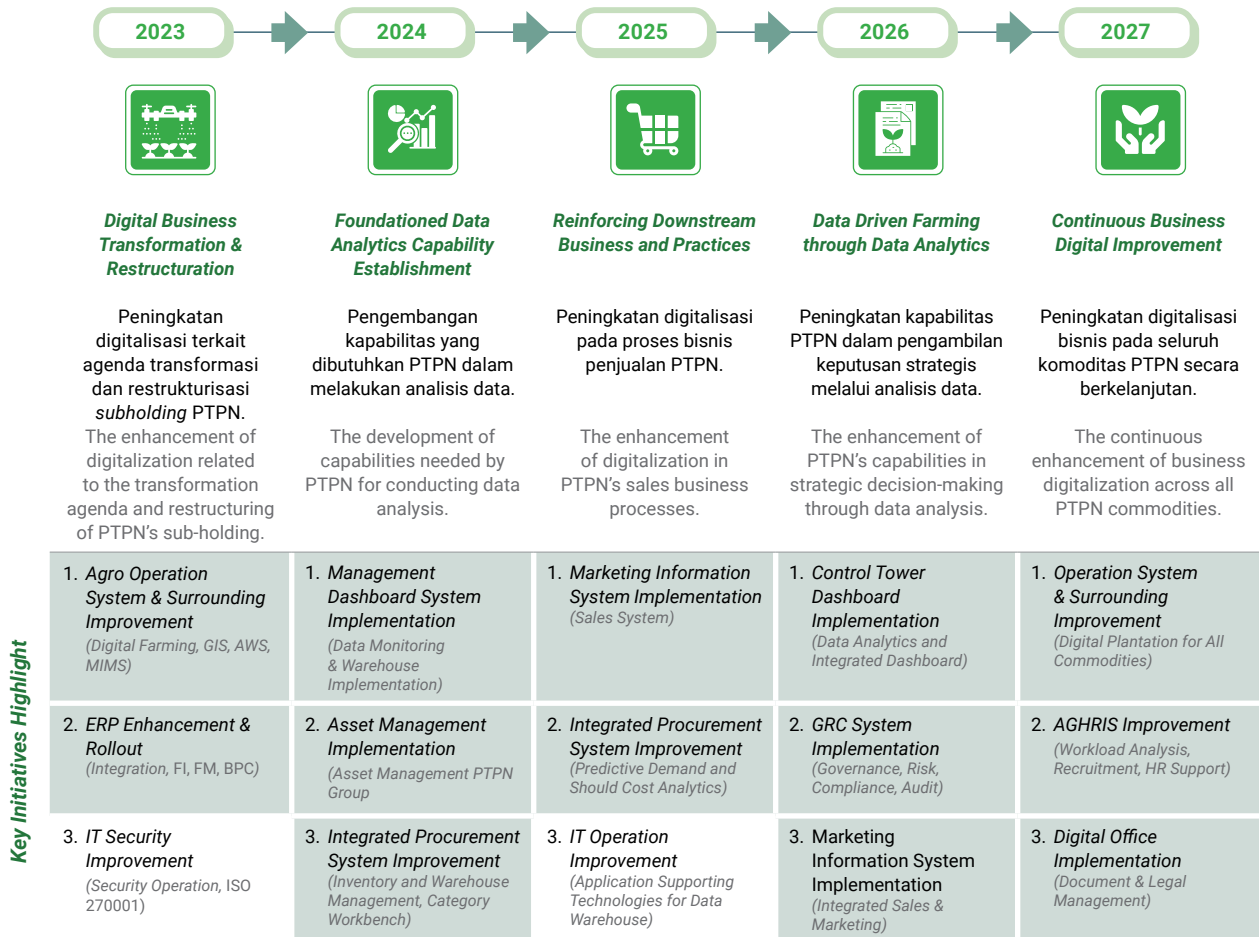
Perkebunan Nusantara's holding has developed the 2021-2025 Plantation Digitalization Roadmap as a guidance of the development of information technology. This plan aligns with the Ministry of SOEs' five main priorities, especially in Technology Leadership and Strategic House of Perkebunan Nusantara's Holding and its subsidiaries. It emphasizes System & Technology Enhancement, aiming to incorporate digitalization and technology into operations and business.

Relevant to this context, five annual themes have been formulated to support business productivity as part of PT Perkebunan Nusantara IV's digital transformation. These themes are designed to enhance business productivity in the company. Each theme focuses on an area expected to improve operational efficiency and effectiveness.

## Plantation Digital Roadmap (PDR)

Pelaksanaan PDR dirumuskan ke dalam 5 tema tahunan transformasi digital untuk menunjang produktivitas bisnis PTPN Group.

The implementation of the PDR is formulated into five annual digital transformation themes to support the business productivity of the PTPN Group.



Key Initiatives Highlight



### Perbaikan Berkelanjutan dan Kolaborasi yang Mendukung Continuous Improvement and Supportive Collaboration

- Pemantauan implementasi yang konsisten dengan evaluasi secara berkala  
Consistent implementation monitoring with regular evaluations
- Kolaborasi antara stakeholder untuk merealisasikan PDR melalui dukungan dari berbagai level manajemen  
Collaboration among stakeholders to realize the PDR through support from various levels of management

PTPN Digital Lighthouse 4.0 Strategy

## Inisiatif Digital

Pada tahun 2023, dilakukan inisiatif digital yang dilaksanakan sesuai dengan Plantation Digital Roadmap meliputi hal-hal berikut:

1. Implementasi ERP SAP PTPN IV di seluruh Region  
ERP (Enterprise Resource Planning) SAP adalah sistem perangkat lunak yang dirancang untuk membantu perusahaan mengelola berbagai proses bisnis dalam satu platform terpadu. ERP SAP menyediakan solusi untuk berbagai fungsi, seperti keuangan, produksi, distribusi, sumber daya manusia, dan manajemen rantai pasokan.

## Digital Initiatives

In 2023, digital initiatives have been implemented in line with the Plantation Digital Roadmap. The initiatives include:

1. Implementation of SAP PTPN IV ERP across Regions  
ERP (Enterprise Resource Planning) SAP is a software system designed to help companies manage various business processes in one integrated platform. It provides finance, production, distribution, human resources, and supply chain management solutions.

2. *Rollout Digital Farming Kelapa Sawit dan Karet*  
Digital Farming Sawit merupakan aplikasi pendukung dalam terlaksananya pencatatan dan pemanfaatan sumber daya dalam operasional panen. *Digital Farming* membantu perusahaan dalam penekanan biaya operasional melalui efisiensi penggunaan tenaga kerja, percepatan pengiriman data dan informasi, serta sebagai pendukung visi perusahaan menjadi perusahaan agribisnis kelas dunia.
  3. Implementasi Mill Indicator Monitoring System (MIMS)  
Mill Indicator Monitoring System (MIMS) merupakan sistem yang dirancang untuk memantau dan menganalisis berbagai indikator kinerja di pabrik, terutama dalam pengolahan kelapa sawit. Sistem ini bertujuan mengumpulkan data dari berbagai sumber dan menyediakan informasi real-time mengenai berbagai aspek operasional pabrik
  4. Akuisisi Foto Udara dan Data Spasial PTPN Group  
Pada tahun 2023, Tim Data Spasial PT Perkebunan Nusantara IV telah menyelesaikan pengambilan foto udara untuk 100% area komoditas kelapa sawit. Pengambilan foto udara tersebut juga didukung dengan aktivitas sosialisasi dan implementasi *Control Tower Dashboard (CTD)*, pendampingan pengurusan izin terbang, dan koordinasi aplikasi pendukung operasional di bidang *Geospatial Information System (GIS)*.
  5. Implementasi e-Office PTPN IV (Elemen)  
Pada tahap awal pasca integrasi, *Head Office* telah mengimplementasikan aplikasi Elemen dan secara bertahap akan di-*roll out* ke seluruh regional.
2. Rollout of Digital Farming for Oil Palm and Rubber  
Digital Farming Sawit is an application that supports the recording and utilizing of resources in harvest operations. *Digital Farming* helps the company in reducing operational costs through efficient use of labor and accelerated delivery of data and information and supports the company's vision to become a world-class agribusiness company.
  3. Implementation of Mill Indicator Monitoring System (MIMS)  
The Mill Indicator Monitoring System (MIMS) is designed to monitor and analyze various performance indicators in the factory, particularly in palm oil processing. This system aims to collect data from different sources and provide real-time information on factory operations.
  4. Acquisition of Aerial Photos and Spatial Data of PTPN Group  
In 2023, the PT Perkebunan Nusantara IV Spatial Data Team completed aerial photography for 100% of the palm oil commodity area. Socialization activities supported aerial photography, implementing the Control Tower Dashboard (CTD), assisting in processing flight permits, and coordinating operational support applications in the Geospatial Information System (GIS) field.
  5. Implementation of PTPN IV e-Office (Element)  
In the early stage following the integration, the Element application has been implemented at the Head Office and will be gradually rolled out to all regions after integration.

## Tingkat Kematangan TI

Sebagai upaya dalam mengantisipasi dampak perubahan yang dapat mempengaruhi organisasi, PT Perkebunan Nusantara IV telah melaksanakan Asesmen Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) yang diikuti oleh Regional III dengan hasil skor 2,40 skala 4.00 yang meliputi 5 pilar berupa Manajemen dan Organisasi, Orang dan Budaya, Produk dan Layanan, Teknologi, dan Operasi Perseroan.

Selain pengukuran INDI 4.0, PT Perkebunan Nusantara juga telah melakukan pengukuran IT *Maturity* di seluruh regional dengan hasil skor > 3.00 sesuai dengan target dalam RKAP 2023. Pengukuran IT *Maturity Level* juga dilakukan secara *self-assessment* sebagai tindak lanjut pemenuhan rekomendasi hasil pengukuran yang diselenggarakan oleh *Holding Perkebunan Nusantara*.

## IT Maturity Level

PT Perkebunan Nusantara IV has implemented the Indonesia Industry 4.0 Readiness Index (INDI 4.0) Assessment in an effort to anticipate the impact of changes that can affect the organization. Following this, Region III achieved a score of 2.40 out of 4.00 on the assessment, which includes five pillars: Management and Organization, People and Culture, Products and Services, Technology, and Company Operations.

In addition to the INDI 4.0 measurement, PT Perkebunan Nusantara has conducted IT Maturity measurements in all regions. The score obtained was greater than 3.00, in line with the 2023 RKAP target. The IT maturity level measurements are carried out through self-assessment as a follow-up to fulfill the recommendations of the measurement results conducted by Perkebunan Nusantara's holding.

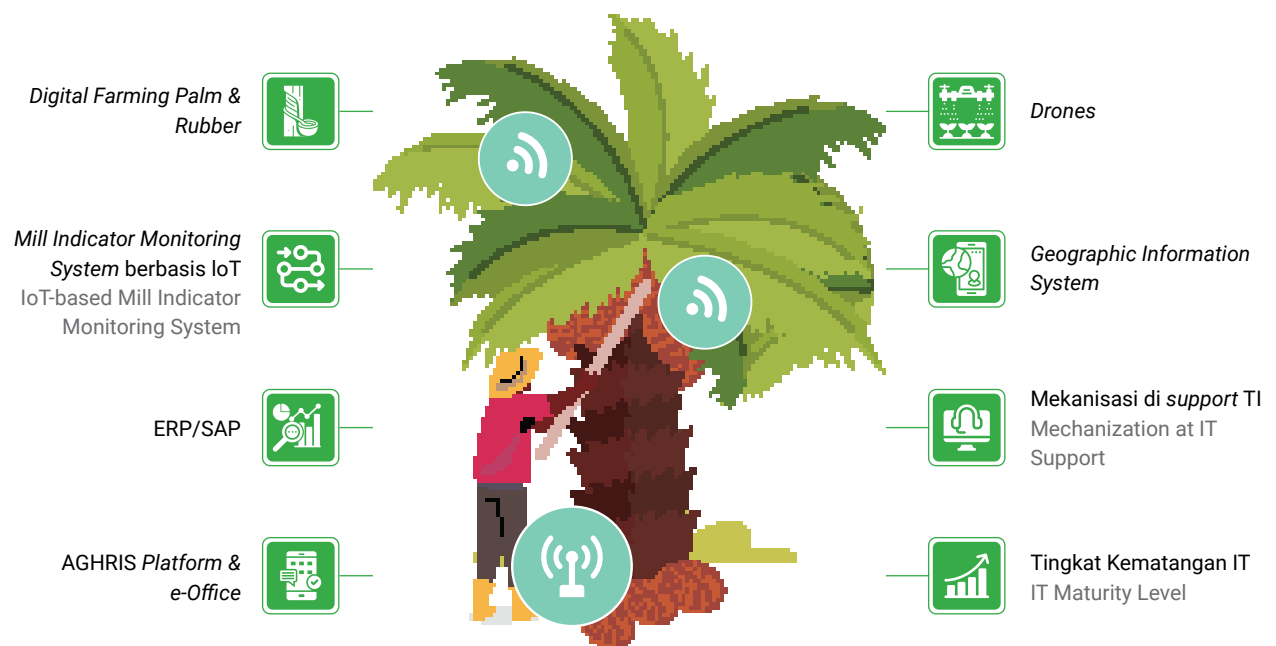
### Strategi Implementasi Digitalisasi PTPN IV

Secara *quick win* di fase awal pasca integrasi dilakukan *mapping & review* atas seluruh sumber daya teknologi informasi di setiap regional baik dari sisi SDM, infrastruktur TI & sistem aplikasi, dengan harapan dapat dilakukan kolaborasi, sinergi, efisiensi dan integrasi dari sistem digital yang telah ada. Model pengembangan Digitalisasi PTPN IV adalah dengan melakukan *rollout* aplikasi atau platform yang sebelumnya yang sudah ada di beberapa regional serta membangun digital inisiatif baru yang dapat digunakan di seluruh regional serta mengintegrasikan aplikasi atau platform yang telah ada sesuai dengan kebutuhan PTPN IV. Tujuan utama digitalisasi PTPN IV adalah peningkatan produktivitas melalui *monitoring* dan evaluasi berbasis digital dan efisiensi kerja sehingga PTPN IV dapat memastikan seluruh lini berjalan secara standar/*best practices* dan dapat dimonitor dan dievaluasi dengan baik dan mudah.

### PTPN IV Digitalization Implementation Strategy

During the early post-integration phase, we aim to efficiently map and review all information technology resources in each region, including HR, IT infrastructure, and application systems. Our goal is to achieve collaboration, synergy, efficiency, and integration of existing digital systems. The PTPN IV digitalization development model seeks to deploy existing applications or platforms present in multiple regions and create new digital initiatives that can be utilized across the region, as well as integrate existing applications or platforms based on PTPN IV's requirements. The primary objective of PTPN IV's digitalization is to enhance productivity through digital-based monitoring, evaluation, and work efficiency. This will ensure that all operations adhere to standard best practices and can be easily monitored and evaluated.

### Palm Oil Digitalization Project





# ANALISIS DAN PEMBAHASAN MANAJEMEN

Management Discussion and Analysis







# 05

Stabilitas politik dan ekonomi, serta potensi pasar yang besar, menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia. The country's political and economic stability, as well as its substantial market potential, make it an attractive destination for capital investment.



## TINJAUAN EKONOMI MAKRO

### » Macro-Economic Review

**Di tengah tekanan dan perlambatan ekonomi global, Indonesia berhasil mencatatkan pertumbuhan yang baik di level 5,05%. Walaupun sedikit menurun dari tahun 2022 yaitu 5,31%, namun Indonesia mampu membuktikan resiliensi dan persistensi yang patut diapresiasi karena berhasil melawan badai dan tantangan yang menghampiri.**

In the face of global economic pressures and a slowdown, Indonesia managed to achieve a solid growth rate of 5.05%. Although this was a slight decrease from 5.31% in 2022, Indonesia's resilience and persistence in overcoming challenges deserve appreciation as it successfully weathered storms and challenges.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia utamanya didorong oleh peningkatan konsumsi rumah tangga dan investasi. Konsumsi rumah tangga tercatat menjadi komponen terbesar dari Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia, dengan kontribusi sebesar 4,82% di 2023. Pencapaian ini didukung oleh kenaikan upah minimum dan bantuan sosial pemerintah. Di tengah tantangan ekonomi global dan inflasi yang tinggi, kondisi ini menunjukkan bahwa daya beli masyarakat Indonesia masih terjaga dan bergulir dengan baik.

Sementara itu, investasi tumbuh 4,40%, didukung oleh realisasi program pembangunan infrastruktur. Meskipun pertumbuhan investasi melambat dibandingkan tahun sebelumnya, hal ini tetap menunjukkan tingginya kepercayaan investor terhadap perekonomian Indonesia. Stabilitas politik dan ekonomi, serta potensi pasar yang besar, menjadi daya tarik bagi investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Ekspor dan impor juga mengalami peningkatan. Kenaikan ekspor didorong oleh permintaan global yang relatif masih kuat terhadap komoditas andalan Indonesia, seperti batu bara, minyak kelapa sawit, dan karet. Sementara itu, peningkatan impor didorong oleh kebutuhan bahan baku dan barang modal untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih mampu bersaing di pasar global.

Indonesia's economic growth is primarily driven by increased household consumption and investment. Household consumption accounts for the largest share of Indonesia's Gross Domestic Product (GDP), contributing 4.82% in 2023. This accomplishment is supported by an increase in the minimum wage and government social assistance. Despite global economic challenges and high inflation, this indicates that the purchasing power of the Indonesian people is still being maintained.

Meanwhile, investment grew by 4.40%, supported by the implementation of infrastructure development programs. Although investment growth slowed compared to the previous year, it still demonstrates high investor confidence in the Indonesian economy. The country's political and economic stability, as well as its substantial market potential, make it an attractive destination for capital investment.

Both exports and imports also saw an increase. The rise in exports was fueled by strong global demand for Indonesia's key commodities, such as coal, palm oil, and rubber. On the other hand, the increase in imports was driven by the necessity for raw materials and capital goods to support economic growth. This underscores Indonesia's ability to remain competitive in the global market.

# TINJAUAN INDUSTRI

## » Industry Review

Produksi CPO nasional tahun 2023 diperkirakan mencapai 50,07 juta ton atau naik sebesar 7,15% dari tahun 2022 yakni sebesar 46,73 juta ton. Sementara itu, produksi PKO nasional mencapai 4,77 juta ton atau naik 5,66% dari tahun 2022 yakni sebesar 4,52 juta ton.

Kenaikan ini diperkirakan disebabkan oleh sejumlah faktor, antara lain harga minyak sawit menjelang akhir tahun 2021 dan sepanjang tahun 2022 relatif tinggi, sehingga mendorong pelaku usaha untuk mengelola kebunnya dengan baik, termasuk pemberian pupuk. Faktor lainnya adalah adanya perluasan areal yang telah menghasilkan di tahun 2023. Hal ini sesuai dengan data Kementerian Pertanian dalam periode 2017-2020 terdapat perluasan 540 ribu hektar dan diperkirakan tahun 2023 akan ada penambahan areal TM (Tanaman Menghasilkan) seluas 260 ribu hektar. Selain itu, El Nino yang semula diperkirakan akan melanda Indonesia, ternyata tidak berpengaruh terhadap produksi tanaman kelapa sawit, karena melanda di sebagian besar Indonesia bagian selatan.

Konsumsi dalam negeri menunjukkan kenaikan dari 21,24 juta ton pada tahun 2022 menjadi 23,13 juta ton atau kenaikan sekitar 8,90%. Kenaikan ini dikontribusi oleh implementasi kebijakan Biodiesel (B35) yang secara efektif dilakukan pada Juli 2022, sehingga meningkatkan konsumsi minyak sawit sebesar 17,68% yakni dari 9,048 juta ton pada tahun 2022 menjadi 10,65 juta ton di tahun 2023. Dengan diimplementasikannya B35, konsumsi biodiesel selama 2023 telah melampaui konsumsi untuk pangan dalam negeri.

Ekspor produk CPO dan PKO mengalami penurunan 2,38% dari 33,15 juta ton di tahun 2022 menjadi 32,21 juta ton di tahun 2023. Sementara itu, ekspor untuk biodiesel dan oleokimia mengalami kenaikan masing-masing sebesar 29 ribu ton dan 395 ribu ton. Penurunan ekspor yang besar terjadi untuk tujuan EU yakni sebesar 11,6% dari 4,13 juta ton di tahun 2022 menjadi 3,70 juta ton di tahun 2023. Sebaliknya, ekspor untuk tujuan Afrika naik sebesar 33% dari 3.183 ribu ton menjadi 4.232 ribu ton, China naik 23% dari 6.280 ribu ton menjadi 7.736 ribu ton, India naik 8% dari 5.536 ribu ton menjadi 5.966 ribu ton dan Amerika Serikat naik 10% dari 2.276 ribu ton menjadi 2.512 ribu ton.

National CPO production in 2023 was estimated to reach 50.07 million tons, which was a 7.15% increase from the 2022 production of 46.73 million tons. Additionally, national PKO production is expected to reach 4.77 million tons, reflecting a 5.66% increase from the 2022 production of 4.52 million tons.

This increase was attributed to several factors, including the relatively high price of palm oil in 2021 and 2022, which has motivated businesses to manage their plantations efficiently by providing fertilizer. Furthermore, the expansion of producing areas in 2023 is expected to contribute to the increased production. Data from the Ministry of Agriculture shows that there was an expansion of 540 thousand hectares in the 2017-2020 period, and it is estimated that there will be an additional Mature Plants (TM) area of 260 thousand hectares in 2023. Additionally, the impact of El Nino, which was predicted to affect Indonesia, has been minimal due to its impact being mostly in southern Indonesia.

Domestic consumption is projected to increase from 21.24 million tons in 2022 to 23.13 million tons in 2023, representing an 8.90% increase. This increase is largely due to the effective implementation of the Biodiesel (B35) policy in July 2022, which has led to a 17.68% increase in palm oil consumption, from 9.048 million tons in 2022 to 10.65 million tons in 2023. As a result of the B35 policy, biodiesel consumption in 2023 is expected to surpass domestic food consumption.

Exports of CPO and PKO products decreased by 2.38% from 33.15 million tons in 2022 to 32.21 million tons in 2023. Conversely, exports of biodiesel and oleochemicals increased by 29 thousand tons and 395 thousand tons, respectively. Notably, there has been a significant decline in exports to EU destinations, with a decrease of 11.6% from 4.13 million tons in 2022 to 3.70 million tons in 2023. On the other hand, exports to African destinations have risen by 33%, to 4,232 thousand tons, exports to China have increased by 23% to 7,736 thousand tons, exports to India have risen by 8% to 5,966 thousand tons, and exports to the United States have risen by 10% to 2,512 thousand tons.



## TINJAUAN OPERASI PER SEGMENT USAHA

### » Operational Review by Business Segment

Saat ini, Perseroan mengklasifikasikan mengoperasikan segmen usaha kelapa sawit. Kinerja segmen diukur dan dievaluasi berdasarkan laba atau rugi operasi pada laporan keuangan konsolidasian. Perseroan senantiasa memantau hasil operasi dari unit usahanya secara terpisah agar dapat menentukan alokasi sumber daya dan melakukan penilaian kinerja.

#### Kinerja

Kelapa sawit merupakan segmen usaha terbesar Perseroan. Per 31 Desember 2023, Perseroan mengelola komoditas kelapa sawit seluas 169.361,71 ha, terbagi menjadi 3 (tiga) distrik dengan 29 unit usaha yang menyebar di 9 (sembilan) kabupaten, yaitu Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara, dan Mandailing Natal.

Seluruh unit usaha segmen usaha kelapa sawit dikelola dengan memperhatikan aspek konservasi lingkungan dan sosial untuk minyak sawit berkelanjutan, dan telah dilengkapi dengan sertifikat RSPO dan ISPO sehingga memiliki daya saing yang kuat di pasar global.

Pada tahun 2023, penjualan bersih segmen kelapa sawit yang ditujukan untuk pasar dalam negeri mencapai Rp26,82 triliun atau 96,23% dari total penjualan, sedangkan penjualan ekspor mencapai Rp1,05 triliun atau 3,77% dari total penjualan.

Realisasi produksi TBS Kebun Sendiri pada 2023 tercatat sebesar 7.515.795 ton, menurun sebesar 6,01% dari 7.996.312 ton pada 2022. Hal ini utamanya disebabkan oleh adanya El Nino, *dry spell* tegas akibat penurunan curah hujan (region IV & V), defisiensi unsur hara akibat aplikasi pemupukan beberapa tahun terakhir yang tidak selesai 100% (Regional 5), serta gangguan keamanan di beberapa wilayah.

Sementara itu, realisasi pembelian TBS tercatat sebesar 2.474.300 ton, meningkat sebesar 0,78% dari 2.455.125 ton pada 2022. Hal ini utamanya disebabkan oleh ketersediaan TBS di lapangan dan harga beli TBS yang lebih bersaing dengan kompetitor.

Capaian produksi Minyak Sawit dan Inti Sawit gabungan mengalami penurunan sebesar 75.940 ton atau 2,85% dari 2.660.901 ton pada 2022 menjadi 2.584.961 ton pada 2023. Realisasi produksi CPO dan PK sendiri pada 2023 menurun dari

The Company currently categorizes its operations under the palm oil business segment. Segment performance is evaluated based on operating profit or loss in the consolidated financial statements. The Company continuously monitors the operating results of its business units separately to allocate resources and assess performance.

#### Performance

Palm oil is the Company's largest business segment. As of December 31, 2023, the Company managed 169,361.71 hectares of palm oil commodities, divided into 3 (three) districts with 29 business units spread across nine regencies: Langkat, Serdang Bedagai, Simalungun, Asahan, Labuhan Batu Utara, Labuhan Batu, Padang Lawas, Batubara, and Mandailing Natal.

All business units in the palm oil business segment are managed with consideration for environmental and social conservation to promote sustainable palm oil, equipped with RSPO and ISPO certificates to ensure strong competitiveness in the global market.

In 2023, net sales of the palm oil segment for the domestic market totaled Rp26.82 trillion, accounting for 96.23% of total sales, while export sales reached Rp1.05 trillion, comprising 3.77% of total sales.

The actual Own Plantation FFB production in 2023 was 7,515,795 tons, a 6.01% decrease from 7,996,312 tons in 2022. This decline was mainly due to El Nino, severe dry spells resulting from reduced rainfall (in regions IV & V), nutrient deficiencies due to incomplete fertilization applications in recent years (Regional 5), and security disturbances in several areas.

Meanwhile, the recorded amount of FFB purchases was 2,474,300 tons, showing a 0.78% increase from 2,455,125 tons in 2022. This increase was due to the availability of FFB in the field and a more competitive purchase price compared to competitors.

The combined production of Palm Oil and Palm Kernel decreased by 75,940 tons or 2.85% from 2,660,901 tons in 2022 to 2,584,961 tons in 2023. The production of CPO and PK from own plantations in 2023 decreased by 71,743 tons



tahun 2022, masing-masing sebesar 71.743 ton atau 4,00% dan 16.148 ton atau 5,21%. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya jumlah bahan baku atau TBS dari kebun sendiri serta tidak tercapainya rendemen kebun sendiri baik CPO dan PK.

Perolehan produksi minyak sawit dan inti sawit dari pembelian TBS tahun 2023 berada di atas realisasi tahun 2022 masing-masing sebesar 8.189 ton atau 1,84% dan 3.763 ton atau 3,39%. Hal ini sejalan dengan meningkatnya realisasi pembelian TBS.

Pada tahun 2023, produktivitas TBS tercatat 22,23 ton/ha, menurun sebesar 1,90% dibandingkan 22,66 ton/ha di tahun 2022. Produktivitas minyak sawit menurun 2,81%, yaitu dari 5,34 ton/ha di tahun 2022 menjadi 5,19 ton/ha di tahun 2023, sedangkan produktivitas inti sawit menurun 3,30%, yaitu dari 0,91 ton/ha di tahun 2022 menjadi 0,88 ton/ha di tahun 2023.

Pengolahan industri hilir menghasilkan produk berupa PKO dan PKM. Pada tahun 2023, sebanyak 347.765 ton inti sawit yang diolah menjadi PKO dan PKM, meningkat 9,57%, dibandingkan 317.388 ton pada 2022. Produk yang dihasilkan berupa PKO sebanyak 138.527 ton, meningkat 7,22%, dibandingkan 129.195 pada tahun 2022, serta PKM sebanyak 188.178 ton, meningkat 10,90%, dibandingkan 169.688 ton pada 2022.

or 4.00% and 16,148 tons or 5.21%, respectively, compared to 2022. This decrease was due to the failure to achieve the required amount of raw materials or FFB from own plantations and the failure to achieve the yield of own plantations for both CPO and PK.

The production of palm oil and palm kernel from the purchased FFB in 2023 increased by 8,189 tons or 1.84% and 3,763 tons or 3.39%, respectively, compared to 2022. This increase aligns with the rising FFB purchases.

In 2023, the FFB productivity was 22.23 tons/ha, decreased by 1.90% compared to 22.66 tons/ha in 2022. Palm oil productivity also decreased by 2.81%, from 5.34 tons/ha in 2022 to 5.19 tons/ha in 2023, while palm kernel productivity decreased by 3.30%, from 0.91 tons/ha in 2022 to 0.88 tons/ha in 2023.

The downstream industrial processing produces products in the form of PKO and PKM. In 2023, 347,765 tons of palm kernel were processed into PKO and PKM, showing an increase by 9.57% compared to 317,388 tons in 2022. The products produced in the form of PKO were 138,527 tons, increasing by 7.22%, compared to 129,195 tons in 2022, while PKM were recorded at 188,178 tons, showing an increase by 10.90%, compared to 169,688 tons in 2022.



## Kapasitas Produksi

Pada tahun 2023, areal konsesi komoditas kelapa sawit Perseroan tercatat seluas 471.988 ha, terdiri atas Tanaman Menghasilkan seluas 338.018 ha, Tanaman Belum Menghasilkan seluas 35.134 ha, Tanaman Baru/Tanaman Ulang/Tanaman Tahun Ini seluas 88.820 ha, serta Tanaman Tahun Akan Datang seluas 10.016 ha.

Perseroan secara konsisten mempertahankan komposisi tanaman agar tetap ideal dengan melakukan *replanting* secara berkelanjutan dan terprogram. Adanya penambahan areal seluas 242 ha di tahun 2021 serta perbaikan terus-menerus baik *on-farm* maupun *off-farm* berdampak positif pada peningkatan kapasitas produksi secara berkelanjutan.

## Production Capacity

In 2023, the Company's oil palm concession area was recorded at 471,988 ha, consisting of 338,018 ha of Mature Plants, 35,134 ha of Non-Mature Plants, 88,820 ha of New Plants/Repeat Plants/Current Year Plants, and 10,016 ha of Next Year Plants.

The Company ensures the ideal plant composition by conducting sustainable and planned replanting. The addition of 242 ha in 2021, along with continuous on-farm and off-farm improvements, has positively impacted the sustainable increase in production capacity.

Uraian Description	2023		2022		Δ 2023-2022 (%)
	Luasan (ha) Area (ha)	Komposisi (%) Composition	Luasan (ha) Area (ha)	Komposisi (%) Composition	
<b>Tanaman Menghasilkan</b> Mature Plantation					
Tanaman Renta Old-Growing Plants	11.494,11	2,12	1.154,00	0,90	996,02
Tanaman Tua Old Plants	47.025,06	8,67	7.829,00	6,07	600,65
Tanaman Dewasa Mature Plants	188.737,93	34,80	44.926,09	34,85	420,11
Tanaman Remaja Prime Plant	139.575,80	25,74	38.354,31	29,75	363,91
Tanaman Muda Young Plants	80.915,60	14,92	22.896,00	17,76	353,40
Jumlah TM Total TM	467.748,50	86,25	115.159,40	89,33	406,17
TBM 1-3 Tahun TBM 1-3 Years	44.571,64	8,22	13.757,00	10,67	323,99
TB + TU + TK	30.009,49	5,53	0,00	0,00	N/A
<b>Jumlah Tanaman Kelapa Sawit</b> Number of Oil Palm Plants	<b>542.329,63</b>	<b>100,00</b>	<b>128.916,40</b>	<b>100,00</b>	<b>420,68</b>

Perseroan memiliki 56 unit PKS dengan kapasitas total 2.500 ton TBS per jam. Untuk meningkatkan nilai tambah, Perseroan juga mengelola industri hilir kelapa sawit berupa 3 (tiga) unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS), yaitu PPIS Sei Mangkei berkapasitas 400 ton per hari, PPIS Pabatu berkapasitas 400 ton per hari, dan PPIS Timur berkapasitas 25 ton per hari dengan produk akhir PKO dan PKM.

Rendemen minyak sawit kebun sendiri tahun 2023 mencapai 23,17%, lebih rendah dari 23,20% pada tahun 2022, sedangkan rendemen inti sawit kebun sendiri 2023 mencapai 3,95%, lebih rendah dari 4,01% pada 2022. Hal ini terutama disebabkan oleh masih terdapatnya TBS mentah, belum tercapainya brondolan 5% di pabrik, serta masih terdapat losis di pabrik.

The Company has 56 PKS units with a total capacity of 2,500 tons of FFB per hour. To improve added value, the Company manages the downstream palm oil industry with 3 (three) Palm Kernel Processing Plants (PPIS): PPIS Sei Mangkei with a capacity of 400 tons per day, PPIS Pabatu with a capacity of 400 tons per day, and PPIS Timur with a capacity of 25 tons per day. The final products of these plants are PKO and PKM.

The yield of palm oil from its own plantation in 2023 was 23.17%, a slight decrease from 23.20% in 2022. Similarly, the yield of palm kernel from its own plantation in 2023 was 3.95%, down from 4.01% in 2022. These decreases were mainly attributed to the presence of raw FFB, failure to achieve 5% loose fruit in the factory, and losses in the factory.

## Penjualan

Pada tahun 2023, sekitar 95,45% produk komoditas kelapa sawit dipusatkan untuk memenuhi kebutuhan lokal, sedangkan sisanya sebesar 4,55% diekspor. Kuantum penjualan segmen kelapa sawit tahun 2023 mencapai 2.798.699 ton, lebih rendah 3,75% dari 2.907.889 ton pada 2022.

Secara keseluruhan, segmen kelapa sawit mencatatkan penjualan bersih sebesar Rp27,87 triliun, menurun 13,36% dibandingkan Rp32,17 triliun pada 2022. Penurunan ini terutama disebabkan oleh turunnya harga CPO. Rerata harga jual komoditas kelapa sawit tahun 2023 tercatat sebesar Rp11.052 sedangkan harga jual tahun 2022 mencapai Rp12.536.

### Profitabilitas Profitability

dalam Rp penuh  
in full Rp

Uraian Description	2023	2022	Δ 2023-2022 (%)
<b>Nilai Penjualan</b> Sales Value			
Ekspor Export	1.411.049	1.244.500	1.027,66
Lokal Local	29.359.253	32.576.234	210,30
Total	30.770.302	33.820.734	220,97
Laba (Rugi) Kotor Gross Profit (Loss)	9.404.992	4.841.932	94,24
Laba (Rugi) Usaha Operating Profit (Loss)	5.579.192	3.050.084	82,92
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	4.364.078	2.942.695	48,30

## Analisis Kinerja dan Prospek Usaha

Realisasi total kuantum penjualan produk kelapa sawit pada tahun 2023 berada di bawah RKAP Agregasi dan realisasi 2022 (disajikan kembali) masing-masing sebesar 458.468 ton atau 14,08% dan 109.190 ton atau 3,75%. Hal ini disebabkan oleh tidak tercapainya realisasi produksi produk kelapa sawit pada tahun 2023 akibat dari tidak tercapainya produksi TBS dari RKAP Agregasi dan realisasi tahun 2022 (disajikan kembali).

Realisasi nilai penjualan produk kelapa sawit pada tahun 2023 berada di bawah RKAP Agregasi dan realisasi tahun 2022 (disajikan kembali), masing-masing sebesar Rp4.904.883 juta atau 14,96% dan Rp4.298.406 juta atau 13,36%. Hal tersebut disebabkan oleh penurunan harga jual rata-rata produk kelapa sawit yang berada di bawah RKAP Agregasi dan realisasi tahun 2022 (disajikan kembali).

## Sales

In 2023, approximately 95.45% of palm oil commodity products were focused on meeting local demand, while the remaining 4.55% were exported. The sales volume of the palm oil segment in 2023 reached 2,798,699 tons, a 3.75% decrease from 2,907,889 tons in 2022.

In 2023, the palm oil segment generated net sales of Rp27.87 trillion, a 13.36% decrease from Rp32.17 trillion in 2022. This drop was primarily due to the decline in CPO prices. The average selling price of palm oil commodities in 2023 was Rp11,052, compared to Rp12,536 in 2022.

## Performance Analysis and Business Prospects

The total quantum realization of palm oil product sales in 2023 was below the Aggregation RKAP and the realization of 2022 (restated) by 458,468 tons or 14.08% and 109,190 tons or 3.75%, respectively. This was due to the inability to realize palm oil product production in 2023 due to the inability to attain FFB production from the Aggregation RKAP and the realization of 2022 (restated).

The sales value of palm oil products in 2023 was below the Aggregation RKAP and the realization of 2022 (restated) by Rp4,904,883 million or 14.96% and Rp4,298,406 million or 13.36%, respectively. This was due to a decrease in the average selling price of palm oil products, which was below the Aggregation RKAP and the realization in 2022 (restated).



Realisasi kuantum produksi TBS kebun sendiri pada tahun 2023 berada di bawah RKAP Agregasi dan realisasi tahun 2022 (disajikan kembali) masing-masing sebesar 737.834 ton atau 8,85% dan 395.894 ton atau 4,95%. Hal ini disebabkan oleh penurunan rata-rata berat tandan yang disebabkan oleh fenomena El Nino selama tahun 2023 sehingga memengaruhi pertumbuhan buah kelapa sawit serta menyebabkan buah kelapa sawit menjadi lebih kering dikarenakan cuaca cenderung lebih panas.

Realisasi kuantum produksi minyak sawit dan inti sawit yang berasal dari produk kebun sendiri pada tahun 2023 berada di bawah RKAP Agregasi masing-masing sebesar 190.893 ton atau 9,79% dan 37.659 ton atau 11,15%. Hal ini sejalan dengan tidak tercapainya realisasi produksi TBS kebun sendiri.

Selain itu, realisasi kuantum produksi minyak sawit dan inti sawit kebun sendiri tahun 2023 juga berada di bawah realisasi tahun 2022 (disajikan kembali) masing-masing sebesar 35.377 ton atau 1,97% dan 10.144 ton atau 3,27%, yang disebabkan oleh penurunan realisasi kuantum produksi TBS tahun 2023 sebesar 395.894 ton atau 4,95% jika dibandingkan dengan realisasi kuantum produksi tahun 2022 (disajikan kembali), disebabkan oleh fenomena El Nino selama tahun 2023 sehingga mempengaruhi pertumbuhan buah kelapa sawit serta menyebabkan buah kelapa sawit menjadi lebih kering dikarenakan cuaca cenderung lebih panas.

Realisasi produksi karet kering yang berasal dari kebun sendiri pada tahun 2023 berada di bawah RKAP Agregasi dan realisasi tahun 2022 (disajikan kembali) masing-masing sebesar 4.526 ton atau 11,48% dan 4.259 ton atau 10,88%. Hal ini terutama disebabkan oleh kekurangan tenaga penyadap yang disediakan pihak ketiga dan *recovery tap* sebagai pengganti hari sadap akibat hujan belum dilaksanakan secara optimal.

Realisasi produksi PKO pada tahun 2023 berada di bawah RKAP Agregasi sebesar 222.114 ton atau 61,76%. Hal ini disebabkan oleh realisasi inti sawit yang diolah tahun 2023 berada di bawah RKAP Agregasi akibat dari tidak tercapainya target produksi TBS dan tidak tercapainya target rendemen jika dibandingkan dengan RKAP Agregasi. Realisasi produksi PKO berada di atas realisasi tahun 2022 (disajikan kembali) sebesar 9.146 ton atau 7,13% disebabkan oleh peningkatan inti sawit yang diolah sebesar 29.935 ton atau 9,49% pada tahun 2023 jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 (disajikan kembali).

Realisasi produksi PKM tahun 2023 berada di bawah RKAP Agregasi sebesar 278.332 ton atau 59,82%. Hal ini disebabkan oleh realisasi inti sawit yang diolah tahun 2023 berada di bawah RKAP Agregasi akibat dari tidak tercapainya target produksi TBS dan tidak tercapainya target rendemen jika dibandingkan dengan RKAP Agregasi. Namun, realisasi produksi PKM tahun 2023 berada di atas realisasi tahun 2022 (disajikan kembali) sebesar 18.319 ton atau 10,86%. Hal ini

The quantum of FFB production from own plantations in 2023 was below the Aggregation RKAP and the realization in 2022 (restated) by 737,834 tons or 8.85% and 395,894 tons or 4.95%, respectively. This was due to a decrease in the average weight of bunches caused by the El Nino phenomenon during 2023, which affected the growth of oil palm fruit and caused the oil palm fruit to become drier because the weather tended to be hotter.

The realization of the quantum of palm oil and palm kernel production from own plantation products in 2023 was below the Aggregation RKAP by 190,893 tons or 9.79% and 37,659 tons or 11.15%, respectively. This aligns with the failure to realize FFB production from its plantations.

In addition, the realization of the quantum of palm oil and palm kernel production from own plantations in 2023 is also below the realization in 2022 (restated) of 35,377 tons or 1.97% and 10,144 tons or 3.27%, respectively, which is caused by a decrease in the realization of FFB production quantum in 2023 by 395,894 tons or 4.95% when compared to the realization of production quantum in 2022 (restated), caused by the El Nino phenomenon during 2023 which affected the growth of oil palm fruit and caused oil palm fruit to become drier because the weather tends to be hotter.

The realization of dry rubber production from own plantations in 2023 was below the Aggregation RKAP, and the realization in 2022 (restated) was 4,526 tons or 11.48% and 4,259 tons or 10.88%, respectively. This was mainly due to the shortage of tappers provided by third parties and recovery taps as a substitute for tapping days due to rain not being implemented optimally.

The realization of PKO production in 2023 was below the Aggregation RKAP by 222,114 tons or 61.76%. This was because the palm kernel processed in 2023 was below the Aggregation RKAP due to the failure to achieve the FFB production target and the inability to reach the yield target compared to the Aggregation RKAP. The realization of PKO production is above the realization in 2022 (restated) by 9,146 tons or 7.13% due to an increase in processed palm kernel by 29,935 tons or 9.49% in 2023 when compared to the realization in 2022 (restated).

The realization of PKM production in 2023 is below the Aggregation RKAP by 278,332 tons or 59.82%. This is because the realization of processed palm kernel in 2023 is below the Aggregation RKAP due to the failure to achieve the FFB production target and the inability to reach the yield target compared to the Aggregation RKAP. However, the realization of PKM production in 2023 is above the realization in 2022 (restated) by 18,319 tons or 10.86%. This is due to the





disebabkan oleh realisasi inti sawit yang diolah pada tahun 2023 berada di atas realisasi tahun 2022 (disajikan kembali) sebesar 29.935 ton atau 9,49%.

Realisasi pembelian TBS pada tahun 2023 berada di bawah RKAP Agregasi sebesar 499.558 ton atau 16,24%. Hal ini terutama disebabkan oleh persaingan harga beli dengan perusahaan lainnya. Namun, realisasi pembelian TBS pada tahun 2023 mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 (disajikan kembali) sebesar 122.328 ton atau 4,98%. Hal ini dikarenakan untuk memenuhi persediaan bahan baku yang akan diproduksi akibat menurunnya TBS yang dipanen dari kebun sendiri pada tahun 2023 karena adanya fenomena El Nino.

Realisasi produksi minyak sawit dan inti sawit dari pembelian TBS berada di bawah RKAP Agregasi masing-masing sebesar 97.489 ton atau 17,05% dan 9.092 ton atau 7,13%. Hal ini disebabkan oleh realisasi pembelian TBS di tahun 2023 yang berada di bawah RKAP Agregasi. Realisasi produksi minyak sawit dan inti sawit dari pembelian TBS di tahun 2023 berada di atas realisasi tahun 2022 (disajikan kembali) masing-masing sebesar 29.344 ton atau 6,59% dan 3.501 ton atau 3,05%. Peningkatan ini sejalan dengan peningkatan kuantum pembelian TBS dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 (disajikan kembali).

realization of palm kernel processed in 2023 being above the realization in 2022 (restated) of 29,935 tons or 9.49%.

FFB purchases in 2023 were realized below the Aggregation RKAP of 499,558 tons or 16.24%. This was mainly due to competition in purchase prices with other companies. However, the realization of FFB purchases in 2023 increased compared to the realization in 2022 (restated) of 122,328 tons or 4.98%. This is due to the need to meet the supply of raw materials to be produced due to the decline in FFB harvested from our plantations in 2023 due to the El Nino phenomenon.

The realization of palm oil and palm kernel production from FFB purchases was below the Aggregation RKAP by 97,489 tons or 17.05% and 9,092 tons or 7.13%, respectively. This was due to realizing FFB purchases in 2023, below the Aggregation RKAP. The realization of palm oil and palm kernel production from FFB purchases in 2023 was above 2022 (restated) by 29,344 tons or 6.59% and 3,501 tons or 3.05%, respectively. This increase aligns with the rise in the quantum of FFB purchases compared to the realization in 2022 (restated).



# TINJAUAN KINERJA KEUANGAN

## » Financial Performance Review

Tinjauan kinerja keuangan di bawah ini mengacu pada Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan dan Entitas Anak (secara konsolidatif disebut sebagai "Grup") untuk periode 31 Desember 2023 dan 2022 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Purwantono, Sungkoro & Surja, pada 31 Mei 2024, dan memperoleh opini menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

The financial performance review below pertains to the Consolidated Financial Statements of the Company and its Subsidiaries (collectively referred to as the "Group") for the period ending on December 31, 2023 and 2022. These statements were audited by the Public Accounting Firm Purwantono, Sungkoro & Surja on May 31, 2024 and received unqualified opinion in all material aspects, in accordance with Financial Accounting Standards in Indonesia.

## Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian Consolidated Statement of Financial Position

### Jumlah Aset

Secara keseluruhan, jumlah aset Perseroan meningkat sebesar 4,79% dari Rp59,80 triliun pada 2022 menjadi Rp62,66 triliun pada 2023, yang utamanya disebabkan oleh meningkatnya investasi dan kenaikan penilaian revaluasi tanah selama tahun 2023.

### Total Assets

The Company's total assets increased by 4.79% from Rp59.80 trillion in 2022 to Rp62.66 trillion in 2023. This increase was primarily due to higher investments and increased land revaluation during 2023.

### Aset Lancar

#### Current Assets

Uraian Description	2023		2022*		Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalent	3.193.808	27,62	6.154.237	37,03	5.054.025	(30,41)
Kas dan Deposito yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash and Time Deposit	361.312	3,12	184.468	1,11	176.844	95,87
Piutang Usaha Trade Receivables						
- Pihak Ketiga Third Parties	140.462	1,21	197.038	1,19	(56.576)	(28,71)
- Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	2.506.299	21,67	2.176.731	13,10	329.569	15,14
Persediaan Total Liabilities	1.854.115	16,03	3.941.406	23,72	(2.087.291)	(52,96)
Aset Biologis Biological Assets	445.234	3,85	454.814	2,74	(9.580)	(2,11)
Piutang Lain-lain Other Receivables						
- Pihak Ketiga Third Parties	194.554	1,68	385.448	2,32	(190.894)	(49,53)
- Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	758.911	6,56	2.246.540	13,52	(1.487.629)	(66,22)
Bagian Lancar - Piutang Lain-lain Jangka Panjang Current Portion - Other Long-term Receivables	562.009	4,86	12.917	0,08	549.092	4.251,06
Pajak Dibayar Dimuka Prepaid Taxes	1.320.765	11,42	797.128	4,80	523.637	65,69
Aset Lancar Lainnya Other Current Assets	227.625	1,97	68.392	0,41	159.233	232,82
<b>Jumlah Aset Lancar</b> <b>Total Current Assets</b>	<b>11.565.093</b>	<b>100,00</b>	<b>16.619.118</b>	<b>100,00</b>	<b>(5.054.025)</b>	<b>(30,41)</b>

\*) disajikan kembali/restated

### Aset Lancar

Pada 2023, Perseroan membukukan aset lancar sebesar Rp11,57 triliun, menurun sebesar 30,41% dari Rp16,62 triliun pada 2022.

### Kas dan Setara Kas

Posisi kas dan setara kas Perseroan pada 2023 tercatat sebesar Rp11,57 triliun, menurun sebesar 30,41% dari Rp16,62 triliun pada 2022. Penurunan ini terjadi karena penggunaan kas untuk aktivitas investasi pada aset tetap dan tanaman selama tahun berjalan.

### Kas dan Deposito yang Dibatasi Penggunaannya

Pada 2023, posisi kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya tercatat sebesar Rp361,31 miliar, meningkat sebesar 95,87% dari Rp184,47 miliar pada 2022. Kenaikan ini terjadi karena pembayaran utang perbankan.

### Piutang Usaha

Piutang usaha pada 2023 tercatat sebesar Rp2,65 triliun, meningkat sebesar 11,50% dari Rp2,37 triliun pada 2022. Kenaikan ini terjadi karena peningkatan volume penjualan.

### Persediaan

Nilai persediaan pada akhir 2023 tercatat sebesar Rp1,85 triliun, menurun sebesar 52,96% dari Rp3,94 triliun pada 2022. Penurunan ini terjadi karena tidak tercapainya produksi pada tahun berjalan.

### Aset Biologis

Jumlah aset biologis pada 2023 tercatat sebesar Rp445,23 miliar, menurun sebesar 2,11% dari Rp454,81 miliar pada 2022. Penurunan ini terjadi karena belum maksimalnya kegiatan pemeliharaan Tanaman Belum Menghasilkan (TBM) yang sudah dianggarkan. Sebaliknya, realisasi investasi tanaman pada tahun 2023 berada di atas realisasi tahun 2022 (disajikan kembali) sebesar Rp691.558 juta atau 76,53%. Hal ini disebabkan oleh aktivitas pemeliharaan TBM dan tambahan areal tanaman kelapa sawit yang di-replanting tahun 2023.

### Piutang Lain-Lain

Piutang lain-lain pada 2023 tercatat sebesar Rp953,47 miliar, menurun sebesar 63,77% dari Rp2.631,99 miliar pada 2022. Penurunan ini terjadi karena realisasi pelunasan piutang.

### Bagian Lancar – Piutang Lain-lain Jangka Panjang

Bagian lancar – piutang lain-lain jangka panjang tercatat meningkat sebesar 4.251,06% dari Rp12,92 miliar pada 2022 menjadi Rp562,01 miliar pada 2023 yang disebabkan oleh adanya realisasi pemberian pinjaman piutang jangka panjang pihak berelasi (PTPN Grup) sebagai akibat dari adanya *repackaging loan* dengan HIMBARA Plus (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).

### Pajak Dibayar di Muka

Pajak dibayar di muka tercatat meningkat sebesar 65,69% dari Rp797,13 miliar pada 2022 menjadi Rp1.320,77 miliar pada 2023 yang disebabkan oleh peningkatan pembayaran PPN yang merupakan realisasi peningkatan CAPEX Perseroan.

### Current Assets

In 2023, the Company recorded current assets of Rp11.57 trillion, marking a decrease of 30.41% from Rp16.62 trillion in 2022.

### Cash and Cash Equivalents

The Company's cash and cash equivalents position in 2023 was recorded at Rp11.57 trillion, reflecting a decrease of 30.41% from Rp16.62 trillion in 2022. This decrease resulted from cash used for investment activities in fixed assets and plants during the current year.

### Restricted Cash and Deposits

In 2023, restricted cash and deposits were recorded at Rp361.31 billion, increasing 95.87% from Rp184.47 billion in 2022. This increase was due to the payment of bank debt.

### Accounts Receivables

Accounts receivables in 2023 were recorded at Rp2.65 trillion, indicating an increase of 11.50% from Rp2.37 trillion in 2022. This increase can be attributed to a rise in sales volume.

### Inventories

The value of inventories at the end of 2023 was recorded at Rp1.85 trillion, showing a decrease of 52.96% from Rp3.94 trillion in 2022. This decrease was due to the failure to achieve production in the current year.

### Biological Assets

The total biological assets in 2023 were recorded at Rp445.23 billion, a decrease of 2.11% from Rp454.81 billion in 2022. This decrease was due to suboptimal maintenance activities of Immature Plants (TBM) that were budgeted. However, plant investment in 2023 exceeded the 2022 realization by Rp691,558 million, marking a 76.53% increase. This was attributed to TBM maintenance activities and additional replanting of oil palm plantation areas in 2023.

### Other Receivables

Other receivables in 2023 were recorded at Rp953.47 billion, down 63.77% from Rp2,631.99 billion in 2022. This decrease was due to the settlement of receivables.

### Current Portion – Other Long-Term Receivables

The current portion of other long-term receivables increased significantly by 4,251.06% from Rp12.92 billion in 2022 to Rp562.01 billion in 2023. This substantial increase was a result of the realization of long-term receivables loans from related parties (PTPN Group) following the repackaging loan with HIMBARA Plus (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, and Indonesian Export Financing Institution).

### Prepaid Taxes

Prepaid taxes increased by 65.69% from Rp797.13 billion in 2022 to Rp1,320.77 billion in 2023 due to higher VAT payments, reflecting the Company's CAPEX increase.



### Aset Lancar Lainnya

Per akhir 2023, aset lancar lainnya tercatat meningkat sebesar 232,82% dari Rp68,39 miliar pada 2022 menjadi Rp227,62 miliar pada 2023 yang disebabkan oleh aset KSO.

### Other Current Assets

As of the end of 2023, other current assets increased by 232.82% from Rp68.39 billion in 2022 to Rp227.62 billion in 2023 due to KSO assets.

### Aset Tidak Lancar

#### Non-Current Assets

Uraian Description	2023		2022*		Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
Piutang Lain-Lain Jangka Panjang Other Long-Term Receivables	9.080.878	17,77	3.798.734	8,80	5.282.145	139,05
Piutang Plasma Plasma Receivables	169.902	0,33	223.803	0,52	(53.901)	(24,08)
Investasi Saham Investments in Shares of Stock	403.571	0,79	335.625	0,78	67.946	20,24
Aset Pajak Tangguhan Deferred Tax Assets	340.873	0,67	460.849	1,07	(119.976)	(26,03)
Aset Hak Guna Right-of-Use Assets	146.936	0,29	106.333	0,25	40.603	38,19
Aset Tetap Fixed Assets	39.465.465	77,24	37.107.559	85,94	2.357.906	6,35
Properti Investasi Investment Property	439.725	0,86	426.491	0,99	13.234	3,10
Beban Tangguhan Hak atas Tanah Deferred Charges on Land Rights	327.965	0,64	291.470	0,68	36.494	12,52
Piutang Tagihan Pajak Claim for Tax Refund	627.670	1,23	344.540	0,80	283.130	82,18
Aset Tidak Lancar Lainnya Other Non-Current Assets	93.708	0,18	85.219	0,20	8.489	9,96
<b>Jumlah Aset Tidak Lancar Total Non-Current Assets</b>	<b>51.096.694</b>	<b>100,00</b>	<b>43.180.623</b>	<b>100,00</b>	<b>7.916.071</b>	<b>18,33</b>

\*) disajikan kembali/restated

### Aset Tidak Lancar

Jumlah aset tidak lancar Perseroan pada 2023 tercatat sebesar Rp51,10 triliun, meningkat sebesar 18,33% dari tahun 2022 yaitu Rp43,18 miliar. Kenaikan ini terjadi karena meningkatnya pembelian mesin dan instalasi untuk meningkatkan produksi Perseroan.

### Non-Current Assets

The Company's total non-current assets in 2023 amounted to Rp51.10 trillion, marking an 18.33% increase from the 2022 figure of Rp43.18 billion. This rise was primarily due to increased investments in machinery and installations to boost the Company's production capacity.

### Jumlah Liabilitas

Jumlah liabilitas Perseroan terbukukan sebesar Rp41,47 triliun per 31 Desember 2023, menurun sebesar 1,25% dari Rp41,99 triliun pada 2022.

### Total Liabilities

As of December 31, 2023, the Company's total liabilities stood at Rp41.47 trillion, reflecting a 1.25% decrease from the 2022 total of Rp41.99 trillion.

### Liabilitas Jangka Pendek

#### Current Liabilities

Uraian Description	2023		2022*		Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
Utang Bank Jangka Pendek Short-Term Bank Loans	7.500	0,07	2.000	0,02	5.500	275,00
Utang Usaha Trade Payables						
- Pihak Ketiga Third Parties	3.185.671	27,94	2.689.981	25,05	495.690	18,43
- Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	158.802	1,39	99.014	1,06	59.788	60,38

Uraian Description	2023		2022*		Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
Utang Lain-Lain Other Payables						
- Pihak Ketiga Third Parties	119.499	1,05	132.375	1,23	(12.876)	(9,73)
- Pihak-Pihak Berelasi Related Parties	655.176	5,75	392.578	3,66	262.598	66,89
Liabilitas Kontrak Contract Liabilities	767.496	6,73	1.129.750	10,52	(362.254)	(32,06)
Utang Pajak Taxes Payable	127.478	1,12	400.255	3,73	(272.777)	(68,15)
Akrual Accrued	1.013.229	8,89	2.108.550	19,63	(1.095.321)	(51,95)
Bagian Lancar Utang Bank Jangka Panjang Current Maturities of Long-term Bank Loans	4.202.236	36,86	2.844.158	26,48	1.358.078	47,75
Bagian Lancar Liabilitas Sewa Current Maturities of Lease Liabilities	64.618	0,57	67.146	0,63	(2.529)	(3,77)
Bagian Lancar Pendapatan Diterima Dimuka Current Maturities of Unearned Revenue	2.250	0,02	2.050	0,02	199	9,74
Bagian Lancar Liabilitas Imbalan Kerja Current Maturities of Employee Benefits Liabilities	1.096.696	9,621	871.593	8,12	225.103	25,83
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Pendek Total Current Liabilities</b>	<b>11.400.652</b>	<b>100,00</b>	<b>10.739.451</b>	<b>100,00</b>	<b>661.200</b>	<b>6,16</b>

\*) disajikan kembali/restated

### Liabilitas Jangka Pendek

Perseroan memiliki liabilitas jangka pendek sebesar Rp11,40 triliun per 31 Desember 2023, meningkat sebesar 6,16% dari Rp10,74 triliun pada 2022. Kenaikan ini terjadi karena porsi jangka pendek naiknya nilai utang bank yang disebabkan oleh adanya *repackaging loan* dengan HIMBARA Plus (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia).

### Short-Term Liabilities

As of December 31, 2023, the Company's short-term liabilities totaled Rp11.40 trillion, marking a 6.16% increase from the 2022 amount of Rp10.74 trillion. This increase was driven by the short-term portion of a rise in bank debt following a loan restructuring with HIMBARA Plus (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia, and the Indonesian Export Financing Institution).

### Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities

Uraian Description	2023		2022*		Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
Liabilitas Sewa Jangka Panjang Long-Term Lease Liabilities	85.326	0,28	49.554	0,16	35.772	72,19
Utang Bank Jangka Panjang Long-term Bank Loans	22.513.924	74,88	23.046.721	73,74	(532.797)	(2,31)
Pendapatan Diterima Dimuka Jangka Panjang Unearned Revenue	1.326	0,00	4.975	0,02	(3.650)	(73,36)
Utang Lain-Lain Jangka Panjang Other Long-Term Debts	899.480	2,99	711.360	9,13	188.120	26,45
Liabilitas Pajak Tangguhan Deferred Tax Liabilities	33.257	0,11	31.258	0,10	1.999	6,40
Liabilitas Imbalan Kerja Employee Benefits Liabilities	7.433.761	24,72	8.120.579	25,98	(686.818)	(8,46)
<b>Jumlah Liabilitas Jangka Panjang Total Non-Current Liabilities</b>	<b>30.067.594</b>	<b>100,00</b>	<b>31.253.087</b>	<b>100,00</b>	<b>(1.185.493)</b>	<b>(3,79)</b>

\*) disajikan kembali/restated



## Liabilitas Jangka Panjang

Perseroan membukukan liabilitas jangka panjang sebesar Rp30,07 triliun per 31 Desember 2023, menurun sebesar 3,79% atau Rp1,19 triliun dari tahun 2022 yakni Rp31,25 triliun.

## Long-Term Liabilities

The Company's long-term liabilities amounted to Rp30.07 trillion as of December 31, 2023, a decrease of 3.79% or Rp1.19 trillion from the 2022 total of Rp31.25 trillion.

## Ekuitas Equity

Uraian Description	2023	2022*	Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(juta Rp) (million Rp)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Equity Attributable to Owners of the Parent Entity				
Modal Saham - Nilai Nominal Rp1.000.000 per Saham Share Capital - Par Value Rp1,000,000 per Share				
Modal Dasar - 11.700.000 Saham Authorized - 11,700,000 Shares				
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh Sebanyak 8.395.318 Lembar Saham Issued and Fully Paid-Up Capital of 8,395,318 Shares	8.395.318	2.942.116	5.453.202	185,35
Komponen Ekuitas Lainnya Other Components of Equity	12.798.222	(22.832)	12.821.054	(56.153,88)
Penghasilan Komprehensif Lain Other Comprehensive Income	7.651.356	3.688.289	3.963.068	107,45
Saldo Laba/(Akumulasi Rugi) Retained Earnings/(Accumulated Losses)	-	-	-	-
Ditentukan penggunaannya Appropriated	8.210.555	6.025.156	2.185.399	36,27
Belum Ditentukan Penggunaannya Unappropriated	(2.079.299)	(659.031)	(1.420.268)	215,51
Total Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk Total Equity Attributable to Owners of the Parent Entity				
Pemilik Entitas Induk Parent Entity	21.397.495	17.977.374	3.420.121	19,02
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interests	(203.954)	(170.172)	(33.783)	19,85
<b>Jumlah Ekuitas</b> <b>Total Equity</b>	<b>21.193.540</b>	<b>17.807.202</b>	<b>3.386.338</b>	<b>19,02</b>

\*) disajikan kembali/restated

## Jumlah Ekuitas

Ekuitas Perseroan meningkat sebesar 19,02% dari Rp17,81 triliun pada 2022 menjadi Rp21,19 triliun pada 2023, yang utamanya didukung oleh kenaikan modal saham sebesar Rp5.453.202 juta yang disebabkan oleh penerbitan saham baru kepada Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai efek dari aksi korporasi berupa penggabungan dari PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI dan PT Perkebunan Nusantara XIII kepada PT Perkebunan Nusantara IV dan pengalihan aset dan liabilitas unit bisnis sawit dan karet kepada PT Perkebunan Nusantara IV dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) pada 1 Desember 2023.

## Total Equity

In 2023, the Company's equity increased by 19.02% from Rp17.81 trillion in 2022 to Rp21.19 trillion, mainly due to the increasing share capital of Rp5.453.202 million due to the issuance of new shares to the Republic of Indonesia and PT Perkebunan Nusantara III (Persero). This was a result of the merger of PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, and PT Perkebunan Nusantara XIII into PT Perkebunan Nusantara IV, along with the transfer of assets and liabilities of the palm oil and rubber business unit from PT Perkebunan Nusantara III (Persero) to PT Perkebunan Nusantara IV on December 1, 2023.

## Laporan Laba Rugi Komprehensif Konsolidasian

### Consolidated Statement of Comprehensive Profit or Loss

Uraian Description	2023	2022*	Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(juta Rp) (million Rp)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
<b>Pendapatan</b> Revenues	30.770.302	33.820.734	(3.050.432)	(9,02)
<b>Beban Pokok Penjualan</b> Cost of Goods Sold	(21.365.310)	(18.515.130)	(2.850.180)	15,39
<b>Laba Bruto</b> Gross Profit	9.404.992	15.305.604	(5.900.612)	(38,55)
Keuntungan yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis Gain arising from change in fair value of biological assets	182.742	(293.077)	475.818	(162,35)
Beban Pemasaran dan Penjualan Marketing and Selling Expenses	(624.936)	(565.608)	(59.327)	10,49
Beban Umum dan Administrasi General and Administrative Expenses	(3.317.186)	(4.734.912)	1.417.726	(29,94)
Pendapatan Operasi Lain Other Operating Income	678.074	863.215	(185.141)	(21,45)
<b>Laba Usaha</b> Operating Profit	5.579.192	9.482.121	(3.902.929)	(41,16)
Bagian Laba/(Rugi) Entitas Asosiasi Share in Loss of Associate	1.980	(78.539)	80.519	(102,52)
Penghasilan Keuangan Finance Income	1.348.956	1.062.441	286.515	26,97
Pajak Final atas Penghasilan Keuangan Final Tax Related to Finance Income	(4.777)	(5.396)	619	(11,97)
Beban Keuangan Finance Costs	(2.566.049)	(1.993.726)	(572.324)	28,71
<b>Laba Sebelum Pajak Penghasilan</b> Profit Before Income Tax Expense	1.586.881	2.855.323	(1.268.442)	(44,42)
<b>Beban Pajak Penghasilan</b> Income Tax Expense	(401.599)	(680.535)	278.937	(40,99)
<b>Laba Tahun Berjalan</b> Profit for the Year	1.185.282	2.174.788	(989.510)	(44,09)
Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain: Other Comprehensive Income (Loss):				
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi: Items that will not be reclassified to profit or loss:				
Kerugian pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti - neto Loss on remeasurement of defined benefit liability - net	(1.177.867)	(902.793)	(275.074)	30,47
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi Other comprehensive income from associated entities	26.581	25	26.557	108.386,32
Revaluasi Aset Tetap Revaluation of Fixed Assets	1.300.878	(209.193)	1.510.070	(721,86)
Pajak Penghasilan Terkait Income Tax Related	235.611	190.333	45.278	23,79
Nilai Wajar Investasi Saham Fair Value of Share Investment	28.616	(4.306)	32.922	(764,57)
Penghasilan/(Rugi) Komprehensif Lain Setelah Pajak Other Comprehensive Income/ (Loss) - Net of Tax	413.781	(925.916)	1.339.696	(144,69)
<b>Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan</b> Total Comprehensive Income for The Year	1.141.895	1.886.039	(744.144)	(39,46)
Laba Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Profit (Loss) for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Company	1.221.889	2.185.399	(963.510)	(44,09)



Uraian Description	2023	2022*	Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(juta Rp) (million Rp)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	(36.607)	(10.612)	(25.996)	244,97
Total	1.185.282	2.174.788	(989.510)	(44,09)
Laba/(Rugi) Komprehensif Tahun Berjalan yang Dapat Diatribusikan Kepada: Comprehensive Income/(Loss) for the Year Attributable to:				
Pemilik Entitas Induk Owners of Parent Company	1.179.075	1.896.156	(717.081)	(37,82)
Kepentingan Non-Pengendali Non-Controlling Interest	(37.180)	(10.117)	(27.063)	267,50
Total	1.141.895	1.886.039		
<b>Laba per Saham Dasar yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b> <b>Basic Earnings per Share Attributable to the Owners of the Parent Company</b>	<b>440.941</b>	<b>742.799</b>	<b>(301.858)</b>	<b>(40,64)</b>

\*) disajikan kembali/restated

### Penjualan Bersih

Perseroan membukukan penjualan bersih sebesar Rp30,77 triliun pada 2023, menurun sebesar 9,02% dari Rp33,82 triliun pada 2022. Penurunan ini terjadi karena penurunan harga jual rata-rata produk kelapa sawit yang berada di bawah RKAP Agregasi dan realisasi tahun 2022 (disajikan kembali).

### Beban Pokok Penjualan

Beban pokok penjualan Perseroan tercatat sebesar Rp21,37 triliun pada 2023, meningkat sebesar 15,39% dari Rp18,52 triliun pada 2022. Kenaikan ini terjadi karena kenaikan tarif angkut yang menyebabkan kenaikan beban jasa transportasi dan pengangkutan.

### Laba Kotor

Per 31 Desember 2023, laba kotor Perseroan terbukukan sebesar Rp9,40 triliun pada 2023, menurun sebesar 38,55% dari Rp15,31 triliun pada 2022. Penurunan ini terjadi karena penurunan harga jual rata-rata produk kelapa sawit dan peningkatan harga pokok penjualan yang disebabkan besarnya nilai persediaan awal tahun 2023 akibat besarnya nilai persediaan awal produk gula.

### Laba Usaha

Perseroan mencatat perolehan laba usaha sebesar Rp5,58 triliun pada 2023, menurun sebesar 41,16% dari Rp9,48 triliun pada 2022. Penurunan ini terjadi karena tidak tercapainya target nilai penjualan produk kelapa sawit akibat dari penurunan harga jual rata-rata produk kelapa sawit dibandingkan dengan tahun 2022 (disajikan kembali).

### Laba Sebelum Pajak Penghasilan

Laba sebelum pajak penghasilan tercatat mencapai Rp1,59 triliun pada 2023, menurun sebesar 44,42% dari Rp2,86 triliun pada 2022. Penurunan ini terjadi karena penurunan harga jual rata-rata produk kelapa sawit dan peningkatan harga pokok penjualan yang disebabkan besarnya nilai persediaan awal tahun 2023 akibat besarnya nilai persediaan awal produk gula.

### Laba Bersih Tahun Berjalan

Laba bersih tahun berjalan Perseroan pada 2023 mengalami penurunan sebesar 45,50% dari Rp2,17 triliun pada 2022 menjadi Rp1,19 triliun. Penurunan ini utamanya disebabkan

### Net Sales

In 2023, the Company recorded net sales of Rp30.77 trillion, representing a 9.02% decrease from Rp33.82 trillion in 2022. This decrease was primarily due to the average selling price of palm oil products falling below the Aggregation RKAP and realization in 2022 (restated).

### Cost of Goods Sold

The Company's cost of goods sold in 2023 amounted to Rp21.37 trillion, reflecting a 15.39% increase from Rp18.52 trillion in 2022. This rise was attributed to an increase in freight rates, which in turn led to higher transportation and freight service costs.

### Gross Profit

The Company's gross profit as of December 31, 2023, was Rp9.40 trillion, showing a 38.55% decrease from Rp15.31 trillion in 2022. This decrease resulted from the reduced average selling price of palm oil products and increased cost of goods sold due to the significant initial inventory value in 2023, primarily due to sugar products' considerable initial inventory value.

### Operating Profit

The Company's operating profit in 2023 was Rp5.58 trillion, reflecting a 41.16% decrease from Rp9.48 trillion in 2022. This decrease was due to the failure to achieve the target sales value of palm oil products, resulting from the decreased average selling price compared to 2022 (restated).

### Profit Before Income Tax

The profit before income tax for 2023 was Rp1.59 trillion, marking a 44.42% decrease from Rp2.86 trillion in 2022. This resulted from the decreased average selling price of palm oil products and increased cost of goods sold due to the significant initial inventory value in 2023, primarily due to sugar products' considerable initial inventory value.

### Net Profit for the Current Year

The Company's net profit in 2023 decreased by 45.50% from Rp2.17 trillion in 2022 to Rp1.19 trillion. This decrease was mainly due to the failure to achieve the target sales value of



oleh tidak tercapainya target nilai penjualan produk kelapa sawit akibat dari penurunan harga jual rata-rata produk kelapa sawit dibandingkan dengan tahun 2022 (disajikan kembali).

### Total Penghasilan Komprehensif Tahun Berjalan

Di akhir 2023, total penghasilan komprehensif tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk adalah sebesar Rp1,14 triliun, menurun sebesar 39,46% dari Rp1,89 triliun pada 2022. Penurunan ini terjadi karena tidak tercapainya target nilai penjualan produk kelapa sawit akibat dari penurunan harga jual rata-rata produk kelapa sawit dibandingkan dengan tahun 2022 (disajikan kembali).

### Laba per Saham Dasar

Laba per saham dasar yang diatribusikan kepada pemilik entitas induk pada tahun 2023 adalah sebesar Rp440.941, menurun sebesar 40,64% dari Rp742.799 pada 2022. Penurunan ini terjadi karena tidak tercapainya target nilai penjualan produk kelapa sawit akibat dari penurunan harga jual rata-rata produk kelapa sawit dibandingkan dengan tahun 2022 (disajikan kembali).

palm oil products due to the decreased average selling price compared to 2022 (restated).

### Total Comprehensive Income for the Year

At the end of 2023, the total comprehensive income for the year attributable to the owners of the parent entity was Rp1.14 trillion, down 39.46% from Rp1.89 trillion in 2022. This decrease was due to the failure to achieve the target sales value of palm oil products, resulting from the decreased average selling price compared to 2022 (restated).

### Basic Earnings per Share

Basic earnings per share attributable to the owners of the parent entity in 2023 were Rp440,941, down 40.64% from Rp742,799 in 2022. This decrease was primarily due to the failure to achieve the target sales value of palm oil products due to the decreased average selling price compared to 2022 (restated).

## Laporan Arus Kas Konsolidasian Consolidated Cash Flow Statement

Uraian Description	2023	2022*	Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(juta Rp) (million Rp)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
Arus Kas dari Aktivitas Operasi Cash Flow from Operating Activities	4.027.890	5.423.989	(1.396.098)	(25,74)
Arus Kas dari Aktivitas Investasi Cash Flow from Investing Activities	(7.862.862)	(2.525.770)	(5.337.092)	211,31
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan Cash Flow from Financing Activities	884.092	(2.477.352)	3.361.445	(135,69)
Dampak Perubahan Kurs Impact of Exchange Rate Changes	(9.549)	51.165	(60.714)	(118,66)
Kas dan Setara Kas Awal Tahun Cash and Cash Equivalents at Beginning of Year	6.154.237	5.682.205	472.031	8,31
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun Cash and Cash Equivalents at End of Year	3.193.808	6.154.237	(2.960.429)	(48,10)

\*) disajikan kembali/restated

### Arus Kas dari Aktivitas Operasi

Arus kas bersih yang diperoleh Perseroan dari aktivitas operasi selama 2023 menunjukkan penurunan sebesar 25,74% dari Rp5,42 triliun pada 2022 menjadi Rp4,03 triliun. Penurunan ini terjadi karena penurunan nilai penjualan.

### Arus Kas dari Aktivitas Investasi

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas investasi menunjukkan peningkatan sebesar 211,31% dari Rp2,53 triliun pada 2022 menjadi Rp7,86 triliun pada 2023. Kenaikan ini terjadi karena realisasi CAPEX dan pembayaran jangka panjang lain-lain berelasi.

### Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan

Arus kas bersih yang digunakan untuk aktivitas pendanaan menunjukkan peningkatan sebesar 135,69% dari (Rp2,48 triliun) pada 2022 menjadi Rp884,09 miliar pada 2023. Peningkatan ini terjadi karena adanya penerimaan *repackaging*.

### Consolidated Cash Flow Statement

#### Cash Flow from Operating Activities

In 2023, the Company's net cash flow from operating activities decreased by 25.74% from Rp5.42 trillion in 2022 to Rp4.03 trillion. This decrease was attributed to a decline in sales.

#### Cash Flow from Investing Activities

In 2023, the Company's net cash flow from investing activities increased by 211.31% from Rp2.53 trillion in 2022 to Rp7.86 trillion in 2023. This increase was due to the realization of CAPEX and other related long-term payments.

#### Cash Flow from Financing Activities

In 2023, the Company's net cash flow from financing activities increased by 135.69% from (Rp2.48 trillion) in 2022 to Rp884.09 billion in 2023. This increase was attributed to the receipt of *repackaging*.



## KEMAMPUAN MEMBAYAR UTANG

### » Solvency

Perseroan melakukan pengelolaan profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank. Perseroan mengevaluasi proyeksi arus kas dan aktual serta memantau tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan secara teratur.

Solvabilitas adalah kemampuan Perseroan untuk memenuhi seluruh liabilitasnya, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kemampuan membayar utang diukur dengan menggunakan rasio DER (*Debt-to-Equity Ratio*) maupun DAR (*Debt-to-Assets Ratio*).

Kemampuan Perseroan untuk memenuhi liabilitas lancarnya tercermin dalam rasio lancar dan rasio kas. Pada tahun 2023, rasio lancar tercatat mencapai 101,44%, menurun sebesar 34,45% dari posisi per 31 Desember 2022 yang mencapai 154,75%. Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan mampu memenuhi kewajiban jangka pendeknya yang akan jatuh tempo. Di tahun 2023, Perseroan memiliki aset lancar sebesar Rp11,57 triliun dan liabilitas lancar sebesar Rp11,40 triliun, sedangkan rasio cepat tercatat sebesar 62,76% Rasio kas tercatat sebesar 31,18%.

Per tanggal 31 Desember 2023, DER mengalami penurunan dari 15,76% pada 2022 menjadi 249,46%, sementara DAR mencapai 67,93%, meningkat dari 64,76% pada 2022. Hal tersebut disebabkan oleh naiknya nilai utang bank yang disebabkan oleh adanya *repackaging loan* dengan HIMBARA Plus (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia dan Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia). Secara keseluruhan, Perseroan memiliki kemampuan membayar utang yang baik dan stabil.

The Company manages its liquidity to finance capital expenditures and pay off maturing debts by maintaining cash and bank reserves. It evaluates projected and actual cash flows and regularly monitors the maturity dates of financial assets and liabilities.

Solvency is the Company's ability to meet all of its current and non-current liabilities. Solvency is measured using the Debt-to-Equity Ratio (DER) and Debt-to-Assets Ratio (DAR).

The current and cash ratios reflect the Company's ability to meet its current liabilities. In 2023, the current ratio decreased by 34.45% from 154.75% on December 31, 2022 to 101.44% in 2023. This indicates that the Company can still meet its due current liabilities. In 2023, the Company had current assets of Rp11.57 trillion and current liabilities of Rp11.40 trillion, while the quick ratios are 62.76%. Cash ratio was recorded at 31.18%.

As of December 31, 2023, the DER decreased from 15.76% in 2022 to 249.46%, while the DAR increased to 67.93% from 64.76% in 2022. This change is due to the increase in bank debt value caused by the loan repackaging with HIMBARA Plus (Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia, Bank Rakyat Indonesia and the Indonesian Export Financing Institution). Overall, the Company has a good and stable solvency to pay debts.

## TINGKAT KOLEKTIBILITAS PIUTANG

### » Receivables Collectability

Kolektibilitas piutang dipengaruhi oleh kemampuan Perseroan dalam menagih piutangnya. Hingga akhir tahun 2023, kemampuan Perseroan secara konsolidasi dalam menagih piutang (*collection period*) memperlihatkan perbaikan menjadi 31 hari dibandingkan lama periode penagihan piutang di 2022 yang mencapai 45 hari. Perhitungan ini didapat dari pembagian antara saldo piutang per 31 Desember 2023 dengan pendapatan neto selama tahun 2023 dan dikalikan dengan jumlah hari dalam satu tahun (365 hari).

Untuk memitigasi risiko piutang tidak tertagih, Perseroan melakukan evaluasi kredit terhadap kondisi keuangan atas piutang dan apabila diperlukan, penjualan harus dengan jaminan kredit. Piutang usaha dari pihak berelasi dan piutang lain-lain dari pihak berelasi dan pihak ketiga dilakukan dengan pihak ketiga terpercaya dan pihak berelasi terpercaya.

The collectibility of receivables depends on the Company's ability to collect them. As of the end of 2023, the Company's consolidated ability to collect receivables (collection period) improved to 31 days compared to the 45 days collection period in 2022. This calculation is derived by dividing the receivable balance as of December 31, 2023 by the net income for 2023 and multiplying it by the number of days in a year (365 days).

To manage the risk of uncollectible receivables, the Company conducts a credit evaluation of the financial condition of receivables and, when necessary, requires credit collateral for sales. Trade receivables from related parties and other receivables from related and third parties are transacted with trusted third parties and trusted related parties.

# STRUKTUR MODAL

## » Capital Structure



### Dasar Pemilihan Kebijakan Manajemen atas Struktur Modal

Dalam mengelola keseimbangan struktur modalnya, manajemen Perseroan senantiasa berupaya mengoptimalkan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham. Dengan pengelolaan risiko modal yang tepat, Perseroan memastikan kemampuannya untuk melanjutkan keberlangsungan usahanya sehingga dapat terus memberikan imbal hasil dan manfaat yang optimal bagi pemegang saham dan seluruh pemangku kepentingan.

Kebijakan manajemen atas struktur modal Perseroan diregulasi dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas tanggal 7 Agustus 2007, di mana Perseroan wajib mengontribusikan sampai dengan minimal 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan. Perseroan mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian berdasarkan perubahan kondisi ekonomi.

### Basis for Selection of Management Policy on Capital Structure

In managing its capital structure, the Company's management always strives to optimize the maintenance of a healthy capital ratio to support the business and maximize rewards for shareholders. By managing capital risk appropriately, the Company ensures its ability to sustain its business and provide optimal returns and benefits for shareholders and all stakeholders.

The management policy regarding the Company's capital structure is regulated in the Limited Liability Company Law dated August 7, 2007, which obliges the Company to contribute up to a minimum of 20% of the issued and fully paid share capital into a reserve fund that may not be distributed. The Company manages its capital structure and makes adjustments based on changing economic conditions.



Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Perseroan dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Kebijakan Perseroan adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

## Rincian Struktur Modal

Struktur modal adalah perimbangan antara modal asing dan modal sendiri. Dalam hal ini, modal asing adalah utang jangka panjang maupun jangka pendek, sedangkan modal sendiri terbagi atas laba ditahan dan penyertaan kepemilikan perusahaan.

Selama tahun 2023, Perseroan tetap mempertahankan tujuan utama dan kebijakan pengelolaan modal pada tahun sebelumnya, yaitu memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat dengan mempertahankan rasio utang terhadap modal maksimum sebesar 60:40. Pada tahun 2023, komposisi struktur modal Perseroan adalah 71,38% berasal dari liabilitas dan 28,62% berupa ekuitas. Komposisi ini mengalami perubahan dari tahun 2022, yaitu liabilitas sebesar 48,73%, dan modal dari ekuitas sebesar 51,26%.

## Struktur Modal Capital Structure

Uraian Description	2023		2022*		Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
Liabilitas Jangka Pendek Current Liabilities	11.400.652	27,49	10.739.451	25,57	661.200	6,16
Liabilitas Jangka Panjang Non-Current Liabilities	30.067.594	72,51	31.253.087	74,43	(1.185.493)	(3,79)
Jumlah Liabilitas Total Liabilities	41.468.246	66,18	41.992.538	70,22	(524.292)	(1,25)
Jumlah Ekuitas Total Equity	21.193.540	33,82	17.807.202	29,78	3.386.338	19,02
<b>Jumlah Liabilitas dan Ekuitas Total Liabilities and Equity</b>	<b>62.661.786</b>	<b>100,00</b>	<b>59.799.740</b>	<b>100,00</b>	<b>2.862.046</b>	<b>4,79</b>

\*) disajikan kembali/restated

To maintain and adjust the capital structure, the Company can adjust dividend payments to shareholders, capital rewards to shareholders, or issue new shares. The Company's policy is to maintain a healthy capital structure to secure access to funding at a reasonable cost.

## Capital Structure Details

The capital structure is the balance between foreign capital and own capital. In this case, foreign capital includes long-term and short-term debt, while own capital is divided into retained earnings and company ownership.

During 2023, the Company maintained the main objectives and capital management policies of the previous year, ensuring the maintenance of a healthy capital ratio by maintaining a maximum debt to capital ratio of 60:40. In 2023, the composition of the company's capital structure was 71.38% from liabilities and 28.62% from equity. This composition has changed from 2022, with liabilities amounting to 48.73% and equity capital amounting to 51.26%.

## IKATAN MATERIAL UNTUK INVESTASI BARANG MODAL

### » Material Commitments for Capital Goods Investment

Selama tahun 2023 tidak ada ikatan yang material atas investasi barang modal.

During 2023, there are no material commitments for capital goods investment.

## REALISASI INVESTASI BARANG MODAL

### » Realization of Capital Goods Investment

Perseroan melakukan investasi barang modal berdasarkan kebutuhan dan prioritas, sesuai rencana jangka panjang yang telah dipetakan. Pelaksanaan investasi senantiasa dilakukan dengan penuh kehati-hatian, pertimbangan yang matang dan menyeluruh, serta secara objektif dan efisien.

The Company makes capital goods investments based on its needs and priorities, following the long-term plan it has mapped out. The implementation of these investments is always approached with careful consideration, maturity, and objectivity to ensure efficiency.

### Jenis Investasi

Pada 2023, Perseroan telah melakukan sejumlah investasi barang modal sebagai berikut:

### Types of Investments

In 2023, the Company made several capital goods investments, including:

dalam Rp juta | in million Rp

Keterangan Description	Anggaran Investasi Investment Budget	Realisasi Investasi Realization of Investment
Investasi Tanaman Plant Investment	2.270.399	1.591.579
Investasi Non-Tanaman Non-Plant Investment	3.605.176	1.514.612
<b>Total Investasi</b> Total Investment	<b>5.875.575</b>	<b>3.106.192</b>

### Tujuan Investasi

Kegiatan investasi Perseroan dilaksanakan secara rutin untuk mempertahankan kemampuannya seperti peremajaan tanaman yang sudah tidak produktif, penggantian suku cadang mesin, dan instalasi pabrik agar tetap dapat beroperasi optimal.

### Investment Objectives

The Company regularly conducts investment activities to sustain its capabilities, including rejuvenating unproductive plants, replacing machine spare parts, and installing factories to ensure optimal operations.



## Nilai Investasi

Berikut adalah nilai investasi yang dikeluarkan Perseroan sesuai dengan kegiatan atau jenis investasi yang dilakukan pada tahun 2023:

## Investment Value

The investment value issued by the Company in 2023 varies according to the activities or types of investments undertaken:

Uraian Description	2023	2022*	Δ	
	(juta Rp) (million Rp)	(juta Rp) (million Rp)	(juta Rp) (million Rp)	(%)
Aset Tanaman Plant Assets	1.591.579	920.160	671.419	72,97
<b>Aset Tetap</b> Fixed Assets				
Bangunan Rumah House Buildings	83.589	51.344	32.245	62,80
Bangunan Kantor Office Buildings	133.188	113.557	19.631	17,29
Mesin dan Instalasi Machinerics and Installations	845.729	710.041	135.688	19,11
Jalan, Jembatan, dan Saluran Air Roads, Bridges, and Waterways	238.401	175.410	62.991	35,91
Alat Pengangkutan Transportation Equipments	40.413	48.713	(8.300)	(17,04)
Alat Pertanian dan Inventaris Lain Other Farming and Inventory Tools	46.462	34.229	12.233	35,74
Aset Tetap dalam Penyelesaian Fixed Assets in Progress	99.228	112.292	(13.064)	(11,63)
Sub Jumlah Sub Total	1.387.782	2.165.746	(777.964)	(35,92)
HGU	15.822	52.530	(36.708)	(69,88)
Penyertaan Inclusion	0	50.000	(50.000)	(100,00)
Aset Lain-Lain Other Assets	11.781	27.892	(16.111)	(57,76)
<b>Jumlah</b> Total	<b>1.415.385</b>	<b>2.296.168</b>	<b>(880.783)</b>	<b>(38,36)</b>

\*) disajikan kembali/restated



# TARGET DAN REALISASI TAHUN 2023

## » Target and Realization in 2023

### Aspek Operasional

#### Target dan Realisasi Produksi Komoditas

#### Target and Realization of Commodity Production

##### Kuantum Produksi dan Penjualan (ton)

##### Production and Sales Quantum (tons)

Komoditas Commodities	Kuantum Produksi 2023 Production Quantum 2023		Kuantum Penjualan 2023 Sales Quantum 2023	
	Target Target	Realisasi Realization	Target Target	Realisasi Realization
Minyak Sawit CPO	2.649.427	3.108.484	2.607.747	2.282.695
Inti Sawit PK	502.342	577.632	109.801	94.409
PKO	148.724	169.430	154.398	138.836
PKM	204.171	220.798	198.257	189.601

##### Nilai Penjualan (juta Rp)

##### Sales Value (million Rp)

Komoditas Commodities	Realisasi 2022 Realization in 2022	Target 2023 Target in 2023	Realisasi 2023 Realization in 2023
Minyak Sawit CPO	28.336.035	29.592.144	25.228.700
Inti Sawit PK	539.469	584.579	370.474
PKO	2.384.728	1.941.074	1.757.365
PKM	299.949	233.081	315.231

### Aspek Finansial

#### Target dan Realisasi Tahun 2023 (juta Rp)

#### Target and Realization in 2023 (million Rp)

Aspek Aspect	Realisasi 2022* Realization in 2022	Target 2023 Target in 2023	Realisasi 2023 Realization in 2023
Penjualan Sales	33.820.734	37.931.484	30.770.302
Beban Pokok Penjualan Cost of Goods Sold	18.515.130	24.715.044	21.365.310
Laba Kotor Gross Profit	15.305.604	13.216.440	9.404.992
Laba Usaha Operating Income	(6.833.306)	(7.212.676)	(5.040.914)
Laba Sebelum Pajak Profit Before Tax	8.472.298	6.003.764	4.364.078
Laba (Rugi) Bersih Tahun Berjalan Net Profit (Loss) for the Year	7.186.279	4.630.558	3.646.548



Aspek Aspect	Realisasi 2022* Realization in 2022	Target 2023 Target in 2023	Realisasi 2023 Realization in 2023
Total Aset Total Assets	62.661.786	79.676.565	59.799.740
Total Liabilitas Total Liabilities	41.992.538	52.561.091	41.468.246
Total Ekuitas Total Equity	17.807.202	27.115.475	21.193.540

\*) disajikan kembali/restated

## INFORMASI DAN FAKTA MATERIAL YANG TERJADI SETELAH TANGGAL LAPORAN AKUNTAN

### » Material Information and Facts that Occurred After the Date of the Accountant's Report

#### Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PTPN I dan PTPN IV

Pada 27 Desember 2023, Perseroan dan PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I") telah menandatangani perjanjian Kerja Sama Operasi ("KSO") atas pengelolaan Kebun, Pabrik Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Inti Sawit milik PTPN I termasuk optimalisasi lahan yang akan ditanami Kelapa Sawit dan lahan kebun karet yang akan dikonversi menjadi kebun kelapa sawit.

#### Joint Operation Agreement ("JOA") between PTPN I and PTPN IV

On December 27, 2023, the Company and PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I") signed a joint operation agreement ("KSO") for the management of PTPN I's plantations, palm oil mills and palm kernel processing plants including the optimization of land to be planted with palm oil and rubber plantation land to be converted into oil palm plantations.

#### Pembentukan dan Penetapan Region Head dan Senior Executive Vice President (SEVP) Region KSO VI & VII

Pada 1 April 2024, berdasarkan surat No. DPSB/SKPTS/140/2024 sehubungan dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara Perseroan dan PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I"). Perseroan membentuk Regional KSO Kelapa Sawit serta melakukan perubahan struktur organisasi. Penambahan regional KSO pada struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

1. Regional 6 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 6) dan KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)
2. Regional 7 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 2 & 7) dan KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)
3. Regional 8 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 8)

#### Establishment and Appointment of Region Head and Senior Executive Vice President (SEVP) of KSO Region VI & VII

As of April 1, 2024, pursuant to letter No. DPSB/SKPTS/140/2024 in relation to joint operation ("KSO") agreement between the Company and PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I"). The Company established the KSO Regional for palm oil and made changes to the organizational structure.

The addition of regional KSOs to the organizational structure is as follows:

1. Regional 6 KSO, is responsible for KSO Palm Oil – Eks PTPN 1 (Regional 6) and KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)
2. Regional 7 KSO, is responsible for KSO Palm Oil – Eks PTPN 1 (Regional 2 & 7) and KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)
3. Regional 8 KSO, is responsible for KSO Palm Oil – Eks PTPN 1 (Regional 8)



Namun, pada 30 April 2024, berdasarkan surat No. DPSB/X/257/IV/2024 dan keputusan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. DPSB/SKPTS/149/2024 tanggal 29 April 2024 tentang perubahan hubungan struktur organisasional KSO yang meliputi pengelolaan kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, dan pusat penelitian inti sawit. Perseroan melakukan perubahan atas penambahan region KSO, sebagai berikut:

1. Regional 1, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit Distrik Sei Meranti Tujuh, Distrik Aceh Timur (DATIM), Distrik Jawa Barat (DJABA), dan KSO eks PTPN 1 (Regional 2)
2. Regional 2, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 1 & 8)
3. Regional 6 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 6) dan KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)
4. Regional 7 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 2) dan KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)

### **Pembentukan dan Penetapan Region Head dan Senior Executive Vice President (SEVP) Region KSO VI & VII**

Atas pembentukan Region KSO 6 dan 7, sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPRS/R/71/2024 tanggal 30 April 2024 dan No. DSDM/SKPRS/R/71/2024 tanggal 8 Mei 2024, tentang penempatan Region Head dan anggota-anggota Senior Executive Vice President (SEVP) pada KSO Kelapa Sawit antara Perseroan dan PTPN I sebagai berikut:

1. Syahriadi Siregar sebagai Region Head Regional 6 KSO
2. T. Zein Ichwan sebagai SEVP Operation Regional 6 KSO
3. Denny Ramadhan Nasution sebagai Region Head Regional 7 KSO
4. Darmansyah Siregar sebagai SEVP Operation Regional 7 KSO
5. Bambang Eko Prasetyo sebagai SEVP Operation Regional 7 KSO

However, as of April 30, 2024, based on letter No. DPSB/X/257/IV/2024 and the Decree of the Company's Board of Directors No. DPSB/SKPTS/149/2024 dated April 29, 2024 regarding changes in organizational structure for the KSO which included management of oil palm plantations, palm oil mills, and palm kernel research centers. The Company made changes to the addition of the KSO region, as follows:

1. Regional 1, is responsible for KSO Kelapa Sawit Distrik Sei Meranti Tujuh, Distrik Aceh Timur (DATIM), Distrik Jawa Barat (DJABA), and KSO eks PTPN 1 (Regional 2)
2. Regional 2, is responsible for KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 1 & 8)
3. Regional 6 KSO, is responsible for KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 6) and KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)
4. Regional 7 KSO, is responsible for KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 2) dan KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)

### **Establishment and Appointment of Region Head and Senior Executive Vice President (SEVP) of KSO Region VI & VII**

Regarding the establishment of KSO Regions 6 and 7, in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPRS/R/71/2024 dated April 30, 2024 and No. DSDM/SKPRS/R/71/2024 dated May 8, 2024, regarding the placement of the Region Head and members of the Senior Executive Vice President (SEVP) in the Palm Oil KSO between the Company and PTPN I as follow:

1. Syahriadi Siregar as Head Regional 6 KSO
2. T. Zein Ichwan as SEVP Operation Regional 6 KSO
3. Denny Ramadhan Nasution as Region Head Regional 7 KSO
4. Darmansyah Siregar as SEVP Operation Regional 7 KSO
5. Bambang Eko Prasetyo as SEVP Business Support Regional 7 KSO



## PROSPEK USAHA

### » Business Outlook

Pada tahun 2024, industri kelapa sawit Indonesia diproyeksikan masih menemui sejumlah tantangan. Dari sisi ekonomi global, ketidakpastian masih membayangi pertumbuhan ekonomi global khususnya negara-negara maju. Amerika Serikat masih dilanda inflasi di atas target, China sebagai salah satu konsumen terbesar kedua minyak sawit juga masih bergulat dengan pelemahan ekonomi pasca Covid-19, begitu juga dengan Eropa yang masih mengalami pelemahan kondisi ekonomi dengan defisit fiskal yang meningkat diiringi inflasi yang tinggi.

Sementara itu, eskalasi tensi geopolitik global yang terus memanas juga memberikan dampak yang signifikan pada pasokan beberapa komoditas strategis di pasar global. Meletusnya perang Israel dan Palestina juga diperkirakan dapat memberikan dampak besar terhadap pasokan komoditas mengingat laut merah merupakan jalur strategis perdagangan global.

Berdasarkan data dari berbagai sumber, prospek industri sawit tahun 2024 diproyeksikan sebagai berikut:

- Konsumsi dalam negeri diperkirakan akan terus mengalami kenaikan, terutama untuk kebutuhan pangan, industri oleokimia, dan kebutuhan energi (biodiesel) dengan adanya implementasi Biodiesel (B35) secara setahun penuh (*Fully Implemented*).
- Harga minyak nabati dunia termasuk minyak kelapa sawit tidak banyak mengalami perubahan dibandingkan dengan tahun 2023.
- Produksi diperkirakan akan stagnan.
- Volume ekspor diperkirakan akan mengalami penurunan, terutama karena meningkatnya kebutuhan dalam negeri.

Business Outlook

In 2024, the Indonesian palm oil industry is expected to face several challenges. Globally, economic uncertainty continues to affect growth, particularly in developed countries. The United States is dealing with inflation above the target, China is still grappling with post-Covid-19 economic weakness, and Europe is experiencing weakening economic conditions along with increasing fiscal deficit and high inflation.

Moreover, escalating global geopolitical tensions are impacting the supply of strategic commodities on the global market. The outbreak of the conflict between Israel and Palestine is expected to have a significant impact on commodity supplies, as the Red Sea is a critical route for global trade.

Based on data from various sources, the prospects for the palm oil industry in 2024 are as follows:

- Domestic consumption is expected to rise, especially for food, the oleochemical industry, and energy needs (biodiesel) due to the full-year implementation of Biodiesel (B35).
- Global prices of vegetable oils, including palm oil, are anticipated to remain stable compared to 2023.
- Production is expected to stagnate.
- Export volume is projected to decrease primarily due to increasing domestic demand



# ASPEK PEMASARAN

## » Marketing Aspect



Perseroan menjual hasil komoditasnya melalui Indonesia Commodity (Inacom) (dahulu PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara (PT KPBN)) dengan sistem *tender* dan *bid offer*, maupun *Long Term Contract* (LTC) yang mengacu pada formulasi harga sesuai *Term of Regulation* (TOR) Tata Cara dan Ketentuan Penjualan Komoditas Perkebunan di Inacom.

Salah satu strategi pemasaran yang dilakukan Perseroan adalah melakukan analisis pasar dengan mencari informasi harga yang akurat dari berbagai sumber terpercaya, dan mempertimbangkan berbagai faktor yang dapat memengaruhi kinerja industri kelapa sawit.

Karakteristik dari produk komoditas yaitu harga ditentukan oleh penawaran dan permintaan pasar bukan ditentukan oleh penyalur maupun penjual. Fluktuasi harga ini perlu disikapi dengan cermat dengan melakukan kebijakan yang efektif dan berimbang. Oleh karena itu, Perseroan harus mampu menghasilkan produk berkualitas dan berdaya saing tinggi agar dapat mempertahankan stabilitas kerjanya. Selaras dengan upaya ini, Perseroan terus meningkatkan kapabilitas sumber daya produksi dan SDM bersamaan dengan pengendalian biaya sehingga menghasilkan harga pokok penjualan yang kompetitif untuk meningkatkan daya saing.

Agar dapat memenuhi ekspektasi dan kepuasan pelanggan, Perseroan memiliki persyaratan dan standar mutu produk sehingga sesuai dengan SNI dan spesifikasi yang diminta pembeli dalam kontrak. Perseroan juga senantiasa menjaga ketepatan waktu pengiriman sesuai dengan kontrak yang disepakati serta menjalin komunikasi yang efektif dengan pelanggan dalam menyelesaikan setiap keluhan pelanggan.

The Company sells its commodity products through Indonesia Commodity (Inacom) (formerly PT Kharisma Marketing Bersama Nusantara (PT KPBN)) using a tender and bid offer system, as well as a Long-Term Contract (LTC). LTC refers to the price formulation in accordance with the Term of Regulation (TOR) Procedures and Conditions for Sales of Plantation Commodities at Inacom.

One of the marketing strategies carried out by the company is to conduct market analysis by seeking accurate price information from various trusted sources and considering various factors that can influence the performance of the palm oil industry.

The characteristic of commodity products is that prices are determined by market supply and demand, not determined by distributors or sellers. These price fluctuations need to be carefully addressed by implementing effective and balanced policies. Therefore, the company must be able to produce quality and highly competitive products to maintain the stability of its performance. In line with these efforts, the company continues to improve the capabilities of production resources and human resources along with cost control to produce competitive prices of goods sold and increase competitiveness.

To meet customer expectations and satisfaction, the Company has product quality requirements and standards to comply with SNI and specifications requested by buyers in the contract. The Company also always maintains timely delivery in accordance with agreed contracts and establishes effective communication with customers to resolve every customer complaint.

## KEBIJAKAN DIVIDEN

### » Dividend Policy

Sesuai dengan keputusan pemegang saham, pembagian dividen dibayarkan dalam bentuk tunai kepada pemegang saham sekali dalam setahun. Rasio dividen ditetapkan minimal sebesar 30% dari laba bersih setelah pajak kecuali ditentukan lain oleh RUPS dengan tetap memperhatikan posisi keuangan dan tingkat kesehatan Perseroan. Berikut adalah histori pembagian dividen Perseroan selama 2 (dua) tahun terakhir:

The Company distributes dividends in cash to shareholders once a year, in accordance with shareholder decisions. The dividend ratio is set at a minimum of 30% of net profit after tax, unless otherwise determined by the GMS, taking into account the financial position and soundness of the company. Here's the history of the Company's dividend distribution for the last 2 (two) years:

Tahun Buku Fiscal Year	Tanggal RUPS GMS Date	Tanggal Pembayaran Dividen Dividend Payout Date	Jumlah Dividen Tunai Rp) Total Cash Dividend (Rp)	Rasio Terhadap Laba Bersih (%) Ratio to Net Profit (%)	Cadangan Umum (Rp) General Reserves (Rp)	Rasio Terhadap Laba Bersih (%) Ratio to Net Profit (%)
2023	28 Juni 2024 June 28, 2024	-	-	0%	8.210.555.362.829	100
2022	5 Juni 2023 June 5, 2023	-	-	0%	2.185.399.453.623	100

## PROGRAM KEPEMILIKAN SAHAM OLEH KARYAWAN DAN/ATAU MANAJEMEN (ESOP/MSOP)

### » Share Ownership Program by Employees and/or Management (ESOP/MSOP)

Per akhir 2023, tidak terdapat kepemilikan saham oleh karyawan (*Employee Stock Option Program/ESOP*) dan oleh manajemen (*Management Stock Option Program/MSOP*). Dengan demikian, tidak terdapat informasi terkait jumlah saham ESOP/MSOP dan realisasinya, jangka waktu, persyaratan karyawan dan/atau manajemen yang berhak serta harga *exercise*.

At the end of 2023, there is no employee or management ownership of shares through the Employee Stock Option Program (ESOP) or the Management Stock Option Program (MSOP). As a result, there is currently no available information about the number of ESOP/MSOP shares, their realization, time period, eligibility requirements for employees and/or management, and exercise price.

## PENGGUNAAN DANA PENAWARAN UMUM

### » Use of Proceeds

Hingga akhir 2023, Perseroan belum pernah melakukan penawaran umum di BEI dan masih berstatus sebagai perusahaan tertutup hingga saat ini. Oleh sebab itu, tidak terdapat informasi terkait realisasi penggunaan dana penawaran umum yang dapat diungkapkan dalam Laporan Tahunan ini.

Up until the end of 2023, the Company has never conducted a public offering on the IDX and still remains a private company. As a result, there is no information available regarding the actual use of public offering funds that can be disclosed in this Annual Report.

## INFORMASI MATERIAL TERKAIT INVESTASI, EKSPANSI, DIVESTASI, PENGGABUNGAN ATAU PELEBURAN USAHA, AKUISISI, ATAU RESTRUKTURISASI UTANG/MODAL

### » Material Information Related to Investment, Expansion, Divestment, Business Merger/Consolidation, Acquisition, or Debt/Capital Restructuring

Pada 27 Juni 2023, PTPN Grup dengan BMRI, BNI, BRI, dan LPEI telah menandatangani perjanjian kredit sindikasi PalmCo Nomor 11 ("PK PTPN IV") dan Akta Perjanjian Fasilitas Kredit Supporting Co Nomor 12 ("PK PTPN VII").

On June 27, 2023, PTPN Group, along with BMRI, BNI, BRI, and LPEI, signed the PalmCo syndicated credit agreement Number 11 ("PK PTPN IV") and the Supporting Co Credit Facility Agreement Deed Number 12 ("PK PTPN VII").

Pencairan atas fasilitas pinjaman sindikasi PK PTPN IV dan PK PTPN VII tersebut telah dilaksanakan pada 24 Juli 2023 dan 26 Juli 2023, digunakan untuk pelunasan utang bank eksisting PTPN Grup berdasarkan *Master Amendment Agreement* (MAA) tahun 2021. Posisi total utang bank PalmCo pasca dilaksanakannya skema *Loan Repackaging* adalah sebesar Rp25.550 miliar, dengan rincian masing-masing kreditur Bank Mandiri Rp12.016 miliar, BNI Rp6.904 miliar, BRI Rp5.418 miliar, dan LPEI Rp1.212 miliar. Pada 27 Desember 2023, Bank BRI melakukan *sell down* atau pengalihan porsi pinjamannya di PTPN IV kepada Bank Raya sebesar Rp200 miliar. Dari Rp25.550 miliar fasilitas pinjaman di atas, Rp5.000 miliar di antaranya telah digunakan PTPN IV untuk melunasi pinjaman PTPN VII, PTPN VIII, PTPN XI dan PTPN XII yang merupakan bagian dari persetujuan yang diberikan oleh kreditur atas permohonan PTPN.

The disbursement of the syndicated loan facilities PK PTPN IV and PK PTPN VII took place on July 24, 2023, and July 26, 2023, and was used to pay off PTPN Group's existing bank debt based on Master Amendment Agreement (MAA) of 2021. After the implementation of the Loan Repackaging scheme, the total position of PalmCo's bank debt was Rp25,550 billion with the following details: Bank Mandiri Rp12,016 billion, BNI Rp6,904 billion, BRI Rp5,418 billion, and LPEI Rp1,212 billion. On December 27, 2023, Bank BRI sold down or transferred its loan portion in PTPN IV to Bank Raya, amounting to Rp200 billion. Out of the Rp25,550 billion loan facility, Rp5,000 billion was used by PTPN IV to pay off loans from PTPN VII, PTPN VIII, PTPN XI, and PTPN XII, with approval from the creditors at the request of PTPN.

Pada 1 Desember 2023, telah dilakukan merger PTPN V, PTPN VI, PTPN XIII serta *spin-off* tidak murni Aset PTPN III ke PTPN IV.

On December 1, 2023, the merger of PTPN V, PTPN VI, and PTPN XIII took place, along with the impure spin-off of PTPN III Assets to PTPN IV.

Pada 27 Desember 2023, telah dilakukan perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) antara PTPN I dengan PTPN IV tentang Kerja Sama Operasi (KSO) Pengolahan Kebun, Pabrik Kelapa Sawit, dan Pabrik Pengolahan Inti Sawit.

On December 27, 2023, an Operational Cooperation (KSO) agreement was made between PTPN I and PTPN IV regarding the Operational Cooperation for Plantation Processing, Palm Oil Mills, and Palm Kernel Processing Mills.



# INFORMASI TRANSAKSI MATERIAL YANG MENGANDUNG BENTURAN KEPENTINGAN DAN TRANSAKSI DENGAN AFILIASI

## Material Information Containing Conflicts of Interest and Transactions with Affiliates

### Pihak Berelasi dan Sifat Hubungan

Pihak-pihak berelasi adalah perusahaan dan perorangan yang mempunyai keterkaitan kepemilikan atau kepengurusan secara langsung maupun tidak langsung dengan Perseroan. Pihak berelasi yaitu dengan beberapa bank yang dikendalikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, beberapa perusahaan perkebunan dan asosiasinya, beberapa koperasi karyawan dan pusat koperasi karyawan berupa penempatan giro, deposito dan fasilitas kredit modal kerja, serta pemberian pinjaman modal kerja kepada perusahaan afiliasi dan lain-lain. Pengungkapan saldo dan transaksi signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

### Related Parties and the Nature of the Relationship

Related parties are companies and individuals who have a direct or indirect ownership or management relationship with the Company. Related parties include several banks controlled by the central government and regional governments, several plantation companies and their associations, several employee cooperatives and employee cooperative centers in the form of placing current accounts, deposits, and working capital credit facilities, as well as providing working capital loans to affiliated companies and others. The disclosure of significant balances and transactions with related parties is as follows:

Keterangan Description	2023 (dalam % / in %)	2022* (dalam % / in %)
Kas dan Setara Kas Cash and Cash Equivalents	99,43	98,83
Kas yang Dibatasi Penggunaannya Restricted Cash	100,00	96,60
Piutang Usaha Trade Receivables	94,69	91,70
Piutang Lain-Lain Other Receivables	79,60	85,36
Utang Usaha Trade Payables	4,75	3,17
Utang Lain-Lain Other Payables	84,57	74,78
Liabilitas Kontrak Contract Liabilities	1,82	1,10
Pendapatan Diterima Dimuka Unearned Revenue	100,00	100,00
Utang Bank Jangka Panjang Long-Term Bank Loans	100,00	97,51
Utang Lain-Lain Jangka Panjang Other Long-Term Debts	100,00	100,00
Pendapatan Revenue	20,06	39,29
Beban Pemasaran dan Penjualan Marketing and Selling Expenses	12,69	19,12
Penghasilan Keuangan Finance Income	94,49	100,00
Beban Keuangan Finance Costs	70,04	96,88

\*) disajikan kembali/restated

### Alasan Dilakukannya Transaksi

Transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak berelasi bertujuan untuk mendukung kegiatan operasional Perseroan.

### Reason for Transaction

The Company's transactions with related parties are intended to support its operational activities.

## Penjelasan Mengenai Kewajaran Transaksi

Kewajaran seluruh transaksi yang dilakukan Perseroan dengan pihak-pihak berelasi atau berafiliasi telah diungkapkan pada laporan keuangan, dan telah sesuai dengan standar PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi". Semua transaksi dengan pihak yang berelasi, dilakukan dengan persyaratan, tingkat harga, dan kondisi normal sebagaimana dilakukan dengan pihak ketiga dan telah diungkapkan dalam laporan keuangan. Tidak terdapat perbedaan kebijakan harga dan syarat transaksi antara pihak-pihak berelasi dan pihak ketiga.

## Kebijakan Perusahaan Terkait Mekanisme Review atas Transaksi

Mekanisme *review* Perseroan atas transaksi dengan pihak-pihak berelasi dilakukan melalui proses audit, khususnya audit yang telah dilakukan oleh akuntan publik dan dipublikasikan, di mana mekanisme ini tertuang dalam PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi".

## Pemenuhan Peraturan dan Ketentuan Terkait

Pemenuhan peraturan dan ketentuan terkait, yaitu Standar Akuntansi Keuangan (SAK) di Indonesia dilakukan melalui upaya pengungkapan PSAK 7 (revisi 2014) tentang "Pengungkapan Pihak-Pihak Berelasi" dalam laporan keuangan Perusahaan tahun 2021 yang telah diaudit oleh Akuntan Publik.

## Explanation of Transaction Fairness

The fairness of these transactions is disclosed in the financial statements and complies with PSAK 7 standards (revised 2014) regarding "Related Party Disclosures." All transactions with related parties are conducted under normal terms, price levels, and conditions as with third parties and are disclosed in the financial statements. There are no differences in pricing policies and transaction terms between related parties and third parties.

## Company Policy Regarding Transaction Review Mechanisms

The Company's review mechanism for transactions with related parties is conducted through an audit process, especially audits carried out by public accountants and published, as outlined in PSAK 7 (revised 2014) regarding "Related Party Disclosures."

## Fulfillment of Related Regulations and Provisions

To comply with related regulations and provisions, such as the Financial Accounting Standards (SAK) in Indonesia, efforts have been made to disclose PSAK 7 (revised 2014) regarding "Related Party Disclosures" in the Company's 2021 financial report, which has been audited by a Public Accountant.

# PERUBAHAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

## » Changes in Legislation

Sepanjang tahun 2023, terdapat perubahan peraturan perundangan-undangan di bidang perkebunan, dengan terbitnya Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang, yang disahkan dan diundangkan oleh Pemerintah pada 31 Maret 2023. Adapun beberapa peraturan yang mengalami perubahan yaitu:

Throughout 2023, there were changes in legislation in the plantation sector, with the issuance of Law Number 6 of 2023 concerning the Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2022 concerning Job Creation into law, which was ratified and promulgated by the Government on March 31, 2023. Some of the regulations that have changed are:

No.	Nomor Regulasi Regulation Number	Judul Title
1	UU No. 39 Tahun 2014 Law No. 39 of 2014	Perkebunan Plantations
2	UU No. 3 Tahun 2014 Law No. 3 of 2014	Perindustrian Industrial Affairs
3	UU No. 18 Tahun 2013 Law No. 18 of 2013	Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Prevention and Eradication of Forest Destruction



No.	Nomor Regulasi Regulation Number	Judul Title
4	UU No. 24 Tahun 2011 Law No. 24 of 2011	Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Social Security Agency
5	UU No. 32 Tahun 2009 Law No. 32 of 2009	Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Environmental Protection and Management
6	UU No. 26 Tahun 2007 Law No. 26 of 2007	Penataan Ruang Spatial Planning
7	UU No. 40 Tahun 2007 Law No. 40 of 2007	Perseroan Terbatas Limited Liability Company
8	UU No. 25 Tahun 2007 Law No. 25 of 2007	Penanaman Modal Capital Investment
9	UU No. 19 Tahun 2004 Law No. 19 of 2004	Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law Number 1 of 2004 concerning Amendments to Law Number 41 of 1999 concerning Forestry to Become Law
10	UU No. 40 Tahun 2004 Law No. 40 of 2004	Sistem Jaminan Sosial Nasional National Social Security System
11	UU No. 13 Tahun 2003 Law No. 13 of 2003	Ketenagakerjaan Manpower
12	UU No. 19 Tahun 2003 Law No. 19 of 2003	Badan Usaha Milik Negara State-Owned Enterprises

## PERUBAHAN KEBIJAKAN AKUNTANSI

### » Changes in Accounting Policy

#### Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PTPN I dan PTPN IV

Pada 27 Desember 2023, Perseroan dan PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I") telah menandatangani perjanjian Kerja Sama Operasi ("KSO") atas pengelolaan Kebun, Pabrik Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Inti Sawit milik PTPN I termasuk optimalisasi lahan yang akan ditanami kelapa sawit dan lahan kebun karet yang akan dikonversi menjadi kebun kelapa sawit. Perjanjian ini efektif berlaku sejak 1 April 2024.

#### Pembentukan dan Penetapan Region Head dan Senior Executive Vice President (SEVP) Region KSO VI & VII

Pada 1 April 2024, berdasarkan Surat No. DPSB/SKPTS/140/2024 sehubungan dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara Perseroan dan PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I"). Perseroan membentuk Regional KSO Kelapa Sawit serta melakukan perubahan struktur organisasi.

Penambahan regional KSO pada struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

1. Regional 6 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 6) dan KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)

#### Joint Operation Agreement ("JOA") between PTPN I and PTPN IV

On December 27, 2023, the Company and PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I") signed a joint operation agreement ("KSO") for the management of PTPN I's plantations, palm oil mills and palm kernel processing plants including the optimization of land to be planted with palm oil and rubber plantation land to be converted into oil palm plantations. This agreement is effective from April 1, 2024.

#### Establishment and Appointment of Region Head and Senior Executive Vice President (SEVP) of KSO Region VI & VII

As of April 1, 2024, pursuant to letter No. DPSB/SKPTS/140/2024 in relation to joint operation ("KSO") agreement between the Company and PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I"). The Company established the KSO Regional for palm oil and and made changes to the organizational structure.

The addition of regional KSOs to the organizational structure is as follows:

1. Regional 6 KSO, is responsible for KSO Palm Oil – Eks PTPN 1 (Regional 6) and KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)



2. Regional 7 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 2 & 7) dan KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)
3. Regional 8 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 8)

Namun, pada 30 April 2024, berdasarkan surat No. DPSB/X/257/IV/2024 dan keputusan Surat Keputusan Direksi Perseroan No. DPSB/SKPTS/149/2024 tanggal 29 April 2024 tentang perubahan hubungan struktur organisasional KSO yang meliputi pengelolaan kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, dan pusat penelitian inti sawit. Perseroan melakukan perubahan atas penambahan region KSO, sebagai berikut:

1. Regional 1, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit Distrik Sei Meranti Tujuh, Distrik Aceh Timur (DATIM), Distrik Jawa Barat (DJABA), dan KSO eks PTPN 1 (Regional 2)
2. Regional 2, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 1 & 8)
3. Regional 6 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 6) dan KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)
4. Regional 7 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 2) dan KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)

## Pembentukan dan Penetapan Region Head dan Senior Executive Vice President (SEVP) Region KSO VI & VII

Atas pembentukan Region KSO 6 dan 7, sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPRS/R/71/2024 tanggal 30 April 2024 dan No. DSDM/SKPRS/R/71/2024 tanggal 8 Mei 2024, tentang penempatan Region Head dan anggota-anggota Senior Executive Vice President (SEVP) pada KSO Kelapa Sawit antara Perseroan dan PTPN I sebagai berikut:

1. Syahriadi Siregar sebagai Region Head Regional 6 KSO
2. T. Zein Ichwan sebagai SEVP Operation Regional 6 KSO
3. Denny Ramadhan Nasution sebagai Region Head Regional 7 KSO
4. Darmansyah Siregar sebagai SEVP Operation Regional 7 KSO
5. Bambang Eko Prasetyo sebagai SEVP Operation Regional 7 KSO

2. Regional 7 KSO, is responsible for KSO Palm Oil – Eks PTPN 1 (Regional 2 & 7) and KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)
3. Regional 8 KSO, is responsible for KSO Palm Oil – Eks PTPN 1 (Regional 8)

However, as of April 30, 2024, based on letter No. DPSB/X/257/IV/2024 and the Decree of the Company's Board of Directors No. DPSB/SKPTS/149/2024 dated April 29, 2024 regarding changes in organizational structure for the KSO which included management of oil palm plantations, palm oil mills, and palm kernel research centers. The Company made changes to the addition of the KSO region, as follows:

1. Regional 1, is responsible for KSO Kelapa Sawit Distrik Sei Meranti Tujuh, Distrik Aceh Timur (DATIM), Distrik Jawa Barat (DJABA), and KSO eks PTPN 1 (Regional 2)
2. Regional 2, is responsible for KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 1 & 8)
3. Regional 6 KSO, is responsible for KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 6) and KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)
4. Regional 7 KSO, is responsible for KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 2) dan KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)

## Establishment and Appointment of Region Head and Senior Executive Vice President (SEVP) of KSO Region VI & VII

Regarding the establishment of KSO Regions 6 and 7, in accordance with the Decree of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/SKPRS/R/71/2024 dated April 30, 2024 and No. DSDM/SKPRS/R/71/2024 dated May 8, 2024, regarding the placement of the Region Head and members of the Senior Executive Vice President (SEVP) in the Palm Oil KSO between the Company and PTPN I as follow:

1. Syahriadi Siregar as Head Regional 6 KSO
2. T. Zein Ichwan as SEVP Operation Regional 6 KSO
3. Denny Ramadhan Nasution as Region Head Regional 7 KSO
4. Darmansyah Siregar as SEVP Operation Regional 7 KSO
5. Bambang Eko Prasetyo as SEVP Business Support Regional 7 KSO

## INFORMASI KEUANGAN YANG TELAH DILAPORKAN YANG MENGANDUNG KEJADIAN YANG SIFATNYA LUAR BIASA DAN JARANG TERJADI

### » Reported Financial Information Containing Extraordinary and Rare Events

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat pelaporan informasi keuangan yang mengandung kejadian luar biasa dan jarang terjadi.

Throughout 2023, there was no reporting of financial information of extraordinary and rare events.

## KONTRIBUSI KEPADA NEGARA

### » Contribution to the Country

Perseroan memberikan kontribusi kepada negara berupa pembayaran pajak, dividen, serta pungutan ekspor baik kepada pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Realisasi kontribusi yang diberikan perusahaan per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

The Company contributes to the state through tax payments, dividends, and export levies to both the central and regional governments. The Company's contributions as of December 31, 2023, are as follows:

dalam Rp juta | in million Rp

Keterangan Description	2023	2022
Pajak Bumi dan Bangunan Land and Building Tax	90.358	95.368
PPN Masukan Input VAT	393.091	301.777
PPN Keluaran (Kompensasi) Output VAT (Compensation)	1.095.974	134.592
PPH Pasal 21 Income Tax Article 21	186.558	87.630
PPH Pasal 22 Income Tax Article 22	1.316	-
PPH Jasa Giro/Deposito Pasal 23 Current Account/Deposit Service Income Tax Article 23	7.837	5.174
PPH Pasal 25/29 Income Tax Article 25/29	545.385	1.041.531
PPH Pasal 4 Ayat 2 Income Tax Article 4 Paragraph 2	2.590	-
Pungutan Ekspor Export Tax	38.316	7.937
Total Rp Total Rp	2.361.425	1.674.008
Dividen Dividend	-	-

### Devisa

Perseroan berkontribusi pada peningkatan devisa negara yang berasal dari penjualan ekspor komoditas kelapa sawit. Sampai dengan Desember 2023, Perseroan menghasilkan devisa sebesar Rp1.411 miliar, meningkat 754,54% dari tahun 2022 sebesar Rp187,49 miliar di samping turunnya pendapatan ekspor.

### Foreign Exchange

The Company contributes to the increase in the country's foreign exchange through its export sales of palm oil commodities. As of December 2023, the Company has generated Rp1,411 billion in foreign exchange, marking a 754.54% increase from Rp187.49 billion in 2022, despite a decrease in export revenue.

# INFORMASI KELANGSUNGAN USAHA

## » Business Continuity Information



Selama 1 (satu) tahun ke depan, Perseroan akan terus berfokus pada pembangunan fondasi baru, di antaranya:

- Sepenuhnya bermigrasi ke model operasi baru
- Melakukan transformasi bisnis hilir CPO
- Menyiapkan fondasi untuk masa depan digital
- Membentuk kemitraan strategis untuk meningkatkan bisnis hilir
- Mengimplementasikan inisiatif ESG secara berkelanjutan
- Mengaktifkan operasional KSO
- Memulihkan komoditas karet dan teh
- Melakukan restrukturisasi utang dan tata kelola investasi

Over the next year, the Company will continue to focus on building a new foundation, including:

- Fully migrating to a new operating model
- Transforming the CPO downstream business
- Preparing the foundation for a digital future
- Forming strategic partnerships to enhance the downstream business
- Implementing ESG initiatives sustainably
- Activating KSO operations
- Recovering rubber and tea commodities
- Restructuring debt and investment governance.



# TATA KELOLA PERUSAHAAN

Corporate Governance



# 06

Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada setiap pemangku kepentingan dalam setiap aktivitas, baik operasional maupun bisnis.

The Company prioritizes fairness and equality by treating every stakeholder equally in every activity, whether operations or business.



# TATA KELOLA PERUSAHAAN

## » Good Corporate Governance

### Komitmen Perusahaan

**Perseroan berkomitmen penuh untuk terus mengimplementasikan tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) secara konsisten dan berkelanjutan. Praktik GCG yang sehat dan kuat tentunya akan berdampak besar bagi kelangsungan dan kesejahteraan Perseroan secara jangka panjang.**

#### Company's Commitment

The Company is fully committed to consistently and sustainably implementing Good Corporate Governance (GCG). Healthy and strong GCG practices will certainly have a major impact on the long-term sustainability and prosperity of the Company.

Setiap individu Perseroan wajib mematuhi dan mempraktikkan prinsip-prinsip GCG di seluruh pekerjaan dan pelaksanaan tugasnya sehari-hari, yaitu:

1. Bekerja dengan disiplin dan penuh tanggung jawab untuk menghasilkan kinerja terbaik, profitabilitas yang unggul, dan nilai tambah yang optimal bagi seluruh pemangku kepentingan.
2. Membangun mekanisme pengambilan keputusan yang berkualitas pada setiap organ Perseroan, yaitu didasarkan pada nilai moral serta aspek kepatuhan terhadap peraturan dan perundang-undangan yang berlaku;
3. Mendorong pengelolaan Perseroan yang profesional, efektif, dan efisien dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perseroan;
4. Memaksimalkan nilai Perseroan melalui peningkatan kualitas pengelolaan sesuai prinsip transparansi, kemandirian, akuntabilitas, pertanggungjawaban, dan kewajiban pada setiap aktivitas operasional dan bisnis;
5. Mendorong terlaksananya pengelolaan Perseroan yang profesional dan independen;
6. Mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan Perseroan.

Every individual in the Company is obliged to comply with and practice GCG principles in all their work and implementation of daily duties, namely:

1. Working with discipline and responsibility to produce the best performance, excellent profitability, and optimal added value for all stakeholders.
2. Building a quality decision-making mechanism in each Company organ, which is based on moral values and aspects of compliance with applicable laws and regulations.
3. Encouraging professional, effective, and efficient Company management in order to realize the Company's vision and mission.
4. Maximizing the value of the Company through improving the quality of management in accordance with the principles of transparency, independence, accountability, responsibility, and fairness in every operational and business activity.
5. Encouraging the implementation of professional and independent company management.
6. Preventing irregularities in Company management.



## Dasar Hukum Penerapan Praktik GCG

Dasar hukum kebijakan pemerintah terkait implementasi praktik GCG yang telah diratifikasi oleh manajemen Perseroan adalah:

1. Undang-Undang RI No. 19 tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang RI No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN; dan
4. Surat Keputusan Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara No.SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

## Legal Basis for Implementing GCG Practices

The government policy regarding the implementation of GCG practices that has been ratified by the Company's management is based on the following legal foundations:

1. Republic of Indonesia Law No. 19 of 2003 concerning State-Owned Enterprises;
2. Republic of Indonesia Law No. 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies;
3. Regulation of the Minister of State for SOEs No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs; and
4. Decree of the Secretary of the Ministry of State-Owned Enterprises No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.



Selain itu, Perseroan juga senantiasa mengadopsi dan mengaplikasikan perkembangan terkini terkait *best practice* yang berlaku, meliputi:

1. *Principles of Corporate Governance oleh Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*;
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*;
3. Pedoman umum GCG Indonesia oleh Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG);
4. Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK).

## Kebijakan GCG

Dengan berlandaskan pada dasar hukum dan *best practice* yang berlaku, Perseroan telah membentuk dan terus mengembangkan berbagai kebijakan dan pedoman internal, antara lain sebagai berikut:

1. Pedoman Perilaku;
2. Pedoman Tata Kelola Perusahaan;
3. Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi;
4. Pedoman Pengawasan Internal;
5. Pedoman Pelaksanaan Sekretaris Perusahaan;
6. Piagam Komite Audit;
7. Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG;
8. Pedoman Pengenalan Dewan Komisaris dan Direksi;
9. Pedoman Penanganan Gratifikasi;
10. Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan; dan
11. Pedoman Sistem Pelaporan Pelanggaran.

## Prinsip-Prinsip GCG GCG Principles

<p><b>Transparansi</b> Transparency</p>	<p>Perseroan menyediakan informasi yang dibutuhkan oleh publik terkait produk, jasa, dan aktivitas operasionalnya dengan akses informasi yang mudah, efektif, dan terpercaya.</p>	<p>The Company provides the public with easy, effective, and reliable access to information about its products, services, and operational activities.</p>
<p><b>Akuntabilitas</b> Accountability</p>	<p>Setiap individu Perseroan wajib menjalankan amanah, wewenang, dan tanggung jawab yang dimilikinya dengan integritas dan akuntabilitas.</p>	<p>Every individual in the Company must carry out their authorities and responsibilities with integrity and accountability.</p>
<p><b>Tanggung Jawab</b> Responsibility</p>	<p>Seluruh individu Perseroan senantiasa melaksanakan aktivitas bisnis sejalan dengan etika yang berlaku, memenuhi kewajiban terhadap pemerintah sesuai hukum yang berlaku, menghormati budaya masyarakat di daerah operasional Perseroan, bekerja sama secara aktif demi kepentingan bersama, serta berupaya optimal untuk memberikan kontribusi yang nyata kepada pemangku kepentingan.</p>	<p>All of the Company's employees conduct business activities in accordance with applicable ethics, fulfill obligations to the government according to applicable law, respect the culture of the community in the Company's operational areas, actively collaborate for the common good, and make optimal efforts to provide fundamental contributions to stakeholders.</p>
<p><b>Kemandirian</b> Independence</p>	<p>Perseroan dikelola secara mandiri dan profesional tanpa mengalami benturan kepentingan serta pengaruh/tekanan dari pihak manapun sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.</p>	<p>The Company is managed independently and professionally without experiencing conflicts of interest or influence/pressure from any party following applicable laws and regulations.</p>
<p><b>Kewajaran dan Kesetaraan</b> Fairness and Equality</p>	<p>Perseroan senantiasa mengedepankan prinsip kewajaran dan kesetaraan dengan memberikan perlakuan yang wajar dan setara kepada setiap pemangku kepentingan dalam setiap aktivitas, baik operasional maupun bisnis.</p>	<p>The Company prioritizes fairness and equality by treating every stakeholder equally in every activity, whether operations or business.</p>

Additionally, the Company also consistently adopts and applies the latest developments related to applicable best practices, including:

1. *Principles of Corporate Governance by the Organization for Economic Co-Operation and Development (OECD)*;
2. *ASEAN Corporate Governance Scorecard*;
3. General guidelines for Indonesian GCG by the National Governance Policy Committee (KNKG);
4. Public Company Governance Guidelines by the Financial Services Authority (OJK).

## GCG Policies

The Company has established various internal policies and guidelines based on applicable legal principles and best practices, including:

1. Code of Conduct;
2. Corporate Governance Guidelines;
3. Guidelines for the Work Procedures of the Board of Commissioners and Directors;
4. Internal Supervision Guidelines;
5. Implementation Guidelines for Corporate Secretary;
6. Audit Committee Charter;
7. Risk Management and GCG Monitoring Committee Charter;
8. Guidelines for Introduction to the Board of Commissioners and Directors;
9. Guidelines for Handling Gratification;
10. Guidelines for Handling Conflicts of Interest; and
11. Violation Reporting System Guidelines.



## Penilaian Penerapan GCG

Perseroan melakukan penilaian penerapan GCG setiap tahun untuk mengetahui kualitas dan tingkat kecukupan penerapan tata kelola di perusahaan. Penilaian ini dilakukan oleh Asesor Independen dengan tujuan:

1. Memahami dan meningkatkan kualitas penerapan GCG secara berkelanjutan;
2. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan penerapan GCG, serta mengusulkan rekomendasi perbaikan untuk mengurangi celah (*gap*) antara kriteria dan penerapan GCG.
3. Memonitor konsistensi penerapan GCG dan memperoleh masukan untuk penyempurnaan dan pengembangan di masa mendatang.

Berdasarkan ketentuan Pasal 44 (1) Permen BUMN 01/2011, Perseroan melakukan pengukuran atas kualitas penerapan GCG yang dilaksanakan berkala setiap 2 (dua) tahun dalam 2 (dua) bentuk yaitu:

1. Penilaian (*assessment*) atas pelaksanaan GCG; dan
2. Evaluasi (*review*) atas tindak lanjut atas rekomendasi perbaikan dari hasil penilaian sebelumnya.

Penilaian terhadap penerapan GCG Perseroan dilaksanakan berdasarkan metode dan prosedur *assessment* sesuai Keputusan Sekretaris Menteri BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik pada Badan Usaha Milik Negara.

Aspek penilaian penerapan GCG mencakup komitmen terhadap penerapan tata kelola secara berkelanjutan, pemegang saham dan RUPS/pemilik modal, Dewan Komisaris, Direksi, pengungkapan informasi dan transparansi, dan aspek lainnya yang terangkum dalam 43 indikator dengan jumlah 153 parameter.

Pada 2022, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Sumatra Utara telah melakukan penilaian terhadap praktik GCG Perseroan dengan hasil skor sebesar 92,43 dari total skor sebesar 100 dengan predikat "Sangat Baik".

**Tabel Hasil Assessment GCG Tahun 2022 Berdasarkan Kriteria BUMN**  
Table of GCG Assessment Results for 2022 Based on SOE Criteria

Aspek Pengujian Assessment Aspects	Nilai Maksimal Maximum Score	2022	
		Capaian Achievement	Tingkat Pemenuhan Fulfillment Level
Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara Berkelanjutan Commitment to Sustainable Governance Implementation	7,00	7,00	100,00
Pemegang Saham dan RUPS Shareholders and GMS	9,00	8,71	96,79
Dewan Komisaris Board of Commissioners	35,00	33,84	96,69

## GCG Implementation Assessment

The Company conducts an annual assessment of GCG implementation to evaluate the quality and adequacy of governance within the company. This assessment is carried out by an Independent Assessor with the following objectives:

1. Understand and enhance the quality of GCG implementation continuously.
2. Identify strengths and weaknesses of GCG implementation, and propose recommendations for improvement to bridge the gap between GCG criteria and implementation.
3. Monitor the consistency of GCG implementation and gather input for future improvements and developments.

In accordance with Article 44 (1) of BUMN Ministerial Decree 01/2011, the Company measures the quality of GCG implementation every 2 (two) years in two forms:

1. Assessment of GCG implementation; and
2. Review of the follow-up to recommendations for improvement from the previous assessment.

The assessment of the Company's GCG implementation is conducted based on assessment methods and procedures outlined in the Decree of the Secretary of the Minister of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Assessment and Evaluation Indicators for the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises.

The assessment aspects of GCG implementation include commitment to implementing sustainable governance, shareholders and GMS/capital owners, Board of Commissioners, Directors, information disclosure and transparency, and other relevant aspects, summarized in 43 indicators with a total of 153 parameters.

In 2022, the North Sumatra Province Representative Financial and Development Supervisory Agency (BPKP) conducted an assessment of the Company's GCG practices, resulting in a score of 92.43 out of a total score of 100, with a rating of "Very Good."

Aspek Pengujian Assessment Aspects	Nilai Maksimal Maximum Score	2022	
		Capaian Achievement	Tingkat Pemenuhan Fulfillment Level
Direksi Board of Directors	35,00	34,05	97,28
Pengungkapan Informasi dan Transparansi Information Disclosure and Transparency	9,00	5,08	56,45
Aspek Lainnya Other Aspects	5,00	3,75	75,00
<b>Jumlah</b> Total	<b>100,00</b>	<b>92,43</b>	<b>92,43</b>

## Tindak Lanjut atas Area of Improvement

Perseroan telah menindaklanjuti sebagian besar Area of Improvement (Aol) atas hasil asesmen penerapan GCG tahun 2022. Berdasarkan Laporan *Monitoring Tindak Lanjut Aol Penerapan GCG* pada Perseroan, berikut hasil tindak lanjut atas Aol hasil asesmen GCG yang dilaksanakan pada tahun 2023:

### Tindak Lanjut atas Aol Follow up on Aol

Indikator/Parameter Indicators/Parameters	Tindak Lanjut Follow-Up	Uraian Tindak Lanjut Follow-up Description	Keterangan Notes
<b>Aspek I: Komitmen terhadap Penerapan Tata Kelola secara berkelanjutan</b> Aspect I: Commitment to the Implementation of Sustainable Governance			
a. Pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang Baik tidak menjadi salah satu unsur <i>Key Performance Indicator</i> (KPI) yang dituangkan dalam Kontrak Manajemen. Implementation of GCG is not one of the elements of the Key Performance Indicator (KPI) set forth in the Management Contract.	✓	Kontrak Manajemen tahun 2022 dan 2023 telah mencantumkan GCG sebagai KPI Direksi dengan target skor sebesar 90,30 di tahun 2022 dan 90,50 di tahun 2023. The 2022 and 2023 Management Contracts list GCG as a KPI for the Board of Directors, with a target score of 90.30 in 2022 and 90.50 in 2023.	Tuntas Completed
b. Perencanaan, implementasi, pelaporan dan evaluasi terhadap pengendalian gratifikasi belum dilaksanakan. Planning, implementation, reporting and evaluation of gratuity control has not been carried out.	✓	Sudah ada perencanaan, pelaksanaan, pelaporan, dan evaluasi terhadap pengendalian gratifikasi sesuai Kepdir PTPN IV No. 04.03/Kpts/01/I/2018 tanggal 23 Januari 2018. There has been planning, implementation, reporting, and evaluation of gratification control in accordance with the Decree of the Director of PTPN IV No. 04.03/Kpts/01/I/2018 dated January 23, 2018.	Tuntas Completed
<b>Aspek II: Pemegang Saham/RUPS</b> Aspect II: Shareholders/GMS			
a. Pelaksanaan uji kelayakan dan kepatutan oleh pemegang saham belum menilai semua kriteria penilaian Direksi yang ditetapkan dalam ketentuan perundang-undangan. The implementation of the fit and proper test by the shareholders has not assessed all the Board of Directors assessment criteria set out in statutory provisions.	✓	N/A (Tidak ada perubahan komposisi Direksi tahun 2022) N/A (There was no change in the Board of Directors' composition in 2022)	Tuntas Completed
b. PS belum meminta masukan secara formal dari Departemen teknis BUMN untuk calon anggota Komisaris. PS has not asked for formal input from the SOE technical department for prospective members of the Board of Commissioners.	✓	N/A (Tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris tahun 2022). N/A (There was no change in the Board of Commissioners' composition in 2022)	Tuntas Completed

## Follow-up on Areas of Improvement

The Company has addressed most of the Areas of Improvement (Aol) identified in the 2022 GCG implementation assessment. Based on Aol Follow-up Monitoring Report on GCG Implementation, the results of the Aol on GCG assessment result in 2023 are as follows:

Indikator/Parameter Indicators/Parameters	Tindak Lanjut Follow-Up	Uraian Tindak Lanjut Follow-up Description	Keterangan Notes
<p>c. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal belum menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan komposisinya. (Jumlah komisaris maksimal sama dengan jumlah Direksi). Shareholders/GMS/Capital Owners have not determined the appointment of members of the Board of Commissioners/Supervisory Board according to their composition. (The maximum number of commissioners is the same as the number of directors).</p>	√	<p>N/A (Tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris tahun 2022). N/A (There was no change in the Board of Commissioners' composition in 2022)</p>	Tuntas Completed
<p>d. Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal belum menetapkan pengangkatan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas sesuai dengan komposisinya. (Anggota Komisaris Independen dinyatakan secara eksplisit dalam SK pengangkatan sebanyak 20% dari jumlah seluruh Komisaris). Shareholders/GMS/Capital Owners have not determined the appointment of members of the Board of Commissioners/Supervisory Board according to their composition. (Members of independent commissioners are stated explicitly in the appointment decree as much as 20% of the total number of commissioners).</p>	√	<p>N/A (Tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris tahun 2022). N/A (There was no change in the Board of Commissioners' composition in 2022)</p>	Tuntas Completed
<p>e. Pemegang Saham /RUPS/Pemilik Modal belum memberikan pengesahan/persetujuan terhadap rancangan RJPP atau Revisi RJPP. Shareholders/GMS/Capital Owners have not ratified/approved the RJPP draft or the RJPP Revision.</p>	√	<p>N/A (Tidak terdapat pengajuan rancangan). N/A (No design was submitted).</p>	Tuntas Completed
<p>f. Pengesahan RKAP dilaksanakan belum tepat waktu sesuai ketentuan. The ratification of the RKAP has not been carried out in a timely manner according to the provisions.</p>	√	<p>Berdasarkan Risalah RUPS No. 04.06/RUPS-RKAP/01/1/ 2022 Tanggal 26 Januari 2022, RKAP Tahun 2022 telah disahkan tepat waktu yaitu 26 Januari 2022 (paling lambat 31 Januari 2022). Based on the Minutes of the GMS No. 04.06/RUPS-RKAP/01/1/2022 dated January 26, 2022, the 2022 RKAP was ratified on time, namely January 26, 2022 (no later than January 31, 2022).</p>	Tuntas Completed
<p>g. Persetujuan/keputusan oleh Pemegang Saham/RUPS/Pemilik Modal dilaksanakan tepat waktu. (RUPS/Pemilik Modal memberikan persetujuan/keputusan dalam waktu paling lambat 30 hari untuk KSO/BOT dan maksimal 7 hari untuk pelepasan asset setelah dokumen usulan dan penjelasan diterima secara lengkap sesuai dengan yang diperlukan oleh RUPS/Pemilik Modal dalam mengambil keputusan). Approval/decisions by Shareholders/GMS/Capital Owners are carried out on time. (GMS/Capital Owners give approval/decisions no later than 30 days for KSO/BOT and a maximum of 7 days for disposal of assets after the proposal documents and explanations are received in full according to what is required by the GMS/Capital Owners in making decisions.)</p>	X	-	Belum Tuntas Not Completed
<p>h. Belum ada pedoman/sistem Penilaian Kinerja Dewan Komisaris yang memuat sekurang-kurangnya indikator kinerja utama dan kriteria keberhasilan. There are currently no guidelines or grading systems in place to evaluate the performance of the Board of Commissioners, including key performance indicators and success criteria.</p>	√	<p>Pedoman Penilaian Kinerja Dewan Komisaris mengacu kepada Peraturan Menteri BUMN No. PER-11/ MBU/11/2020 tentang Kontrak Manajemen dan Kontrak Manajemen Tahunan Direksi BUMN. The Board of Commissioners Performance Assessment Guidelines refer to Regulation of the Minister of SOEs No. PER-11/MBU/11/2020 concerning Management Contracts and Annual Management Contracts of the Board of Directors of SOEs.</p>	Tuntas Completed

Indikator/Parameter Indicators/Parameters	Tindak Lanjut Follow-Up	Uraian Tindak Lanjut Follow-up Description	Keterangan Notes
i. Belum ada kontrak kinerja komisaris secara kolegal yang disahkan oleh RUPS. There is no collegial commissioner performance contract ratified by the GMS.	✓	Kontrak Manajemen antara Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV dengan para Pemegang Saham PT Perkebunan Nusantara IV Tahun 2022 telah dibuat dan ditandatangani para pihak pada 26 Januari 2022 disertai Lampiran KPI Dekom Tahun 2022. The Management Contract between the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IV and the Shareholders of PT Perkebunan Nusantara IV for 2022 was made and signed by the parties on January 26, 2022, accompanied by the Attachment of the 2022 Board of Commissioners KPI.	Tuntas Completed
j. Belum ada Usulan pengajuan auditors eksternal dari Komisaris/Dewan Pengawas kepada RUPS/Pemilik Modal. There is no proposal for the submission of external auditors from the Commissioners/Supervisory Board to the GMS/Capital Owners.	✓	Berdasarkan Surat Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV No. DK-58/VI/2022 tanggal 3 Juni 2022 tentang usulan remunerasi Dewan Komisaris dan direksi serta Usulan KAP untuk Audit Tahun Buku 2022 dengan usulan KAP Purwanto, Sungkoro dan Surja (Ernst&Young). Based on the Letter of the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IV No. DK-58/VI/2022, dated June 3, 2022, concerning the proposed remuneration of the Board of Commissioners and directors and the KAP Proposal for the Audit of the 2022 Financial Year with the proposal of KAP Purwanto, Sungkoro, and Surja (Ernst & Young).	Tuntas Completed
k. Belum ada hasil telaahan laporan tahunan oleh pemegang saham/Pemilik Modal dan belum ada hasil telaahan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas oleh Pemilik Modal. There has been no review of the annual reports by shareholders/Capital Owners and no results of a review of the supervisory duties of the BoC/Supervisory Board by Capital Owners.	✓	Terdapat penelaahan <i>draft</i> Laporan Tahunan 2022 dan laporan tugas pengawasan Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. The draft of the 2022 Annual Report and the Supervisory Task Report of the Board of Commissioners/Supervisory Board were reviewed.	Tuntas Completed
l. Belum ada pembahasan dan evaluasi dan/atau arahan atas pelaksanaan GCG pada Perusahaan. There has been no discussion and evaluation and/or directives on the implementation of GCG in the Company.	✓	Terdapat pembahasan dan evaluasi dan/atau arahan atas pelaksanaan tata kelola perusahaan dalam rapat BOD <i>Holding</i> . There are discussions, evaluations, and directions on the implementation of corporate governance in the BOD Holding meeting.	Tuntas Completed
m. Belum ada rencana tindak atas <i>area of improvement</i> yang dihasilkan dari <i>assessment</i> GCG dan realisasi progress pelaksanaan rencana tindak. There is currently no action plan for the area of improvement resulting from the GCG assessment and the actual progress of the action plan implementation.	✓	Berdasarkan Surat No. DSPN/PTPN/ 251/2022 Perihal Pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut AOI Hasil Assessment GCG Tahun 2021 dari Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III. Based on Letter No. DSPN/PTPN/251/2022 regarding the Implementation of the AOI Follow-up Plan for the Results of the 2021 GCG Assessment from the Head of the Corporate Secretariat Division of PT Perkebunan Nusantara III.	Tuntas Completed
<b>Aspek III: Dewan Komisaris</b> Aspect III: Board of Commissioners			
a. Tidak ada pelaksanaan pengenalan terhadap Dewan Komisaris yang baru sesuai materi program pengenalan setidaknya pengenalan prinsip-prinsip GCG, gambaran umum BUMN, kewenangan yang didelegasikan, tugas dan tanggung jawab Direksi dan Komisaris. There is no introduction to the new Board of Commissioners according to the introduction program material, at least an introduction to GCG principles, general description of SOEs, delegated authority, duties and responsibilities of the Board of Directors and Board of Commissioners.	✓	N/A (Tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris tahun 2022). N/A (There was no change in the Board of Commissioners' composition in 2022)	Tuntas Completed

Indikator/Parameter Indicators/Parameters	Tindak Lanjut Follow-Up	Uraian Tindak Lanjut Follow-up Description	Keterangan Notes
<p>b. Dewan Komisaris menyampaikan tanggapan tertulis berupa pendapat dan saran mengenai rancangan RJPP kepada RUPS/Pemilik Modal tidak tepat waktu. The Board of Commissioners submitted a written response in the form of opinions and suggestions regarding the RJPP draft to the GMS/Capital Owners but it was not timely.</p>	✓	<p>N/A (Tidak ada perubahan komposisi Dewan Komisaris tahun 2022). N/A (There was no change in the Board of Commissioners' composition in 2022)</p>	Tuntas Completed
<p>c. Dewan Komisaris tidak memberikan arahan/ telaah atas kebijakan, khususnya pada tingkat operasional. The Board of Commissioners does not provide direction/review of policies, particularly at the operational level.</p>	✓	<p>Dewan Komisaris telah memberikan arahan/ telaah atas kebijakan, khususnya pada tingkat operasional. The Board of Commissioners has provided recommendations/reviews on policies, particularly on operational matters.</p>	Tuntas Completed
<p>d. Dewan Komisaris belum melakukan penilaian atas efektivitas Sistem Pengendalian Internal pada tingkat entitas. The Board of Commissioners has not yet assessed the effectiveness of the Internal Control System at the entity level.</p>	✓	<p>Laporan Evaluasi Sistem Pengendalian Intern tahun 2022 PTPN IV. Internal Control System Evaluation Report 2022 of PTPN IV.</p>	Tuntas Completed
<p>e. Dewan Komisaris belum menyampaikan arahan dan saran kepada Direksi tentang kebijakan mutu dan pelayanan beserta pelaksanaannya. The Board of Commissioners has not yet submitted directions and suggestions to the Directors regarding quality and service policies and their implementation.</p>	✓	<p>Sesuai dengan Surat Dewan Komisaris kepada Direktur No. DK.103/X/2022, tanggal 13 Oktober 2022 tentang Tanggapan terhadap Telaah Kebijakan Mutu Perusahaan. Based on the Letter of the Board of Commissioners to the Director No. DK.103/X/2022, dated October 13, 2022, concerning Response to the Review of the Company's Quality Policy.</p>	Tuntas Completed
<p>f. Dewan Komisaris tidak melakukan telaah atas laporan hasil audit atas kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku (PSA-62) yang diterbitkan Akuntan Publik. The Board of Commissioners did not review the audit report on compliance with applicable laws and regulations (PSA-62) issued by a Public Accountant.</p>	✓	<p>Evaluasi Laporan Hasil Audit atas Kepatuhan(PSA62) dan Management Letter 2021 No. KA/19/L/IX/2022, tanggal 8 September 2022. Evaluation of the Compliance Audit Report (PSA62) and Management Letter 2021 No. KA/19/L/IX/2022, dated September 8, 2022.</p>	Tuntas Completed
<p>g. Dewan Komisaris tidak menyampaikan usulan auditor eksternal, alasan pencalonan, dan usulan besarnya honorarium kepada RUPS/PS karena RUPS/PS langsung melakukan penunjukan auditor eksternal. The Board of Commissioners does not submit the external auditor's proposal, reasons for nomination, and the proposed amount of honorarium to the GMS/PS because the GMS/PS directly appointed an external auditor.</p>	✓	<p>Usulan Renumerasi Dewan Komisaris dan Komisaris dan Direksi serta usulan KAP untuk Audit tahun buku 2022 No. DK-58/VI/2022, tanggal 3 Juni 2022. Remuneration Proposal for the Board of Commissioners and Commissioners and Directors and the proposal of the KAP for the 2022 fiscal year Audit No. DK-58/VI/2022, dated June 3, 2022.</p>	Tuntas Completed
<p>h. Dewan Komisaris tidak melaksanakan evaluasi atas kinerja auditor eksternal. The Board of Commissioners does not evaluate the performance of the external auditors.</p>	✓	<p>Hasil Evaluasi Pelaksanaan Audit Laporan Keuangan Tahun Buku 2021 No. KA/10/L/V/2022 tanggal 30 Mei 2022. Results of the Evaluation of the Implementation of the Audit of the Financial Report for the Fiscal Year 2021, No. KA/10/L/V/2022 dated May 30, 2022.</p>	Tuntas Completed
<p>i. Dewan Komisaris memiliki kebijakan benturan kepentingan namun belum dilaksanakan secara konsisten. The Board of Commissioners has a conflict-of-interest policy but it has not been implemented consistently.</p>	✓	<p>Dalam memberikan telahan dan persetujuan terhadap suatu usulan aksi korporasi yang dilakukan oleh Direksi telah dilengkapi dengan pakta integritas Dewan Komisaris (pelaksanaan tahun 2022). The Board of Directors has been provided with an integrity pact by the Board of Commissioners for the implementation in 2022, to approve and consent to a proposed corporate action.</p>	Tuntas Completed



Indikator/Parameter Indicators/Parameters	Tindak Lanjut Follow-Up	Uraian Tindak Lanjut Follow-up Description	Keterangan Notes
j. Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris tidak melakukan pembahasan capaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dalam media rapat. The Board of Commissioners and its Committees do not discuss the performance achievements of each member in media meetings.	✓	Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris telah melakukan pembahasan capaian kinerja masing-masing anggota Dewan Komisaris dan Komite Dewan Komisaris dalam media rapat. The Board of Commissioners and its Committees have discussed the performance achievements of each member in media meetings.	Tuntas Completed
k. Pemberian pendapat Dewan Komisaris terhadap bakal calon Direksi dan Dewan Komisaris anak perusahaan/perusahaan patungan, tidak tepat waktu. Giving the opinion of the Board of Commissioners on the prospective candidates for the Board of Directors and the Board of Commissioners of a subsidiary/joint company, was not timely.	✓	Tanggapan Dewan Komisaris atas Pengusulan Komisaris PT Padasa Enam Utama No. 45/V/2022 tanggal 9 Mei 2022. Response of the Board of Commissioners to the Proposal of Commissioners of PT Padasa Enam Utama No. 45/V/2022 dated May 9, 2022.	Tuntas Completed
l. Tidak ada usulan Dewan Komisaris atas calon-calon anggota Direksi yang baru kepada RUPS/ Pemilik Modal. There is no proposal from the Board of Commissioners for new candidates for members of the Board of Directors to the GMS/Capital Owners.	✓	N/A (Tidak terdapat perubahan komposisi Direksi tahun 2022). N/A (There was no change in the Board of Directors' composition in 2022).	Tuntas Completed
m. Dewan Komisaris tidak melakukan penilaian kinerja Direksi secara individu karena tidak ditetapkannya target kinerja Direksi secara individu. The Board of Commissioners does not evaluate the individual performance of the Board of Directors because no individual Directors' performance targets have been set.	✓	Sampai dengan saat ini, tidak terdapat target kinerja Direksi secara individu sehingga tidak dapat dilakukan penilaian oleh Dewan Komisaris. There are no individual performance targets for the Board of Directors until now, so the Board of Commissioners cannot conduct an assessment.	Tuntas Completed
<b>Aspek IV: Direksi</b> Aspect IV: Board of Directors			
a. Ketentuan rapat Direksi (terdiri dari beberapa Direktur) menjadi tidak relevan lagi, disebabkan adanya perubahan struktur manajemen di mana Direksi hanya 1 (satu) orang. The provisions of the Board of Directors meeting (consisting of several Directors) are no longer relevant, due to a change in the management structure where the Board of Directors is only 1 (one) person.	✓	Definisi rapat Direksi perlu ditinjau kembali dan disesuaikan dengan <i>Board Manual</i> (bukti masih dalam proses). The Board of Directors meeting definition needs to be reviewed and adjusted in the Board Manual (evidence still in process).	Tuntas Completed
b. Proses penyusunan dan penyampaian Rancangan RJPP 2020-2024 kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tidak tepat waktu. The process of preparing and submitting the 2020-2024 RJPP Draft to the Board of Commissioners and Shareholders was not timely.	✓	Tidak dapat ditindaklanjuti. Cannot be followed-up.	Tuntas Completed
c. Rancangan RKAP tahun 2021 belum sepenuhnya menggambarkan penjabaran dari RJPP 2020-2024. The 2023 RKAP draft does not fully describe the elaboration of the 2020-2024 RJPP.	✓	Angka-angka dalam RKAP tahun 2022 telah merujuk pada RJPP tahun 2020-2024. The figures in the 2022 RKAP refer to the 2020-2024 RJPP.	Tuntas Completed
d. Direksi belum menetapkan kebijakan yang mengatur evaluasi pasca diklat 4 level, Pemahaman, peningkatan kompetensi, sikap, dan kontribusi kinerja. The Board of Directors has not established a policy governing 4 levels of post-training evaluation, understanding, competency improvement, behavior and performance contribution.	✓	Evaluasi pasca diklat 4 level telah dilaksanakan dan telah ada kebijakan yaitu Kepdir No. 04.12/Kpts/53/IX/2009 tanggal 30 September 2009 tentang Pelaksanaan Diklat Bagi Karyawan dan Calon Karyawan PTPN IV (Persero). Four levels of post-training evaluation have been carried out, and there is a policy, namely Kepdir No. 04.12/Kpts/53/IX/2009, dated September 30, 2009, concerning the Implementation of Training for Employees and Prospective Employees of PTPN IV (Persero).	Tuntas Completed

Indikator/Parameter Indicators/Parameters	Tindak Lanjut Follow-Up	Uraian Tindak Lanjut Follow-up Description	Keterangan Notes
<p>e. Tidak ada rencana dan laporan progress pelaksanaan tindak lanjut dari hasil survei kepuasan pelanggan. There is no follow-up plan and progress report on the results of the customer satisfaction survey.</p>	√	<p>Tahun 2022 telah dilakukan survei oleh <i>holding</i> dan hasilnya telah diterima oleh anak perusahaan (PTPN IV). In 2022, the holding conducted a survey, and the results were received by subsidiaries (PTPN IV).</p>	Tuntas Completed
<p>f. Kontrak perjanjian dengan pemasok belum mengatur kewajiban denda jika terjadi keterlambatan pembayaran oleh pihak Perusahaan. The contract agreement with the supplier has not regulated the obligation of fines in the event of late payment by the Company.</p>	√	<p>Pada kontrak pengadaan pupuk tahun 2022, telah diberlakukan ketentuan denda pembayaran apabila pihak PTPN terlambat membayar. In the 2022 fertilizer procurement contract, a fine payment provision applies if PTPN is late in paying.</p>	Tuntas Completed
<p>g. Survei kepuasan pemasok dilaksanakan setiap tahun, namun tidak ada tabulasi dan simpulan dari hasil survey. Supplier satisfaction surveys are conducted annually, but there are no tabulations or conclusions from the survey results.</p>	√	<p>Tahun 2022 telah dilakukan survei oleh <i>holding</i> dan hasilnya telah diterima oleh anak perusahaan (PTPN IV). In 2022, the holding conducted a survey, and the results were received by subsidiaries (PTPN IV).</p>	Tuntas Completed
<p>h. SPI belum membuat laporan <i>assessment</i> atas jaminan kualitas dan peningkatan fungsi pengawasan internal. SPI has not made an assessment report on quality assurance and improvement of the internal control function.</p>	√	<p>Penjaminan kualitas fungsi pengawasan intern tahun 2021 dilakukan oleh pihak ekstern yaitu BPKP Perwakilan Sumut sesuai laporan No. LAP-554/PW02/4.1/2022 tanggal 3 Oktober 2022. The quality assurance of the internal audit function in 2021 was conducted by an external party, specifically the BPKP Representative Office of North Sumatra, as per Report No. LAP-554/PW02/4.1/2022 dated October 3, 2022.</p>	Tuntas Completed
<p>i. SPI belum melaksanakan evaluasi atas keselarasan kegiatan operasional terhadap sasaran dan tujuan Perusahaan. SPI has not yet carried out an evaluation of the alignment of operational activities with the Company's goals and objectives.</p>	√	<p>Telah dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi capaian kinerja Perusahaan tahun 2022 dan disampaikan kepada Dewan Komisaris dengan surat Kabag SPI No. 04.02/X/3/II/2023 tanggal 1 Februari 2023. Monitoring and evaluation of the Company's performance achievements in 2022 have been completed and submitted to the Board of Commissioners with a letter from the Head of SPI, No. 04.02/X/3/II/2023 dated February 1, 2023.</p>	Tuntas Completed
<p>j. Perusahaan/SPI belum melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pengendalian internal pada tingkat entitas dan operasional. The Company/SPI has not yet conducted an evaluation/assessment of the effectiveness of internal control at the entity and operational levels.</p>	√	<p>Laporan hasil review efektivitas sistem pengendalian internal telah diterbitkan. The report on the review of the effectiveness of the internal control system has been released.</p>	Tuntas Completed
<p>k. Perusahaan belum menerbitkan laporan pengendalian internal yang mencakup: a. Pernyataan bahwa manajemen bertanggung jawab untuk menetapkan dan memelihara suatu struktur pengendalian internal dan prosedur pelaporan keuangan yang memadai. b. Pernyataan atas efektivitas struktur pengendalian intern dan prosedur pelaporan keuangan. The Company has not issued an internal control report which includes: a. A statement that management is responsible for establishing and maintaining an adequate internal control structure and financial reporting procedures. b. Statement on the effectiveness of the internal control structure and financial reporting procedures.</p>	√	<p>Laporan pengendalian internal dibuat bersamaan dengan penyusunan Laporan Keuangan tahun 2022. The internal control report is prepared at the same time as the 2022 Financial Report.</p>	Tuntas Completed

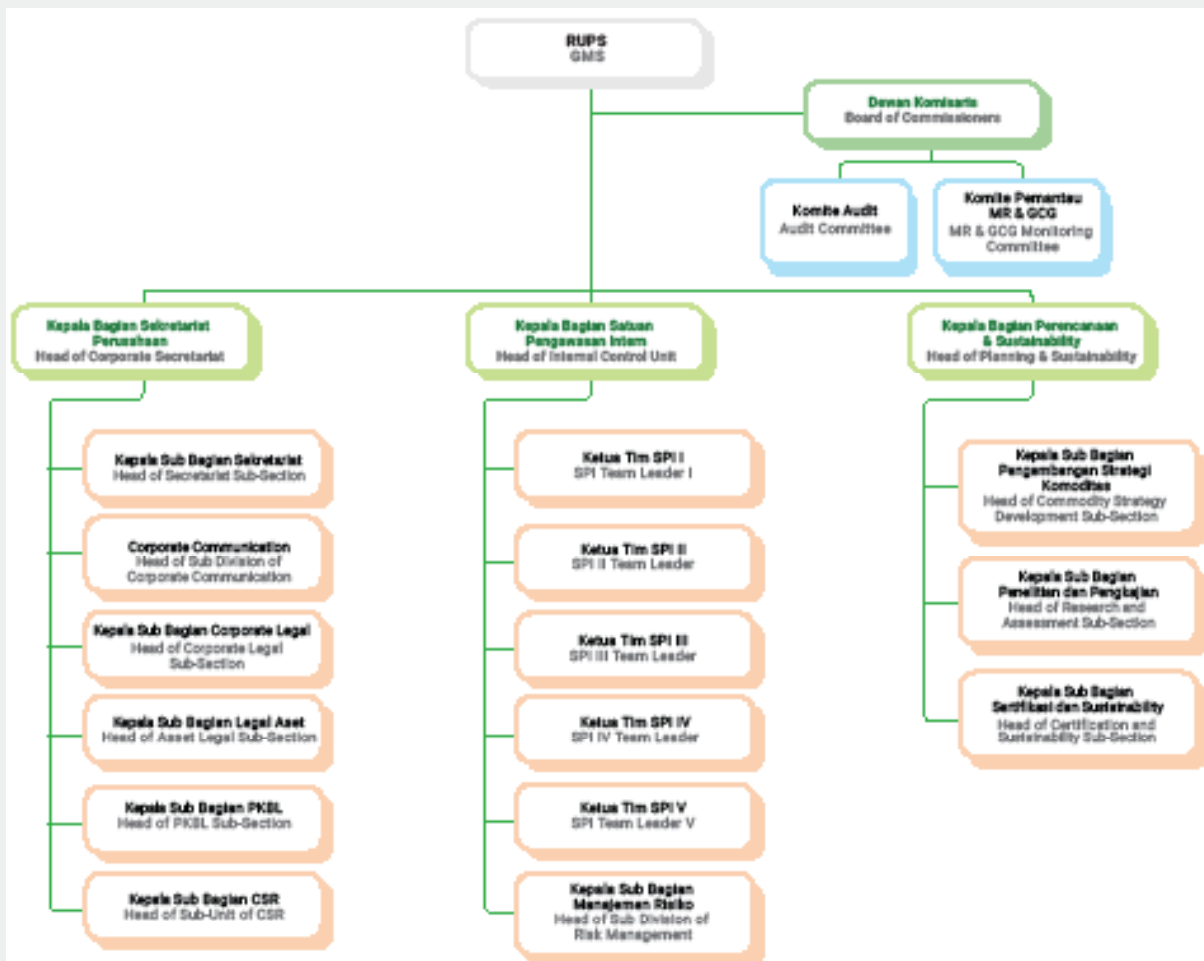


Indikator/Parameter Indicators/Parameters	Tindak Lanjut Follow-Up	Uraian Tindak Lanjut Follow-up Description	Keterangan Notes
<p>l. Direksi telah menyelenggarakan RUPS sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Anggaran Dasar dan peraturan perundang-undangan, namun pemanggilan RUPS belum dilakukan tepat waktu. The Board of Directors has convened a GMS in accordance with the procedures stipulated in the Articles of Association and laws and regulations, but the summons for the GMS has not been made on time.</p>	√	<p>Untuk tahun 2022, pemanggilan dan pelaksanaan RUPS dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum 31 Januari 2022 (26 Januari 2022). For 2022, the summons and implementation of the GMS were carried out on time, specifically before January 31, 2022 (January 26, 2022).</p>	Tuntas Completed
<p>m. RUPS/Keputusan Pemilik Modal untuk pengesahan/persetujuan RKAP tahun 2023 dilaksanakan terlambat. Shareholders' GMS/Decisions for ratification/approval of the 2023 RKAP are held late.</p>	√	<p>Untuk tahun 2022, RUPS pengesahan/persetujuan RKAP dilaksanakan tepat waktu yaitu sebelum 31 Januari 2022 (26 Januari 2022). The GMS for the approval of the RKAP was held on time for 2022, before January 31, 2022, specifically on January 26, 2022.</p>	Tuntas Completed
<p>n. Direksi belum menetapkan target kinerja dan analisis capaian kinerja Direksi secara individu. The Board of Directors has not set performance targets and analysis of individual Directors' performance achievements.</p>	√	<p>Tidak dapat ditindaklanjuti (di BUMN tidak terdapat target kinerja Direksi secara individual). Individual performance targets for the Board of Directors are not implemented in BUMN.</p>	Tuntas Completed
<p>o. Direksi belum menerapkan seleksi jabatan untuk pengisian jabatan satu level di bawah Direksi The Board of Directors has not implemented position selection to fill positions one level below the Board of Directors.</p>	√	<p>Seleksi jabatan satu level di bawah Direksi dilakukan oleh <i>holding</i>. The selection of positions one level below the Board of Directors is conducted by the holding company.</p>	Tuntas Completed
<p>p. Pemanggilan RUPS dilaksanakan satu hari sebelum penyelenggaraan RUPS (tidak tepat waktu, seharusnya paling lambat 14 hari sebelum RUPS). The call for the GMS is carried out one day before the GMS is held (not on time, it should be no later than 14 days before the GMS).</p>	√	<p>RUPS tahun 2022 dilaksanakan pada 26 Januari 2022 dan undangan pada 25 Januari 2022. The 2022 GMS took place on January 26, 2022, and the invitations were sent out on January 25, 2022.</p>	Tuntas Completed
<p><b>Aspek V: Pengungkapan Informasi dan Transparansi</b> Aspect V: Information Disclosure and Transparency</p>			
<p>a. Perusahaan tidak berpartisipasi dalam Annual Report Award (ARA) dan Sustainability Reporting Award (CSR Award) dan belum memperoleh penghargaan di bidang publikasi. The Company does not participate in the Annual Report Award (ARA) or the Sustainability Reporting Award (SRA) and has not received an award in the field of publication.</p>	√	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tahun 2022, PTPN IV ikut berpartisipasi dalam LACP Award dan keluar sebagai juara satu.</li> <li>• Pemenang kompetisi Digitalisasi Publikasi tahun 2021.</li> <li>• Pemenang CSR Award Tahun 2021.</li> <li>• In 2022, PTPN IV participated in the LACP Award and came out as the first winner.</li> <li>• Winner of the 2021 Publication Digitalization competition.</li> <li>• Winner of the 2021 CSR Award.</li> </ul>	Tuntas Completed

Catatan: Sudah (√) / Belum (X)  
Note: Done (√) / Not Yet (X)



## Struktur Tata Kelola Perusahaan Corporate Governance Structure



### Praktik Bad Corporate Governance

Perseroan senantiasa berupaya menghindari segala risiko dan faktor yang dapat memicu terjadinya praktik *bad corporate governance* di lingkungan usahanya agar tidak terjadi dampak negatif. Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak memperoleh adanya laporan terkait pencemaran lingkungan.

Kebijakan Perseroan terkait pengelolaan lingkungan terdapat dalam UKL-UPL yang setiap diperbaharui dan dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali kepada Badan Lingkungan Hidup. Selain itu, Manajemen juga telah mengadopsi sistem manajemen lingkungan ISO 14001:2004 yang merupakan komitmen Perseroan dalam mewujudkan kelangsungan hidup lingkungan serta pengelolaan yang berkelanjutan. Hal ini merupakan bagian dari komitmen Perseroan untuk mewujudkan pembangunan masyarakat dan pelestarian lingkungan yang berkelanjutan.

### Bad Corporate Governance Practice

Throughout 2023, the Company did not receive any reports related to environmental pollution, and it always strives to avoid all risks and factors that could trigger bad corporate governance practices in its business environment to prevent negative impacts.

The Company's environmental management policy is outlined in the UKL-UPL, which is updated and reported every 6 (six) months to the Environmental Agency. In addition, the management has adopted the ISO 14001:2004 environmental management system, demonstrating the Company's commitment to achieving environmental sustainability and sustainable management. This reflects the Company's dedication to promoting sustainable community development and environmental preservation.

Selain itu, Perseroan juga terbukti tidak melakukan praktik *bad corporate governance* di aspek lainnya, seperti ketidakpatuhan dalam pemenuhan kewajiban perpajakan serta ketidaksesuaian penyajian, LHKPN, gratifikasi dan benturan kepentingan.

## Rapat Umum Pemegang Saham

Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) adalah organ tata kelola tertinggi di Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam undang-undang dan/atau Anggaran Dasar. RUPS merupakan representasi kekuasaan pemegang saham dalam membuat keputusan tetap didasarkan pada kepentingan usaha Perseroan dalam jangka panjang. Menteri BUMN ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah selaku pemegang saham pada Perseroan.

### Penyelenggaraan RUPS

RUPS Tahunan diadakan setiap tahun, paling lambat bulan Juni setelah penutupan tahun buku dengan tujuan memberikan persetujuan Laporan Tahunan. RUPS Tahunan juga memberikan persetujuan atas RKAP, yang dilaksanakan paling lambat 30 hari setelah tahun anggaran berjalan.

### Ketentuan Kuorum

Berdasarkan Undang-Undang Perseroan Terbatas Pasal 86 dan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 26, RUPS dapat dilangsungkan jika dalam RUPS paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili, kecuali Undang-Undang dan/atau Anggaran Dasar menentukan jumlah kuorum yang lebih besar.

Kuorum kehadiran RUPS Tahunan untuk pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023 telah terpenuhi sehingga Rapat dinyatakan sah serta dapat mengambil keputusan-keputusan yang sah dan mengikat bagi para pemegang saham Perseroan untuk setiap mata acara Rapat.

### Kehadiran Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi dalam RUPS

Pelaksanaan RUPS Tahunan di tahun 2023 dihadiri oleh Pemegang Saham sebanyak 90%, Pemegang Saham sebanyak 10%, anggota Dewan Komisaris dan Direksi yang menjabat sampai pada saat Rapat diselenggarakan, Staf Kementerian BUMN, Staf PTPN III (Persero), dan Staf Perseroan.

Furthermore, the Company has been proven to have not engaged in bad corporate governance practices in other areas, such as non-compliance with tax obligations, discrepancies in presentation, LHKPN, gratuities, and conflicts of interest.

## General Meeting of Shareholders

The General Meeting of Shareholders (GMS) is the highest governing body in the Company, with authority not granted to the Directors or Board of Commissioners within the limits specified in the law and/or the Articles of Association. The GMS represents shareholder power in making decisions based on the long-term business interests of the Company. The Minister of SOE is appointed and/or given the power to represent the government as a shareholder in the Company.

### Organizing GMS

The Annual GMS is held every year, no later than June after the close of the financial year, with the aim of approving the Annual Report. The Annual GMS also approves the RKAP, which is implemented no later than 30 days after the current fiscal year.

### Quorum Provisions

In accordance with Article 86 of the Limited Liability Company Law and Article 26 of the Company's Articles of Association, a General Meeting of Shareholders (GMS) can proceed if at least 51% (fifty one percent) of the total number of shares with voting rights are present or represented, unless the Law and/or the Articles of Association specify a larger quorum.

The attendance quorum for the Annual GMS for the ratification of the 2023 Financial Year Annual Report has been met, allowing the Meeting to be considered valid and enabling legal and binding decisions to be made for the Company's shareholders on each agenda item.

### Attendance of Shareholders, Board of Commissioners and Directors at the GMS

The 2023 Annual GMS was attended by 90% of Shareholders, 10% of Shareholders, members of the Board of Commissioners and Directors who were in office at the time of the Meeting, SOE Ministry Staff, PTPN III (Persero) Staff, and Company Staff.

## Kehadiran Pemegang Saham pada RUPS Tahunan 2023 Attendance of Shareholders at the 2023 Annual GMS

Nama Name	Perusahaan Company	Jabatan Position
<b>Pemegang Saham Shareholders</b>		
Rachman Ferry Isfianto	Kementerian Badan Usaha Milik Negara Ministry of State-Owned Enterprises	Asisten Deputi Bidang Industri Perkebunan dan Kehutanan Assistant Deputy for Plantation and Forestry Industry
Mohammad Abdul Ghani	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	Direktur Utama President Director
<b>Dewan Komisaris dan Direksi Board of Commissioners and the Board of Directors</b>		
Dahlan Harahap	PT Perkebunan Nusantara IV	Komisaris Utama President Commissioner
Andi Wibisono	PT Perkebunan Nusantara IV	Komisaris Independen Independent Commissioner
Arief Budiono	PT Perkebunan Nusantara IV	Komisaris Commissioner
Sucipto Prayitno	PT Perkebunan Nusantara IV	Direktur Director
Joni Raja Siregar	PT Perkebunan Nusantara IV	SEVP Operation II
Budi Susanto	PT Perkebunan Nusantara IV	SEVP Business Support

### Keputusan RUPS

Pada tahun 2023, Perseroan menyelenggarakan 2 (dua) kali RUPS, yang terdiri dari 1 (satu) kali RUPS Pengesahan RKAP pada tanggal 30 Januari 2023 dan 1 (satu) kali RUPS Tahunan yang dilaksanakan pada 5 Juni 2023.

### RUPS Pengesahan RKAP RKAP Ratification GMS

No.	Agenda	Keputusan Resolutions
1.	<p>Pengesahan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 dan Rencana dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023.</p> <p>Ratification of the 2023 Company Work Plan and Budget (RKAP) and the 2023 Social and Environmental Responsibility Program Plan and Budget (RKA TJSL).</p>	<p>Mengesahkan Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) Tahun 2023 dan Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) Tahun 2023 dengan pokok-pokok sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Areal, Produksi, dan Produktivitas Areal tanaman Tahun 2023 untuk masing-masing komoditas dan target produksi dan produktivitas Tahun 2023 untuk masing-masing komoditas.</li> <li>2. Laba (Rugi) &amp; Penghasilan Komprehensif Lain (Konsolidasi) Laba Tahun Berjalan PTPN IV Tahun 2023 ditargetkan sebesar Rp1.498 miliar.</li> <li>3. Posisi Keuangan Konsolidasian Posisi Keuangan atau Neraca Konsolidasian PTPN IV per 31 Desember 2023 ditargetkan ditutup dengan Jumlah Aset sebesar Rp24.137,86 miliar.</li> <li>4. Arus Kas Konsolidasian PTPN IV Tahun 2023.</li> <li>5. Investasi dan Penyertaan tahun 2023 dianggarkan sebesar Rp2.217,21 miliar.</li> <li>6. Rencana Kerja dan Anggaran Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (RKA TJSL) tahun 2023.</li> </ol> <p>Ratified of the 2023 Company RKAP and the 2023 RKA TJSL:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Area, Production, and Productivity: Define the planted area for each commodity in 2023 and set production and productivity targets for each commodity.</li> <li>2. Profit (Loss) &amp; Other Comprehensive Income (Consolidation): The targeted profit for PTPN IV in 2023 was Rp1,498 billion.</li> </ol>

No.	Agenda	Keputusan Resolutions
		<p>3. Consolidated Financial Position: Targeting a total asset value of Rp24,137.86 billion for PTPN IV's Consolidated Balance Sheet as of December 31, 2023.</p> <p>4. Consolidated Cash Flow: Detailed plan for PTPN IV's consolidated cash flow in 2023.</p> <p>5. The budget was set at Rp2,217.21 billion for investment and participation in 2023.</p> <p>6. Work Plan and Budget for the Social and Environmental Responsibility Program (RKA TJSL) in 2023.</p>
2.	<p>Penetapan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi Tahun 2023 yang Tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.</p> <p>Determination of the Board of Directors' Key Performance Indicators (KPI) in 2023 as stated in the 2023 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders.</p>	<p>Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Direksi Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Direksi dan Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham sebagaimana terlampir.</p> <p>Determining the Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Directors in 2023 as stated in the 2023 Management Contract between the Board of Directors and the Board of Commissioners with Shareholders as attached.</p>
3.	<p>Penetapan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2023 yang Tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham.</p> <p>Determination of the Board of Commissioners' Key Performance Indicators (KPI) for 2023 as stated in the 2023 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders.</p>	<p>Menetapkan <i>Key Performance Indicators</i> (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2023 yang tertuang dalam Kontrak Manajemen Tahun 2023 antara Dewan Komisaris dengan Pemegang Saham sebagaimana terlampir.</p> <p>Determining the Key Performance Indicators (KPI) of the Board of Commissioners for 2023 as stated in the 2023 Management Contract between the Board of Commissioners and Shareholders as attached.</p>
4.	<p>Persetujuan Indikator Aspek Operasional Tahun 2023 untuk Menghitung Tingkat Kesehatan Perusahaan Berdasarkan Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002.</p> <p>Approval of Operational Aspect Indicators for 2023 to Calculate Company Health Level Based on Decree of the Minister of State-Owned Enterprises No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002.</p>	<p>Menetapkan aspek operasional tahun 2023 untuk Pengukuran Tingkat Kesehatan Tahun 2023.</p> <p>Determining the operational aspects for 2023 for the Measurement of Soundness Level for 2023.</p>
5.	<p>Persetujuan Pelimpahan Wewenang kepada Dewan Komisaris untuk Memberikan Persetujuan Apabila Terdapat Tindakan-Tindakan yang Mengakibatkan Perubahan Alokasi Anggaran Investasi dengan Nilai Maksimum 10% (Sepuluh Persen) dari Masing-Masing Program Investasi Sepanjang Tidak Mengubah Total Nilai Investasi.</p> <p>Approval of the Delegation of Authority to the Board of Commissioners to Provide Approval If There Are Actions That Result in Changes in Investment Budget Allocation with a Maximum Value of 10% (Ten Percent) of Each Investment Program as Long as It Does Not Change the Total Investment Value.</p>	<p>Menyetujui pelimpahan wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan persetujuan apabila terdapat tindakan-tindakan yang mengakibatkan perubahan alokasi anggaran investasi dengan nilai maksimum 10% (sepuluh persen) dari nilai masing-masing program investasi sepanjang tidak mengubah total nilai investasi.</p> <p>Approved the delegation of authority to the Board of Commissioners to provide approval if actions result in changes in investment budget allocation with a maximum value of 10% (ten percent) of the value of each investment program as long as it does not change the total investment value.</p>
6.	<p>Penguatan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>Confirmation of the implementation of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises.</p>	<p>Menguatkan pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara.</p> <p>Confirmed the implementation of the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises.</p>

**RUPS Pengesahan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023**  
**2023 Annual Report Ratification GMS**

No.	Agenda	Keputusan Resolutions
1.	<p>Persetujuan Laporan Tahunan Perusahaan termasuk Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris dan Laporan Pelaksanaan Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan untuk Tahun Buku 2022, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2022.</p> <p>Approval of the Company's Annual Report, including the Board of Commissioners' Supervisory Duties Report and the Report on the Implementation of Social and Environmental Responsibility for the 2022 Financial Year, as well as Ratification of the Company's Consolidated Financial Statements for the 2022 Financial Year.</p>	<p><b>A. Kinerja Keuangan</b>  Realisasi penjualan sebesar Rp10,48 triliun atau sebesar 104,92% dibandingkan dengan RKAP 2022, laba kotor sebesar Rp4,98 triliun atau 113,38% dibandingkan RKAP 2022. Laba bersih sebesar Rp2,17 triliun atau 181,87% dibandingkan RKAP 2022. Total aset sebesar Rp23 triliun atau sebesar 111,93% dibandingkan RKAP 2022. Ekuitas sebesar Rp11,79 triliun atau sebesar 122,32% dibandingkan RKAP 2022. Arus kas aktivitas operasional sebesar Rp1,77 triliun atau sebesar 90,49% dibandingkan RKAP 2022.</p> <p><b>A. Financial Performance</b>  Sales realization of Rp10.48 trillion or 104.92% compared to the 2022 RKAP, gross profit of Rp4.98 trillion or 113.38% compared to the 2022 RKAP. The net profit was Rp2.17 trillion, or 181.87%, compared to the 2022 RKAP. Total assets of Rp23 trillion or 111.93% compared to the 2022 RKAP. Equity of Rp11.79 trillion or 122.32% compared to the 2022 RKAP. Cash flow from operational activities of Rp1.77 trillion or 90.49% compared to the 2022 RKAP.</p> <p><b>B. Kinerja Operasional</b></p> <p><b>1) Kelapa Sawit</b>  Produksi minyak sawit kebun sendiri sebesar 592 ribu ton atau sebesar 86,23% dibandingkan RKAP 2022, selanjutnya rendemen minyak sawit kebun sendiri sebesar 22,32% atau sebesar 93,66% dibandingkan RKAP 2022. Produksi inti sawit kebun sendiri sebesar 106 ribu ton atau sebesar 88,05% dibandingkan RKAP 2022, selanjutnya rendemen inti sawit kebun sendiri sebesar 4,02% atau sebesar 95,64% dibandingkan RKAP 2022.</p> <p><b>B. Operational Performance</b></p> <p><b>1) Palm Oil</b>  Own plantation palm oil production of 592 thousand tons or 86.23% compared to the 2022 RKAP, then the yield of own plantation palm oil of 22.32% or 93.66% compared to the 2022 RKAP. The palm kernel production from the plantation itself is 106 thousand tons or 88.05% compared to the 2022 RKAP, and the yield of palm kernel from the plantation itself is 4.02% or 95.64% compared to the 2022 RKAP.</p> <p><b>2) Teh</b>  Produksi teh kering kebun sendiri sebesar 9,32 ribu ton atau sebesar 95,27% dibandingkan RKAP 2022, selanjutnya rendemen teh kering kebun sendiri sebesar 21,61% atau sebesar 97,98% dibandingkan RKAP 2022.</p> <p><b>2) Tea</b>  The production of dry tea from the plantation itself is 9.32 thousand tons, or 95.27%, compared to the 2022 RKAP, and the yield of dry tea from the plantation itself is 21.61%, or 97.98%, compared to the 2022 RKAP.</p> <p><b>C. Tingkat Kesehatan Perusahaan</b>  The Company's Soundness Level</p> <p><b>D. Key Performance Indicators (KPI)</b>  Key Performance Indicators (KPI)</p> <p><b>E. Rasio Target Sesuai Aspirasi Pemegang Saham</b>  Target Ratio based on Shareholders' Aspiration</p>

No.	Agenda	Keputusan Resolutions
2.	<p>Pengesahan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil Tahun Buku 2022. Approval of the Financial Report of the Micro and Small Business Funding Program for the 2022 Financial Year.</p>	<p>A. Penggunaan Dana Kemitraan Use of Partnership Funds B. Penggunaan Dana Bina Lingkungan Use of Community Development Funds</p>
3.	<p>Penetapan Penggunaan Laba Bersih Perusahaan Tahun Buku 2022. Determination of Use of the Company's Net Profit for the 2022 Financial Year.</p>	<p>Menetapkan penggunaan laba bersih Perusahaan tahun buku 2022. Determined the use of the Company's Net Profit for the 2022 financial year.</p>
4.	<p>Penetapan Tantiem untuk Tahun Buku 2022 serta Gaji/Honorarium, Tunjangan dan Fasilitas Tahun Buku 2023 untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Determination of Bonus for the 2022 Financial Year and Compensation, Benefits, and Facilities for the 2023 Financial Year for the Company's Board of Commissioners and Directors.</p>	<p>Menetapkan tantiem untuk tahun buku 2022 serta gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas tahun buku 2023 untuk Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan. Determined the bonus for the 2022 financial year and compensation, benefits, and facilities for the 2023 financial year for the Company's Board of Commissioners and Directors.</p>
5.	<p>Penunjukan Kantor Akuntan Publik untuk Mengaudit Laporan Keuangan Konsolidasian Perusahaan Tahun Buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) Tahun Buku 2023. Appointment of the Public Accounting Firm to Audit the Company's Consolidated Financial Statements for the 2023 Financial Year and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 Financial Year;</p>	<p>Menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perusahaan tahun buku 2023 dan Laporan Keuangan Program Pendanaan Usaha Mikro dan Usaha Kecil (PUMK) tahun buku 2023. Appointed the Public Accounting Firm to audit the Company's consolidated financial statements for the 2023 financial year and the Financial Statements of the Micro and Small Business Funding Program (PUMK) for the 2023 financial year;</p>
6.	<p>Pengukuhan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: a. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; b. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; dan c. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara Enactment of Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: a. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises; b. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and c. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</p>	<p>Mengukuhkan Pemberlakuan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia Nomor: a. PER-1/MBU/03/2023 tentang Penugasan Khusus dan Program Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan Badan Usaha Milik Negara; b. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara; c. PER-3/MBU/03/2023 tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara. Enacted the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia Number: a. PER-1/MBU/03/2023 concerning Special Assignments and Social and Environmental Responsibility Programs of State-Owned Enterprises; b. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises; and c. PER-3/MBU/03/2023 concerning Organs and Human Resources of State-Owned Enterprises.</p>

## Dewan Komisaris

Dewan Komisaris merupakan organ tata kelola Perseroan yang memiliki tugas dan tanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus sejalan dengan Anggaran Dasar Perseroan dan memberikan nasihat kepada Direksi serta memastikan Perseroan untuk melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Dewan Komisaris memiliki wewenang dan tanggung jawab yang jelas sesuai dengan fungsinya masing-masing, sebagaimana diamanatkan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada RUPS. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan prinsip-prinsip GCG. Selain itu, kinerja Dewan Komisaris senantiasa akan dievaluasi berdasarkan parameter-parameter yang telah ditentukan dan disampaikan dalam RUPS.

### Kriteria dan Proses Pengangkatan

Proses pengangkatan calon anggota Dewan Komisaris mengikuti proses uji kelayakan dan kepatutan Dewan Komisaris berdasarkan Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-10/MBU/10/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri BUMN No. 2/2015 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Komisaris dan Dewan Pengawas BUMN. Persyaratan Dewan Komisaris Perseroan memiliki kriteria persyaratan calon anggota Dewan Komisaris sebagaimana tercantum dalam Anggaran Dasar Perseroan Pasal 14 tahun 2019.

Dewan Komisaris telah melalui uji kelayakan dan kepatutan (*fit and proper test*) oleh Pemegang Saham guna menjamin calon Dewan Komisaris memiliki integritas, kompetensi, reputasi, bebas dari afiliasi maupun benturan kepentingan lain. Selain itu, calon Dewan Komisaris harus memiliki kemampuan yang mencakup:

1. Memiliki pengetahuan yang memadai dan relevan di bidang usaha Perseroan maupun jabatannya.
2. Memiliki pemahaman mengenai permasalahan manajemen Perseroan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen.
3. Memiliki pengalaman di bidang usaha Perseroan dan/atau bidang lainnya yang relevan dengan jabatannya.

Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Komisaris Perseroan dilakukan oleh RUPS setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Seluruh anggota Dewan Komisaris diangkat dengan mempertimbangkan aspek integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Dewan Komisaris harus memenuhi persyaratan umum dan khusus yang ditetapkan dalam *Board Manual*.

### Masa Jabatan Dewan Komisaris

Masa jabatan Dewan Komisaris adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. Anggota Dewan Komisaris sewaktu-waktu dapat diberhentikan

## Board of Commissioners

The Board of Commissioners is the governance body of the Company, responsible for carrying out general and specific supervision in line with the Company's Articles of Association. They provide advice to the Board of Directors and ensure the implementation of GCG at all levels of the organization. The Board of Commissioners has clear authority and responsibilities according to their functions as stated in the company's Articles of Association and relevant laws and regulations.

The Board of Commissioners is directly accountable to the GMS. This accountability signifies their supervisory role over the Company's management in the context of implementing GCG principles. Furthermore, the performance of the Board of Commissioners will be evaluated based on predetermined parameters presented at the GMS.

### Criteria and Appointment Process

The process of appointing potential members of the Board of Commissioners follows the fit and proper test process for the Board of Commissioners based on the Minister of SOE Regulation No. PER-10/MBU/10/2020 regarding the Amendment of the Minister of SOE Regulation No. 2/2015 concerning Requirements and Procedures for Appointment and Dismissal of Members of the Board of Commissioners and the Supervisory Board of SOE. The Company has specific criteria for the requirements for prospective members of the Board of Commissioners as stated in the Company's Articles of Association Article 14 of 2019.

The Board of Commissioners undergoes a fit and proper test by Shareholders to ensure that candidates have integrity, competence, reputation, and are free from affiliations or other conflicts of interest. In addition, candidates for the Board of Commissioners must have the following abilities:

1. Adequate and relevant knowledge in the Company's business field and position.
2. Understanding of Company management issues related to one of the management functions.
3. Experience in the Company's business sector and/or other relevant fields.

The appointment and dismissal of members of the Company's Board of Commissioners is carried out by the GMS after a nomination process in accordance with statutory regulations, which is binding on the GMS. All members of the Board of Commissioners are appointed by considering aspects of integrity, competence, and reputation in accordance with the Company's business needs. The Board of Commissioners must fulfill the general and specific requirements set out in the Board Manual.

### Term of Office of the Board of Commissioners

The term of office of the Board of Commissioners is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) term of office. Members of the Board of Commissioners may be dismissed

sebelum masa jabatannya berakhir berdasarkan keputusan RUPS dengan menyebutkan alasannya. Masa jabatan Anggota Dewan Komisaris berakhir apabila:

1. Meninggal dunia,
2. Masa jabatannya berakhir,
3. Diberhentikan berdasarkan Keputusan RUPS,
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Komisaris berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan dan peraturan perundang-undangan lainnya.

### Komposisi Dewan Komisaris

Penetapan komposisi Dewan Komisaris Perseroan mengacu pada Anggaran Dasar, ketentuan Pemegang Saham, dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta mempertimbangkan unsur keberagaman dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin, dan usia. Hingga Laporan Tahunan ini diterbitkan, anggota Dewan Komisaris Perseroan berjumlah 6 (enam) orang, yang terdiri dari 1 (satu) Komisaris Utama, 3 (tiga) Komisaris, dan 2 (dua) Komisaris Independen dengan komposisi sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Dahlan Harahap	Komisaris Utama / President Commissioner	SK-185/MBU/06/2020
Arief Budiono	Komisaris / Commissioner	SK-344/MBU/12/2023
Arie Yuriwin	Komisaris / Commissioner	SK-269/MBU/08/2021
Andi Nur Alam Syah	Komisaris / Commissioner	SK-104/MBU/04/2024
Andi Wibisono	Komisaris Independen / Independent Commissioner	SK-185/MBU/06/2020
Fauzi Yusuf	Komisaris Independen / Independent Commissioner	SK-344/MBU/12/2023

### Tugas Dewan Komisaris

Tugas Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan, jalannya pengurusan pada umumnya baik mengenai Perseroan maupun usaha Perseroan yang dilakukan oleh Direksi serta memberikan nasihat kepada Direksi termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan Rencana Jangka Panjang Perusahaan (RJPP), Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan (RKAP) serta ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS, serta peraturan perundang-undangan yang berlaku, untuk kepentingan Perseroan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.
2. Tugas utama Dewan Komisaris sekurang-kurangnya namun tidak terbatas, sebagai berikut:
  - a. Pemberian persetujuan atas rancangan RJPP Perseroan.
  - b. Pemberian persetujuan atas rancangan RKAP Perseroan.
  - c. Pemberian persetujuan atas transaksi atau tindakan dalam lingkup kewenangan Dewan Komisaris atau RUPS.
  - d. Pengawasan atas implementasi rencana dan kebijakan Perseroan yang dilaksanakan oleh Direksi.
  - e. Pengawasan atas kepatuhan Direksi dalam menjalankan Perseroan sesuai dengan RKAP dan RJPP.
  - f. Pengawasan terhadap efektivitas dan kesinambungan penerapan praktik GCG di Perseroan.
  - g. Melakukan penilaian kinerja Direksi secara kolejal dan individu berdasarkan kriteria, target dan indikator utama yang dimuat dalam Kontrak Manajemen Direksi dan *Key Performance Indicator* (KPI) sebagaimana dilampirkan dalam RKAP.

at any time before their term of office ends based on a GMS decision by stating the reasons. The term of office of a member of the Board of Commissioners ends if:

1. Passed away,
2. His term of office ends,
3. Dismissed based on the GMS Decision, and
4. No longer meets the requirements as a member of the Board of Commissioners based on the provisions of the Company's Articles of Association and other laws and regulations.

### Composition of the Board of Commissioners

The determination of the composition of the Company's Board of Commissioners is based on the Articles of Association, Shareholder provisions, applicable laws and regulations, and also takes into account diversity in terms of education, work experience, gender, and age. Until this Annual Report was published, there are 6 (six) members of the Company's Board of Commissioners, including 1 (one) President Commissioner, 3 (three) Commissioners, and 2 (two) Independent Commissioners, with the following composition:

### Duties of the Board of Commissioners

The duties of the Board of Commissioners are as follows:

1. Oversees the general management policies of the Company, both about the Company or businesses carried out by the Board of Directors, provides advice to the Board of Directors, and supervises the implementation of the Company's Long-Term Plan (RJPP), Company Work Plan and Budget (RKAP), as well as the requirements by the Articles of Association, resolutions of the GMS, in accordance with applicable laws and regulations, for the best interests of the Company and in line with its aims and objectives.
2. The primary duties of the Board of Commissioners are at least but not limited to the following:
  - a. Providing approval for the Company's RJPP draft.
  - b. Providing approval for the Company's draft RKAP.
  - c. Providing approval for transactions or actions within the scope of authority of the Board of Commissioners or GMS.
  - d. Supervising of implementing Company plans and policies by the Board of Director
  - e. Supervising the Board of Directors' compliance with the RKAP and RJPP in running the Company.
  - f. Supervising the effectiveness and sustainability of the implementation of GCG practices in the Company.
  - g. Conducting collegial and individual performance assessments of the Board of Directors based on the criteria, targets, and leading indicators in the Directors' Management Contract and Key Performance Indicators (KPI) attached to the RKAP.



- |  |   |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Pengawasan terhadap kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/ perusahaan patungan.</li> <li>i. Mengevaluasi dan mengusulkan calon Auditor eksternal kepada RUPS.</li> <li>j. Mengevaluasi kinerja Auditor Eksternal dan Satuan Pengawasan Internal sesuai dengan ketentuan dan standar yang berlaku.</li> <li>k. Pemberian arahan tentang hal-hal penting mengenai perubahan lingkungan bisnis yang diperkirakan berdampak besar pada usaha kinerja Perseroan secara tepat waktu.</li> <li>l. Pemberian arahan kepada Direksi tentang langkah-langkah untuk mengatasi gejala menurunnya kinerja Perseroan.</li> <li>m. Pemberian arahan tentang penguatan sistem pengendalian internal Perseroan.</li> <li>n. Pemberian arahan tentang kebijakan peningkatan efektivitas audit internal dan audit eksternal.</li> <li>o. Pemberian arahan tentang penguatan manajemen risiko Perseroan.</li> <li>p. Pemberian arahan tentang kebijakan dan pelaksanaan manajemen karir di Perseroan.</li> <li>q. Pemberian arahan tentang sistem teknologi informasi yang digunakan Perseroan.</li> <li>r. Pemberian arahan tentang kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum di Indonesia.</li> <li>s. Pemberian arahan tentang kebijakan pengadaan barang dan jasa Perseroan dan pelaksanaannya.</li> <li>t. Pemberian arahan tentang kebijakan mutu Perseroan dan pelaksanaannya.</li> <li>u. Mengevaluasi kesesuaian penyusunan Laporan Manajemen Tahunan dan Laporan Tahunan Perseroan dengan peraturan perundang-undangan sebelum ditandatangani oleh seluruh anggota Dewan Komisaris.</li> <li>v. Pemberian arahan atas saran, harapan, permasalahan dan keluhan dari pemangku kepentingan (pelanggan, pemasok, kreditur, dan karyawan) yang disampaikan langsung kepada Dewan Komisaris ataupun penyampaiannya oleh Direksi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>h. Supervising policies and implementation of subsidiary/ joint company management.</li> <li>i. Evaluating and proposing external auditor candidates to the GMS.</li> <li>j. Evaluating the performance of the External Auditor and Internal Audit Unit following applicable regulations and standards.</li> <li>k. Providing guidance on essential matters regarding changes in the business environment, which are expected to impact the Company's business performance promptly and significantly.</li> <li>l. Providing direction to the Board of Directors regarding steps to overcome symptoms of declining Company performance.</li> <li>m. Providing direction regarding strengthening the Company's internal control system.</li> <li>n. Providing direction regarding policies to increase the effectiveness of internal and external audits.</li> <li>o. Providing direction regarding strengthening the Company's risk management.</li> <li>p. Providing direction regarding policies and implementation of career management in the Company.</li> <li>q. Providing direction regarding the information technology system used by the Company.</li> <li>r. Providing direction regarding accounting policies and preparing the company's financial reports following generally accepted accounting standards in Indonesia.</li> <li>s. Providing direction regarding the Company's goods and services procurement policy and its implementation.</li> <li>t. Providing direction regarding the Company's quality policy and its implementation.</li> <li>u. Evaluate the suitability of preparing the Annual Management Report and the Company's Annual Report with statutory regulations before being signed by all Board of Commissioners.</li> <li>v. Providing direction regarding suggestions, hopes, problems, and complaints from stakeholders (customers, suppliers, creditors, and employees), which are submitted directly to the Board of Commissioners or submitted by the Board of Directors.</li> </ul> |
|--|---|

Berdasarkan keputusan Dewan Komisaris No. DK-03/Kpts/VI/2020 tanggal 15 Juni 2020, pembagian tugas antar anggota Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Komisaris Utama bertanggung jawab untuk melakukan koordinasi tugas pengawasan yang dilaksanakan oleh setiap anggota Dewan Komisaris sesuai bidang tugasnya masing-masing.
2. Komisaris Independen, bertanggung jawab mengawasi bidang keuangan dan pemasaran sekaligus sebagai Ketua Komite Audit Perseroan.
3. Komisaris Independen, bertanggung jawab mengawasi bidang operasional, pengembangan usaha, dan GCG, sekaligus sebagai Ketua Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG.
4. Komisaris, bertanggung jawab mengawasi bidang SDM, legal, dan umum.

In accordance with the decision of the Board of Commissioners No. DK-03/Kpts/VI/2020 dated June 15, 2020, the division of duties among the members of the Board of Commissioners is as follows:

1. The President Commissioner is responsible for coordinating the supervisory duties carried out by each member of the Board of Commissioners in accordance with their respective areas of responsibility.
2. An Independent Commissioner is responsible for overseeing finance and marketing, as well as serving as the Chair of the Company's Audit Committee.
3. Another Independent Commissioner is responsible for overseeing operations, business development, and GCG, as well as serving as the Chair of the Risk Management and GCG Monitoring Committee.
4. Commissioner is responsible for overseeing HR, legal, and general affairs.



## Kewajiban Dewan Komisaris

Kewajiban Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Memberikan nasihat kepada Direksi dalam melaksanakan pengurusan Perseroan.
2. Meneliti dan menelaah serta menandatangani RJPP dan RKAP Perseroan yang disiapkan Direksi, sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
3. Memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai RJPP dan RKAP Perseroan mengenai alasan Dewan Komisaris menandatangani RJPP dan RKAP.
4. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan, memberikan pendapat dan saran kepada RUPS mengenai setiap masalah yang dianggap penting bagi kepengurusan Perseroan.
5. Melaporkan dengan segera kepada RUPS apabila terjadi gejala menurunnya kinerja Perseroan.
6. Meneliti dan menelaah laporan berkala dan laporan tahunan yang disiapkan Direksi serta menandatangani laporan tahunan.
7. Memberikan penjelasan, pendapat, dan saran kepada RUPS mengenai Laporan Tahunan, apabila diminta.
8. Menyusun program kerja tahunan dan memasukan dalam RKAP.
9. Membentuk Komite Audit dan komite lain, jika diperlukan.
10. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris dan menyimpan salinannya.
11. Mengusulkan Akuntan Publik kepada RUPS.
12. Melaporkan kepada Perseroan mengenai kepemilikan sahamnya dan/atau keluarganya pada Perseroan dan perusahaan lain.
13. Memberikan laporan tentang tugas pengawasan yang telah dilakukan selama tahun buku yang baru lampau kepada RUPS.
14. Melaksanakan kewajiban lainnya dalam rangka tugas pengawasan dan pemberian nasihat, sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.

## Wewenang Dewan Komisaris

Wewenang Dewan Komisaris adalah sebagai berikut:

1. Melihat buku-buku, surat-surat, serta dokumen-dokumen lainnya, memeriksa kas untuk keperluan verifikasi dan lain-lain surat berharga dan memeriksa kekayaan Perseroan.
2. Memasuki perkarangan, gedung, dan kantor yang dipergunakan oleh Perseroan.
3. Meminta penjelasan dari Direksi dan/atau pejabat lainnya mengenai segala persoalan yang menyangkut pengelolaan Perseroan.
4. Mengetahui segala kebijakan dan tindakan yang telah dan akan dijalankan oleh Direksi.
5. Meminta Direksi dan/atau pejabat lainnya di bawah Direksi dengan sepengetahuan Direksi untuk menghadiri rapat Dewan Komisaris.
6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Dewan Komisaris jika dianggap perlu.
7. Memberhentikan sementara anggota Direksi sesuai dengan ketentuan anggaran dasar Perusahaan.
8. Membentuk komite-komite lain selain Komite Audit, jika dianggap perlu dengan memperhatikan kemampuan Perseroan.

## Responsibilities of the Board of Commissioners

The responsibilities of the Board of Commissioners are as follows:

1. Providing advice to the Board of Directors in managing the Company.
2. Reviewing and signing the Company's RJPP and RKAP prepared by the Board of Directors, in accordance with the provisions of the Company's Articles of Association.
3. Providing opinions and suggestions to the GMS regarding the Company's RJPP and RKAP and explaining the reasons for signing them.
4. Monitoring the Company's activities, providing opinions and suggestions to the GMS on important management issues.
5. Reporting immediately to the GMS if there are signs of declining Company performance.
6. Reviewing periodic reports and annual reports prepared by the Board of Directors and signing the annual report.
7. Providing explanations, opinions, and suggestions to the GMS regarding the Annual Report, if requested.
8. Preparing an annual work program and including it in the RKAP.
9. Establishing an Audit Committee and other committees, if necessary.
10. Keeping minutes of meetings of the Board of Commissioners.
11. Proposing a Public Accountant to the GMS.
12. Reporting share ownership in the Company and other companies by the Board member or their family.
13. Providing a report on the supervisory tasks carried out during the previous financial year to the GMS.
14. Fulfilling other obligations related to supervisory duties and providing advice, as long as they comply with statutory regulations, the Articles of Association, and/or GMS decisions.

## Authority of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has the following authority:

1. Review books, letters, and other documents, examine cash and other securities, and inspect the Company's assets for verification purposes.
2. Access the Company's premises, buildings, and offices.
3. Request explanations from the Directors or other officials regarding all issues related to the Company's management.
4. Be informed about all policies and actions that have been or will be implemented by the Board of Directors.
5. Request the attendance of Directors or other officials at Board of Commissioners meetings.
6. Appoint and dismiss the Secretary of the Board of Commissioners if necessary.
7. Temporarily suspend members of the Board of Directors in accordance with the Company's articles of association.
8. Establish additional committees, apart from the Audit Committee, if deemed necessary and within the Company's capabilities.

9. Menggunakan tenaga ahli untuk hal tertentu dan dalam jangka waktu tertentu atas beban Perseroan jika dianggap perlu.
10. Melakukan tindakan pengurusan Perseroan dalam keadaan tertentu untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
11. Menghadiri rapat Direksi dan memberikan pandangan-pandangan terhadap hal-hal yang dibicarakan.
12. Melaksanakan kewenangan pengawasan lainnya sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, Anggaran Dasar Perseroan, dan/atau keputusan RUPS.

### Independensi dan Kepemilikan Saham Anggota Dewan Komisaris

Setiap anggota Dewan Komisaris diwajibkan membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan pada awal menjabat. Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan tersebut memuat beberapa pernyataan di antaranya kepemilikan saham, hubungan keluarga, rangkap jabatan, serta jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.

Seluruh anggota Dewan Komisaris telah menandatangani pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan di mana di dalamnya dinyatakan bahwa Dewan Komisaris:

1. Tidak memiliki hubungan keuangan, kepemilikan saham, dan atau hubungan keluarga dengan sesama anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi Perseroan.
2. Tidak melakukan rangkap jabatan sebagai Direksi pada perusahaan sejenis dengan bisnis yang dilakukan oleh Perseroan.
3. Bersedia memenuhi kewajiban untuk segera memberitahukan kepada pemegang saham apabila ditemukan pelanggaran peraturan perundang-undangan dan keadaan atau perkiraan keadaan yang dapat membahayakan kelangsungan usaha Perusahaan.
4. Menyatakan independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dalam pelaksanaan tugas untuk mengawasi dan memberi nasehat kepada Direksi Perseroan.

Selain itu, berdasarkan pernyataan Dewan Komisaris yang tertuang dalam Daftar Khusus Kepemilikan Saham, Dewan Komisaris dan atau keluarganya pada Perusahaan maupun perusahaan lain, selama tahun 2023 tidak terdapat kepemilikan saham Perseroan oleh Dewan Komisaris.

### Rangkap Jabatan

Berdasarkan Pasal 14 ayat (32) Anggaran Dasar Perseroan, Pedoman Tata Kelola Perseroan, dan *Board Manual*, anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai anggota Direksi pada BUMN, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta (BUMS), pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif, Kepala Daerah/Wakil dan/atau calon Kepala/Wakil Kepala Daerah, serta jabatan lainnya yang dapat menimbulkan benturan kepentingan. Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat anggota Dewan Komisaris yang memangku jabatan rangkap sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

9. Engage experts for specific matters at the Company's expense, if necessary and within a certain period of time.
10. Take actions to manage the company in specific circumstances for a certain period of time, in accordance with the company's Articles of Association.
11. Attend Board of Directors meetings and provide input on discussed matters.
12. Exercise other supervisory authority as long as it does not conflict with statutory regulations, the company's Articles of Association, and/or decisions made by the GMS.

### Independence and Share Ownership of Members of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners requires each member to make a statement of independence and disclose any potential conflicts of interest at the beginning of their term. The Statement of No Conflict of Interest covers share ownership, family relationships, holding multiple positions, and any other situations that could lead to a conflict of interest.

All members of the Board of Commissioners have signed a statement confirming their independence and freedom from conflicts of interest. The statement includes the following key points:

1. They have no financial or family relationships with other board members or members of the Company's Board of Directors.
2. They do not hold concurrent positions as Directors in companies similar to the business of the Company.
3. They are committed to promptly informing shareholders about any violations of laws and regulations, as well as any conditions that could jeopardize the Company's operations.
4. They declare their independence and confirm that they have no conflicts of interest in carrying out their supervisory and advisory duties to the Company's Board of Directors.

Furthermore, based on the Special List of Share Ownership, no members of the Board of Commissioners and/or their families own any shares in the Company or other companies in 2023.

### Concurrent Positions

According to Article 14, paragraph (32) of the Articles of Association, Corporate Governance Guidelines, and Board Manual, members of the Board of Commissioners are not allowed to hold positions as members of the Board of Directors at BUMN, Regional Owned Enterprises (BUMD), Private Owned Enterprises (BUMS), political party administrators and/or legislative candidates/members, Regional Head/Deputy Head and/or candidate for Head/Deputy Regional Head, as well as any other positions that may lead to a conflict of interest. Throughout 2023, no members of the Board of Commissioners hold concurrent positions as specified in the Company's Articles of Association.



### Program Pengenalan Perusahaan

Perseroan memiliki kebijakan dan mekanisme bagi anggota Dewan Komisaris yang baru ditunjuk/menjabat diberikan informasi terkait Perseroan secara komprehensif dan representatif. Informasi yang diberikan merupakan bentuk pengenalan dari Perseroan kepada anggota Dewan Komisaris terpilih. Anggota Dewan Komisaris Perusahaan yang diangkat untuk pertama kalinya wajib mengikuti program pengenalan meliputi:

1. Pelaksanaan prinsip-prinsip GCG.
2. Gambaran mengenai tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan, dan operasi, strategi, RJPP, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya.
3. Keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit;
4. Keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris serta hal-hal yang tidak diperbolehkan.

### Program Pengembangan Kapabilitas

Program peningkatan kapabilitas Dewan Komisaris dilakukan melalui berbagai sarana, seperti seminar, pelatihan, dan *workshop*. Pada tahun 2023, Dewan Komisaris telah mengikuti dan berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan pengembangan kapabilitas, antara lain:

### Company Introduction Program

The Company has policies and mechanisms in place to provide newly appointed or serving members of the Board of Commissioners with comprehensive and representative information about the company. This serves as an introduction from the company to the elected members of the Board of Commissioners. Newly appointed members are required to participate in an induction program that includes:

1. Implementation of GCG principles.
2. An overview of objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, RJPP, competitive position, risks, and other strategic issues.
3. Information about delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, including the Audit Committee.
4. Information regarding the duties and responsibilities of the Board of Commissioners as well as things that are not permitted.

### The Capability Development Program

The Board of Commissioners' capability improvement program is carried out through various means, such as seminars, training, and workshops. In 2023, the Board of Commissioners participated in several capability development activities, including:

No.	Tanggal Date	Judul Kegiatan Activity Title	Tempat Place
1.	Dahlan Harahap	GRC Masterclass Program 2023 (Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN) GRC Masterclass Program 2023 (Socialization of SOE & SOE Subsidiaries Ranking)	Jakarta (Online)
		GRC Masterclass Program 2023 (ESG for Boards – Governance of ESG)	Jakarta (Online)
		GRC Masterclass Program 2023 (GRC Integrated Information for Supervisory Board)	Jakarta (Online)
		Rakornaswasin 2023 dengan tema "Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi" Rakornaswasin 2023 with the theme "Monitoring Productivity for Economic Transformation"	Jakarta (Online)
2.	Andi Wibisono	GRC Masterclass Program 2023 (Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN) GRC Masterclass Program 2023 (Socialization of SOE & SOE Subsidiaries Ranking)	Jakarta (Online)
		GRC Masterclass Program 2023 (ESG for Boards – Governance of ESG)	Jakarta (Online)
		GRC Masterclass Program 2023 (GRC Integrated Information for Supervisory Board)	Jakarta (Online)
		Rakornaswasin 2023 dengan tema Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi Rakornaswasin 2023 with the theme "Monitoring Productivity for Economic Transformation"	Jakarta (Online)
3.	Atas Wijayanto	GRC Masterclass Program 2023 (Pre-IPO & Post-IPO)	Jakarta (Online)
		GRC Masterclass Program 2023 (Risk Management Effectiveness Evaluation)	Jakarta (Online)
		GRC Masterclass Program 2023 (Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN) GRC Masterclass Program 2023 (Socialization of SOE & SOE Subsidiaries Ranking)	Jakarta (Online)
		GRC Masterclass Program 2023 (ESG for Boards – Governance of ESG)	Jakarta (Online)
		GRC Masterclass Program 2023 (GRC Integrated Information for Supervisory Board)	Jakarta (Online)
		Seminar Online Manajemen Risiko Asuransi; Teknik Audit Berbasis Risiko "Menentukan Strategi dan Pendekatan Audit secara Tepat dalam Risk-Based Auditing" Insurance Risk Management Online Seminar; Risk-Based Audit Techniques "Determining the Right Audit Strategy and Approach in Risk- Based Auditing"	Jakarta (Online)
		Rakornaswasin 2023 dengan tema "Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi" Rakornaswasin 2023 with the theme "Monitoring Productivity for Economic Transformation"	Jakarta (Online)

No.	Tanggal Date	Judul Kegiatan Activity Title	Tempat Place
4.	Arief Budiono	GRC Masterclass Program 2023 (Sosialisasi Pemeringkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN) GRC Masterclass Program 2023 (Socialization of SOE & SOE Subsidiaries Ranking)	Jakarta (Online)
		GRC Masterclass Program 2023 (ESG for Boards– Governance of ESG)	Jakarta (Online)
		GRC Masterclass Program 2023 (GRC Integrated Information for Supervisory Board)	Jakarta (Online)
		Rakornaswasin 2023 dengan tema “Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi” Rakornaswasin 2023 with the theme “Monitoring Productivity for Economic Transformation”	Jakarta (Online)

### Tolok Ukur Pengawasan Dewan Komisaris

Dalam melaksanakan tugas pengawasannya, Dewan Komisaris menggunakan tolok ukur sebagai berikut:

1. Ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Anggaran Dasar Perseroan.
3. RJPP dan RKAP 2023.
4. Praktik GCG.
5. Keputusan dan arahan RUPS.
6. Arahan Dewan Komisaris dalam pelaksanaan RKAP 2023.
7. Program kerja Dewan Komisaris tahun 2023.
8. *Board Manual*, Piagam Komite, dan kelengkapan SPO lainnya.

### Fokus Pengawasan dan Pelaksanaan Tugas Dewan Komisaris Tahun 2023

Selama tahun 2023, salah satu bentuk pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris adalah dengan melakukan kunjungan lapangan untuk analisis berdasarkan observasi langsung atas kondisi operasi dan investasi di lapangan. Hal ini dilakukan sebagai pendalaman atas analisis dalam rapat Dewan Komisaris. Dewan Komisaris telah melakukan 17 kali kunjungan ke unit-unit usaha, anak perusahaan, dan kantor Direksi.

### Persetujuan dan Rekomendasi Dewan Komisaris

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris menerbitkan 39 surat terkait persetujuan Dewan Komisaris atas tindakan Direksi yang sesuai ketentuan Anggaran Dasar memerlukan persetujuan Dewan Komisaris, tanggapan tertulis atas laporan kinerja Perseroan, dan RKAP. Selama tahun 2023, aksi korporasi yang dilakukan oleh Direksi yang memerlukan persetujuan tertulis dan rekomendasi dari Dewan Komisaris sesuai Anggaran Dasar adalah:

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Regarding
1.	DK-02/I/2023	3 Januari 2023 January 3, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP Tahun 2023 PT Perkebunan Nusantara IV Board of Commissioners' Response to PT Perkebunan Nusantara IV's 2023 RKAP
2.	DK-03/I/2023	3 Januari 2023 January 3, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas RKAP Tahun 2023 PT Perkebunan Nusantara IV Board of Commissioners' Response to PT Perkebunan Nusantara IV's 2023 RKAP
3.	DK-06/I/2023	11 Januari 2023 January 11, 2023	Persetujuan Izin Cuti Approval of Leave Permit
4.	DK-08/I/2023	13 Januari 2023 January 13, 2023	Persetujuan Perubahan Izin Cuti Approval of Changes to Leave Permit
5.	DK-14/I/2023	23 Januari 2023 January 23, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Penghapusbukuan Aset untuk Pembangunan Pabrik BioCNG Plant PKS Mayang Board of Commissioners' Response to Asset Write-off for Construction of BioCNG Plant PKS Mayang

### Board of Commissioners Supervision Benchmarks

The Board of Commissioners uses the following benchmarks to carry out its supervisory duties:

1. Applicable legal provisions and regulations.
2. Company Articles of Association.
3. RJPP and RKAP 2023.
4. GCG practices.
5. GMS decisions and directions.
6. Directions of the Board of Commissioners in implementing the 2023 RKAP.
7. Board of Commissioners work program for 2023.
8. Board Manual, Committee Charter, and other SPO equipment.

### Focus of Supervision and Implementation of Duties of the Board of Commissioners in 2023

In 2023, the Board of Commissioners conducted field visits to analyze operational and investment conditions firsthand as a part of their supervisory duties. These visits were conducted to provide a thorough analysis in the Board of Commissioners' meetings. In total, the Board of Commissioners conducted 17 visits to business units, subsidiaries, and the Board of Directors' offices.

### Approval and Recommendation of the Board of Commissioners

Throughout 2023, the Board of Commissioners issued 39 letters approving the actions of the Board of Directors in accordance with the provisions of the Articles of Association, which require approval from the Board of Commissioners. The approvals included written responses to the Company's performance reports and RKAP. In 2023, corporate actions requiring written approval and recommendations from the Board of Commissioners, as per the Articles of Association, were:



No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Regarding
6.	DK-17/II/2023	3 Februari 2023 February 3, 2023	Persetujuan Penghapusbukuan Tanaman Kelapa Sawit Approval of Palm Oil Plant Write-off
7.	DK-31/III/2023	14 Maret 2023 March 14, 2023	Persetujuan Rancangan Penggabungan PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V), PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI), dan PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) ke dalam PT Perkebunan Nusantara IV Approval of Merger Plan of PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V), PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI), and PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) into PT Perkebunan Nusantara IV
8.	DK-32/III/2023	14 Maret 2023 March 14, 2023	Persetujuan Rancangan Pemisahan ( <i>Spin Off</i> ) Bisnis Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet PT Perkebunan Nusantara III (Persero) kepada PT Perkebunan Nusantara IV Approval of Spin-Off Plan of Palm Oil and Rubber Plantation Business of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) to PT Perkebunan Nusantara IV
9.	DK-33/III/2023	28 Maret 2023 March 28, 2023	Persetujuan Dewan Komisaris Terhadap Rencana Kerja Sama Operasi (KSO) PTPN IV dengan PTPN XIV di Kebun Kelapa Sawit dan PKS PTPN XIV Board of Commissioners' Approval of PTPN's Joint Operation (KSO) Plan IV with PTPN XIV in Oil Palm Plantation and PTPN XIV PKS
10.	DK-37/IV/2023	13 April 2023 April 13, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Rencana Integrasi PTPN Grup Board of Commissioners' Response to PTPN Group Integration Plan Request
11.	DK-38/IV/2023	13 April 2023 April 13, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Keuangan Tahun Buku 2022 PT Perkebunan Nusantara IV Board of Commissioners' Response to PT Perkebunan Nusantara IV's Financial Report for Fiscal Year 2022
12.	DK-40/IV/2023	18 April 2023 April 18, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen s.d. Triwulan I Tahun 2023 PT Perkebunan Nusantara IV Board of Commissioners' Response to PT Perkebunan Nusantara IV's Management Report up to the First Quarter of 2023
13.	DK-43.1/V/2023	12 Mei 2023 May 12, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Pengusulan Komisaris PT Padasa Enam Utama Board of Commissioners' Response to PT Padasa Enam Utama's Commissioner Proposal
14.	DK-44/IV/2023	22 Mei 2023 May 22, 2023	Usulan Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi serta Usulan KAP untuk Audit Tahun Buku 2023 Board of Commissioners' and Board of Directors' Remuneration Proposal and KAP Proposal for the 2023 Fiscal Year Audit
15.	DK-45/V/2023	25 Mei 2023 May 25, 2023	Persetujuan Izin Cuti Approval of Leave Permit
16.	DK-49/VI/2023	9 Juni 2023 June 9, 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Kandidat Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan PT Perkebunan Nusantara IV Board of Commissioners' Approval of Candidate for Head of Corporate Secretariat of PT Perkebunan Nusantara IV
17.	DK-57/VI/2023	26 Juni 2023 June 26, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas <i>Repackaging</i> Utang dalam rangka Integrasi PTPN. Board of Commissioners' Response to Debt Repackaging in the Context of PTPN Integration.
18.	DK-58/VI/2023	26 Juni 2023 June 26, 2023	Persetujuan Dewan Komisaris atas Pinjaman HIMBARA Plus untuk PTPN IV dalam rangka Integrasi PTPN. Board of Commissioners' Approval of HIMBARA Plus Loan for PTPN IV in the Context of PTPN Integration.
19.	DK-62/VII/2023	31 Juli 2023 July 31, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Laporan Manajemen s.d. Triwulan II Tahun 2023 PT Perkebunan Nusantara IV. Board of Commissioners' Response to Management Report up to Quarter II of 2023 of PT Perkebunan Nusantara IV
20.	DK-65/VIII/2023	25 Agustus 2023 August 25, 2023	Pengalihan Anggaran Investasi Tahun 2023 Investment Budget Transfer in 2023
21.	DK-71/IX/2023	29 September 2023 September 29, 2023	Persetujuan Kerangka Acuan Kerja General Audit PTPN IV dan Entitas Anak. Approval of General Audit Work Reference Framework for PTPN IV and Subsidiaries.
22.	DK-74/X/2023	2 Oktober 2023 October 2, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Pengusulan Direksi PT SPN. Board of Commissioners' Response to the Proposal of the Board of Directors of PT SPN.
23.	DK-76/X/2023	9 October 2023 October 9, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Draft RKAP PTPN IV Tahun 2024. Board of Commissioners' Response to Draft RKAP of PTPN IV in 2024.

No.	Nomor Surat Letter Number	Tanggal Date	Perihal Regarding
24.	DK-80/X/2023	30 Oktober 2023 October 30, 2023	Tanggapan atas Pelaksanaan Pengadaan Jasa Audit Tahun Buku 2023 PTPN III (Persero) dan Entitas Anak. Response to Implementation of Audit Services Procurement for Fiscal Year 2023 of PTPN III (Persero) and Subsidiaries.
25.	DK-81/X/2023	31 Oktober 2023 October 31, 2023	Pengalihan Anggaran Investasi Tahun 2023. Investment Budget Transfer in 2023.
26.	DK-82/X/2023	31 Oktober 2023 October 31, 2023	Pengalihan Anggaran Investasi Tahun 2023. Investment Budget Transfer in 2023.
27.	DK-83/X/2023	31 Oktober 2023 October 31, 2023	Pengalihan Anggaran Investasi Tahun 2023. Investment Budget Transfer in 2023.
28.	DK-86/XI/2023	22 November 2023 November 22, 2023	Pengalihan Anggaran Investasi Tahun 2023. Investment Budget Transfer in 2023.
29.	DK-87/XI/2023	27 November 2023 November 27, 2023	Tanggapan Tertulis atas Tindakan PTPN IV Sebagai Penanggung dan Pemberi Jaminan atas Fasilitas <i>Non Cash Loan</i> dan Fasilitas <i>Treasury Line</i> . Written Response Regarding the Actions of PTPN IV as the Guarantor and Provider of Guarantees for Non-Cash Loan Facilities and Treasury Line Facilities.
30.	DK-88/XI/2023	27 November 2023 November 27, 2023	Tanggapan atas Agunan SHGU No. 48 Kebun BER dan SHGU No. 1 Kebun DOI untuk Perpanjangan Fasilitas dan Penambahan Limit <i>Non Cash Loan</i> dan Fasilitas <i>Treasury Line</i> a.n. PTPN IV. Response concerning Collateral SHGU No. 48 of BER Plantation and SHGU No. 1 of DOI Plantation for the Extension of Facilities and Addition of Non-Cash Loan Limits and Treasury Line Facilities under the name of PTPN IV.
31.	DK-89/XI/2023	27 November 2023 November 27, 2023	Tanggapan Persetujuan Dewan Komisaris atas Persediaan Teh Jenis Waste. Response Regarding the Approval of the Board of Commissioners on Waste Tea Inventory.
32.	DK-90/XI/2023	27 November 2023 November 27, 2023	Tanggapan Persetujuan Dewan Komisaris atas Penghapusbukuan dan Pemindahtanganan Aset Tanaman Teh PTPN IV. Response Regarding the Approval of the Board of Commissioners on the Write-Off and Transfer of PTPN IV Tea Plant Assets.
33.	DK-91/XI/2023	27 November 2023 November 27, 2023	Pengalihan Anggaran Investasi Tahun 2023. Investment Budget Transfer in 2023.
34.	DK-93/XI/2023	30 November 2023 November 30, 2023	Tanggapan Dewan Komisaris atas Permohonan Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi 1 (satu) Tingkat di bawah Direksi. Response of the Board of Commissioners to the Request for Approval of Changes to the Organizational Structure 1 (one) Level below the Board of Directors.
35.	DK-94/XII/2023	1 Desember 2023 December 1, 2023	Tanggapan Persetujuan Dewan Komisaris atas Kandidat Kepala Divisi Sekretariat Perusahaan dan Kepala Divisi SPI PT Perkebunan Nusantara IV. Response of the Board of Commissioners' Approval of Candidates for Head of the Corporate Secretariat Division and Head of the SPI Division of PT Perkebunan Nusantara IV.
36.	COMM/01/XII/2023	7 Desember 2023 December 7, 2023	Tanggapan DK atas Rencana Kerja Sama Operasi antara PTPN IV dan PTPN I. Response of the Board of Commissioners to the Operational Cooperation Plan between PTPN IV and PTPN I.
37.	COMM/02.1/XII/2023	11 Desember 2023 December 11, 2023	Tanggapan RKAP Tahun 2023. Response to the 2023 RKAP.
38.	COMM/02.2/XII/2023	12 Desember 2023 December 12, 2023	Tanggapan RKAP Tahun 2024. Response to the 2024 RKAP.
39.	COMM/04/XII/2023	15 Desember 2023 December 15, 2023	Persetujuan Perubahan Struktur Organisasi 1 (Satu) Tingkat di bawah Direksi. Approval of Changes to the Organizational Structure 1 (One) Level below the Board of Directors.

## Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Dewan Komisaris

Dewan Komisaris telah melaksanakan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perusahaan, antara lain:

- Melaksanakan tugas pengawasan terhadap kebijakan dan jalannya pengurusan Perseroan dan memberikan nasehat terhadap pelaksanaan RKAP termasuk KPI Direksi, berdasarkan ketentuan Anggaran Dasar dan Keputusan RUPS serta peraturan-peraturan yang berlaku untuk kepentingan Perseroan sesuai dengan maksud dan tujuan Perseroan.

## Implementation of the Duties and Authorities of the Board of Commissioners

The Board of Commissioners has carried out activities related to its duties and functions as regulated in the Company's Articles of Association, including:

- Supervising the Company's policies and management and providing advice on implementing the RKAP, including the Directors' KPI, based on the provisions of the Articles of Association and GMS Resolutions as well as applicable regulations in the interests of the Company, following the Company's aims and objectives.



2. Menjalankan prinsip-prinsip GCG dan mengawasi penerapannya di dalam organisasi.
3. Memberi pandangan dan masukan secara keseluruhan atas laporan kinerja Direksi kepada RUPS.
4. Memimpin Komite yang dibentuk oleh Dewan Komisaris dalam menjalankan seluruh tugas dan hubungan kerja Komite.
5. Memberikan persetujuan kepada Direksi atau memberikan saran dan pendapat/tanggapan kepada RUPS atas rencana Direksi dalam melaksanakan kebijakannya sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan.
6. Mengikuti perkembangan kegiatan Perseroan dan memberikan pendapat dan saran mengenai rencana dan pelaksanaan RKAP, maupun terhadap masalah yang dianggap penting bagi Perseroan.
7. Memastikan agar Perseroan mengungkapkan pelaksanaan prinsip-prinsip GCG dalam RUPS dan dalam Laporan tahun 2023.
8. Melakukan rapat-rapat dengan jajaran Direksi, komite-komite Dewan Komisaris dan unit lain yang terkait, antara lain:
  - a. Rapat Internal Dewan Komisaris.
  - b. Rapat dengan Direksi.
  - c. Rapat dengan SPI membahas Laporan Hasil Pemeriksaan.
  - d. Rapat dengan Auditor Eksternal (KAP).
9. Mengikuti RUPS membahas pengesahan RKAP Tahun 2022.
10. Mengikuti RUPS membahas Pertanggungjawaban dan Pengesahan Laporan Manajemen Perseroan Tahun 2023 dan Laporan Kegiatan TJSL tahun buku 2023.

### Penilaian Terhadap Kinerja Komite di Bawah Dewan Komisaris

Dewan Komisaris menilai kinerja Komite berdasarkan sejumlah indikator, antara lain:

1. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Komite
2. Tingkat Kehadiran dalam Rapat Internal Dewan Komisaris
3. Tingkat Kontribusi Tertulis bagi Komite
4. Akurasi Rekomendasi Tertulis
5. Akurasi Rekomendasi Lisan
6. Peran Aktif (Inisiatif) dan Inovasi.

Pada 2023, penilaian terhadap kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dilakukan berdasarkan realisasi dan penyelesaian program kerja yang tercantum dalam Rencana Kerja Komite dan dilaporkan kepada Dewan Komisaris dalam laporan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG yang meliputi pelaksanaan tugas komite di bidang manajemen risiko. Hasil penilaian tersebut menjadi bahan pertimbangan bagi Dewan Komisaris untuk mengangkat kembali dan/atau memberhentikan anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG untuk periode jabatan berikutnya.

2. Implementing GCG principles and supervising their implementation within the organization.
3. Providing overall views and input on the Directors' performance report to the GMS.
4. Leading the Committee formed by the Board of Commissioners in carrying out all duties and working relationships of the Committee.
5. Approving the Board of Directors or providing suggestions and opinions/responses to the GMS regarding their plans to implement its policies by the Company's Articles of Association provisions.
6. Following developments in the Company's activities and providing opinions and suggestions regarding the plans and implementation of the RKAP and issues deemed important to the Company.
7. Ensuring that the Company discloses the implementation of GCG principles at the GMS and in the 2023 Report.
8. Conducting meetings with the Board of Directors, Board of Commissioners committees, and other related units, including:
  - a. Internal Meeting of the Board of Commissioners.
  - b. Meeting with the Board of Directors.
  - c. Meeting with SPI to discuss the Audit Results Report.
  - d. Meeting with External Auditor (KAP).
9. Participating in the GMS to discuss ratification of the 2022 RKAP.
10. Participating in the GMS to discuss the Accountability and Ratification of the Company's Management Report for 2023 and the CSR Activity Report for the 2023 financial year.

### Assessment of the Performance of Committees under the Board of Commissioners

The Board of Commissioners evaluates the Committee's performance using various indicators, including:

1. Attendance level at Committee Meetings
2. Level of participation in internal meetings of the Board of Commissioners
3. Contribution to the Committee in writing
4. Accuracy of written recommendations
5. Accuracy of oral recommendations
6. Active role (initiative) and innovation.

In 2023, an assessment of the Risk Management and GCG Monitoring Committee's performance will be conducted based on the completion of the work program outlined in the Committee's Work Plan. The findings will be reported to the Board of Commissioners in the Risk Management and GCG Monitoring Committee report, which includes the implementation of the committee's responsibilities in the field of risk management. These results will be used by the Board of Commissioners to decide whether to reappoint or dismiss members of the Risk Management and GCG Monitoring Committee for the next term of office.



## Komisaris Independen

### Kriteria Penentuan Komisaris Independen

Berdasarkan Pasal 120 ayat (2) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT"), Komisaris Independen adalah "Komisaris dari pihak luar". Pasal 120 ayat (2) UUPT juga mengatur bahwa Komisaris Independen diangkat dari pihak yang tidak terafiliasi dengan pemegang saham utama, anggota Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris lainnya. Sebagaimana tercantum di dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023, serta *Board Manual* Perseroan, disebutkan bahwa dalam komposisi Dewan Komisaris, paling sedikit 20% merupakan anggota Dewan Komisaris Independen yang ditetapkan dalam keputusan pengangkatannya.

Komisaris Independen merupakan anggota Dewan Komisaris yang tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas lainnya, anggota Direksi dan/atau pemegang saham pengendali atau hubungan dengan BUMN yang bersangkutan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2023 sebanyak 2 (dua) orang atau sebanyak 50% dari total keseluruhan anggota Dewan Komisaris sebanyak 4 (empat) orang, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Menteri BUMN dan Direktur Utama Perusahaan Perseroan (Persero) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) selaku pemegang saham Perseroan. Jumlah Komisaris Independen Perseroan telah memenuhi ketentuan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023.

### Pernyataan Independensi Komisaris Independen

Jumlah anggota Komisaris Independen Perseroan pada tahun 2023 adalah sebanyak 2 (dua) orang, atas nama Andi Wibisono dan Fauzi Yusuf. Pada awal jabatannya, Komisaris Independen telah membuat pernyataan independensi.

## Direksi

Direksi adalah organ tata kelola Perseroan yang bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk mengelola Perseroan dan melaksanakan GCG pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi. Direksi bertanggung jawab penuh atas pengurusan Perseroan untuk kepentingan dan tujuan Perseroan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar.

## Independent Commissioner

### Criteria for Determining Independent Commissioners

The criteria for determining independent commissioners are outlined in Article 120 paragraph (2) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies ("UUPT"). According to this law, an independent commissioner is defined as a "commissioner from an outside party" and is appointed from parties who are not affiliated with the main shareholders, members of the Board of Directors, or other members of the Board of Commissioners. The Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 and the Company's Board Manual state that at least 20% of the composition of the Board of Commissioners should consist of independent board members, as determined in the appointment decision.

Independent Commissioners are members of the Board of Commissioners who do not have financial, management, share ownership, family, or other relationships with other members of the Board of Commissioners/Supervisory Board, members of the Board of Directors and/or controlling shareholder or relationships with related SOEs that could affect their ability to act independently.

The Company's Board of Commissioners will have 2 (two) Independent Commissioners in 2023, which is 50% of the total 4 (four) commissioners. These appointments are based on the Decree of the Minister of State-Owned Enterprises and the President Director of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as the Company's shareholder. The number of Independent Commissioners complies with Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023.

### Statement of Independence of Independent Commissioners

The Company's Independent Commissioners for 2023 consist of 2 (two) members, Andi Wibisono and Fauzi Yusuf. Upon assuming their positions, the Independent Commissioners declared their independence.

## Board of Directors

The Board of Directors is a corporate governance body responsible for managing the Company and implementing good corporate governance practices at all levels of the organization. The Board of Directors is fully responsible for managing the company in accordance with the Company's objectives as outlined in the Articles of Association.

## Kriteria dan Proses Pengangkatan

Pengangkatan dan pemberhentian Direksi dilakukan oleh RUPS setelah melalui proses pencalonan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan pencalonan tersebut mengikat bagi RUPS. Seluruh anggota Direksi diangkat dengan mempertimbangkan aspek integritas, kompetensi, dan reputasi yang memadai sesuai dengan kebutuhan bisnis Perseroan. Direksi harus memenuhi persyaratan formal dan material ditetapkan dalam *Board Manual*.

## Komposisi Direksi

Penetapan komposisi Direksi melalui seleksi yang ketat dan terbaik sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dengan demikian, Perseroan dapat dikelola dengan optimal dan tepat arah sesuai visi dan misi yang ditetapkan dan menghasilkan kinerja yang unggul.

Penetapan komposisi Direksi Perseroan mempertimbangkan unsur keberagaman dari sisi pendidikan, pengalaman kerja, jenis kelamin, dan usia. Per 31 Desember 2023, anggota Direksi Perseroan berjumlah 7 (tujuh) orang dengan komposisi sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Dasar Hukum Pengangkatan Legal Basis of Appointment
Jatmiko K. Santosa	Direktur Utama / Chief Executive Officer	SK-343/MBU/12/2023
Rizal H. Damanik	Direktur Operasional / Chief Operating Officer	SK-343/MBU/12/2023
Ryanto Wisnuardhy	Direktur Pemasaran & Komersial / Chief Marketing & Commercial Officer	SK-343/MBU/12/2023
Ugun Untaryo	Direktur Strategi & Sustainability / Chief Strategy & Sustainability Officer	SK-343/MBU/12/2023
Hilda Savitri	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko / Chief Financial & Risk Management Officer	SK-343/MBU/12/2023
Suhendri	Direktur Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi / Chief Human Resources & Information Technology Officer	SK-343/MBU/12/2023
Irwan Perangin-angin	Direktur Hubungan Kelembagaan / Chief Institutional Relations Officer	SK-343/MBU/12/2023

## Senior Executive Vice President (SEVP)

Penempatan Senior Executive Vice President (SEVP) berdasarkan Peraturan Direksi PTPN III (Persero) No. DIR/PER/7/2020 tentang Senior Executive Vice President pada Anak Perusahaan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

## Persyaratan SEVP

Perseorangan yang cakap melakukan perbuatan hukum, kecuali dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pengangkatannya pernah menjadi anggota Direksi atau anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas yang dinyatakan bersalah menyebabkan suatu perusahaan dinyatakan pailit.

## Tanggung Jawab SEVP

- SEVP bertanggung jawab atas tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab yang diberikan kepadanya.
- Dalam pelaksanaan tugas, wewenang, kewajiban, dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud SEVP bertanggung jawab kepada Direksi Anak Perusahaan PTPN III.

## Criteria and Appointment Process

The appointment and dismissal of Directors is carried out by the GMS after a nomination process that complies with statutory regulations and the nomination is binding on the GMS. All members of the Board of Directors are appointed based on integrity, competence, and adequate reputation in line with the Company's business needs. Directors must meet the formal and material requirements outlined in the Board Manual.

## Composition of the Board of Directors

The Company carefully selects the members of the Board of Directors in accordance with the laws and regulations to ensure effective management aligned with the Company's vision and mission, resulting in outstanding performance.

The composition of the Board of Directors takes into account diversity in education, work experience, gender, and age. As of December 31, 2023, the Company's Board of Directors consists of 7 (seven) members with the following composition:

## Senior Executive Vice President (SEVP)

The appointment of the Senior Executive Vice President (SEVP) is governed by PTPN III (Persero) Board of Directors Regulation No. DIR/PER/7/2020 regarding the Senior Executive Vice President at the Subsidiary PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

## SEVP Requirements

Individuals who are capable of carrying out legal actions must not have been members of the Board of Directors or members of the Board of Commissioners/Supervisory Board found guilty of causing a company to be declared bankrupt within 5 (five) years prior to their appointment.

## SEVP Responsibilities

- The SEVP is responsible for the duties, authority, obligations, and responsibilities assigned to them.
- In carrying out the duties, authority, obligations, and responsibilities as intended, the SEVP is responsible to the Directors of the PTPN III Subsidiary.

## Komposisi SEVP

1. Untuk membantu Direksi dalam menjalankan pengurusan perusahaan mewakili Perseroan, dalam dan luar pengadilan, dipandang perlu untuk menetapkan nomenklatur jabatan dan menempatkan SEVP di Perseroan.
2. Dalam struktur organisasi, SEVP membawahi unit kerja fungsi utama (*core unit*) dan/atau fungsi pendukung (*supporting unit*) 1 (satu) tingkat di bawah Direksi.
3. Nomenklatur jabatan SEVP terdiri dari:
  - a. SEVP Operation I
  - b. SEVP Operation II
  - c. SEVP Business Support

## Masa Jabatan Direksi

Masa jabatan Direksi adalah 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan. RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sewaktu-waktu dengan menyebutkan alasannya. Jabatan Direksi berakhir apabila:

1. Meninggal dunia.
2. Masa jabatannya berakhir.
3. Mengundurkan diri sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Direksi berdasarkan ketentuan anggaran dasar dan peraturan perundang-undangan.

RUPS dapat memberhentikan anggota Direksi sebelum habis masa jabatannya. Keputusan pemberhentian tersebut diambil setelah anggota Direksi yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri. Rencana pemberhentian sewaktu-waktu anggota Direksi diberitahukan kepada anggota Direksi yang bersangkutan secara lisan atau tertulis oleh Pemegang Saham.

## Pedoman Kerja Direksi

Guna mendukung Direksi dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Perseroan telah menyusun Peraturan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi No. DK/13/KPTS/XII/2020 dan No. 04.01/KPTS/46/XII/2020 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi (*Board Manual*). *Board Manual* disusun berdasarkan prinsip-prinsip hukum korporasi, ketentuan Anggaran Dasar, peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, arahan Pemegang Saham serta praktik-praktik terbaik GCG. Isi *Board Manual* meliputi Dasar Hukum, Ruang Lingkup, Tujuan, prinsip dasar hubungan kerja Dewan Komisaris dan Direksi, dan pedoman pelaksanaan kerja Dewan Komisaris dan Direksi.

## Tugas Direksi

Walaupun bekerja secara kolektif, namun terdapat pembagian tugas secara terpisah antar anggota Direksi untuk menghasilkan kinerja yang efisien dan efektif. Pembagian tugas dan wewenang setiap anggota Direksi ditetapkan oleh RUPS dan wewenang tersebut oleh RUPS dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris. Pembagian tugas Direksi Perusahaan sebagaimana tercantum dalam *Board Manual* sebagai berikut:

## SEVP Composition

1. To assist the Board of Directors in managing the company both inside and outside the court, it is necessary to establish position titles and appoint a Senior Executive Vice President (SEVP) within the Company.
2. Within the organizational structure, the SEVP oversees the core unit and/or supporting unit that is one level below the Board of Directors.
3. The SEVP positions are as follows:
  - a. SEVP Operation I
  - b. SEVP Operation II
  - c. SEVP Business Support

## Term of Office of the Board of Directors

The term of office for the Board of Directors is 5 (five) years and can be reappointed for 1 (one) additional term. The GMS has the authority to dismiss members of the Board of Directors at any time by stating the reasons. The term of office for the Board of Directors ends if:

1. They pass away.
2. Their term of office expires.
3. They resign in accordance with applicable regulations.
4. They no longer meet the requirements as a Director based on the provisions of the articles of association and statutory regulations.

The GMS has the power to dismiss members of the Board of Directors before the end of their term of office. The decision to dismiss a member of the Board of Directors is made after the individual has been given the opportunity to defend themselves. Any plan to dismiss a member of the Board of Directors at any time will be communicated to the relevant individual verbally or in writing by the Shareholders.

## Board of Directors' Work Guidelines

To support the Board of Directors in carrying out their duties and functions, the Company has prepared Joint Regulations for the Board of Commissioners and Directors No. DK/13/KPTS/XII/2020 and No. 04.01/KPTS/46/XII/2020, which outline guidelines for the work procedures of the Board of Commissioners and Directors (*Board Manual*). The *Board Manual* is formulated based on corporate legal principles, provisions of the Articles of Association, applicable laws and regulations, shareholder directions, and GCG best practices. It includes the legal basis, scope, objectives, basic principles of the working relationship between the Board of Commissioners and Directors, and guidelines for implementing their work.

## Board of Directors' Duties

While working collectively, the Board of Directors efficiently divides tasks among its members to ensure effective performance. The allocation of duties and authority for each member is determined by the GMS and can be delegated to the Board of Commissioners. The division of duties for the Company's Directors, as outlined in the *Board Manual*, is as follows:



Direktur	Director
<p><b>Tugas</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan Perusahaan untuk kepentingan Perusahaan dan sesuai dengan maksud dan tujuan Perusahaan serta mewakili Perusahaan baik dalam maupun luar pengadilan tentang segala hal dan kejadian dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan Keputusan RUPS.</li> <li>2. Wajib melaksanakan tugasnya dengan itikad baik untuk kepentingan BUMN dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUMN, serta memastikan agar BUMN melaksanakan tanggung jawab sosialnya serta memperhatikan kepentingan dari berbagai pemangku kepentingan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.</li> </ol>	<p><b>Duties</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To carry out all actions related to the management of the Company in accordance with the Company's objectives and represent the Company in all matters, both inside and outside the court, within the limits set by applicable laws, the Articles of Association, and GMS Resolutions.</li> <li>2. To carry out my duties in good faith for the interests of the SOE and ensure that SOE fulfills its social responsibilities and considers the interests of various stakeholders in accordance with statutory regulations.</li> </ol>
<p><b>Wewenang</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menetapkan kebijakan kepengurusan Perusahaan dengan ketentuan bahwa kebijakan di bidang produksi, pemasaran, keuangan, akuntansi dan perbendaharaan, pengadaan, perencanaan dan pengembangan, teknologi informasi, sumber daya manusia, dan pengawasan wajib berpedoman pada kebijakan yang ditetapkan oleh Pemegang Saham Seri A Dwiwarna atau yang diberikan kuasa.</li> <li>2. Mengatur kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang untuk mengambil keputusan atas nama Direksi atau mewakili Perusahaan dalam dan luar pengadilan.</li> <li>3. Mengatur penyerahan kekuasaan Direksi kepada seorang atau beberapa orang pekerja Perusahaan baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama atau kepada orang lain, untuk mewakili Perusahaan dalam dan luar pengadilan.</li> <li>4. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian Perusahaan termasuk penetapan gaji, pensiun, dan jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dengan ketentuan penetapan gaji, pensiun, jaminan hari tua, dan penghasilan lain bagi pekerja yang melampaui kewajiban yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, harus mendapat persetujuan terlebih dahulu dari Pemegang Saham Seri B terbanyak.</li> <li>5. Mengangkat dan memberhentikan pekerja Perusahaan berdasarkan peraturan kepegawaian Perusahaan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.</li> <li>6. Mengangkat dan memberhentikan Sekretaris Perusahaan.</li> <li>7. Melakukan segala tindakan dan perbuatan lainnya mengenai pengurusan maupun pemilihan kekayaan Perusahaan, mengikat Perusahaan dengan pihak lain dan/atau pihak lain dengan Perusahaan, serta mewakili Perusahaan dalam dan luar pengadilan tentang segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan-pembatasan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggaran Dasar, dan/atau keputusan RUPS.</li> </ol>	<p><b>Authorities</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. To establish Company management policies with provisions that policies in production, marketing, finance, accounting and treasury, procurement, planning and development, information technology, human resources, and supervision must be guided by the policies established by Series A Dwiwarna Shareholders or given authority.</li> <li>2. To regulate the powers of the Board of Directors to one or several individuals to make decisions on behalf of the Board of Directors or represent the Company inside and outside the court.</li> <li>3. To regulate the transfer of the powers of the Board of Directors to one or several company employees, either individually or jointly, or to other individuals, to represent the Company inside and outside the court.</li> <li>4. To regulate provisions regarding Company employment, including determining salaries, pensions, and old-age security, and other income for the Company's workers based on applicable laws and regulations, with provisions for determining salaries, pensions, old-age security, and other income for workers that exceed the obligations stipulated by applicable laws and regulations, must obtain prior approval from the largest number of Series B shareholders.</li> <li>5. To appoint and dismiss the Company's employees based on Company personnel regulations and applicable laws and regulations.</li> <li>6. To appoint and dismiss the Corporate Secretary.</li> <li>7. To carry out all actions and other activities regarding the management and ownership of the company's assets, bind the Company with other parties and/or other parties with the company, and represent the Company in and out of court regarding all matters and all events, with restrictions as regulated in the regulations, applicable laws, Articles of Association, and/or GMS decisions.</li> </ol>

### SEVP Operation I

#### Tugas SEVP Operation I

1. Membawahi dan mengkoordinir rancangan RKAP.
2. Mempersiapkan dan mengkoordinir rancangan RKAP dan RKO Bagian Tanaman dan Bagian *Operational Supporting*.
3. Memberi penjelasan kepada Direksi tentang rancangan RKAP, RKO, Laporan Kinerja Periodik, Laporan Tahunan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
4. Melaksanakan dan mengendalikan program kerja di bidang Bagian Tanaman, Pengamanan Aset Produksi, dan Bidang Plasma (berkaitan bidang perencanaan, *monitoring*, dan evaluasi eksploitasi plasma dan administrasi terkait).
5. Mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali dengan Direksi dan bagian/fungsi yang berada dibawahnya guna membahas permasalahan di bidang yang dibawah SEVP Operation I.
6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian KPI di bidang yang dibawah SEVP Operation I.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang yang dibawah SEVP Operation I.
8. Menjalankan arahan Direksi.
9. Menyampaikan laporan dan/atau penjelasan kepada Direksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilakukan di bidang yang dibawah SEVP Operation I.
10. Melakukan evaluasi realisasi kinerja di di bidang yang dibawah SEVP Operation I sesuai RKO dan RKAP, serta melakukan analisis dan kajian untuk melakukan perubahan apabila terjadi penyimpangan.
11. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko di di bidang yang dibawah SEVP Operation I.
12. Menjalankan dan mematuhi *Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Pedoman Pengendalian Gratifikasi*, dan prosedur/pedoman/peraturan yang berlaku di Perseroan.
13. Menjalankan kuasa Direksi.

#### SEVP Operation I Duties

1. To supervise and coordinate the drafting of RKAP.
2. To prepare and coordinate the drafting of RKAP and RKO for the Plant Section and Operational Supporting Section.
3. To provide explanations to the Board of Directors regarding the draft RKAP, RKO, Periodic Performance Reports, Annual Reports, and other necessary matters.
4. To implement and control work programs in the areas of Plant Division, Security of Production Assets, and Plasma Sector (related to planning, monitoring, and evaluating plasma exploitation and related administration).
5. To hold regular meetings at least once a month with the Board of Directors and the sections/functions under them to discuss problems in areas under SEVP Operation I.
6. To conduct regular evaluations of KPI achievements in areas under SEVP Operation I.
7. To coordinate the implementation of activities in areas under SEVP Operation I.
8. To carry out the directions of the Board of Directors.
9. To submit reports and/or explanations to the Board of Directors regarding the implementation of duties and functions as well as activities carried out in areas under SEVP Operation I.
10. To evaluate performance realization in areas under SEVP Operation I according to RKO and RKAP, as well as carry out analysis and studies to make changes if deviations occur.
11. To implement and monitor the implementation of GCG principles and risk management in areas under SEVP Operation I.
12. To implement and comply with the Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Gratification Control Guidelines, and applicable procedures/guidelines/regulations in the Company.
13. To exercise the powers of the Board of Directors.

#### Tugas SEVP Operation II

1. Membawahi dan mengkoordinir tugas-tugas di bidang yang dibawah Bagian Teknik dan Pengolahan di seluruh unit kerja.
2. Mempersiapkan dan mengkoordinir rancangan RKAP dan RKO di bidang yang dibawah Bagian Teknik dan Pengolahan di seluruh unit kerja.
3. Memberi penjelasan kepada Direksi tentang rancangan RKAP, RKO, Laporan Kinerja Periodik, Laporan Tahunan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
4. Melaksanakan dan mengendalikan program kerja di bidang yang dibawah bagian teknik dan pengolahan di seluruh unit kerja.
5. Mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap bulan dengan Direksi dan bagian/fungsi yang berada di bawahnya guna membahas permasalahan di bidang yang dibawah bagian teknik dan pengolahan.
6. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian KPI di bidang yang dibawah Bagian Teknik dan Pengolahan, serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.
7. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang yang dibawah bagian teknik dan pengolahan.

#### SEVP Operation II Duties

1. To supervise and coordinate tasks in areas under the Engineering and Processing Section in all work units.
2. To prepare and coordinate the draft RKAP and RKO in the fields under the Engineering and Processing Section in all work units.
3. To explain to the Board of Directors regarding the draft RKAP, RKO, Periodic Performance Reports, Annual Reports, and other necessary matters.
4. To implement and control work programs in areas under the engineering and processing section in all work units.
5. To hold regular meetings at least 1 (one) time per month with the Board of Directors and the sections/functions under them to discuss problems in the areas under the engineering and processing section.
6. To regularly evaluate KPI achievements in areas under the Engineering and Processing Section and formulate necessary corrective actions.
7. To coordinate the implementation of activities in areas under the engineering and processing section.



- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>8. Menjalankan arahan Direksi.</li> <li>9. Menyampaikan laporan dan/atau penjelasan kepada Direksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilakukan di bidang yang dibawah bagian teknik dan pengolahan.</li> <li>10. Melakukan evaluasi realisasi kinerja di bidang yang dibawah bagian teknik dan pengolahan sesuai RKO dan RKAP, serta melakukan analisa dan kajian untuk melakukan perubahan apabila terjadi penyimpangan.</li> <li>11. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko di bidang yang dibawah bagian teknik dan pengolahan.</li> <li>12. Menjalankan dan mematuhi <i>Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Pedoman Pengendalian Gratifikasi</i>, dan prosedur/pedoman/peraturan yang berlaku di Perseroan.</li> <li>13. Melaksanakan dan mengendalikan program kerja di bidang yang dibawah oleh Direktur yaitu bidang PKBL dan CSR dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko.</li> <li>14. SEVP Operation II dengan ketentuan yang akan diatur lebih lanjut dalam prosedur/pedoman/peraturan yang ditetapkan Direksi;</li> <li>15. Bertindak untuk dan atas nama Perseroan baik dalam maupun luar pengadilan berdasarkan surat kuasa Direksi.</li> <li>16. Ketentuan mengenai teknis pelaksanaan tugas dan wewenang SEVP Operation II dapat diatur dalam prosedur/pedoman/peraturan yang ditetapkan Direksi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>8. To carry out the direction of the Board of Directors.</li> <li>9. To submit reports and explanations to the Board of Directors regarding implementing duties, functions, and activities in areas under the engineering and processing section.</li> <li>10. To evaluate performance realization in areas under the engineering and processing section following RKO and RKAP and conduct analysis and studies to make changes if deviations occur.</li> <li>11. To implement and monitor the application of GCG principles and risk management in areas under the engineering and processing section.</li> <li>12. To implement and comply with the Company's Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Gratification Control Guidelines, and applicable procedures/guidelines/regulations.</li> <li>13. To implement and control work programs under the Director's supervision, namely PKBL, and CSR, by paying attention to the principles of GCG and risk management.</li> <li>14. SEVP Operation II with provisions that will be further regulated in procedures/guidelines/regulations determined by the Board of Directors;</li> <li>15. To act for and on behalf of the Company inside and outside the court based on the Board of Directors' power of attorney.</li> <li>16. Procedures/guidelines/regulations determined by the Board of Directors can regulate provisions regarding the technical implementation of SEVP Operation II's duties and authority.</li> </ol> |
|---|--|

#### SEVP Business Support

##### Tugas

1. Membawahi, mempersiapkan, dan mengkoordinir tugas-tugas termasuk rancangan RKAP dan RKO di bidang yang dibawah bagian keuangan dan akuntansi, bagian sumber daya manusia, bagian pengadaan dan umum, bagian optimalisasi anak perusahaan dan aset di seluruh Unit Kerja.
2. Memberi penjelasan kepada Direksi tentang rancangan RKAP, RKO, Laporan Kinerja Periodik, Laporan Tahunan dan hal-hal lain yang dianggap perlu.
3. Melaksanakan dan mengendalikan program kerja di bidang yang dibawah bagian keuangan dan akuntansi, bagian sumber daya manusia, bagian pengadaan dan umum, bagian optimalisasi anak perusahaan dan aset di seluruh Unit Kerja.
4. Mengadakan rapat secara berkala minimal 1 (satu) kali setiap bulan dengan Direksi dan bagian/fungsi yang berada di bawahnya guna membahas permasalahan di bidang yang dibawah bagian keuangan dan akuntansi, bagian sumber daya manusia, bagian pengadaan dan umum, bagian optimalisasi anak perusahaan dan aset.
5. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian KPI di bidang yang dibawah bagian keuangan dan akuntansi, bagian sumber daya manusia, bagian pengadaan dan umum, bagian optimalisasi anak perusahaan dan aset serta merumuskan tindakan perbaikan yang diperlukan.
6. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan di bidang yang dibawah bagian keuangan dan akuntansi, bagian sumber daya manusia, bagian pengadaan dan umum, bagian optimalisasi anak perusahaan dan aset.

##### Duties

1. To supervise, prepare, and coordinate tasks, including drafting RKAP and RKO in areas under the finance and accounting sections, human resources, procurement and general affairs, and subsidiary and asset optimization sections in all Work Units.
2. To explain to the Board of Directors regarding the draft RKAP, RKO, Periodic Performance Reports, Annual Reports, and other necessary matters.
3. To implement and control work programs in all work units under the finance and accounting, human resources, procurement, general affairs, subsidiary, and asset optimization sections.
4. To hold regular meetings at least 1 (one) time per month with the Board of Directors and the sections/functions under them to discuss problems in areas under the finance and accounting section, human resources section, procurement and general affairs section, subsidiary optimization section, and assets.
5. To conduct regular evaluations of KPI achievements in areas under the finance and accounting, human resources, procurement and general affairs, and subsidiary and asset optimization sections and formulate necessary corrective actions.
6. To coordinate the implementation of activities in areas under the finance and accounting department, human resources department, procurement and general affairs department, subsidiary, and asset optimization section.

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>7. Menjalankan arahan Direksi.</li> <li>8. Menyampaikan Laporan dan/atau penjelasan kepada Direksi atas pelaksanaan tugas dan fungsi serta kegiatan yang dilakukan di bidang yang dibawah baglan keuangan dan akuntansi, bagian sumber daya manusia, bagian pengadaan dan umum, bagian optimalisasi anak perusahaan dan aset.</li> <li>9. Melakukan evaluasi realisasi kinerja di bidang yang dibawah bagian keuangan dan akuntansi, bagian sumber daya manusia, bagian pengadaan dan umum, bagian optimalisasi anak perusahaan dan aset serta melakukan analisis dan kajian untuk melakukan perubahan apabila terjadi penyimpangan.</li> <li>10. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko di bidang yang dibawah bagian keuangan dan akuntansi, bagian sumber daya manusia, bagian pengadaan dan umum, bagian optimalisasi anak perusahaan dan aset.</li> <li>11. Menjalankan dan mematuhi <i>Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Pedoman Pengendalian Gratifikasi</i>, dan prosedur/pedoman/peraturan yang berlaku di Perseroan.</li> <li>12. Melaksanakan dan mengendalikan program kerja di bidang yang dibawah oleh Direktur yaitu bidang Sekretariat, bidang Legal Aset, bidang <i>Corporate Legal</i>, bidang <i>Corporate Communication</i>, dan bidang-bidang di bawah Bagian Perencanaan dan <i>Sustainability</i> dengan memperhatikan prinsip-prinsip GCG, manajemen risiko, <i>Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Pedoman Pengendalian Gratifikasi</i>, dan prosedur/pedoman/peraturan yang berlaku di Perusahaan.</li> <li>13. Menjalankan kuasa Direksi.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>7. To carry out the direction of the Board of Directors.</li> <li>8. To submit reports and explanations to the Board of Directors regarding the implementation of duties, functions, and activities carried out in areas under the finance and accounting department, human resources department, procurement, general affairs department, subsidiary, and asset optimization section.</li> <li>9. To evaluate performance realization in areas under the finance and accounting department, human resources department, procurement, general affairs department, subsidiary, and asset optimization section, and conduct analysis and studies to make changes if deviations occur.</li> <li>10. To implement and monitor the application of GCG principles and risk management in areas under the finance and accounting, human resources, procurement and general affairs, subsidiary, and asset optimization departments.</li> <li>11. To implement and comply with the Company's Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Gratification Control Guidelines, and applicable procedures/guidelines/regulations.</li> <li>12. To implement and control work programs in the fields under the Director's supervision, namely the Secretariat field, Asset Legal field, Corporate Legal field, Corporate Communication field, and fields under the Planning and Sustainability Section by taking into account the principles of GCG, risk management, Board Manual, Code of Conduct, Code of Corporate Governance, Gratification Control Guidelines, and procedures/guidelines/regulations that apply in the Company.</li> <li>13. To exercising the powers of the Board of Directors.</li> </ol> |
|--|---|

### Independensi dan Kepemilikan Saham Anggota Direksi

Setiap anggota Direksi wajib membuat pernyataan independensi dan bebas benturan kepentingan pada awal menjabat. Surat Pernyataan Tidak Mempunyai Benturan Kepentingan tersebut memuat beberapa pernyataan, antara lain kepemilikan saham, hubungan keluarga, rangkap jabatan, serta jabatan lain yang menimbulkan benturan kepentingan.

Setiap anggota Direksi Perseroan telah memenuhi kriteria independensi sebagai berikut:

1. Patuh dan tunduk pada Anggaran Dasar Perseroan serta peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Tidak memiliki benturan kepentingan antara kepentingan pribadi/keluarga, jabatan lain, atau golongan dengan kepentingan Perseroan.
3. Tidak mempunyai kepemilikan saham di Perseroan dan perusahaan lain.
4. Menerapkan prinsip-GCG.
5. Apabila melanggar hal-hal yang tercantum dalam pernyataan Pakta Integritas, bersedia dikenakan sanksi administrasi serta dituntut ganti rugi dan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### Independence and Share Ownership of Directors

All members of the Board of Directors are required to declare their independence and confirm that they are free from any conflicts of interest at the beginning of their term. The Statement of No Conflict of Interest covers various aspects, including share ownership, family relationships, holding multiple positions, and any other positions that could lead to a conflict of interest.

Each member of the Company's Board of Directors has met the following independence criteria:

1. Compliance with the Company's Articles of Association and relevant laws and regulations.
2. No conflicts of interest between personal/family interests, other positions, or groups and the interests of the Company.
3. No share ownership in the Company or any other companies.
4. Adherence to GCG principles.
5. Willingness to face administrative sanctions and legal action, including compensation and criminal charges, for violating the Integrity Pact statement, in accordance with applicable laws and regulations.

Perseroan mewajibkan anggota Direksi untuk mengungkapkan kepemilikan sahamnya, baik kepemilikan saham pada Perseroan, maupun pada perusahaan lain, yang berkedudukan di dalam dan luar negeri, pada saat awal menjabat, yang harus diperbaharui setiap tahunnya.

Berdasarkan pernyataan Direksi yang tertuang dalam Daftar Khusus Kepemilikan Saham Direksi, selama tahun 2023, tidak terdapat kepemilikan saham Perseroan oleh Direksi.

### Rangkap Jabatan Anggota Direksi

Selama tahun 2023, tidak terdapat Anggota Direksi Perseroan yang merangkap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Tata Kelola Perusahaan, yang menyebutkan bahwa:

1. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap pada BUMN, BUMD, BUMS;
2. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN;
3. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/ lembaga pemerintah pusat dan atau daerah;
4. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala Daerah/ Wakil Kepala Daerah; dan/atau; dan
5. Jabatan lain yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat anggota Direksi yang memangku jabatan rangkap sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan.

### Program Pengenalan Perusahaan

Anggota Direksi yang diangkat untuk pertama kalinya wajib mengikuti program pengenalan mengenai Perseroan. Program ini meliputi pelaksanaan prinsip-prinsip GCG oleh BUMN, gambaran mengenai BUMN berkaitan dengan tujuan, sifat, dan lingkup kegiatan, kinerja keuangan dan operasi, strategi, rencana usaha jangka pendek dan jangka panjang, posisi kompetitif, risiko dan masalah-masalah strategis lainnya, keterangan berkaitan dengan kewenangan yang didelegasikan, audit internal dan eksternal, sistem dan kebijakan pengendalian internal, termasuk Komite Audit; keterangan mengenai tugas dan tanggung jawab Direksi serta hal-hal yang tidak diperbolehkan. Pada tahun 2023, tidak terdapat pengangkatan Direktur baru maupun pergantian Direksi sehingga tidak dilaksanakan program pengenalan Perseroan.

### Kebijakan Suksesi Direksi

Kandidat yang akan ditetapkan menjadi anggota Direksi adalah seseorang yang telah dinyatakan memenuhi Persyaratan Formal dan Persyaratan Lain dan lulus Uji Kelayakan dan Kepatutan (UKK) sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara.

The Company mandates that members of the Board of Directors disclose their share ownership, both in the Company and in other companies, both domestically and internationally, at the beginning of their term and annually thereafter.

Based on the Directors' statement included in the Special List of Directors' Share Ownership, it is confirmed that in 2023, none of the Directors owns the Company's shares.

### Concurrent Positions for Member of the Board of Directors

During 2023, there were no members of the Company's Board of Directors who hold concurrent positions as referred to in the Corporate Governance Guidelines, which state that:

1. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions at SOE, ROE, POE;
2. Member of the Board of Commissioners/Supervisory Board of SOE;
3. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions;
4. Other positions under the provisions of statutory regulations; political party administrators and/or legislative candidates/members and/or regional head/deputy regional head candidates; and/or; and
5. Other positions that may give rise to a conflict of interest.

Throughout 2023, no members of the Board of Directors held concurrent positions as regulated in the Company's Articles of Association.

### Company Introduction Program

Newly appointed members of the Board of Directors are required to participate in an introductory program about the Company. This program covers the implementation of corporate governance principles by SOEs, an overview of SOE objectives, nature and scope of activities, financial and operational performance, strategy, short-term and long-term business plans, competitive position, risks, and other strategic issues. It also includes information about delegated authority, internal and external audits, internal control systems and policies, as well as the duties and responsibilities of the Board of Directors and prohibited actions. In 2023, there were no new Director appointments or changes, so the Company's introductory program are not implemented.

### Board of Directors' Succession Policy

The candidate appointed as a member of the Board of Directors must meet the Formal Requirements, Other Requirements, and pass the Fit and Proper Test (UKK) as per the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-03/MBU/02/2015. The UKK is conducted by a professional institution appointed by the Minister or a team formed



UKK terhadap bakal calon dilakukan oleh lembaga profesional yang ditunjuk oleh Menteri. UKK dapat dilakukan oleh Tim yang dibentuk oleh Menteri tanpa melalui lembaga profesional. Dalam rangka mendukung pembangunan *Integrated Talent Management System* (ITMS), Direksi melaksanakan program sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan *talent management system* sekaligus menyiapkan talenta perusahaan masuk ke dalam *talent pool* di Kementerian BUMN.
2. Menyediakan *talent pool* minimal 20% dari talenta Perseroan.
3. Menyiapkan kandidat dari calon Direksi dari talenta Perseroan sejumlah 3 (tiga) suksesor per posisi Direksi.

### Program Pengembangan Kapabilitas

Program peningkatan kapabilitas Direksi dilakukan melalui berbagai sarana, seperti seminar, pelatihan, dan *workshop*. Pada tahun 2023, Direksi telah mengikuti dan berpartisipasi dalam sejumlah kegiatan pengembangan kapabilitas, antara lain:

No.	Tanggal Date	Judul Kegiatan Activity Title	Tempat Place
1	Februari 2023 February 2023	<i>Certified Risk Executive Leader</i>	Ciawi - Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Ciawi- Finance and Development Supervisory Agency
2	Juli 2023 July 2023	<i>Qualified Risk Governance Professional</i>	Jakarta - Center for Risk Management Studies (CRMS)
3	Agustus 2023 August 2023	BUMN <i>Essential Batch II</i>	Bogor - Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Bogor - State-Owned Enterprise (SOE)
4	Oktober 2023 October 2023	<i>Qualified Risk Governance Professional</i>	Jakarta - Center for Risk Management Studies (CRMS)

### Pelaksanaan Tugas Direksi Tahun 2023

Direksi Perseroan telah melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya selama periode tahun 2023, berdasarkan RKAP 2023, dan Kontrak Manajemen 2023. Adapun realisasi tugas dan tanggung jawab Direksi tahun 2023 sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Manajemen, Laporan Tahunan, laporan keuangan dan laporan lainnya bagi Pemegang Saham, regulator dan pemangku kepentingan lainnya.
2. Melaksanakan program kerja dan evaluasi untuk memenuhi target RKAP 2023.
3. Menyelenggarakan RUPS Tahunan pengesahan RKAP 2023 dan pengesahan pertanggungjawaban Laporan Tahunan Perseroan tahun buku 2023.
4. Menyusun RKAP tahun 2023.
5. Menetapkan struktur/susunan organisasi yang sesuai dengan kebutuhan Perusahaan.
6. Menetapkan kebijakan-kebijakan operasional dan standar baku (SOP) seluruh proses bisnis Perseroan.
7. Melakukan evaluasi secara berkala terhadap pencapaian target KPI.
8. Melakukan inovasi strategi pemasaran dan penjajakan pasar.
9. Melaksanakan dan memantau penerapan prinsip-prinsip GCG dan manajemen risiko.

by the Minister. The Board of Directors has implemented the following program to support the Integrated Talent Management System (ITMS):

1. Establishing a talent management system to prepare company talent for entry into the Ministry of SOE talent pool.
2. Creating a talent pool consisting of at least 20% of the Company's talent.
3. Preparing 3 (three) successors from the Company's talents for each Director position.

### Capability Development Program

The capability improvement program for the Directors includes seminars, training, and workshops. In 2023, the Board of Directors has participated in several capability development activities, such as:

### Implementation of the Board of Directors' Duties in 2023

The Company's Board of Directors have fulfilled their duties and responsibilities for the year 2023, as outlined in the 2023 RKAP and 2023 Management Contract. The following are the accomplishments of the Directors in 2023:

1. Preparation of Management Reports, Annual Reports, financial reports, and other reports for Shareholders, regulators, and other stakeholders.
2. Implementation of work programs and evaluations to meet the 2023 RKAP targets.
3. Conduction of the Annual GMS to approve the 2023 RKAP and endorse the Company's Annual Report for the 2023 financial year.
4. Development of the RKAP for 2023.
5. Determination of the organizational structure in line with the Company's requirements.
6. Establishment of operational policies and standard procedures (SOP) for all of the Company's business processes.
7. Regular evaluations of KPI target achievement.
8. Innovation of marketing strategies and market exploration.
9. Implementation and monitoring of GCG principles and risk management.



10. Menindaklanjuti temuan hasil audit SPI dan auditor eksternal.
11. Melaksanakan pengelolaan SDM, termasuk rekrutmen, penempatan, penilaian kinerja, karir, remunerasi, dan purna tugas.
12. Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (PKB) untuk dibahas bersama dengan Serikat Pekerja dan peraturan kepegawaian.
13. Melakukan pemilihan KAP yang akan diusulkan pada RUPS.
14. Melakukan pengawasan atas kinerja anak Perseroan.
15. Melakukan inventarisasi aset Perseroan dan optimasi aset nonproduktif Perseroan.
16. Melakukan hubungan dengan pemangku kepentingan yang bernilai tambah baik bagi Perseroan dan maupun bagi pemangku kepentingan, meliputi: penerimaan masukan, perlindungan hak-hak dan penanganan keluhan dan survei kepuasan dari pelanggan, pemasok, kreditur, karyawan, melakukan *assessment* terhadap pemasok berdasarkan pencapaian QCDS (*quality, cost, delivery, service*) dan pelaksanaan kewajiban kepada negara serta melakukan tanggung jawab sosial Perseroan.

### Penilaian atas Kinerja Komite di Bawah Direksi

Perseroan tidak memiliki komite yang berada di bawah Direksi. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi didukung oleh para Kepala Bagian di Kantor Direksi, General Manager Distrik I – IV, Para Manajer Kebun, para Manajer Pabrik, dan Manajer Balai Benih serta organ fungsional lainnya.

### Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris dan Direksi

#### Kebijakan Mengenai Keberagaman Komposisi Dewan Komisaris

Penetapan komposisi Dewan Komisaris mengacu pada Anggaran Dasar Perusahaan Pasal 14, Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN.

Komposisi Dewan Komisaris terdiri atas beragam latar pendidikan dan bidang studi, pengalaman kerja dan usia sehingga bisa saling melengkapi yang sangat diperlukan untuk efektivitas pelaksanaan pengawasan. Saat ini, Perseroan memiliki 4 (empat) Komisaris berlatar belakang Sarjana Pertanian, 1 (satu) Komisaris berlatar belakang Sarjana Sosial, serta 1 (satu) Komisaris berlatar belakang Sarjana Hukum dan Magister Ilmu Administrasi. Penjelasan mengenai latar belakang pendidikan dan pengalaman kerja Dewan Komisaris dapat dilihat pada Bab Profil Dewan Komisaris dan Direksi dalam Laporan Tahunan ini.

10. Follow-up on audit findings from SPI and external auditors.
11. Management of HR, including recruitment, placement, performance appraisal, career development, remuneration, and retirement.
12. Preparation of a Collective Labor Agreement (PKB) for discussion with the Labor Union and personnel regulations.
13. Selection of KAP to be proposed at the GMS.
14. Supervision of the performance of subsidiaries.
15. Conducting an inventory of the Company's assets and optimizing the Company's non-productive assets.
16. Managing relationships with stakeholders to add value to both the Company and its stakeholders, including receiving input, protecting rights, handling complaints and satisfaction surveys from customers, suppliers, creditors, and employees, assessing suppliers based on QCDS achievements (*quality, cost, delivery, service*), fulfilling obligations to the state, and carrying out corporate social responsibility.

### Performance Assessment of Committees under the Board of Directors

The Company currently does not have a committee under the Board of Directors. The duties and responsibilities of the Board of Directors are carried out with support from the Heads of Sections in the Office of the Directors, General Managers for Districts I – IV, Plantation Managers, Factory Managers, Seed Hall Managers, and other functional organs.

### Diversity in the Composition of the Board of Commissioners and Directors

#### Policy Regarding Diversity in the Composition of the Board of Commissioners

The determination of the composition of the Board of Commissioners refers to the Company's Articles of Association Article 14, Regulation of the Minister of State for SOE No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs.

The composition of the Board of Commissioners consists of individuals with diverse educational backgrounds, fields of study, work experience, and age to complement each other, which is essential for the effective implementation of supervision. Currently, the Company has 4 (four) Commissioners with a bachelor's degree in Agriculture, 1 (one) as Bachelor of Social Science, and 1 (one) as Bachelor of Law and Master of Administration Science. The educational background and work experience of the Board of Commissioners are detailed in the Board of Commissioners' and Directors' Profile Chapter in this Annual Report.

## Penilaian Kinerja Terhadap Dewan Komisaris dan Direksi

Sebagai pengawas, Dewan Komisaris menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengawasan atas pengelolaan Perseroan oleh Direksi. Laporan pengawasan Dewan Komisaris merupakan bagian dari laporan tahunan yang disampaikan kepada RUPS untuk memperoleh persetujuan.

Dengan diberikannya persetujuan atas Laporan Tahunan dan pengesahan atas laporan keuangan, berarti RUPS telah memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris sejauh hal-hal tersebut tercermin dari laporan tahunan, dengan tidak mengurangi tanggung jawab masing-masing anggota Dewan Komisaris dalam hal terjadi tindak pidana atau kesalahan dan atau kelalaian yang menimbulkan kerugian bagi pihak ketiga yang tidak dapat dipenuhi dengan aset Perseroan. Pertanggungjawaban Dewan Komisaris kepada RUPS merupakan perwujudan akuntabilitas pengawasan atas pengelolaan Perseroan dalam rangka pelaksanaan asas GCG.

### Penilaian Kinerja Dewan Komisaris

Kinerja Dewan Komisaris dievaluasi dengan kriteria yang ditetapkan dalam RUPS, meliputi sejumlah aspek, yaitu perencanaan, pengawasan dan nasehat, pelaporan, dan dinamis. Berikut adalah pencapaian penilaian kinerja Dewan Komisaris selama tahun 2023:

No.	Indikator Indicators	Bobot Weight	Hasil Output
Aspek Perencanaan Planning Aspect			15%
1.	Menyusun RKA Dewan Komisaris Tahun 2023 Preparing the RKA of the Board of Commissioners in 2023	10%	1
2.	Menyusun Kontrak Manajemen (KPI) Dewan Komisaris Tahun 2023 Drafting the Board of Commissioners' Management Contract (KPI) in 2023	5%	1
Aspek Pengawasan dan Nasehat Supervision and Advisory Aspects			55%
1.	Memberikan tanggapan/rekomendasi kepada Pemegang Saham terhadap: Providing feedback/recommendations to Shareholders on:		
	a. Rencana Kerja & Anggaran Perusahaan Company Work Plan & Budget	10%	1
	b. Laporan Tahunan Annual Report	10%	1
	c. Analisis Kinerja Triwulanan Quarterly Performance Analysis	5%	3
2.	Memberikan nasehat/rekomendasi kepada Direksi sesuai tugas Dewan Komisaris Providing advice/recommendations to the Board of Directors by the duties of the Board of Commissioners	5%	40
3.	Rapat Dewan Komisaris Board of Commissioners' Meeting		
	a. Jumlah Rapat Number of Meetings	10%	27
	b. Kehadiran Rapat Meeting Attendance	5%	100
	c. Penyelesaian Risalah Rapat Completion of Minutes of Meeting	5%	27

## Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors

The Board of Commissioners, as the supervisor, submits a report on their oversight of the Company's management by the Board of Directors. This report is included in the annual report that is presented to the General Meeting of Shareholders (GMS) for approval.

When the GMS approves the Annual Report and ratifies the financial report, it signifies that the GMS releases and discharges the responsibilities of each member of the Board of Commissioners as outlined in the annual report. However, this does not reduce the responsibilities of each member of the Board of Commissioners in the event of criminal acts, errors, negligence, or losses to third parties that cannot be covered by company assets. The Board of Commissioners' accountability to the GMS demonstrates their supervisory role over the Company's management in line with the implementation of GCG principles.

### Performance Assessment of the Board of Commissioners

The performance of the Board of Commissioners is evaluated based on criteria outlined in the GMS, which includes aspects such as planning, supervision, advice, reporting, and dynamism. The following are the achievements of the Board of Commissioners' performance assessment during 2023:

No.	Indikator Indicators	Bobot Weight	Hasil Output
4.	Kunjungan Kerja Dewan Komisaris Board of Commissioners' Working Visit	5%	14
<b>Aspek Pelaporan</b> Reporting Aspect			15%
1.	Laporan Realisasi Pelaksanaan KPI Dewan Komisaris KPI Implementation Realization Report of the Board of Commissioners	5%	3
2.	Laporan Pengawasan Dewan Komisaris Tahunan Annual Supervisory Report of the Board of Commissioners	10%	1
<b>Aspek Dinamis</b> Dynamic Aspect			15%
1.	Pengusulan Eksternal Auditor kepada Pemegang Saham External Auditor Proposal to Shareholders	4%	1
2.	Peningkatan Kompetensi melalui Seminar, Workshop, dan sebagainya Competency Improvement through Seminars, Workshops, and others	4%	1
3.	Hasil Assessment GCG Dewan Komisaris GCG Assessment Results of the Board of Commissioners	4%	33,84
4.	Tanggapan terhadap Tindak Lanjut Temuan Auditor/SPI/Asesor GCG Response to Follow-up Findings of GCG Auditor/SPI/Assessor	3%	1
<b>Jumlah</b> Total		<b>100%</b>	

Evaluasi terhadap kinerja Dewan Komisaris secara individual dilakukan secara *self-assessment* dengan hasil sebagai berikut:

Evaluation of the performance of the Board of Commissioners individually is carried out through self-assessment with the following results:

No.	Uraian Bidang Pengawasan Description of Supervision Scope	Bobot Weight	Tingkat Pemenuhan Fulfillment Level	Skor Score
<b>Komisaris Utama</b> President Commissioner				
1.	Produksi Production	15	98	14,7
2.	Perencanaan dan Pengembangan Planning and Development	15	98	14,7
3.	SDM dan Umum HR and General Administration	15	98	14,7
4.	Keuangan dan Pemasaran Finance and Marketing	15	98	14,7
5.	Koordinasi dan Kegiatan Bersama Coordination and Gatherings	40	99	39,6
<b>Komisaris Independen</b> Independent Commissioner				
1.	Keuangan Finance	55	97	53,4
2.	Pemasaran Marketing	15	98	14,7
3.	Audit Internal Internal Audit	15	96	14,4
5.	Koordinasi dan Kegiatan Bersama Coordination and Gatherings	15	96	14,4
<b>Komisaris Independen</b> Independent Commissioner				
1.	Operasional Perusahaan Corporate Operation	10	98	9,8
2.	Pengembangan Usaha Business Development	55	97	53,4
3.	Pelaksanaan GCG GCG Implementation	10	95	9,5

No.	Uraian Bidang Pengawasan Description of Supervision Scope	Bobot Weight	Tingkat Pemenuhan Fulfillment Level	Skor Score
4.	Manajemen Risiko Risk Management	10	96	9,6
5.	Koordinasi dan Kegiatan Bersama Coordination and Gatherings	15	97	14,6
<b>Komisaris</b> Commissioner				
1.	SDM Human Resources	15	98	14,7
2.	Legal Legal	15	97	14,6
3.	Umum General Administration	55	97	53,4
4.	Koordinasi dan Kegiatan Bersama Coordination and Gatherings	15	96	14,4
<b>Rataan Kolegial (tertimbang)</b> Collective Average (Weighed)				<b>97,26</b>

## Penilaian Kinerja Direksi

Penilaian kinerja Direksi dilakukan secara kolegal maupun individual oleh Pemegang Saham. Penilaian kinerja oleh pemegang saham dilakukan dalam RUPS Tahunan tentang Laporan Pertanggungjawaban Laporan Keuangan. Indikator penilaian kinerja Direksi meliputi aspek sebagai berikut:

1. Pencapaian KPI Kontrak Manajemen
2. Pencapaian kinerja operasional dan keuangan
3. Pelaksanaan implementasi GCG

Indikator KPI sebagai dasar evaluasi kinerja Direksi mencakup aspek Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia, Inovasi Model Bisnis, Kepemimpinan Teknologi, Pengembangan Investasi, dan Pengembangan Talenta.

### Pencapaian Penilaian Kinerja Direksi Tahun 2023

#### Achievement of the Board of Directors' Performance Appraisal in 2023

No.	Indikator Indicator	Skor Score
1.	Nilai Ekonomi dan Sosial Untuk Indonesia Economic and Social Value for Indonesia	35,04
2.	Inovasi Model Bisnis Business Model Innovation	18,74
3.	Kepemimpinan Teknologi Technology Leadership	10,90
4.	Pengembangan Investasi Investment Development	7,57
5.	Pengembangan Talenta Talent Development	15,96
<b>Total</b>		<b>88,21</b>

## Performance Assessment of the Board of Directors

The Board of Directors' performance assessment is conducted collectively and individually by Shareholders. Shareholders carry out the performance assessment at the Annual GMS, focusing on the Financial Report and Accountability Report. The performance assessment indicators for the Directors include the following aspects:

1. Achievement of Management Contract KPIs
2. Achievement of operational and financial performance
3. Implementation of GCG

The KPI indicators used to evaluate the Directors' performance include Economic and Social Value for Indonesia, Business Model Innovation, Technological Leadership, Investment Development, and Talent Development.



## Penilaian Kinerja Dewan Komisaris dan Direksi berdasarkan Implementasi Tata Kelola Perusahaan

Sebagai organ utama Perseroan, Dewan Komisaris dan Direksi bertanggung jawab atas penerapan GCG di Perseroan. Dengan adanya asesmen GCG, maka kinerja Dewan Komisaris dan Direksi atas penerapan tata kelola perusahaan dapat dievaluasi. Penilaian ini menggunakan kriteria yang terdapat dalam SK-16/S.MBU/2012 tanggal 6 Juni 2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN.

Perseroan melakukan penilaian mandiri atas pelaksanaan praktik GCG tahun buku 2022 melalui Tim BPKP Perwakilan Sumatra Utara. Evaluasi Pelaksanaan Penerapan GCG Perseroan Tahun 2022 memperoleh hasil skor sebesar 92,43 (predikat "Sangat Baik"), sedangkan penilaian untuk aspek Dewan Komisaris adalah sebesar 96,69 (Sangat Baik) dan Direksi sebesar 97,23 (Sangat Baik).

## Penilaian Tingkat Kesehatan Perusahaan

Penilaian tingkat kesehatan Perseroan mengacu pada Surat Keputusan Menteri BUMN No. KEP-100/MBU/2002 tanggal 4 Juni 2002 yang meliputi aspek keuangan, operasional, dan administrasi.

Merujuk pada surat PT Perkebunan Nusantara IV No. DKSH/eX/104/VI/2024 tertanggal 7 Juni 2024 kepada PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) perihal Surat Permohonan Pemeringkatan *Standalone* dan *Final Rating* PT Perkebunan Nusantara IV, hasil Peringkat Berdiri Sendiri dan Peringkat Akhir Perseroan adalah sebagai berikut:

Peringkat Berdiri Sendiri Standalone Rating	Peringkat Akhir Final Rating	Tingkat Kesehatan Soundness Level
idA-(sa)	idA-/Stable	Sehat / Healthy

## Remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi

### Acuan Penetapan Remunerasi

Pemegang saham dalam RUPS mempunyai kewenangan untuk menetapkan remunerasi bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris. Formulasi remunerasi mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-04/MBU/2014 tanggal 10 Maret 2014 tentang Pedoman Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris, dan Dewan Pengawas BUMN sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/11/2020.

## Performance Assessment of the Board of Commissioners and Directors based on the Corporate Governance Implementation

As the primary governing bodies of the Company, the Board of Commissioners and the Board of Directors are accountable for implementing GCG in the Company. The performance of the Board of Commissioners and Directors in implementing corporate governance can be evaluated through GCG assessment. This assessment utilizes the criteria outlined in SK-16/S.MBU/2012 dated June 6, 2012 concerning Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of GCG in SOE.

The Company conducted an independent assessment of the implementation of GCG practices for the 2022 financial year through the North Sumatra Representative BPKP Team. The evaluation of the company's GCG implementation in 2022 received a score of 92.43 (rated as "Very Good"). The assessment for the Board of Commissioners amounted to 96.69 (Very Good), and for the Board of Directors, it was 97.23 (Very Good).

## Assessment of the Company's Soundness Level

The evaluation of the Company's health is based on the Minister of State-Owned Enterprises Decree No. KEP-100/MBU/2002 dated June 4, 2002, which encompasses financial, operational, and administrative aspects.

In reference to PT Perkebunan Nusantara IV's letter No. DKSH/eX/104/VI/2024 dated June 7, 2024, addressed to PT Pemeringkat Efek Indonesia (PEFINDO) concerning the application for Standalone Rating and Final Rating of PT Perkebunan Nusantara IV, the Standalone Rating and Final Rating results of the Company are as follows:

## Remuneration of the Board of Commissioners and Directors

### Benchmark for Determining Remuneration

Shareholders at the GMS have the authority to determine the remuneration for members of the Board of Directors and the Board of Commissioners. The remuneration formulation refers to the Regulation of the Minister of SOE No. PER-04/MBU/2014 dated March 10, 2014, concerning Guidelines for Determining the Income of Directors, Board of Commissioners, and Supervisory Boards of SOEs, as amended by Minister of SOEs Regulation No. PER-12/MBU/11/2020.

## Prosedur Penetapan Remunerasi

Dalam RUPS tentang Persetujuan Laporan Tahunan Tahun Buku 2023, Direksi menyampaikan permohonan penetapan gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan untuk Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan Tahun 2023 serta Tantiem untuk Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja Tahun Buku 2023 yang akan ditetapkan secara tersendiri. Besaran remunerasi Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan Tahun 2023 mengacu pada besaran remunerasi tahun sebelumnya dengan mempertimbangkan faktor skala usaha, kompleksitas usaha, tingkat inflasi, kondisi dan kemampuan keuangan Perseroan, dan faktor-faktor relevan lainnya. Selanjutnya, Dewan Komisaris mengusulkan dan/atau mendukung usulan Direksi kepada Pemegang Saham perihal penetapan gaji dan tunjangan-tunjangan Direksi tahun buku 2023, dan penetapan tantiem Direksi tahun buku 2023.

Setelah melalui pembahasan dalam RUPS, keputusan rapat menetapkan untuk melimpahkan wewenang dan kuasa kepada Pemegang Saham Seri B terbanyak untuk menetapkan besaran gaji/honorarium berikut fasilitas dan tunjangan lainnya pada tahun 2023 bagi anggota Direksi dan Dewan Komisaris atas kinerja tahun buku 2022.

Berdasarkan Surat  *Holding*  Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/N. IV/2573/2022 tentang Penetapan Penghasilan Direksi dan Dewan Komisaris Tahun 2023, gaji/honorarium, tunjangan dan fasilitas Direksi, SEVP, dan Dewan Komisaris sebagai berikut:

- Gaji Direktur: 100%
- Komisaris Utama: 45% dari Direktur
- Komisaris Lainnya: 90% dari Komisaris Utama

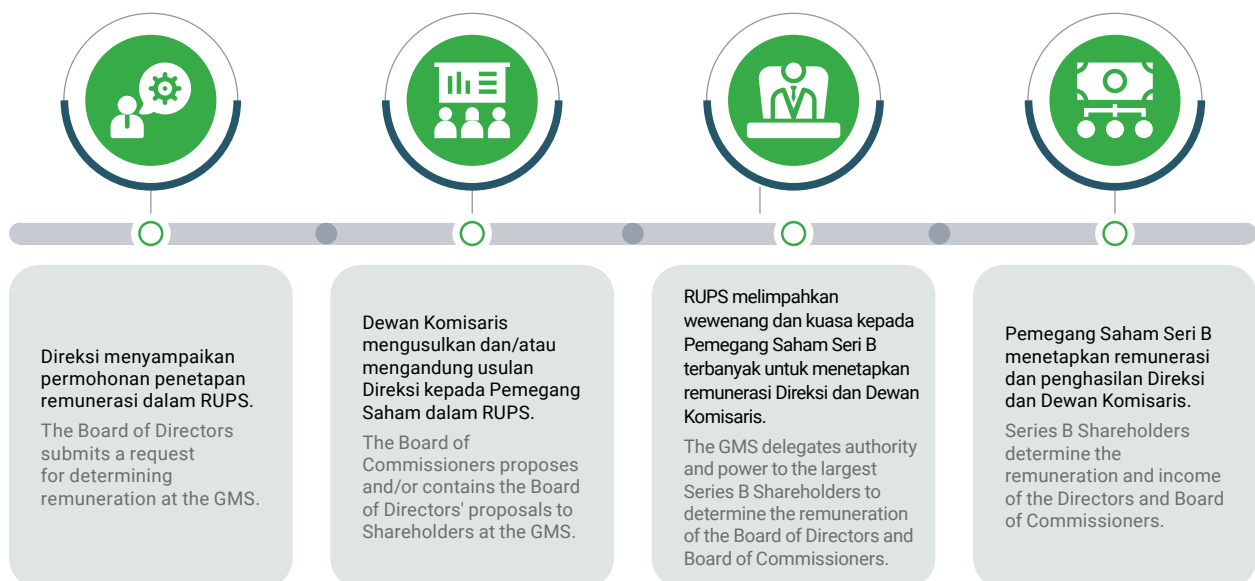
## Remuneration Determination Procedure

Regarding the approval of the Annual Report for the 2023 Financial Year in the GMS, the Board of Directors has requested to determine the salary, honorarium, facilities, and allowances for the Company's Directors and Board of Commissioners for 2023. This also includes determining the performance bonus (Tantiem) for the Directors and Board of Commissioners for the 2023 Financial Year, which will be decided separately. The remuneration for the Company's Board of Commissioners and Directors in 2023 were based on the previous year's remuneration, taking into account factors such as business scale, complexity, inflation rate, financial condition, and the Company's capability, among other relevant factors. Additionally, the Board of Commissioners supports the proposal by the Board of Directors to the Shareholders regarding the determination of the salaries and benefits of the Board of Directors for the 2023 financial year and the determination of the tantiem for the Board of Directors for the 2023 financial year.

After discussions at the GMS, the meeting decision was made to delegate authority and power to the largest Series B Shareholders to determine the amount of salary, honorarium, facilities, and allowances for members of the Board of Directors and Board of Commissioners for their performance in the 2022 financial year.

Based on PT Perkebunan Nusantara III (Persero) PT Perkebunan Nusantara Holding Letter No. DSDM/N. IV/2573/2022 concerning the Determination of the Income of Directors and Board of Commissioners for 2023, the salaries, honorariums, allowances, and facilities for Directors, SEVP, and Board of Commissioners are as follows:

- Director's Salary: 100%
- President Commissioner: 45% of Directors
- Other Commissioners: 90% of the President Commissioner





## Struktur Remunerasi

1. Tunjangan Perumahan Jabatan: Perseroan memberikan tunjangan perumahan jabatan bagi Direksi termasuk biaya utilitas yang diberikan secara bulanan sebesar 40% dari gaji, dengan ketentuan paling banyak sebesar Rp25.000.000 untuk wilayah ibu kota provinsi.
2. Kendaraan Jabatan: Perseroan menyediakan fasilitas berupa 1 (satu) kendaraan jabatan termasuk biaya pemeliharaan dan operasionalnya yang jenis dan besarnya ditetapkan dengan memperhatikan kondisi keuangan Perseroan.
3. Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan fasilitas pengobatan sesuai dengan kemampuan Perseroan dan ketentuan yang berlaku di Perseroan.
4. Pada setiap akhir masa jabatan, Direksi dan Dewan Komisaris dapat diberikan santunan purna jabatan melalui pengikutsertaaan dalam program asuransi atau tabungan pensiun yang beban premi/iuran tahunannya tidak melebihi dari 25% gaji/honorarium dalam satu tahun dan ditanggung oleh Perseroan serta sudah dianggarkan dalam RKAPP Perseroan setiap tahun anggaran.

## Besaran Remunerasi

Merujuk pada persetujuan Pemegang Saham Seri B disampaikan berdasarkan Surat  *Holding*  Perkebunan Nusantara PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. DSDM/N.IV/SR/3383/2023 tentang Perubahan Penetapan Penghasilan Direksi, Dewan Komisaris,  *Region Head*  dan  *Senior Executive Vice President*  (SEVP) PT Perkebunan Nusantara IV Tahun 2023, besarnya gaji/honorarium bagi Dewan Komisaris, Direksi,  *Region Head*  dan  *Senior Executive Vice President*  (SEVP) pada 2023 adalah sebagai berikut:

1. Gaji Direktur Utama sebesar 30x dari rata-rata gaji karyawan.
2. Gaji Direktur Teknis sebesar 85% dari Gaji Direktur Utama.
3. Honorarium Komisaris Utama sebesar 45% dari Gaji Direktur Utama dan Honorarium anggota Dewan Komisaris ditetapkan sebesar 90% dari Honorarium Komisaris Utama.
4. Gaji  *Region Head*  ditetapkan sebesar 50% dari gaji Direktur Utama dengan memperhitungkan faktor jabatan, yang ditetapkan sebagai berikut :
  - a. Faktor Jabatan  *Region Head*  pada Regional 1, Regional 2 dan Regional 3 ditetapkan sebesar 100%;
  - b. Faktor Jabatan  *Region Head*  pada Regional 4 dan Regional 5 ditetapkan sebesar 90%.

Gaji SEVP di masing - masing regional ditetapkan sebesar 90% gaji  *Region Head* .

## Rapat Dewan Komisaris dan Direksi

### Rapat Dewan Komisaris

Secara umum, rapat Dewan Komisaris diselenggarakan secara berkala minimal 1 (satu) bulan sekali. Dalam melaksanakan tugas, Dewan Komisaris dapat mengundang Direksi untuk

## Remuneration Structure

1. Position Housing Allowance: The Company provides a position housing allowance for Directors, including monthly utility costs of 40% of salary, with a maximum provision of Rp25,000,000 for the provincial capital area.
2. Service Vehicle: The Company provides facilities in the form of 1 (one) office vehicle, including maintenance and operational costs. The type and amount of the vehicle are determined by taking into account the Company's financial condition.
3. Treatment Facilities: The Board Directors and Board of Commissioners may be provided with treatment facilities in accordance with the Company's capabilities and the provisions applicable to the Company.
4. Post-Service Compensation: At the end of each term of office, Directors and Board of Commissioners can be given post-service compensation through participation in an insurance or retirement savings program. The annual premium/contribution burden should not exceed 25% of salary/honorarium in one year. This burden is borne by the Company and has been budgeted in the Company RKAPP every fiscal year.

## Amount of Remuneration

Referring to the approval of Series B Shareholders submitted based on PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Perkebunan Nusantara Holding Letter No. DSDM/N.IV/SR/3383/2023 Regarding Determination of the Income of the Board of Directors and Board of Commissioners in 2023, the amount of salary/honorarium for the Board of Commissioners, Directors,  *Region Head*  and  *Senior Executive Vice President*  (SEVP) in 2023 is as follows:

1. The Chief Executive Officer salary is 30x of the mean employee's salary.
2. The Technical Director's salary is 85% of the Chief Executive Officer's salary.
3. The honorarium for the President Commissioner is 45% of the salary of the Chief Executive Officer, and the honorarium for members of the Board of Commissioners is 90% of the honorarium for the President Commissioner.
4. The salary of the  *Region Head*  is set at 50% of the salary of the Chief Executive Officer, taking into account the position factor, which is determined as follows:
  - a. The  *Region Head*  Position Factor in Regional 1, Regional 2, and Regional 3 is 100%.
  - b. The  *Region Head*  Position Factor in Regional 4 and Regional 5 is 90%.

The SEVP salary in each region is 90% of the  *Region Head* 's salary.

## Meeting of the Board of Commissioners and Directors

### Board of Commissioners' Meeting

The Board of Commissioners typically holds meetings at least 1 (once) a month. In carrying out its duties, the Board of Commissioners may also have joint meetings with the Board



melaksanakan rapat gabungan. Rapat Dewan Komisaris juga menghasilkan risalah rapat tentang pembahasan yang berkembang dalam rapat, kehadiran anggota, serta catatan penting lainnya. Selama tahun 2023, Dewan Komisaris telah melaksanakan rapat kerja (internal) sebanyak 14 kali. Berikut adalah kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris dalam rapat internalnya sepanjang tahun 2023:

of Directors. Meeting minutes are produced to document the discussions, member attendance, and other important notes. In 2023, the Board of Commissioners held internal meetings 14 times. Below is the attendance record of the Board of Commissioners at these internal meetings throughout 2023:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
1.	Dahlan Harahap	Komisaris Utama / President Commissioner	14	14	100%
2.	Arief Budiono	Komisaris / Commissioner	14	14	100%
3.	Arie Yuriwin*	Komisaris / Commissioner	0	0	-
4.	Andi Nur Alam Syah**	Komisaris / Commissioner	0	0	-
5.	Andi Wibisono	Komisaris Independen / Independent Commissioner	14	14	100%
6.	Fauzi Yusuf*	Komisaris Independen / Independent Commissioner	0	0	-

\* resmi menjabat per 4 Desember 2023. / officially serves as of December 4, 2023.

\*\* resmi menjabat per 3 Mei 2024. / officially serves as of May 3, 2024.

### Agenda Rapat Internal Dewan Komisaris

#### Internal Meeting Agenda of the Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	18 Januari 2023 January 18, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Kinerja Perusahaan s.d. Triwulan IV tahun 2022 (<i>Unaudited</i>);</li> <li>Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>The Company's Performance up to the 4<sup>th</sup> Quarter in 2022 (<i>Unaudited</i>);</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>
2.	22 Februari 2023 February 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Kinerja Perusahaan Januari 2023;</li> <li>Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>The Company's Performance in January 2023;</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>
3.	28 Maret 2023 March 28, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Kinerja Perusahaan s.d. Februari tahun 2023;</li> <li>Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>The Company's Performance up to February 2023;</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>
4.	17 April 2023 April 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Kinerja Perusahaan s.d. Triwulan I tahun 2023;</li> <li>Kinerja Perusahaan s.d. Triwulan IV (<i>Audited</i>);</li> <li>Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>The Company's Performance up to the 1<sup>st</sup> Quarter in 2023;</li> <li>The Company's Performance up to the 4<sup>th</sup> Quarter (<i>Audited</i>);</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>
5.	22 Mei 2023 May 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Kinerja Perusahaan s.d. April 2023;</li> <li>Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>The Company's Performance up to April 2023;</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>
6.	23 Mei 2023 May 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Persiapan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2022;</li> <li>Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>Preparation of GMS concerning the Financial Statements of the 2022 Fiscal Year;</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>
7.	9 Juni 2023 June 9, 2023	Pembahasan tindak lanjut arahan-arahan RUPS Laporan Keuangan Tahun Buku 2022. Discussion of follow-up actions on the GMS' directives of the 2022 Financial Statements.
8.	21 Juni 2023 June 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Kinerja Perusahaan s.d. Mei 2023;</li> <li>Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>The Company's Performance up to May 2023;</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>



No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
9.	24 Juli 2023 July 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Triwulan II tahun 2023;</li> <li>3. Lain-lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to the 2<sup>nd</sup> Quarter of 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol>
10.	23 Agustus 2023 August 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Juli tahun 2023;</li> <li>3. Lain-lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to July 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol>
11.	21 September 2023 September 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Agustus tahun 2023;</li> <li>3. Lain-lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to August 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol>
12.	24 Oktober 2023 October 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Triwulan III tahun 2023;</li> <li>3. Lain-lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to the 3<sup>rd</sup> Quarter of 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol>
13.	16 November 2023 November 16, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Oktober tahun 2023;</li> <li>3. Lain-lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to October 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol>
14.	19 Desember 2023 December 19, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengenalan Dewan Komisaris baru;</li> <li>2. Penyusunan kebijakan pembagian bidang tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris;</li> <li>3. Penetapan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris;</li> <li>4. Rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris beserta Organ tahun 2024;</li> <li>4. Lain-lain.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduction of the new Board of Commissioners;</li> <li>2. Preparation of policies on the division of tasks of the Members of the Board of Commissioners;</li> <li>3. Determination of the decision-making mechanism of the Board of Commissioners;</li> <li>2. Work plan and budget of the Board of Commissioners and its Organs for 2024;</li> <li>5. Others.</li> </ol>

#### Agenda Rapat Dewan Komisaris Lainnya

#### Other Meeting Agenda of the Board of Commissioners

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	9 Februari 2023 February 9, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelesaian percepatan kontrak;</li> <li>2. Kinerja PKS antara lain losis, stagnasi, utilitas, dan kapasitas;</li> <li>3. Percepatan <i>owner estimate</i> (HPS);</li> <li>4. Percepatan tender;</li> <li>5. Pengendalian <i>internal control report</i>; dan</li> <li>6. Pengawasan SDM.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Completion of contract acceleration;</li> <li>2. PKS performance including loss, stagnation, utility, and capacity;</li> <li>3. Acceleration of owner estimate (HPS);</li> <li>4. Acceleration of tender;</li> <li>5. Internal control report control; and</li> <li>6. HR supervision.</li> </ol>
2.	8 Mei 2023 May 8, 2023	<i>Out of Spec CPO</i>
3.	15 Mei 2023 May 15, 2023	Diskusi tentang pemasaran teh Discussion of tea marketing
4.	5 Juni 2023 June 5, 2023	Rapat koordinasi terkait hal isu terkini Coordination meeting regarding latest issues
5.	15 Juni 2023 June 15, 2023	Penerapan <i>Good Corporate Governance</i> di PTPN IV Good Corporate Governance Implementation at PTPN IV
6.	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Pembahasan laporan manajemen s.d. Triwulan II tahun 2023 PTPN IV Discussion of management report until Quarter II of 2023 of PTPN IV

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
7.	29 Agustus 2023 August 29, 2023	1. Pembahasan pembelian TBS pihak ketiga; 2. Analisis <i>review</i> pengadaan barang dan jasa terkait eksploitasi dan investasi di Bagian Tekpol. 1. Discussion regarding the FFB acquisition from a third party; 2. Analysis of goods and services procurement review related to the development and investment in the Tekpol Section.
8.	18 September 2023 September 18, 2023	1. Pembahasan Pajak Tantiem; 2. Optimalisasi Aset; dan 3. Pembahasan Teh. 1. Discussion of Tantiem Tax; 2. Asset Optimization; and 3. Discussion of Tea.
9.	31 Oktober 2023 October 31, 2023	Pencapaian Kinerja Produksi Tahun 2023 Production Performance Achievement in 2023
10.	3 November 2023 November 3, 2023	Pembahasan <i>Update</i> RKAP PTPN IV Draft I Discussion of RKAP PTPN IV Draft I Update
11.	9 November 2023 November 9, 2023	<i>Kick-off meeting</i> pelaksanaan <i>general audit</i> tahun buku 2023 Kick-off meeting of general audit implementation for the 2023 financial year
12.	21 November 2023 November 21, 2023	Persiapan <i>legal day one</i> Preparation of legal day one
13.	6 Desember 2023 December 6, 2023	Percepatan permohonan persetujuan aksi korporasi <i>Sub Holding</i> Acceleration of application for approval of Sub Holding corporate actions

### Rapat Direksi

Selama tahun 2023, Direksi telah melakukan rapat kerja (internal) sebanyak 3 kali, meskipun seluruh anggota Direksi baru menjabat per 4 Desember 2023. Berikut adalah kehadiran rapat anggota Direksi dalam rapat internalnya sepanjang tahun 2023:

### Board of Directors' Meeting

Throughout 2023, the Board of Directors held three internal working meetings, even though all members of the Board only began their term of office on December 4, 2023. Below is a summary of the attendance of the Board members at these internal meetings throughout the year:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
1.	Jatmiko K. Santosa	Direktur Utama / Chief Executive Officer	3	3	100%
2.	Rizal H. Damanik	Direktur Operasional / Chief Operating Officer	3	3	100%
3.	Ryanto Wisnuardhy	Direktur Pemasaran & Komersial Chief Marketing & Commercial Officer	3	3	100%
4.	Ugun Untaryo	Direktur Strategi & Sustainability Chief Strategy & Sustainability Officer	3	3	100%
5.	Hilda Savitri	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Chief Financial & Risk Management Officer	3	3	100%
6.	Suhendri	Direktur Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi Chief Human Resources & Information Technology Officer	3	3	100%
7.	Irwan Perangin-angin	Direktur Hubungan Kelembagaan Chief Institutional Relations Officer	3	3	100%

### Agenda Rapat Internal Direksi

#### Internal Meeting Agenda of the Board of Directors

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	6 Desember 2023 December 6, 2023	Arahan awal Regional Manajemen untuk Region 1 hingga 5 Initial briefing from Regional Management for Regions 1 to 5
2.	11 Desember 2023 December 11, 2023	Arahan dari Kepala Divisi <i>Head Office</i> Briefing from the Head Office Division Head
3.	18 Desember 2023 December 18, 2023	Penyusunan <i>crash program</i> pasca restrukturisasi Development of the post-restructuring crash program

### Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

Dewan Komisaris dan Direksi mengadakan rapat gabungan secara berkala untuk menyatukan pandangan dan memutuskan kebijakan strategis menyangkut kelangsungan

### Board of Commissioners and Board of Directors Joint Meeting

The Board of Commissioners and Directors hold regular joint meetings to unite views and decide on strategic policies regarding the continuity of the Company's business and operations.



usaha dan operasional Perseroan. Rapat gabungan dihadiri anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, Sekretaris Dewan Komisaris, Sekretaris Perusahaan, atau pejabat lain yang ditugaskan oleh Komisaris Utama/Direktur Utama, kecuali untuk rapat-rapat khusus yang hanya boleh dihadiri oleh Anggota Dewan Komisaris dan Direksi. Berikut adalah kehadiran rapat anggota Dewan Komisaris dan Direksi dalam rapat gabungan sepanjang tahun 2023:

Joint meetings are attended by members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, Secretary of the Board of Commissioners, Company Secretary, or other officials assigned by the President Commissioner/Chief Executive Officer, except for special meetings which may only be attended by members of the Board of Commissioners and Directors. The following is the meeting attendance of members of the Board of Commissioners and Directors at joint meetings throughout 2023:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
1.	Dahlan Harahap	Komisaris Utama / President Commissioner	14	14	100%
2.	Arief Budiono	Komisaris / Commissioner	14	14	100%
3.	Arie Yuriwin*	Komisaris / Commissioner	2	2	100%
4.	Andi Nur Alam Syah**	Komisaris / Commissioner	0	0	-
5.	Andi Wibisono	Komisaris Independen / Independent Commissioner	14	14	100%
6.	Fauzi Yusuf*	Komisaris Independen / Independent Commissioner	2	2	100%
7.	Jatmiko K. Santosa	Direktur Utama / Chief Executive Officer	2	2	100%
8.	Rizal H. Damanik	Direktur Operasional / Chief Operating Officer	2	2	100%
9.	Ryanto Wisnuardhy	Direktur Pemasaran & Komersial Chief Marketing & Commercial Officer	2	2	100%
10.	Ugun Untaryo	Direktur Strategi & Sustainability Chief Strategy & Sustainability Officer	2	2	100%
11.	Hilda Savitri	Direktur Keuangan & Manajemen Risiko Chief Financial & Risk Management Officer	2	2	100%
12.	Suhendri	Direktur Sumber Daya Manusia & Teknologi Informasi Chief Human Resources & Information Technology Officer	2	2	100%
13.	Irwan Perangin-angin	Direktur Hubungan Kelembagaan Chief Institutional Relations Officer	2	2	100%

\* resmi menjabat per 4 Desember 2023. / officially serves as of December 4, 2023.

\*\* resmi menjabat per 3 Mei 2024. / officially serves as of May 3, 2024.

#### Agenda Rapat Gabungan Dewan Komisaris dan Direksi

#### Joint Meeting Agenda of the Board of Commissioners and the Board of Directors

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
1.	18 Januari 2023 January 18, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Kinerja Perusahaan s.d. Triwulan IV tahun 2022 (<i>Unaudited</i>);</li> <li>Lain-lain.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>The Company's Performance up to the 4<sup>th</sup> Quarter in 2022 (<i>Unaudited</i>);</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>
2.	22 Februari 2023 February 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Kinerja Perusahaan Januari 2023;</li> <li>Lain-lain.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>The Company's Performance in January 2023;</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>
3.	28 Maret 2023 March 28, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Kinerja Perusahaan s.d. Februari tahun 2023;</li> <li>Lain-lain.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>The Company's Performance up to February 2023;</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>
4.	17 April 2023 April 17, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>Progres rapat sebelumnya;</li> <li>Kinerja Perusahaan s.d. Triwulan I tahun 2023;</li> <li>Kinerja Perusahaan s.d. Triwulan IV (<i>Audited</i>);</li> <li>Lain-lain.                             <ol style="list-style-type: none"> <li>Previous report progress;</li> <li>The Company's Performance up to the 1<sup>st</sup> Quarter in 2023;</li> <li>The Company's Performance up to the 4<sup>th</sup> Quarter (<i>Audited</i>);</li> <li>Others.</li> </ol> </li> </ol>

No.	Tanggal Rapat Meeting Date	Agenda Rapat Meeting Agenda
5.	22 Mei 2023 May 22, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. April 2023;</li> <li>3. Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to April 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol> </li> </ol>
6.	21 Juni 2023 June 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Mei 2023;</li> <li>3. Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to May 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol> </li> </ol>
7.	24 Juli 2023 July 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Triwulan II tahun 2023;</li> <li>3. Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to the 2<sup>nd</sup> Quarter of 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol> </li> </ol>
8.	23 Agustus 2023 August 23, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Juli tahun 2023;</li> <li>3. Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to July 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol> </li> </ol>
9.	21 September 2023 September 21, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Agustus tahun 2023;</li> <li>3. Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to August 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol> </li> </ol>
10.	24 Oktober 2023 October 24, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Triwulan III tahun 2023;</li> <li>3. Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to the 3<sup>rd</sup> Quarter of 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol> </li> </ol>
11.	20 November 2023 November 20, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Progres rapat sebelumnya;</li> <li>2. Kinerja Perusahaan s.d. Oktober tahun 2023;</li> <li>3. Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Previous report progress;</li> <li>2. The Company's Performance up to October 2023;</li> <li>3. Others.</li> </ol> </li> </ol>
12.	4 Desember 2023 December 4, 2023	Laporan Manajemen bulan November dan s.d. November 2023. Management Report in November and up to November 2023.
13.	19 Desember 2023 December 19, 2023	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengenalan Dewan Komisaris baru;</li> <li>2. Penyusunan kebijakan pembagian bidang tugas Anggota-Anggota Dewan Komisaris;</li> <li>3. Penetapan mekanisme pengambilan keputusan Dewan Komisaris;</li> <li>4. Rencana kerja dan anggaran Dewan Komisaris beserta Organ tahun 2024;</li> <li>4. Lain-lain.               <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Introduction of the new Board of Commissioners;</li> <li>2. Preparation of policies on the division of tasks of the Members of the Board of Commissioners;</li> <li>3. Determination of the decision-making mechanism of the Board of Commissioners;</li> <li>2. Work plan and budget of the Board of Commissioners and its Organs for 2024;</li> <li>5. Others.</li> </ol> </li> </ol>

## Hubungan Afiliasi

Hingga 31 Desember 2023, Perseroan menyatakan bahwa tidak terdapat hubungan afiliasi dalam hal kekeluargaan, keuangan, dan kepengurusan antar anggota Dewan Komisaris, antar anggota Direksi, antar anggota Dewan Komisaris dan Direksi, dan dengan Pemegang Saham pengendali.

## Affiliate Relationships

As of December 31, 2023, the Company stated that there were no familial, financial, or management relationships among members of the Board of Commissioners, members of the Board of Directors, between the Board of Commissioners and Directors, or with controlling shareholders.

## ORGAN PENDUKUNG DEWAN KOMISARIS

### » Supporting Organs of the Board of Commissioners

Untuk mendukung fungsi pengawasan, Dewan Komisaris telah membentuk 2 (dua) Komite Penunjang Dewan Komisaris yakni Komite Audit, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG serta didukung oleh fungsi Sekretaris Dewan Komisaris. Setiap Komite Penunjang Dewan Komisaris diketuai oleh anggota Dewan Komisaris, dan tugas serta tanggung jawab masing-masing Komite tercantum dalam masing-masing piagam kerja (*charter*). Adapun dasar hukum pembentukan organ penunjang Dewan Komisaris mengacu pada:

1. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN; dan
2. Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara.

Seluruh organ pendukung Dewan Komisaris wajib membuat laporan pada Dewan Komisaris atas setiap penugasan yang diterima dan disertai dengan rekomendasi jika diperlukan. Laporan tersebut ditandatangani oleh ketua dan anggota Komite.

### Sekretaris Dewan Komisaris

Sekretaris Dewan Komisaris diangkat untuk membantu kelancaran tugas Dewan Komisaris, khususnya di bidang kesekretariatan dan penghubung Dewan Komisaris dengan pihak lain, termasuk Direksi. Sekretaris Dewan Komisaris dijabat oleh Rugun Hutapea, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK-06/Kpts/IV/2019 tanggal 29 April 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV serta Surat Sekretaris Kementerian BUMN No. SR-91/S.MBU/03/2019 tanggal 23 Maret 2019 perihal Usulan Penggantian Organ Pendukung Dewan Komisaris PT Perkebunan Nusantara IV; Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK-06/Kpts/IV/2019 tanggal 29 April 2019 dengan masa jabatan selama 3 (tiga) tahun. Sekretaris Dewan Komisaris bertanggung jawab langsung kepada Dewan Komisaris dan memiliki tugas, tanggung jawab, dan wewenang yang diatur dalam Pedoman Kerja (*Charter*) Sekretaris Dewan Komisaris.

The Board of Commissioners has established 2 (two) supporting committees, namely the Audit Committee, the Risk Management and GCG Monitoring Committee, to assist in its supervisory function. These committees are chaired by members of the Board of Commissioners and have specific duties and responsibilities outlined in their respective charters. The formation of these supporting organs is based on:

1. The regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs; and
2. The regulation of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-12/MBU/2012 concerning the Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises.

All supporting organs of the Board of Commissioners must submit reports to the Board of Commissioners regarding their assignments, along with any necessary recommendations. These reports are signed by the Committee chairman and members.

### Secretary of the Board of Commissioners

The Secretary to the Board of Commissioners is appointed to assist in the smooth running of the Board's duties, particularly in the secretarial sector and in liaising between the Board and other parties, including the Board of Directors. The current Secretary of the Board of Commissioners is Rugun Hutapea, who was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. DK-06/Kpts/IV/2019 dated April 29, 2019. This appointment was made in accordance with the Letter of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SR-91/S.MBU/03/2019 dated March 23, 2019 concerning Proposed Replacement of Supporting Organs for the Board of Commissioners of PT Perkebunan Nusantara IV; Board of Commissioners Decree No. DK-06/Kpts/IV/2019 dated April 29, 2019 with a term of office of 3 (three) years. The Secretary is directly responsible to the Board of Commissioners and has duties, responsibilities, and authority as regulated in the Work Guidelines (*Charter*) of the Secretary of the Board of Commissioners.



## RUGUN HUTAPEA

Sekretaris Dewan Komisaris

Secretary to the Board  
Commissioners



Warga Negara Indonesia, lahir di Balige, 8 Maret 1972, berusia 51 tahun, berdomisili di Jakarta.

Indonesian citizen, born in Balige, March 8, 1972, 51 years old, domiciled in Jakarta.

Beliau memperoleh gelar S1 bidang Akuntansi dari Universitas Sumatra Utara dan S2 Magister Manajemen dari STIE IPWI Jakarta.

She obtained a Bachelor's degree in Accounting from the University of North Sumatra and a Master's in Management from STIE IPWI Jakarta.

### Riwayat Pekerjaan Nonstruktural

Beliau pernah bekerja sebagai Staf Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada PT Biofarma (Persero) (2005-2006), Sekretaris Dekom/Dewas pada PT Indofarma (Persero) Tbk (2005-2013), Sekretaris Dewan Perum Percetakan Uang RI (2013-2018), dan kini sebagai Sekretaris Perusahaan (sejak 2019).

### Non-structural Work Experience

She has worked as Staff of the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Biofarma (Persero) (2005-2006), Secretary of the Board of Commissioners/Supervisory Board at PT Indofarma (Persero) Tbk (2005-2013), Secretary of the Board of the Republic of Indonesia Money Printing Corporation (2013-2018), and now as Corporate Secretary (since 2019).

### Riwayat Pekerjaan Struktural

Beliau pernah bekerja sebagai Kasubbid Usaha Industri Strategis & Manufaktur Ila2 (2002-2006), Kasubbid Tata Kelola & Manajemen Risiko Usaha Aneka Industri I (2006-2010), Kasubbag Akuntansi (2010-2012), Kasubbid Usaha Industri Strategis & Manufaktur Ila2 (2012-2014), Kasubbid Usaha Logistik dan Kawasan Industri Ila (2014-2015), Kasubbid Usaha Energi, Logistik, Kawasan dan Pariwisata Ib-1 (2015-2019), Kasubbid usaha Industri Agro dan Farmasi Ib-2 (9 Januari 2019- 8 Juni 2020), dan Pengendali Subfungsi TJSL (sejak 9 Juni 2020 – sekarang).

### Structural Work Experience

She has worked as Head of the Sub-Division of Strategic Industrial & Manufacturing Businesses Ila2 (2002-2006), Head of the Sub-Division of Governance & Risk Management of Miscellaneous Industrial Businesses I (2006-2010), Head of Sub-Division of Accounting (2010-2012), Head of Sub-Division of Strategic Industrial & Manufacturing Businesses Ila2 (2012-2014), Head of Sub-Division of Logistics Business and Industrial Areas Ila (2014-2015), Head of Sub-Division of Energy, Logistics, Regions and Tourism Ib-1 (2015-2019), Head of Sub-Division of Agro-Industry and Pharmaceutical Business Ib-2 (January 9, 2019-June 8, 2020), and TJSL Subfunction Controller (since June 9, 2020 – present).

### Pedoman Kerja

Pedoman Kerja Sekretaris Dewan Komisaris ditetapkan oleh Dewan Komisaris berdasarkan Keputusan bersama Dewan Komisaris dengan Direksi No. DK-18/KPTS/2016 dan No. 04.03/02/KPTS/2016 tanggal 6 Desember 2016 perihal Pemberlakuan Infrastruktur GCG Perseroan, salah satunya adalah *Board Manual*. Pedoman tersebut disusun berpedoman pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Juli 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara serta Pedoman Kerja (*Charter*) Sekretaris Dewan Komisaris.

### Work Guidelines

The duties and responsibilities of the Secretary of the Board of Commissioners are determined by the Board of Commissioners based on the joint Decree of the Board of Commissioners and the Board of Directors No. DK-18/KPTS/2016 and No. 04.03/02/KPTS/2016 dated December 6, 2016 regarding the Implementation of the Company's GCG Infrastructure. These guidelines were prepared based on the Regulation of the Minister of BUMN No. PER-12/MBU/2012 dated July 24, 2012 concerning Supporting Organs for the Board of Commissioners/Supervisory Board of State-Owned Enterprises as well as the Work Guidelines (Charter) for the Secretary of the Board of Commissioners.

### Tugas dan Tanggung Jawab

Tugas dan tanggung jawab Sekretaris Dewan Komisaris meliputi:

1. Mempersiapkan rapat, termasuk bahan rapat (*briefing sheet*) Dewan Komisaris.

### Duties and Responsibilities

The Secretary to the Board of Commissioners is responsible for the following duties and responsibilities:

1. Preparing meeting materials (*briefing sheets*) for the Board of Commissioners and organizing meetings.



2. Membuat risalah rapat Dewan Komisaris sesuai dengan anggaran/*Board Manual*.
3. Mengadministrasikan dokumen Dewan Komisaris, baik surat masuk, surat keluar, risalah rapat maupun dokumen lainnya.
4. Menyusun Rancangan Rencana Anggaran Kerja dan Anggaran Dewan Komisaris.
5. Melaksanakan tugas lain dari Dewan Komisaris.
6. Memastikan bahwa Dewan Komisaris mematuhi peraturan perundang-undangan serta menerapkan prinsip-prinsip GCG.
7. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta.
8. Mengkoordinasikan anggota Komite, jika diperlukan, dalam rangka memperlancar tugas Dewan Komisaris.
9. Sebagai penghubung (*liaison officer*) Dewan Komisaris dengan pihak lain.

## Komite Audit

Komite Audit merupakan organ pendukung Dewan Komisaris yang dibentuk untuk membantu Dewan Komisaris dalam melakukan pengawasan terhadap pengelolaan Perseroan sesuai dengan prinsip GCG. Pembentukan Komite Audit oleh Dewan Komisaris dilakukan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang No. 19 Tahun 2003 tanggal 4 Oktober 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara;
2. Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
3. Peraturan Menteri BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/ Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
4. Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan BUMN;
5. Keputusan Sekretaris Kementerian BUMN No. SK-16/S. MBU/2012 tentang Indikator/Parameter Penilaian dan Evaluasi atas Penerapan Tata Kelola Perusahaan yang Baik (GCG) pada BUMN;
6. Anggaran Dasar Perseroan.

### Komposisi Anggota Komite Audit

Sesuai Piagam Komite Audit Perseroan, keanggotaan Komite Audit terdiri dari seorang atau lebih yang berasal dari Anggota Dewan Komisaris dengan jumlah maksimal 2 (dua) orang yang bukan berasal dari anggota Dewan Komisaris. Salah satu anggota Komite Audit yang berasal dari unsur Dewan Komisaris (Komisaris Independen) atau yang dapat bertindak independen menjadi Ketua Komite Audit.

2. Recording minutes of Board of Commissioners meetings in accordance with the budget/*Board Manual*.
3. Managing and organizing Board of Commissioners documents, including incoming and outgoing letters, minutes of meetings and other documents.
4. Drafting a Work Budget Plan and Budget for the Board of Commissioners.
5. Performing other duties as assigned by the Board of Commissioners.
6. Ensuring that the Board of Commissioners complies with statutory regulations and implements GCG principles.
7. Providing necessary information to the Board of Commissioners periodically and upon request.
8. Coordinating Committee members when necessary to facilitate the duties of the Board of Commissioners.
9. Serving as a liaison officer for the Board of Commissioners with other parties.

## Audit Committee

The Audit Committee is a supporting body for the Board of Commissioners. It was established to help the Board of Commissioners oversee the Company's management in line with GCG (Good Corporate Governance) principles. The formation of the Audit Committee by the Board of Commissioners is based on the following references:

1. Law No. 19 of 2003 dated October 4, 2003 regarding State-Owned Enterprises;
2. Law No. 40 of 2007 regarding Limited Liability Companies;
3. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012 regarding Supporting Organs for the Board of Commissioners/ Supervisory Board of State-Owned Enterprises;
4. Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023 on Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of SOEs;
5. Decree of the Secretary of the Ministry of BUMN No. SK-16/S.MBU/2012 regarding Indicators/Parameters for Assessment and Evaluation of the Implementation of Good Corporate Governance in State-Owned Enterprises;
6. Company Articles of Association.

### Composition of Audit Committee Members

Following the Company's Audit Committee Charter, the Audit Committee is composed of one or more members of the Board of Commissioners, with a maximum of 2 individuals who are not members of the Board of Commissioners. The Chair of the Audit Committee is either a member of the Board of Commissioners (Independent Commissioner) or someone who can act independently.



Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK-05/Kpts/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021, DK-07/Kpts/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 dan DK-02/Kpts/1/2022 tanggal 28 Januari 2022, susunan keanggotaan Komite Audit Perseroan adalah sebagai berikut:

In accordance with Board of Commissioners Decree No. DK-05/Kpts/VIII/2021 dated August 18, 2021, DK-07/Kpts/VI/2020 dated June 24, 2020, and DK-02/Kpts/1/2022 dated January 28, 2022, the membership composition of the Company's Audit Committee is as follows:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Menjabat Term of Office	Masa Menjabat Tenure
Andi Wibisono	Ketua Chairman	18 Agustus 2021 - sekarang August 18, 2021 - present	3 (tiga) tahun 3 (three) years
Ali Akbar	Anggota Member	24 Juni 2020 - 30 April 2024 June 24, 2020 - April 30, 2024	3 (tiga) tahun 3 (three) years
Eddy Tea C. Barus	Anggota Member	1 Mei 2022 - 31 Januari 2025 May 1, 2022 - January 31, 2025	3 (tiga) tahun 3 (three) years

### Profil Komite Audit Profile of the Audit Committee



**ANDI WIBISONO**  
Ketua  
Chairman

Beliau ditunjuk berdasarkan SK Dekom No. DK-05/Kpts/VIII/2021 tanggal 18 Agustus 2021. Profil beliau dapat dilihat pada Profil Dewan Komisaris.

He was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. DK-05/Kpts/VIII/2021 dated August 18, 2021. His profile is disclosed in the Board of Commissioners Profile.



**ALI AKBAR**  
Anggota  
Member

Warga Negara Indonesia. Lahir di Tebing Tinggi, 16 Agustus 1962, berusia 61 tahun.

Indonesian citizen. Born in Tebing Tinggi on August 16, 1962, 61 years old.

Ditunjuk berdasarkan SK Dekom No. DK-07/Kpts/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Ekonomi dari UMA Medan.

Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. DK-07/Kpts/VI/2020 dated June 24, 2020. He graduated with a Bachelor of Economics from UMA Medan.

Beliau memulai karir di perkebunan sebagai Staf Data Akuntansi Satuan Pengawas Intren PTP VIII di Medan (1991), Kepala Tata Usaha Kebun Sidamanik (2000), Kepala Urusan Tata Usaha Bagian Teknik (2000), Kepala Urusan Bidang Keuangan/Akuntansi GUU-III (2003), Kepala Dinas Tata Usaha Kebun Berangir (2005), Kepala Urusan Tata Buku Bagian Akuntansi (2006), Kepala Urusan Verifikasi Bagian Akuntansi (2006), Kepala Urusan Pelaporan Bagian Akuntansi (2006), Kepala Urusan Tata Buku Bagian Akuntansi (2011), Kepala Bagian Akuntansi (2013), Kepala Bagian Keuangan (2016), dan Komite Audit Perseroan sejak 2020.

He started his career in plantations as Accounting Data Staff of the PTP VIII Internal Supervisory Unit in Medan (1991), Head of Sidamanik Plantation Administration (2000), Head of Administrative Affairs of the Technical Section (2000), Head of Financial/Accounting Affairs of GUU-III (2003), Head of the Berangir Garden Administration Service (2005), Head of Bookkeeping Affairs of the Accounting Department (2006), Head of Verification Affairs of the Accounting Department (2006), Head of Reporting Affairs of the Accounting Department (2006), Head of Bookkeeping Affairs of the Accounting Department (2011), Head of Accounting Department (2013), Head of Finance Department (2016), and Company Audit Committee since 2020.



## EDDY TEA C. BARUS

Anggota  
Member



Warga Negara Indonesia. Lahir di Pematang Siantar pada 26 Oktober 1964, berusia 59 tahun.  
Indonesian citizen. Born in Pematang Siantar on October 26, 1964, 59 years old.

Ditunjuk berdasarkan SK Dekom No. DK-02/Kpts/1/2022 tanggal 28 Januari 2022. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana Teknik Mesin pada Universitas Pembangunan Masyarakat Indonesia, Medan.

Beliau memulai karir di perkebunan sebagai Asisten Teknik The Unit Usaha Sidamanik (1992), Asisten Teknik Unit Pabrik Mesin Tenera (2001), Asisten Teknik Umum Unit Usaha Mayang (2002), Kepala Dinas Teknik Unit Pabrik Mesin Tenera (2009), Kepala Dinas Teknik dan Pengolahan Unit Kebun Berangir (2010), Asisten Urusan Mesin dan Instalasi (2012), Kepala Urusan Pengawasan Operasional dan Sisdur SPI (2015), Manajer Kebun dan Pabrik Unit Usaha Ajamu (2018), Kepala Bagian Teknik (2018), Kepala Bagian Pengolahan (2019), Kepala Bagian Teknik dan Pengolahan (2020). Sejak 31 Januari 2024, beliau menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG. Beliau memiliki Sertifikasi Kompetensi Manajemen Risiko (*Qualified Risk Management Officer*/QRMO).

### Masa Tugas Komite Audit

Masa jabatan anggota Komite Audit yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah paling lama tiga (3) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### Independensi Komite Audit

Setiap anggota Komite Audit wajib memenuhi persyaratan independensi dalam hal hubungan dengan Dewan Komisaris dan Direksi, tidak memiliki hubungan dengan kepengurusan baik usaha, saham di Perseroan serta syarat lainnya mengenai tidak menjabat sebagai pengurus politik. Independensi Komite Audit bertujuan untuk memastikan setiap Anggota Komite Audit bersifat independen sehingga dapat bertindak objektif dan profesional dalam melaksanakan audit.

### Piagam Komite Audit

Untuk pelaksanaan tugas Komite Audit, Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Audit berdasarkan usulan Komite Audit sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN No. PER.12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Dewan Komisaris /Dewan Pengawas. Piagam Komite Audit Perseroan tahun 2016 merupakan pemutakhiran dari Piagam Komite Audit tahun 2013, dan telah disahkan melalui Keputusan Bersama Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan tanggal 6 Desember 2016. Piagam Komite Audit mengatur struktur, persyaratan keanggotaan, masa jabatan,

Appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. DK-02/Kpts/1/2022 dated January 28, 2022. He completed a Bachelor's degree in Mechanical Engineering at the Indonesian Community Development University, Medan.

He started his career in plantations as Technical Assistant for the Sidamanik Business Unit (1992), Technical Assistant for the Tenera Machine Factory Unit (2001), General Technical Assistant for the Mayang Business Unit (2002), Head of the Tenera Machine Factory Unit Technical Service (2009), Head of the Engineering Service and Processing of the Berangir Plantation Unit (2010), Assistant for Machinery and Installation Affairs (2012), Head of Operational Supervision and Systems Affairs of SPI (2015), Manager of the Plantation and Factory Ajamu Business Unit (2018), Head of the Engineering Department (2018), Head of the Processing Department (2019), Head of Engineering and Processing (2020). Since January 31, 2024, he serves as the Member of Risk Management and GCG Monitoring Committee. He has a Risk Management Competency Certification (*Qualified Risk Management Officer*/QRMO).

### Term of Service of the Audit Committee

The members of the Audit Committee who are not part of the Board of Commissioners can serve for a maximum of three (3) years. Their term can be extended once for an additional two (2) years. However, the Board of Commissioners reserves the right to remove them at any time.

### Independence of the Audit Committee

The Audit Committee requires each of its members to meet independence criteria in terms of their relationship with the Board of Commissioners and Directors. Members should not have any connection with the management of the business, hold shares in the company, or serve as a political administrator. The aim of ensuring Audit Committee independence is to guarantee that each member can act objectively and professionally when conducting audits.

### Audit Committee Charter

To fulfill the responsibilities of the Audit Committee, the Board of Commissioners has created an Audit Committee Charter based on the proposal of the Audit Committee in accordance with the State Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER.12/MBU/2012 dated August 24, 2012 regarding Organs of the Board of Commissioners/Supervisory Board. The 2016 Company Audit Committee Charter is an updated version of the 2013 Audit Committee Charter and was approved through a Joint Decree of the Company's President Commissioner and Chief Executive Officer dated December 6, 2016. The Audit Committee

penghasilan, tugas, wewenang, kode etik, dan mekanisme kerja Komite Audit serta hubungan Komite Audit dengan berbagai pihak.

### Tugas dan Wewenang Komite Audit

Komite Audit bekerja secara kolektif dan mandiri dalam melaksanakan tugasnya, baik dalam pelaksanaan tugasnya maupun dalam pelaporan. Secara umum, tugas utama Komite Audit adalah:

1. Menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh Satuan Pengawas Internal maupun auditor eksternal sehingga dapat dicegah pelaksanaan dan pelaporan yang tidak memenuhi standar.
2. Memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen Perseroan serta pelaksanaannya.
3. Memberi masukan atas penunjukan calon eksternal auditor Perseroan kepada Komisaris.
4. Memastikan telah terdapat prosedur *review* yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan termasuk laporan keuangan berkala, proyeksi/*forecast* dan lain-lain informasi keuangan yang disampaikan Perseroan kepada pemegang saham.
5. Melakukan identifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian Komisaris.
6. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Komisaris berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Sementara itu, Komite Audit juga memiliki tugas lainnya, antara lain:

1. Melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan keputusan dan arahan RUPS oleh Direksi.
2. Menelaah RJPP, RKAP, dan informasi lainnya.
3. Menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
4. Menelaah kebijakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan.
5. Menelaah pengaduan atau keluhan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Perseroan.
6. Mengevaluasi penunjukan auditor eksternal dan kecukupan perencanaan auditor eksternal beserta jumlah auditornya.
7. Menelaah isu-isu terkini tentang perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perseroan.
8. Menelaah kesesuaian visi dan misi Perusahaan dengan perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perseroan.
9. Menelaah kebijakan dan pelaksanaan pengembangan karir dalam Perseroan.
10. Menelaah kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Perseroan.
11. Menelaah kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
12. Menelaah kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, RJP, RKAP, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis perusahaan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga.
13. Menelaah kriteria, target, dan indikator kinerja utama yang tercakup dalam Kontrak Manajemen Direksi secara kolektif dengan realisasi pencapaiannya.

Charter outlines the structure, membership requirements, term of office, remuneration, responsibilities, authority, code of ethics, and operational mechanisms of the Audit Committee, as well as the Audit Committee's interactions with various stakeholders.

### Duties and Authorities of the Audit Committee

The Audit Committee works collectively and independently in carrying out its duties, both in carrying out its duties and in reporting. In general, the primary responsibilities of the Audit Committee are:

1. Assess the implementation of activities and the results of audits carried out by the Internal Supervisory Unit and external auditors to prevent implementation and reporting that do not meet standards.
2. Provide recommendations regarding improvements to the Company's management control system and its implementation.
3. Provide input on appointing candidates for the Company's external auditors to the Commissioner.
4. Ensure that there are satisfactory review procedures for all company information, including periodic financial reports, projections/forecasts, and other financial information submitted to shareholders.
5. Identify matters that require the Commissioner's attention.
6. Carry out other duties the Commissioner assigns based on applicable statutory provisions.

Meanwhile, the Audit Committee also has other duties, including:

1. Evaluate the implementation of GMS decisions and directions by the Board of Directors.
2. Review RJPP, RKAP, and other information.
3. Review the Company's compliance with statutory regulations and articles of association.
4. Review accounting policies and preparation of financial reports.
5. Review complaints or complaints from stakeholders related to the Company.
6. Evaluate the appointment of external auditors, the adequacy of external auditor planning, and the number of auditors.
7. Examining current issues regarding changes in the business environment and the Company's problems.
8. Review the suitability of the Company's vision and mission with changes in the business environment and problems faced by the Company.
9. Review policies and implementation of career development within the Company.
10. Review policies and implementation of the Company's procurement of goods and services.
11. Review policies and implementation of subsidiary/joint company management.
12. Review the Board of Directors compliance with the articles of association, RJP, RKAP, laws and regulations governing the company's business (sectoral regulations), and other laws and regulations, as well as agreements with third parties.
13. Collegally review the criteria, targets, and leading performance indicators included in the Directors' Management Contract with the realization of their achievements.

14. Menelaah usulan remunerasi Direksi yang diajukan oleh Direksi.

Komite Audit juga mengemban tugas terkait penunjukan KAP, yaitu:

1. Memberikan rekomendasi atas penunjukan dan pemberhentian Auditor Eksternal.
2. Melakukan evaluasi/penilaian atas efektivitas pelaksanaan audit yang dilakukan oleh Auditor Eksternal.
3. Memberikan Usulan penunjukan atau pemberhentian KAP.

Wewenang Komite Audit adalah:

1. Dapat mengakses catatan atau informasi tentang karyawan, dana, aset, serta sumber daya lainnya milik Perusahaan yang berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya.
2. Dapat melakukan koordinasi secara langsung dengan komite lainnya dan Satuan Pengawasan Intern, serta pihak terkait lainnya.

### Rapat Komite Audit

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Audit, rapat Komite Audit dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yaitu 1 (satu) bulan sekali. Setiap rapat Komite Audit dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite Audit yang hadir untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris. Kehadiran anggota Komite Audit dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Audit.

No.	Nama Name	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
1.	Andi Wibisono	12	12	100%
2.	Ali Akbar	12	12	100%
3.	Eddy Tea C. Barus	12	12	100%

### Kegiatan Peningkatan Kompetensi Komite Audit

Sepanjang tahun 2023, anggota Komite Audit mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kegiatan Activity	Tanggal Date
1.	Andi Wibisono	Ketua Chairman	GRC Masterclass Program 2023 (Sosialisasi Pemingkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN)	14 September 2023
			GRC Masterclass Program 2023 (Socialization of SOE & SOE Subsidiaries Ranking)	September 14, 2023
			GRC Masterclass Program 2023 (ESG for Boards – Governance of ESG)	28 September 2023
			GRC Masterclass Program 2023 (GRC Integrated Information For Supervisory Board)	28 September 2023
2.	Ali Akbar	Anggota Member	Rakornaswasin 2023 dengan tema “Kawal Produktivitas untuk Transformasi Ekonomi”	14 Juni 2023
			Rakornaswasin 2023 with the theme “Monitoring Productivity for Economic Transformation”	June 14, 2023
			Seminar Diskusi & Sharing Manajemen Risiko & Asuransi	2023
			Risk Management & Insurance Discussion and Sharing Seminar	
			<i>Risk Management Effectiveness Evaluation</i>	7 September 2023
			Sosialisasi Pemingkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN	14 September 2023
			Socialization of SOE & SOE Subsidiaries Ranking	September 14, 2023
			Seminar Online Majemen Risiko Asuransi; Teknik Audit Berbasis Risiko	2023
			Insurance Risk Management Online Seminar; Risk-Based Audit Techniques	

14. Review the Board of Directors’ remuneration proposals submitted by the Board of Directors.

The Audit Committee also carries out duties related to the appointment of KAP, namely:

1. Provide recommendations for the appointment and dismissal of External Auditor.
2. Conduct an evaluation/assessment of the audit’s effectiveness by the External Auditor.
3. Provide recommendations for the appointment or dismissal of KAP.

The authority of the Audit Committee is:

1. Access records or information about employees, funds, assets, and other resources belonging to the Company related to the implementation of their duties.
2. Coordinate directly with other committees and the Internal Audit Unit, as well as other related parties.

### Audit Committee Meeting

The Audit Committee Charter states that Audit Committee meetings are held at least once a month, as per the minimum requirements in the articles of association. The minutes of each meeting, signed by all attending members, are submitted to the Board of Commissioners. The attendance of Audit Committee members at meetings is reported in the quarterly report and the Audit Committee’s annual report.

### Audit Committee Competency Improvement Activities

Throughout 2023, Audit Committee members has participated in the following training programs:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kegiatan Activity	Tanggal Date
3.	Eddy Tea C. Barus	Anggota Member	Seminar <i>Online Risk Management Effectiveness Evaluation</i> Online Risk Management Effectiveness Evaluation Seminar	7 September 2023 September 7, 2023
			Seminar <i>Online Sosialisasi Pemeringkatan BUMN &amp; Anak Perusahaan BUMN</i> Online Seminar on Socialization of SOE & SOE Subsidiaries Ranking	14 September 2023 September 14, 2023

### Remunerasi Komite Audit

Penghasilan anggota Komite Audit sesuai pasal 16 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perseroan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan tetap lain selain honorarium tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua/Anggota Komite Audit tidak diberikan penghasilan tetap tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan.

### Pelaksanaan Kegiatan Komite Audit Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Audit telah melaksanakan rencana kerja dan anggaran tahunan dan tugas lainnya. Realisasi pelaksanaan tugas Komite Audit tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Menyampaikan Program Kerja 2023 kepada Pemegang Saham melalui Surat No. DK-20/II/2023 tanggal 9 Februari 2023 yang terintegrasi dengan Program Kerja Dewan Komisaris Tahun 2023.
2. Memonitor dan mengevaluasi proses penyelesaian dan proses audit laporan pertanggung jawaban keuangan perusahaan tahun buku 2022.
3. Melakukan evaluasi terhadap SPI dan menyampaikan laporan kepada Dewan Komisaris melalui Surat No. KA-02/L/I/2023 tanggal 13 Januari 2023 seiring dengan evaluasi audit laporan keuangan 2023.
4. Melakukan evaluasi atas Sistem Pengendalian Manajemen kegiatan tertentu.
5. Menelaah Laporan Keuangan Audit Tahun 2022.
6. Melakukan evaluasi untuk penunjukan auditor eksternal untuk melakukan audit Laporan Keuangan tahun buku 2023.
7. Melakukan evaluasi dan memonitor atas laporan Direksi tentang progres pelaksanaan arahan RUPS.
8. Melakukan evaluasi dan monitor Laporan Manajemen Triwulan.
9. Melakukan evaluasi atas Laporan Kinerja bulanan kebun, Grup Unit Usaha, dan Unit Usaha tertentu.
10. Menentukan dan mengevaluasi rencana dan realisasi arus kas Perseroan.
11. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program TJSL.
12. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diminta Komisaris.

### Evaluasi Kinerja Komite Audit

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Audit, baik secara individual maupun secara kolektif, dilakukan setiap semester dan tahunan secara *self-assessment*, dengan menilai faktor-faktor sebagai berikut:

### Audit Committee Remuneration

The remuneration for Audit Committee members is based on Article 16 of the State Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012. They are entitled to a maximum honorarium of 20% of the Chief Executive Officer's salary, with the Company bearing the tax burden. No other fixed income is allowed apart from the honorarium. Members of the Board of Commissioners who serve as Chairman or Members of the Audit Committee are not eligible for any additional fixed income from this position.

### Implementation of Audit Committee Activities in 2023

In 2023, the Audit Committee has carried out various activities as part of their annual work plan and budget. The following are the details of the Audit Committee's activities in 2023:

1. Communicated the 2023 Work Program to Shareholders via Letter No. DK-20/II/2023 dated February 9, 2023, which is integrated with the 2023 Board of Commissioners Work Program.
2. Monitored and evaluated the completion and audit process of the Company's financial responsibility report for the 2022 financial year.
3. Evaluated the SPI and submitted a report to the Board of Commissioners via Letter No. KA-02/L/I/2023 dated January 13, 2023 along with the evaluation of the 2023 financial report audit.
4. Evaluated the Management Control System for certain activities.
5. Reviewed the 2022 Audited Financial Report.
6. Conducted an evaluation for the appointment of an external auditor to audit the Financial Report for the 2023 financial year.
7. Evaluated and monitored the Directors' report regarding the progress of implementing the GMS directives.
8. Evaluated and monitored Quarterly Management Reports.
9. Evaluated the monthly performance reports of plantations, business unit groups, and certain business units.
10. Determined and evaluated the Company's cash flow plans and realization.
11. Monitored and evaluated the implementation of the CSR program.
12. Carried out other tasks as requested by the Commissioners.

### Audit Committee Performance Evaluation

Evaluation of the performance of Audit Committee members, both individually and collectively, is carried out every semester and annually by self-assessment, by assessing the following factors:



#### Ketua Komite

- Keuangan
- Progres Arahan RUPS
- Auditor Internal dan Eksternal
- Arus Kas
- Koordinasi dan Kegiatan Bersama

#### Anggota Komite

- Laporan Manajemen
- Laporan Kinerja Kebun
- Pemasaran
- TJSL
- Tugas lainnya dari Komisaris

Pada tahun 2023, Komite Audit telah melakukan *assessment* dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Audit.

## Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dibentuk untuk membantu tugas pengawasan dan penasihat Dewan Komisaris dalam melakukan identifikasi, pemetaan, analisis, dan mitigasi risiko atas seluruh proses bisnis Perseroan, sehingga Perseroan dapat mencegah, meminimalisasi, memantau, dan memitigasi risiko secara komprehensif.

### Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Komposisi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG terdiri dari 1 (satu) atau lebih anggota Dewan Komisaris maupun pihak luar yang independen yang memiliki keahlian, pengalaman serta kualitas dalam mengelola risiko. Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Komisaris No. DK-04/Kpts/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020, DK-02/Kpts/III/2020 tanggal 31 Maret 2020 dan DK-03/Kpts/1/2022 tanggal 28 Januari 2022, maka susunan keanggotaan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG per 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Name	Jabatan Position	Periode Menjabat Term of Office	Masa Menjabat Tenure
Atas Wijayanto	Ketua Chairman	16 Juni 2020 - 6 Desember 2023 June 16, 2020 - December 6, 2023	3 (tiga) tahun 3 (three) years
Ashweer Anwar	Anggota Member	1 Februari 2021 - sekarang February 1, 2021 - present	3 (tiga) tahun 3 (three) years
Lidang Panggabean	Anggota Member	26 April 2022 - 31 Januari 2024 April 26, 2022 - January 31, 2024	1 (satu) tahun 1 (one) year

#### Chairman of the Committee

- Finance
- Progress of GMS Directions
- Internal and External Auditors
- Cash Flow
- Coordination and Joint Activities

#### Member of the Committee

- Management Reports
- Farm Performance Report
- Marketing
- CSR
- Other duties of the Commissioner

In 2023, the Audit Committee carried out an assessment and submitted its report to the Board of Commissioners along with the Annual Report on the Implementation of the Audit Committee's Duties.

## Risk Management and GCG Monitoring Committee

The Risk Management and GCG Monitoring Committee was established to support the Board of Commissioners in their supervisory and advisory roles. The committee's main responsibilities include identifying, mapping, analyzing, and mitigating risks associated with all of the Company's business processes to ensure that the Company can effectively prevent, minimize, monitor, and mitigate risks.

### Composition of the Risk Management and GCG Monitoring Committee

The composition of the Risk Management and GCG Monitoring Committee consists of 1 (one) or more members of the Board of Commissioners or independent external parties who have expertise, experience, and quality in managing risk. Based on the Decree of the Board of Commissioners No. DK-04/Kpts/VI/2020 dated June 16, 2020, DK-02/Kpts/III/2020 dated March 31, 2020, and DK-03/Kpts/1/2022 dated January 28, 2022, then the composition of the Risk Management Monitoring Committee membership and GCG as of December 31, 2023 is as follows:

## Profil Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Risk Management and GCG Monitoring Committee Profile



Beliau ditunjuk berdasarkan SK Dekom No. DK-04/Kpts/VI/2020 tanggal 16 Juni 2020. Beliau efektif menjabat hingga 6 Desember 2023. Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris.

He was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. DK-04/Kpts/VI/2020 dated June 16, 2020. He effectively served until December 6, 2023. His profile is disclosed in the Board of Commissioners profile.



**ATAS WIJAYANTO**  
Ketua  
Chairman




Beliau ditunjuk berdasarkan SK Dekom No. COMM SKPTS/05/I/2024. Beliau efektif menjabat sejak 6 Desember 2023. Profil beliau dapat dilihat pada profil Dewan Komisaris.

He was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. COMM/SKPTS/05/I/2024. His profile is disclosed in the Board of Commissioners profile.




**FAUZI YUSUF**  
Ketua  
Chairman



Warga Negara Indonesia, lahir pada 2 September 1953, berusia 69 tahun.

Indonesian citizen, born on September 2, 1953, 69 years old.



**ASHWEER ANWAR**  
Anggota  
Member

Beliau ditunjuk berdasarkan SK Dekom No. DK-02/Kpts/III/2021 tanggal 1 Februari 2021. Beliau meraih gelar Sarjana Pertanian dari Universitas Sumatra Utara pada 1979.

Dalam perjalanan karirnya, beliau pernah menjabat sebagai Manajer Sawit Lingkak PTPN IV (2006-2009), Direktur PT Alumna Nusantara (Konsultan Perkebunan) (2010-2013), Staf Ahli Kebun Percobaan USU Tambunan A (2014-2015), dan Staf Ahli Tanaman PT Buana Estate (sejak 2015 – sekarang).

He was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. DK-02/Kpts/III/2021 dated February 1, 2021. He earned a Bachelor's in Agriculture from the University of North Sumatra in 1979.

In the course of his career, he has served as PTPN IV Level Palm Oil Manager (2006-2009), Director of PT Alumna Nusantara (Plantation Consultant) (2010-2013), Expert Staff at the USU Tambunan A Experimental Garden (2014-2015), and Plant Expert Staff PT Buana Estate (since 2015 – present).



**LIDANG PANGGABEAN**  
Anggota  
Member



Warga Negara Indonesia. Lahir di Samsir,  
22 Mei 1962, berusia 61 tahun.  
Indonesian citizen. Born in Samsir,  
May 22, 1962, 61 years old.

Beliau ditunjuk berdasarkan SK Dekom No. DK-02/Kpts/1/2022 tanggal 28 Januari 2022. Beliau menamatkan pendidikan Sarjana pada Universitas Kisnadwipayana. Beliau memulai karir di Bagian Pelaporan/BTU-BUMN, Departemen Pertanian sebagai Pegawai Bulanan (ADM PTP VII) (1990), Staf Pembiayaan (1994), Staf Biro Sekretariat Perwakilan PTPN IV, Jakarta (1998), Asisten Urusan Humas Sekretaris Perusahaan PTPN IV, Kantor Pusat Medan (2005), *Public Relations & Corporate Communication* (2006), Kepala Bagian Pembelian Bahan Baku Direktorat Produksi (2012), Kepala Bagian Umum Direktorat SDM & Umum (2013), Kepala Bagian Umum (2013), dan Kepala Bagian Hukum & Pertanahan (2016). Sejak 31 Januari 2024, beliau menjabat sebagai Anggota Komite Audit. Beliau memiliki sertifikasi Manajemen Risiko Berkualifikasi (QRMO).

### Masa Jabatan

Masa jabatan anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG yang bukan merupakan anggota Dewan Komisaris adalah paling lama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang 1 (satu) kali selama 2 (dua) tahun masa jabatan, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris untuk memberhentikannya sewaktu-waktu.

### Pernyataan Independensi

Anggota Komite Manajemen Risiko & GCG yang berasal dari pihak independen tidak memiliki hubungan keuangan, kepengurusan, kepemilikan saham dan/atau hubungan keluarga dengan Dewan Komisaris, Direksi dan/atau Pemegang Saham Pengendali atau hubungan dengan Perseroan, yang dapat memengaruhi kemampuannya untuk bertindak independen.

Komite Manajemen Risiko dan GCG wajib menyampaikan laporan tertulis kepada Dewan Komisaris secara berkala mengenai hasil penugasannya maupun laporan khusus yang berisi temuan yang diperkirakan dapat mengganggu kegiatan Perseroan. Komite Manajemen Risiko dan GCG wajib menjaga kerahasiaan dokumen, data, dan informasi perusahaan, baik dari pihak internal dan eksternal dan hanya digunakan untuk kepentingan pelaksanaan tugasnya. Untuk menjamin independensi anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG, Perseroan menerapkan beberapa kriteria khusus, yaitu bukan karyawan Perusahaan, tidak memiliki saham atas Perseroan, memiliki perilaku dan pemikiran yang independen dan tidak memiliki benturan kepentingan dengan Perseroan.

Berdasarkan hasil *review* atas kriteria independensi, semua anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG telah memenuhi kriteria independensi.

He was appointed based on the Decree of the Board of Commissioners No. DK-02/Kpts/1/2022 dated January 28, 2022. He completed his Bachelor's degree at Kisnadwipayana University. He started his career in the Reporting Section/BTU-BUMN, Department of Agriculture as a Monthly Employee (ADM PTP VII) (1990), Financing Staff (1994), Staff of the PTPN IV Representative Secretariat Bureau, Jakarta (1998), Assistant for Public Relations of the PTPN IV Corporate Secretary, Medan Head Office (2005), Public Relations & Corporate Communication (2006), Head of Raw Material Purchasing Section, Production Directorate (2012), Head of General Section, HR & General Directorate (2013), Head of General Section (2013), and Head of Legal Section & Land (2016). Since January 31, 2024, he serves as Member of the Audit Committee. He has QRMO certification.

### Term of Service

The term of office for members of the Risk Management and GCG Committee who are not part of the Board of Commissioners is a maximum of 3 (three) years and can be extended once for an additional 2 (two) years, with the possibility of being dismissed by the Board of Commissioners at any time.

### Statement of Independence

The members of the Risk Management and GCG Committee who are independent parties do not have any financial, management, share ownership, or family relationships with the Board of Commissioners, Directors, or Controlling Shareholders that could influence their ability to act independently.

The Risk Management and GCG Committee is required to periodically submit written reports to the Board of Commissioners regarding the results of its assignments, as well as special reports containing findings that may disrupt the Company's activities. The committee is also obligated to maintain the confidentiality of company documents, data, and information, from both internal and external parties, and to use them only for the purpose of carrying out its duties. To ensure the independence of the members of the Risk Management and GCG Committee, the Company applies specific criteria, which include not being employees of the Company, not owning shares in the Company, exhibiting independent behavior and thinking, and having no conflicts of interest with the Company.

Based on a review of the independence criteria, all members of the Risk Management and GCG Committee have met the independence criteria.



## Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Untuk memastikan bahwa tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG terlaksana dengan baik, Dewan Komisaris telah menetapkan Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG berdasarkan usulan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG sesuai dengan peraturan Menteri Negara BUMN No. PER.12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012 tentang Organ Dewan Komisaris/Dewan Pengawas. Piagam ini kemudian diperbaharui pada 2016 melalui Keputusan Bersama Komisaris Utama dan Direktur Utama Perseroan tanggal 6 Desember 2016.

Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG mengatur struktur, persyaratan keanggotaan, masa jabatan, penghasilan, tugas, wewenang, kode etik, mekanisme kerja, dan hubungan dengan berbagai pihak.

## Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko & GCG

Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG adalah:

### Manajemen Risiko

1. Mendapatkan pemahaman atas manajemen risiko Perseroan yang mencakup berbagai risiko yang dihadapi Perseroan, strategi, sistem dan kebijakan manajemen risiko Perseroan, pengendalian intern Perseroan, termasuk kebijakan, metodologi dan infrastruktur.
2. Melakukan evaluasi terhadap berbagai model pengukuran risiko yang digunakan Perseroan dan memberikan rekomendasi penyempurnaan lebih lanjut.
3. Memantau kesesuaian berbagai kebijakan dan pelaksanaan manajemen risiko Perseroan.
4. Memantau berbagai potensi risiko yang dihadapi Perseroan.
5. Mengevaluasi berbagai kebijakan manajemen Perseroan.
6. Melakukan koordinasi implementasi dan pengawasan keberadaan dan efektivitas masing-masing komponen dari *Enterprise Risk Management (ERM)* dalam Perseroan.
7. Mengukur efektivitas masing-masing komponen dari ERM yang telah diterapkan di Perseroan.
8. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Dewan Komisaris/Dewan Pengawas berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### GCG

1. Melakukan evaluasi secara berkala atas kecukupan kelengkapan manual GCG perusahaan sesuai dengan perkembangan peraturan perundang-undangan, praktik-praktik yang baik (*best practice*) sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan arahan kepada Direksi guna menyempurnakan manual GCG tersebut.
2. Mengevaluasi secara berkala efektivitas penerapan GCG Perseroan berdasarkan laporan penerapan GCG yang disampaikan oleh Direksi, sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan arahan kepada Direksi guna meningkatkan efektivitas penerapan GCG Perseroan.

## Risk Management and GCG Monitoring Committee Charter

The Board of Commissioners has established a Risk Management and GCG Monitoring Committee Charter to ensure that the committee's duties are carried out effectively. This charter is based on the proposal of the Risk Management and GCG Monitoring Committee, following State Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER.12/MBU/2012 dated August 24, 2012. It was updated in 2016 through a Joint Decree of the Company's President Commissioner and Chief Executive Officer dated December 6, 2016.

The Risk Management and GCG Monitoring Committee Charter regulates the structure, membership requirements, term of office, income, duties, authority, code of ethics, work mechanisms, and relationships with various parties.

## Duties of the Risk Management & GCG Monitoring Committee

The duties of the Risk Management and GCG Monitoring Committee are:

### Risk Management

1. Understand the Company's risk management, including the various risks it faces, the strategy, system, and policies in place, as well as internal controls and infrastructure.
2. Evaluate the different risk measurement models used by the Company and make recommendations for improvements.
3. Monitor the suitability and implementation of the Company's risk management policies.
4. Keep an eye on potential risks faced by the Company.
5. Evaluate the Company's management policies.
6. Coordinate the implementation and monitoring of Enterprise Risk Management (ERM) components within the Company.
7. Measure the effectiveness of implemented ERM components in the Company.
8. Perform other tasks assigned by the Board of Commissioners/Supervisory Board as per statutory provisions.

### GCG

1. Regularly evaluate the company's GCG manual to ensure it complies with the latest laws, regulations, and best practices. Provide guidance to the Board of Directors to enhance the GCG manual.
2. Periodically assess the effectiveness of the Company's GCG implementation based on reports submitted by the Directors. Use this assessment to guide the Directors in improving the effectiveness of the Company's GCG implementation.

3. Melakukan evaluasi atas kajian hukum yang dilakukan oleh Direksi terkait dengan usulan aktivitas/transaksi usaha yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham dan melakukan kajian ke lapangan (bila diperlukan).
4. Melakukan *review* atas kecukupan informasi mengenai penerapan GCG Perseroan dalam laporan-laporan yang ditandatangani oleh Dewan Komisaris.
5. Melakukan *review* atas *draft* laporan hasil *assessment* penerapan GCG Perseroan yang dilakukan oleh pihak independent.
6. Merumuskan tindak lanjut atas *area of improvement* penerapan GCG untuk ditindaklanjuti oleh Dewan Komisaris yang menjadi kewenangannya.
7. Memantau tindak lanjut atas *area of improvement* penerapan GCG dalam perusahaan yang dilakukan oleh organ Perseroan sebagai bahan masukan bagi Dewan Komisaris untuk memberikan arahan kepada Direksi untuk penyelesaian tindak lanjutnya secara tuntas.

#### Bidang Lainnya

1. Menelaah RJPP, RKAP, dan informasi lainnya.
2. Menelaah ketaatan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan dan anggaran dasar.
3. Menelaah atas pengaduan/keluhan pemangku kepentingan yang berkaitan dengan Perseroan.
4. Menelaah kesesuaian visi dan misi Perseroan dengan perubahan lingkungan bisnis dan permasalahan yang dihadapi Perseroan.
5. Menelaah kebijakan sistem teknologi informasi Perseroan dan pelaksanaannya.
6. Menelaah kebijakan pengembangan karir dalam Perseroan dan pelaksanaannya.
7. Menelaah kebijakan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Perseroan.
8. Menelaah kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan anak perusahaan/perusahaan patungan.
9. Menelaah kebijakan dan pelaksanaan kualitas (mutu) pelayanan kepada pemangku kepentingan Perseroan.
10. Menelaah kepatuhan Direksi terhadap anggaran dasar, RJPP, RKAP, peraturan perundang-undangan yang mengatur bisnis Perseroan (regulasi sektoral), dan peraturan perundang-undangan lainnya serta perjanjian dengan pihak ketiga.

#### Rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Sebagaimana tercantum dalam Piagam Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG, rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dilaksanakan sekurang-kurangnya sama dengan ketentuan minimal yang ditetapkan dalam anggaran dasar, yaitu 1 (satu) bulan sekali. Setiap rapat Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dituangkan dalam risalah rapat yang ditandatangani oleh seluruh anggota Komite

3. Review legal studies carried out by the Board of Directors for proposed business activities/transactions requiring approval from the Board of Commissioners and/or Shareholders. Conduct field studies if necessary.
4. Ensure that reports signed by the Board of Commissioners contain adequate information about the Company's GCG implementation.
5. Review the draft report on the assessment of the Company's GCG implementation conducted by an independent party.
6. Develop action plans to address areas for improvement in GCG implementation. These action plans will be followed up by the Board of Commissioners.
7. Monitor the progress of improvement areas in GCG implementation within the company. Use this information to guide the Board of Directors in ensuring complete follow-up.

#### Other Fields

1. Review RJPP, RKAP, and other relevant information.
2. Review the Company's compliance with statutory regulations and its articles of association.
3. Review stakeholder complaints and any complaints related to the Company.
4. Review the suitability of the Company's vision and mission in light of changes in the business environment and the challenges faced by the Company.
5. Review the Company's information technology system policies and their implementation.
6. Review the Company's career development policies and their implementation.
7. Review the policies and implementation of the Company's procurement of goods and services.
8. Review the policies and implementation of managing subsidiary/joint companies.
9. Review the policies and implementation of service quality provided to Company stakeholders.
10. Review the Board of Directors' compliance with the articles of association, RJPP, RKAP, sectoral regulations, and other laws and regulations, as well as agreements with third parties.

#### Risk Management and GCG Monitoring Committee Meeting

Following the Risk Management and GCG Monitoring Committee Charter, the committee holds meetings at least once a month as stipulated in the articles of association. The minutes of each meeting, signed by all present members of the Risk Management and GCG Monitoring Committee, and submitted to the Board of Commissioners. The attendance of the Risk Management and GCG Monitoring Committee

Pemantau Manajemen Risiko dan GCG yang hadir untuk kemudian disampaikan kepada Dewan Komisaris. Kehadiran anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG dalam rapat dilaporkan dalam laporan triwulanan dan laporan tahunan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG.

members at meetings is reported in the quarterly and annual reports of the Risk Management and GCG Monitoring Committee.

No.	Nama Name	Jumlah Rapat Total Meeting	Kehadiran Attendance	Persentase Percentage
1.	Atas Wijayanto	12	12	100%
2.	Ashweer Anwar	12	12	100%
3.	Lidang Panggabean	12	12	100%
3.	Fauzi Yusuf	1	1	100%

### Kegiatan Peningkatan Kompetensi Komite Manajemen Risiko dan GCG

Sepanjang tahun 2023, anggota Komite Manajemen Risiko dan GCG mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

### Risk Management and GCG Committee Competency Improvement Activities

Throughout 2023, members of the Risk Management and GCG Committee participated in the following training programs:

No.	Nama Name	Jabatan Position	Kegiatan Activity	Tanggal Date
1.	Atas Wijayanto	Ketua Chairman	GRC Masterclass Program 2023 (Pre IPO & Post IPO)	27 Juni 2023 June 27, 2023
			GRC Masterclass Program 2023 (Risk Management Effectiveness Evaluation)	7 September 2023 September 7, 2023
			GRC Masterclass Program 2023 (Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN)	14 September 2023 September 14, 2023
			GRC Masterclass Program 2023 (Socialization of SOE & SOE Subsidiaries Ranking)	
			GRC Masterclass Program 2023 (ESG for Boards – Governance of ESG)	28 September 2023 September 28, 2023
			GRC Masterclass Program 2023 (GRC Integrated Information For Supervisory Board)	5 Oktober 2023 5 October 2023
2.	Ashweer Anwar	Anggota Member	Lokakarya dan Pemahaman Sistem Pengendalian Internal & Manajemen Risiko PTPN IV - LPP Yogyakarta Workshop and Understanding of Internal Control System & Risk Management PTPN IV - LPP Yogyakarta	31 Januari 2023 January 31, 2023
			Seminar Online Risk Management Effectiveness Evaluation Online Risk Management Effectiveness Evaluation Seminar	7 September 2023 September 7, 2023
			Seminar Online Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN Online Seminar on Socialization of SOE & SOE Subsidiaries Ranking	7 September 2023 September 7, 2023
3.	Lidang Panggabean	Anggota Member	Seminar Online Manajemen Risiko Asuransi; Teknik Audit Berbasis Risiko "Menentukan Strategi dan Pendekatan Audit secara Tepat dalam Risk-Based Auditing" Insurance Risk Management Online Seminar; Risk-Based Audit Techniques "Determining the right audit strategy and approach in Risk-Based Auditing"	2023
			GRC Masterclass Program 2023 (Risk Management Effectiveness Evaluation)	7 September 2023 September 7, 2023
			Seminar Online Sosialisasi Peningkatan BUMN & Anak Perusahaan BUMN Online Seminar on Socialization of SOE & SOE Subsidiaries Ranking	14 September 2023 September 14, 2023



## Pelaksanaan Kegiatan Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG Tahun 2023

Selama tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG telah melaksanakan beberapa kegiatan sebagai berikut:

1. Menelaah kecukupan pedoman (kebijakan dan prosedur) pelaksanaan manajemen risiko di Perseroan.
2. Menelaah kecukupan manual untuk penerapan GCG di Perseroan.
3. Menelaah efektivitas pelaksanaan manajemen risiko dan penerapan GCG Perseroan.
4. Menelaah efektivitas pelaksanaan tugas Bagian Manajemen Risiko dan GCG Perseroan.
5. Menelaah efektivitas pelaksanaan tugas Pemilik Risiko.
6. Menganalisis risiko dan kajian hukum yang dilakukan oleh Direksi terkait dengan usulan aktivitas/transaksi usaha yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris dan/atau Pemegang Saham dan melakukan kajian ke lapangan bila diperlukan.
7. Peninjauan ke lapangan atas profil risiko yang signifikan (level tinggi) dan atas kegiatan yang memerlukan persetujuan Dewan Komisaris sebanyak 12 kali.
8. Melaksanakan rapat dan pertemuan berkala dengan Komite Audit, Bagian Manajemen Risiko dan GCG, dan Satuan Pengawasan Intern.
9. Memantau pelaksanaan tindak lanjut atas Aol di bidang Manajemen Risiko dan GCG oleh manajemen.
10. *Self-assessment* terhadap pencapaian kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG setiap tahun.
11. Pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kompetensi anggota komite.

## Penilaian Kinerja Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Evaluasi terhadap kinerja anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG, baik secara individual maupun kolektif, dilakukan setiap semester dan tahunan secara *self-assessment*, dengan menilai faktor-faktor sebagai berikut:

### Ketua Komite

- Manajemen Risiko
- GCG
- Profil Risiko
- Progres Arahan RUPS
- Koordinasi dan Kegiatan Bersama

### Anggota Komite

- Manajemen Risiko
- GCG
- Laporan Manajemen
- Profil Risiko
- Tugas Lain dari Komisaris

Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG wajib menilai efektivitas kerja dan kinerjanya sendiri (*self-evaluation*) secara teratur setiap tahun. Pada tahun 2023, Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG telah melakukan *self-assessment* dan menyampaikan laporannya kepada Dewan Komisaris

## Implementation of Risk Management and GCG Monitoring Committee Activities in 2023

During 2023, the Risk Management and GCG Monitoring Committee has carried out several activities as follows:

1. Review the adequacy of guidelines (policies and procedures) for implementing risk management in the Company.
2. Review the adequacy of manuals for implementing GCG in the Company.
3. Evaluate the effectiveness of implementing risk management and GCG of the Company.
4. Assess the effectiveness of the Risk Management and GCG Section's duties within the Company.
5. Evaluate the effectiveness of the Risk Owner's duties.
6. Review risk analysis and legal studies carried out by the Board of Directors relating to proposed business activities/ transactions requiring the approval of the Board of Commissioners and/or Shareholders, and conducting field studies if necessary.
7. Conduct field reviews of significant risk profiles (high level) and activities requiring the approval of the Board of Commissioners at least 12 times.
8. Hold regular meetings with the Audit Committee, Risk Management and GCG Section, and Internal Audit Unit.
9. Monitor the implementation of follow-up actions on findings in Risk Management and GCG by the management.
10. Conduct a self-assessment of the performance achievements of the Risk Management and GCG Monitoring Committee annually.
11. Provide education and training to enhance the competence of committee members.

## Performance Assessment of the Risk Management and GCG Monitoring Committee

Evaluation of the performance of the members of the Risk Management and GCG Monitoring Committee, both individually and collectively, is carried out every semester and annually through self-assessment by assessing the following factors:

### Chairman of the Committee

- Risk management
- GCG
- Risk Profile
- Progress of GMS Directions
- Coordination and Joint Activities

### Member of the Committee

- Risk management
- GCG
- Management Reports
- Risk Profile
- Other Duties of the Commissioner

The Risk Management and GCG Monitoring Committee is required to regularly assess its effectiveness and performance through self-evaluation every year. In 2023, the Committee conducted a self-assessment and submitted its report to the Board of Commissioners, along with the Annual Report on the

bersamaan dengan Laporan Tahunan Pelaksanaan Tugas Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG.

### Remunerasi Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG

Sesuai pasal 16 Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-12/MBU/2012 tanggal 24 Agustus 2012, remunerasi anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG berupa honorarium maksimal sebesar 20% dari gaji Direktur Utama, dengan ketentuan pajak ditanggung Perseroan dan tidak diperkenankan menerima penghasilan tetap lain selain honorarium tersebut. Anggota Dewan Komisaris yang menjadi Ketua atau Anggota Komite Pemantau Manajemen Risiko dan GCG tidak diberikan penghasilan tetap tambahan dari jabatan tersebut selain penghasilan.

### Fungsi Nominasi dan Remunerasi

Hingga saat ini, Dewan Komisaris Perseroan belum membentuk Komite Nominasi dan Remunerasi. Pelaksanaan fungsi nominasi dan remunerasi di lingkungan Perseroan dilakukan oleh Dewan Komisaris, di mana Dewan Komisaris memiliki wewenang untuk menyusun sistem, prosedur nominasi dan seleksi bagi calon anggota Dewan Komisaris dan calon Direktur, memberikan rekomendasi tentang jumlah anggota Dewan Komisaris dan Direktur serta mengembangkan sistem untuk pemberian remunerasi bagi anggota Dewan Komisaris dan Direktur.

Sementara itu, remunerasi Direksi dan Dewan Komisaris ditetapkan melalui sebuah proses kajian yang dilaksanakan oleh Holding PTPN III (Persero). Hasil kajian tersebut menjadi bahan pertimbangan dalam persetujuan dan pengesahan atas besaran, bentuk, dan waktu berlakunya remunerasi Direksi dilakukan pada saat RUPS Tahunan atau Keputusan Pemegang Saham secara sirkuler. Dengan demikian, Pemegang Saham menjadi satu-satunya pemangku kepentingan yang memiliki wewenang untuk turut menentukan remunerasi Direksi.

### Sekretariat Perusahaan

Perseroan menyadari pentingnya peran Sekretariat Perusahaan dalam memperlancar hubungan antar organ tata kelola, hubungan antara Perseroan dan pemangku kepentingan, serta dipenuhinya ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Untuk mendukung peranan tersebut, Perseroan menetapkan kedudukan Sekretariat Perusahaan berada satu level di bawah Direktur Utama dalam struktur organisasinya.

Implementation of the Duties of the Risk Management and GCG Monitoring Committee.

### Remuneration of the Risk Management and GCG Monitoring Committee

The remuneration for members of the Risk Management and GCG Monitoring Committee is outlined in article 16 of the State Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-12/MBU/2012 dated August 24, 2012. Members are entitled to a maximum honorarium of 20% of the Chief Executive Officer's salary, with the tax being covered by the Company. They are not allowed to receive any fixed income other than the honorarium. Additionally, members of the Board of Commissioners who serve as Chair or Member of the Risk Management and GCG Monitoring Committee are not eligible for any additional fixed income from that position.

### Nomination and Remuneration Functions

Currently, the Company's Board of Commissioners has not established a Nomination and Remuneration Committee. The responsibilities of nominating and remunerating individuals within the Company are handled by the Board of Commissioners. They have the authority to create a system for nominating and selecting potential Board members and Directors, provide recommendations on the number of members of the Board of Commissioners and Directors, and establish a system for awarding remuneration.

On the other hand, the remuneration of the Directors and Board of Commissioners is determined through a review process conducted by Holding PTPN III (Persero). The findings of this review are used to consider and approve the amount, form, and timing of the Board of Directors' remuneration during the Annual GMS or through a circular Shareholder Resolution. Therefore, Shareholders are the only stakeholders with the authority to participate in deciding the remuneration of the Board of Directors.

### Corporate Secretariat

The Company recognizes the crucial role of the Corporate Secretariat in facilitating communication between governance bodies, the Company, and stakeholders, as well as ensuring compliance with laws and regulations. To support this role, the Company has positioned the Corporate Secretariat one level below the Chief Executive Officer in its organizational structure.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Negara BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, Sekretariat Perusahaan bertanggung jawab untuk:

1. Memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG.
2. Memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan atau sewaktu-waktu apabila diminta.
3. Sebagai penghubung (*liaison officer*).
4. Menatausahakan serta menyimpan dokumen perusahaan, termasuk tetapi tidak terbatas pada Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, dan risalah rapat Direksi, rapat Dewan Komisaris dan RUPS.

### Kedudukan Sekretariat Perusahaan

Berdasarkan Keputusan Direksi No. DPSB/SKPTS/18/XII/2023 tentang perubahan Struktur Organisasi PTPN IV, Sekretariat Perusahaan berada di bawah Direktur Utama dengan struktur sebagai berikut:

- Direktur Utama
- Sekretariat Perusahaan
- Sub Divisi Sekretariat & GCG
- Sub Divisi Corporate Communication
- Sub Divisi Umum

### Pengangkatan dan Pemberhentian Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan diangkat dan diberhentikan oleh Direktur Utama berdasarkan mekanisme internal perusahaan dengan persetujuan Dewan Komisaris.

Per 31 Desember 2023, Sekretaris Perusahaan dijabat oleh Bambang Budi Santoso, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN IV No. 04.03/Skpts/R/86/2023 tanggal 1 Desember 2023.

In line with State Minister for State-Owned Enterprises Regulation No. PER-2/MBU/03/2023, the Corporate Secretariat is responsible for:

1. Ensuring the Company's compliance with disclosure requirements in accordance with GCG principles.
2. Providing information to the Board of Directors and Board of Commissioners periodically and upon request.
3. Serving as a liaison officer.
4. Managing and maintaining company documents, including the Shareholders Register, Special Register, and minutes of Directors' meetings, Board of Commissioners meetings, and GMS.

### Position of Corporate Secretariat

Following the Decree of the Board of Directors No. DPSB/SKPTS/18/XII/2023 concerning changes to the PTPN IV Organizational Structure, the Corporate Secretariat is under the Chief Executive Officer with the following structure:

- Chief Executive Officer
- Corporate Secretariat
- Sekretariat & GCG Sub Division
- Corporate Communication Sub Division
- General Sub Division

### Appointment and Dismissal of the Corporate Secretary

The Corporate Secretary is appointed and dismissed by the Chief Executive Officer with the approval of the Board of Commissioners, based on the Company's internal mechanism.

As of December 31, 2023, Bambang Budi Santoso, holds the position of Corporate Secretary, having been appointed by Decree of the Board of Directors of PTPN IV No. 04.03/Skpts/R/86/2023 dated December 1, 2023.





**BAMBANG SANTOSO**  
Sekretaris Perusahaan  
Corporate Secretary



Warga Negara Indonesia, lahir di Jakarta pada 25 Juli 1974, berusia 49 tahun, berdomisili di Jakarta.

Indonesian citizen, born on July 25, 1974 in Jakarta, 49 years old, resides in Jakarta.

Beliau ditunjuk sebagai Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN IV No. 04.03/Skpts/R/86/2023 tanggal 1 Desember 2023.

He was appointed as Head of the Corporate Secretary Division based on the Decree of the Board of Directors of PTPN IV No. 04.03/Skpts/R/86/2023 dated December 1, 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana Ekonomi pada tahun 1998 dan Magister Manajemen Tahun 2015 dari Universitas Riau.

He obtained a Bachelor of Economics degree in 1998 and a Master of Management degree in 2015 from the University of Riau.

Sebelumnya, beliau berkarir sebagai Kepala Urusan Administrasi/Kuangan/Umum – *Strategic Business Unit* (SBU) Tandun PTPN V (2011), Kepala Urusan Kesehatan - Bagian SDM PTPN V (2012), Kepala Urusan Administrasi Kesehatan dan Persiapan Pendirian Anak Perusahaan Rumah Sakit – Bagian Kesehatan PTPN V (2013), Kepala Urusan Kesehatan – Bagian SDM PTPN V (2015), Kepala Urusan Jaminan Ketenagakerjaan dan Hubungan Industrial – Bagian SDM PTPN V (2016), Kepala Bagian Pengadaan PTPN V (2017), Kepala Bagian Sekretariat Perusahaan (2020), dan Kepala Divisi Sekretaris Perusahaan PTPN IV (1 Desember 2023–sekarang).

His previous positions include Head of Administration/ Finance/General Affairs – Strategic Business Unit (SBU) Tandun PTPN V (2011), Head of Health Affairs – HR Division PTPN V (2012), Head of Health Administration Affairs and Preparation for the Establishment of Hospital Subsidiaries – Health Division PTPN V (2013), Head of Health Affairs – HR Division PTPN V (2015), Head of Employment Security and Industrial Relations Affairs – HR Division PTPN V (2016), Head of Procurement Division PTPN V (2017), Head of Corporate Secretariat Division (2020), and Head of Corporate Secretary Division PTPN IV (December 1, 2023–present).

Beliau memiliki sertifikasi profesi di bidang *procurement* bersertifikasi sebagai *Certified Procurement Consultant* (CPC) Tahun 2019, dan sebagai Sekretaris Perusahaan maka Beliau juga otomatis menjadi Spokesperson PTPN V (2023), dan juga *Spokesperson* PTPN IV (2023-sekarang).

He holds a professional certification in procurement and is certified as a Certified Procurement Consultant (CPC) in 2019. In addition to his role as Corporate Secretary, he also serves as the Spokesperson for PTPN V (2023) and PTPN IV (2023–present).

### Kualifikasi Pendidikan dan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sekretaris Perusahaan telah memenuhi persyaratan kompetensi jabatan (*job requirement*), yaitu mampu berkomunikasi dan membangun hubungan kerja, serta mempunyai pemikiran analitis dan mampu berpikir secara konseptual. Sekretaris Perusahaan bertanggung jawab memastikan sistem manajemen dapat terintegrasi dan jalannya Perseroan dapat dikelola dengan efektif dan efisien melalui perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan fungsi *gate keeper* dan *compliance advisor*.

### Educational Qualifications and Competencies of Corporate Secretary

The Corporate Secretary has met the job requirements, such as effective communication and relationship building, as well as possessing analytical thinking and conceptual reasoning skills. The Corporate Secretary is responsible for ensuring the integration of the management system and the effective and efficient management of the Company's operations by planning, implementing, and supervising the functions of gatekeeping and compliance advising.

### Pedoman Kerja Sekretariat Perusahaan

Dalam melaksanakan tugasnya, Sekretariat Perusahaan berpedoman pada Pedoman Pelaksanaan Sekretariat Perusahaan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan No. DK/19/Kpts/XII/2020 dan No. 04.01/kpts/48/XII/2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Pemberlakuan Pedoman Infrastruktur GCG.

### Corporate Secretariat Work Guidelines

When performing his responsibilities, the Corporate Secretariat follows the Corporate Secretariat Implementation Guidelines outlined in the Joint Decree of the Company's Board of Commissioners and Directors No. DK/19/Kpts/XII/2020 and No. 04.01/kpts/48/XII/2020 dated December 30, 2020 regarding the Implementation of GCG Infrastructure Guidelines.



## Tugas Pokok Sekretariat Perusahaan

Salah satu tugas pokok Sekretariat Perusahaan adalah memastikan bahwa Perseroan mematuhi peraturan tentang persyaratan keterbukaan sejalan dengan penerapan prinsip-prinsip GCG. Berkaitan dengan hal ini, Sekretariat Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Menelaah ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang baru dan mendistribusikan serta mensosialisasikan kepada pihak terkait.
2. Melakukan kajian hukum (*legal opinion*) atas setiap rencana tindakan strategis dan permasalahan yang terjadi sebagaimana telah diatur dalam ketentuan perusahaan dan peraturan perundang-undangan.
3. Melakukan kajian dan upaya penyelesaian kasus litigasi dan nonlitigasi sesuai dengan ketentuan Perseroan dan peraturan perundang-undangan.
4. Mengkoordinasikan penyusunan laporan tingkat kepatuhan Perseroan terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Menyusun dan menerbitkan Daftar Rekanan Terseleksi (DRT) terbaru Perseroan setiap awal tahun untuk memberikan kesempatan kepada semua badan usaha/hukum yang berminat menjadi rekanan di Perseroan sesuai dengan persyaratan yang telah ditetapkan, peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perseroan yang berlaku serta mendistribusikannya kepada Unit Kebun yang terkait.
6. Memutakhirkan materi informasi yang disajikan dalam *website online* Perseroan secara berkala sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
7. Mengkoordinasikan persiapan dan penyediaan bahan-bahan untuk siaran pers atas setiap pernyataan dalam tingkatan Direksi.
8. Memberikan pelayanan pemberian informasi yang dibutuhkan oleh pemangku kepentingan mengenai data atau kinerja Perseroan dalam batas-batas yang ditetapkan dalam protokol informasi yang ditetapkan perusahaan.
9. Menyampaikan informasi dan laporan-laporan lainnya kepada pemangku kepentingan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Melakukan survei secara berkala atas kecukupan keterbukaan informasi Perseroan kepada pemangku kepentingan melalui *website* atau kuesioner.

Dalam menjalankan fungsinya untuk memberikan informasi yang dibutuhkan oleh Direksi dan Dewan Komisaris secara berkala dan/atau sewaktu-waktu apabila diminta, Sekretariat Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Manajemen Triwulanan, Laporan Manajemen Tahunan dan Laporan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan.
2. Menyampaikan Laporan Manajemen Triwulanan dan Laporan Manajemen Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Memfasilitas penerbitan Laporan Manajemen Triwulanan yang ditandatangani oleh seluruh Direksi dan Laporan Manajemen Tahunan yang ditandatangani oleh seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris.

## Main Duties of the Corporate Secretariat

One of the Corporate Secretariat's main duties is to ensure that the Company adheres to regulations regarding disclosure requirements in line with the implementation of GCG principles. In this role, the Corporate Secretariat has the following duties:

1. Review new legal provisions and regulations, and distribute and explain them to relevant parties.
2. Provide legal opinions on each strategic action plan and address any issues in accordance with company provisions and statutory regulations.
3. Conduct studies and efforts to resolve litigation and non-litigation cases in line with company provisions and statutory regulations.
4. Coordinate the preparation of reports on the Company's compliance with applicable laws and regulations.
5. Compile and publish the Company's latest Selected Partner List (DRT) at the beginning of each year, in accordance with established requirements, laws, regulations, and Company policies, and distribute it to Associated Garden Units.
6. Regularly update the information presented on the Company's online website in accordance with statutory provisions and regulations.
7. Coordinate the preparation and provision of materials for press release for each statement at the Board of Directors level.
8. Provide services to supply information required by stakeholders regarding Company data or performance within the limits specified in the information protocol established by the company.
9. Submit information and reports to stakeholders in compliance with applicable laws and regulations.
10. Conduct regular surveys on the adequacy of the Company's information disclosure to stakeholders via the website or questionnaires.

The Corporate Secretariat is responsible for providing necessary information to the Board of Directors and Board of Commissioners regularly and upon request. Their duties include:

1. Coordinating the preparation of accurate and reliable Quarterly Management Reports, Annual Management Reports, and Annual Reports.
2. Submitting Quarterly Management Reports and Annual Management Reports to the Board of Commissioners and Shareholders in a timely manner as per regulations.
3. Facilitating the publication of Quarterly Management Reports signed by all Directors and Annual Management Reports signed by all Directors and members of the Board of Commissioners.



4. Mengkoordinasikan penyusunan Laporan Tahunan yang akurat dan dapat diandalkan sesuai ketentuan yang berlaku.
5. Menyampaikan Laporan Tahunan kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham tepat waktu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
6. Laporan Tahunan ditandatangani oleh seluruh Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
7. Mengkoordinasikan penyusunan dan menyampaikan informasi dan laporan lainnya kepada Dewan Komisaris dan Pemegang Saham sewaktu-waktu apabila diminta.

Dalam menjalankan fungsinya sebagai Pejabat Penghubung, Sekretariat Perusahaan mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Mengorganisasikan dan mengoordinasikan rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris, RUPS, dan kegiatan lainnya dengan pemangku kepentingan antara lain konferensi pers, dengar pendapat dengan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan sebagainya.
2. Menyusun jadwal dan tahapan kegiatan menjelang RUPS, rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan rapat lainnya.
3. Membuat undangan RUPS, rapat Direksi, rapat Direksi dengan Dewan Komisaris dan rapat lainnya dengan mencantumkan acara, tanggal, waktu, tempat rapat, ketersediaan bahan-bahan rapat, dan menyampaikan kepada peserta rapat tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam menatausahakan dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, RUPS, dan rapat Direksi, Sekretariat Perusahaan bertugas untuk:

1. Membuat, memelihara, dan menyimpan Daftar Pemegang Saham, Daftar Khusus, Risalah RUPS, Risalah Rapat Direksi, dan Risalah rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.
2. Menerima, memelihara, dan menyimpan Risalah Rapat Direksi dan Risalah Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris.

Sekretariat Perusahaan juga bertugas untuk menatausahakan dan menyimpan arsip Perseroan. Selain itu, Sekretariat Perusahaan bertugas menyelenggarakan program pengenalan bagi Direksi dan/atau anggota Dewan Komisaris yang baru diangkat dan rencana kerja mengenai program pengenalan terkait.

### Kewajiban dan Wewenang Sekretariat Perusahaan

Sekretariat Perusahaan memiliki kewajiban untuk:

1. Memberikan masukan kepada Direksi terkait kepatuhan pada ketentuan yang berhubungan dengan UU BUMN, UU Perseroan Terbatas, UU Pasar Modal, peraturan pemerintah, peraturan menteri/instansi terkait dan peraturan pelaksanaannya.

4. Coordinating the preparation of an accurate and reliable Annual Report in compliance with regulations.
5. Submitting the Annual Report to the Board of Commissioners and Shareholders on time as per regulations.
6. Ensuring that the Annual Report is signed by all Directors and members of the Board of Commissioners.
7. Coordinating the preparation and submission of information and other reports to the Board of Commissioners and Shareholders promptly upon request.

As the Liaison Officer, the Corporate Secretariat is responsible for the following duties:

1. Organizing and coordinating Board of Directors meetings, Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, General Meetings of Shareholders (GMS), and other activities involving stakeholders such as press conferences and meetings with members of the House of Representatives.
2. Preparing schedules and plans for activities leading up to GMS, Board of Directors meetings, Board of Directors meetings with the Board of Commissioners, and other meetings.
3. Sending out invitations for GMS, Directors' meetings, Directors' meetings with the Board of Commissioners, and other meetings. This includes providing details such as the event, date, time, venue, availability of meeting materials, and ensuring timely communication with meeting participants in accordance with relevant regulations.

The Corporate Secretariat is responsible for administering and maintaining the Shareholders Register, Special Register, GMS, and Board of Directors meetings. This includes:

1. Creating, maintaining, and storing the Shareholders Register, Special Register, Minutes of GMS, Minutes of Directors' Meetings, and Minutes of Joint Meetings of Directors and Board of Commissioners.
2. Receiving, maintaining, and storing Minutes of Directors' Meetings and Minutes of Joint Meetings of Directors and Board of Commissioners.

Additionally, the Corporate Secretariat is responsible for managing the Company archives and organizing an introduction program for newly appointed Directors and/or members of the Board of Commissioners, as well as developing related work plans for induction programs.

### Obligations and Authorities of the Corporate Secretariat

The Corporate Secretariat has the following obligations:

1. Providing input to the Board of Directors regarding compliance with provisions related to the State-Owned Enterprise Law, Limited Liability Company Law, Capital Markets Law, government regulations, relevant ministerial/agency regulations, and implementing regulations.

2. Membantu dan memberikan saran kepada Direksi dalam pengambilan keputusan yang cepat, akurat, dan strategis.
3. Membuat dan/atau meneliti konsep surat keputusan/surat edaran Direksi baik untuk kepentingan internal dan eksternal.
4. Membangun citra positif Perseroan dengan membina hubungan yang baik dengan pihak luar Perseroan atau mengikuti pameran berkaitan dengan korporasi.
5. Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Direktur Utama.

Sementara itu, wewenang Sekretariat Perusahaan adalah:

1. Berhak meminta data/informasi dari masing-masing Bagian/Distrik/Kebun, yaitu data/informasi yang relevan untuk disampaikan dan dipublikasikan kepada pemangku kepentingan.
2. Menanggapi pertanyaan pemangku kepentingan sepanjang tidak ada pembatasan dari Direksi.

### Kegiatan Peningkatan Kompetensi Sekretaris Perusahaan

Sepanjang tahun 2023, Sekretaris Perusahaan mengikuti program pelatihan sebagai berikut:

No.	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Tempat Place	Lokasi Place
1.	7 Februari 2023 February 7, 2023	Pelatihan <i>Creating Share Value (CSV) and Social Return on Investment (SROI)</i> Creating Share Value (CSV) and Social Return on Investment (SROI) Training	Sei Karang	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
2.	11 Februari 2023 February 11, 2023	Pelatihan Pembuatan Legal Opinion Legal Opinion Making Training	Medan	Alsa Plus Mandiri
3.	13 Februari 2023 February 13, 2023	Lokakarya Larangan Persekongkolan dan Monopoli dalam Tender Workshop on Prohibition of Collusion and Monopoly in Tenders	Pusdiklat Kantor Medan Pusdiklat of Medan Office	Ikatan Ahli Pengadaan Indonesia Procurement Association of Indonesia
4.	5-6 Mei 2023 May 5-6, 2023	BUMN <i>Communications Week 2023 "Communications in Digital World"</i>	Bandung	Bandung
5.	5 Juni 2023 June 5, 2023	Pelatihan dan Sertifikasi Praktisi Hukum Perusahaan dan Hubungan Industrial Training and Certification of Corporate and Industrial Relations Law Practitioners	Medan	PT Justitia Global Mandiri
6.	31 Juni 2023 June 31, 2023	Pelatihan <i>Developing and Nurturing Collaborative Relationship</i> Developing and Nurturing Collaborative Relationship Training	Pusdiklat Kantor Medan Pusdiklat of Medan Office	LPP Agro Nusantara Medan
7.	16 Agustus 2023 August 16, 2023	Pelatihan ESG ESG Training	Jakarta	Hotel Royal Kuningan
8.	21 Agustus 2023 August 21, 2023	Pelatihan <i>Developing and Nurturing Innovative Problem Solving</i> Developing and Nurturing Innovative Problem-Solving Training	Medan	LPP Agro Nusantara Medan
9.	28 Agustus 2023 August 28, 2023	Pelatihan <i>Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization</i> Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Training	Pusdiklat Kantor Medan Pusdiklat of Medan Office	LPP Agro Nusantara Yogyakarta
10.	11 November 2023 November 11, 2023	Lokakarya Penguatan Kompetensi "Strategic Orientation and Driving Execution" "Strategic Orientation and Driving Execution" Competency Enhancement Workshop	Pusdiklat Kantor Medan Pusdiklat of Medan Office	LPP Agro Nusantara

2. Assisting and advising the Board of Directors in making fast, accurate, and strategic decisions.
3. Creating and/or researching draft decisions/circular letters from the Board of Directors for both internal and external purposes.
4. Building a positive image of the Company by establishing good relationships with parties outside the Company or participating in exhibitions related to the corporation.
5. Reporting the implementation of his duties to the Chief Executive Officer.

Meanwhile, the authority of the Corporate Secretariat includes:

1. The right to request data/information from each Section/District/Plant, namely relevant data/information to be submitted and published to stakeholders.
2. Responding to stakeholder questions as long as there are no restrictions from the Board of Directors.

### Corporate Secretary Competency Improvement Activities

Throughout 2023, the Corporate Secretary participated in the following training program:

No.	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Tempat Place	Lokasi Place
11.	21-22 November 2023 November 21-22, 2023	Lokakarya dengan tema "Cyber Security Awareness – Certified Secure Computer User (CSCU) V3" "Cyber Security Awareness – Certified Secure Computer User (CSCU) V3" Workshop	Online	Online
12.	23 November 2023 November 23, 2023	Bimbingan Teknis Aplikasi E-TSBLP E-TSBLP Application Technical Guidance	Pontianak	Hotel Mercure Pontianak
13.	5-7 Desember 2023 December 5-7, 2023	Pelatihan <i>Training of Trainer (ToT) Social Media Rangers</i> Training of Trainer (ToT) Social Media Rangers Training	Jakarta	BULOG Corporate University

### Pelaksanaan Tugas Sekretariat Perusahaan Tahun 2023

Selama tahun 2023, Sekretariat Perusahaan telah melaksanakan tugasnya antara lain sebagai berikut:

1. Menyusun Laporan Manajemen Perusahaan yang diterbitkan dan disampaikan kepada Pemegang Saham dan Dewan Komisaris. Laporan tersebut terdiri atas:
  - a. Laporan Manajemen Triwulan I tahun 2023
  - b. Laporan Manajemen Triwulan II tahun 2023
  - c. Laporan Manajemen Triwulan III tahun 2023
  - d. Laporan Manajemen Tahunan tahun 2023
2. Menyusun Laporan Tahunan 2022.
3. Melakukan koordinasi dan berperan sebagai penanggung jawab dalam *assessment* GCG.
4. Melakukan *monitoring* atas tindak lanjut keputusan RUPS tahun 2023; dan
5. Memberikan pelayanan data dan informasi kepada para pihak yang berkepentingan dengan Perseroan yaitu Pemegang Saham, Dewan Komisaris, Direksi, serta pihak ketiga lainnya.

### Evaluasi Kinerja Sekretariat Perusahaan

Kinerja Sekretariat Perusahaan dievaluasi dan diukur setiap triwulan berdasarkan sejumlah indikator KPI. Hal ini merupakan bentuk kontrak manajemen antara Kepala Bagian Sekretaris Perusahaan dan Direktur Utama. Evaluasi kinerja Sekretariat Perusahaan dilaporkan kepada Direktur Utama. Penilaian kerja Sekretariat Perusahaan dilakukan oleh Direktur Utama berdasarkan parameter kriteria Kelengkapan dan Pelaksanaan Tugas Sekretariat Perusahaan. Pada 2023, pencapaian tugas Sekretariat Perusahaan telah mencapai target Perseroan sesuai dengan rencana kerja yang disusun. Indikator Utama dalam KPI Sekretariat Perusahaan adalah sebagai berikut:

1. Indeks Kepuasan Pelayanan untuk Kantor Direksi/Distrik.
2. Persentase keberhasilan penyelesaian permasalahan.
3. Indeks kepuasan Direksi
4. Progres implementasi e-office

### Implementation of Corporate Secretariat Duties in 2023

During 2023, the Corporate Secretariat has carried out his duties, including the following:

1. Prepare a Company Management Report published and submitted to Shareholders and the Board of Commissioners. The report consists of:
  - a. 2023 First Quarter Management Report
  - b. 2023 Second Quarter Management Report
  - c. 2023 Third Quarter Management Report
  - d. Annual Management Report 2023
2. Prepare the 2022 Annual Report.
3. Coordinate and act as the person responsible for GCG assessment.
4. Monitoring the follow-up to the 2023 GMS decisions; and
5. Provide data and information services to parties interested in the Company, namely Shareholders, Board of Commissioners, Board of Directors, and other third parties.

### Evaluation of Corporate Secretariat Performance

The Corporate Secretariat's performance is evaluated quarterly based on several KPI indicators. This is a management contract between the Head of the Corporate Secretary Department and the Chief Executive Officer. Evaluation of the performance of the Corporate Secretariat is reported to the Chief Executive Officer. The Chief Executive Officer carries out the Corporate Secretariat's work assessment based on the criteria parameters for Completeness and Implementation of the Corporate Secretariat's Duties. In 2023, the Company's corporate Secretariat's duties were achieved following the work plan that had been prepared. The key indicators in the Corporate Secretariat KPI are as follows:

1. Service Satisfaction Index for Directors/District Offices.
2. Percentage of success in solving problems.
3. Board of Directors' satisfaction index
4. Progress of e-office implementation

Berdasarkan kriteria di atas, hasil pengukuran kinerja Sekretariat Perusahaan sebagai berikut:

Based on the criteria above, the results of measuring the performance of the Corporate Secretariat are as follows:

No.	Indikator Indicator	Satuan Unit	Target	Skor Score
1.	Indeks <i>Corporate Image</i> Corporate Image Index	indeks index	4,00	4,40
2.	Nilai GCG GCG Score	indeks index	92,06	92,43
3.	Persentase Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Direksi Tepat Waktu Percentage of Timely Coordination and Board of Directors Meetings	%	95,00	95,00
4.	Persentase Kolektibilitas Pengembalian Dana Program Kemitraan (PK) Collectibility Percentage of Partnership Program Funds Refund (PK)	%	50,00	50,00
5.	Capaian Penyaluran CSR CSR Distribution Achievements	%	100,00	100,00
6.	Ketepatan Waktu Review Perjanjian Timeliness of Agreement Review	Hari Days	6,00	6,00
7.	Persentase Penyelesaian Perizinan Perusahaan Sesuai SLA Percentage of the Company's Licensing Completion According to SLA	%	100,00	100,00
8.	Penurunan Kasus Litigasi dan Nonlitigasi Decrease in Litigation and Non-Litigation Cases	%	100,40	100,40
9.	Penyelesaian Sengketa Aset Assets Dispute Resolution	%	20,00	20,00
10.	Penyelesaian kajian opini legal secara tepat waktu Timely completion of legal opinion review	%	100,00	100,00

## Satuan Pengawas Internal

Sehubungan dengan penggabungan usaha yang terjadi pada Desember 2023, Bagian Satuan Pengawas Internal (SPI) yang ada di setiap Perkebunan Nusantara bergabung dalam Divisi SPI - PT Perkebunan Nusantara IV yang membawahi SPI yang berada di *Head Office* dan regional atau wilayah eks PT Perkebunan Nusantara yang dipimpin oleh Pengawas Wilayah.

### Struktur Organisasi SPI

Struktur Organisasi SPI ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. DPSB/SKPTS/18/XII/2023 tanggal 16 Desember 2023 tentang Struktur Organisasi PT Perkebunan Nusantara IV.

Kedudukan SPI berada di bawah Direktur Utama dan bertanggung jawab kepada Direktur Utama. Secara struktural, organisasi SPI terdiri dari:

- Kepala Divisi SPI
- Pengawas Wilayah
- Ketua TIM SPI
- Kepala Sub Bagian Manajemen Audit
- Asisten Auditor
- Asisten Manajemen Audit
- Asisten Monitoring Audit dan WBS

## Internal Supervisory Unit

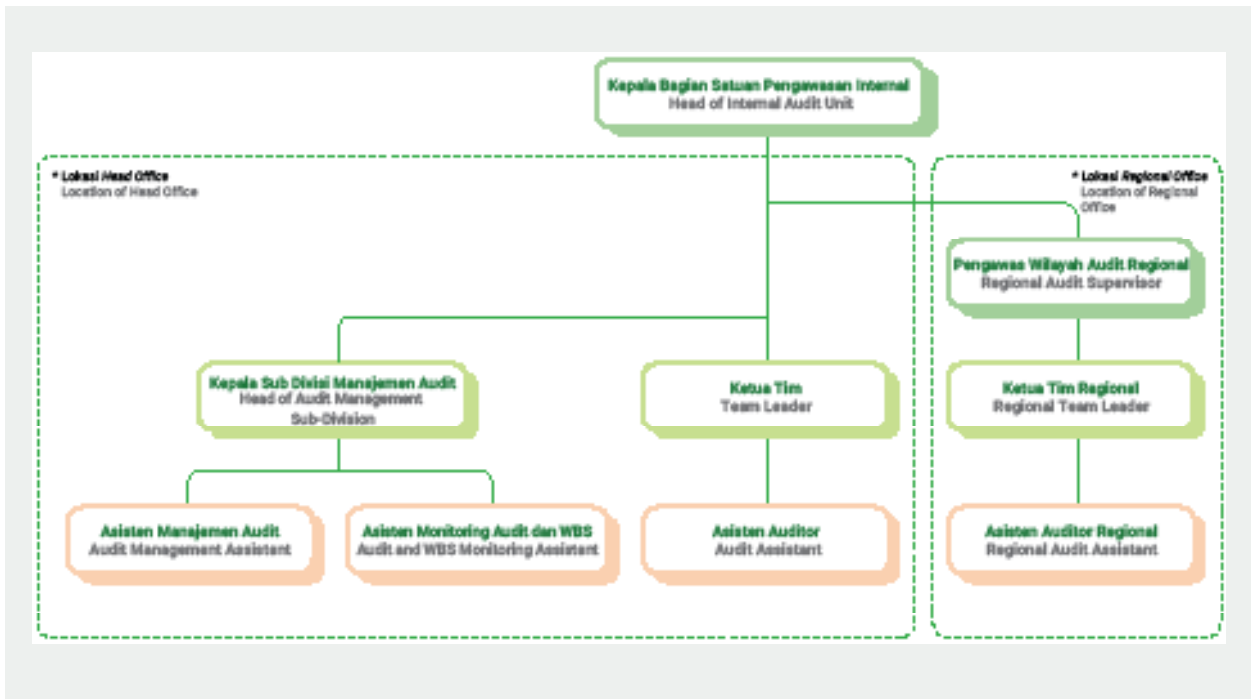
As a result of the merger that took place in December 2023, the Internal Supervisory Unit (SPI) Sections in each Perkebunan Nusantara were consolidated into the Internal Supervisory Unit Division of PT Perkebunan Nusantara IV. This division is responsible for supervising SPIs at the Head Office and regions, or former region of PT PT Perkebunan Nusantara, each led by a Regional Supervisor.

### Organization Structure of SPI

The organizational structure of the SPI at PT Perkebunan Nusantara IV is based on the Decree of the Board of Directors No. DPSB/SKPTS/18/XII/2023 dated December 16, 2023.

The SPI is positioned under the Chief Executive Officer and reports to the Chief Executive Officer. Structurally, the SPI organization consists of the following roles:

- Head of SPI Division
- Regional Supervisor
- Head of SPI Team
- Head of Audit Management Sub-Division
- Assistant Auditor
- Assistant Audit Management
- Assistant Audit Monitoring and WBS



## Visi dan Misi Bagian SPI

### Visi

PT Perkebunan Nusantara IV yang diakui dengan standar kelas dunia dalam hal tata kelola, risiko dan pengendalian (*governance, risk and control*) untuk mencapai kinerja prima perusahaan.

### Misi

Menjadi mitra utama/konsultan yang terpercaya bagi manajemen untuk meningkatkan dan melindungi nilai bisnis PT Perkebunan Nusantara IV dengan menyediakan jasa penjamin (*assurance*), pemberian saran (*advice*), pencerahan (*insight*), dan prediksi (*foresight*) serta antisipasi (*anticipate*) secara objektif yang berbasis manajemen risiko.

## Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Divisi SPI

Sesuai dengan Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023, dan Board Manual PT Perkebunan Nusantara IV tahun 2016 tentang Pedoman Tata Kerja Dewan Komisaris dan Direksi, proses pengangkatan dan pemberhentian Kepala Bagian SPI sepenuhnya menjadi kewenangan Direksi, dengan terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Komisaris. Saat ini, Kepala Bagian SPI Perseroan dijabat oleh Dhanny Hermawan berdasarkan Keputusan Direksi PTPN IV No. 04.07/Kpts/R/123/XI/2020 tanggal 23 November 2020. Pengangkatan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Direksi berdasarkan Surat Keputusan Direksi No. 04.07/Kpts/R/123/XI/2020 tanggal 23 November 2020 perihal Mutasi/Promosi Karyawan Golongan IIIA s/d IVD.

## Vision and Mission of SPI Unit

### Vision

PT Perkebunan Nusantara IV is known for its world-class standards of governance, risk, and control, which have enabled the company to achieve excellent performance.

### Mission

Our aim is to become a trusted main partner/consultant for management, helping to increase and protect PT Perkebunan Nusantara IV's business value. We will provide assurance, advice, insight, and foresight, as well as objective anticipation services based on risk management.

## Appointment and Dismissal of the Head of the SPI Unit

According to the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises No. PER-2/MBU/03/2023, and the Board Manual of PT Perkebunan Nusantara IV of 2016 regarding Guidelines for the Work Procedures of the Board of Commissioners and Directors, the process of appointing and dismissing the Head of the SPI Unit is entirely under the authority of the Board of Directors, with prior approval from the Board of Commissioners. Currently, Dhanny Hermawan holds the position of Head of the SPI Unit based on PTPN IV Directors' Decree No. 04.07/Kpts/R/123/XI/2020 dated November 23, 2020. This appointment has been approved by the Board of Directors based on Directors' Decree No. 04.07/Kpts/R/123/XI/2020 dated November 23, 2020 concerning Employee Transfers/Promotions from Classes IIIA to IVD.



**DHANNY  
HERMAWAN**  
Kepala Bagian SPI  
Head of the SPI Unit



Warga Negara Indonesia, lahir di Karawang pada 5 Januari 1979, berusia 44 tahun.  
Indonesian citizen, born in Karawang on January 5, 1979, 44 years old.

Beliau ditunjuk sebagai Kepala Bagian SPI berdasarkan Surat Keputusan Direksi PTPN IV No. 04.03/Sktps/R/86/2023 tanggal 1 Desember 2023.

Beliau meraih gelar Sarjana Sains pada 2001 dan Magister Sains pada 2007 dari Universitas Sumatra Utara.

Sebelumnya, beliau pernah berkarir sebagai PJ. Kepala Urusan Bagian Perencanaan (2015), PJ. Masinis Kepala PKS Timur (2016), Kepala Sub Bagian Sistem Manajemen Perkebunan Nusantara IV (2019), Kepala Bagian Perencanaan dan Sustainability (2020), dan Kepala Bagian Satuan Pengawas Intern PTPN IV (2021-sekarang).

### Tugas dan Tanggung Jawab

Dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawab, Divisi SPI memiliki tugas dan tanggung jawab sebagai berikut:

1. Menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) berbasis risiko dan/atau pendekatan risiko termasuk strategi, kebijakan, anggaran, dan lain-lain yang berkoordinasi dengan Komite Audit;
2. Memberikan keyakinan bahwa pertimbangan profesional digunakan dalam perencanaan audit, pelaksanaan audit, dan pelaporan hasil audit;
3. Menyediakan personil yang mempunyai kompetensi profesional dan secara kolektif mempunyai keahlian dan pengetahuan yang memadai;
4. Menjaga data dan informasi selama melaksanakan audit dan tidak boleh menggunakan informasi tersebut di luar pelaksanaan audit, kecuali ditentukan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau putusan pengadilan;
5. Memberikan analisis, penilaian, rekomendasi, konsultasi, dan informasi mengenai aktivitas yang diperiksa sesuai dengan standar audit;
6. Menyampaikan usulan rekomendasi atas hasil audit yang disetujui Direktur Utama untuk ditindaklanjuti oleh auditee;
7. Bertanggung jawab atas mutu hasil audit atau penilaian/evaluasi yang dikemukakan dalam laporan;
8. Menyusun Rencana Jangka Panjang Unit Audit Internal guna mendukung Rencana Jangka Panjang Perusahaan;
9. Melakukan koordinasi dengan Dewan Komisaris melalui Komite Audit terhadap Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) Unit Audit Internal PT Perkebunan Nusantara IV;

He was appointed as Head of the SPI Unit based on the Decree of the Board of Directors of PTPN IV No. 04.03/Sktps/R/86/2023 dated on December 1, 2023.

He obtained a Bachelor of Science degree in 2001 and a Master of Science degree in 2007 from the University of North Sumatra.

Prior to his current role, he held the positions of PJ. Head of Planning Affairs (2015), PJ. Head Machinist of East PKS (2016), Head of Nusantara IV Plantation Management System Sub-Division (2019), Head of Planning and Sustainability Section (2020), and Head of PTPN IV Internal Supervisory Unit (2021-present).

### Duties and Responsibilities

In carrying out its duties and responsibilities, the SPI Division is responsible for the following:

1. Preparing a risk-based Annual Audit Plan (PKPT) and/or risk approach, including strategy, policy, and budget, in coordination with the Audit Committee;
2. Ensuring professional judgment is used in audit planning, implementation, and reporting of audit results.
3. Providing personnel with professional competence and adequate expertise and knowledge;
4. Maintaining the privacy of data and information obtained during audits and must not use such information outside audits, unless statutory provisions and/or court decisions require otherwise;
5. Offering analysis, assessment, recommendations, consultation, and information regarding audited activities in line with audit standards;
6. Submitting proposed recommendations on audit results approved by the Chief Executive Officer for follow-up by the auditee;
7. Maintaining the quality of audit or assessment/evaluation results presented in the report;
8. Preparing a Long-Term Plan for the Internal Audit Unit to support the company's Long-Term Plan;
9. Coordinating with the Board of Commissioners through the Audit Committee on the Annual Audit Plan (PKPT) of the Internal Audit Unit of PT Perkebunan Nusantara IV;

10. Melaporkan seluruh hasil kegiatan pengawasan (LHA) langsung kepada Direktur Utama dan memberikan tembusan kepada Dewan Komisaris melalui Komite Audit;
  11. Memantau, menganalisa, melaporkan dan mendorong pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi audit atas Laporan Hasil Audit (LHA) yang diterbitkan oleh Unit Audit Internal maupun laporan yang diterbitkan oleh Auditor Eksternal pada perusahaan maupun anak perusahaan dan/atau Unit Kerja Sama Operasional (KSO);
  12. Memberikan konsultasi atas permintaan manajemen mengenai upaya peningkatan efektivitas pengendalian intern, peningkatan efisiensi, efektivitas rencana strategis, manajemen risiko, dan kegiatan lain terkait dengan peningkatan kinerja perusahaan;
  13. Menjaga independensi, integritas, dan objektivitas serta bertindak secara profesional seperti yang dipersyaratkan dalam standar profesi auditor internal termasuk menjamin tidak terdapat benturan kepentingan antara Auditor Internal dengan Auditee dan kegiatan yang diaudit;
  14. Memberikan konsultasi dan keyakinan terhadap hal yang bersifat strategis baik pada saat perencanaan maupun pada saat pelaksanaan kegiatan operasional;
  15. Memastikan pelaksanaan pengawasan intern sesuai dengan rencana;
  16. Melaporkan temuan yang signifikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris, memantau tindakan perbaikan, dan melaporkan hasil pemantauan tindak lanjut perbaikan kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris;
  17. Menjaga informasi rahasia yang diperoleh sewaktu menjabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  18. Memastikan terselenggaranya transfer pengetahuan dalam hal terdapat penggunaan jasa pihak eksternal untuk aktivitas pengawasan internal, mewajibkan pihak eksternal mematuhi Piagam Audit Internal PT Perkebunan Nusantara IV, tanpa adanya pengaruh independensi dan objektivitas fungsi Audit Internal; dan
  19. Melakukan evaluasi atas efektivitas pelaksanaan pengendalian internal, manajemen risiko, dan proses tata kelola perusahaan, sesuai dengan standar IIA, peraturan perundang-undangan dan kebijakan Perseroan.
10. Reporting all results of supervisory activities (LHA) directly to the Chief Executive Officer and providing a copy to the Board of Commissioners through the Audit Committee;
  11. Monitoring, analyzing, reporting, and encouraging the implementation of follow-up audit recommendations on Audit Result Reports (LHA) issued by the Internal Audit Unit, as well as reports issued by External Auditors at the company or subsidiaries and/or Operational Cooperation Units (KSO);
  12. Providing consultation at management's request regarding efforts to increase the effectiveness of internal control, efficiency, strategic plans, risk management, and other activities related to improving company performance.
  13. Maintaining independence, integrity, and objectivity and acting professionally as required by the internal auditor professional standards, including ensuring no conflict of interest between the Internal Auditor and the Auditee and the activities being audited.
  14. Offering consultation and confidence on strategic matters during planning and the implementation of operational activities;
  15. Ensuring that the implementation of internal supervision is in accordance with the plan;
  16. Reporting significant findings to the Chief Executive Officer and the Board of Commissioners, monitoring corrective actions, and reporting the results of monitoring follow-up improvements to the Chief Executive Officer and the Board of Commissioners;
  17. Maintaining confidential information obtained while in office in accordance with statutory provisions;
  18. Ensuring the implementation of knowledge transfer in the event that there is use of external party services for internal monitoring activities, requiring external parties to comply with the PT Perkebunan Nusantara IV Internal Audit Charter, without affecting the independence and objectivity of the Internal Audit function; and
  19. Evaluating the effectiveness of the implementation of internal control, risk management, and corporate governance processes, in accordance with IIA standards, laws, and regulations, and the Company's policies.

#### Jumlah Personil Total Personnel

No.	Uraian Description	Jumlah (Orang) Total (People)
<b>Karyawan Pimpinan</b> Leadership Employees		
1.	Kepala Divisi Division Head	1
2.	Pengawas Wilayah Area Supervisor	2
3.	Ketua Tim SPI Head of SPI Team	21
4.	Asisten Auditor Auditor Assistant	37
5.	Kepala Sub Divisi Manajemen Audit Head of Sub-Division Audit Management	1

No.	Uraian Description	Jumlah (Orang) Total (People)
6.	Asisten Manajemen Audit Assistant of Sub Division Audit Management	2
7.	Asisten Monitoring Audit dan WBS Audit Monitoring and WBS Assistant	-
<b>Karyawan Pelaksana</b> Managing Employees		
8.	Krani Krani	17
9.	Tenaga Alih Daya Outsourcing	1
<b>Jumlah Total</b>		<b>82</b>

### Kompetensi dan Kualifikasi Competency and Qualifications

Bidang Kompetensi Competency Field	Jumlah Total	Jenjang Pendidikan Education Level				Sertifikasi Auditor Auditor Certification		
		S2	S1	D3	SMA	QIA	CIAE	QRMO
Tanaman Plant	21	1	19	1	-	21	1	5
Teknik & Pengolahan Engineering & Processing	22	1	21	-	-	18	1	5
Administrasi, Keuangan, dan Umum Administrative, Financial, and General	21	5	15	-	1	16	4	4
<b>Jumlah Total</b>	<b>64</b>	<b>7</b>	<b>55</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>55</b>	<b>6</b>	<b>14</b>

No.	Jenis Sertifikasi Type of Certification	Jumlah Total
<b>Sertifikasi Auditor Internal</b> Internal Auditor Certification		
<b>Sertifikasi QIA (YPIA – DS QIA)</b> QIA Certification (YPIA – DS QIA)		
1.	Tingkat Dasar Basic Level	23
2.	Tingkat Lanjutan Advanced Level	22
3.	Tingkat Manajerial Managerial Level	20
4.	Pengukuhan Wisudawan <i>Qualified Internal Auditor (QIA)</i> Inauguration of Qualified Internal Auditor (QIA) Graduates	6
5.	Seminar Nasional Internal Audit National Seminar on Internal Audit	2
<b>Sertifikasi Lainnya</b> Other Certifications		
1.	<i>Certified Internal Audit Executive (CIAE) BPKP</i>	3
2.	<i>Certified Risk Management Analyst (QRMA)</i>	1
3.	<i>Certified Information System Auditor (CISA)</i>	1
4.	<i>Certified Internal Auditor (CIA)</i>	1
<b>Pendidikan Berkesinambungan (Seminar dan Lokakarya)</b> Continuous Education (Seminar & Workshop)		
1.	Konferensi Auditor Internal dengan tema " <i>Building Resilience in Tuna World: Control Your Future or Someone Else Will</i> " Internal Auditor Conference with theme " <i>Building Resilience in Tuna World: Control Your Future or Someone Else Will</i> "	2





No.	Jenis Sertifikasi Type of Certification	Jumlah Total
2.	Program GRC Masterclass Tahun 2023: ESG for Auditor 2023 GRC Masterclass Program: ESG for Auditor	9
3.	Webinar "Temukan Potensimu Dengan Talent DNA dan Cerahkan Masa Depan" "Temukan Potensimu Dengan Talent DNA dan Cerahkan Masa Depan" Webinar	2
4.	Webinar dengan tema "Living Integrity" "Living Integrity" Webinar	4
5.	Corporate Culture Agent (CCA)	1
6.	BSE-GRC Masterclass-Risk Management Effectiveness Evaluation	8
7.	BSE-GRC Masterclass-Introduction to ESG & IFC	1
8.	BLMI GRC Masterclass-Pre IPO & Post IPO	1
9.	Change Agent: Don't Let Toxic Employee Hurt Your Corporate Culture	5
10.	Webinar "Strategic Management in Practices" "Strategic Management in Practices" Webinar	1
11.	Seminar "Staying Relevant in a Changing World: Better and Stronger IA for Effective National Development Risk Management" "Staying Relevant in a Changing World: Better and Stronger IA for Effective National Development Risk Management" Seminar	1
12.	Refreshment Training SMART	22
13.	Finance for Non-Finance in Agro Industry	3
14.	Teknik Inventarisasi Pergudangan Warehouse Inventory Techniques	8
15.	Plantation Leadership Development Program (PLDP) Tahap I Plantation Leadership Development Program (PLDP) Phase I	1
16.	Plantation Leadership Development Program (PLDP) Tahap II Plantation Leadership Development Program (PLDP) Phase II	1
17.	GRC Masterclass Program 2023	21
18.	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA), Yogyakarta 5-6 Juli 2023 Internal Audit National Seminar (SNIA), Yogyakarta, July 5-6, 2023	15
19.	Financial Strategy for Non-Finance	1
20.	Building Skills and Coaching Mindset (online)	15
21.	Excellent Public Speaking Skills	1
22.	Seminar Nasional Internal Audit (SNIA), Bali 6-7 Desember 2023 Internal Audit National Seminar (SNIA), Bali, December 6-7, 2023	6
23.	Refreshment Training Penggunaan Aplikasi SMART PTPN Group Refreshment Training of SMART Application Usage of PTPN Group	3
24.	Coaching for Unleash Potential to Increase Performance	1
25.	Strategy Camp for Strategist	1
26.	Finance for Non-Finance in Agro Industry	1
27.	Innovation Roadmap & Innovation Assessment	1
28.	Team Collaboration & Communication Skill	3
29.	What is a True Transformational Leader	2
30.	HR for non-HR in Competitive Business Organization	1
31.	Strategic Leadership	1
32.	Awareness ISO 37001:2016	3
33.	Penyusunan Laporan Efektif untuk Auditor Formulating Effective Report for Auditor	2
34.	Strategic Transformation Officer (STO)	1
35.	Pelatihan GCG GCG Training	1
36.	Pelatihan Pengadaan Barang dan Jasa Procurement of Goods and Services Training	3
37.	Pelatihan Integritas dan Anti Korupsi SPI BUMN Tahun 2022 Integrity and Anti-Corruption Training for SPI SOE in 2022	2

## Kode Etik Auditor SPI

Kode Etik adalah prinsip-prinsip yang relevan terhadap profesi audit internal, serta aturan perilaku yang menjelaskan perilaku yang diharapkan dari seorang auditor internal. Kode etik berlaku bagi pihak-pihak dan lembaga yang memberikan jasa audit internal. Kode etik bertujuan untuk mengembangkan budaya etis dalam profesi audit internal secara global. Auditor Unit Audit Internal PT Perkebunan Nusantara IV wajib memiliki Kode Etik sebagai berikut:

<b>Integritas</b> Integrity	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan pekerjaan dengan jujur, hati-hati, tekun dan bertanggung jawab.</li> <li>2. Menaati hukum dan membuat pengungkapan yang disyaratkan oleh hukum maupun profesi.</li> <li>3. Tidak dengan sengaja menjadi bagian dari aktivitas ilegal apapun atau melakukan kegiatan yang dapat mendiskreditkan profesi auditor dan perusahaan.</li> <li>4. Menghormati dan memberikan kontribusi bagi tujuan yang sah dan etis bagi Perusahaan.</li> <li>5. Tidak menerima imbalan/suap atau gratifikasi dalam bentuk apapun dari auditan, karyawan, mitra bisnis perusahaan, atau pihak manapun, terkait dengan kegiatan audit yang dapat mengganggu atau dianggap mengganggu pertimbangan profesionalnya.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Carry out work honestly, carefully, diligently, and responsibly.</li> <li>2. Comply with the law and make disclosures required by law and the profession.</li> <li>3. Not intentionally become part of any illegal activity or carry out activities that may discredit the audit profession and the Company.</li> <li>4. Respect and contribute to the legitimate and ethical goals of the company.</li> <li>5. Not accept any reward, bribe, or gratuity in any form from auditees, employees, business partners of the company, or any party related to audit activities that may interfere or be considered to interfere with their professional judgment.</li> </ol>
<b>Objektivitas</b> Objectivity	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tidak berpartisipasi dalam kegiatan/hubungan apapun yang dapat, atau patut diduga dapat, menghalangi penilaian yang adil dari auditor, termasuk kegiatan/hubungan apapun yang mengakibatkan timbulnya pertentangan kepentingan dengan Perusahaan.</li> <li>2. Melaporkan semua hasil audit yang bersifat material dengan mengungkapkan kebenaran sesuai fakta materiel yang diketahui dan tidak menyembunyikan hal-hal yang jika tidak diungkap dapat:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• Merugikan perusahaan;</li> <li>• Mendistorsi laporan atas kegiatan yang diaudit; dan</li> <li>• Menutupi praktik-praktik yang melanggar hukum;</li> </ul> </li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Do not engage in any activity or relationship that could hinder the auditor's fair assessment. This includes any activity or relationship that may result in a conflict of interest with the Company.</li> <li>2. Report all significant audit findings by truthfully disclosing known material facts. Do not conceal matters that, if left undisclosed, could:                         <ul style="list-style-type: none"> <li>• Harm the company;</li> <li>• Distort the report on audited activities; and</li> <li>• Cover up unlawful practices.</li> </ul> </li> </ol>
<b>Kerahasiaan</b> Confidentiality	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Berhati-hati dalam menggunakan dan menjaga informasi yang diperoleh selama melakukan tugas.</li> <li>2. Tidak boleh menggunakan informasi yang diperoleh untuk mencari keuntungan pribadi, atau dalam cara apapun, yang bertentangan dengan hukum atau merugikan tujuan Perusahaan yang sah dan etis.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Use and maintain information obtained during the performance of duties with care.</li> <li>2. Do not use information obtained for personal gain or in any way that is contrary to law or detrimental to the legitimate and ethical objectives of the Company.</li> </ol>
<b>Kompetensi</b> Competency	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan penugasan berdasarkan pengetahuan, keahlian, dan pengalaman yang dimiliki dengan penuh tanggung jawab.</li> <li>2. Menjalankan penugasan sesuai dengan standar praktik profesional audit internal.</li> <li>3. Meningkatkan keahlian maupun efektivitas serta kualitas audit secara berkelanjutan.</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Execute assignments with full responsibility based on knowledge, expertise, and experience.</li> <li>2. Perform assignments in accordance with internal audit professional practice standards.</li> <li>3. Continuously enhance expertise, effectiveness, and audit quality.</li> </ol>

## SPI Auditor Code of Ethics

The Code of Ethics outlines the principles and rules of conduct for the internal audit profession, defining the expected behavior of internal auditors. It applies to all individuals and organizations providing internal audit services, with the goal of fostering an ethical culture within the global internal audit profession. The Internal Audit Unit Auditors of PT Perkebunan Nusantara IV must adhere to the following Code of Ethics:

## Laporan Pelaksanaan Kegiatan Audit Internal Tahun 2023

Audit yang telah dilaksanakan hingga Desember 2023 mengacu kepada Program Kerja Pemeriksaan Tahunan (PKPT) tahun 2023 yaitu Audit Rutin, Audit dengan Tujuan Tertentu, Audit Mandatory, Audit Tematik atas kegiatan investasi tanaman dan non tanaman, Audit Serah Terima Jabatan, Audit KSO, serta Audit *Consulting* dengan capaian 134,09%.

## 2023 Internal Audit Activity Implementation Report

The audits conducted until December 2023 are based on the 2023 Annual Audit Work Program (PKPT). They include Routine Audits, Audits with Specific Purposes, Mandatory Audits, Thematic Audits of plant and non-plant investment activities, Job Handover Audits, KSO Audits, and Consulting Audits, with an achievement rate of 134.09%.

Uraian Description	PKPT (LHA)	Realisasi Realization
	Hingga Desember 2023 Until December 2023	Hingga Desember 2023 Until December 2023
Audit Rutin Routine Audits	237	229
Audit dengan Tujuan Tertentu Purposeful Audits	7	36
<b>Audit Mandatory</b> Mandatory Audits	3	3
Audit tematik atas kegiatan investasi tanaman dan non tanaman - Pelaksanaan Pekerjaan Tanaman Ulang Tahun 2023 - Evaluasi Kerugian Anak Perusahaan (PTPN VIII, PT INL, PT SPMN) - Pembelian TBS Pihak III - Kinerja Tanaman Karet Thematic audit of plant and non-plant investment activities - Implementation of the 2023 Anniversary Plant Work - Evaluation of Subsidiary Losses (PTPN VIII, PT INL, PT SPMN) - Purchase of Third-Party FFB - Rubber Plant Performance	1 2 - -	13 3 9 10
Audit Serah Terima Jabatan atas permintaan manajemen Handover Audit at management's request	-	17
Audit KSO	13	13
Audit Consulting	1	21
<b>Jumlah</b> Total	<b>264</b>	<b>354</b>

## Akuntan Publik

Dalam rangka menjaga independensi dalam aspek keuangan, Perseroan menunjuk Kantor Akuntan Publik (KAP) sebagai auditor eksternal untuk memastikan bahwa pencatatan akuntansi Perseroan yang disusun sesuai dengan ketentuan Pernyataan Standar Akuntansi dan Keuangan (PSAK) dan menyajikan laporan keuangan secara wajar.

Akuntan publik berfungsi untuk memberikan opini terkait kesesuaian penyajian laporan keuangan Perseroan terhadap Standar Akuntansi Keuangan (SAK) yang berlaku di Indonesia. Menindaklanjuti hasil keputusan RUPS tahun buku 2023, Dewan Komisaris menetapkan KAP Purwanto, Sungkoro, & Surja sebagai auditor eksternal dalam melakukan pemeriksaan Laporan Keuangan Perseroan dan laporan lainnya tahun buku 2023.

Selama tahun buku 2023, KAP juga memberikan jasa lain selain lingkup audit sebagaimana tersebut di atas, yaitu jasa Review Properti Investasi dan Aset Biologis dan Jasa Review Implementasi SAP.

Jumlah periode KAP dan Akuntan Publik yang ditunjuk untuk mengaudit laporan keuangan Perseroan telah memenuhi ketentuan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 17/PMK.01/2008 tanggal 5 Februari 2008 tentang Jasa Akuntan Publik Pasal 3 ayat 1. Pemberian jasa general audit atas laporan keuangan dilakukan oleh KAP paling lama 6 (enam) tahun buku berturut-turut.

## Public Accountant

To maintain its independence in financial aspects, the Company appoints a Public Accounting Firm (KAP) as an external auditor to ensure that the Company's accounting records are in line with the provisions of the Statement of Accounting and Financial Standards (PSAK) and present financial reports fairly.

Public accountants provide opinions on the appropriateness of the presentation of the company's financial reports based on the Financial Accounting Standards (SAK) applicable in Indonesia. Following the decision made during the GMS for the 2023 financial year, the Board of Commissioners appointed KAP Purwanto, Sungkoro, & Surja as external auditors to examine the company's Financial Report and other reports for the 2023 financial year.

During the 2023 financial year, KAP also provided other services alongside the audit scope. These services included Investment Property and Biological Asset Review services, as well as SAP Implementation Review Services.

The number of KAP and Public Accountant periods appointed to audit the company's financial statements complies with the provisions of Decree of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 17/PMK.01/2008 dated February 5, 2008 concerning Public Accounting Services Article 3 paragraph 1. According to the provision, general audit services for financial reports can be carried out by KAP for a maximum of 6 (six) consecutive financial years.

Tahun Buku Financial Year	KAP Public Accounting Firm	Akuntan Publik Public Accountant	Fee Audit (Rp) Audit Fee (Rp)
2023	Purwantonono, Sungkoro & Surja, Ernst & Young	Damestar Hutagalung	14.354.500.000
2022	Purwantonono, Sungkoro & Surja, Ernst & Young	Damestar Hutagalung	1.887.000.000

## Hasil Audit

Hasil pemeriksaan yang telah dilakukan oleh KAP disampaikan dalam bentuk opini Laporan Keuangan. Untuk tahun buku 2023, Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan memperoleh opini Wajar tanpa Pengecualian (WTP). Hal ini menunjukkan bahwa Perseroan telah menyajikan Laporan Keuangan Konsolidasian secara akurat sesuai standar yang berlaku serta lepas dari salah saji yang material.

## Manajemen Risiko

Manajemen risiko adalah proses mengidentifikasi, menganalisis, mengevaluasi, dan mengkaji ulang risiko perusahaan agar seluruh risiko yang terkait dengan perusahaan dapat dikelola dan dimitigasi dengan efektif. Manajemen risiko yang adaptif dan solutif memungkinkan Perseroan untuk melindungi dirinya dari dampak risiko yang signifikan.

Perseroan menerapkan sistem manajemen risiko sesuai Peraturan Menteri BUMN No. PER-2/MBU/03/2023. Perseroan menyadari bahwa jalannya operasional Perseroan tidak terlepas dari berbagai risiko, baik yang berada di bawah maupun di luar kendalinya. Oleh sebab itu, seluruh risiko, baik yang belum dan berpotensi terjadi, harus dipetakan dan dikelola secara optimal. Seiring dengan perancangan Sistem Manajemen Terpadu Perseroan, sistem manajemen risiko Perseroan mulai beradaptasi dari COSO *Enterprise Risk Management – Integrated Framework* ke ISO 31000 (2009).

Berdasarkan Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara, Bab III Penerapan Manajemen Risiko Badan Usaha Milik Negara pasal 46, Perseroan menerapkan hal-hal sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Risiko pada Perseroan bertujuan untuk melindungi dan menciptakan nilai bagi BUMN.
2. Manajemen risiko pada Perusahaan sebagaimana dimaksud pada poin 1 meliputi:
  - a. Kebijakan Manajemen Risiko;
  - b. Perencanaan, penerapan, pemantauan dan evaluasi manajemen risiko; dan
  - c. Pelaporan Manajemen Risiko.

## Audit Result

The KAP's audit results are presented in the form of a financial report opinion. For the 2023 financial year, the Company's Consolidated Financial Statements received an Unqualified Opinion (WTP). This indicates that the Company has accurately presented the Consolidated Financial Statements in line with applicable standards and there are no material misstatements.

## Risk Management

Risk management is the process of identifying, analyzing, evaluating, and reviewing company risks so that all risks related to the company can be managed and mitigated effectively. Adaptive and solution-oriented risk management enables the company to protect itself from significant risk impacts.

The Company implements a risk management system in accordance with BUMN Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023. The Company is aware that its operations are inseparable from various risks, both under and outside its control. Therefore, all risks, both those that have not yet occurred and those that have the potential to occur, must be mapped and managed optimally. Along with the design of the Company's Integrated Management System, the Company's risk management system began to adapt from COSO Enterprise Risk Management – Integrated Framework to ISO 31000 (2009).

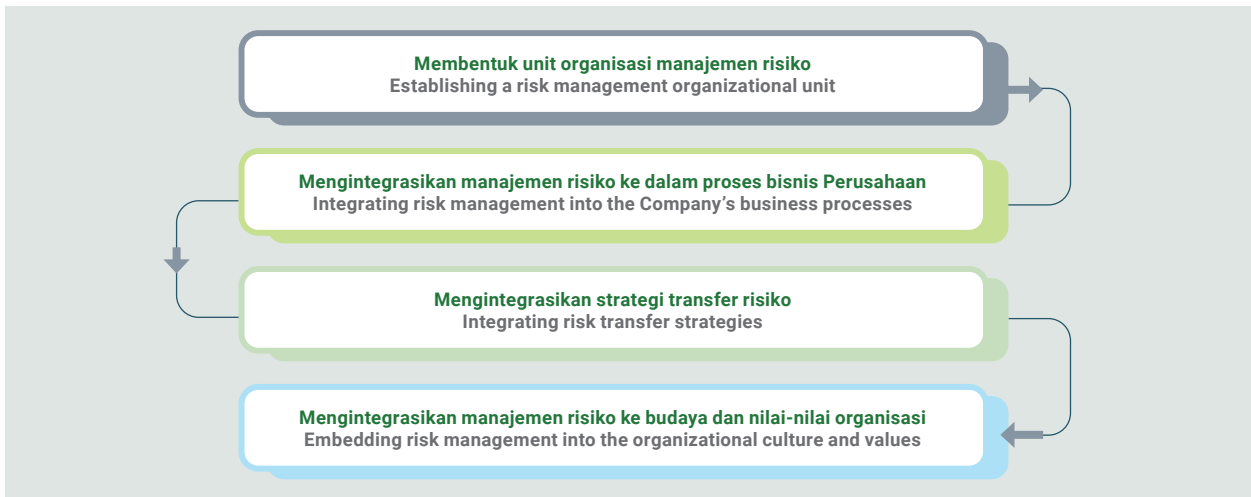
Based on the Regulation of the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia No. PER-2/MBU/03/2023 concerning Guidelines for Governance and Significant Corporate Activities of State-Owned Enterprises, Chapter III Implementation of State-Owned Enterprise Risk Management, Article 46, the Company implements the following:

1. The implementation of Risk Management in the Company aims to protect and create value for BUMN.
2. Risk management in the Company, as referred to in point 1, includes:
  - a. Risk Management Policy;
  - b. Planning, implementation, monitoring, and evaluation of risk management; and
  - c. Risk Management Reporting.

Dalam pelaksanaannya, Direktur Utama membawahi Direktur Keuangan & Manajemen Risiko, kemudian Divisi Perbendaharaan Anggaran dan Manajemen Risiko. Sebagai penanggungjawab utama, tugas Direktur Utama adalah menerapkan manajemen risiko pada Perseroan. Sementara itu, Dewan Komisaris sebagai Pengawas Tertinggi, senantiasa melakukan pengawasan terhadap penerapan manajemen risiko pada Perseroan.

In its implementation, the Chief Executive Officer is in charge of the Chief Financial & Risk Management Officer, then the Treasury Budget and Risk Management Division. As the main person in charge, the Chief Executive Officer's task is implementing risk management in the Company. Meanwhile, the Board of Commissioners, as the highest supervisor, always supervises the implementation of risk management in the Company.

### Strategi Penerapan Manajemen Risiko Risk Management Implementation Strategy



### Struktur Organisasi Manajemen Risiko Company Risk Management Structure





## Pengembangan Kompetensi dan Sosialisasi Manajemen Risiko

Untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan manajemen risiko, Perseroan memfasilitasi pelatihan dan pengembangan kompetensi kepada personil yang membidangi manajemen risiko sebagai berikut:

## Competency Development and Risk Management Socialization

To improve the quality of risk management implementation, the Company facilitates training and competency development for personnel in charge of risk management as follows:

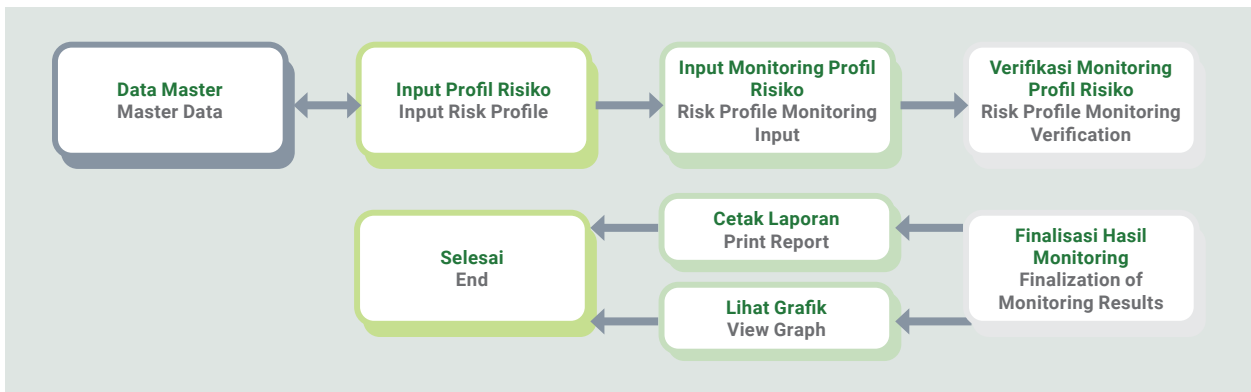
No.	Tanggal Date	Kegiatan Activity	Tempat Place	Lokasi Location
1.	7-10 Februari 2023 February 7-10, 2023	Qualified Risk Management Analyst (QRMA) – Regional 3	Online	Online
2.	8 Februari 2023 February 8, 2023	Diklat dan Sertifikasi Manajemen Risiko Qualified Risk Management Analyst (QRMA) – Regional 5 Risk Management Training and Certification of Qualified Risk Management Analyst (QRMA) – Regional 5	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) The Center for Development of Accounting and Finance	Yogyakarta
3.	8 Mei 2023 May 8, 2023	Pelatihan Manajemen Risiko Menengah melalui Agro Wallet – Regional 2 Middle Risk Management Training through Agro Wallet – Regional 2	PT LPP Agro Nusantara	Yogyakarta
4.	8 Mei 2023 May 8, 2023	Pelatihan Manajemen Risiko (QRMO) - Regional 4 Risk Management Training QRMO) - Regional 4	PT LPP Agro Nusantara	Jogjakarta
5.	8 Mei 2023 May 8, 2023	Pelatihan Manajemen Risiko Menengah – Regional 3 Middle Risk Management Training – Regional 3	LPP Agro Nusantara	Yogyakarta
6.	15-17 Mei 2023 May 15-17, 2023	Pelatihan Manajemen Risiko (QRMO) - Regional 4 Risk Management Training QRMO) - Regional 4	WAY Academy	Jakarta Selatan South Jakarta
7.	5 Juni 2023 June 5, 2023	Qualified Risk Management Officer - Regional 4	WAY Academy	Jakarta Selatan South Jakarta
8.	4 Agustus 2023 August 4, 2023	Pendidikan dan Pelatihan Qualified Risk Management Analyst (QRMA) – Regional 5 Qualified Risk Management Analyst (QRMA) Training and Education – Regional 5	Pusat Pengembangan Akuntansi dan Keuangan (PPA&K) The Center for Development of Accounting and Finance	Online
9.	8 Agustus 2023 August 8, 2023	Empowering Risk Owner for Successful Risk Management in Organization Batch 2 – Regional 5	PT LPP Agro Nusantara	Yogyakarta
10.	10 Agustus 2023 August 10, 2023	Risk Control Self-Assessment (RCSA) – Regional 2	PT Cipta Karya Mekar Sahitya	Online - Zoom
11.	14-15 Agustus 2023 August 14-15, 2023	Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 1 – Regional 1 & 3	PT LPP Agro Nusantara	Yogyakarta
12.	22-23 Agustus 2023 August 22-23, 2023	Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 2 – Regional 1 & 3	PT LPP Agro Nusantara	Yogyakarta
13.	24-25 Agustus 2023 August 24-25, 2023	Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 3 – Regional 1 & 3	PT LPP Agro Nusantara	Yogyakarta
14.	28-29 Agustus 2023 August 28-29, 2023	Empowering Risk Owner for Successful Risk Management Implementation in Organization Batch 4 – Regional 1, 3, 4	PT LPP Agro Nusantara	Yogyakarta
15.	28 Agustus 2023 August 28, 2023	Qualified Risk Management Officer (QRMO) - Regional 4	WAY Academy	Jakarta Selatan South Jakarta
16.	2 September 2023 September 2, 2023	Certified Risk Professional (CRP) – Regional 2	Tap Kapital Indonesia	Online - Zoom
17.	7 September 2023 September 7, 2023	Risk Management Effectiveness Evaluation – Regional 1	BLMI	Jakarta
18.	13-15 September 2023 September 13-15, 2023	Pelatihan Manajemen Risiko Menengah – Regional 1 Middle Risk Management Training – Regional 1	PT LPP Agro Nusantara	Medan
19.	16 November 2023 November 16, 2023	Sertifikasi Manajemen Risiko Certified Risk Professional – Regional 5 Risk Management Certification of Certified Risk Professional – Regional 5	PT LPP Agro Nusantara	Yogyakarta
20.	4 Desember 2023 December 4, 2023	Pelatihan dan Sertifikasi Qualified Risk Management Professional (QRMP) – Regional 5 Qualified Risk Management Professional (QRMP) Training and Certification – Regional 5	PPM Manajemen	Jakarta
21.	5 Desember 2023 December 5, 2023	Seminar “Staying Relevant in a Changing World: Better and Stronger IA for Effective National Development Risk Management”	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP)	Jakarta
22.	19-21 Desember 2023 December 19-21, 2023	Refreshment Peran Risk Owner & Second Line dari Konteks Three Lines of Defence Model serta Evaluasi Implementasi Per-2/MBU/03/2023 - Regional 4 Refreshment of the Role of Risk Owner & Second Line from the Three Lines of Defense Model Context and Evaluation of the Implementation of Per-2/MBU/03/2023 - Regional 4	PT LPP Agro Nusantara	Padang

### Integrasi Manajemen Risiko dengan Simako (Sistem Manajemen Risiko)

SIMAKO adalah sistem aplikasi dengan database terpusat untuk mengintegrasikan proses manajemen risiko di PTPN Group mulai dari operasional manajemen data risiko, proses *monitoring* dan pelaporan data risiko, hingga strategi mitigasi yang dapat diakses dengan berbagai peralatan TI. Sebagai anak perusahaan dari PTPN Group, Perseroan telah mengaplikasikan SIMAKO sejak 2019.

### Risk Management Integration with Simako (Risk Management System)

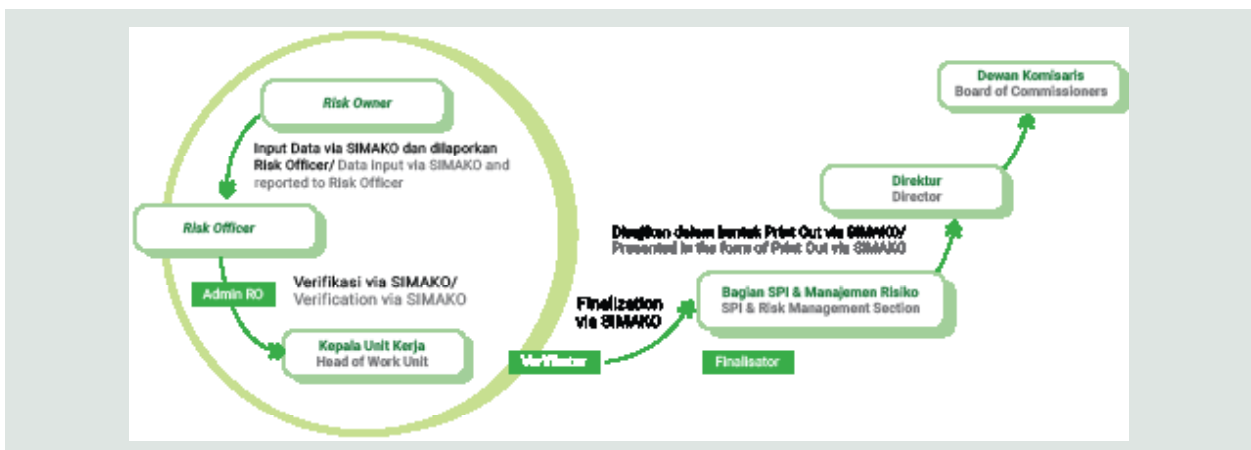
SIMAKO is an application system with a centralized database that integrates risk management processes within the PTPN Group. This includes managing operational risk data, monitoring and reporting on risk data, and accessing mitigation strategies using various IT equipment. The Company, as a subsidiary of PTPN Group, has been implementing SIMAKO since 2019.



Adanya integrasi sistem ke dalam SIMAKO memberikan berbagai nilai tambah yaitu kecepatan dan kemudahan (*speed*), efisien ruang penyimpanan (*space*), keakuratan (*accuracy*), terpeliharanya keselarasan data (*consistant*), data dapat dipakai secara bersama-sama (*shared*), keamanan (*security*), dan dapat diterapkan standarisasi (*standardization*).

The integration of the system into SIMAKO provides several added benefits: speed and convenience, efficient storage space, accuracy, maintaining data consistency, shared usability of data, security, and the ability to apply standardization.

### Alur Penyampaian Laporan Report Submission Flow



### Risk Assessment 2023

Setiap tahunnya, Perseroan melakukan penyusunan profil risiko di seluruh bagian dan unit kerja dengan menyelaraskan kegiatan di bagian dan unit kerja. Penyusunan profil risiko dimulai dari identifikasi, penaksiran, penentuan respon, pelaksanaan aktivitas pengendalian dan pemantauan, menjadi sarana komunikasi dan penyempurnaan program secara periodik, serta dijadikan sebagai acuan Bagian Satuan Pengawas Intern (SPI).

### Risk Assessment 2023

Every year, the Company creates risk profiles for all departments and work units by aligning activities within them. The process of creating a risk profile involves identifying, assessing, determining responses, implementing control and monitoring activities. This serves as a means of communication and periodic program improvement and is utilized as a reference for the Internal Audit Unit (SPI).

Pemantauan terhadap identifikasi dan mitigasi risiko terus dilakukan secara periodik setiap triwulan. Pada triwulan keempat, *monitoring* dilakukan untuk memastikan apakah implementasi manajemen risiko di Perseroan sudah benar-benar dilaksanakan, memberikan manfaat, dan berdampak positif untuk Perseroan. Hasil dari proses *monitoring* di triwulan IV menunjukkan bahwa Perseroan telah menerapkan sistem manajemen risiko dan dapat menurunkan beberapa tingkat risiko melalui mitigasi yang dilakukan.

Monitoring of risk identification and mitigation is conducted periodically every quarter. In the fourth quarter, monitoring is carried out to ensure whether risk management has been effectively implemented within the company. The results of the monitoring process in the fourth quarter demonstrate that the company has successfully implemented a risk management system, resulting in the reduction of various levels of risk through mitigation efforts.

### Kriteria Risiko dan Mitigasi Risiko

Kriteria risiko terdiri dari 4 (empat) kategori yaitu *Low*, *Low to Moderate*, *Moderate*, *Moderate to High* dan *High* yang menunjukkan perbedaan pengelolaan yang diperlukan.

### Risk Criteria and Risk Mitigation

Risk criteria are divided into 4 (four) categories: *Low*, *Low to Moderate*, *Moderate*, *Moderate to High* and *High*, indicating the differences in required management.

TINGKAT KEMUNGKINAN LIKELIHOOD	Hampir Pasti Almost Certain	E	Rendah ke Moderat Low to Moderate 7	Moderat Moderate 12	Moderat ke Tinggi Moderate to High 17	Tinggi High 22	Tinggi High 25
	Sangat Mungkin Terjadi Very Often	D	Rendah Low 4	Rendah ke Moderat Low to Moderate 9	Moderat Moderate 14	Moderat ke Tinggi Moderate to High 19	Tinggi High 24
	Bisa Terjadi Cloud Occur	C	Rendah Low 3	Rendah ke Moderat Low to Moderate 8	Moderat Moderate 13	Moderat ke Tinggi Moderate to High 18	Tinggi High 23
	Jarang Terjadi Really Happening	B	Rendah Low 2	Rendah ke Moderat Low to Moderate 6	Rendah ke Moderat Low to Moderate 11	Moderat ke Tinggi Moderate to High 16	Tinggi High 22
	Sangat Jarang Terjadi Very Rare	A	Rendah Low 1	Rendah Low 5	Rendah ke Moderat Low to Moderate 10	Moderat Moderate 15	Tinggi High 20
			1 Sangat Rendah Very Low	2 Rendah Low	3 Moderat Moderate	4 Tinggi High	5 Sangat Tinggi Very High
			DAMPAK IMPACT				

Kriteria Criteria	Keterangan Description
Tinggi High	Tidak dapat diterima, perlu perhatian BOD dalam pelaksanaan dan pengembangan pengendalian secara khusus. Unacceptable, requires BOD attention in implementing and developing specific controls.
Moderat ke Tinggi Moderate to High	Dapat diterima, namun menjadi perhatian dan pemantauan BOD-1 dengan melaksanakan pengembangan terhadap pengendalian yang ada. Acceptable, but it is a matter of concern and monitoring for BOD-1 by carrying out developments on existing controls.
Moderat Moderate	Dapat diterima dengan pemantauan langsung oleh BOD-1 terhadap pengendalian yang sudah ada. Acceptable with direct monitoring by BOD-1 of existing controls.
Rendah ke Moderat Low to Moderate	Dapat diterima dengan pemantauan terhadap pengendalian yang sudah ada. Acceptable with monitoring of existing controls.
Rendah Low	Dapat diterima dengan pengendalian yang ada Acceptable with existing controls.

Dalam melakukan *risk assessment*, ukuran *likelihood* risiko dinyatakan dengan persentase probabilitas sedangkan dampak risiko dinyatakan dengan satuan besaran (satuan ukuran sasaran masing-masing). Sebagai pedoman untuk mengkonversi berbagai ukuran risiko tersebut, dibutuhkan satu ukuran yang seragam.

When conducting a risk assessment, risk likelihood is expressed as a probability percentage. In contrast, risk impact is expressed in units of measurement (the respective target measurement units). One uniform measure is needed as a guideline for converting various risk measures.



### Ukuran Likelihood Likelihood Measures

Level	Kriteria Criteria	Keterangan Description	Probabilitas (%) Probability (%)
5	Hampir Pasti Almost Certain	Dapat terjadi pada banyak keadaan Can occur in many circumstances	80-99
4	Kemungkinan Besar High Possibility	Akan mungkin terjadi pada banyak keadaan It would be possible in many circumstances	60-80
3	Kemungkinan Sedang Medium Possibility	Dapat terjadi pada beberapa waktu May occur at various times	40-60
2	Kemungkinan Kecil Small Possibility	Mungkin terjadi pada beberapa waktu May happen at some time	20-40
1	Jarang Rarely	Mungkin terjadi hanya pada kondisi tidak normal May occur only in abnormal conditions	<20

### Ukuran Dampak Impact Size

Level	Skala Scale	Keterangan Description
5	Sangat Besar Enormous	Kriteria untuk dampak risiko akan sangat banyak, tergantung satuan ukuran yang digunakan untuk masing-masing sasaran yang terpengaruh oleh risiko. The criteria for risk impact will vary, depending on the unit of measurement used for each target affected by the risk.
4	Besar Large	
3	Moderat Moderate	
2	Rendah Low	
1	Tidak Signifikan Insignificant	

Monitoring dan evaluasi manajemen risiko harus dilakukan secara berkala dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Frekuensi dan cakupan ulang. Evaluasi disesuaikan dengan risiko yang ditimbulkan oleh aktivitas bisnis serta kecepatan perubahan dalam metode penaksiran dan pengelolaan risiko.
2. Evaluasi terhadap penaksiran risiko mencakup:
  - a. Metodologi, model, asumsi, variabel yang digunakan untuk mengukur risiko dan menetapkan level risiko.
  - b. Perbandingan antara hasil dan model penaksiran risiko menggunakan simulasi atau proyeksi di masa mendatang dengan hasil sebenarnya.
  - c. Perbandingan antara asumsi yang digunakan dalam faktor input model dengan kondisi aktual.
  - d. Perbandingan antara struktur level yang ditetapkan dan aktual.
3. Penaksiran level risiko harus sejalan dengan strategi bisnis dan manajemen risiko Perseroan dengan memperhatikan kinerja masa lalu dan kondisi keuangan Perseroan.

Risk management monitoring and evaluation have to be implemented regularly, by focusing on the following areas:

1. Repeat frequency and coverage: Evaluations are customized to address the risks associated with business activities and the rapid changes in risk assessment and management methods.
2. The evaluation of risk assessment includes:
  - a. Methodologies, models, assumptions, and variables utilized for measuring risk and establishing risk levels.
  - b. Comparison of results with risk assessment models through simulations or future projections against actual results.
  - c. Comparison of the assumptions used in the model input factors with actual conditions.
  - d. Comparison of set level structures with actual levels.
3. The assessment of risk levels must align with the Company's business strategy and risk management, taking into consideration the Company's historical performance and financial condition.



Berdasarkan penjelasan di atas, Perseroan telah menyusun profil risiko meliputi penaksiran, dampak, dan mitigasi risiko tahun 2023 sebagai berikut:

Based on the explanation above, the Company has prepared a risk profile for 2023, which includes assessment, impact, and risk mitigation.

No.	Konteks Asesmen Risiko Risk Assessment Context	Peristiwa Risiko Risk Event	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
1.	Volatilitas Harga Price Volatility	Harga jual rata-rata CPO dalam tahun 2023 di bawah Rp11.310/kg The average selling price of CPO in 2023 was below Rp11,310/kg	<ul style="list-style-type: none"> <li>Kontrak penjualan CPO jangka panjang dengan harga kompetitif.</li> <li>Melakukan pemeriksaan <i>oil content</i> dan <i>kernel content</i> secara berkala, melakukan pembinaan mutu panen kepada petani, pelaksanaan sortasi sesuai dengan mutu TBS, peningkatan mutu produksi plasma yang telah di-replanting, membeli TBS dengan mutu yang baik (<i>Grade A</i>).</li> <li>Sertifikasi ISCC sebanyak 29 PKS dan 40 kebun.</li> <li>Long-term CPO sales contract with competitive price.</li> <li>Conducting regular oil and kernel content checks, providing harvest quality coaching to farmers, implementing sorting according to FFB quality, improving the quality of plasma production that has been replanted, and purchasing FFB with good quality (<i>Grade A</i>).</li> <li>ISCC certification for 29 PKS and 40 plantations.</li> </ul>
2.	TU/TK/TB Komoditas Utama TU/TK/TB of Main Commodity	Risiko kegagalan investasi tanaman (tanaman ulang, tanaman konversi, tanaman baru) kelapa sawit Risk of failure of oil palm plantation investment (replanting, conversion planting, new planting)	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengidentifikasi lahan-lahan yang akan dilakukan konversi dan areal TU.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan pemerintah kabupaten kota terkait dengan persyaratan sesuai peraturan perundangan terkait dengan lahan yang akan dilakukan konversi.</li> <li>Menyiapkan dokumen perizinan lingkungan dan izin perubahan peruntukan lahan (persetujuan kesesuaian kegiatan pemanfaatan ruang untuk kegiatan usaha).</li> <li>Mengidentifikasi lahan-lahan yang akan dilakukan TB.</li> <li>Mengidentifikasi dan menyusun seluruh dokumen terkait dalam pengembangan Kelapa Sawit baik perizinan perundang-undangan maupun pihak eksternal seperti RSPO.</li> <li>Melakukan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Kota terkait dengan persyaratan sesuai peraturan perundangan terkait dengan lahan yang akan dilakukan TB.</li> <li>Memastikan seluruh dokumen yang mendapatkan persetujuan dari masing-masing pihak yang memegang otorisasi telah terbit sesuai dengan jadwal.</li> <li>Mengevaluasi kualifikasi vendor PTPN 3, 4, 5, 6, dan 13 untuk mendapatkan vendor dengan <i>track record</i> terbaik dalam pelaksanaan pekerjaan investasi tanaman kelapa sawit.</li> <li>Identify the lands to be converted and TU areas.</li> <li>Coordinate with the city/district government regarding the requirements according to the laws and regulations related to the land to be converted.</li> <li>Prepare environmental permit documents and land use change permits, including approval of the suitability of space utilization activities for business activities.</li> <li>Identify and compile all related documents for the development of Palm Oil, including legal permits and external parties such as RSPO.</li> <li>Ensure that all documents approved by each authorized party have been issued according to schedule.</li> <li>Evaluate the vendor qualifications of PTPN 3, 4, 5, 6, and 13 to obtain vendors with the best track record in implementing oil palm investment work.</li> </ul>
3.	Laba Perusahaan Company Profit	Risiko pendapatan CPO dan PKO Perusahaan yang tidak optimal dalam mendukung pencapaian <i>target pricing excellence</i> Risk of the Company's CPO and PKO revenues not being optimal in supporting the achievement of pricing excellence targets.	<ul style="list-style-type: none"> <li>Mengimplementasikan model <i>advanced analytics</i> untuk mendukung strategi <i>hedging</i> dalam mengunci penjualan 1-12 bulan kedepan dengan durasi dan harga yang ditetapkan.</li> <li>Meningkatkan realisasi penjualan CPO bersertifikat yang sebelumnya dijual sebagai tidak bersertifikat.</li> <li>Meningkatkan realisasi penjualan PKO bersertifikat yang sebelumnya dijual sebagai tidak bersertifikat.</li> <li>Menyusun serta mengelola strategi penjualan dan <i>marketing</i> untuk produk <i>bulk</i>.</li> <li>Melakukan identifikasi atas areal unit usaha yang belum mendapatkan sertifikasi RSPO dan ISCC.</li> <li>Meningkatkan jumlah kebun inti dan plasma yang tersertifikasi ISPO dan RSPO.</li> <li>Implement advanced analytics models to support hedging strategies for locking sales 1-12 months ahead at a set duration and price.</li> <li>Increase sales realization of certified CPO that was previously sold as uncertified.</li> <li>Increase sales realization of certified PKO that was previously sold as uncertified.</li> <li>Develop and manage sales and marketing strategies for bulk products.</li> <li>Identify business unit areas that have not received RSPO and ISCC certification.</li> <li>Increase the number of core and plasma plantations that are ISPO and RSPO certified.</li> </ul>

No.	Konteks Asesmen Risiko Risk Assessment Context	Peristiwa Risiko Risk Event	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
4.	<p>Produktivitas Komoditas Utama Productivity of Main Commodity</p>	<p>Risiko adanya disparitas produktivitas tanaman antar entitas di PTPN. Risk of disparities in crop productivity between entities at PTPN.</p> <hr/> <p>Ketidaktercapaian produksi TBS. Failure to achieve FFB production.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mengidentifikasi dan menetapkan praktik operasi perkebunan yang baik (<i>good agricultural practice</i>) di seluruh entitas PTPN yang belum terstandarisasi.</li> <li>• Melakukan sosialisasi dan pelatihan atas standarisasi praktik operasi perkebunan yang baik (<i>good agricultural practice</i>) di seluruh unit usaha dan melakukan pengawasan atas implementasinya.</li> <li>• Mempertimbangkan faktor potensi kelas lahan dalam penyusunan target produksi.</li> <li>• Identify and establish good agricultural practices in all PTPN entities that have not been standardized.</li> <li>• Carry out awareness and training sessions on standardizing good agricultural practices in all business units and oversee their implementation.</li> <li>• Take into account land class potential factors when setting production targets.</li> </ul> <hr/> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Melakukan perencanaan, evaluasi dan <i>monitoring progress</i> perbaikan infrastruktur jalan.</li> <li>• Melakukan evaluasi dan <i>monitoring</i> serangan hama penyakit tanaman serta progres pengendalian dan mengeluarkan kebijakan terkait hama penyakit.</li> <li>• Mengeluarkan kebijakan dan sosialisasi panen bersih.</li> <li>• Melakukan <i>monitoring</i> aplikasi pemupukan secara rutin dan mengeluarkan kebijakan terkait aplikasi pemupukan.</li> <li>• Melakukan substitusi pupuk alternatif.</li> <li>• Melakukan edukasi dan pendampingan kepada petani plasma agar dapat menerapkan <i>good agricultural practice</i> (contoh: edukasi pemilihan bibit yang baik, dll), dan melakukan pembinaan terhadap petani plasma dan pihak ketiga, termasuk peremajaan sawit rakyat.</li> <li>• Melakukan <i>review</i> atas pengendalian internal pada pengamanan kebun sawit yang ada pada PTPN IV. Jika terdapat kelemahan pada pengendalian internal, dapat dipertimbangkan untuk melakukan penguatan kontrol (contoh: menyiapkan strategi yang tepat dalam melakukan patroli, menempatkan satuan-satuan patroli secara acak baik tempat maupun waktu, meningkatkan frekuensi patroli pada wilayah perkebunan, melakukan <i>monitoring</i> kontrol secara berkala untuk memastikan aktivitas pencegahan pencurian dilakukan secara berkala.</li> <li>• Plan, evaluate, and monitor the progress of road infrastructure repairs.</li> <li>• Evaluate and monitor plant pest and disease attacks, as well as the progress of pest and disease control, and issue related policies.</li> <li>• Issue policies and promote the practice of clean harvesting.</li> <li>• Regularly monitor fertilizer applications and issue related policies.</li> <li>• Explore alternative fertilizer options.</li> <li>• Provide education and assistance to smallholder farmers to help them implement good agricultural practices, such as selecting quality seeds, and provide guidance for oil palm rejuvenation.</li> <li>• Review the internal control measures for securing oil palm plantations within the company, and consider strengthening control if weaknesses are identified. For example, preparing effective strategies for patrols, random placement of patrol units, increasing patrol frequency, and conducting periodic monitoring and control to prevent theft.</li> </ul>
5.	<p>Harga Pokok Produksi CPO Cost of CPO Production</p>	<p>Kekurangan bahan baku olah sehingga PKS <i>idle capacity</i>. Lack of raw materials for processing resulting POM has idle capacity.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Meningkatkan produktivitas tanaman kebun inti.</li> <li>• Penerapan <i>single management</i> di Kebun Plasma/KKPA</li> <li>• Pemberian harga pembelian bahan baku yang lebih kompetitif.</li> <li>• Menerapkan sistem <i>Cost Reduction Program</i> (CRP) untuk beberapa program CAPEX dan OPEX.</li> <li>• Increase productivity of core plantation crops.</li> <li>• Implement single management in Plasma Plantation/KKPA.</li> <li>• Offer more competitive prices for purchasing raw materials.</li> <li>• Roll out the Cost Reduction Program (CRP) system for several CAPEX and OPEX programs.</li> <li>• Implement the Cost Reduction Program (CRP) system for several CAPEX and OPEX programs.</li> </ul>



No.	Konteks Asesmen Risiko Risk Assessment Context	Peristiwa Risiko Risk Event	Mitigasi Risiko Risk Mitigation
6.	Utilitas Pabrik Plant Utility	Target volume pembelian TBS pihak ketiga tidak tercapai Failure to achieve the target volume of FFB purchase from third parties	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyuluhan dan pengawasan secara berkesinambungan kepada petani Plasma/ KKPA terkait budidaya tanaman kelapa sawit agar produktivitas tanaman mereka meningkat.</li> <li>• Penyuluhan dan pendekatan kepada petani sekitar pabrik agar menjual hasilnya ke pabrik perusahaan.</li> <li>• Penerapan <i>single management</i> di Kebun Plasma/KKPA.</li> <li>• Meningkatkan pelayanan kepada petani baik plasma/KKPA maupun pihak ke III,</li> <li>• Pemberian harga pembelian bahan baku yang lebih kompetitif.</li> <li>• Penerapan program <i>preventive maintenance</i> terhadap peralatan pabrik.</li> <li>• Provide continuous counseling and supervision for Plasma/KKPA farmers regarding oil palm cultivation to enhance their crop productivity.</li> <li>• Counsel and reach out to farmers around the factory to encourage the sale of their produce to the company's factory.</li> <li>• Implement unified management in Plasma/KKPA Plantations.</li> <li>• Enhance services for farmers, including those who are part of Plasma/KKPA and third parties.</li> <li>• Offer more competitive purchase prices for raw materials.</li> <li>• Implementation of preventive maintenance programs for factory equipment.</li> </ul>
7.	Integrasi PTPN PTPN Integration	<p>Ketidaksiuaian dengan PP Nomor 26 Tahun 2021 pasal 3 ayat 1 terkait dengan batasan luas maksimum dimana untuk perkebunan kelapa sawit dan karet luas maksimum yang dapat diberikan masing-masing adalah 100.000 Ha dan 23.000 Ha. There is an inconsistency with PP Number 26 of 2021 Article 3 paragraph 1 regarding the maximum area limit. For oil palm and rubber plantations, the maximum area that can be granted is 100,000 Ha and 23,000 Ha, respectively.</p> <p>Persetujuan dari kreditur tidak diperoleh sesuai dengan target waktu. Creditor approval was not obtained according to the target time.</p> <p>Risiko adanya resistensi oleh karyawan terkait proses restrukturisasi. Risk of employee resistance related to the restructuring process.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Bersama dengan tim konsultan legal membuat perencanaan terkait dengan tahapan proses pengajuan pengecualian batasan luas lahan Perusahaan. Termasuk juga diantaranya yaitu dengan membuat <i>timeline</i> dan melakukan pemetaan atas syarat-syarat yang harus dipenuhi dan hal-hal lainnya yang perlu dipertimbangkan (jika ada).</li> <li>• Melakukan komunikasi dengan KBUMN terkait dengan usulan mengecualikan Perusahaan pada batasan luasan lahan, dengan mengirimkan surat yang selanjutnya akan diteruskan ke Kementerian Pertanian untuk menambahkan klausul pengecualian pada PP Nomor 26 Tahun 2021.</li> <li>• Memastikan klausul pengecualian untuk Perusahaan pada revisi PP Nomor 26 Tahun 2021 sudah ditambahkan, dengan melakukan <i>monitoring</i> pada proses penyusunannya.</li> <li>• Work with the legal consultant team to plan the process of submitting an exception to the Company's land area limitation. This includes creating a timeline, outlining the requirements, and considering any other relevant factors (if any).</li> <li>• Communicate with KBUMN about the proposal to exclude the Company from the land area limitation by sending a letter to be forwarded to the Ministry of Agriculture to add an exception clause to PP Number 26 of 2021.</li> <li>• Monitor the drafting process to ensure that the exception clause for the Company in the revision of PP Number 26 of 2021 has been added.</li> <li>• Mengusulkan pengajuan <i>repackaging</i> utang kepada kreditur dengan kondisi yang dapat diterima kedua belah pihak, sebagai berikut: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addendum dan perubahan ketentuan pada MAA <i>existing</i> atau pada Perjanjian Pinjaman Baru/<i>Repackaging</i>.</li> <li>- Pengurangan jumlah kreditur dengan mekanisme pengambilalihan seluruh utang Non Himbara atau pembiayaan baru.</li> <li>- Pembiayaan baru dengan skema komersial dan tenor lebih panjang.</li> </ul> </li> <li>• Propose a debt repackaging application to creditors with acceptable conditions to both parties, as follows: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Addendum and changes to the provisions of the existing MAA or to the New Loan Agreement/<i>Repackaging</i>.</li> <li>- Seek a reduction in the number of creditors, with a takeover mechanism for all Non-Himbara debts or new financing.</li> <li>- Introduce new financing with a commercial scheme and longer tenor.</li> </ul> </li> <li>• Bersama dengan konsultan menyusun dan melakukan pemahaman, komunikasi, dan sosialisasi atas program <i>change management</i> kepada karyawan.</li> <li>• Melakukan penataan tenaga kerja (seperti status karyawan, formasi jabatan, <i>talent mobility</i>) pasca restrukturisasi.</li> <li>• Menyusun dan melakukan sosialisasi secara intensif mengenai Peraturan Direksi terkait Penggunaan Kebijakan Remunerasi yang baru pada <i>surviving entity</i>.</li> <li>• Collaborate with consultants to prepare and implement a change management program, ensuring that employees understand and are appropriately informed about the changes.</li> <li>• Manage workforce restructuring, including employee status, job roles, and talent reassignment.</li> <li>• Conduct comprehensive communication and explanation sessions regarding the Board of Directors Regulations associated with the new Remuneration Policy in the remaining entity.</li> </ul>

## Tinjauan atas Efektivitas Manajemen Risiko

Salah satu tujuan penerapan sistem manajemen risiko yang terintegrasi adalah mendukung pencapaian dan pertumbuhan kinerja secara berkelanjutan sekaligus meningkatkan adaptabilitas dan daya saing Perseroan. Penerapan manajemen risiko yang bersifat proaktif dan *forward-looking* diharapkan dapat memaksimalkan nilai tambah bagi pemegang saham, mengelola modal secara komprehensif, dan meningkatkan profitabilitas.

Keselarasan antara strategi dan tujuan bisnis dengan strategi risiko dan *risk appetite* juga menjadi elemen penting dalam penerapan manajemen risiko. Implementasi strategi risiko dan *risk appetite* diterjemahkan ke dalam tata kelola, proses, kebijakan, perangkat, dan metodologi yang didukung oleh teknologi informasi, sumber daya manusia, dan budaya risiko yang kuat. Untuk itu, Perseroan mengimplementasikan Kebijakan Umum Manajemen Risiko sebagai acuan dasar yang bersifat strategis dan komprehensif dalam penerapan manajemen risiko.

Perseroan mendorong agar implementasi manajemen risiko senantiasa berjalan secara efektif, dengan berlandaskan pada tata kelola risiko yang telah ditetapkan. Tata kelola risiko mengatur dengan jelas peran dan tanggung jawab, proses pengambilan keputusan, keterkaitan antar fungsi pengelolaan risiko, serta kebijakan yang memastikan bahwa risiko dikelola dengan baik.

Dewan Komisaris berperan penting untuk mengawasi pelaksanaan manajemen risiko secara aktif. Kegiatan pengawasan ini dilakukan melalui forum rapat gabungan Direksi dan Dewan Komisaris, serta dalam rapat bersama Komite Pemantau Manajemen Risiko & GCG dan Komite Audit dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Menyetujui kebijakan manajemen risiko Perusahaan termasuk strategi dan kerangka manajemen risiko yang ditetapkan sesuai dengan tingkat risiko yang akan diambil (*risk appetite*) dan toleransi risiko (*risk tolerance*).
2. Mengevaluasi kebijakan dan strategi manajemen risiko.
3. Mengevaluasi pertanggungjawaban Direksi dan memberikan arahan perbaikan atas pelaksanaan kebijakan manajemen risiko Perseroan.
4. Memastikan kebijakan dan proses manajemen risiko dilaksanakan secara efektif dan terintegrasi dalam proses manajemen risiko secara keseluruhan.

Pada tahun 2023, Perseroan melakukan asesmen tingkat kematangan pengelolaan risiko 2022 yang dilakukan oleh perusahaan  *Holding*. Hasil pengukuran *Risk Maturity Level* (RML) menunjukkan skor maturitas sebesar 4,17 (Regional 1), 4,07 (Regional 2), 4,04 (Regional 3), 3,66 (Regional 4) dan 3,61 (Regional 5). Hasil ini menunjukkan bahwa pengelolaan risiko Perseroan telah berada di jalur yang tepat dengan kategori *Managed* dan *Defined*.

## Review of Risk Management Effectiveness

An integrated risk management system aims to support sustainable performance and growth while enhancing the Company's adaptability and competitiveness. Proactive and forward-looking risk management is expected to maximize shareholder value, comprehensively manage capital, and increase profitability.

It is crucial to align business strategy and objectives with risk strategy and risk appetite when implementing risk management. The translation of risk strategy and risk appetite into governance, processes, policies, tools, and methodologies is supported by information technology, human resources, and a strong risk culture. The Company implements the General Risk Management Policy as a foundational reference for risk management.

Effective risk management, based on established risk governance, is encouraged by the Company. Risk governance clearly defines roles and responsibilities, decision-making processes, linkages between risk management functions, and policies to ensure effective risk management.

The Board of Commissioners has an important role in actively supervising the implementation of risk management. This supervisory activity is carried out through joint meetings of the Board of Directors and the Board of Commissioners, as well as in joint meetings with the Risk Management & GCG Monitoring Committee and the Audit Committee. The following are the key mechanisms:

1. Approving the company's risk management policy, including the risk management strategy and framework, in accordance with the level of risk to be taken (*risk appetite*) and risk tolerance.
2. Evaluating risk management policies and strategies.
3. Assessing the responsibilities of the Board of Directors and providing guidance for improvements to the implementation of the company's risk management policies.
4. Ensuring that risk management policies and processes are effectively implemented and integrated into the overall risk management process.

In 2023, the Company conducted an assessment of the risk management maturity level for 2022. The results of the Risk Maturity Level (RML) measurement show scores of 4.17 (Regional 1), 4.07 (Regional 2), 4.04 (Regional 3), 3.66 (Regional 4), and 3.61 (Regional 5). These scores indicate that the Company's risk management is performing well within the Managed and Defined categories, demonstrating that it is on the right track.



## Pernyataan Kecukupan Sistem Manajemen Risiko

Selama tahun 2023, Dewan Komisaris dan Direksi menilai bahwa sistem manajemen risiko Perseroan telah berjalan dengan baik dan memiliki tingkat kecukupan yang memadai dari segi kebijakan, toleransi, dan limit risiko. Proses identifikasi, pengukuran, pemantauan, dan pengendalian risiko juga telah dilakukan secara berkesinambungan sehingga sistem manajemen risiko dapat terlaksana dengan efektif.

## Rencana Manajemen Risiko 2024

Di tahun 2024, Perseroan telah menyusun program kerja *Preparation & Assessment of Risk Management* untuk meningkatkan kualitas pengelolaan manajemen risiko, antara lain:

1. Pemetaan Komposisi Organ Pengelolaan Risiko sesuai dalam Permen BUMN (PER-2/MBU/03/2023).
2. *Self-Assessment* Pemetaan *Risk Maturity Index*.
3. Penyusunan *Roadmap* Perbaikan Manajemen Risiko.
4. Pemetaan dan pemenuhan kualifikasi organ pengelola risiko.
5. Pemetaan dan *update* kesesuaian aplikasi Sistem Informasi Manajemen Risiko.
6. Penyiapan pemenuhan aspek-aspek yang diperlukan dalam Permen BUMN Nomor: PER-2/MBU/03/2023.
7. Pelatihan Pemahaman *Risk Awareness & Risk Culture* melalui webinar yang terjadwal & *knowledge management* di aplikasi AGRHIS.
8. Mengevaluasi manajemen risiko unit kerja dengan kunjungan kerja ke Unit Kebun dan PKS.
9. Melakukan sosialisasi dan pelatihan terkait manajemen risiko kepada unit-unit kerja.
10. Menyusun profil risiko korporat.
11. Memutakhirkan Pedoman Manajemen Risiko.

## Sistem Pengendalian Internal

Penerapan sistem pengendalian internal bertujuan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional dan finansial Perseroan terawasi dan terkendali dengan optimal. Efektivitas sistem pengendalian internal berfungsi untuk mengamankan investasi dan aset, yaitu mencakup system pengendalian prosedur (*tangible*) dan pengendalian substansi (*intangible*). Hal ini dilakukan dalam rangka memantau dan memastikan adanya keselarasan segenap aktivitas unit kegiatan terhadap strategi bisnis dan strategi yang telah ditetapkan Perseroan, merekomendasikan tindakan perbaikan apabila ditemukan adanya penyimpangan, serta menjamin:

1. Keandalan laporan dan informasi
2. Kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku
3. Efisiensi dan efektivitas kegiatan operasional dan keamanan aset.

## Risk Management System Adequacy Statement

In 2023, the Board of Commissioners and Directors have assessed that the company's risk management system is operating effectively and meets the required level of adequacy with regards to policies, risk tolerance, and limits. The continuous processes of identifying, measuring, monitoring, and controlling risks have been successfully carried out, ensuring the effective implementation of the risk management system.

## 2024 Risk Management Plan

In 2024, the Company developed a program called Preparation & Assessment Risk Management to enhance the quality of risk management. This program includes the following steps:

1. Mapping the Composition of Risk Management Departments according to the BUMN Ministerial Regulation (PER-2/MBU/03/2023).
2. Mapping the Self-Assessment Risk Maturity Index.
3. Developing a Roadmap for Improving Risk Management.
4. Mapping and meeting the qualifications of risk management departments.
5. Updating the Risk Management Information System application.
6. Preparing to meet the requirements specified in the BUMN Ministerial Regulation No. PER-2/MBU/03/2023.
7. Conducting training sessions on Understanding Risk Awareness and Risk Culture through scheduled webinars and knowledge management using the AGRHIS application.
8. Evaluating risk management in work units by visiting Plantation Units and PKS.
9. Providing outreach and training on risk management to work units.
10. Developing a corporate risk profile.
11. Updating the Risk Management Guidelines.

## Internal Control System

The internal control system is implemented to ensure optimal monitoring and control of the Company's operational and financial activities. The system aims to safeguard investments and assets through procedural control (*tangible*) and substance control (*intangible*). It is designed to monitor and align all activities with the business strategy, recommend corrective actions for deviations, and ensure:

1. Reliability of reports and information
2. Compliance with applicable regulations
3. Efficiency and effectiveness of operational activities and asset security.

Sistem pengendalian internal Perseroan merupakan salah satu bentuk kepatuhan terhadap Keputusan Menteri Negara BUMN No. PER-01/MMBU/2011 tanggal 1 Agustus 2011 bagian ketujuh pasal 26 tentang Sistem Pengendalian Internal.

### Pengendalian Keuangan dan Operasional

Sistem pengendalian internal melibatkan seluruh insan Perseroan, termasuk Dewan Komisaris dan Direksi. Kegiatan pengendalian internal mencakup penetapan kebijakan, prosedur pengendalian, dan proses verifikasi lebih dini untuk memastikan bahwa kebijakan dan prosedur tersebut dijalankan secara konsisten, serta menjadi kegiatan yang integral dari setiap fungsi atau setiap kegiatan Perseroan. Kegiatan pengendalian diterapkan pada semua tingkatan fungsional sesuai struktur organisasi Perseroan.

Upaya yang dilakukan Perseroan terkait pengendalian keuangan adalah:

1. Menyusun rencana kerja yang membahas strategi Perseroan secara keseluruhan yang mencakup arah pengembangan bisnis.
2. Mengendalikan kegiatan investasi dengan hati-hati.
3. Mengalokasikan biaya secara tepat guna.
4. Memantau realisasi RKAP dalam laporan yang dibuat secara berkala.
5. Memantau perolehan laba agar dapat berjalan sesuai dengan rencana Perseroan.

Di sisi lain, upaya yang dilakukan oleh Perseroan terkait pengendalian operasional adalah sebagai berikut:

1. Menggunakan SOP yang merinci prosedur kerja setiap aktivitas operasional terkait produk dan aktivitas baru termasuk mitigasi risiko operasional terkait.
2. Menentukan aturan keputusan sesuai jangka waktu penerapannya.
3. Mengidentifikasi operasi-operasi dan aktivitas yang terkait dengan aspek penting lingkungan sejalan dengan kebijakan, tujuan, dan sasaran.
4. Membuat struktur organisasi Perseroan yang ideal, dilengkapi dengan divisi pengawasan atau pengendalian sehingga dapat mendukung pengendalian operasional.

### Kesesuaian Sistem Pengendalian Internal dengan Kerangka Internasional (COSO – International Control Framework)

Pengendalian internal yang dilakukan Perseroan telah sesuai dengan kerangka pengendalian internal COSO yang terdiri dari 5 (lima) komponen yaitu:

Kriteria Criteria	Penjelasan Description
Lingkungan Pengendalian Control Environment	Lingkungan pengendalian mencerminkan keseluruhan sikap, komitmen, perilaku, kepedulian, dan langkah-langkah Dewan Komisaris dan Direksi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian operasional.
Penilaian Risiko Risk Assessment	Unit kerja manajemen risiko mengidentifikasi, menganalisis, dan mengevaluasi serta menilai dan mengelola risiko usaha yang relevan.

The Company's internal control system is in compliance with the Decree of the Minister of State for State-Owned Enterprises No. PER-01/MMBU/2011 dated August 1, 2011, part seven, article 26, concerning Internal Control Systems.

### Financial and Operational Control

The internal control system involves all of the Company personnel, including the Board of Commissioners and Directors. Internal control activities include establishing policies, control procedures, and early verification processes to ensure that these policies and procedures are implemented consistently, and become an integral activity of every function or every activity of the Company. Control activities are implemented at all functional levels according to the Company's organizational structure.

The Company's efforts regarding financial control are as follows:

1. Prepare a work plan that discusses the company's overall strategy, including the direction of business development.
2. Carefully control investment activities.
3. Allocate costs appropriately.
4. Monitor the realization of the RKAP in periodic reports.
5. Monitor profit generation to align with the Company's plans.

On the other hand, the Company's efforts regarding operational control are as follows:

1. Use SOPs that detail work procedures for each operational activity related to new products and activities, including mitigating related operational risks.
2. Determine decision rules according to the time period for which they will be implemented.
3. Identify operations and activities related to important aspects of the environment in line with policies, goals, and targets.
4. Create an ideal company organizational structure, equipped with a supervisory or control division to support operational control.

### Conformity of the Internal Control System with the International Framework (COSO – International Control Framework)

The internal control carried out by the Company is by the COSO internal control framework, which consists of 5 (five) components, namely:



Kriteria Criteria	Penjelasan Description
Prosedur Pengendalian Control Procedure	Perseroan melakukan proses pengendalian terhadap kegiatan usaha di setiap tingkat dan unit kerja dalam struktur organisasi Perseroan. The Company carries out a control process over business activities at every level and work unit in the Company's organizational structure.
Informasi dan Komunikasi Information and Communication	Perseroan memastikan bahwa informasi dan komunikasi tentang lingkungan pengendalian, penilaian risiko, prosedur pengendalian dan <i>monitoring</i> senantiasa menaati hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku. The Company ensures that information and communication regarding the control environment, risk assessment, control, and monitoring procedures always comply with applicable laws and regulations.
Pemantauan Monitoring	Dilakukan melalui <i>performance check</i> Audit Internal oleh SPI dan Audit oleh eksternal (BPK, BPKP, KAP). This is carried out through internal audit performance checks by SPI and external audits (BPK, BPKP, KAP).

### Evaluasi atas Efektivitas Sistem Pengendalian Internal

Secara keseluruhan, Perseroan menilai bahwa sistem pengendalian internal telah berjalan cukup efektif dan optimal sepanjang tahun 2023, berdasarkan hasil pelaksanaan audit rutin dan khusus sesuai PKAT yang telah dilaksanakan oleh SPI. Dewan Komisaris aktif melakukan rapat dengan Komite Audit dan Komite GCG dan Manajemen Risiko serta melakukan kunjungan kerja lapangan untuk memastikan dan memantau kondisi objektif yang sedang dalam proses pengkajian.

Sebagaimana tertuang dalam Surat Perjanjian Kerja Audit dengan KAP, Perseroan melakukan audit independen terkait aspek kepatuhan (compliance audit) terhadap peraturan perundangan-undangan yang berlaku dan pengendalian internal untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023. Hasil dari bentuk audit, pemeriksaan, dan pemantauan menghasilkan rekomendasi atas temuan atau *Correction Action and Preventive Action* (CAPA) untuk ditindaklanjuti oleh seluruh pihak terkait agar sistem dan prosedur operasional dapat mematuhi regulasi secara efisien dan efektif.

### Kasus Hukum dan Perkara Penting

Berikut adalah perkara hukum penting yang sedang dalam proses per akhir 2023:

Entitas Entity	Kasus Case	Para Pihak The Parties	Objek Object	Status Status
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara III) The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III)	Sengketa Tanah Kebun Sarang Giting 23/ Pdt.G/2022/PN Srh. Land Dispute Sarang Giting Estate 23/ Pdt.G/2022/PN Srh.	Perusahaan sebagai tergugat dan ahli waris Abidan Sitorus sebagai penggugat. The company as the defendant and the heirs of Abidan Sitorus as the plaintiff.	Tanah 3.678 m <sup>2</sup> milik eks PTPN III <i>Spin-Off</i> Kebun Sarang Giting. Land 3,678 m <sup>2</sup> owned by eks PTPN III Spin- Off Sarang Giting Estate.	Perkara di tingkat Pengadilan Negeri Sei Rampah telah dimenangkan oleh Perusahaan, namun penggugat mengajukan banding ke pengadilan tinggi medan. The case at the Sei Rampah District Court level was won by the Company, but the plaintiff filed an appeal to the Medan High Court.

### Evaluation of the Effectiveness of the Internal Control System

The Company has assessed that its internal control system has been running effectively and optimally throughout 2023 in overall. This assessment is based on routine and special audits conducted by SPI in accordance with PKAT. The Board of Commissioners actively meets with the Audit Committee, GCG, and Risk Management Committee, and conducts field work visits to ensure and monitor the current conditions being reviewed.

In accordance with the Audit Work Agreement Letter with KAP, the Company conducted an independent audit focusing on compliance with applicable laws and regulations, as well as internal control for the financial year ending on December 31, 2023. The results of the audit, inspection, and monitoring have led to recommendations for findings or Corrective Action and Preventive Action (CAPA). These recommendations will be followed up by all relevant parties to ensure that operational systems and procedures comply with regulations efficiently and effectively.

### Legal Cases and Lawsuits

The Company currently undergoes these following important legal cases as of the end of 2023:



Entitas Entity	Kasus Case	Para Pihak The Parties	Objek Object	Status Status
Perusahaan The Company	Sengketa Tanah Kebun Mandailing Natal 114/Pdt.G/2022/PN-Mdl. Land Dispute Mandailing Natal Estate 114/Pdt.G/2022/PN-Mdl.	Perusahaan sebagai tergugat dan H. Khairunedi Lubis sebagai penggugat. The company as the defendant and H. Khairunedi Lubis as the plaintiff.	Tanah 66 Ha milik PTPN IV Kebun Mandailing Natal. Land 66 Ha owned by PTPN IV Mandailing Natal Estate.	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini. areal dikuasi Perusahaan dan proses pengajuan kasasi dari H. Khairunedi Lubis dan kawan-kawan masih berlangsung. As of the issuance date of these consolidated financial statements. the area still controlled by the Company and the cassation process filed by H. Khairunedi Lubis is still ongoing.
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara V) The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V)	Pemerintah daerah Siak telah melakukan wanprestasi kepada Perusahaan. Local Government Siak had breached to the Company.	Pemerintah Daerah Siak sebagai tergugat dan Perusahaan sebagai penggugat. Local Government Siak as the defendant and the Company as the plaintiff.	Uang muka kerjasama antara Perusahaan dengan Pemerintah daerah Siak untuk pembangunan kebun masyarakat sebesar Rp33.200.506.674. Advance payment between the company and the Siak local government for the development of community gardens amounts to Rp33,200,506,674.	Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Putusan No. 643/PK/PDT/2017 Putusan tersebut menerima dan mengabulkan gugatan Perusahaan dan menyatakan Pemerintah Siak telah melakukan wanprestasi Berdasarkan Perjanjian No. 5/HKM/BA/10/V/2020, piutang sebesar Rp33.200.506.674 akan dibayarkan Pemerintah Daerah Siak secara bertahap selama 8 tahun anggaran dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2028. Pada tahun 2022, Pemda Siak telah membayar sebesar Rp3.885.786.664 (2021: Rp6.000.000.000). Selanjutnya, pada tahun 2022 sampai 2028 Pemda Siak akan membayar sebesar Rp3.885.786.664 pada setiap tahun anggaran The Supreme Court of the Republic of Indonesia issued decision No. 643/PK/PDT/2017. The decision accepted and granted the Company's lawsuit and stated that the Government of Siak had breached. Based on Agreement No. 5/HKM/BA/10/V/2020, receivable amounting to Rp33,200,506,674 will be paid by the Local Government Siak in installment over 8 fiscal years starting from 2021 to 2028. In 2022, the Local Government Siak paid Rp3,885,786,664 (2021: Rp6,000,000,000). Furthermore, in 2022 to 2028 the Local Government Siak will pay Rp3,885,786,664 in each fiscal year.
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara V) The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V)	Gugatan perdata dari Koperasi Sawit Makmur ("KOPSA M") perkara No. 99/PDT.G/2019/PN.BKN. Civil lawsuit from Koperasi Sawit Makmur ("KOPSA M") case No. 99/PDT.G/2019/PN.BKN.	KOPSA M sebagai penggugat dan Perusahaan sebagai tergugat KOPSA M as plaintiff and Company as defendant.	Perusahaan merupakan tergugat kerugian materiil KOPSA M sebesar Rp129.980.911.500 dikarenakan ketidaksepakatan dalam pembangunan kebun pada lahan seluas 1.650 ha, yang terletak di Provinsi Riau. The Company is a defendant to a lawsuit regarding material loss amounted to Rp129,980,911,500 due to disagreement in development estate on an area of 1,650 ha, which located at Riau Province.	KOPSA M mengajukan pencabutan permohonan Kasasi melalui Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Juni 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan ini, Perusahaan belum menerima tindak lanjut permohonan tersebut dari Mahkamah Agung KOPSA M filed the revocation of the Cassation application through the Bangkinang District Court on June 3, 2021. As of the completion date of this report, the Company has not yet received a follow-up on the request from the Supreme Court.



Entitas Entity	Kasus Case	Para Pihak The Parties	Objek Object	Status Status
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIII) The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara XIII)	Sengketa Tanah Kebun Gunung Emas 18/ Pdt.G/2021/PN jo. 2/PDT/2022/PT PTK jo. 2135 K/Pdt/2022. Land Dispute Gunung Emas 18/Pdt.G/2021/PN jo. 2/PDT/2022/PT PTK jo. 2135 K/Pdt/2022.	Perusahaan sebagai penggugat dan Ilu Dkk, BPN Kab. Sanggau sebagai tergugat. The Company as the defendant and Ilu Dkk, BPN Kab. Sanggau as the plaintiff.	Tanah 14,23 Ha milik eks PTPN XIII Afdeling II Kebun Gunung Emas. Land owned by eks PTPN XIII Afdeling II Gunung Emas Estate.	Eks PTPN XIII mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, atas Putusan MA RI Nomor 2135K/PDT/2022 tanggal 28 Juli 2022 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Sanggau dengan sesuai Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali nomor : 2/Akta Pdt.PK/2023/PN.Sag. PTPN XIII has filed a Request for Judicial Review, against the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2135K/PDT/2022 dated July 28, 2022, to the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Sanggau District Court in accordance with the Receipt of the Review Memorandum number: 2/Akta Pdt.PK/2023/PN.Sag.
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIII) The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara XIII)	Sengketa Tanah Kebun Pandawa No: 1/ Pdt.G/2019/PN.Tgt jo. 101/PDT/2019/PT SMR Jo. 1404/K /PDT/2020 Jo. 264 PK/PDT/2022. Land Dispute Pandawa Estate No: 1/ Pdt.G/2019/PN.Tgt jo. 101/PDT/2019/PT SMR Jo. 1404/K /PDT/2020 Jo. 264 PK/PDT/2022.	PT Pucuk Jaya sebagai penggugat dan Yordan Redan dan Masyarakat Dusun Daet sebagai tergugat. The Company as the defendant and Yordan Redan and Dusun Daet Community as the plaintiff.	Tanah 165,03 Ha milik eks PTPN XIII Kebun Pandawa Land 165.03 Ha owned by former PTPN XIII Pandawa Estate.	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih melakukan upaya mediasi. As of the issuance date of these consolidated financial statements, the mediation process is still ongoing.
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIII) The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara XIII)	Sengketa Kebun Longkali No. 21/ Pdt.G/2022/PN Tgt. Dispute Longkali estate No. 21/Pdt.G/2022/PN Tg.	Marten dkk Sebagai Penggugat, PTPN XIII Sebagai Tergugat, dan BPN Kab. Paser Sebagai Turut Tergugat. Marten and others as Plaintiff, PTPN XIII as Defendant, and BPN Kab. Paser as Defendant.	Marten dkk. mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dugaan penguasaan lahan milik Marten dkk. (para penggugat) oleh PTPN XIII (selaku tergugat) yang selanjutnya dilakukan penebangan dan/atau pembinasaan tanam tumbuh / pohon-pohonan tanpa adanya ganti rugi kepada Para Penggugat, dan kemudian tergugat melakukan penanaman pohon karet yang selanjutnya setelah 25 tahun dilakukan penanaman tanaman kelapa sawit di area tanah Para Penggugat tanpa menghiraukan keberatan dan protes dari Para Penggugat. Marten & others filed a civil lawsuit for Unlawful Acts (PMH) over the alleged control of land owned by Marten & others (the plaintiffs) by PTPN XIII (as the defendant) which was then carried out logging and / or destruction of planting / trees without compensation to the Plaintiffs, and then the defendant planted rubber trees further after 25 years of planting oil palm plants in the Plaintiffs' land area regardless of objections and protests of the Plaintiffs.	Menyatakan gugatan Para Pembanding (Marten CS) semula Para Penggugat tidak dapat diterima. Declaring the claim of the Claimants (Marten and others) originally the Plaintiffs inadmissible.

Entitas Entity	Kasus Case	Para Pihak The Parties	Objek Object	Status Status
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIII) The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara XIII)	Sengketa Kebun Danau Salak No. 15/G/2021/PTUN. BJM Jo.127/B/2022/ PT.TUN.JKT. Dispute Salak Lake estate No. 15/G/2021/PTUN. BJM Jo.127/B/2022/PT. TUN. JKT.	H. Zulwahid dan H. Abdul Hakim selaku Para Penggugat, BPN Kab. Banjar selaku Tergugat, PTPN XIII dan PT Bank Mandiri selaku Para Tergugat Intervensi. H. Zulwahid and H. Abdul Hakim as Plaintiffs, BPN Kab. Banjar as Defendants, PTPN XIII and PT Bank Mandiri as Intervention Defendants.	Klaim kepemilikan lahan seluas 134 Ha. Land ownership claim of 134 Ha.	H. Zulwahid dan H. Abdul Hakim telah mengajukan Permohonan PK dan PTPN XIII pada tanggal 27 Maret 2023 telah menyerahkan kontra memori PK. H. Zulwahid and H. Abdul Hakim have filed a PK Application and PTPN XIII on March 27, 2023 has submitted a counter-memory of PK.

### Dampak Terhadap Perusahaan

Permasalahan hukum perdata dan pidana yang dijalani Perseroan tidak memberikan dampak signifikan dan materiel terhadap kelangsungan usaha Perusahaan.

### Permasalahan Hukum Dewan Komisaris dan Direksi

Selama tahun 2023, tidak terdapat perkara penting yang melibatkan anggota Dewan Komisaris dan Direksi Perusahaan yang sedang menjabat.

### Upaya Meminimalisir Risiko Hukum

Perseroan senantiasa berupaya untuk meminimalisir risiko hukum dengan melakukan upaya-upaya berikut ini:

1. Melaksanakan program *Legal Risk Awareness* secara konsisten untuk mencegah risiko hukum dan meningkatkan kualitas pemahaman aspek hukum bagi karyawan di seluruh lapisan jabatan.
2. Memperkuat budaya Perseroan dan integritas melalui sosialisasi dan pengukuran pemahaman pegawai terhadap integritas.
3. Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi.
4. Menegakkan kedisiplinan karyawan.

### Informasi atas Sanksi Administratif

Selama tahun 2023, Perseroan tidak menerima sanksi dalam bentuk apa pun dari lembaga maupun regulator yang berwenang.

### Kepatuhan Terhadap Pajak

Selama tahun 2023, Perseroan telah melaksanakan kewajiban penyetoran dan pembayaran pajak secara tepat waktu sesuai peraturan perpajakan yang berlaku.

### Impact on the Company

The civil and criminal legal issues experienced by the Company did not have a significant and material impact on the continuity of the Company's business.

### Legal Issues for the Board of Commissioners and Directors

In 2023, there were no significant cases involving current members of the Company's Board of Commissioners and Board of Directors.

### Efforts to Minimize Legal Risk

The Company consistently strives to minimize legal risks by implementing the following efforts:

1. Consistently implement the Legal Risk Awareness program to prevent legal risks and improve employees' understanding of legal aspects at all levels of positions.
2. Strengthen the Company's culture and integrity through socialization and measuring employee understanding of integrity.
3. Establish a Gratification Control Unit.
4. Enforce employee discipline.

### Information on Administrative Sanctions

During 2023, the Company did not receive any form of sanctions from authorized institutions or regulators.

### Tax Compliance

During 2023, the Company has carried out its obligations to deposit and pay taxes on time by applicable tax regulations.



## Akses Informasi dan Data Perusahaan

Perseroan telah menyusun dan melaporkan informasi keuangan dan nonkeuangan secara transparan kepada pemegang saham, pemangku kepentingan dan lembaga lain yang dipersyaratkan. Informasi-informasi tersebut disajikan dengan lengkap dan akurat, terkini, utuh, dan memadai sesuai dengan tata cara, jenis, dan cakupan dan dilaporkan secara tepat waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan tentang transparansi kondisi Perseroan.

Perseroan menyediakan media yang tepat, mudah, dan aksesibel bagi seluruh pemangku kepentingan agar dapat memperoleh informasi mengenai Perseroan, salah satunya adalah situs web. Perseroan juga mempublikasikan laporan tahunan baik kepada otoritas dan publik yang dapat diakses dalam situs web resmi.

### Keterbukaan dalam Komunikasi Internal

Perseroan memanfaatkan sarana komunikasi internal untuk menyebarkan informasi antar pihak internal dalam organisasi agar tercipta hubungan kerja yang konstruktif. Oleh karena itu, Perseroan senantiasa menciptakan komunikasi dua arah kepada karyawan melalui berbagai media komunikasi. Komunikasi internal di Perseroan juga dilakukan dalam berbagai aktivitas operasional seperti rapat internal, rapat *townhall*, termasuk kegiatan *employee gathering/family gathering*.

### Keterbukaan dalam Komunikasi Eksternal

Perseroan aktif berkomunikasi dengan pihak eksternal untuk meningkatkan kualitas interaksi yang kondusif dan kepercayaan pemangku kepentingan terhadap Perseroan. Selain itu, komunikasi eksternal juga merupakan bentuk kewajiban pemenuhan keterbukaan informasi yang telah ditetapkan oleh regulator. Perseroan memiliki berbagai sarana informasi yang dapat diakses dengan mudah oleh pemangku kepentingan, antara lain:

## Access to Company Information and Data

The Company has transparently compiled and reported both financial and non-financial information to shareholders, stakeholders, and other necessary institutions. This information is presented completely and accurately, and is kept up-to-date, intact, and adequate in accordance with the relevant procedures, types, and scope. It is reported in a timely manner as regulated in the provisions regarding transparency of the Company's conditions.

The Company provides appropriate, easily accessible media for all stakeholders to obtain information about the Company, including through its website. The company also publishes annual reports for both authorities and the public, which can be accessed on the official website.

### Transparency in Internal Communication

The Company uses internal communication tools to share information among employees and build positive working relationships. This involves establishing two-way communication channels through various media. Internal communication is integrated into operational activities, including internal meetings, townhall meetings, and employee and family gathering events.

### Transparency in External Communication

The Company actively engages with external parties to enhance the quality of interactions and build trust with stakeholders. In addition, external communication is a way to meet the information disclosure requirements set by regulators. The Company provides various information channels that are easily accessible to stakeholders, including:



### Kantor Direksi

#### Board of Directors' Office

Jl. Letjen Suprpto No. 2, Hamdan, Kec. Medan Maimun, Kota Medan, Sumatera Utara 20151  
☎ (061) 418274



### Kantor Perwakilan dan Dewan Komisaris di Jakarta Representative and the Board of Commissioners' Office at Jakarta

Jl. Wijaya X No. 3, RT. 4/RW. 4, Melawai, Kec. Kby. Baru, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Jakarta 12170



### Situs Resmi

#### Official Website

[www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id)

Situs web menyediakan informasi seputar Perseroan, seperti profil, kinerja, pengumuman pengadaan maupun lowongan, serta informasi lainnya.

The website provides information about the Company, such as profile, performance, procurement and vacancy announcements, and other information.



### Sistem Informasi E-Procurement

#### E-Procurement Information System

Sistem ini digunakan untuk melakukan proses pengadaan barang dan jasa secara online. Sistem ini merupakan salah satu langkah Perusahaan untuk mewujudkan proses pengadaan proses pengadaan barang dan jasa yang adil, transparan, efektif, dan efisien sesuai prinsip-prinsip GCG.

This system is used to procure goods and services online. It is one of the Company's steps to realize a fair, transparent, effective, and efficient procurement process for goods and services following GCG principles.



### Buletin PTPN IV "MINAT"

#### PTPN IV's Bulletin "MINAT"

Buletin ini terbit setiap bulan dan dapat diakses melalui situs web Perseroan.

This bulletin is published monthly and can be accessed via the Company's website.



### Media Sosial

#### Social Media

- Ptpn PalmCo
- ptpn4\_palmco
- ptpn4\_palmco
- [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id)
- PTPN IV
- ptpn4\_palmco
- [ptpnusantara4@ptpn4.co.id/](mailto:ptpnusantara4@ptpn4.co.id)  
[corsecpalmcon4@gmail.com](mailto:corsecpalmcon4@gmail.com)



### Media Layanan Pengaduan

#### Whistleblowing System

☎ 08113621212

✉ [layananpengaduan@ptpn4.co.id](mailto:layananpengaduan@ptpn4.co.id)

Formulir online yang tersedia di *Electronic Room* pada situs Perseroan

The online form available in the Electronic Room on the Company's website

## Metode Komunikasi dengan Pemegang Saham dan Pemangku Kepentingan

Berikut adalah beragam media dan metode komunikasi yang dilakukan Perseroan kepada para pemegang saham dan pemangku kepentingan:

## Communication Methods with Shareholders and Stakeholders

The following are a number of media and communication methods used by the Company to shareholders and stakeholders:

Sasaran Goal	Media Informasi Media Information	Fungsi Media Media Functions
<b>Pemegang Saham</b> Shareholders		
Pemerintah Republik Indonesia melalui Kementerian BUMN Government of the Republic of Indonesia through the Ministry of SOEs	RUPS, Rapat dengan Kementerian BUMN, Laporan Tahunan GMS, Meeting with the Ministry of SOEs, Annual Report.	Penjelasan tentang kinerja dan kondisi Perseroan terkini Explanation of the Company's latest performance and condition
<b>Pemangku Kepentingan Internal</b> Internal Stakeholders		
Direksi dan Dewan Komisaris Board of Directors and Board of Commissioners	Mekanisme organisasi Organizational mechanism	Pengelolaan operasional dan usaha Operational and business management
Karyawan Employees	Serikat Pekerja, Buletin Internal Trade Unions, Internal Bulletins	Penjelasan tentang kinerja dan isu-isu yang relevan terkait Perseroan Explanation of performance and relevant issues related to the Company
<b>Pemangku Kepentingan Eksternal</b> External Stakeholders		



Sasaran Goal	Media Informasi Media Information	Fungsi Media Media Functions
Dewan Perwakilan Rakyat House of Representatives	Rapat Dengar Pendapat (RDP) Hearing Meeting (RDP)	Penjelasan tentang klarifikasi atas isu-isu terkait dengan Perseroan Explanation of clarification on issues related to the Company
Pelanggan/Konsumen Customer/Consumer	Brosur dan poster Perseroan, pameran, seminar, jalur keluhan pelanggan/konsumen Company brochures and posters, exhibitions, seminars, and customer/consumer complaint lines	Penjelasan tentang produk, kegiatan promosi, penanganan keluhan, dan edukasi Product description, promotional activities, handling complaints, and education
Kreditur Creditor	Proposal studi kelayakan, paparan publik Feasibility study proposal, public exposure	Penjelasan rencana penggunaan dan pengembalian dana Explanation of fund usage and refund plans
Mitra Kerja, Rekanan, Pemasok, Vendor Work Partners, Partners, Suppliers, Vendors	Profil Perseroan Company Profile	Penjelasan tentang peluang kerja sama Explanation of cooperation opportunities
Masyarakat Public	Seminar, pameran, paparan publik, media massa Seminars, exhibitions, public exposure, mass media	Penjelasan tentang kinerja dan kondisi terkini Perseroan Explanation of the Company's current performance and condition

## Kode Etik Perusahaan

Perseroan telah merumuskan Kode Etik Perusahaan untuk meningkatkan kualitas penerapan GCG serta menerapkan standar etika terbaik dalam menjalankan aktivitas bisnis agar sesuai dengan visi, misi, dan budaya Perusahaan. Kode Etik Perseroan dipercaya dapat mendorong peningkatan nilai dan pertumbuhan bisnis jangka panjang secara berkelanjutan.

Etika Kerja merupakan bagian dari Kode Etik Perusahaan yang mewajibkan setiap insan Perseroan untuk menjunjung tinggi kepatuhan terhadap hukum yang berlaku. Dalam melakukan pekerjaan sehari-hari, setiap karyawan wajib menaati hukum dan menampilkan perilaku yang baik dan beretika.

Pedoman Perilaku (*Code of Conduct*) Perseroan telah berlaku sejak tahun 2007. Pedoman ini memuat nilai-nilai etika yang menjadi kebijakan dan standar perilaku yang diwajibkan bagi setiap anggota perusahaan, yang menguraikan komitmen, sikap, dan perbuatan yang wajib dan dilarang untuk dilaksanakan. Perseroan senantiasa mengkaji dan memperbaharui Pedoman Perilaku sesuai kebutuhan, perkembangan dunia usaha, dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Revisi Pedoman Perilaku yang terakhir dilakukan pada tahun 2023 dan telah disahkan oleh Komisaris Utama dan Direktur pada 21 Juli 2023.

### Pemberlakuan Kode Etik Perusahaan

Pedoman Perilaku berlaku untuk seluruh anggota Perseroan tanpa terkecuali, termasuk Dewan Komisaris, Direksi, Komite-komite Dewan Komisaris, kepala bagian, manajer, karyawan pimpinan, dan karyawan pelaksana. Seluruh anggota Perseroan wajib menjunjung tinggi dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai dan aturan perilaku yang tercantum di dalam Pedoman Perilaku. Selain itu, seluruh pemangku kepentingan

## Code of Ethics

The Company has established a Code of Ethics to enhance the implementation of GCG and uphold the highest ethical standards in conducting business activities aligning with the Company's vision, mission, and culture. The Code of Ethics is expected to promote increased value and sustainable long-term business growth.

Work Ethics is an integral part of the Code of Ethics, mandating all employees to comply with relevant laws. In their daily work, all employees are required to adhere to the law and exhibit good and ethical conduct.

The Company's Code of Conduct has been effective since 2007. It encompasses ethical values, policies, and behavioral standards that all company members must follow. It outlines the commitments, attitudes, and actions that are mandatory and prohibited. The Company consistently reviews and updates the Code of Conduct in line with business needs, industry developments, and statutory regulations. The most recent revision of the Code of Conduct was conducted in 2023 and was approved by the President Commissioner and Directors on July 21, 2023.

### Implementation of the Company Code of Ethics

The Code of Conduct applies to all members of the company without exception, including the Board of Commissioners, Board of Directors, Board of Commissioners Committees, department heads, managers, management employees, and executive employees. All members of the Company are obligated to uphold and behave in accordance with the values and rules of conduct stated in the Code of Conduct. Additionally,

Perseroan juga harus memahami dan menaati ketentuan yang mengikat dari Pedoman Perilaku. Seluruh anggota Perseroan wajib menandatangani Surat Pernyataan Kepatuhan setiap awal tahun sebagai bentuk persetujuan untuk menaati seluruh isi Pedoman Perilaku.

## Pokok-Pokok Kode Etik Perusahaan

### Etika Usaha

#### Kewajiban dan Hak Pelaku Bisnis

- Pelaku Bisnis
- Kewajiban dan Hak Pelaku Bisnis
- Surat Pernyataan Tidak Memiliki Benturan Kepentingan
- Pengamanan Harta Benda Perusahaan
- Integritas Laporan Keuangan dan Non Keuangan
- Kerahasiaan Informasi dan Aset Tak Berwujud
- Keselamatan, Kesehatan, dan Kelestarian Lingkungan Kerja
- Kesempatan Kerja yang Sama

#### Larangan Bagi Pelaku Bisnis

- Benturan Kepentingan
- KKN dan Suap (Gratifikasi)
- Kegiatan Politik
- Narkoba dan Perjudian
- Jamuan Bisnis
- Hadiah, Cendera Mata, dan Sumbangan
- Perbuatan Tercela

### Etika Kerja

#### Etika dengan Pemangku Kepentingan Lainnya

- Perilaku Terhadap Pemegang Saham
- Perilaku Terhadap Rekanan
- Perilaku Terhadap Kreditur
- Perilaku Terhadap Pelanggan/Pembeli
- Perilaku Terhadap Anak Perusahaan dan Perusahaan Patungan
- Perilaku Terhadap Persaingan yang Sehat
- Perilaku Terhadap Pemerintah
- Perilaku Terhadap Lembaga Legislatif
- Perilaku Terhadap Masyarakat
- Perilaku Terhadap Media Massa

## Sosialisasi Kode Etik Perusahaan

Perseroan aktif melakukan sosialisasi Pedoman Perilaku ke seluruh anggota Perseroan dengan beragam metode, seperti melalui majalah bulanan "Minat", pertemuan dan aktivitas karyawan, dan sebagainya. Setiap bawahan berhak meminta penjelasan yang objektif kepada atasannya terkait bentuk tugas dan tanggung jawabnya.

## Pelaporan Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

Setiap anggota Perseroan diharapkan dapat melaporkan pelanggaran terhadap Pedoman Perilaku dengan menghubungi atasan langsung, atasan dari atasan langsung, dan Departemen SDM. Pelaporan ini dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

all Company stakeholders must understand and comply with the binding provisions of the Code of Conduct. All Company members are required to sign a Compliance Statement at the beginning of each year as a form of agreement to comply with all contents of the Code of Conduct.

## Principles of the Company's Code of Ethics

### Business Ethics

#### Obligations and Rights of Business Actors

- Business Actors
- Obligations and Rights of Business Actors
- Statement Letter of No Conflict of Interest
- Security of Company Assets
- Integrity of Financial and Non-Financial Reports
- Confidentiality of Information and Intangible Assets
- Safety, Health and Sustainability of the Work Environment
- Equal Employment Opportunities

#### Prohibitions for Business Actors

- Conflict of Interest
- KKN and Bribery (Gratification)
- Political Activities
- Drugs and Gambling
- Business Dinner
- Gifts, Souvenirs and Donations
- Disgraceful Acts

### Work Ethics

#### Ethics with Other Stakeholders

- Behavior towards Shareholders
- Behavior towards Partners
- Behavior towards Creditors
- Behavior towards Customers/Buyers
- Behavior towards Subsidiaries and Joint Venture Companies
- Behavior towards Fair Competition
- Behavior towards the Government
- Behavior towards the Legislative Institution
- Behavior towards Public
- Behavior towards Mass Media

## Socialization of the Company's Code of Ethics

The Company actively shares the Code of Conducts with all members through various methods, such as the monthly magazine "Minat", employee meetings, and activities. Every employee has the right to ask their supervisor for an objective explanation of their duties and responsibilities.

## Reporting Violations of the Company's Code of Ethics

Every member of the Company is expected to report violations of the Code of Conduct by contacting their immediate superior, their immediate superior's superior, and the HR Department. This reporting is carried out through the following mechanisms:

1. Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan pimpinan dan karyawan pelaksana dilaporkan kepada pimpinan unit kerjanya dengan tembusan kepada bagian yang ditetapkan oleh Direksi di kantor pusat.
2. Pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan pimpinan setingkat manajer dilaporkan kepada Direksi bidang terkait dengan tembusan kepada bagian yang akan ditetapkan oleh Direksi di kantor pusat.
3. Pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi dilaporkan kepada Dewan Komisaris dengan tembusan kepada pemegang saham.
4. Pelanggaran yang dilakukan oleh Dewan Komisaris dilaporkan kepada Pemegang Saham.
5. Pelaporan pelanggaran harus disertai data atau bukti-bukti yang mendukung agar dapat dilakukan pemeriksaan atas laporan tersebut.

### Sanksi terhadap Pelanggaran Kode Etik Perusahaan

Setiap individu yang terbukti melakukan pelanggaran dalam tingkatan apapun akan dikenakan tindakan disipliner atau sanksi lainnya sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan Perseroan. Pemberian sanksi dilakukan secara tertulis oleh:

- RUPS/Pemegang Saham apabila pelanggaran dilakukan oleh Dewan Komisaris.
- RUPS/Pemegang Saham apabila pelanggaran dilakukan oleh Direksi dengan tembusan kepada Dewan Komisaris.
- Direksi apabila pelanggaran dilakukan oleh karyawan Perseroan.

Selama tahun 2023 dan 2022, jumlah sanksi yang diberikan kepada karyawan yang melanggar Pedoman Perilaku Perseroan adalah sebagai berikut:

Jenis Punishment Types of Punishment	2023		2022	
	Karyawan Pelaksana	Karyawan Pimpinan	Karyawan Pelaksana	Karyawan Pimpinan
Surat Peringatan I Warning Letter I	423	69	22	24
Surat Peringatan II Warning Letter II	203	8	6	6
Surat Peringatan III Warning Letter III	169	1	3	3
Surat Teguran Tertulis Written Reprimand Letter	2.169	439	7	30
Surat Teguran Lisan Verbal Reprimand Letter	-	-	2	4
Demosi Demotion	4	2	0	0
PHK Layoffs	240	-	0	0
Lain-lain Others	-	-	2	4
<b>Jumlah Total</b>	<b>3.208</b>	<b>519</b>	<b>40</b>	<b>67</b>

1. Violations committed by management and executive employees are to be reported to the head of their work unit, with a copy sent to the section determined by the Board of Directors at the head office.
2. Violations committed by management level employees are to be reported to the Board of Directors in the relevant field, with a copy sent to the department decided by the Board of Directors at the head office.
3. Violations committed by the Board of Directors are to be reported to the Board of Commissioners, with a copy sent to the shareholders.
4. Violations committed by the Board of Commissioners are to be reported directly to the Shareholders.
5. Reporting violations must be accompanied by supporting data or evidence for proper examination of the report.

### Sanctions for Violations of the Company's Code of Ethics

Any individual who is found to have committed a violation at any level will be subject to disciplinary action or other sanctions in accordance with statutory regulations and Company regulations. Sanctions will be given in writing by:

- GMS/Shareholders if violations are committed by the Board of Commissioners.
- GMS/Shareholders if violations are committed by the Board of Directors with a copy to the Board of Commissioners.
- Board of Directors if violations are committed by the Company's employees.

The number of sanctions given to employees who violate the Company's Code of Conduct in 2023 and 2022 is as follows:



## Pakta Integritas dan Tata Kelola Pengadaan Barang dan Jasa

Perseroan secara khusus mewajibkan seluruh pihak yang terlibat dalam proses dan kegiatan pengadaan barang dan jasa untuk menandatangani Pakta Integritas. Hal ini dilakukan sebagai upaya pencegahan praktik kecurangan dan/atau ketidaksesuaian yang mungkin dapat terjadi. Melalui mekanisme pakta integritas dan tata kelola pengadaan barang, tidak terdapat kegiatan pengadaan barang dan jasa yang terindikasi praktik kecurangan dan/atau ketidaksesuaian.

## Inisiatif Antikorupsi

Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi menyebutkan bahwa pengertian korupsi mencakup perbuatan melawan hukum, memperkaya diri orang/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 2); menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (Pasal 3); kelompok delik penyuaian (Pasal 5, 6, dan 11); kelompok delik penggelapan dalam jabatan (Pasal 8, 9, dan 10); delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12); delik yang berkaitan dengan pemborongan (Pasal 7); hingga delik gratifikasi (Pasal 12B dan 12C).

Perseroan berkomitmen penuh untuk menjaga kredibilitas dan transparansinya dengan menegaskan pelaksanaan kebijakan antikorupsi sebagai upaya mendasar dari penerapan prinsip GCG. Kebijakan Perseroan untuk mendukung praktik antikorupsi, kolusi, dan nepotisme tertuang dalam Pedoman Etika Usaha dan Tata Perilaku, Pedoman Pengendalian Gratifikasi, Kebijakan *Whistleblowing System* dan Kebijakan Kepatuhan dan Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Secara khusus, Pedoman Pengendalian Gratifikasi bertujuan untuk membingkai dan memastikan bahwa setiap anggota Perseroan bekerja dengan jujur, bersih, dan transparan dengan tidak menerima gratifikasi dalam bentuk apa pun dan oleh karena alasan apa pun. Tindakan gratifikasi dapat menyebabkan seorang individu menerima tuduhan tindak pidana suap sebagaimana diatur pada Pasal 12 B ayat (1) UU 31/1999 Jo. UU 20/2011 yang menyatakan bahwa setiap gratifikasi kepada pegawai negeri atau penyelenggara negara dianggap pemberian suap, apabila berhubungan dengan jabatannya dan yang berlawanan dengan kewajiban atau tugasnya.

Sepanjang tahun 2023, Perseroan tidak menemukan adanya tindakan atau aksi gratifikasi oleh dan kepada anggota Perseroan.

## Integrity Pact and Governance for Procurement of Goods and Services

The Company specifically requires everyone involved in procuring goods and services to sign an Integrity Pact. This is to prevent any possible fraudulent practices or discrepancies. Through an integrity pact and proper procurement governance, all goods and services procurement activities are free from fraudulent practices and non-compliance.

## Anti-Corruption Initiatives

Law No. 31 of 1999 Jo. Law No. 20 of 2001 concerning the Eradication of Corruption Crimes define that corruption includes acts against the law, enrichment of an individual or entity at the expense of the state's finances or economy (Article 2); abusing authority in a way that could harm the state's finances or economy (Article 3); bribery offense group (Articles 5, 6, and 11); embezzlement in office (Articles 8, 9, and 10), extortion in office (Article 12), contracting offenses (Article 7), and the offense of gratification (Articles 12B and 12C).

The Company is fully committed to upholding its credibility and transparency by prioritizing the implementation of anti-corruption policies a fundamental step in adhering to GCG principles. The Company's anti-corruption, collusion, and nepotism policies are outlined in the Business Ethics and Code of Conduct Guidelines, Gratification Control Guidelines, Whistleblowing System Policy, and Compliance Policy, as well as in the Management of State Officials' Wealth Reports (LHKPN).

In particular, the Gratification Control Guidelines are designed to ensure that every member of the Company conducts themselves honestly, cleanly, and transparently by refraining from accepting gratification in any form or for any reason. Accepting gratification can lead to criminal charges for bribery, in accordance with Article 12B, paragraph (1) of Law 31/1999 Jo. Law 20/2011. According to this law, any gratification given to civil servants or state officials constitutes bribery if it is related to their position and contradicts their obligations or duties.

Throughout 2023, the Company did not uncover any instances of gratification involving members of the Company.



## Sistem Pelaporan Pelanggaran

Sebagai bentuk kepatuhan atas prinsip akuntabilitas, Perseroan menerapkan Sistem Pelaporan Pelanggaran (*Whistleblowing System/WBS*) dan tim khusus untuk memungkinkan pemangku kepentingan dalam melaporkan indikasi tindak penipuan, transaksi tidak pantas, penyimpangan, atau penyalahgunaan wewenang yang terjadi di lingkungan bisnis Perseroan.

WBS adalah mekanisme penanganan pelaporan atas dugaan pelanggaran, kecurangan, atau hal-hal lainnya yang melanggar kode etik dan/atau peraturan perundang-undangan yang berpotensi merugikan Perseroan. Melalui WBS, pelaporan dapat disampaikan dengan rahasia dan aman. Untuk itu, Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor sebagai bentuk perlindungan terhadap pelapor.

Pedoman WBS terakhir diperbaharui tahun 2020 yang memfasilitasi mekanisme penyampaian laporan pelanggaran berbasis web melalui [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id).

### Pengaduan atas Pelanggaran

Karyawan diwajibkan untuk melapor kepada Perseroan apabila terdapat indikasi/dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Perseroan. Perseroan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran dari pelapor yang mencantumkan identitasnya dan bukti-bukti yang sah. Jenis pelanggaran yang dapat dilaporkan kepada Unit Pengelola Pengaduan Pelanggaran (UP3), antara lain:

1. Benturan kepentingan;
2. Korupsi;
3. Pencurian atau penggelapan;
4. Pelanggaran proses pengadaan barang/jasa;
5. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan;
6. Suap/gratifikasi;
7. Perbuatan curang;
8. Kegiatan-kegiatan lain yang merugikan Perusahaan.

Pengaduan atas pelanggaran dilakukan sebagai berikut:

1. Perseroan wajib menerima dan menyelesaikan pengaduan pelanggaran dari pelapor, dengan syarat:
  - a. Mencantumkan identitas dan bukti-bukti yang jelas atau;
  - b. Dapat tidak mencantumkan identitas namun melampirkan bukti-bukti yang dapat diyakini adalah benar.
2. Karyawan diwajibkan untuk melapor kepada Perseroan apabila terdapat indikasi/dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Perseroan, yang meliputi pokok masalah, lokasi dan waktu kejadian, pihak yang terlibat, kronologi kejadian, ketersediaan bukti pendukung, dan keterangan apakah kasus pelanggaran yang diadukannya pernah dilaporkan kepada orang/pihak lain.

## Whistleblowing System

In accordance with the principle of accountability, the Company has established a Whistleblowing System (WBS) and a dedicated team to allow stakeholders to report any suspected fraud, inappropriate transactions, irregularities, or abuse of authority within the Company's business environment.

The WBS is a mechanism for managing reports of suspected violations, fraud, or other activities that go against the code of ethics and/or laws and regulations, potentially harming the Company. Through the WBS, reports can be submitted confidentially and safely. The Company ensures the confidentiality of the reporter's identity to protect them.

The guidelines for the WBS was last renewed in 2020, which facilitated the web-based mechanism of violation report submission through [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id).

### Complaints of Violations

Employees are required to report any suspected violations in the Company's management. The Company must receive and address complaints from whistleblowers who provide their identity and valid evidence. Types of violations that can be reported to Unit Pengelola Pengaduan Pelanggaran (UP3) including:

1. Conflict of interest;
2. Corruption;
3. Theft or embezzlement;
4. Violation of the goods/services procurement process;
5. Abuse of position/authority;
6. Bribery/gratification;
7. Fraudulent acts; and
8. Other activities detrimental to the company.

Complaints regarding violations are made as follows:

1. The Company must receive and address violations complaints from the reporter with following terms:
  - a. Include clear identity and evidence or;
  - b. Choose not to disclose identity but attach evidence that is believed to be true.
2. Employees must report any indications/alleged violations in the Company's management, including the subject matter, location and time of the incident, parties involved, chronology of the incident, availability of supporting evidence, and information on whether the violation case has been reported to anyone else.

3. Pelapor yang berbentuk badan hukum wajib membuktikan mempunyai kewenangan mewakili badan hukum.

### Penyampaian Laporan Pelanggaran

Aksi korporasi pembentukan *Sub Holding* PTPN IV menyebabkan Bagian SPI yang ada di PT Perkebunan Nusantara III, V, VI, dan XIII tersebut bergabung dalam Divisi SPI – PT Perkebunan Nusantara IV yang membawahi SPI yang berada di *Head Office* dan Satuan Pengawasan Intern yang berada di regional atau wilayah eks PT Perkebunan Nusantara yang dipimpin oleh Pengawas Wilayah. Sistem WBS masih dikelola oleh masing-masing regional dengan rincian sebagai berikut:

3. Legal entities reporting violations are required to prove that they have the authority to represent the legal entity.

### Submission of Violation Reports

The corporate decision to establish Sub Holding PTPN IV led to the merger of the SPI Sections in PT Perkebunan Nusantara III, V, VI, and XIII into the SPI Division – PT Perkebunan Nusantara IV. This division is responsible for overseeing the SPI at the Head Office and those in the former PT Perkebunan Nusantara areas under the leadership of the Regional Supervisor. The WBS is still managed separately by each region with the following details:



#### Regional I

PT Perkebunan Nusantara – Regional I menyediakan media komunikasi untuk penyampaian laporan, yaitu:

PT Perkebunan Nusantara – Regional I provide communication channel for submitting reports, namely:

- Jl. Sei Batanghari No. 2, Medan
- (061) 845 2244 Ext. 99
- 0811 6074 003

#### Regional II

PT Perkebunan Nusantara – Regional II menyediakan media komunikasi untuk penyampaian laporan, yaitu:

PT Perkebunan Nusantara – Regional II provide communication channel for submitting reports, namely:

- [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id)
- [pengaduan@ptpn4.co.id](mailto:pengaduan@ptpn4.co.id)
- 0811 6171 900

#### Regional III

PT Perkebunan Nusantara – Regional III menyediakan media komunikasi untuk penyampaian laporan, yaitu:

PT Perkebunan Nusantara – Regional III provide communication channel for submitting reports, namely:

- [ptpn5@ptpn5.co.id](mailto:ptpn5@ptpn5.co.id)
- 0811 7060 555
- 1342 Pekanbaru

Kotak Pelaporan: Disediakan di lobi kantor Regional III dan pada masing-masing kantor distrik.  
Reporting Submission Box: Provided in the lobby of the Regional III office and at each district office.

#### Regional IV

PT Perkebunan Nusantara – Regional IV menyediakan media komunikasi untuk penyampaian laporan, yaitu:

PT Perkebunan Nusantara – Regional IV provide communication channel for submitting reports, namely:

- [www.ptpn6.com](http://www.ptpn6.com)
- [wbs@ptpn6.id](mailto:wbs@ptpn6.id)
- 0811 7401 666

Surat Resmi ditujukan kepada Komite Pengelola WBS dengan cara diantar langsung atau melalui pos ke alamat: Jl. Lingkar Barat I RT 20, Kenali Asam Bawah Kota Baru, Jambi - 36128.  
Official Letter attention to the WBS Management Committee through direct submission or by post to the following address: Jl. Lingkar Barat I RT 20, Kenali Asam Bawah Kota Baru, Jambi - 36128.

#### Regional V

PT Perkebunan Nusantara – Regional V menyediakan media komunikasi untuk penyampaian laporan, yaitu:

PT Perkebunan Nusantara – Regional V provide communication channel for submitting reports, namely:

- [wbs.ptpn13.id](http://wbs.ptpn13.id)
- [spi@ptpn13.id](mailto:spi@ptpn13.id)
- 0812 5635 753

## Pihak yang Mengelola WBS

Mekanisme WBS dikelola oleh UP3 yang berkedudukan di Divisi SPI dan Sekretariat Perusahaan. Anggota UP3 berasal dari karyawan bagian terkait yang diangkat dengan Surat Keputusan Direksi. UP3 mempunyai tanggung jawab sebagai berikut:

1. Mengelola *electronic room*.
2. Menerima dan melakukan verifikasi atas pengaduan pelanggaran.
3. Menganalisis bukti-bukti yang ada.
4. Menjaga kerahasiaan pelapor.
5. Menerima laporan dari pelapor atas tindakan tekanan atau ancaman dari pelapor.
6. Melakukan sosialisasi kepada karyawan dan pemangku kepentingan terkait keputusan ini.
7. Mengelola administrasi pengaduan pelanggaran.
8. Melaksanakan korespondensi dengan pelapor terkait perkembangan hal yang dilaporkan.
9. Membuat Laporan Berkala kepada Direksi atas pengelolaan pengaduan pelanggaran.
10. Bekerjasama dengan bagian terkait untuk mempublikasikan penerapan WBS di situs web Perseroan, termasuk pengungkapan jumlah laporan, status laporan, dan jumlah laporan yang sedang dan telah ditangani.

Berdasarkan Keputusan Direksi No. 04.01/Kpts/06/III/2019 tanggal 29 Maret 2019 tentang Unit Pengelola Pengaduan Pelanggaran (UP3), Perseroan mengangkat Kepala Bagian Satuan Pengawasan Intern sebagai Ketua UP3.

## Tim Pengelola Pelanggaran (TP2)

Berdasarkan hasil verifikasi, laporan pengaduan perlu ditindaklanjuti dengan investigasi. Oleh karena itu, UP3 mengusulkan kepada Direksi untuk membentuk TP2 dengan mekanisme sebagai berikut:

1. TP2 dibentuk oleh Dewan Komisaris apabila yang melakukan pelanggaran adalah Direksi.
2. Anggota TP2 berasal dari bagian terkait sesuai dengan objek laporan dan mempunyai kompetensi.
3. Dalam melaksanakan tugasnya, UP3 dan TP2 berwenang untuk:
  - a. Meminta penjelasan kepada pihak-pihak yang dianggap mempunyai hubungan dengan dugaan pelanggaran.
  - b. Meminta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan dugaan pelanggaran.
4. Apabila dipandang perlu, TP2 dalam melaksanakan investigasi dapat didampingi oleh investigator eksternal.
5. UP3 dan TP2 yang melaksanakan investigasi dilindungi oleh Perseroan dari segala bentuk ancaman, intimidasi, hukuman, ataupun tindakan tidak menyenangkan dari pihak manapun. Mekanisme kerja dan standar prosedur operasional diatur lebih lanjut dengan Surat Keputusan Direksi.

## WBS Managing Party

The WBS mechanism is managed by UP3, which is located in the SPI Division and Corporate Secretariat. Its members are appointed by the Board of Directors' Decree from employees in related departments. UP3 has several responsibilities:

1. Managing the electronic room.
2. Receiving and verifying complaints of violations.
3. Analyzing existing evidence.
4. Maintaining the confidentiality of the reporter.
5. Receiving reports from the reporter regarding acts of pressure or threats from the reporter.
6. Conducting outreach to employees and stakeholders regarding this decision.
7. Managing the administration of violation complaints.
8. Carrying out correspondence with the reporter regarding developments in the matter reported.
9. Making periodic reports to the Board of Directors regarding the management of violation complaints.
10. Collaborating with related departments to publish WBS implementation on the Company's website, including disclosure of the number of reports, report status, and the number of reports that are being and have been handled.

According to the Board of Directors' Decree No. 04.01/Kpts/06/III/2019 dated March 29, 2019 concerning the Violation Complaint Management Unit (UP3), the Company appointed the Head of the Internal Audit Unit as Head of UP3.

## Violation Management Team (TP2)

Based on the verification results, complaint reports have to be followed-up with investigation. UP3 proposes the formation of TP2 to the Board of Directors, with the following mechanism:

1. TP2 will be formed by the Board of Commissioners if the person involved in the violation is the Board of Directors.
2. TP2 members will be selected from relevant departments based on the subject of the report and their competence.
3. UP3 and TP2 will have the authority to:
  - a. Request explanations from parties related to the alleged violation.
  - b. Request documents related to the alleged violation.
4. If necessary, TP2 can be accompanied by an external investigator during the investigation.
5. UP3 and TP2 members carrying out the investigations will be protected by the Company from any threats, intimidation, punishment, or unpleasant actions from any party. The work mechanisms and standard operational procedures will be further regulated in the Board of Directors' Decree.

## Mekanisme Penyampaian Laporan

Mekanisme penyampaian dan penanganan laporan dalam sistem WBS adalah sebagai berikut:

1. Laporan dapat dikirimkan secara tertulis, di-email ke [pengaduan@ptpn4.co.id](mailto:pengaduan@ptpn4.co.id), atau disampaikan melalui situs PTPN IV, melalui laman berikut: [www.ptpn4.co.id/main/wbs](http://www.ptpn4.co.id/main/wbs).
2. Setiap pelapor akan menerima bukti tanda terima pelaporan dan/atau mencantumkan nomor registrasi pelaporan.
3. Atas laporan yang diterima, UP3 akan melakukan aksi tindak lanjut sebagai berikut:
  - a. Apabila yang dilaporkan Dewan Komisaris atau organ pendukung Dewan Komisaris, maka laporan diteruskan kepada Direktur Utama.
  - b. Apabila yang dilaporkan Direksi, maka laporan diteruskan kepada Dewan Komisaris.
  - c. Apabila yang dilaporkan karyawan, maka laporan diteruskan kepada Direktur Utama dan Direktur yang membawahi Direktorat di mana diduga terjadi pelanggaran.
4. Dalam melakukan verifikasi, apabila dibutuhkan, UP3 dapat melakukan komunikasi atau meminta keterangan tambahan dari pelapor.
5. UP3 melakukan verifikasi atas laporan pengaduan yang masuk dan memutuskan perlu tidaknya dilakukan investigasi lebih lanjut atas laporan pengaduan pelanggaran dalam waktu 30 hari kerja dan dapat diperpanjang paling lama 14 hari kerja.
6. Apabila dari hasil verifikasi menunjukkan adanya indikasi laporan tidak benar, maka UP3 tidak menindaklanjuti laporan. Apabila berdasarkan bukti-bukti yang ada memperlihatkan adanya indikasi pelanggaran, maka UP3 dapat memproses ke tahap investigasi.
7. Pelapor dapat meminta informasi perkembangan laporan yang terbukti memuat indikasi awal pelanggaran berdasarkan verifikasi UP3 dengan menginformasikan nomor registrasi.

## Tindak Lanjut Investigasi

Mekanisme terhadap tindak lanjut investigasi sebagai berikut:

1. TP2 menyampaikan hasil investigasi kepada Direksi atau Dewan Komisaris (sesuai organ yang menetapkan TP2). Setelah selesai investigasi, TP2 menyerahkan seluruh dokumen kepada UP3 untuk didokumentasikan.
2. Apabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh TP2 terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh Direksi atau Dewan Komisaris atau organ pendukung Dewan Komisaris, maka Direksi atau Dewan Komisaris (organ yang tidak melakukan pelanggaran) menyampaikan hasil investigasi TP2 kepada Pemegang Saham.
3. Apabila berdasarkan hasil investigasi yang dilakukan oleh TP2 terbukti adanya pelanggaran yang dilakukan oleh karyawan, maka TP2 memberikan rekomendasi kepada Direktur Utama dan atau Direktur Bidang terkait untuk memberikan keputusan atas tindak lanjut yang akan dilaksanakan.

## Report Submission Mechanism

The mechanism for submitting and handling reports in the WBS system is as follows:

1. Reports can be submitted in writing, sent via email to [complaint@ptpn4.co.id](mailto:complaint@ptpn4.co.id), or through the PTPN IV website, at the following page: [www.ptpn4.co.id/main/wbs](http://www.ptpn4.co.id/main/wbs).
2. Each whistleblower will receive confirmation of receipt of the report and a unique reporting registration number.
3. Upon receipt of the report, UP3 will take the following actions:
  - a. Reports from the Board of Commissioners or supporting organs will be forwarded to the Chief Executive Officer.
  - b. Reports from the Board of Directors will be forwarded to the Board of Commissioners.
  - c. Reports from employees will be forwarded to the Chief Executive Officer and the Director in charge of the Directorate where the violation is suspected to have occurred.
4. If necessary, UP3 may communicate with the reporter or request additional information during the verification process.
5. UP3 will verify the incoming complaint report and decide within 30 working days (with a possible extension of up to 14 working days) whether further investigation is necessary for the violation complaint report.
6. If the verification results indicate that the report is incorrect, UP3 will not proceed with further action. If there is evidence of a violation, UP3 may proceed to the investigation stage.
7. The whistleblower can request information on the progress of the report by providing the registration number, in the event that the report contains initial indications of violations based on UP3's verification.

## Investigation Follow-Up

The process for follow-up investigations is outlined as follows:

1. TP2 will submit the investigation results to the Board of Directors or Board of Commissioners, depending on the determining entity for TP2. Following the investigation, TP2 will transfer all documents to UP3 for documentation purposes.
2. If TP2's investigation proves that a violation has been committed by the Directors, Board of Commissioners, or supporting organs of the Board of Commissioners, then the unaffected entity (the one not involved in the violation) will report the results of TP2's investigation to the Shareholders.
3. If TP2's investigation reveals a violation committed by an employee, TP2 will provide recommendations to the Chief Executive Officer and/or Director of the relevant department to decide on the next course of action.



4. SPI menindaklanjuti rekomendasi TP2 sebagaimana yang dimaksud ayat (3). Pasal ini termasuk dan tidak terbatas menetapkan sanksi atas pelanggaran dan memutuskan perlu atau tidak untuk ditindaklanjuti secara hukum.
5. Sanksi yang dapat diberikan kepada karyawan yang terbukti melakukan pelanggaran yaitu sebagai berikut:
  - a. Surat Peringatan
  - b. Penurunan golongan
  - c. Diberhentikan dari jabatan
  - d. Pengembalian kerugian perusahaan
  - e. Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
6. Apabila berdasarkan hasil investigasi terbukti adanya pelanggaran tindak pidana, maka akan ditindaklanjuti kepada pihak yang berwenang sesuai ketentuan hukum acara pidana dan peraturan-peraturan lain yang berlaku.

### Perlindungan Pelapor

Perseroan (termasuk UP3 dan TP3) wajib memberikan perlindungan kepada pelapor yang beritikad baik. Perseroan menjamin kerahasiaan identitas pelapor sampai laporan pengaduan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku. Insan Perseroan dan seluruh pemangku kepentingan dapat berpartisipasi sebagai pelapor. Perseroan menerima dan akan memproses pengaduan pelanggaran dari pelapor yang:

1. Mencantumkan identitas dan bukti-bukti yang jelas.
2. Tidak mencantumkan identitas namun melampirkan bukti-bukti yang dapat diyakini adalah benar (minimal mencantumkan e-mail untuk berkorespondensi dengan UP3)
3. Seorang pelapor mempunyai hak:
  - a. Memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan pengaduan pelanggaran yang disampaikan.
  - b. Memberikan laporan tanpa tekanan.
  - c. Jaminan kerahasiaan identitas Pelapor dan isi laporan.
  - d. Jaminan perlindungan terhadap perlakuan yang merugikan.
  - e. Pemecatan yang tidak adil.
  - f. Perlindungan atas penurunan jabatan dan pangkat.
  - g. Perlindungan atas pelecehan atau diskriminasi dalam segala bentuk.

### Jumlah dan Status Laporan

Selama tahun 2023, terdapat 28 laporan pelanggaran yang diterima oleh Perseroan melalui surat, SMS, email, dan situs web Perseroan.

### Sosialisasi

Pada tahun 2023, Perseroan terus melakukan sosialisasi berlakunya WBS kepada seluruh pemangku kepentingan melalui situs web, majalah internal "Minat", *gathering* dengan mitra kerja, dan juga dalam kontrak kerja sama dengan pihak ketiga.

4. SPI will act on TP2's recommendations, as stated in paragraph (3). This includes but is not limited to determining sanctions for violations and deciding on the necessity of legal action.
5. Sanctions for employees found guilty of violations may include:
  - a. Warning letter
  - b. Demotion
  - c. Dismissal
  - d. Repayment of company losses
  - e. Termination of Employment
6. If the investigation proves a criminal violation, the competent authorities will be involved in accordance with the criminal procedural law and other relevant regulations.

### Whistleblower Protection

The Company, including UP3 and TP3, are required to provide protection to whistleblowers acting in good faith. The company ensures the confidentiality of the whistleblower's identity until the complaint is processed in compliance with relevant legal provisions. All company personnel and stakeholders can act as whistleblowers. The company will receive and process reports of violations from whistleblowers who:

1. Provide clear identity and evidence.
2. Do not disclose their identity but attach evidence that is deemed credible (at least provide an email for correspondence with UP3).
3. A whistleblower has the right to:
  - a. Receive protection for personal security, family, and property and be free from threats related to the submitted complaints of violations.
  - b. Submit reports without facing pressure.
  - c. Have their identity and the contents of the report kept confidential.
  - d. Be protected against any retaliatory treatment.
  - e. Be protected against unfair dismissal.
  - f. Be safeguarded against demotion in position and rank.
  - g. Be protected against harassment or discrimination in any form.

### Number and Status of Reports

During 2023, the Company received 28 violation reports via letters, SMS, emails, and the Company's website.

### Socialization

In 2023, the Company continues to socialize the implementation of the WBS to all stakeholders through the website, the internal magazine "Minat," *gatherings* with work partners, and cooperation contracts with third parties.

## Benturan Kepentingan dan Hubungan dengan Pihak Berelasi

Benturan kepentingan adalah situasi di mana Dewan Komisaris, Direksi, dan karyawan Perseroan diduga memiliki kepentingan pribadi atau keluarga terhadap setiap penggunaan wewenang dalam kedudukan atau jabatannya, sehingga dapat memengaruhi kualitas keputusan dan/atau tindakannya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Untuk itu, Perseroan memiliki Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Bersama Dewan Komisaris dan Direksi PT Perkebunan Nusantara IV No. DK/18/KPTS/2016 dan No. 04.03/02/KPTS/2016 tanggal 6 Desember 2016. Pedoman ini disusun dengan mengacu pada Peraturan Menteri BUMN No. PER-01/MBU/01/2015 tentang pedoman penanganan benturan kepentingan di lingkungan Kementerian BUMN, dan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. KPJAK/HOLD/SKPTS/26/2015 tentang pedoman umum penanganan benturan kepentingan di Lingkungan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PTPN I, II, IV s.d. XIV.

### Larangan Bagi Pelaku Bisnis

Setiap pelaku bisnis harus menghindari konflik kepentingan (*conflict of interest*) antara kepentingan pribadi dan keluarga dengan kepentingan Perseroan sebagai berikut:

1. Anggota Dewan Komisaris dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Pengurus partai politik dan/atau anggota legislatif dan/atau tidak sedang calon anggota legislatif.
  - b. Kepala/wakil kepala daerah dan/atau tidak sedang mencalonkan diri sebagai calon kepala/wakil kepala daerah.
  - c. Jabatan lain yang berpotensi menimbulkan benturan kepentingan dengan Perseroan.
  - d. Jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Dewan Komisaris.
2. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:
  - a. Anggota Direksi pada BUMN, BUMD, dan BUMS.
  - b. Anggota Dewan Komisaris/Dewan Pengawas pada BUMN.
  - c. Jabatan struktural dan fungsional lainnya pada instansi/lembaga pemerintah pusat dan/atau daerah.
  - d. Jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan; pengurus partai politik dan/atau calon/anggota legislatif dan/atau calon kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah.
3. Dilarang melakukan tindakan yang mempunyai benturan kepentingan, dan mengambil keuntungan pribadi, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

## Conflict of Interest and Relationships with Related Parties

A conflict of interest occurs when the Company's Board of Commissioners, Board of Directors, or employees are suspected of having a personal or family interest in any use of authority that could influence their decisions or actions quality, both directly and indirectly.

To address this, the Company has established Guidelines for Handling Conflicts of Interest as outlined in the Joint Decree of the Board of Commissioners and Directors of PT Perkebunan Nusantara IV No. DK/18/KPTS/2016 and No. 04.03/02/KPTS/2016 dated December 6, 2016. These guidelines were developed in accordance with the Minister of State-Owned Enterprises Regulation No. PER-01/MBU/01/2015 concerning guidelines for handling conflicts of interest within the Ministry of SOE, and the Decree of the Board of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. KPJAK/HOLD/SKPTS/26/2015 concerning general guidelines for handling conflicts of interest within PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and PTPN I, II, IV up to. XIV.

### Prohibitions for Business Actors

Every business person must avoid conflict of interest between personal and family interests and the Company's interests as follows:

1. Members of the Board of Commissioners are prohibited from holding concurrent positions as:
  - a. Political party administrators and/or legislative members and/or not currently legislative candidates.
  - b. Head/deputy regional head and/or not currently running as a candidate for regional head/deputy head.
  - c. Other positions that potentially cause a conflict of interest with the Company.
  - d. Positions based on statutory regulations are prohibited from being concurrent with the positions of members of the Board of Commissioners.
2. Members of the Board of Directors are prohibited from holding concurrent positions as:
  - a. Member of the Board of Directors at BUMN, BUMD, and BUMS.
  - b. Member of the Board of Commissioners/Supervisory Board at BUMN.
  - c. Other structural and functional positions in central and/or regional government agencies/institutions.
  - d. Other positions by provisions in statutory regulations include political party administrators, legislative candidates/members, and regional head/deputy regional head candidates.
3. It is prohibited to take actions with a conflict of interest and take personal advantage, either directly or indirectly, which could give rise to a conflict of interest.



4. Menghindari posisi atau situasi baik secara langsung maupun tidak langsung yang menimbulkan benturan kepentingan dengan kepentingan Perseroan.
5. Dilarang untuk menanamkan modal/investasi atau ikatan bisnis dengan pihak lainnya yang mempunyai keterkaitan bisnis dengan Perseroan, baik secara langsung maupun tidak langsung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan.

### Mekanisme Pelaporan

Pelaporan potensi benturan kepentingan dapat disampaikan melalui:

#### Atasan Langsung

- Pelapor: Insan Perseroan
- Pelaporan: menyampaikan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan kepada Atasan Langsung untuk disampaikan kepada Bagian Perencanaan Strategis (unit yang membawahi urusan Manajemen Risiko dan GCG), u.p. UP3.

### Sistem Pelaporan Pelanggaran

- Pelapor: Insan Perseroan atau pihak-pihak lainnya (pelanggan, mitra kerja, dan masyarakat) yang tidak memiliki keterlibatan langsung, namun mengetahui adanya atau potensi adanya benturan kepentingan.
- Pelaporan: melalui WBS

### Sanksi Terhadap Benturan Kepentingan

Pihak yang terbukti memiliki benturan kepentingan dilarang terlibat dalam pengambilan keputusan, terlibat dalam tim dan atau proyek yang terbukti yang bersangkutan memiliki benturan kepentingan. Pelanggaran terhadap ketentuan dalam pedoman penanganan benturan kepentingan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan disiplin karyawan yang berlaku. Laporan benturan kepentingan kepentingan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1. Tidak terdapat benturan kepentingan yang dilakukan oleh Dewan Komisaris, Direksi, maupun karyawan Perseroan.
2. Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan yang dilaporkan kepada Atasan Langsung sebanyak 0 surat.
3. Pelaporan melalui WBS sebanyak 0 laporan.

Selama tahun 2023, tidak terdapat sanksi terhadap benturan kepentingan.

### Kebijakan Antigratifikasi

Perseroan senantiasa mengutamakan pengelolaan bisnis yang bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN), dengan tetap memperhatikan prinsip-prinsip GCG untuk dapat melaksanakan pengelolaan yang penuh amanah, transparan, dan akuntabel. Perseroan telah memiliki Pedoman Gratifikasi yang selaras dengan Pedoman Tata Kelola Perusahaan (*Code of Corporate Governance*), dan Pedoman Perilaku, serta nilai-nilai yang berlaku di Perseroan. Pedoman Gratifikasi Perseroan terakhir diperbaharui pada tahun 2020.

4. Avoid positions or situations, either directly or indirectly, that give rise to a conflict of interest with the Company's interests.
5. It is prohibited to invest capital/investment or business ties with other parties who have a business connection with the Company, directly or indirectly, which could give rise to a conflict of interest.

### Reporting Mechanism

Reporting of potential conflicts of interest can be submitted through:

#### Direct Supervisor

- Reporter: Company Personnel
- Reporting: submit a Statement of Potential Conflict of Interest to the Direct Supervisor to be submitted to the Strategic Planning Section (the unit in charge of Risk Management and GCG affairs), u.p. UP3.

### Violation Reporting System

- Reporter: Company personnel or other parties (customers, work partners, and the public) who do not have direct involvement but are aware of the existence or potential of a conflict of interest.
- Reporting: via WBS

### Sanctions for Conflicts of Interest

Parties proven to have a conflict of interest are prohibited from participating in decision-making, being part of teams, or working on projects where such conflicts exist. Any violations of the conflict-of-interest guidelines will result in sanctions in line with relevant employee disciplinary measures. The 2023 conflict of interest report is as follows:

1. There are no conflicts of interest involving the Board of Commissioners, Directors, or employees of the Company.
2. No Statements of Potential Conflict of Interest were reported to Direct Supervisors.
3. There were zero reports submitted via WBS.

No sanctions for conflicts of interest were imposed in 2023.

### Anti-Gratification Policy

The Company prioritizes business management that is free from Corruption, Collusion and Nepotism (KKN). We pay attention to GCG principles to ensure trustworthy, transparent, and accountable management. The Company has established Gratification Guidelines that align with the Code of Corporate Governance, Code of Conduct, and Company values. These guidelines were last renewed in 2020.



## Etika Terkait Gratifikasi

Standar Etika Perseroan telah mengatur etika kerja terkait KKN, dan suap. Setiap pelaku bisnis dilarang melakukan KKN dan Suap (Gratifikasi) sebagaimana berikut:

1. Korupsi, yaitu tindakan melawan hukum untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain yang merugikan Perseroan sebagaimana diatur dalam UU No. 31/1999 dan UU No. 20/2001 tentang Pemberantasan Tindak Korupsi.
2. Kolusi, yaitu perjanjian atau kerjasama melawan hukum yang menguntungkan keluarga dan atau kroni yang merugikan Perseroan.
3. Nepotisme, yaitu hubungan keluarga dan atau kroni yang mengambil peranan melakukan kolusi yang merugikan Perseroan.
4. Suap (gratifikasi), yaitu memberikan, menawarkan, atau menerima baik secara langsung maupun tidak langsung kepada/dari seseorang sesuatu yang berharga secara ilegal dengan maksud untuk memengaruhi agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam pelaksanaan tugasnya yang bertentangan dengan kewajiban dan kewenangan yang dimilikinya, dengan uraian sebagai berikut:
  - a. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam rangka memengaruhi kebijakan dan keputusan yang diambil.
  - b. Uang/barang/fasilitas lainnya berapa pun nilainya dalam setiap pelayanan terkait dengan tugas, wewenang atau tanggung jawabnya.
  - c. Uang/barang/fasilitas lainnya di luar yang telah ditetapkan dalam rangka melakukan kunjungan Dinas.
  - d. Uang/barang/fasilitas lainnya dalam proses penerimaan/promosi/mutasi jabatan.

## Unit Pengendali Gratifikasi

Perseroan memiliki Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) yang bertugas mengumpulkan laporan gratifikasi di lingkup Perseroan untuk dilaporkan ke KPK dan ditembuskan ke UPG PTPN III (Persero) selaku perusahaan induk. Laporan gratifikasi dilakukan secara *online* ataupun melalui surat jika saluran *online* belum tersedia atau terdapat masalah dan minimal memuat informasi sebagai berikut:

1. Identitas pelapor, terdiri dari nama lengkap, jabatan, dan unit kerja;
2. Tempat dan waktu penerimaan gratifikasi;
3. Uraian jenis gratifikasi yang diterima;
4. Nilai gratifikasi yang diterima;
5. Nama pihak/lembaga pemberi, penerima gratifikasi; dan
6. Hubungan dengan pihak pemberi dan alasan pemberian.

## Ethics Related to Gratification

The Company's Ethical Standards regulate work ethics related to corruption, collusion, nepotism, and bribery. Every business actor is prohibited from committing the following acts:

1. Corruption: This involves unlawful acts to enrich oneself or others, which are detrimental to the Company as regulated in Law No. 31/1999 and Law No. 20/2001 concerning the Eradication of Corruption.
2. Collusion: This refers to an agreement or collaboration against the law that benefits the family and/or cronies, which is detrimental to the Company.
3. Nepotism: This involves family relationships and/or cronies who take the role of carrying out collusion that is detrimental to the Company.
4. Bribery (gratification): This includes giving, offering, or receiving something of value illegally with the intention of influencing someone to do or not do something in the implementation of their duties, which is contrary to their obligations and authority. This category includes:
  - a. Money/goods/other facilities in order to influence policies and decisions taken.
  - b. Money/goods/other facilities whatever their value in each service related to their duties, authority or responsibilities.
  - c. Money/goods/other facilities other than those specified for carrying out official visits.
  - d. Money/goods/other facilities in the process of acceptance/promotion/position transfer.

## Gratification Control Unit (UPG)

The Company has a Gratification Control Unit (UPG) responsible for collecting reports of gratuities within the company. These reports are then submitted to the Corruption Eradication Committee and shared with the UPG PTPN III (Persero) as the parent company. Gratuity reports can be submitted online or by letter if online channels are not available or encounter issues. The reports should include the following information:

1. Identity of the whistleblower, including full name, position, and work unit;
2. Place and time of receipt of the gratuity;
3. Description of the type of gratuity received;
4. Value of the gratuity received;
5. Name of the party/institution giving the gratuity and the recipient of the gratuity; and
6. Relationship with the giver and reason for the gift.

## Penghargaan dan Sanksi

Insan Perseroan yang tidak disiplin dalam melakukan pelaporan gratifikasi secara periodik akan dikenai sanksi berupa penundaan kenaikan golongan dan bonus serta sanksi lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, Insan Perseroan yang disiplin dalam melakukan pelaporan secara periodik akan mendapatkan reward berupa surat penghargaan dari Induk Perseroan/ *Holding* yang diusulkan oleh Perseroan serta akan dipertimbangkan dalam kegiatan pengembangan, promosi, dan mutasi pegawai.

## Jumlah Pelaporan Gratifikasi

Sepanjang tahun 2023, tidak terdapat laporan gratifikasi di lingkup Perseroan baik yang terkait dengan penerimaan hadiah/cendera mata dan hiburan dari relasi Perseroan, penerimaan hadiah/cinderamata dan hiburan yang tidak sesuai ketentuan Perseroan, hadiah/cendera mata dan hiburan yang cepat kadaluwarsa, maupun penerimaan hadiah/cendera mata dan hiburan yang tidak kadaluwarsa.

## Pengelolaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN)

Untuk melaksanakan pengelolaan LHKPN, Direksi membuat Surat Edaran ini dibuat berdasarkan Peraturan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. 03.06/PER/01/2017 tentang Pedoman penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara bagi pejabat tertentu di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara Group. Direksi telah menerbitkan SK Direksi PTPN IV No. 04.11/Kpts/137/XI/2018 tanggal 1 November 2018 tentang Penunjukkan Koordinator Pengelolaan Laporan Harta kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan BUMN.

Pada 2019, Direksi menerbitkan Surat Edaran Direksi No. 04.11/SE/02/I/2019 tentang Kewajiban Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di Lingkungan PT Perkebunan IV Tahun 2019. Dengan ditetapkannya Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, maka proses penyampaian LHKPN dari semula secara manual menggunakan formulir A dan formulir B diganti menjadi secara elektronik melalui e-LHKPN. Perseroan telah menyesuaikan prosedur penyampaian LHKPN dengan merujuk pada peraturan KPK tersebut serta pedoman penyampaian LHKPN bagi pejabat tertentu di PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dan PT Perkebunan Nusantara Group.

## Awards and Sanctions

Company employees failing to report gratuities periodically will face penalties such as delayed promotions, bonuses, and other sanctions as per regulations. Conversely, the Company's employees who periodically report gratuities consistently will receive an award in form of commendation letter from the Parent Company/ *Holding*, as proposed by the Company, and will be considered for employee development, promotions, and transfers.

## Number of Gratification Reporting

Throughout 2023, no reports of gratification within the Company, whether related to receiving gifts/souvenirs and entertainment from Company relations, receiving gifts/souvenirs and entertainment that do not meet with Company regulations, gifts/souvenirs and entertainment that expire quickly, or receiving gifts/souvenirs and entertainment that do not expire.

## Management of State Officials' Wealth Reports (LHKPN)

To manage State Officials' Wealth Reports (LHKPN), the Board of Directors issued several guidelines and regulations based on the Board of Directors' Regulation of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No. 03.06/PER/01/2017 concerning Guidelines of State Officials' Asset Reports Submission for certain officials at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and PT Perkebunan Nusantara Group. The Board of Directors has issued the Board of Directors' Decree of PTPN IV No. 04.11/Kpts/137/XI/2018 dated November 1, 2018 concerning the Appointment of the Coordinator for Management of State Officials' Asset Reports within SOE.

In 2019, the Board of Directors issued the Board of Directors' Circular Letter No. 04.11/SE/02/I/2019 concerning the Obligation to Submit Reports on the Assets of State Officials within PT Perkebunan IV in 2019. With the stipulation of Corruption Eradication Commission Regulation No. 07 of 2016 concerning Procedures for Registration, Announcement and Inspection of State Officials' Assets, the process of submitting the LHKPN from previously manually using formula A and form B was changed to electronically via e-LHKPN. The Company has adjusted the procedures for submitting LHKPN by referring to the KPK regulations as well as guidelines for submitting LHKPN for certain officials at PT Perkebunan Nusantara III (Persero) and PT Perkebunan Nusantara Group.

## Wajib Laporan LHKPN

Pejabat tertentu yang diwajibkan mengisi dan menyampaikan LHKPN kepada KPK adalah:

1. Pejabat Tertentu di Lingkungan Perusahaan Induk:
  - a. Direksi, Dewan Komisaris, dan *Senior Executive Vice President* (SEVP);
  - b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi, Kepala Divisi, Kepala Bagian, General/Distrik Manajer, Manajer, atau pejabat yang termasuk dalam kategori pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
2. Pejabat Tertentu di Lingkungan Anak Perusahaan PTPN:
  - a. Direksi dan Dewan Komisaris;
  - b. Pejabat satu tingkat di bawah Direksi, Kepala Divisi, Kepala Bagian, General/Distrik Manajer, Manajer, atau pejabat yang termasuk dalam kategori pejabat 1 (satu) tingkat di bawah Direksi;
3. Pejabat Tertentu di Lingkungan Perusahaan Anak Non PTPN dan Perusahaan Terafiliasi PTPN III (Persero) adalah Direksi dan Dewan Komisaris yang tidak menjabat sebagai Direksi, Dewan Komisaris, dan Pejabat Satu Tingkat di Bawah Direksi di Perusahaan Induk atau Perusahaan Anak PTPN.

## Pelaporan LHKPN

Penyampaian LHKPN oleh penyelenggara negara atas harta kekayaan yang diperoleh sejak 1 Januari hingga 31 Desember 2023 dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret 2023 melalui aplikasi e-LHKPN Modul *e-registration* pada alamat <https://elhkpn.kpk.go.id>.

## Pemberian Sanksi

Pejabat tertentu yang tidak menyampaikan LHKPN sesuai ketentuan yang berlaku, dikenakan sanksi sebagai berikut:

1. Penundaan pembayaran bonus/tantiem atau nama lain yang sejenis bagi Pejabat Tertentu yang masih aktif, dan/ atau
2. Penundaan pembayaran santunan hari tua atau nama lain yang sejenis bagi pejabat yang berakhir masa jabatannya atau pensiun. Pada periode 1 Januari s.d. 31 Desember 2023, tidak terdapat pemberian sanksi kepada Pejabat tertentu di lingkup Perseroan.

Hingga akhir periode pelaporan terdapat 299 LHKPN yang telah disampaikan atau 100% dari total 299 pejabat Perseroan yang menjadi wajib lapor.

## Mandatory LHKPN Report

Certain officials who are obligated to complete and submit the LHKPN to the KPK are as follows:

1. Certain Officials in the Parent Company:
  - a. Board of Directors, Board of Commissioners, and Senior Executive Vice President (SEVP);
  - b. Officials one level below the Board of Directors, Division Heads, Section Heads, General/District Managers, Managers, or officials included in the category of officials 1 (one) level below the Board of Directors.
2. Certain Officials in PTPN Subsidiaries:
  - a. Board of Directors and Board of Commissioners;
  - c. Officials one level below the Directors, including Division Heads, Section Heads, General/District Managers, and Managers, or officials included in the category of officials 1 (one) level below the Board of Directors.
3. Certain Officials in Non-PTPN Subsidiary Companies and PTPN III (Persero) Affiliated Companies are the Board of Directors and Board of Commissioners who do not serve as the Board of Directors, Board of Commissioners, or Officials One Level Below the Directors in the Parent Company or PTPN Subsidiary Companies.

## LHKPN Reporting

Submission of LHKPN by state administrators for assets acquired from January 1 to December 31, 2023 will be carried out no later than March 31, 2023 via the e-LHKPN e-registration module application at the address <https://elhkpn.kpk.go.id>.

## Imposing Sanctions

Sanctions will be imposed on certain officials who do not submit their LHKPN as required by regulations. The sanctions include:

1. Postponement of bonus, tantiem payments, or similar incentives for active Certain Officials, and/or
2. Postponement of old age compensation or similar benefits for officials whose term of office ends or who retire. From January 1 to December 31, 2023, no sanctions were imposed on certain officials within the Company.

As of the end of the reporting period, 299 LHKPN have been submitted, which represents 100% of the total 299 Company officials who are required to report.



# TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN

Corporate Social  
Responsibilities





KABUPATEN SOSIAL LINGKUNGAN (TJSL)  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA XIII

2023

## LAPORAN KEBERLANJUTAN » Sustainability Report



Atas dasar kepatuhan terhadap POJK No. 51/POJK.03/2017 tentang Penerapan Keuangan Berkelanjutan Bagi Lembaga Jasa Keuangan, Emiten, dan Perusahaan Publik dan SEOJK No. 16 /SEOJK.04/2021 tentang Bentuk dan Isi Laporan Tahunan, Perseroan juga menerbitkan sebuah Laporan Keberlanjutan. Laporan ini diterbitkan dalam buku yang terpisah dari Laporan Tahunan, namun merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan Laporan Tahunan.

Laporan Keberlanjutan Perseroan memuat informasi-informasi yang elaboratif dan komprehensif mengenai program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (TJSL) Perseroan. Oleh sebab itu, Laporan Tahunan ini tidak lagi memuat informasi mengenai TJSL. Laporan Tahunan dan Laporan Keberlanjutan Perseroan tersedia dalam 2 (dua) bahasa dan dapat diunduh secara digital di [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id).

Under the FSA Regulation No. 51/POJK.03/2017 concerning the Implementation of Sustainable Finance for Financial Service Institutions, Issuers, and Public Companies and the FSA Circular Letter No. 16/SEOJK.04/2021 concerning the Form and Content of the Annual Report, the Company also published a Sustainability Report. The report is published independently from the Annual Report but is inseparable from it.


The Company's Sustainability Report elaborates comprehensive information on its Corporate Social Responsibility (CSR) programs. Therefore, this Annual Report no longer discloses any information about CSR. The Company's Annual Report and Sustainability Report are available in 2 (two) languages and can be downloaded in digital form at [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id).


# 2023


Laporan Tahunan  
Annual Report




Gedung Agro Plaza Lt.8,  
Jl. H. R. Rasuna Said Kav.X2 No.1,  
Kuningan Timur, Setiabudi,  
Jakarta Selatan 12950

 [ptpnusantara4@ptpn4.co.id](mailto:ptpnusantara4@ptpn4.co.id)

 [www.ptpn4.co.id](http://www.ptpn4.co.id)

 (+62-21) 31119000

 (+62-21) 31119001

PT Perkebunan Nusantara IV  
dan entitas anaknya/*and its subsidiaries*

Laporan keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023  
dan untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut  
beserta laporan auditor independen/  
*Consolidated financial statements as of December 31, 2023  
and for the year then ended with independent auditor's report*



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
TANGGAL 31 DESEMBER 2023  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR  
PADA TANGGAL TERSEBUT  
BESERTA LAPORAN AUDITOR INDEPENDEN**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS  
AS OF DECEMBER 31, 2023  
AND FOR THE YEAR THEN ENDED  
WITH INDEPENDENT AUDITOR'S REPORT**

**Daftar Isi**

**Table of Contents**

	Halaman/ Page	
Surat Pernyataan Direksi		<i>Director's Statement</i>
Laporan Auditor Independen		<i>Independent Auditor's Report</i>
Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian.....	1-3	<i>Consolidated Statement of Financial Position</i>
Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian .....	4-6	<i>Consolidated Statement of Profit or Loss and Other Comprehensive Income</i>
Laporan Perubahan Ekuitas Konsolidasian.....	7	<i>Consolidated Statement of Changes in Equity</i>
Laporan Arus Kas Konsolidasian .....	8	<i>Consolidated Statement of Cash Flows</i>
Catatan atas Laporan Keuangan Konsolidasian.....	9-238	<i>Notes to the Consolidated Financial Position</i>

\*\*\*\*\*



**SURAT PERNYATAAN DIREKSI  
TENTANG TANGGUNG JAWAB ATAS  
LAPORAN KEUANGAN KONSOLIDASIAN  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
TANGGAL 31 DESEMBER 2023  
DAN UNTUK TAHUN YANG BERAKHIR PADA  
TANGGAL TERSEBUT**

***DIRECTORS' STATEMENT  
ON THE RESPONSIBILITY FOR THE  
THE CONSOLIDATED FINANCIAL  
STATEMENTS  
PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
AS OF DECEMBER 31, 2023 AND  
FOR THE YEAR THEN ENDED***

Kami yang bertanda tangan di bawah ini: / *We, the undersigned:*

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Nama / <i>Name</i>                        | : | Jatmiko K. Santosa  |
| Alamat Kantor / <i>Office Address</i>        | : | Gedung Agro Plaza Lantai 11<br>Jl. H. R. Rasuna Said Kav X2 - 1<br>Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan |
| Alamat Domisili / <i>Residential Address</i> | : | Jl. Tebet Utara II A / 7<br>Tebet Timur, Tebet, Jakarta Selatan   |
| Nomor telepon / <i>Telephone number</i>      | : | (021) 31119000  |
| Jabatan / <i>Title</i>                       | : | Direktur Utama / <i>President Director</i>  |
| 2. Nama / <i>Name</i>                        | : | Hilda Savitri   |
| Alamat Kantor / <i>Office Address</i>        | : | Gedung Agro Plaza Lantai 11<br>Jl. H. R. Rasuna Said Kav X2 – 1<br>Kuningan Timur, Setiabudi, Jakarta Selatan |
| Alamat Domisili / <i>Residential Address</i> | : | Komplek Migas 44 No. 11<br>Kemanggisan, Palmerah, Jakarta Barat   |
| Nomor telepon / <i>Telephone number</i>      | : | (021) 31119000  |
| Jabatan / <i>Title</i>                       | : | Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko /<br><i>Finance and Risk Management Director</i>                       |

menyatakan bahwa: /*certify that:*

- |  |  |
|--|--|
| 1. Kami bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara IV (Perusahaan) dan entitas anaknya ("Grup");   | 1. <i>We take the responsibility for the preparation and presentation of consolidated financial statements of PT Perkebunan Nusantara IV ("the Company") and its subsidiaries (the "Group");</i> |
| 2. Laporan keuangan konsolidasian Grup telah disusun dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia;                                      | 2. <i>The Group's consolidated financial statements have been prepared in accordance with the Indonesian Financial Accounting Standards;</i>   |
| 3. a. Semua informasi dalam laporan keuangan konsolidasian Grup telah dimuat secara lengkap dan benar;   | 3. a. <i>All information in Group's consolidated financial statements has been completely and properly disclosed;</i>  |
| b. Laporan keuangan konsolidasian Grup tidak mengandung informasi atau fakta material yang tidak benar, dan tidak menghilangkan informasi atau fakta material; | b. <i>The Group's consolidated financial statements do not contain material misleading information or facts, and do not omit material information or facts;</i>                                  |
| 4. Kami bertanggung jawab atas sistem pengendalian internal dalam Grup.  | 4. <i>We are responsible for the Group's internal control system.</i>  |



Demikian pernyataan ini dibuat dengan *The statement is made truthfully.*  
sebenarnya.

Jakarta, 31 Mei 2024 / May 31 , 2024  
PT Perkebunan Nusantara IV



**Jatmiko K. Santosa**  
Direktur Utama /  
President Director

**Hilda Savitri**  
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko /  
Finance and Risk Management Director

*The original report included herein is in  
the Indonesian language.*

## Laporan Auditor Independen

Laporan No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-  
5/1/V/2024

Pemegang Saham, Dewan Komisaris, dan Direksi  
PT Perkebunan Nusantara IV

## Opini

Kami telah mengaudit laporan keuangan konsolidasian PT Perkebunan Nusantara IV (“Perusahaan”) dan entitas anaknya (secara kolektif disebut sebagai “Grup”) terlampir, yang terdiri dari laporan posisi keuangan konsolidasian tanggal 31 Desember 2023, serta laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, laporan perubahan ekuitas konsolidasian, dan laporan arus kas konsolidasian untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, serta catatan atas laporan keuangan konsolidasian, termasuk informasi kebijakan akuntansi material.

Menurut opini kami, laporan keuangan konsolidasian terlampir menyajikan secara wajar, dalam semua hal yang material, posisi keuangan konsolidasian Grup tanggal 31 Desember 2023, serta kinerja keuangan dan arus kas konsolidasiannya untuk tahun yang berakhir pada tanggal tersebut, sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia.

## Independent Auditor’s Report

Report No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-  
5/1/V/2024

*The Shareholders, the Boards of Commissioners  
and Directors  
PT Perkebunan Nusantara IV*

## Opinion

*We have audited the accompanying consolidated financial statements PT Perkebunan Nusantara IV (the “Company”) and its subsidiaries (collectively referred to as the “Group”), which comprise the consolidated statement of financial position as of December 31, 2023, and the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, consolidated statement of changes in equity, and consolidated statement of cash flows for the year then ended, and notes to the consolidated financial statements, including material accounting policy information.*

*In our opinion, the accompanying consolidated financial statements present fairly, in all material respects, the consolidated financial position of the Group as of December 31, 2023, and its consolidated financial performance and cash flows for the year then ended, in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

Basis opini

Kami melaksanakan audit kami berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia ("IAPI") dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara ("SPKN") yang ditetapkan oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia ("BPK"). Tanggung jawab kami menurut standar tersebut diuraikan lebih lanjut dalam paragraf Tanggung Jawab Auditor terhadap Audit atas Laporan Keuangan Konsolidasian pada laporan kami. Kami independen terhadap Grup berdasarkan ketentuan etika yang relevan dalam audit kami atas laporan keuangan konsolidasian di Indonesia, dan kami telah memenuhi tanggung jawab etika lainnya berdasarkan ketentuan tersebut. Kami yakin bahwa bukti audit yang telah kami peroleh adalah cukup dan tepat untuk menyediakan suatu basis bagi opini kami.

Hal lain

Kami juga telah menerbitkan secara terpisah laporan-laporan bertanggal 31 Mei 2024, masing-masing atas: (i) kepatuhan Grup terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian, dan (ii) pengendalian internal Grup.

Informasi lain

Manajemen bertanggung jawab atas informasi lain. Informasi lain terdiri dari informasi yang tercantum dalam Laporan Tahunan Tahun 2023 ("Laporan Tahunan"). Laporan Tahunan diharapkan akan tersedia bagi kami setelah tanggal laporan auditor independen ini.

*Independent Auditor's Report (continued)*

*Report No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)*

*Basis for opinion*

*We conducted our audit in accordance with Standards on Auditing established by the Indonesian Institute of Certified Public Accountants ("IICPA") and State Financial Auditing Standards ("SPKN") established by the Audit Board of the Republic of Indonesia ("BPK"). Our responsibilities under those standards are further described in the Auditor's Responsibilities for the Audit of the Consolidated Financial Statements paragraph of our report. We are independent of the Group in accordance with the ethical requirements relevant to our audit of the consolidated financial statements in Indonesia, and we have fulfilled our other ethical responsibilities in accordance with such requirements. We believe that the audit evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion.*

*Other matter*

*We have also separately issued reports dated May 31, 2024, on: (i) the Group's compliance with laws and regulations that directly and materially affect the presentation of its consolidated financial statements, and (ii) the Group's internal control.*

*Other information*

*Management is responsible for the other information. Other information comprises the information included in the 2023 Annual Report ("The Annual Report"). The Annual Report is expected to be made available to us after the date of this independent auditor's report.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

Laporan No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

Informasi lain (lanjutan)

Opini kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir tidak mencakup Laporan Tahunan, dan oleh karena itu, kami tidak menyatakan bentuk keyakinan apapun atas Laporan Tahunan tersebut.

Sehubungan dengan audit kami atas laporan keuangan konsolidasian terlampir, tanggung jawab kami adalah untuk membaca Laporan Tahunan ketika tersedia dan, dalam melaksanakannya, mempertimbangkan apakah Laporan Tahunan mengandung ketidakkonsistensian material dengan laporan keuangan konsolidasian terlampir atau pemahaman yang kami peroleh selama audit, atau mengandung kesalahan penyajian material.

Ketika kami membaca Laporan Tahunan, jika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu kesalahan penyajian material di dalamnya, kami diharuskan untuk mengomunikasikan hal tersebut kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola dan melakukan tindakan yang tepat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian

Manajemen bertanggung jawab atas penyusunan dan penyajian wajar laporan keuangan konsolidasian tersebut sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan di Indonesia, dan atas pengendalian internal yang dianggap perlu oleh manajemen untuk memungkinkan penyusunan laporan keuangan konsolidasian yang bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan.

*Independent Auditor's Report (continued)*

*Report No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)*

*Other information (continued)*

*Our opinion on the accompanying consolidated financial statements does not cover the Annual Report, and accordingly, we do not express any form of assurance on the Annual Report.*

*In connection with our audit of the accompanying consolidated financial statements, our responsibility is to read the Annual Report when it becomes available and, in doing so, consider whether the Annual Report is materially inconsistent with the accompanying consolidated financial statements or our knowledge obtained in the audit, or otherwise appears to be materially misstated.*

*When we read the Annual Report, if we conclude that there is a material misstatement therein, we are required to communicate the matter to those charged with governance and take appropriate actions based on the applicable laws and regulations.*

*Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements*

*Management is responsible for the preparation and fair presentation of the consolidated financial statements in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards, and for such internal control as management determines is necessary to enable the preparation of consolidated financial statements that are free from material misstatement, whether due to fraud or error.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

*Independent Auditor's Report (continued)*

Laporan No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

*Report No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)*

Tanggung jawab manajemen dan pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola terhadap laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

*Responsibilities of management and those charged with governance for the consolidated financial statements (continued)*

Dalam penyusunan laporan keuangan konsolidasian, manajemen bertanggung jawab untuk menilai kemampuan Grup dalam mempertahankan kelangsungan usahanya, mengungkapkan, sesuai dengan kondisinya, hal-hal yang berkaitan dengan kelangsungan usaha, dan menggunakan basis akuntansi kelangsungan usaha, kecuali manajemen memiliki intensi untuk melikuidasi Grup atau menghentikan operasi, atau tidak memiliki alternatif yang realistis selain melaksanakannya.

*In preparing the consolidated financial statements, management is responsible for assessing the Group's ability to continue as a going concern, disclosing, as applicable, matters related to going concern, and using the going concern basis of accounting, unless management either intends to liquidate the Group or to cease its operations, or has no realistic alternative but to do so.*

Pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola bertanggung jawab untuk mengawasi proses pelaporan keuangan Grup.

*Those charged with governance are responsible for overseeing the Group's financial reporting process.*

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian

*Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements*

Tujuan kami adalah untuk memperoleh keyakinan memadai tentang apakah laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan bebas dari kesalahan penyajian material, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, dan untuk menerbitkan laporan auditor independen yang mencakup opini kami. Keyakinan memadai merupakan suatu tingkat keyakinan tinggi, namun bukan merupakan suatu jaminan bahwa audit yang dilaksanakan berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI akan selalu mendeteksi kesalahan penyajian material ketika hal tersebut ada. Kesalahan penyajian dapat disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan dan dianggap material jika, baik secara individual maupun agregat, dapat diekspektasikan secara wajar akan memengaruhi keputusan ekonomi yang diambil oleh pengguna berdasarkan laporan keuangan konsolidasian tersebut.

*Our objectives are to obtain reasonable assurance about whether the consolidated financial statements taken as a whole are free from material misstatement, whether due to fraud or error, and to issue an independent auditor's report that includes our opinion. Reasonable assurance is a high level of assurance, but is not a guarantee that an audit conducted in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA will always detect a material misstatement when it exists. Misstatements can arise from fraud or error and are considered material if, individually or in the aggregate, they could reasonably be expected to influence the economic decisions of users taken on the basis of these consolidated financial statements.*

Laporan Auditor Independen (lanjutan)

*Independent Auditor's Report (continued)*

Laporan No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

*Report No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)*

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

*Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)*

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga:

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also:*

- Mengidentifikasi dan menilai risiko kesalahan penyajian material dalam laporan keuangan konsolidasian, baik yang disebabkan oleh kecurangan maupun kesalahan, mendesain dan melaksanakan prosedur audit yang responsif terhadap risiko tersebut, serta memperoleh bukti audit yang cukup dan tepat untuk menyediakan basis bagi opini kami. Risiko tidak terdeteksinya suatu kesalahan penyajian material yang disebabkan oleh kecurangan lebih tinggi dari yang disebabkan oleh kesalahan, karena kecurangan dapat melibatkan kolusi, pemalsuan, penghilangan secara sengaja, pernyataan salah, atau pengabaian atas pengendalian internal.
  - Memeroleh suatu pemahaman tentang pengendalian internal yang relevan dengan audit untuk mendesain prosedur audit yang tepat sesuai dengan kondisinya, tetapi bukan untuk tujuan menyatakan opini atas keefektifitasan pengendalian internal Grup.
  - Mengevaluasi ketepatan kebijakan akuntansi yang digunakan serta kewajaran estimasi akuntansi dan pengungkapan terkait yang dibuat oleh manajemen.
- *Identify and assess the risks of material misstatement of the consolidated financial statements, whether due to fraud or error, design and perform audit procedures responsive to such risks, and obtain audit evidence that is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. The risk of not detecting a material misstatement resulting from fraud is higher than for one resulting from error, as fraud may involve collusion, forgery, intentional omissions, misrepresentations, or override of internal control.*
  - *Obtain an understanding of internal control relevant to the audit in order to design audit procedures that are appropriate in the circumstances, but not for the purpose of expressing an opinion on the effectiveness of the Group's internal control.*
  - *Evaluate the appropriateness of accounting policies used and the reasonableness of accounting estimates and related disclosures made by management.*



Laporan Auditor Independen (lanjutan)

*Independent Auditor's Report (continued)*

Laporan No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

*Report No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)*

Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)

*Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)*

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

*As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)*

- Menyimpulkan ketepatan penggunaan basis akuntansi kelangsungan usaha oleh manajemen dan, berdasarkan bukti audit yang diperoleh, apakah terdapat suatu ketidakpastian material yang terkait dengan peristiwa atau kondisi yang dapat menyebabkan keraguan signifikan atas kemampuan Grup untuk mempertahankan kelangsungan usahanya. Ketika kami menyimpulkan bahwa terdapat suatu ketidakpastian material, kami diharuskan untuk menarik perhatian dalam laporan auditor independen kami ke pengungkapan terkait dalam laporan keuangan konsolidasian atau, jika pengungkapan tersebut tidak memadai, memodifikasi opini kami. Kesimpulan kami didasarkan pada bukti audit yang diperoleh hingga tanggal laporan auditor independen kami. Namun, peristiwa atau kondisi masa depan dapat menyebabkan Grup tidak dapat mempertahankan kelangsungan usaha.
- Mengevaluasi penyajian, struktur, dan isi laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan, termasuk pengungkapannya, dan apakah laporan keuangan konsolidasian mencerminkan transaksi dan peristiwa yang mendasarinya dengan suatu cara yang mencapai penyajian wajar.

- *Conclude on the appropriateness of management's use of the going concern basis of accounting and, based on the audit evidence obtained, whether a material uncertainty exists related to events or conditions that may cast significant doubt on the Group's ability to continue as a going concern. If we conclude that a material uncertainty exists, we are required to draw attention in our independent auditor's report to the related disclosures in the consolidated financial statements or, if such disclosures are inadequate, to modify our opinion. Our conclusion is based on the audit evidence obtained up to the date of our independent auditor's report. However, future events or conditions may cause the Group to cease to continue as a going concern.*
- *Evaluate the overall presentation, structure, and content of the consolidated financial statements, including the disclosures, and whether the consolidated financial statements represent the underlying transactions and events in a manner that achieves fair presentation.*

**Laporan Auditor Independen (lanjutan)**

Laporan No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (lanjutan)

**Tanggung jawab auditor terhadap audit atas laporan keuangan konsolidasian (lanjutan)**

Sebagai bagian dari suatu audit berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh IAPI, kami menerapkan pertimbangan profesional dan mempertahankan skeptisisme profesional selama audit. Kami juga: (lanjutan)

- Memeroleh bukti audit yang cukup dan tepat terkait informasi keuangan entitas atau aktivitas bisnis dalam Grup untuk menyatakan opini atas laporan keuangan konsolidasian. Kami bertanggung jawab atas arahan, supervisi, dan pelaksanaan audit grup. Kami tetap bertanggung jawab sepenuhnya atas opini audit kami.

Suatu audit yang dilaksanakan berdasarkan SPKN yang ditetapkan BPK juga mencakup pengujian atas: (i) kepatuhan Grup terhadap peraturan perundang-undangan yang berpengaruh langsung dan material terhadap penyajian laporan keuangan konsolidasian Grup, dan (ii) pengendalian internal Grup.

Kami mengomunikasikan kepada pihak yang bertanggung jawab atas tata kelola mengenai, antara lain, ruang lingkup dan saat yang direncanakan atas audit serta temuan audit signifikan, termasuk setiap defisiensi signifikan dalam pengendalian internal yang teridentifikasi oleh kami selama audit.

**Independent Auditor's Report (continued)**

Report No. 01582/2.1032/AU.1/01/1609-5/1/V/2024 (continued)

**Auditor's responsibilities for the audit of the consolidated financial statements (continued)**

As part of an audit in accordance with Standards on Auditing established by the IICPA, we exercise professional judgment and maintain professional skepticism throughout the audit. We also: (continued)

- Obtain sufficient appropriate audit evidence regarding the financial information of the entities or business activities within the Group to express an opinion on the consolidated financial statements. We are responsible for the direction, supervision, and performance of the group audit. We remain solely responsible for our audit opinion.

An audit conducted in accordance with SPKN established by BPK also includes testing of the: (i) Group's compliance with laws and regulations that directly affect and material to the presentation of Group's consolidated financial statements, and (ii) Group's internal control.

We communicate with those charged with governance regarding, among other matters, the planned scope and timing of the audit and significant audit findings, including any significant deficiencies in internal control that we identify during our audit.

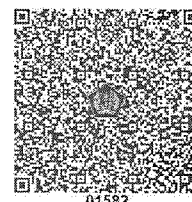
**KAP Purwantono, Sungkoro & Surja**



**Damestar Hutagalung**

Registrasi Akuntan Publik No. AP.1609/Public Accountant Registration No. AP.1609

31 Mei 2024/May 31, 2024



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF  
FINANCIAL POSITION  
As of December 31, 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Disajikan kembali (Catatan 46)/  
As Restated (Note 46)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
<b>Aset</b>					<b>Assets</b>
<b>Aset Lancar</b>					<b>Current Assets</b>
Kas dan setara kas	4,36a	3.193.808.187.252	6.154.236.702.607	5.682.205.279.806	Cash and cash equivalents
Kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya	5,36b	361.311.633.060	184.467.959.023	137.432.173.609	Restricted cash and time deposit
Piutang usaha	6				Trade receivables
Pihak ketiga		140.461.760.181	197.037.923.794	121.430.129.152	Third parties
Pihak-pihak berelasi	36c	2.506.299.451.287	2.176.730.596.914	2.623.338.427.725	Related parties
Persediaan	7	1.854.114.606.862	3.941.405.633.406	1.758.086.593.880	Inventories
Aset biologis	8	445.233.800.504	454.814.281.510	507.911.314.139	Biological assets
Piutang lain-lain	9a				Other receivables
Pihak ketiga		194.553.942.402	385.448.113.819	128.824.992.771	Third parties
Pihak-pihak berelasi	36d	758.911.116.577	2.246.540.001.832	1.346.749.547.179	Related parties
Bagian lancar - piutang lain-lain jangka panjang	9b, 36d	562.008.541.944	12.916.584.000	-	Current maturities of other long-term receivables
Pajak dibayar di muka	21a	1.320.765.093.309	797.127.801.855	643.943.929.420	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	16a	227.624.594.661	68.391.975.800	316.522.924.780	Other current assets
<b>Total Aset Lancar</b>		<b>11.565.092.728.039</b>	<b>16.619.117.574.560</b>	<b>13.266.445.312.461</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>Aset Tidak Lancar</b>					<b>Non-current Assets</b>
Piutang lain-lain jangka panjang	9b				Other long-term receivables
Pihak ketiga		125.102.884.401	13.925.625.676	18.643.218.093	Third parties
Pihak-pihak berelasi	36d	8.955.775.165.002	3.784.807.921.329	3.544.562.517.554	Related parties
Piutang plasma	10	169.902.463.755	223.803.019.640	270.069.621.123	Plasma receivable
Investasi saham	11	403.571.114.400	335.625.496.235	346.914.155.502	Investments in shares of stock
Aset hak guna	12	146.935.977.279	106.332.790.043	105.664.606.694	Right-of-use assets
Aset tetap	13	39.465.464.999.661	37.107.558.786.976	37.319.261.847.822	Fixed assets
Properti investasi	14	439.725.000.000	426.490.800.000	421.420.940.000	Investment property
Beban tangguhan hak atas tanah	15	327.964.711.089	291.470.360.129	280.446.120.298	Deferred charges landrights
Piutang tagihan pajak	21b	627.669.769.087	344.539.919.171	153.684.770.259	Claim for tax refund
Aset pajak tangguhan	21f	340.873.296.232	460.849.073.075	442.963.905.000	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	16b	93.708.139.082	85.218.737.961	52.195.170.115	Other non-current assets
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>		<b>51.096.693.519.988</b>	<b>43.180.622.530.235</b>	<b>42.955.826.872.460</b>	<b>Total Non-current Assets</b>
<b>Total Aset</b>		<b>62.661.786.248.027</b>	<b>59.799.740.104.795</b>	<b>56.222.272.184.921</b>	<b>Total Assets</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
As of December 31, 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Disajikan kembali (Catatan 46)/  
As Restated (Note 46)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
<b>Liabilitas dan Ekuitas</b>					<b>Liabilities and Equity</b>
<b>Liabilitas</b>					<b>Liabilities</b>
<b>Liabilitas Jangka Pendek</b>					<b>Current Liabilities</b>
Utang bank jangka pendek	17	7.500.000.000	2.000.000.000	-	Short-term bank loans
Utang usaha	18				Trade payables
Pihak ketiga		3.185.671.230.868	2.689.980.811.727	2.032.240.124.863	Third parties
Pihak-pihak berelasi	36e	158.802.286.184	99.014.546.198	43.676.651.555	Related parties
Utang lain-lain	19				Other payables
Pihak ketiga		119.498.695.185	132.375.159.833	221.023.579.488	Third parties
Pihak-pihak berelasi	36f	655.176.488.024	392.578.442.413	321.712.044.864	Related parties
Liabilitas kontrak	20,36g	767.495.961.797	1.129.749.510.985	459.654.819.905	Contract liabilities
Utang pajak	21c	127.478.212.168	400.254.783.031	955.626.521.906	Taxes payable
Akrual	22	1.013.229.347.438	2.108.550.371.387	1.717.330.223.393	Accrued
Bagian lancar atas utang jangka panjang	23	4.202.236.082.197	2.844.158.428.938	3.216.356.059.031	Current maturities of long-term debts
Bagian lancar liabilitas sewa	12	64.617.549.298	67.146.134.462	48.693.303.729	Current maturities of lease liabilities
Bagian lancar pendapatan diterima dimuka	36h	2.249.877.912	2.050.256.424	3.509.192.475	Current maturities of unearned revenue
Bagian lancar liabilitas imbalan kerja karyawan	24	1.096.695.789.042	871.592.727.863	1.157.369.459.120	Current maturities of employee benefits liability
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>		<b>11.400.651.520.113</b>	<b>10.739.451.173.261</b>	<b>10.177.191.980.329</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>Liabilitas Jangka Panjang</b>					<b>Non-current Liabilities</b>
Liabilitas sewa jangka panjang	12	85.325.916.778	49.553.769.371	72.198.145.165	Long-term lease liabilities
Liabilitas pajak tangguhan	21f	33.257.442.719	31.258.107.609	22.658.467.295	Deferred tax liabilities
Utang jangka panjang	23,36i	22.513.924.305.952	23.046.720.952.324	24.577.038.790.662	Long-term debts
Liabilitas imbalan kerja karyawan	24	7.433.760.955.436	8.120.578.800.524	7.881.589.895.121	Employee benefits liability
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	36h	1.325.656.115	4.975.304.496	5.524.967.528	Unearned revenue
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>		<b>30.067.594.277.000</b>	<b>31.253.086.934.324</b>	<b>32.559.010.265.771</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>Total Liabilitas</b>		<b>41.468.245.797.113</b>	<b>41.992.538.107.585</b>	<b>42.736.202.246.100</b>	<b>Total Liabilities</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN POSISI KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF  
FINANCIAL POSITION (continued)  
As of December 31, 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

Disajikan kembali (Catatan 46)/  
As Restated (Note 46)

	Catatan/ Notes	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
<b>Ekuitas</b>					<b>Equity</b>
<b>Ekuitas yang Dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk</b>					<b>Equity Attributable to the Owners of the Parent</b>
Ekuitas Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk					Equity Attributable to Owner of the Parent Entity
Modal saham - nilai nominal Rp1.000.000 per saham					Share capital - par value Rp1,000,000 per share
Modal dasar - 11.700.000 saham					Authorized - 11,700,000 shares
Modal ditempatkan dan disetor penuh - 8.395.318 saham, (31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021: 2.942.116 saham)					Issued and fully paid - 8,395,318 shares (December 31, 2022 and January 1, 2022/ December 31 2021, 2,942,116 shares)
Tambahan modal disetor	25	8.395.318.000.000	2.942.116.000.000	2.942.116.000.000	Additional paid in capital
Penghasilan komprehensif lain	26	(771.887.794.251)	(538.315.714)	(538.315.714)	Other comprehensive income
Ekuitas merging entity	27	7.651.356.324.398	3.688.288.615.183	3.688.288.615.183	Equity merging entities
Perubahan nilai wajar aset keuangan		(8.547.826.294)	(12.862.769.110)	(15.383.782.308)	Changes in fair value of financial asset
Saldo laba/(Akumulasi rugi)					Retained earnings / (Accumulated losses)
Ditentukan penggunaannya		8.210.555.362.829	6.025.155.909.206	3.870.817.237.018	Appropriated
Belum ditentukan penggunaannya		(2.079.299.184.092)	(659.031.231.193)	(398.327.305.460)	Unappropriated
Total ekuitas yang dapat Diatribusikan kepada Pemilik Entitas Induk		21.397.494.882.590	17.977.373.912.742	13.646.124.861.286	Total equity Attributable to Owners of the Parent Entity
Kepentingan Non-pengendali	28a	(203.954.431.676)	(170.171.915.532)	(160.054.922.465)	Non-controlling interests
<b>Total Ekuitas</b>		<b>21.193.540.450.914</b>	<b>17.807.201.997.210</b>	<b>13.486.069.938.821</b>	<b>Total Equity</b>
<b>Total Liabilitas dan Ekuitas</b>		<b>62.661.786.248.027</b>	<b>59.799.740.104.795</b>	<b>56.222.272.184.921</b>	<b>Total Liabilities and Equity</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME  
For the year ended  
December 31, 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal/ Year ended		31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ December 31, 2022/ (Restated) (Note 46)	
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes		
<b>PENDAPATAN</b>	30.770.302.314.679	29	33.820.734.244.459	<b>REVENUE</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	(21.365.310.291.616)	30	(18.515.130.328.534)	<b>COST OF REVENUE</b>
<b>LABA BRUTO</b>	<b>9.404.992.023.063</b>		<b>15.305.603.915.925</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Keuntungan/ (Kerugian) yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis	182.741.600.180	8	(293.076.706.973)	Gain/ (Loss) arising from changes in fair value of biological asset
Beban pemasaran dan penjualan	(624.935.959.159)	31	(565.608.460.883)	Marketing and selling expenses
Beban umum dan administrasi	(3.317.186.180.429)	32	(4.734.912.309.762)	General and administrative expenses
Pendapatan operasi lain	678.074.028.471	33	863.215.266.466	Other operating income
Beban operasi lain	(744.493.254.744)	34	(1.093.100.417.871)	Other operating expenses
<b>LABA USAHA</b>	<b>5.579.192.257.382</b>		<b>9.482.121.286.902</b>	<b>OPERATING PROFIT</b>
Bagian laba/ (rugi) entitas asosiasi	1.979.579.289	11	(78.539.239.610)	Share in gain/ (loss) of associate entity
Penghasilan keuangan	1.348.955.748.382	35a	1.062.441.055.496	Finance income
Beban keuangan	(2.566.049.493.903)	35b	(1.993.725.585.774)	Finance costs
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN TERMASUK MERGING ENTITIES</b>	<b>4.364.078.091.150</b>		<b>8.472.297.517.014</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE INCLUDING MERGING ENTITIES</b>
Penyesuaian laba sebelum beban pajak penghasilan - <i>merging entities</i>	(2.777.197.455.922)		(5.616.974.457.561)	Adjustment to profit before income tax expense - <i>merging entities</i>
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>1.586.880.635.228</b>		<b>2.855.323.059.453</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
Beban pajak penghasilan termasuk <i>merging entities</i>	(717.530.397.047)	21d, 21e, 21f	(1.286.018.566.089)	Income tax expense including <i>merging entities</i>
Penyesuaian beban pajak penghasilan - <i>merging entities</i>	315.931.815.031		605.483.293.445	Adjustment to income tax expense - <i>merging entities</i>
<b>BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>(401.598.582.016)</b>		<b>(680.535.272.644)</b>	<b>INCOME TAX EXPENSE</b>
<b>LABA TAHUN BERJALAN TERMASUK MERGING ENTITIES</b>	<b>3.646.547.694.103</b>		<b>7.186.278.950.925</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR INCLUDING MERGING ENTITIES</b>
Laba tahun berjalan - <i>merging entities</i>	2.461.265.640.891		5.011.491.164.116	Profit for the year - <i>merging entities</i>
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>1.185.282.053.212</b>		<b>2.174.787.786.809</b>	<b>PROFIT FOR THE YEAR</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)  
For the year ended  
December 31, 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

		Tahun yang berakhir pada tanggal/ Year ended		
		31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ December 31, 2022/ (Restated) (Note 46)
<b>Penghasilan/ (Rugi) komprehensif lain:</b>				
<b>Pos-pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:</b>				<b>Other comprehensive income (loss):</b>
Kerugian pengukuran kembali atas liabilitas imbalan pasti	(1.177.866.770.100)	24		<b>Items that will not be reclassified to profit or loss:</b>
Revaluasi aset tetap	1.300.877.537.142	13		Loss on remeasurement of defined benefit liability
Nilai wajar investasi saham	28.616.027.396	11		Revaluation of fixed asset
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	26.581.179.266	11		Fair value of share investment
Laba/ (Rugi) aset keuangan tersedia untuk dijual	(38.500.000)			Other comprehensive income from associate entities
Pajak penghasilan terkait	235.611.115.206	21f		Gain/ (Loss) on financial asset available for sale
Penghasilan komprehensif lain - neto	413.780.588.910			Related income tax
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPREHENSIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>4.060.328.283.013</b>			<b>Other comprehensive income - net</b>
Laba/ (Rugi) tahun berjalan termasuk <i>merging entities</i> yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	3.701.843.620.839 (55.295.926.736)			<b>TOTAL COMPREHENSIVE INCOME FOR THE PERIOD</b>
<b>Total</b>	<b>3.646.547.694.103</b>			<b>Profit/ (Loss) including merging entities for the year attributable to:</b>
Laba/ (Rugi) tahun berjalan - <i>merging entities</i> yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	2.479.954.168.381 (18.688.527.490)			Owners of the parent company
<b>Total</b>	<b>2.461.265.640.891</b>			Non-controlling interests
Laba/ (Rugi) tahun berjalan yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	1.221.889.452.458 (36.607.399.246)			<b>Total</b>
<b>Total</b>	<b>1.185.282.053.212</b>			<b>Profit/ (Loss) for the year attributable to:</b>
				Owners of the parent company
				Non-controlling interests
				<b>Total</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN  
KOMPREHENSIF LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)  
Untuk tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS  
AND OTHER COMPREHENSIVE INCOME (continued)  
For the year ended  
December 31, 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal/ Year ended			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ December 31, 2022/ (Restated) (Note 46)	
Laba/ (Rugi) komprehensif termasuk <i>merging entities</i> yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	4.116.325.510.845 (55.997.227.832)		6.286.075.184.873 (25.712.050.503)	Comprehensive income/ (loss) including merging entities for the year attributable to: Owners of the parent company Non-controlling interests
<b>Total</b>	<b>4.060.328.283.013</b>		<b>6.260.363.134.370</b>	<b>Total</b>
Laba/ (Rugi) komprehensif - <i>merging entities</i> yang dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	2.937.250.373.197 (18.817.118.534)		4.389.919.425.220 (15.595.057.436)	Comprehensive income/ (Loss) - merging entities for the year attributable to: Owners of the parent company Non-controlling interests
<b>Total</b>	<b>2.918.433.254.663</b>		<b>4.374.324.367.784</b>	<b>Total</b>
Laba/ (Rugi) komprehensif yang Dapat diatribusikan kepada: Pemilik entitas induk Kepentingan non-pengendali	1.179.075.137.648 (37.180.109.298)		1.896.155.759.653 (10.116.993.067)	Comprehensive income/ (loss) for the year attributable to: Owners of the company Non-controlling interests
<b>Total</b>	<b>1.141.895.028.350</b>		<b>1.886.038.766.586</b>	<b>Total</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUSIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	<b>440.941</b>	<b>37</b>	<b>742.799</b>	<b>BASIC EARNING PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT COMPANY</b>



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA**  
**LAPORAN PERUBAHAN EKUITAS KONSOLIDASIAN**  
**Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023**  
**(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES**  
**CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY**  
**For the year ended December 31, 2023**  
**(Expressed in Rupiah, except otherwise stated)**

Catatan/ Notes	Modal saham ditempatkan dan disetor penuh/ Issued and fully paid capital stock	Equity merging entities	Tambahkan modal disetor/ Additions paid in capital	Surplus revaluasi aset tetap/ Gain on revaluation of fixed asset	Perubahan nilai wajar aset keuangan/ Changes fair value of financial asset	Saldo laba (Defisit)/ Retained Earnings (Deficit)		Jumlah/ Total	Kepentingan non-pengendali/ Non-controlling interest	Total Ekuitas/ Total equity	
						Telah ditentukan penggunaannya/ Appropriated	Belum ditentukan penggunaannya/ Unappropriated				
<b>Saldo per 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 dilaporkan sebelumnya</b>	<b>2.942.116.000.000</b>	<b>-</b>	<b>(22.831.993.890)</b>	<b>3.688.288.615.183</b>	<b>(15.383.782.308)</b>	<b>3.870.817.237.018</b>	<b>(398.327.305.460)</b>	<b>10.064.678.770.543</b>	<b>(160.054.922.465)</b>	<b>9.904.623.848.078</b>	<b>Balance as of January 1, 2022/ December 31, 2021 previously reported</b>
Penyajian kembali: Dampak penerapan PSAK 38 kombinasi bisnis entitas sepengendali	-	3.559.152.412.567	22.293.678.176	-	-	-	-	3.581.446.090.743	-	3.581.446.090.743	Restatement Effect on PSAK 38 implementation business combination of entities under common control
<b>Saldo per 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 (disajikan kembali - Catatan 46)</b>	<b>2.942.116.000.000</b>	<b>3.559.152.412.567</b>	<b>(538.315.714)</b>	<b>3.688.288.615.183</b>	<b>(15.383.782.308)</b>	<b>3.870.817.237.018</b>	<b>(398.327.305.460)</b>	<b>13.646.124.861.286</b>	<b>(160.054.922.465)</b>	<b>13.486.069.938.821</b>	<b>Balance as of January 1, 2022/ December 31, 2021 (As restated - Note 46)</b>
Laba periode berjalan	-	5.011.491.164.116	-	-	-	-	2.185.399.453.623	7.196.890.617.739	(10.611.666.814)	7.186.278.950.925	Profit for the period
Pengalihan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	25, 26	-	-	-	-	2.154.338.672.188	(2.154.338.672.188)	-	-	-	Transfer to appropriated retained earning
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan, setelah pajak	24, 21f	-	(423.093.594.720)	-	-	-	(291.764.707.168)	(714.858.301.888)	494.673.747	(714.363.628.141)	Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax
Pembagian dividen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Dividend distributions
Revaluasi aset tetap	-	-	(209.192.734.513)	-	-	-	-	(209.192.734.513)	-	(209.192.734.513)	Revaluation of fixed assets
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	-	-	-	24.501.872	-	24.501.872	Other comprehensive income from associate entities
Nilai wajar investasi - neto	11	-	(4.924.273.972)	-	-	2.521.013.198	-	(2.403.260.774)	-	(2.403.260.774)	Fair value of share investment - net
Penyesuaian ekuitas <i>merging entities</i>	-	-	(1.780.000.000)	-	-	-	-	(1.780.000.000)	-	(1.780.000.000)	Adjustment of merging entities equity
Laba (rugi) aset keuangan tersedia untuk dijual - neto	-	-	19.305.000	-	-	-	-	19.305.000	-	19.305.000	Gain (loss) on financial asset available for sale - net
Penyesuaian ekuitas <i>merging entities</i> dari <i>spin-off</i>	-	-	(1.937.451.075.980)	-	-	-	-	(1.937.451.075.980)	-	(1.937.451.075.980)	Adjustment of merging entities equity from spin off activity
<b>Saldo per 31 Desember 2022 (disajikan kembali - Catatan 46)</b>	<b>2.942.116.000.000</b>	<b>5.994.245.704.370</b>	<b>(538.315.714)</b>	<b>3.688.288.615.183</b>	<b>(12.862.769.110)</b>	<b>6.025.155.909.206</b>	<b>(659.031.231.193)</b>	<b>17.977.373.912.742</b>	<b>(170.171.915.532)</b>	<b>17.807.201.997.210</b>	<b>Balance as of December 31, 2022 (As restated - Note 46)</b>
Laba periode berjalan	-	2.461.265.640.891	-	-	-	-	1.221.889.452.458	3.683.155.093.349	(36.607.399.246)	3.646.547.694.103	Profit for the period
Pengalihan saldo laba yang telah ditentukan penggunaannya	25, 26	-	-	-	-	2.185.399.453.623	(2.185.399.453.623)	-	-	-	Transfer to appropriated retained earing
Pengukuran kembali atas liabilitas imbalan kerja karyawan, setelah pajak	24, 21f	-	(707.451.384.298)	-	-	-	(230.892.627.925)	(938.344.012.223)	(572.710.052)	(938.916.722.275)	Remeasurement of employee benefit liabilities, after tax
Pembagian dividen	-	-	(145.792)	-	-	-	-	(145.792)	-	(145.792)	Dividend distributions
Revaluasi aset tetap	-	-	1.085.556.940.644	-	215.320.596.498	-	-	1.300.877.537.142	-	1.300.877.537.142	Revaluation of fixed assets
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	-	-	-	-	-	26.581.179.266	26.581.179.266	-	26.581.179.266	Other comprehensive income from associate entities
Nilai wajar investasi - neto	11	-	20.954.461.961	-	-	4.322.632.816	-	25.277.094.777	-	25.277.094.777	Fair value of share investment - net
Laba (rugi) aset keuangan tersedia Untuk dijual - neto	-	-	(30.810.000)	-	-	(7.690.000)	-	(38.500.000)	-	(38.500.000)	Gain (loss) on financial asset available for sale - net
Penambahan modal dari <i>spin-off</i>	26	2.456.849.000.000	(3.694.012.183.626)	563.173.500.109	-	-	-	(673.989.683.517)	-	(673.989.683.517)	Adjustment capital from spin-off activity
Pembalikan ekuitas <i>merging entities</i>	26	2.996.353.000.000	(5.160.528.224.150)	(1.334.522.978.646)	3.747.747.112.717	-	(252.446.503.075)	(3.397.593.154)	3.397.593.154	-	Reversal of merging entities equity
<b>Saldo per 31 Desember 2023</b>	<b>8.395.318.000.000</b>	<b>-</b>	<b>(771.887.794.251)</b>	<b>7.651.356.324.398</b>	<b>(8.547.826.294)</b>	<b>8.210.555.362.829</b>	<b>(2.079.299.184.092)</b>	<b>21.397.494.882.590</b>	<b>(203.954.431.676)</b>	<b>21.193.540.450.914</b>	<b>Balance as of December 31, 2023</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
LAPORAN ARUS KAS  
KONSOLIDASIAN  
Untuk tahun yang berakhir  
pada tanggal 31 Desember 2023  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
CONSOLIDATED STATEMENT  
OF CASH FLOWS  
For the year ended  
December 31, 2023  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Catatan/ Notes	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
<b>Arus Kas dari Aktivitas Operasi</b>				<b>Cash Flows from Operating Activities</b>
Penerimaan kas dari pelanggan	30.131.606.047.838		34.884.610.104.136	Cash received from customers
Pembayaran kas kepada pemasok, karyawan, operasi dan lainnya	(22.984.638.689.362)		(25.063.208.561.993)	Cash paid to suppliers, employees, operations and others
Penerimaan konsorsium gula	731.724.632.000		141.210.444.475	Receipt from sugar consortium
Penerimaan restitusi pajak penghasilan	154.629.400.588		180.818.385.332	Receipts from tax restitution
Pembayaran pajak penghasilan	(1.166.898.447.430)		(1.974.162.717.716)	Payments for income taxes
Pembayaran konsorsium gula	(4.239.360.000)		(772.888.190.000)	Payments for sugar consortium
Pembayaran beban keuangan	(2.834.293.396.061)		(1.972.390.890.854)	Payments for financial expenses
<b>Kas neto yang diperoleh dari aktivitas operasi</b>	<b>4.027.890.187.573</b>		<b>5.423.988.573.380</b>	<b>Net cash provided by operating activities</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Investasi</b>				<b>Cash Flows from Investing Activities</b>
Pembayaran piutang lain-lain jangka panjang - pihak berelasi	(5.700.231.804.010)		(1.200.204.620.140)	Payment to other long-term receivables - related parties
Perolehan aset tetap	(3.227.783.238.542)		(2.178.551.907.833)	Acquisition of fixed assets
Pembayaran kembali dari pihak berelasi	982.681.892.939		749.130.477.239	Repayment from related parties
Penempatan kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya	(179.871.834.842)		(44.007.624.609)	Placement restricted cash and time deposit
Penerimaan dividen kas	45.000.000.000	33	75.000.000.000	Receipts of cash dividends
Penambahan piutang plasma	(9.590.439.391)		(66.505.733.593)	Addition of plasma receivables
Penerimaan penghasilan keuangan	183.442.351.646		113.382.712.039	Receipt of finance income
Penerimaan dari aset lainnya	43.491.336.708		83.487.178.908	Receipt from other asset
Penambahan investasi saham	-		(57.500.000.000)	Additions to investment in shares of stock
<b>Kas neto yang digunakan untuk aktivitas investasi</b>	<b>(7.862.861.735.492)</b>		<b>(2.525.769.517.989)</b>	<b>Net cash used in investing activities</b>
<b>Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan</b>				<b>Cash Flows from Financing Activities</b>
Penerimaan dari utang bank jangka pendek	64.500.000.000	17	17.500.000.000	Proceeds from short term bank loans
Penerimaan dari utang bank jangka panjang	(59.000.000.000)		(15.500.000.000)	Proceeds from long term bank loans
Penerimaan dari utang bank jangka panjang	25.549.965.458.446	23	-	Proceeds from long-term bank loans
Pembayaran kembali kepada negara	-		(3.705.994.022)	Repayment to Government loan
Penerimaan dana PEN dari pihak berelasi	25.480.500.000		91.248.901.678	Receipt of PEN funds from related parties
Pembayaran kembali dana PEN kepada pihak berelasi	(25.480.500.000)		-	Repayment of PEN funds to related parties
Pembayaran liabilitas sewa	(132.046.254.201)		(98.213.542.672)	Payment of lease liabilities
Pembayaran utang bank jangka panjang	(24.539.326.856.717)		(2.468.681.854.941)	Payments of long-term bank loans
<b>Kas neto yang diperoleh dari (digunakan untuk) aktivitas pendanaan</b>	<b>884.092.347.528</b>		<b>(2.477.352.489.957)</b>	<b>Net cash provided by (used in) financing activities</b>
<b>Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas</b>	<b>(2.950.879.200.391)</b>		<b>420.866.565.434</b>	<b>Net Increase (Decrease) in Cash and Cash Equivalents</b>
Dampak perubahan nilai tukar atas Kas dan Setara Kas	(9.549.314.964)		51.164.857.367	Effect of exchange rates changes on Cash and Cash Equivalents
<b>Kas dan Setara Kas Awal Periode/Tahun</b>	<b>6.154.236.702.607</b>	<b>4</b>	<b>5.682.205.279.806</b>	<b>Cash and Cash Equivalents At Beginning of Period/Year</b>
<b>Kas dan Setara Kas Akhir Periode/Tahun</b>	<b>3.193.808.187.252</b>	<b>4</b>	<b>6.154.236.702.607</b>	<b>Cash and Cash Equivalents At End of Period/Year</b>

Catatan atas laporan keuangan konsolidasian terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan konsolidasian secara keseluruhan.

The accompanying notes to the consolidated financial statements form an integral part of these consolidated financial statements.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**1. UMUM**

**a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan**

PT Perkebunan Nusantara IV ("Perusahaan") (dahulu PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)) didirikan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 12 tahun 1996, seperti yang dinyatakan dan berdasarkan akta pendirian yang dibuat dihadapan Notaris Harun Kamil, S.H. No. 37 tanggal 11 Maret 1996 dan telah memperoleh pengesahan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia melalui Surat Keputusan No. C2-8332.HT.01.01.TH.96 tanggal 8 Agustus 1996 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 81 tanggal 8 Oktober 1996, tambahan No. 8675/1996. Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir berdasarkan akta No. 08 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. tanggal 1 Desember 2023, mengenai pernyataan putusan rapat umum para pemegang saham tentang perubahan anggaran dasar. Perubahan anggaran dasar ini telah dilaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-0076469.AH.01.02, tanggal 7 Desember 2023.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perusahaan, maksud dan tujuan Perusahaan adalah melakukan usaha di bidang agro bisnis dan agro industri, untuk optimalisasi pemanfaatan sumber daya Perusahaan.

Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perusahaan dapat melaksanakan kegiatan utama:

- Pengusahaan budidaya tanaman meliputi pembukaan dan pengolahan lahan, pembibitan, penanaman dan pemeliharaan serta pemungutan hasil tanaman dan melakukan kegiatan-kegiatan lain yang berhubungan dengan pengusahaan budidaya tanaman tersebut;
- Produksi meliputi penerimaan dan pengolahan hasil tanaman sendiri maupun dari pihak lain menjadi barang setengah jadi dan atau barang jadi serta produk turunannya;

**1. GENERAL**

**a. The Company's Establishment and General Information**

PT Perkebunan Nusantara IV ("the Company") (previously PT Perkebunan Nusantara IV (Persero)) was established based on the Government Regulation No. 12 year 1996, as stated and based on the Notarial Deed No. 37 of Harun Kamil, S.H. dated March 11, 1996 and was approved by Ministry of Justice of the Republic of Indonesia in its decision letter No. C2-8332.HT.01.01.TH.96 dated August 8, 1996 and published in the State Gazette of Republic of Indonesia No. 81 dated October 8, 1996, Suplemen No. 8675/1996. The Company's Articles of Association has been amended several times, the most recent amendments were made through the Notarial Deed No. 08 of Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. dated December 1, 2023 regarding the decision of general stockholders' meeting concerning changes in articles of association. The amendments of the Company's articles of association has been reported to the Ministry of Laws and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with notification of acceptance letter No. AHU-0076469.AH.01.02, dated December 7, 2023.

According to Article No. 3 of the Company's articles of association, the Company's scope of activities comprises of agro-business and agro-industry, for optimization the Company's resources.

To achieve the objectives mentioned above, the Company perform major activities, such as:

- Agricultural activities consisting of land clearing and management, seedling, planting and maintenance and harvesting of the plantation result and other activities related to the agriculture;
- Production covering receiving and processing of own the plantation result or from other parties to become semi-finished and or finished goods and its derivative products;

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan (lanjutan)**

- Perdagangan meliputi penyelenggaraan kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perusahaan, baik hasil produksi sendiri maupun hasil produksi pihak lain;
- Pengembangan usaha bidang perkebunan, agro wisata, agro bisnis, agro industri, dan agro forestry.

Selain kegiatan usaha utama di atas, Perusahaan dapat melakukan kegiatan usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk *trading house*, pengembangan kawasan industri, *agro industrial complex*, *real estate* (penjualan, pembelian, dan pengelolaan properti termasuk hotel, perumahan, apartemen, dan kondominium), pergudangan, pusat perbelanjaan/mall, pariwisata, *resort*, olahraga dan rekreasi, *rest area*, jalan tol, perpupukan (industri dan perdagangan), rumah sakit, jasa pelayanan kesehatan lainnya, pendidikan, penelitian, prasarana telekomunikasi, sumber daya energi (termasuk namun tidak terbatas biofuel, green diesel ethanol), penyediaan/pembangkit tenaga listrik (termasuk namun tidak terbatas pada yang bersumber dari ethanol, biomasa, dan biogas), jasa penyewaan, jasa pembangunan kebun, jasa pengusahaan sarana dan prasarana yang dimiliki Perusahaan, pertanian, peternakan, perikanan (industri dan perdagangan), perkantoran, jasa konsultasi bidang agro bisnis dan agro industri dan atau pengolahan hasil perkebunan, perikanan, transportasi, kebandarudaraan, pertambangan, pelabuhan, alat mesin pertanian, pakan ternak, penggemukan sapi, ketahanan pangan, kontraktor pembangunan bidang perkebunan, karung goni, karung plastik, alkohol spiritus, *particle board*, ragi, asam asetat, bumbu masak, kosmetik, bahan bangunan, industri bio ethanol, jasa laboratorium, penyediaan air (termasuk air minum dan air baku), pengelolaan limbah, pelatihan, aneka tanaman, *oleochemical*, jasa perbengkelan (*workshop*), jasa konstruksi, rekayasa, pengadaan, dan konstruksi (*engineering procurement and construction* (EPC)), industri pengecoran logam (*foundry*), dan manufaktur.

**1. GENERAL (continued)**

**a. The Company's Establishment and General Information (continued)**

- *Trading covering organizing marketing activities of various products and other tradings activities related to the Company's business activities whether its own production result or others production result;*
- *Business development of agriculture, agro-tourism, agro-business, agro industry and agro forestry.*

*Other than the main activities mentioned above, the Company may perform business activities in optimizing the used of its resources for trading house, development of industrial estate, agro industrial complex, real estate (sale, purchase, and management of property including hotels, housing, apartments and condominiums), warehouses, shopping centers/malls, tourism, hotel, resorts, sports and recreation, rest areas, toll roads, fertilization (industry and trade), hospitals, other health services, education, research, telecommunications infrastructure, energy resources (including but not limited to biofuels, green diesel ethanol), electricity supply/power generation (including but not limited to those sourced from ethanol, biomass, and biogas), rental services, plantation development services, facilities and infrastructure owned by the Company, agriculture, animal husbandry, timber (industry and trade), offices, consulting services in the field of agro-business and agro-industry and/or processing of estate crops, fisheries, transportation, airport, mining, ports, agricultural machine tools, animal feed, cattle fattening, food security, plantation development contractors, gunny sacks, plastic bags, alcohol, particle board, yeast, acetic acid, cooking spices, cosmetics, building materials, bio ethanol industry, laboratory services, water supply (including drinking water and raw water), waste management, training, various plants, oleochemicals, workshop services, construction, engineering, procurement and construction (EPC) services, industry foundry, and manufacturing.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**a. Pendirian dan Informasi Umum Perusahaan (lanjutan)**

Kegiatan Perusahaan pada saat ini adalah perkebunan dan pengolahan komoditas kelapa sawit, teh dan karet yang mencakup pengolahan areal dan tanaman, kebun bibit dan pemeliharaan tanaman menghasilkan, pengolahan komoditas menjadi bahan baku berbagai industri, pemasaran komoditas yang dihasilkan yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki tanah dengan luas 623.387 hektar (ha) (tidak diaudit) yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, Provinsi Sumatera Barat, dan Kalimantan Barat dimana tanah yang telah memiliki status Hak Guna Usaha dari Pemerintah Indonesia masing-masing adalah seluas 484.752 ha dengan jangka waktu 21 tahun sampai dengan 36 tahun. Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, luas lahan yang telah ditanam adalah masing-masing seluas 471.170 ha dan 458.003 ha.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mengelola 5 regional dengan 219 unit usaha yang terdiri dari 95 unit kebun kelapa sawit, 57 unit Pabrik Kelapa Sawit (PKS), 4 unit Pabrik Pengolahan Inti Sawit (PPIS), 3 unit kebun teh, 3 unit pabrik pengolahan teh, 27 unit kebun karet, 12 unit pabrik pengolahan karet, 6 unit proyek pengembangan kebun plasma kelapa sawit, 1 unit kebun benih, 1 unit proyek batubara, 9 unit distrik dan 1 unit perbengkelan.

Kantor Pusat Perusahaan berdomisili di Gedung Agro Plaza Lantai 8 Jalan HR Rasuna Said Kav X2/1, Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.

**1. GENERAL (continued)**

**a. The Company's Establishment and General Information (continued)**

Currently, the Company's activities are plantation and processing of palm oil, tea and rubber commodities which include area and plant processing, nursery plantations and maintenance of mature plantation, processing of commodities into raw materials for various industries, marketing of the commodities produced which located in North Sumatra Province, Riau Province, Jambi Province, West Sumatra Province and West Kalimantan.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the Company has land with an area of 623,387 hectares (ha) (un-audited) which spread across the North Sumatra Province, Riau Province, Jambi Province, West Sumatra Province and West Kalimantan whereby the total land that has the status of Cultivation Rights from the Government of Indonesia is 484,752 ha, with period of 21 years to 36 years. As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the total planted area was 471,170 ha and 458,003 ha.

As of December 31, 2023, the Company manages 5 regions with 219 business units comprising of 95 units of palm oil plantations, 57 units of palm oil mills, 4 units of palm kernel mills, 3 units of tea plantations, 3 units tea processing plants, 27 units of rubber plantations, 12 units of rubber processing plants, 6 unit development project of palm oil smallholding, 1 unit seedling plantation, 1 unit of coal-mining project, 9 district units and 1 business unit of workshop.

The Company's head office is domiciled at Gedung Agro Plaza Lantai 8 Jalan HR Rasuna Said Kav X2/1, Jakarta Selatan, Province of DKI Jakarta.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi, *Region Head* dan  
*Senior Executive Vice President (SEVP)***

Susunan Dewan Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, adalah sebagai berikut:

<b>Dewan Komisaris</b>	<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>Board of Commissioners</b>
Komisaris Utama	Dahlan Harahap	Dahlan Harahap	<i>President Commissioner</i>
Komisaris	Arief Budiono	Arief Budiono	<i>Commissioner</i>
Komisaris	Arie Yuriwin	-	<i>Commissioner</i>
Komisaris Independen	Andi Wibisono	Andi Wibisono	<i>Independent Commissioner</i>
Komisaris Independen	Fauzi Yusuf	Atas Wijayanto	<i>Independent Commissioner</i>
<b>Direksi</b>	<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b>Director</b>
Direktur Utama	Jatmiko K. Santosa	Sucipto Prayitno	<i>President Director</i>
Direktur Operasional	Rizal H. Damanik	-	<i>Operational Director</i>
Direktur Pemasaran dan Komersial	Ryanto Wisnuardhy	-	<i>Marketing and Commercial Director</i>
Direktur Strategi dan <i>Sustainability</i>	Ugun Untaryo	-	<i>Strategy and Sustainability Director</i>
Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko	Hilda Savitri	-	<i>Finance and Risk Management Director</i>
Direktur Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi	Suhendri	-	<i>Human Resource and Information Technology Director</i>
Direktur Hubungan Kelembagaan	Irwan Perangin-angin	-	<i>Institutional Relation Director</i>
<b><i>Region Head &amp; Senior Executive Vice President ("SEVP")</i></b>	<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	<b><i>Region Head &amp; Senior Executive Vice Presiden ("SEVP")</i></b>
Regional I			<i>Region I</i>
<i>Region Head</i>	Ahmad Gusmar Harahap	-	<i>Region Head</i>
<i>SEVP Bidang Operasi I</i>	Yudhi Cahyadi	-	<i>SEVP Operation I</i>
<i>SEVP Bidang Operasi II</i>	Joni Raja Siregar	-	<i>SEVP Operation II</i>
<i>SEVP Bidang Pendukung Bisnis</i>	Tengku Rinel	-	<i>SEVP Business Support</i>
Regional II			<i>Region II</i>
<i>Region Head</i>	Sudarma Bhakti Lessan	-	<i>Region Head</i>
<i>SEVP Bidang Operasi I</i>	Budi Susilo	-	<i>SEVP Operation I</i>
<i>SEVP Bidang Operasi II</i>	Dedy Gurning	-	<i>SEVP Operation II</i>
<i>SEVP Bidang Pendukung Bisnis</i>	Budi Susanto	-	<i>SEVP Business Support</i>
Regional III			<i>Region III</i>
<i>Region Head</i>	Rurianto	-	<i>Region Head</i>
<i>SEVP Bidang Operasi</i>	Arief Subhan	-	<i>SEVP Operation</i>
<i>SEVP Bidang Pendukung Bisnis</i>	Ahmad Diponegoro	-	<i>SEVP Business Support</i>
Regional IV			<i>Region IV</i>
<i>Region Head</i>	Ospin Sembiring	-	<i>Region Head</i>
<i>SEVP Bidang Operasi</i>	Ifri Handi Lubis	-	<i>SEVP Operation</i>
<i>SEVP Bidang Pendukung Bisnis</i>	Achmedi Akbar	-	<i>SEVP Business Support</i>
Regional V			<i>Region V</i>
<i>Region Head</i>	Khayamuddin Panjaitan	-	<i>Region Head</i>
<i>SEVP Bidang Operasi I</i>	Oshutri Anwar	-	<i>SEVP Operation I</i>
<i>SEVP Bidang Operasi II</i>	Ihsan	-	<i>SEVP Operation II</i>
<i>SEVP Bidang Pendukung Bisnis</i>	Muhammad Zulham Rambe	-	<i>SEVP Business Support</i>

**1. GENERAL (continued)**

**b. Board of Commissioners, Directors, *Region Head* and  
*Senior Executive Vice President (SEVP)***

The Company's Board as of December 31, 2023 and December 31, 2022, are as follows:

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**b. Dewan Komisaris, Direksi, Region Head dan Senior Executive Vice President (SEVP)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, jumlah karyawan tetap Grup dan total imbalan jangka pendek personil manajemen kunci adalah sebagai berikut:

	<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>
Jumlah karyawan tetap (tidak diaudit)	50.834 orang/ person
Total imbalan kerja jangka pendek personil manajemen kunci	Rp51.686.629.227

**c. Entitas Anak, Entitas Asosiasi, dan Operasi Bersama**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Perusahaan memiliki Entitas Anak sebagai berikut:

Entitas Anak/ Subsidiaries	Domisili/ Domicile	Jenis usaha/ Principal activity	Tahun operasi secara komersial/ Start of operation	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership		Total aset sebelum eliminasi dalam miliar rupiah/ Total assets before elimination in billion of rupiah	
				31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022	31 Des/ Dec 31, 2023	31 Des/ Dec 31, 2022
PT Prima Medica Nusantara ("PMN")	Medan, Sumatera Utara	Jasa pelayanan kesehatan/ Healthcare services	2015	99,99%	99,99%	101	87
PT Sinergi Perkebunan Nusantara ("SPN")	Morowali, Sulawesi Tengah	Perkebunan dan pabrik minyak sawit/ Oil palm plantation and mill	2012	71,28%	71,28%	785	713
PT Agro Sinergi Nusantara ("ASN")	Meulaboh, Nangroe Aceh Darussalam	Perkebunan dan pabrik minyak sawit/ Oil palm plantation and mill	2011	64,77%	64,77%	921	907
PT Nusa Lima Medika ("NLM")	Pekanbaru, Riau	Jasa pelayanan kesehatan/ Healthcare services	2015	99,99%	99,99%	60	45
PT Alam Lestari Nusantara ("ALN")	Sarolangun, Jambi	Perkebunan karet/ Rubber plantation	2019	83,96%	83,96%	481	488
PT Kalimantan Medika Nusantara ("KMN")	Pontianak, Kalimantan Barat	Jasa pelayanan kesehatan/ Healthcare services	2014	99,50%	99,50%	4	4
PT Nusantara Batulicin ("NB")	Tanah Bumbu, Kalimantan Selatan	Perkebunan karet/ Rubber factory	2011	51,00%	51,00%	48	75

Perusahaan dan Entitas Anaknya, secara bersama-sama disebut sebagai "Grup".

**1. GENERAL (continued)**

**b. Board of Commissioners, Directors, Region Head and Senior Executive Vice President (SEVP)**

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the number of the Group's permanent employee and the amount of short-term benefit for the Company's key management personel are as follows:

	<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	
Jumlah karyawan tetap (tidak diaudit)	50.834 orang/ person	56.657 orang/ person	Number of permanent employees (unaudited)
Total imbalan kerja jangka pendek personil manajemen kunci	Rp51.686.629.227	Rp78.014.789.310	Short-term benefit for key management personel

**c. Subsidiaries, Associates, and Joint Operation**

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the Company's subsidiaries are as follows:

The Company and Subsidiaries, collectively referred to as the "Group".

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Aksi Korporasi**

Pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan melakukan beberapa aksi korporasi melalui transaksi penggabungan usaha PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI") dan PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII") ke dalam Perusahaan, dan pemisahan tidak murni usaha perkebunan kelapa sawit dan karet dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) ke Perusahaan.

**Penggabungan Usaha**

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham SK-328/MBU/11/2023 dan DSPN/KPPS/82/XI/2023 pada tanggal 28 November 2023, para pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:

- a. Penggabungan dengan PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI"), dan PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII") ke dalam Perusahaan.
- b. Penerbitan saham baru kepada Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut:
  - i) Negara Republik Indonesia sebanyak 299.635 lembar saham seri B atau sebesar Rp299.635.000.000.
  - ii) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 2.696.718 lembar saham seri B atau sebesar Rp 2.696.718.000.000.
- c. Peningkatan modal yang ditempatkan Perusahaan dari semula sebesar Rp2.942.116.000.000 menjadi sebesar Rp 5.938.469.000.000.
- d. Pemindehan tempat kedudukan dan kantor pusat Perusahaan dari semula Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara menjadi berkedudukan dan berkantor pusat di Kota Jakarta Selatan, Provinsi DKI Jakarta.
- e. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar.

**1. GENERAL (continued)**

**d. Corporate Action**

On December 1, 2023, the Company performed corporate actions through merger transaction of PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI") and PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII") to the Company, and spin-off asset and liabilities of palm and rubber businesses unit from PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

**Merger**

Based on the Shareholders Statement SK-328/MBU/11/2023 and DSPN/KPPS/82/XI/2023 dated November 28, 2023, the Shareholders approved, among others:

- a. Merger of PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI"), dan PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII") to the Company.
- b. Issuance of new shares to Republic of Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as follows:
  - i) Republic of Indonesia totaling 299,635 series B shares or Rp299,635,000,000.
  - ii) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) totaling 2,696,718 series B shares or Rp 2,696,718,000,000.
- c. Increase the issued and paid up capital of the Company from Rp2,942,116,000,000 to Rp5,938,469,000,000.
- d. Relocation of the Company's domicile and head office from Medan City, North Sumatra Province to being domiciled and headquartered in South Jakarta City, DKI Jakarta Province.
- e. The amendment of Article of Association.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**1. UMUM (lanjutan)**

**d. Aksi Korporasi (lanjutan)**

**Penggabungan Usaha (lanjutan)**

Selanjutnya pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan melakukan penggabungan dengan PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI"), dan PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII"). Perusahaan juga melakukan perubahan atas modal yang ditempatkan dan disetor pada Perusahaan melalui penerbitan saham baru kepada Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut:

- a. Negara Republik Indonesia sebanyak 299.635 lembar saham seri B atau sebesar Rp299.635.000.000
- b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 2.696.718 lembar saham seri B atau sebesar Rp 2.696.718.000.000

Nilai saham tersebut merupakan nilai indikatif sementara dimana nilai definitif akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar sesuai hasil penilaian oleh penilai independen.

Sehingga struktur modal ditempatkan/disetor Perusahaan setelah tanggal penggabungan sebagai berikut:

- a. Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai Rp1.000.000.
- b. Negara Republik Indonesia sebanyak 593.846 lembar saham seri B dengan nilai Rp593.846.000.000.
- c. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 5.344.622 lembar saham seri B dengan nilai Rp5.344.622.000.000.

Penggabungan dan perubahan modal yang ditempatkan dan disetor tersebut telah dikukuhkan melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 1 Desember 2023 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn dan telah disetujui dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.09-0191342 tanggal Menteri 1 Desember 2023.

**1. GENERAL (continued)**

**d. Corporate Action (continued)**

**Merger (continued)**

Subsequently on December 1, 2023, the Company merged with PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI"), and PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII"). The Company also changed the issued and fully paid capital by issuing new shares to Republic of Indonesia and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as follows:

- a. Republic of Indonesia totaling 299,635 series B shares or Rp299,635,000,000
- b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) totaling 2,696,718 series B shares or Rp2,696,718,000,000.

The amount of shares is a temporary indicative value where the definitive value will be determined based on fair value by an independent appraiser assessment result.

Therefore the structure for issued/paid up capital after the date of merger as follows:

- a. Republic of Indonesia totaling 1 series A share Dwiwarna Share or Rp1,000,000.
- b. Republic of Indonesia totaling 593,846 series B shares or Rp593,846,000,000.
- c. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) totaling 5,344,622 series B share or Rp5,344,622,000,000.

The merger and changes in issued and fully paid capital have been confirmed through Notarial Deed No. 01 dated December 1, 2023 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn and has been approved and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-AH.01.09-0191342 dated December 1, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. UMUM (lanjutan)

d. Aksi Korporasi (lanjutan)

**Penerimaan Pemisahan Tidak Murni Usaha  
Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet dari PT  
Perkebunan Nusantara III (Persero)**

Berdasarkan Keputusan Para Pemegang Saham SK-329/MBU/11/2023 dan DSPN/KPPS/82/XI/2023 pada tanggal 28 November 2023, para pemegang saham Perusahaan menyetujui, antara lain:

- Pemisahan tidak murni (*spin-off*) usaha Perkebunan kelapa sawit dan karet dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) kepada Perusahaan.
- Penerbitan saham baru kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 2.456.849 lembar saham seri B atau sebesar Rp2.456.849.000.000
- Peningkatan modal yang ditempatkan Perusahaan dari semula sebesar Rp5.938.469.000.000 (setelah merger) menjadi sebesar Rp8.395.318.000.000.

Pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan menerima pemisahan tidak murni usaha Perkebunan kelapa sawit dan karet dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Atas aksi korporasi tersebut Perusahaan melakukan perubahan atas modal yang ditempatkan dan disetor oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar sebanyak 2.456.849 lembar saham seri B atau sebesar Rp2.456.849.000.000. Nilai tersebut merupakan nilai indikatif sementara dimana nilai definitif akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar sesuai hasil penilaian oleh penilai independen.

Sehingga struktur modal ditempatkan/disetor Perusahaan setelah tanggal penggabungan sebagai berikut:

- Negara Republik Indonesia sebanyak 1 lembar saham seri A Dwiwarna dengan nilai Rp1.000.000.
- Negara Republik Indonesia sebanyak 593.846 lembar saham seri B dengan nilai Rp593.846.000.000.
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 7.801.471 lembar saham seri B dengan nilai Rp7.801.471.000.000.

1. GENERAL (continued)

d. Corporate Action (continued)

**Spin Off of Palm Oil and Rubber Plantation  
Business from PT Perkebunan Nusantara III  
(Persero)**

Based on the Shareholders Statement SK-329/MBU/11/2023 and DSPN/KPPS/82/XI/2023 dated November 28, 2023 the Shareholders approved, among others:

- Spin-off of palm oil and rubber plantation business of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) to the Company.
- Issuance of new shares to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) totaling 2,456,849 series B shares or Rp2,456,849,000,000.
- Increase the issued and paid up capital of the Company from Rp5,938,469,000,000 (post merger) to Rp8,395,318,000,000.

On December 1, 2023, the Company received a spin-off of the palm oil and rubber plantation businesses from PT Perkebunan Nusantara III (Persero). In respect to the corporate action, the Company made changes to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) issued and fully paid capital totaling 2,456,849 series B shares or Rp2,456,849,000,000. The amount is a temporary indicative value where the definitive value will be determined based on fair value by an independent appraiser assessment result.

Therefore the structure for issued/paid up capital after the date of merger as follows:

- Republic of Indonesia totaling 1 series A share Dwiwarna Share or Rp1,000,000.
- Republic of Indonesia totaling 593,846 series B shares or Rp593,846,000,000.
- PT Perkebunan Nusantara III (Persero) totaling 7,801,471 series B share or Rp7,801,471,000,000.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

1. **UMUM (lanjutan)**

d. **Aksi Korporasi (lanjutan)**

**Penerimaan Pemisahan Tidak Murni Usaha  
Perkebunan Kelapa Sawit dan Karet dari PT  
Perkebunan Nusantara III (Persero)  
(lanjutan)**

Perubahan modal ditempatkan atas pemisahan tidak murni bisnis kelapa sawit dan karet tersebut telah dikukuhkan melalui Akta Notaris No.06 tanggal 1 Desember 2023 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn dan telah disetujui dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No. AHU-AH.01.03-0149908 tanggal Menteri 1 Desember 2023.

Selanjutnya, sejak tanggal efektif penggabungan dan pengalihan sebagian aset, liabilitas PTPN III (Persero) setelah pemisahan tidak murni (*Spin-Off*) yaitu tanggal 1 Desember 2023, semua kegiatan perusahaan, operasional, kekayaan, tagihan-tagihan, aset, liabilitas, hak, kewajiban dan pekerja dari entitas yang menggabungkan diri beralih kepada Perusahaan.

Penggabungan usaha dari PTPN V, PTPN VI, PTPN XIII dan pengalihan sebagian aset, liabilitas PTPN III setelah pemisahan tidak murni (*Spin-Off*) ke Perusahaan dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sepengendali".

e. **Penyelesaian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Manajemen Grup bertanggung jawab atas penyusunan laporan keuangan konsolidasian ini, yang telah diselesaikan dan disetujui untuk diterbitkan oleh Direksi Perusahaan pada tanggal 31 Mei 2024.

1. **GENERAL (continued)**

d. **Corporate Action (continued)**

**Spin Off of Palm Oil and Rubber Plantation  
Business from PT Perkebunan Nusantara III  
(Persero) (continued)**

The change in issued capital resulting from the spin-off of the palm oil and rubber businesses has been confirmed through Notarial Deed No. 06 dated December 1, 2023 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn and has been approved and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-AH.01.03-0149908 dated December 1, 2023.

Furthermore, from the effective date of the merger and transfer of some assets, liabilities of PTPN III (Persero) after Spin-Off to the Company which is December 1, 2023, all business, operational, wealth, bills, assets, liabilities, rights, obligations, and employees activities of merged entities transferred to the Company.

The merger transaction of PTPN V, PTPN VI, PTPN XIII and transfer of some assets, liabilities of PTPN III after Spin-Off to the Company are recorded based on the pooling of interest method in accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities Under Common Control".

e. **Completion of the Consolidated Financial Statements**

The Management of the Group is responsible for the preparation of the consolidated financial statements, which were completed and authorized for issue by the Company's Directors on May 31, 2024.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian**

Laporan keuangan konsolidasian telah disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan ("SAK") di Indonesia, yang mencakup Pernyataan dan Interpretasi yang dikeluarkan oleh Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia ("DSAK IAI").

Laporan keuangan konsolidasian disusun berdasarkan konsep akrual, kecuali laporan arus kas konsolidasian, dengan menggunakan konsep biaya historis, kecuali seperti yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian yang relevan.

Laporan arus kas konsolidasian yang disusun menggunakan metode langsung dengan mengelompokkan penerimaan dan pengeluaran kas dan setara kas ke dalam aktivitas operasi, investasi dan pendanaan.

Kebijakan akuntansi yang diterapkan oleh Grup adalah selaras bagi periode yang dicakup oleh laporan keuangan konsolidasian, kecuali untuk standar akuntansi baru dan revisi seperti diungkapkan pada Catatan 2b dibawah ini.

Grup telah menyusun laporan keuangan konsolidasian dengan dasar bahwa Grup akan terus beroperasi secara berkesinambungan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION**

**a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements**

*The consolidated financial statements have been prepared in accordance with Indonesian Financial Accounting Standards ("SAK"), which comprises of the Statements and Interpretations issued by the Financial Accounting Standards Board of the Institute of Indonesia Chartered Accountants (Dewan Standar Akuntansi Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia or "DSAK IAI").*

*The consolidated financial statements have been prepared on the accrual basis, except for the consolidated statement of cash flows, using the historical cost concept of accounting, except as disclosed in the relevant Notes to the consolidated financial statements herein.*

*The consolidated statement of cash flows, which have been prepared using the direct method, present receipts and disbursements of cash and cash equivalent classified into operating, investing and financing activities.*

*The accounting policies adopted by the Group are consistently applied for the periods covered by the consolidated financial statements, except for new and revised accounting standards as disclosed in the following Note 2b.*

*The Group has prepared the consolidated financial statements on the basis that it will continue to operate as a going concern.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**a. Dasar Penyajian Laporan Keuangan Konsolidasian (lanjutan)**

Mata uang penyajian yang digunakan dalam laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang merupakan mata uang fungsional Grup.

**b. Perubahan kebijakan akuntansi**

Grup menerapkan pertama kali seluruh standar baru dan/atau yang direvisi yang berlaku efektif untuk periode yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, termasuk standar yang direvisi berikut ini yang mempengaruhi laporan keuangan konsolidasian Grup:

**Amandemen PSAK 1: Penyajian laporan keuangan tentang Pengungkapan Kebijakan Akuntansi**

Amandemen ini memberikan panduan dan contoh untuk membantu entitas menerapkan pertimbangan materialitas dalam pengungkapan kebijakan akuntansi. Amandemen tersebut bertujuan untuk membantu entitas menyediakan pengungkapan kebijakan akuntansi yang lebih berguna dengan mengganti persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'signifikan' entitas dengan persyaratan untuk mengungkapkan kebijakan akuntansi 'material' entitas dan menambahkan panduan tentang bagaimana entitas menerapkan konsep materialitas dalam membuat keputusan tentang pengungkapan kebijakan akuntansi.

Amandemen tersebut berdampak pada pengungkapan kebijakan akuntansi Grup, namun tidak berdampak pada pengukuran, pengakuan atau penyajian *item* apa pun dalam laporan keuangan Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)**

**a. Basis of Preparation of Consolidated Financial Statements (continued)**

The reporting currency used in the consolidated financial statements are Rupiah, which is the Group functional currency.

**b. Changes in accounting principles**

The Group made first time adoption of all the new and/or revised standards effective for the periods beginning on or after January 1, 2023, including the following revised standards that have affected the consolidated financial statements of the Group:

**Amendment of PSAK 1: Presentation of financial statement - Disclosure of accounting policies**

This amendments provide guidance and examples to help entities apply materiality judgements to accounting policy disclosures. The amendment aim to help entities provide accounting policy disclosures that are more useful by replacing the requirement for entities to disclose their 'significant' accounting policies with a requirement to disclose their 'material' accounting policies and adding guidance on how entities apply the concept of materiality in making decisions about accounting policy disclosures.

The amendments have had an impact on the Group's disclosures of accounting policies, but not on the measurement, recognition or presentation of any items in the Group's financial statements.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**Amendemen PSAK 16: Aset Tetap - Hasil  
sebelum Penggunaan yang Diintensikan**

Amandemen ini tidak memperbolehkan entitas untuk mengurangi suatu hasil penjualan item yang diproduksi saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen dari biaya perolehan suatu aset tetap. Sebaliknya, entitas mengakui hasil dari penjualan *item-item* tersebut, dan biaya untuk memproduksi *item-item* tersebut, dalam laba rugi.

Grup menerapkan amendemen tersebut secara retrospektif hanya pada aset tetap yang tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode penyajian paling awal ketika entitas pertama kali menerapkan amendemen tersebut.

Amandemen ini tidak berdampak pada laporan keuangan konsolidasian Grup karena tidak ada penjualan atas *item-item* yang dihasilkan aset tetap yang menjadi tersedia untuk digunakan pada atau setelah awal periode sajian paling awal, saat membawa aset tersebut ke lokasi dan kondisi yang diperlukan supaya aset dapat beroperasi sesuai dengan intensi manajemen.

**Amendemen PSAK 25: Kebijakan  
Akuntansi, Perubahan Estimasi Akuntansi,  
dan Kesalahan terkait Definisi Estimasi  
Akuntansi**

Amandemen PSAK 25 memperjelas perbedaan antara perubahan estimasi akuntansi, perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan. Amendemen juga mengklarifikasi bagaimana entitas menggunakan teknik pengukuran dan input untuk mengembangkan estimasi akuntansi.

Amandemen ini tidak memiliki dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**b. Changes in accounting principles  
(continued)**

**Amendments to PSAK 16: Fixed Assets -  
Proceeds before Intended Use**

The amendments prohibit entities to deduct from the cost of an item of fixed assets, any proceeds from selling items produced while bringing that asset to the location and condition necessary for it to be capable of operating in the manner intended by management. Instead, an entity recognizes the proceeds from selling such items, and the costs of producing those items, in the profit or loss.

The Group applies the amendments retrospectively only to items of fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented when the entity first applies the amendment.

These amendments had no impact on the consolidated financial statements of the Group as there were no sales of such items produced by fixed assets made available for use on or after the beginning of the earliest period presented, while bringing those assets to the location and condition necessary for them to be capable of operating in the manner intended by management.

**Amendment of PSAK 25: Accounting  
Policies, Changes in Accounting Estimates  
and Errors - Definition of Accounting  
Estimates**

The amendments to PSAK 25 clarify the distinction between changes in accounting estimates, changes in accounting policies and the correction of errors. They also clarify how entities use measurement techniques and inputs to develop accounting estimates.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan  
tentang Pajak Tangguhan Terkait Aset dan  
Liabilitas Yang Timbul Dari Transaksi  
Tunggal**

Amandemen PSAK 46 Pajak Penghasilan mempersempit ruang lingkup pengecualian pengakuan awal, sehingga tidak lagi berlaku pada transaksi yang menimbulkan perbedaan temporer yang dapat dikenakan pajak dan dapat dikurangkan seperti sewa dan liabilitas dekomisioning.

Amandemen ini tidak mempunyai dampak terhadap laporan keuangan konsolidasian Grup.

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan -  
Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan  
Model Pilar Dua**

Amandemen PSAK 46 ini diperkenalkan sebagai tanggapan terhadap aturan Model Pilar Dua yang diterbitkan oleh Organisasi Kerjasama dan Pengembangan Ekonomi atau *Organization for Economic Co-operation and Development (OECD)*, dan mencakup:

- Pengecualian atas pengakuan dan pengungkapan informasi mengenai aset dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan Pilar Dua; dan
- Persyaratan pengungkapan bagi entitas yang terkena dampak untuk membantu pengguna laporan keuangan lebih memahami eksposur entitas terhadap pajak penghasilan Pilar Dua yang timbul dari undang-undang tersebut, terutama sebelum tanggal berlakunya undang-undang tersebut.

Pengecualian tersebut - yang penggunaannya harus diungkapkan - segera berlaku saat penerbitan amandemen ini. Persyaratan pengungkapan lainnya berlaku untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2023, namun tidak untuk periode yang berakhir pada atau sebelum 31 Desember 2023.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**b. Changes in accounting principles  
(continued)**

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -  
Deferred Tax related to Assets and  
Liabilities arising from a Single Transaction**

The amendments to PSAK 46 Income Taxes narrow the scope of the initial recognition exception, so that it no longer applies to transactions that give rise to equal taxable and deductible temporary differences such as leases and decommissioning liabilities.

The amendments had no impact on the Group's consolidated financial statements.

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes -  
International Tax Reform - Pillar Two Model  
Rules**

The amendments to PSAK 46 have been introduced in response to the Pillar Two Rules, issued by Organization for Economic Co-operation and Development (OECD), and include:

- An exception to the recognition and disclosure of deferred taxes related to the Pillar Two income taxes; and
- Disclosure requirements for affected entities to help users of the financial statements better understand an entity's exposure to Pillar Two income taxes arising from that legislation, particularly before its effective date.

The exception - the use of which is required to be disclosed - applies immediately upon the issue of these amendments. The remaining disclosure requirements apply for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2023, but not for any periods ending on or before December 31, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**b. Perubahan kebijakan akuntansi (lanjutan)**

**Amandemen PSAK 46: Pajak Penghasilan - Reformasi Pajak Internasional - Ketentuan Model Pilar Dua (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perundang-undangan terkait pajak penghasilan Pilar Dua belum diberlakukan atau secara substantif belum diberlakukan di Indonesia tempat Grup beroperasi. Oleh karena itu, Grup masih dalam proses melakukan penilaian atas potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua. Potensi eksposur pajak penghasilan Pilar Dua, jika ada, saat ini tidak diketahui atau dapat diperkirakan secara wajar.

**c. Prinsip-prinsip Konsolidasi**

Laporan keuangan konsolidasian meliputi laporan keuangan Perusahaan dan entitas anak. Kendali diperoleh bila Grup terekspos atau memiliki hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee* dan memiliki kemampuan untuk mempengaruhi imbal hasil tersebut melalui kekuasaannya atas *investee*. Dengan demikian, investor mengendalikan *investee* jika dan hanya jika investor memiliki seluruh hal berikut ini:

- i) Kekuasaan atas *investee*, yaitu hak yang ada saat ini yang memberi investor kemampuan kini untuk mengarahkan aktivitas relevan dari *investee*,
- ii) Eksposur atau hak atas imbal hasil variabel dari keterlibatannya dengan *investee*, dan
- iii) Kemampuan untuk menggunakan kekuasaannya atas *investee* untuk mempengaruhi jumlah imbal hasil.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)**

**b. Changes in accounting principles (continued)**

**Amendment of PSAK 46: Income Taxes - International Tax Reform - Pillar Two Model Rules (continued)**

As of December 31, 2023, the Pillar Two income taxes legislation has not yet been enacted or has not yet substantively enacted in Indonesia where the Group operates. Therefore, the Group is still in the process of assessing the potential exposure to Pillar Two income taxes. The potential exposure, if any, to Pillar Two income taxes is currently not known or reasonably estimable.

**c. Principles of Consolidation**

The consolidated financial statements comprise the financial statements of the Company and its subsidiaries. Control is achieved when the Group is exposed, or has rights, to variable returns from its involvement with the *investee* and has the ability to affect those returns through its power over the *investee*. Thus, the Group controls an *investee* if and only if the Group has all of the following:

- i) Power over the *investee*, that is existing rights that give the Group current ability to direct the relevant activities of the *investee*,
- ii) Exposure, or rights, to variable returns from its involvement with the *investee*, and
- iii) The ability to use its power over the *investee* to affect its returns.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN  
AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**c. Prinsip-prinsip Konsolidasi (lanjutan)**

Bila Grup tidak memiliki hak suara atau hak serupa secara mayoritas atas suatu *investee*, Grup mempertimbangkan semua fakta dan keadaan yang relevan dalam mengevaluasi apakah mereka memiliki kekuasaan atas *investee*, termasuk:

- i) Pengaturan kontraktual dengan pemilik hak suara lainnya dari *investee*,
- ii) Hak yang timbul atas pengaturan kontrak lain, dan
- iii) Hak suara dan hak suara potensial yang dimiliki Perusahaan.

Grup menilai kembali apakah mereka mengendalikan *investee* bila fakta dan keadaan mengindikasikan adanya perubahan terhadap satu atau lebih dari ketiga elemen dari pengendalian. Konsolidasi atas entitas-entitas anak dimulai sejak Grup memperoleh pengendalian atas entitas anak dan berakhir pada saat Grup kehilangan pengendalian atas entitas anak. Aset, liabilitas, penghasilan dan beban dari entitas anak yang diakuisisi pada tahun tertentu disertakan dalam laporan keuangan konsolidasian sejak tanggal Grup memperoleh kendali sampai tanggal Grup tidak lagi mengendalikan entitas anak tersebut.

Seluruh laba rugi dan setiap komponen penghasilan komprehensif lain ("PKL") diatribusikan pada pemilik entitas induk dan pada kepentingan nonpengendali ("KNP"), walaupun hal ini akan menyebabkan saldo KNP yang defisit. Bila dipandang perlu, penyesuaian dilakukan terhadap laporan keuangan entitas anak untuk diselaraskan dengan kebijakan akuntansi Grup.

Seluruh aset dan liabilitas, ekuitas, penghasilan dan beban dan arus kas atas transaksi antar anggota Grup dieliminasi sepenuhnya pada saat konsolidasi.

Perubahan dalam bagian kepemilikan entitas induk pada entitas anak yang tidak mengakibatkan hilangnya pengendalian, dicatat sebagai transaksi ekuitas. Bila kehilangan pengendalian atas suatu entitas anak, maka Grup menghentikan pengakuan atas aset (termasuk *goodwill*), liabilitas dan komponen lain dari ekuitas terkait, dan selisihnya diakui pada laba rugi. Bagian dari investasi yang tersisa diakui pada nilai wajar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**c. Principles of Consolidation (continued)**

*When the Group has less than a majority of the voting or similar rights of an investee, the Group considers all relevant facts and circumstances in assessing whether it has power over an investee, including:*

- i) The contractual agreement with the other vote holders of the investee,*
- ii) Rights arising from other contractual arrangements, and*
- iii) The Company's voting rights and potential voting rights.*

*The Group re-assesses whether or not it controls an investee if facts and circumstances indicate that there are changes to one or more of the three elements of control. Consolidation of a subsidiaries begins when the Group obtains control over the subsidiaries and ceases when the Group loses control of the subsidiaries. Assets, liabilities, income and expenses of a subsidiaries acquired during the year are included in the consolidated financial statements from the date the Group gains control until the date the Group ceases to control the subsidiaries.*

*Profit or loss and each component of other comprehensive income ("OCI") are attributed to the equity holders of the parent of the Group and to the non-controlling interests ("NCI"), even if this results in the NCI having a deficit balance. When necessary, adjustments are made to the financial statements of subsidiaries to bring their accounting policies into line with the Group's accounting policies*

*All intra-group assets and liabilities, equity, income, expenses and cash flows relation to transactions between members of the Group are eliminated in full on consolidation.*

*A change in the parent's ownership interest in a subsidiaries, without a loss of control, is accounted for as an equity transaction. If the Group loses control over a subsidiaries, it derecognizes the related assets (including goodwill), liabilities, NCI and other component of equity, while the difference is recognized in the profit or loss. Any investment retained is recognized at fair value.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN  
AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**d. Klasifikasi Lancar dan Tak Lancar**

Grup menyajikan aset dan liabilitas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian berdasarkan klasifikasi lancar/tak lancar. Suatu aset disajikan lancar bila:

- 1) akan direalisasi, dijual atau dikonsumsi dalam siklus operasi normal,
- 2) untuk diperdagangkan,
- 3) akan direalisasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- 4) kas atau setara kas kecuali yang dibatasi penggunaannya atau akan digunakan untuk melunasi suatu liabilitas dalam kurun waktu 12 bulan setelah tanggal pelaporan.

Seluruh aset lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Suatu liabilitas disajikan lancar bila:

- i) akan dilunasi dalam siklus operasi normal,
- ii) untuk diperdagangkan,
- iii) akan dilunasi dalam 12 bulan setelah tanggal pelaporan, atau
- iv) tidak ada hak untuk menangguhkan pelunasannya dalam kurun waktu 12 bulan setelah periode pelaporan.

Seluruh liabilitas lain diklasifikasikan sebagai tidak lancar.

Aset dan kewajiban pajak tangguhan diklasifikasikan sebagai aset dan kewajiban tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**d. Current and Non-current Classification**

The Group presents assets and liabilities in the consolidated statement of financial position based on current/non-current classification. An asset is current when it is:

- 1) expected to be realized or intended to be sold or consumed in the normal operating cycle,
- 2) held primarily for the purpose of trading,
- 3) expected to be realized within 12 months after the reporting period, or
- 4) cash or cash equivalent unless restricted from being exchanged or used to settle a liability for at least 12 months after the reporting period.

All other assets are classified as non-current.

A liability is current when it is:

- i) expected to be settled in the normal operating cycle,
- ii) held primarily for the purpose of trading,
- iii) due to be settled within 12 months after the reporting period, or
- iv) there is no right at the end of reporting period to defer the settlement of the liability for at least 12 months after the reporting period

All other liabilities are classified as non-current.

Deferred tax assets and liabilities are classified as non-current assets and liabilities.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN  
AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**e. Pengukuran Nilai Wajar**

Grup mengukur aset biologis, termasuk produk (agrikultur) dari tanaman produktif, pada nilai wajar setiap tanggal pelaporan. Grup juga mengukur pada pengakuan awal instrumen keuangan, dan aset dan liabilitas yang diperoleh melalui kombinasi bisnis pada nilai wajar. Grup juga mengukur jumlah terpulihkan dari unit penghasil kas ("UPK") tertentu berdasarkan nilai wajar dikurangi biaya pelepasan, dan aset keuangan tertentu pada nilai wajar melalui penghasilan komprehensif lain ("NWPKL").

Nilai wajar adalah harga yang akan diterima dari menjual suatu aset atau harga yang akan dibayar untuk mengalihkan suatu liabilitas dalam transaksi teratur antara pelaku pasar pada tanggal pengukuran. Pengukuran nilai wajar mengasumsikan bahwa transaksi untuk menjual aset atau mengalihkan liabilitas terjadi:

- i) Di pasar utama untuk aset atau liabilitas tersebut, atau
- ii) Jika tidak terdapat pasar utama, di pasar yang paling menguntungkan untuk aset atau liabilitas tersebut.

Pasar utama atau pasar yang paling menguntungkan tersebut harus dapat diakses oleh Grup.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**e. Fair Value Measurement**

The Group measures biological assets, including produce of bearer plants, at fair value at each reporting date. The Group also initially measures financial instruments, and assets and liabilities of the acquirees upon business combinations at fair value. They also measure certain recoverable amounts of the cash generating unit ("CGU") using fair value less cost of disposal ("FVLCD") and certain financial assets at fair value through other comprehensive income ("FVOCI").

Fair value is the price that would be received to sell an asset or paid to transfer a liability in an orderly transaction between market participants at the measurement date. The fair value measurement is based on the presumption that the transaction to sell the asset or transfer the liability takes place either:

- i) In the principal market for the asset or liability, or
- ii) In the absence of a principal market, in the most advantageous market for the asset or liability.

The principal or the most advantageous market must be accessible to by the Group.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN  
AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**e. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)**

Nilai wajar dari aset atau liabilitas diukur dengan menggunakan asumsi yang akan digunakan pelaku pasar ketika menentukan harga aset atau liabilitas tersebut, dengan asumsi bahwa pelaku pasar bertindak dalam kepentingan ekonomi terbaiknya.

Pengukuran nilai wajar dari suatu aset nonkeuangan memperhitungkan kemampuan pelaku pasar untuk menghasilkan manfaat ekonomik dengan menggunakan aset dalam penggunaan tertinggi dan terbaiknya atau dengan menjualnya kepada pelaku pasar lain yang akan menggunakan aset tersebut pada penggunaan tertinggi dan terbaiknya.

Grup menggunakan teknik penilaian yang sesuai dengan keadaan dan data yang memadai tersedia untuk mengukur nilai wajar, dengan memaksimalkan masukan (*input*) yang dapat diamati (*observable*) yang relevan dan meminimalkan masukan (*input*) yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

Semua aset dan liabilitas yang nilai wajarnya diukur atau diungkapkan dalam laporan keuangan konsolidasian dikategorikan dalam hierarki nilai wajar berdasarkan level masukan (*input*) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan sebagai berikut:

- i) Level 1 - Harga kuotasian (tanpa penyesuaian) di pasar aktif untuk aset atau liabilitas yang identik yang dapat diakses entitas pada tanggal pengukuran.
- ii) Level 2 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang dapat diamati (*observable*) baik secara langsung atau tidak langsung.
- iii) Level 3 - Teknik penilaian yang menggunakan tingkat masukan (*input*) yang paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar yang tidak dapat diamati (*unobservable*).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**e. Fair Value Measurement (continued)**

The fair value of an asset or a liability is measured using the assumptions that market participants would use when pricing the asset or liability, assuming that market participants act in their economic best interest.

A fair value measurement of a non-financial asset takes into account a market participant's ability to generate economic benefits by using the asset in its highest and best use or by selling it to another market participant that would use the asset in its highest and best use.

The Group uses valuation techniques that are appropriate in the circumstances and for which sufficient data are available to measure fair value, maximizing the use of relevant observable inputs and minimizing the use of unobservable inputs.

All assets and liabilities for which fair value is measured or disclosed in the consolidated financial statements are categorized within the fair value hierarchy, described as follows, based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole:

- i) Level 1 - Quoted (unadjusted) market prices in active markets for identical assets or liabilities.
- ii) Level 2 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is directly or indirectly observable.
- iii) Level 3 - Valuation techniques for which the lowest level input that is significant to the fair value measurement is unobservable.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**e. Pengukuran Nilai Wajar (lanjutan)**

Untuk aset dan liabilitas yang diakui pada laporan keuangan konsolidasian secara berulang, Grup menentukan apakah terdapat perpindahan antara level dalam hierarki dengan melakukan evaluasi ulang atas penetapan kategori (berdasarkan level masukan (input) paling rendah yang signifikan terhadap pengukuran nilai wajar secara keseluruhan) pada tiap akhir periode pelaporan.

Tim pelaporan keuangan Grup bertanggungjawab atas penilaian dalam menentukan kebijakan dan prosedur untuk pengukuran nilai wajar berulang, seperti aset biologis, nilai wajar (dikurangi biaya untuk menjual) UPK (untuk uji penurunan nilai), dan aset keuangan pada NWPKL.

Penilai eksternal terlibat dalam penilaian aset signifikan, terutama aset biologis. Keterlibatan penilai eksternal ditentukan setiap tahun setelah dibahas dan disetujui oleh Direksi Perusahaan. Kriteria pemilihan termasuk pengetahuan pasar, reputasi, independensi dan kemampuan mematuhi standar profesi. Metode penilaian dan input yang digunakan dibahas dan diputuskan bersama oleh Grup dan penilai eksternal.

Untuk tujuan pengungkapan nilai wajar, Grup menentukan klasifikasi aset dan liabilitas berdasarkan sifat, karakteristik dan risikonya dan level pada hierarki nilai wajar sebagaimana dijelaskan diatas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**e. Fair Value Measurement (continued)**

*For assets and liabilities that are recognized in the consolidated financial statements on a recurring basis, the Group determines whether transfers have occurred between levels in the hierarchy by re-assessing categorization (based on the lowest level input that is significant to the fair value measurement as a whole) at the end of each reporting period.*

*The Group's financial reporting team in charge of valuation to determine the policies and procedures for recurring fair value measurement, such as biological assets and fair value (less costs of disposal) of CGUs (for impairment test purpose) and financial assets at FVOCI.*

*External valuers are involved for valuation of significant assets, in particular, the biological assets. Involvement of external valuers is decided upon annually after discussion with and approval by the Company's Board of Directors. Selection criteria include market knowledge, reputation, independence and whether professional standards are maintained. Valuation techniques and inputs to use were discussed and decided by the Group and external valuers.*

*For the purpose of fair value disclosures, the Group has determined classes of assets and liabilities on the basis of the nature, characteristics and risks of the asset or liability and the level of the fair value hierarchy as explained above.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**f. Kas dan Setara Kas**

Kas dan setara kas dalam laporan posisi keuangan konsolidasian yang terdiri dari kas dan bank serta deposito jangka pendek yang jatuh tempo dalam waktu 3 bulan atau kurang, yang dapat segera dikonversikan menjadi kas dalam jumlah yang dapat ditentukan dan memiliki risiko perubahan nilai yang tidak signifikan.

Kas dan setara kas yang dijamin atau telah ditentukan penggunaannya disajikan sebagai kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**g. Piutang**

Piutang usaha dan piutang lain-lain pada awalnya diakui sebesar nilai wajar dan kemudian diukur pada biaya perolehan diamortisasi dengan menggunakan metode SBE, dikurangi dengan penyisihan untuk penurunan nilai. Jika piutang diharapkan tertagih dalam satu tahun atau kurang (atau dalam siklus normal operasi dari bisnis jika lebih lama), piutang tersebut dikelompokkan sebagai aset lancar. Jika lebih dari satu tahun, piutang tersebut disajikan sebagai aset tidak lancar.

**h. Instrumen Keuangan**

Instrumen keuangan adalah setiap kontrak yang menambah nilai aset keuangan bagi satu entitas dan liabilitas keuangan atau ekuitas bagi entitas lain.

**Aset Keuangan**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Pada pengakuan awal, Grup mengukur aset keuangan pada nilai wajarnya ditambah biaya transaksi, dalam hal aset keuangan tidak diukur pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR"). Piutang usaha yang tidak mengandung komponen pembiayaan yang signifikan, dimana Grup telah menerapkan cara praktis, yaitu diukur pada harga transaksi yang ditentukan sesuai PSAK 72, seperti diungkapkan pada Catatan 2x.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**f. Cash and Cash Equivalents**

Cash and cash equivalents in the statements of consolidated financial position comprise cash on hand and in banks and short-term deposits with a maturity of 3 months or less, that are readily convertible to a known amount of cash and subject to an insignificant risk of changes in value.

Cash and cash equivalents that have been used as collateral and restricted in use are presented as restricted cash and time deposits in the consolidated statement of financial position.

**g. Receivables**

Trade receivables and other receivables are recognized initially at fair value and subsequently measured at amortized cost using the EIR method, less provision for impairment. If the expected uncollectible accounts receivable within one year or less (or in the normal operating cycle of the business if longer), the receivables are classified as current assets. If more than one year, these receivables are presented as non-current assets.

**h. Financial Instrument**

A financial instrument is any contract that gives rise to a financial asset of one entity and a financial liability or equity instrument of another entity.

**Financial Assets**

Initial Recognition and Measurement

At initial recognition, the Group measures a financial asset at its fair value plus transaction costs, in the case of a financial asset not at fair value through profit or loss ("FVTPL"). Trade receivables that do not contain a significant financing component, for which the Group has applied the practical expedient are measured at the transaction price determined under PSAK 72, as disclosed in Note 2x.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengakuan dan Pengukuran Awal (lanjutan)

Agar aset keuangan diklasifikasikan dan diukur pada biaya perolehan diamortisasi atau NWPKL, aset keuangan harus menghasilkan arus kas yang semata dari pembayaran pokok dan bunga ("SPPB") dari jumlah pokok terutang. Penilaian ini disebut sebagai uji SPPB dan dilakukan pada tingkat instrumen.

Model bisnis Grup untuk mengelola aset keuangan mengacu pada bagaimana mereka mengelola aset keuangannya untuk menghasilkan arus kas. Model bisnis menentukan apakah arus kas akan dihasilkan dari penerimaan arus kas kontraktual, penjualan aset keuangan, atau keduanya.

Pengukuran Selanjutnya

Untuk tujuan pengukuran selanjutnya, aset keuangan diklasifikasikan dalam empat kategori:

- Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL dengan reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif (instrumen utang),
- Aset keuangan pada NWPKL tanpa reklasifikasi ke keuntungan dan kerugian kumulatif atas pelepasan (instrumen ekuitas), dan
- Nilai wajar melalui laba rugi (NWLR).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**h. Financial Instrument (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Initial recognition and Measurement  
(continued)

In order for a financial asset to be classified and measured at amortized cost or FVOCI, it needs to give rise to cash flows that are 'solely payments of principal and interest ("SPPI")' on the principal amount outstanding. This assessment is referred to as the SPPI test and is performed at an instrument level.

The Group's business model for managing financial assets refers to how it manages its financial assets in order to generate cash flows. The business model determines whether cash flows will result from collecting contractual cash flows, selling the financial assets, or both.

Subsequent Measurement

For purposes of subsequent measurement, financial assets are classified in four categories:

- Financial assets at amortized cost (debt instruments),
- Financial assets at FVOCI with recycling of cumulative gains and losses (debt instruments),
- Financial assets designated at FVOCI with no recycling of cumulative gains and losses upon derecognition (equity instruments), and
- Fair value through profit or loss (FVTPL).

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

Pengukuran selanjutnya dari aset keuangan tergantung kepada klasifikasi masing-masing aset keuangan seperti berikut ini:

*Aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (instrumen utang)*

Grup mengukur aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi jika kedua kondisi berikut terpenuhi:

- Aset keuangan dimiliki dalam model bisnis dengan tujuan untuk memiliki aset keuangan dalam rangka mendapatkan arus kas kontraktual, dan
- Persyaratan kontraktual dari aset keuangan menghasilkan arus kas pada tanggal tertentu yang merupakan SPPB dari jumlah pokok terutang.

Aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi selanjutnya diukur dengan menggunakan metode suku bunga efektif ("SBE") dan menjadi subjek penurunan nilai. Keuntungan dan kerugian diakui dalam laba rugi pada saat aset dihentikan pengakuannya, dimodifikasi atau diturunkan nilainya.

Aset keuangan Grup yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi termasuk piutang usaha, dan piutang lain-lain jangka panjang, termasuk pinjaman diberikan kepada pihak berelasi

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**h. Financial Instrument (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Subsequent Measurement (continued)

The subsequent measurement of financial assets depends on their classification as described below:

*Financial assets at amortized cost (debt instruments)*

The Group measures financial assets at amortized cost if both of the following conditions are met:

- The financial asset is held within a business model with the objective to hold financial assets in order to collect contractual cash flows, and
- The contractual terms of the financial asset give rise on specified dates to cash flows that are SPPI on the principal amount outstanding.

*Financial assets at amortized cost are subsequently measured using the effective interest ("EIR") method and are subject to impairment. Gains and losses are recognized in profit or loss when the asset is derecognized, modified or impaired.*

*The Group's financial assets at amortized cost includes trade and other long-term receivables, includes loans provided to related parties.*



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

*Aset keuangan pada NWPKL dengan  
pendauran laba dan rugi kumulatif (instrumen  
utang)*

Untuk instrumen utang yang diukur pada NWPKL, pendapatan bunga, revaluasi mata uang asing dan kerugian penurunan nilai atau pembalikan diakui dalam laporan laba rugi dan dihitung dengan cara yang sama seperti untuk aset keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi. Perubahan nilai wajar yang tersisa diakui di PKL. Pada saat penghentian pengakuan, perubahan nilai wajar kumulatif yang diakui di PKL direklasifikasi ke laba rugi.

Grup saat ini tidak memiliki aset keuangan pada NWPKL (instrumen utang).

*Aset keuangan pada NWPKL tanpa  
reklasifikasi keuntungan dan kerugian  
kumulatif setelah pelepasan (instrumen  
ekuitas)*

Pada pengakuan awal, Grup dapat memilih untuk menetapkan klasifikasi yang takterbatalkan atas investasi pada instrumen ekuitas sebagai NWPKL jika memenuhi definisi ekuitas sesuai PSAK 50 dan tidak dimiliki untuk diperdagangkan. Klasifikasi ditentukan atas basis instrumen per instrumen.

Keuntungan dan kerugian atas aset keuangan ini tidak pernah direklasifikasi ke laba rugi, dan aset keuangan ini tidak menjadi subjek penurunan nilai. Dividen diakui sebagai penghasilan lain-lain dalam laba rugi pada saat hak atas pembayaran telah ditetapkan.

Grup memilih untuk mengklasifikasi secara takterbatalkan investasi ekuitas yang tidak terdaftar di bursa masuk dalam kategori ini.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**h. Financial Instrument (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Subsequent Measurement (continued)

*Financial assets at FVOCI with recycling of  
cumulative gains and losses (debt  
instruments)*

*For debt instruments at FVOCI, interest  
income, foreign exchange revaluation and  
impairment losses or reversals are recognized  
in the statement of profit or loss and computed  
in the same manner as for financial assets  
measured at amortized cost. The remaining  
fair value changes are recognized in OCI.  
Upon derecognition, the cumulative fair value  
change recognized in OCI is recycled to profit  
or loss.*

*The Group's currently does not have in its  
possession debt instruments at FVOCI*

*Financial assets designated at FVOCI with no  
recycling of cumulative gains and losses upon  
derecognition (equity instruments)*

*Upon initial recognition, the Group can elect to  
classify irrevocably its investments in equity  
instruments at FVOCI when they meet the  
definition of equity under PSAK 50 and are not  
held for trading. The classification is  
determined on an instrument-by-instrument  
basis.*

*Gains and losses on these financial assets are  
never recycled to profit or loss, and these  
financial assets are not subject to impairment  
assessment. Dividends are recognized as  
other income in the profit or loss when the right  
of payment has been established.*

*The Group elected to classify irrevocably its  
non-listed equity investments under this  
category.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

*Aset Keuangan pada nilai wajar melalui laba rugi ("NWLR")*

Aset keuangan Grup yang diukur pada NWPKL (instrumen ekuitas) termasuk investasi saham - neto dan instrumen saham yang disajikan sebagai bagian dari "aset lancar lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Aset keuangan pada NWLR tercatat dalam laporan posisi keuangan pada nilai wajar dengan perubahan neto nilai wajar yang diakui dalam laporan laba rugi.

Kategori ini termasuk instrumen utang, instrumen derivatif dan investasi ekuitas yang diperdagangkan di bursa efek yang mana Grup memilih untuk mengklasifikasikan pada NWLR.

Derivatif melekat dalam kontrak hibrida, dengan liabilitas keuangan atau kontrak utama non-keuangan, dipisahkan dari kontrak utamanya dan dicatat sebagai derivatif terpisah jika: karakteristik ekonomi dan risiko tidak berkaitan erat dengan kontrak utamanya; instrumen terpisah dengan persyaratan yang sama dengan derivatif melekat akan memenuhi definisi derivatif; dan kontrak hibrida ini tidak diukur pada NWLR. Derivatif melekat diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar diakui dalam laba rugi. Penilaian ulang hanya terjadi jika terdapat perubahan baik dalam persyaratan kontrak yang secara signifikan mengubah arus kas yang sebaliknya akan diperlukan, atau reklasifikasi aset keuangan diluar dari kategori NWLR.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**h. Financial Instrument (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Subsequent Measurement (continued)

*Financial assets at fair value through profit or loss ("FVTPL")*

*The Group's financial assets at FVOCI (equity instruments) investment in shares - net and shares instrument that is presented as part of "other current asset" on the consolidated statement of financial position.*

*Financial assets at FVTPL are carried in the statement of financial position at fair value with net changes in fair value recognized in the statement of profit or loss.*

*This category includes debt instruments, derivative instruments and listed equity investments in which the Group has elected to classify at FVPL.*

*A derivative embedded in a hybrid contract, with a financial liability or non-financial host, is separated from the host and accounted for as a separate derivative if: the economic characteristics and risks are not closely related to the host; a separate instrument with the same terms as the embedded derivative would meet the definition of a derivative; and the hybrid contract is not measured at FVTPL. Embedded derivatives are measured at fair value with changes in fair value recognized in profit or loss. Reassessment only occurs if there is either a change in the terms of the contract that significantly modifies the cash flows that would otherwise be required or a reclassification of a financial asset out of the FVTPL category.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan

Aset keuangan (atau, sesuai dengan kondisinya, bagian dari aset keuangan atau bagian dari kelompok aset keuangan serupa) terutama dihentikan pengakuannya (yaitu, dihapuskan dari laporan posisi keuangan konsolidasian Grup) ketika:

- Hak untuk menerima arus kas dari aset telah berakhir, atau
- Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari aset atau menanggung kewajiban untuk membayar arus kas yang diterima tersebut secara penuh tanpa penundaan yang material kepada pihak ketiga berdasarkan kesepakatan 'pass-through', dan salah satu dari (a) Grup telah mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat atas aset, atau (b) Grup tidak mengalihkan maupun tidak memiliki secara substansial atas seluruh risiko dan manfaat atas aset, tetapi telah mengalihkan kendali atas aset.

Ketika Grup telah mengalihkan haknya untuk menerima arus kas dari suatu aset atau telah menandatangani kesepakatan 'pass-through', Grup mengevaluasi jika, dan sejauh mana, Grup masih mempertahankan risiko dan manfaat atas kepemilikan aset. Ketika Grup tidak mengalihkan maupun seluruh risiko dan manfaat atas aset dipertahankan secara substansial, maupun tidak mengalihkan kendali atas aset, Grup tetap mengakui aset yang dialihkan sebesar keterlibatan berkelanjutan. Dalam kasus tersebut, Grup juga mengakui liabilitas terkait. Aset yang dialihkan dan liabilitas terkait diukur dengan basis yang mencerminkan hak dan kewajiban yang masih dipertahankan oleh Grup.

Keterlibatan berkelanjutan dalam bentuk jaminan atas aset yang ditransfer, diukur pada nilai yang lebih rendah antara jumlah tercatat awal aset dan jumlah maksimum imbalan yang dibutuhkan oleh Grup untuk membayar kembali.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**h. Financial Instrument (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Derecognition

*A financial asset (or, where applicable, a part of a financial asset or part of a group of similar financial assets) is primarily derecognized (i.e., removed from the Group's consolidated statement of financial position) when:*

- *The rights to receive cash flows from the asset have expired, or*
- *The Group has transferred its rights to receive cash flows from the asset or has assumed an obligation to pay the received cash flows in full without material delay to a third party under a 'pass-through' arrangement; and either (a) the Group has transferred substantially all the risks and rewards of the asset, or (b) the Group has neither transferred nor retained substantially all the risks and rewards of the asset, but has transferred control of the asset.*

*When the Group has transferred its rights to receive cash flows from an asset or has entered into a pass-through arrangement, it evaluates if, and to what extent, it has retained the risks and rewards of ownership. When it has neither transferred nor retained substantially all of the risks and rewards of the asset, nor transferred control of the asset, the Group continues to recognize the transferred asset to the extent of its continuing involvement. In that case, the Group also recognizes an associated liability. The transferred asset and the associated liability are measured on a basis that reflects the rights and obligations that the Group has retained.*

*Continuing involvement that takes the form of a guarantee over the transferred asset is measured at the lower of the original carrying amount of the asset and the maximum amount of consideration that the Group could be required to repay.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai

Grup mengakui penyisihan Kerugian Kredit Ekspektasian (KKE) untuk semua instrumen utang yang bukan diukur pada NWLR dan kontrak jaminan keuangan. KKE ditentukan atas perbedaan antara arus kas kontraktual menurut kontrak dan semua arus kas yang diharapkan akan diterima oleh Grup, yang didiskontokan dengan perkiraan SBE orisinal. Arus kas yang diharapkan mencakup setiap arus kas dari penjualan agunan yang dimiliki atau perbaikan kredit lainnya yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam ketentuan kontrak.

KKE diakui dalam dua tahap. Bila belum terdapat peningkatan risiko kredit signifikan sejak pengakuan awal, KKE diakui untuk kerugian kredit yang dihasilkan dari peristiwa gagal bayar yang mungkin terjadi dalam jangka waktu 12 bulan ke depan (KKE 12 bulan). Namun, bila telah terdapat peningkatan signifikan risiko kredit sejak pengakuan awal, penyisihan kerugian diakui untuk kerugian kredit yang diperkirakan selama sisa umur aset, tanpa mempertimbangkan waktu gagal bayar (KKE sepanjang umurnya).

Karena aset kontrak, piutang usaha dan piutang lain-lainnya tidak memiliki komponen pembiayaan signifikan, Grup menerapkan pendekatan yang disederhanakan dalam perhitungan KKE. Oleh karena itu, Grup tidak menelusuri perubahan dalam risiko kredit, namun justru mengakui penyisihan kerugian berdasarkan KKE sepanjang umurnya pada setiap tanggal pelaporan. Grup membentuk matriks provisi berdasarkan pengalaman kerugian kredit masa lampau, disesuaikan dengan perkiraan masa depan (*forward-looking*) atas faktor yang spesifik untuk debitur dan lingkungan ekonomi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**h. Financial Instrument (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Impairment

The Group recognizes an allowance for ECL for all debt instruments not held at FVTPL and financial guarantee contracts. ECLs are based on the difference between the contractual cash flows due in accordance with the contract and all the cash flows that the Group expects to receive, discounted at an approximation of the original EIR. The expected cash flows include any cash flows from the sale of collateral held or other credit enhancements that are integral to the contractual terms.

ECLs are recognized in two stages. When there have been significant increases in credit risks since initial recognition, ECLs are provided for credit losses that result from default events that are possible within the next 12-months (a 12-month ECL). But, when there have been significant increases in credit risks since initial recognition, a loss allowance is recognized for credit losses expected over the remaining life of the asset, irrespective of timing of the default (a lifetime ECL).

Because its contract assets, trade and other receivables do not contain significant financing component, the Group applies a simplified approach in calculating ECL. Therefore, the Group does not track changes in credit risk, but instead recognizes a loss allowance based on lifetime ECL at each reporting date. The Group established a provision matrix that is based on its historical credit loss experience, adjusted for forward-looking factors specific to the debtors and the economic environment.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Aset Keuangan (lanjutan)**

Penurunan Nilai (lanjutan)

Grup menganggap aset keuangan dalam gagal bayar ketika pembayaran kontraktual telah lewat 90 hari dari tanggal jatuh tempo. Namun, dalam kasus tertentu, Grup juga dapat mempertimbangkan aset keuangan menjadi gagal bayar ketika informasi internal atau eksternal menunjukkan bahwa besar kemungkinan Grup tidak menerima jumlah kontraktual terutang secara penuh sebelum memperhitungkan perbaikan kredit yang dimiliki oleh Grup. Aset keuangan dihapuskan jika tidak terdapat ekspektasi yang wajar untuk memulihkan arus kas kontraktual.

**Liabilitas Keuangan**

Pengakuan dan Pengukuran Awal

Liabilitas keuangan diklasifikasikan, pada pengakuan awal, sebagai liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR, utang dan pinjaman atau derivatif ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai pada lindung nilai yang efektif, sesuai dengan kondisinya.

Semua liabilitas keuangan diakui pada nilai wajar saat pengakuan awal dan, dalam hal liabilitas keuangan diklasifikasi sebagai utang dan pinjaman, diakui pada nilai wajar setelah dikurangi biaya transaksi yang dapat diatribusikan secara langsung.

Grup menetapkan liabilitas keuangannya sebagai utang dan pinjaman, termasuk utang usaha, utang lain-lain, akrual, liabilitas imbalan kerja karyawan, liabilitas sewa, dan utang jangka panjang.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**h. Financial Instrument (continued)**

**Financial Assets (continued)**

Impairment (continued)

The Group considers a financial asset in default when contractual payments are 90 days past due. However, in certain cases, the Group may also consider a financial asset to be in default when internal or external information indicates that the Group is unlikely to receive the outstanding contractual amounts in full before taking into account any credit enhancements held by the Group. A financial asset is written off when there is no reasonable expectation of recovering the contractual cash flows.

**Financial Liabilities**

Initial Recognition and Measurement

Financial liabilities are classified, at initial recognition, as financial liabilities at FVTPL, loans and borrowings, or as derivatives designated as hedging instruments in an effective hedge, as appropriate.

All financial liabilities are recognized initially at fair value and, in the case of loans and borrowings and payables, net of directly attributable transaction costs.

The Group designates its financial liabilities as loans and borrowings, such as trade payables, other payables, accrued, employee benefits liability, lease liability, and long-term debts.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya

Pengukuran selanjutnya dari liabilitas keuangan ditentukan oleh klasifikasinya sebagai berikut:

*Liabilitas Keuangan pada NWLR*

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR mencakup liabilitas keuangan yang dimiliki untuk diperdagangkan dan liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal.

Liabilitas keuangan diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan, jika liabilitas keuangan tersebut diperoleh untuk tujuan dibeli kembali dalam waktu dekat. Kategori ini juga mencakup instrumen keuangan derivatif yang dilakukan oleh Grup dimana instrumen derivatif tersebut tidak ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai dalam hubungan lindung nilai sebagaimana didefinisikan dalam PSAK 71. Derivatif melekat yang dipisahkan juga diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk diperdagangkan kecuali ditetapkan sebagai instrumen lindung nilai yang efektif.

Keuntungan atau kerugian atas liabilitas yang dimiliki untuk diperdagangkan diakui dalam laporan laba rugi.

Liabilitas keuangan yang diukur pada NWLR yang ditetapkan saat pengakuan awal harus memenuhi kriteria dalam PSAK 71 dan ditetapkan pada tanggal pengakuan awal. Grup tidak menetapkan liabilitas keuangan apapun sebagai liabilitas yang diukur pada NWLR.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**h. Financial Instrument (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

Subsequent Measurement

The subsequent measurement of financial liabilities depends on their classification as described below:

*Financial Liabilities at FVTPL*

Financial liabilities at FVTPL include financial liabilities held for trading and financial liabilities designated upon initial recognition as at FVTPL.

Financial liabilities are classified as held for trading if they are incurred for the purpose of repurchasing in the near term. This category also includes derivative financial instruments entered into by the Group that are not designated as hedging instruments in hedge relationships as defined by PSAK 71. Separated embedded derivatives are also classified as held for trading unless they are designated as effective hedging instruments.

Gains or losses on liabilities held for trading are recognized in the statement of profit or loss.

Financial liabilities designated upon initial recognition at FVTPL are designated at the initial date of recognition, and only if the criteria in PSAK 71 are satisfied. The Group has not designated any financial liability as at FVTPL.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Pengukuran Selanjutnya (lanjutan)

*Liabilitas keuangan pada biaya perolehan diamortisasi (Utang dan pinjaman)*

i) Utang dan Pinjaman Jangka Panjang yang Dikenakan Bunga

Setelah pengakuan awal, utang dan pinjaman jangka panjang yang berbunga diukur pada biaya perolehan yang diamortisasi dengan menggunakan metode SBE. Pada tanggal pelaporan, biaya bunga yang masih harus dibayar dicatat secara terpisah, dari pokok pinjaman terkait, dalam bagian liabilitas jangka pendek. Keuntungan dan kerugian diakui pada laba rugi ketika liabilitas dihentikan pengakuannya maupun melalui proses amortisasi menggunakan metode SBE.

Biaya amortisasi dihitung dengan mempertimbangkan setiap diskonto atau premium atas akuisisi dan komisi atau biaya yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari SBE. Amortisasi SBE dicatat sebagai beban keuangan pada laba rugi.

ii) Utang dan Akrua

Liabilitas untuk utang usaha dan utang lain-lain jangka pendek, akrua dan liabilitas imbalan kerja jangka pendek dinyatakan sebesar jumlah tercatat (jumlah nosional), yang kurang lebih sebesar nilai wajarnya.

Penghentian Pengakuan

Suatu liabilitas keuangan dihentikan pengakuannya pada saat kewajiban yang ditetapkan dalam kontrak berakhir atau dibatalkan atau kedaluwarsa.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**h. Financial Instrument (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

Subsequent Measurement (continued)

*Financial liabilities at amortized cost (Loans and borrowings)*

i) Long-term Interest-bearing Loans and Borrowings

*Subsequent to initial recognition, long-term interest-bearing loans and borrowings are measured at amortized acquisition costs using EIR method. At the reporting dates, accrued interest is recorded separately from the associated borrowings within the current liabilities section. Gains and losses are recognized in the profit or loss when the liabilities are derecognized as well as through the EIR amortization process.*

*Amortized cost is calculated by taking into account any discount or premium on acquisition and fees or costs that are an integral part of the EIR. The EIR amortization is included in finance costs in the profit or loss.*

ii) Payables and Accruals

*Liabilities for current trade and other accounts payable, accrued expenses and short-term employee benefit liability are stated at carrying amounts (notional amounts), which approximate their fair values.*

Derecognition

*A financial liability is derecognized when the obligation under the contract is discharged or cancelled or expires.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**h. Instrumen Keuangan (lanjutan)**

**Liabilitas Keuangan (lanjutan)**

Penghentian Pengakuan (lanjutan)

Ketika sebuah liabilitas keuangan ditukar dengan liabilitas keuangan lain dari pemberi pinjaman yang sama atas persyaratan yang secara substansial berbeda, atau bila persyaratan dari liabilitas keuangan tersebut secara substansial dimodifikasi, pertukaran atau modifikasi persyaratan tersebut dicatat sebagai penghentian pengakuan liabilitas keuangan orisinal dan pengakuan liabilitas keuangan baru, dan selisih antara nilai tercatat masing-masing liabilitas keuangan tersebut diakui pada laba rugi.

**Saling Hapus Instrumen Keuangan**

Aset keuangan dan liabilitas keuangan disaling hapuskan dan nilai netonya disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian jika, dan hanya jika, terdapat hak secara hukum untuk melakukan saling hapus atas jumlah tercatat dari aset keuangan dan liabilitas keuangan tersebut dan terdapat intensi untuk menyelesaikan secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan.

**i. Transaksi dengan Pihak Berelasi**

Perusahaan dan entitas anaknya melakukan transaksi dengan pihak berelasi sesuai dengan definisi yang diuraikan pada PSAK 7.

Transaksi ini dilakukan berdasarkan persyaratan yang disetujui oleh kedua belah pihak, yang mungkin tidak sama dengan transaksi lain yang dilakukan dengan pihak-pihak yang tidak berelasi.

Transaksi dan saldo yang material dengan pihak berelasi diungkapkan dalam Catatan 36.

Kecuali diungkapkan khusus sebagai pihak berelasi, maka pihak-pihak lain yang disebutkan dalam Catatan atas laporan keuangan konsolidasian merupakan pihak tidak berelasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**h. Financial Instrument (continued)**

**Financial Liabilities (continued)**

Derecognition (continued)

When an existing financial liability is replaced by another from the same lender on substantially different terms, or the terms of an existing liability are substantially modified, such an exchange or modification is treated as derecognition of the original liability and recognition of a new liability, and the difference in the respective carrying amounts is recognized in the profit or loss.

**Offsetting of Financial Instruments**

Financial assets and financial liabilities are offset, and the net amount reported in the consolidated statement of financial position if, and only if, there is a currently enforceable legal right to offset the recognized amounts and there is an intention to settle on a net basis, or to realize the assets and settle the liabilities simultaneously.

**i. Transactions with Related Parties**

The company and subsidiaries have transactions with related parties as defined in PSAK 7.

The transactions are made based on terms agreed by the parties, which may not be the same as those made with unrelated parties.

Significant transactions and balances with related parties are disclosed in Note 36.

Unless specifically identified as related parties, the parties disclosed in the Notes to the consolidated financial statements are unrelated parties.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**j. Persediaan**

Persediaan dinyatakan sebesar nilai yang lebih rendah antara biaya perolehan atau nilai realisasi neto. Biaya perolehan ditentukan dengan menggunakan metode rata-rata tertimbang. Nilai realisasi neto persediaan adalah estimasi harga jual dalam kegiatan usaha biasa dikurangi estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang diperlukan untuk membuat penjualan.

Biaya yang dikeluarkan untuk setiap produk agar berada pada lokasi dan kondisi siap untuk dijual dicatat sebagai berikut:

- i) Bahan baku, suku cadang dan bahan pembantu: harga pembelian;
- ii) Barang jadi dan persediaan dalam proses: biaya bahan baku dan tenaga kerja langsung dan bagian proporsional dari beban overhead berdasarkan kapasitas operasi normal namun tidak termasuk biaya pinjaman.

Sehubungan dengan pembelian bahan baku, biaya perolehan awal persediaan termasuk pengalihan keuntungan dan kerugian atas lindung nilai arus kas kualifikasian, diakui dalam PKL.

Grup menetapkan penyisihan untuk nilai realisasi neto persediaan berdasarkan hasil penelaahan berkala atas kondisi fisik dan nilai realisasi neto persediaan.

**k. Aset biologis**

Aset biologis Grup terdiri atas produk agrikultur utama dari tanaman produktif, yaitu tandan buah segar (TBS), daun teh basah (DTB), karet dan kopi.

Aset biologis dinyatakan sebesar nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual. Keuntungan atau kerugian yang timbul pada pengakuan awal produk agrikultur pada nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan dari perubahan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dari aset biologis pada setiap tanggal pelaporan dimasukkan dalam laba rugi pada tahun terjadinya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)**

**j. Inventories**

*Inventories are valued at the lower of cost or net realizable value. Cost is calculated using weighted-average method. Net realizable value is the estimated selling price in the ordinary course of business, less estimated costs of completion and the estimated costs necessary to make the sale.*

*Costs incurred in bringing each product to its present location and condition are accounted for as follow:*

- i) Raw materials, spare parts and factory supplies: purchase cost;*
- ii) Finished goods and work in-process: cost of direct materials and labor and a proportion of manufacturing overheads based on normal operating capacity but excluding borrowing costs.*

*Initial cost of inventories includes the transfer of gains and losses on qualifying cash flow hedges, recognized in OCI, in respect of the purchases of raw materials.*

*The Group provides allowance for net realizable value of inventories based on periodic reviews of the physical conditions and net realizable values of the inventories.*

**k. Biological Asset**

*The Group's biological assets compris primary agricultural produce of the bearer plants, namely fresh fruit bunches (FFB) and wet tea leave (WTL), rubber and coffee.*

*Biological assets are stated at fair value less costs to sell. Gains or losses arising on initial recognition of agricultural produce at fair value less costs to sell and from the change in fair value less costs to sell of the biological assets at each reporting date are included in the profit or loss for the year in which they arise.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**k. Aset biologis (lanjutan)**

Nilai wajar dari produk agrikultur, termasuk produk yang tumbuh dan sudah dipanen dari tanaman produktif kelapa sawit dan karet ditentukan pada *Level 2* dengan menerapkan estimasi volume produksi terhadap harga pasar yang berlaku pada tanggal pelaporan. Biaya untuk menjual adalah biaya inkremental yang diatribusikan secara langsung untuk pelepasan aset, tidak termasuk beban pembiayaan dan pajak penghasilan.

**l. Biaya Dibayar di Muka**

Biaya dibayar di muka diamortisasi dan dibebankan pada operasi selama masa manfaatnya, dan disajikan sebagai aset lancar atau aset tidak lancar sesuai sifatnya masing-masing.

**m. Beban Tanggahan**

Biaya-biaya tertentu, yang mempunyai masa manfaat lebih dari satu tahun, sehubungan dengan biaya perolehan sistem perangkat lunak, dan beban perolehan hak atas tanah yang ditangguhkan dan tidak memenuhi syarat untuk dicatat sebagai aset tetap seperti diungkapkan pada Catatan 2q, ditangguhkan dan diamortisasi selama masa manfaatnya dengan menggunakan metode garis lurus. Beban-beban ini disajikan sebagai bagian dari akun "Aset Tidak Lancar Lainnya" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**n. Piutang lain-lain jangka panjang - Plasma**

Perusahaan memiliki komitmen dengan beberapa Koperasi Unit Desa ("KUD") yang mewadahi petani plasma untuk mengembangkan perkebunan plasma sebagaimana diwajibkan oleh pemerintah Indonesia. Perusahaan Inti akan memberikan bimbingan dan berbagi pengetahuan dalam mengembangkan perkebunan plasma kelapa sawit hingga tahap produktif.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**k. Biological Asset (continued)**

The fair value of the agricultural produce, including growing produce and harvested produce, of oil palm bearer plants and rubber bearer plants is determined at *Level 2* by applying the estimated volume of the produce to the market price applicable at the reporting date. Costs to sell are the incremental costs directly attributable to the disposal of an asset, excluding finance costs and income taxes.

**l. Prepaid Expenses**

Prepaid expenses are amortized and charged to operations over the periods benefited, and are presented as current asset or non-current asset based on their nature.

**m. Deferred Charges**

Certain expenditures, which benefits extend over a period of more than one year, relating to systems software cost, and deferred land right acquisition costs that do not fulfill the criteria to be recognized as fixed assets as disclosed in Note 2q, are deferred and amortized over the periods benefited using the straight-line method. These expenditures are presented as part of "Other Non-current Assets" account in the consolidated statement of financial position.

**n. Other long-term receivables - Plasma**

The Company has commitments with several rural cooperatives ("KUD" or Koperasi Unit Desa) representing plasma farmers to develop plantations as required by the Indonesian government. The Nucleus Companies is to provide guidance and sharing of knowledge in developing the oil palm plasma plantations up to the productive stage.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**n. Piutang lain-lain jangka panjang - Plasma  
(lanjutan)**

Pembiayaan atas pengembangan perkebunan plasma ini diperoleh melalui pinjaman dari bank, sedangkan Perusahaan Inti memberikan tambahan pinjaman sementara untuk membantu para petani plasma membayar pokok pinjaman beserta bunga sementara perkebunan plasma belum mencapai tahap produktif.

Perusahaan Inti memberikan jaminan perusahaan (*corporate guarantee*) untuk fasilitas pinjaman terkait yang diperoleh dari bank. Piutang plasma yang disajikan dalam laporan posisi keuangan konsolidasian terdiri atas akumulasi biaya-biaya pengembangan yang terjadi dan pembiayaan yang diperoleh dari Perusahaan Inti kepada KUD atau petani plasma dikurangi dana yang diterima dari bank atas nama KUD atau petani plasma dan akumulasi kerugian penurunan nilai.

Piutang plasma juga termasuk pinjaman talangan kredit untuk menutup bunga dan cicilan pinjaman, pinjaman pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya kepada petani.

Piutang plasma diklasifikasikan sebagai aset keuangan pada biaya perolehan diamortisasi sesuai dengan PSAK 71. Kebijakan akuntansi lebih lanjut atas piutang plasma diungkapkan pada bagian "Instrumen Keuangan" dari Catatan ini.

**o. Investasi pada Entitas Asosiasi**

Entitas asosiasi adalah entitas yang terhadapnya Grup memiliki pengaruh signifikan. Pengaruh signifikan adalah kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan kebijakan keuangan dan operasional *investee*, tetapi tidak mengendalikan atau mengendalikan bersama atas kebijakan tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**n. Other receivables - Plasma (continued)**

*The financing of these plasma plantations are mainly provided by the banks while the Nucleus Companies provide additional temporary loans to help the plasma farmers repay the principal and interest while the plasma plantations are not yet at productive stage.*

*The Nucleus Companies provide corporate guarantees to the related credit facilities provided by the banks. The plasma receivables presented in the consolidated statement of financial position consist of accumulated development costs incurred and the funding provided by the Nucleus Companies to the KUD or plasma farmers less the funds received from banks on behalf of the KUD or plasma farmers and accumulated impairment losses.*

*Plasma receivables also include advances to plasma farmers for topping up the loan interest and installment payments to banks, and advances for fertilizers and other agricultural supplies.*

*Plasma receivables are classified as financial assets at amortized cost under PSAK 71. Further accounting policies on plasma receivables are disclosed in "Financial Instruments" section of this Note.*

**o. Investment in Associates**

*An associate is an entity over which the Group has significant influence. Significant influence is the power to participate in the financial and policy decisions of the investee, but is not control or joint control over those policies.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)**

Ventura bersama adalah salah satu tipe pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto ventura bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Pertimbangan yang dibuat dalam menentukan pengaruh signifikan adalah serupa dengan hal-hal yang diperlukan dalam menentukan kendali atas entitas anak.

Penyertaan saham pada entitas dimana Grup tidak memiliki pengaruh yang signifikan dicatat sesuai dengan PSAK No. 71.

Investasi Grup pada entitas asosiasi dicatat dengan menggunakan metode ekuitas. Dalam metode ekuitas, investasi awalnya diakui pada harga perolehan. Nilai tercatat investasi disesuaikan untuk mengakui perubahan bagian Grup atas aset neto entitas asosiasi sejak tanggal perolehan. *Goodwill* yang terkait dengan entitas asosiasi termasuk dalam jumlah tercatat investasi dan tidak diamortisasi maupun diuji secara individual untuk penurunan nilai.

Laba rugi konsolidasian mencerminkan bagian dari Grup atas hasil operasi dari entitas asosiasi. Perubahan PKL dari entitas asosiasi disajikan sebagai bagian dari PKL Grup. Selain itu, bila terdapat perubahan yang diakui langsung pada ekuitas entitas asosiasi, Grup mengakui bagiannya atas perubahan, jika sesuai, dalam laporan perubahan ekuitas konsolidasian. Laba atau rugi yang belum direalisasi sebagai hasil dari transaksi-transaksi antara Grup dengan entitas asosiasi dieliminasi sesuai dengan kepentingan dalam entitas asosiasi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Investment in Associates (continued)**

*A joint venture is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the joint venture. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require the unanimous consent of the parties sharing control.*

*The considerations made in determining significant influence are similar to those necessary to determine control over subsidiaries.*

*Investment in shares of stock of entity wherein the Group does not have significant influence are accounted for in accordance with PSAK No. 71.*

*The Group's investment in its associate is accounted for using the equity method. Under the equity method, the investment in an associate is initially recognized at cost. The carrying amount of the investment is adjusted to recognize changes in the Group's share of net assets of the associate since the acquisition date. Goodwill relating to the associate is included in the carrying amount of the investment and is neither amortized nor tested for impairment individually.*

*The consolidated profit or loss reflects the Group's share of the results of operations of the associate. Any change in OCI of the associate is presented as part of the Group's OCI. In addition, when there has been a change recognized directly in the equity of the associate, the Group recognizes its share of any changes, when applicable, in the consolidated statement of changes in equity. Unrealized gains and losses resulting from transactions between the Group and the associate are eliminated to the extent of the interest in the associate.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR KEBIJAKAN AKUNTANSI  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**o. Investasi pada Entitas Asosiasi (lanjutan)**

Gabungan bagian Grup atas laba rugi entitas asosiasi disajikan pada muka laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (sebagai laba atau rugi) di luar laba usaha dan mencerminkan laba atau rugi setelah pajak dan kepentingan nonpengendali pada entitas anak dari entitas asosiasi.

Jika bagian Grup atas rugi entitas asosiasi sama dengan atau melebihi kepentingannya pada entitas asosiasi, maka Grup menghentikan pengakuan bagiannya atas rugi lebih lanjut. Setelah kepentingan Grup dikurangkan menjadi nihil, tambahan kerugian dicadangkan, dan liabilitas diakui, hanya sepanjang Grup memiliki kewajiban konstruktif atau hukum, atau melakukan pembayaran atas nama entitas asosiasi. Jika entitas asosiasi kemudian melaporkan laba, maka Grup mulai mengakui bagiannya atas laba tersebut hanya setelah bagian atas laba tersebut sama dengan bagian atas rugi yang belum diakui.

Laporan keuangan entitas asosiasi disusun atas tahun pelaporan yang sama dengan Grup.

Setelah penerapan metode ekuitas, Grup menentukan apakah diperlukan untuk mengakui tambahan rugi penurunan nilai atas investasi Grup dalam entitas asosiasi. Grup menentukan pada setiap tanggal pelaporan apakah terdapat bukti yang objektif yang mengindikasikan bahwa investasi dalam entitas asosiasi mengalami penurunan nilai. Dalam hal ini, Grup menghitung jumlah penurunan nilai berdasarkan selisih antara jumlah terpulihkan dan nilai tercatatnya dan mengakuinya dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pada saat kehilangan pengaruh signifikan atas entitas asosiasi, Grup mengukur dan mengakui bagian investasi tersisa pada nilai wajar. Selisih antara nilai tercatat entitas asosiasi dan nilai wajar investasi yang tersisa dan penerimaan dari pelepasan investasi diakui pada laba rugi.

**2. SUMMARY OF SIGNIFICANT ACCOUNTING  
POLICIES (continued)**

**o. Investment in Associates (continued)**

*The aggregate of the Group's share of profit or loss of an associate is shown on the face of the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income (as profit or loss) outside operating profit and represents profit or loss after tax and NCI in the subsidiaries of the associate.*

*If the Group's share of loss of an associate equals or exceeds its interests in associates, the Group derecognise its share of further losses. After the Group's interests are deducted to zero, additional losses are reserved, and a liability is recognized, only to the extent the Group has a legal or constructive obligations or made payments on behalf of the associate. If the associate subsequently reports profits, the Group began to recognize its share of profits only after a portion of the profit is equal to the top of the unrecognized losses.*

*The financial statements of the associate are prepared for the same reporting period of the Group.*

*After the implementation equity method, the Group determines whether it is necessary to recognize an additional impairment loss on the Group's investment in associates. The Group determines whether there is objective evidence that the investment in the associate is impaired at each reporting date. In this regard, the Group calculates the amount of impairment as the difference between the recoverable amount and the carrying value and recognizes the amount in the consolidated statement of comprehensive income.*

*When there is a loss of significant influence over the associate, the Group measures and recognizes any retained investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the associate and the fair value of the retained investment and proceeds from disposal is recognized in profit or loss.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**p. Kombinasi Bisnis dan Goodwill**

Kombinasi bisnis dicatat dengan menggunakan metode akuisisi. Biaya perolehan dari sebuah akuisisi diukur pada nilai agregat imbalan yang dialihkan, diukur pada nilai wajar pada tanggal akuisisi dan jumlah setiap KNP pada pihak yang diakuisisi. Untuk setiap kombinasi bisnis, Grup memilih apakah mengukur KNP pada entitas yang diakuisisi baik pada nilai wajar ataupun pada proporsi kepemilikan KNP atas aset neto yang teridentifikasi dari entitas yang diakuisisi. Biaya-biaya akuisisi yang timbul dibebankan langsung dan disertakan dalam beban administrasi.

Grup menentukan bahwa mereka telah mengakuisisi bisnis ketika rangkaian aktivitas dan aset yang diakuisisi mencakup input dan proses substantif yang bersama-sama secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk menghasilkan output. Proses yang diperoleh adalah substantif jika penting bagi kemampuan untuk terus menghasilkan output, dan input yang diperoleh mencakup tenaga kerja yang terorganisir dengan keterampilan, pengetahuan, atau pengalaman yang diperlukan untuk melakukan proses itu atau secara signifikan berkontribusi pada kemampuan untuk terus menghasilkan output dan dianggap unik atau langka atau tidak dapat diganti tanpa biaya, usaha, atau penundaan yang signifikan dalam kemampuan untuk terus menghasilkan output.

Ketika melakukan akuisisi atas sebuah bisnis, Grup mengklasifikasikan dan menentukan aset keuangan yang diperoleh dan liabilitas keuangan yang diambil alih berdasarkan pada persyaratan kontraktual, kondisi ekonomi dan kondisi terkait lain yang ada pada tanggal akuisisi.

Dalam suatu kombinasi bisnis yang dilakukan secara bertahap, Grup mengukur kembali kepentingan ekuitas yang dimiliki sebelumnya pada pihak yang diakuisisi pada nilai wajar tanggal akuisisi dan mengakui keuntungan atau kerugian yang dihasilkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**p. Business Combination and Goodwill**

*Business combinations are accounted for using the acquisition method. The cost of an acquisition is measured as the aggregate of the consideration transferred, measured at acquisition date fair value, and the amount of any NCI in the acquiree. For each business combination, the Group elects whether it measures the NCI in the acquiree either at fair value or at the proportionate share of the acquiree's identifiable net assets. Acquisition costs incurred are directly expensed and included in administrative expenses.*

*The Group determines that it has acquired a business when the acquired set of activities and assets include an input and a substantive process that together significantly contribute to the ability to create outputs. The acquired process is considered substantive if it is critical to the ability to continue producing outputs, and the inputs acquired include an organized workforce with the necessary skills, knowledge, or experience to perform that process or it significantly contributes to the ability to continue producing outputs and is considered unique or scarce or cannot be replaced without significant cost, effort, or delay in the ability to continue producing outputs.*

*When the Group acquires a business, it assesses the financial assets acquired and liabilities assumed for appropriate classification and designation in accordance with the contractual terms, economic circumstances and pertinent conditions as at the acquisition date.*

*If the business combination is achieved in stages, the acquisition date fair value of the Group's previously held equity interest in the acquiree is remeasured to fair value at the acquisition date through profit or loss.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**p. Kombinasi Bisnis dan Goodwill (lanjutan)**

Setiap imbalan kontinjensi yang akan ditransfer oleh perusahaan pengakuisisi akan diakui pada nilai wajar pada tanggal akuisisi. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai ekuitas tidak diukur kembali dan penyelesaian selanjutnya adalah diperhitungkan dalam ekuitas. Imbalan kontinjensi yang diklasifikasikan sebagai aset atau liabilitas yaitu instrumen keuangan dan dalam lingkup PSAK 71, diukur pada nilai wajar dengan perubahan nilai wajar yang diakui dalam laba rugi sesuai dengan PSAK 71. Imbalan kontinjensi lain yang tidak termasuk dalam PSAK 71 diukur sebesar nilai wajar pada setiap tanggal pelaporan dengan perubahan nilai wajar yang diakui pada laba rugi.

Bila pencatatan awal kombinasi bisnis belum dapat diselesaikan pada tanggal pelaporan, Grup melaporkan jumlah sementara bagi pos yang pencatatannya belum dapat diselesaikan tersebut.

Periode pengukuran adalah periode setelah tanggal akuisisi yang didalamnya Grup dapat melakukan penyesuaian atas jumlah sementara yang diakui dalam kombinasi bisnis tersebut. Selama periode pengukuran, Grup mengakui penambahan aset atau liabilitas bila terdapat informasi terbaru yang diperoleh mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi, yang bila diketahui pada saat itu, akan menyebabkan pengakuan atas aset dan liabilitas pada tanggal tersebut.

Periode pengukuran berakhir pada saat pengakuisisi menerima informasi yang diperlukan mengenai fakta dan keadaan pada tanggal akuisisi atau mengetahui bahwa informasi lainnya tidak dapat diperoleh, namun tidak lebih dari satu tahun dari tanggal akuisisi.

Pada tanggal akuisisi, goodwill awalnya diukur pada harga perolehan yang merupakan selisih lebih nilai agregat dari imbalan yang dialihkan dan jumlah setiap KNP atas selisih jumlah dari aset teridentifikasi yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**p. Business Combination and Goodwill  
(continued)**

*Any contingent consideration to be transferred by the acquirer will be recognized at fair value at the acquisition date. Contingent consideration classified as equity is not re-measured and its subsequent settlement is accounted for within equity. Contingent consideration classified as an asset or liability that is a financial instrument and within the scope of PSAK 71, is measured at fair value with the changes in fair value recognized in the statement of profit or loss in accordance with PSAK 71. Other contingent consideration that is not within the scope of PSAK 71 is measured at fair value at each reporting date with changes in fair value recognized in profit or loss.*

*If the initial accounting for a business combination is incomplete by the end of the reporting, the Group reports provisional amounts for the items for which the accounting is incomplete.*

*The measurement period is the period after the acquisition date during which the Group may adjust the provisional amounts recognized for a business combination. During the measurement period, the Group recognizes additional assets or liabilities if new information is obtained about facts and circumstances that existed as of the acquisition date and, if known, would have resulted in the recognition of those assets and liabilities as of that date.*

*The measurement period ends as soon as the acquirer receives the information it was seeking about facts and circumstances that existed as of the acquisition date or learns that more information is not obtainable but shall not exceed one year from the acquisition date.*

*At acquisition date, goodwill is initially measured at cost being the excess of the aggregate of the consideration transferred and the amount recognized for NCI over the net identifiable assets acquired and liabilities assumed.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**p. Kombinasi Bisnis dan Goodwill (lanjutan)**

Jika imbalan tersebut lebih rendah dari nilai wajar aset neto entitas anak yang diakuisisi, selisih tersebut diakui pada laba rugi sebagai keuntungan dari pembelian dengan diskon setelah sebelumnya manajemen melakukan penilaian atas identifikasi dan nilai wajar dari aset yang diperoleh dan liabilitas yang diambil alih.

Setelah pengakuan awal, goodwill diukur pada jumlah tercatat dikurangi akumulasi kerugian penurunan nilai. Untuk tujuan pengujian penurunan nilai, goodwill yang diperoleh dari suatu kombinasi bisnis, sejak tanggal akuisisi dialokasikan kepada setiap Unit Penghasil Kas ("UPK") dari Grup yang diharapkan akan menerima manfaat dari sinergi kombinasi tersebut, terlepas dari apakah aset atau liabilitas lain dari pihak yang diakuisisi dialokasikan kepada UPK tersebut.

Jika goodwill telah dialokasikan pada suatu UPK dan operasi tertentu atas UPK tersebut dihentikan, maka goodwill yang diasosiasikan dengan operasi yang dihentikan tersebut termasuk dalam jumlah tercatat operasi tersebut ketika menentukan keuntungan atau kerugian dari pelepasan. Goodwill yang dilepaskan tersebut diukur berdasarkan nilai relatif operasi yang dihentikan terhadap bagian dari UPK yang ditahan.

Kombinasi bisnis entitas sepengendali

Kombinasi bisnis entitas sepengendali dicatat dengan menggunakan metode penyatuan kepentingan, dimana selisih antara jumlah imbalan yang dialihkan dengan jumlah tercatat aset neto entitas yang diakuisisi diakui sebagai bagian dari akun "Tambahan Modal Disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

Dalam menerapkan metode penyatuan kepentingan tersebut, unsur-unsur laporan keuangan dari entitas yang bergabung disajikan seolah-olah penggabungan tersebut telah terjadi sejak awal periode entitas yang bergabung berada dalam kesepengendalian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**p. Business Combination and Goodwill  
(continued)**

*If this consideration is lower than the fair value of the net assets of the subsidiaries acquired, the difference is recognized in profit or loss as gain on bargain purchase after previously assessing the identification and fair value measurement of the acquired assets and the assumed liabilities.*

*After initial recognition, goodwill is measured at cost less any accumulated impairment losses. For the purpose of impairment testing, goodwill acquired in a business combination is, from the acquisition date, allocated to each of the Group's Cash-generating Units ("CGU") that are expected to benefit from the combination, irrespective of whether other assets or liabilities of the acquiree are allocated to those CGUs.*

*Where goodwill forms part of a CGU and part of the operations within that CGU is disposed of, the goodwill associated with the operation disposed of is included in the carrying amount of the operation when determining the gain or loss on disposal of the operation. Goodwill disposed of in this circumstance is measured based on the relative values of the operation disposed of and the portion of the CGU retained.*

Business combinations under common control

*Business combinations under common control are accounted for using the pooling-of-interests method, whereby the difference between the considerations transferred and the book value of the net assets of the acquiree is recognized as part of "Additional Paid-in Capital" account in the consolidated statement of financial position.*

*In applying the said pooling-of-interest method, the components of the financial statements of the combining entities are presented as if the combination has occurred since the beginning of the period of the combining entity become under common control.*



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**q. Aset Tetap**

**Tanaman Produktif**

Tanaman produktif adalah tanaman hidup yang digunakan dalam produksi atau penyediaan produk agrikultur; diharapkan untuk menghasilkan produk untuk jangka waktu lebih dari satu periode; dan sangat jarang dijual sebagai produk agrikultur, kecuali untuk penjualan sisa hanya sesekali

Bibit

Biaya-biaya yang terjadi, pembelian bibit dan pemeliharannya dinyatakan sebesar biaya perolehan. Akumulasi biaya ini akan dipindahkan ke akun aset tetap - tanaman belum menghasilkan pada saat siap ditanam.

Tanaman produktif belum menghasilkan

Tanaman produktif belum menghasilkan dinyatakan sebesar biaya perolehan yang meliputi akumulasi biaya persiapan lahan, penanaman bibit, pemupukan, pemeliharaan dan alokasi biaya tidak langsung lainnya sampai dengan saat tanaman yang bersangkutan dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen. Biaya-biaya tersebut juga termasuk kapitalisasi biaya pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan pengembangan tanaman produktif belum menghasilkan.

Kapitalisasi beban pinjaman tersebut berakhir ketika pohon-pohon telah menghasilkan dan siap untuk dipanen. Tanaman produktif belum menghasilkan tidak diamortisasi.

Tanaman produktif belum menghasilkan direklasifikasi menjadi tanaman produktif menghasilkan pada saat tanaman dinyatakan menghasilkan dan dapat dipanen. Secara umum, tanaman produktif kelapa sawit memerlukan waktu sekitar 3 sampai dengan 4 tahun sejak penanaman bibit di area perkebunan untuk menjadi tanaman menghasilkan. Untuk tanaman karet, teh dan kopi memerlukan waktu sekitar 5 sampai dengan 6 tahun untuk dapat menghasilkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**q. Fixed Assets**

**Bearer Plants**

*Bearer plants are living plants used in the production or supply of agricultural produce; are expected to bear produce for more than one period; and have a remote likelihood of being sold as agricultural product, except for incidental scrap sales*

Nursery

*Costs incurred in the preparation of the nursery, purchase of seeds and their upkeep are stated at cost. The accumulated costs are transferred to the fixed asset - immature plantations account at the time of planting.*

Immature bearer plantations

*Immature bearer plants are recognized at cost, which consist mainly of the accumulated cost of land clearing, planting, fertilizing and upkeep/maintaining the plantations and allocations of indirect overhead costs up to the time the trees become commercially productive and available for harvest. Costs also include capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the development of immature bearer plants.*

*Such capitalization of borrowing costs ceases when the trees become commercially productive and available for harvest. Immature bearer plants are not amortized.*

*Immature bearer plants are reclassified to mature bearer plants when they are commercially productive and available for harvest. In general, an oil palm bearer plant takes about 3 to 4 years to reach maturity from the time of planting the seedlings to the field. For rubber, tea and coffee bearer plant take about 5 to 6 years to reach maturity.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**q. Aset Tetap (lanjutan)**

**Tanaman Produktif (lanjutan)**

Tanaman produktif menghasilkan

Biaya perolehan tanaman belum menghasilkan diklasifikasi ke tanaman menghasilkan pada saat tanaman tersebut mulai menghasilkan. Jangka waktu suatu tanaman dinyatakan mulai menghasilkan ditentukan oleh pertumbuhan vegetatif dan berdasarkan taksiran manajemen, dengan ketentuan sebagai berikut:

- i) Tanaman kelapa sawit dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila tanaman telah berumur 36 bulan, dan atau minimal 60% dari jumlah seluruh pohon telah menghasilkan tandan buah dengan dengan berat tandan diatas 3 kilogram, atau produksi rata-rata mencapai antara 4 ton sampai 6 ton per ha per tahun;
- ii) Tanaman teh dinyatakan sebagai tanaman menghasilkan apabila tanaman telah berumur 36 bulan dan atau pertumbuhan daun yang telah saling bertemu antara satu pokok dengan pokok lainnya mencapai lebih dari 70% dari jumlah pokok atau tegakan.
- iii) Tanaman lainnya yaitu kopi dan karet, sebagai tanaman menghasilkan apabila tanaman telah berumur antara 1 tahun sampai dengan 7 tahun.

Penyusutan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus selama masa manfaat yang diestimasi sebagai berikut:

	<b>Tahun/ Year</b>
Tanaman menghasilkan - karet	20
Tanaman menghasilkan - kelapa sawit	25
Tanaman menghasilkan - kopi	40
Tanaman menghasilkan - teh	50

Jumlah tercatat tanaman produktif direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)**

**q. Fixed Assets (continued)**

**Bearer Plants (continued)**

Mature bearer plantations

Cost of immature plantations classified into mature plantations when the plantation starts to produced. The period of a plantation classified as mature depends on the vegetative growth and based on the management estimation with criteria as follows:

- i) The palm oil plantation is classified as mature plantations when the plantation has been 36 months old, and or about 60% of trees per block produces fresh fruit bunches with weight per bunch of 3 kilograms, and the average production is 4 tons to 6 tons per ha per year;
- ii) The tea plantation is classified as mature plantations when the plantation has been 36 months old and the leaves of around 70% of the trees already meet one another.
- iii) Other plantations such as coffee, and rubber are classified as mature plantations when the plantation had been aged between 1 year until 7 years.

Depreciation is computed using the straight-line method over the estimated useful lives, estimated as follows:

Mature plantation - rubber
Mature plantation - oil palm
Mature plantation - coffee
Mature plantation - tea

The carrying amounts of bearer plants are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**q. Aset Tetap (lanjutan)**

**Tanaman Produktif (lanjutan)**

Tanaman produktif menghasilkan (lanjutan)

Jumlah tercatat komponen dari suatu tanaman produktif dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Umur manfaat aset dan metode penyusutan dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

Beban pemeliharaan tanaman produktif dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

**Aset tetap lainnya**

Aset tetap lainnya pada awalnya diakui sebesar biaya perolehan, yang terdiri atas harga perolehan dan biaya-biaya tambahan yang dapat diatribusikan langsung untuk membawa aset ke lokasi dan kondisi yang diinginkan agar aset siap digunakan.

Setelah pengakuan awal, aset ini dinyatakan pada biaya perolehan dikurangi akumulasi penyusutan dan kerugian penurunan nilai.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**q. Fixed Assets (continued)**

**Bearer Plants (continued)**

Mature bearer plantations (continued)

The carrying amount of an item of bearer plants is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.

The asset useful lives and depreciation method are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively if necessary.

Upkeep and maintenance costs of bearer plants are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.

**Other fixed asset**

All other fixed assets are initially recognized at cost, which comprises its purchase price and any costs directly attributable in bringing the asset to its working condition and to the location where it is intended to be used.

Subsequent to initial recognition, these assets are carried at cost less any subsequent accumulated depreciation and impairment losses.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**q. Aset Tetap (lanjutan)**

**Aset tetap lainnya (lanjutan)**

Penyusutan aset dimulai pada saat aset tersebut siap untuk digunakan sesuai maksud penggunaannya oleh Grup dan dihitung dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan estimasi masa manfaat ekonomis sebagai berikut:

	<b>Tahun/ Year</b>	
Mesin dan peralatan	8-20	<i>Machinery and Equipments</i>
Bangunan dan prasaran	5-20	<i>Buildings and infrastructures</i>
Kendaraan dan alat pengangkutan lainnya	5-15	<i>Vehicles and other transportation equipments</i>
Peralatan pertanian dan kantor	3-5	<i>Farming and Office equipments</i>
Instalasi pembibitan	5-16	<i>Nursery Instalation</i>
Aset tetap lainnya	3-5	<i>Other fixed assets</i>

Jumlah tercatat aset ini direviu atas penurunan nilai jika terdapat peristiwa atau perubahan keadaan yang mengindikasikan bahwa jumlah tercatat mungkin tidak dapat seluruhnya terealisasi.

Jumlah tercatat komponen dari suatu aset dihentikan pengakuannya pada saat dilepaskan atau saat sudah tidak ada lagi manfaat ekonomi masa depan yang diharapkan dari penggunaan maupun pelepasannya. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari penghentian pengakuan tersebut (ditentukan sebesar selisih antara jumlah hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya) dimasukkan ke dalam laba rugi pada tahun penghentian pengakuan tersebut dilakukan.

Nilai residu aset, umur manfaat dan metode penyusutan aset tetap dievaluasi setiap akhir tahun pelaporan dan disesuaikan secara prospektif jika dipandang perlu.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)**

**q. Fixed Assets (continued)**

**Other fixed asset (continued)**

*Depreciation of an asset is commenced when the asset is available for use in the manner intended by the Group and is computed using the straight-line method based on the estimated useful lives of the assets as follow:*

*The carrying amounts of these assets are reviewed for impairment when events or changes in circumstances indicate that their carrying values may not be fully recoverable.*

*The carrying amount of an item of these assets is derecognized upon disposal or when no future economic benefits are expected from its use or disposal. Any gain or loss arising from the derecognition of the asset (calculated as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset) is directly included in the profit or loss of year the item is derecognized.*

*The asset residual values, useful lives and depreciation method of fixed assets are reviewed at the end of each reporting year and adjusted prospectively, if necessary.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**q. Aset Tetap (lanjutan)**

**Aset tetap lainnya (lanjutan)**

Aset tetap dalam penyelesaian dicatat sebesar biaya perolehan, yang mencakup kapitalisasi beban pinjaman dan biaya-biaya lainnya yang terjadi sehubungan dengan pendanaan aset tetap dalam penyelesaian tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan direklasifikasi ke akun "Aset Tetap" yang bersangkutan pada saat aset tetap tersebut telah selesai dikerjakan dan siap untuk digunakan. Aset tetap dalam penyelesaian tidak disusutkan sampai memenuhi syarat pengakuan sebagai aset tetap seperti diungkapkan di atas.

Beban pemeliharaan dan perbaikan dibebankan pada laba rugi pada saat terjadinya. Beban pemugaran dan penambahan dalam jumlah besar dikapitalisasi kepada jumlah tercatat aset terkait bila besar kemungkinan bagi Grup manfaat ekonomi masa depan menjadi lebih besar dari standar kinerja awal yang ditetapkan sebelumnya dan disusutkan sepanjang sisa masa manfaat aset terkait.

Aset tetap yang dihentikan pengakuannya atau yang dijual nilai tercatatnya dikeluarkan dari kelompok aset tetap. Keuntungan atau kerugian dari penjualan aset tetap tersebut dibukukan dalam laba rugi.

Aset dalam penyelesaian dinyatakan sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan tersebut termasuk biaya pinjaman yang terjadi selama masa pembangunan yang timbul dari utang yang digunakan untuk pembangunan aset tersebut. Akumulasi biaya perolehan akan dipindahkan ke masing-masing aset tetap yang bersangkutan pada saat selesai dan siap digunakan.

Tanah pada awalnya dinyatakan sebesar harga perolehan dan tidak diamortisasi karena manajemen berpendapat bahwa besar kemungkinan hak atas tanah tersebut dapat diperbaharui/diperpanjang pada saat jatuh tempo.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**q. Fixed Assets (continued)**

**Other fixed asset (continued)**

*Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed. Assets under construction are not depreciated until they fulfill criteria for recognition as fixed assets as disclosed above.*

*Repairs and maintenance expenses are taken to the profit or loss when they are incurred. The cost of major renovation and restoration is included in the carrying amount of the related asset when it is probable that future economic benefits in excess of the originally assessed standard of performance of the existing asset will flow to the Group and is depreciated over the remaining useful life of the related asset.*

*Fixed assets are derecognized or sold in carrying value are removed from fixed assets section. Any gain or loss arising from sales of fixed assets included in profit or loss.*

*Constructions in-progress are stated at cost, including capitalized borrowing costs and other charges incurred in connection with the financing of the said asset constructions. The accumulated costs will be reclassified to the appropriate "Fixed Assets" account when the construction is completed and ready to use.*

*At the initial recognition, land is stated at acquisition cost and not amortized as the management is of the opinion that it is probable that the titles can be renewed/extended upon expiration.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**q. Aset Tetap (lanjutan)**

**Aset tetap lainnya (lanjutan)**

Setelah pengakuan awal, tanah diukur pada nilai wajar pada tanggal revaluasi dikurangi akumulasi rugi penurunan nilai setelah tanggal revaluasi. Revaluasi dilakukan dengan keteraturan yang cukup reguler untuk memastikan bahwa jumlah tercatat tanah tidak berbeda secara material dengan jumlah yang ditentukan dengan menggunakan nilai wajarnya pada akhir periode pelaporan.

Surplus revaluasi diakui dalam penghasilan komprehensif lain dan terakumulasi dalam ekuitas pada bagian surplus revaluasi aset tetap. Namun, kenaikan tersebut diakui dalam laba rugi hingga sebesar jumlah penurunan nilai aset yang sama akibat revaluasi yang pernah diakui sebelumnya dalam laba rugi. Defisit revaluasi diakui dalam laba rugi. Namun penurunan nilai tersebut diakui dalam surplus revaluasi aset tetap sepanjang tidak melebihi saldo surplus revaluasi untuk aset tersebut.

**Aset tidak produktif**

Aset tetap yang tidak digunakan dalam kegiatan usaha diklasifikasikan ke akun aset tetap tidak produktif dalam akun aset tidak lancar lainnya - neto dan disajikan sebesar nilai setelah dikurangi penurunan nilai.

Penghapusan dan pemindahtanganan aset tetap mengikuti ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara nomor PER-03/MBU/03/2021, tentang tata cara penghapusbukuan dan pemindahtanganan aset tetap Badan Usaha Milik negara.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**q. Fixed Assets (continued)**

**Other fixed asset (continued)**

After the initial recognition, land is stated at fair value at the date of the revaluation less accumulated impairment losses. Revaluations is done with sufficient regularity to ensure that the carrying amount does not differ materially from that which would be determined using fair value at the end of the reporting period.

The revaluation surplus is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity under the heading of other comprehensive income. However, the increase is recognized in profit or loss to the extent that it reverses a revaluation decrease of the same asset previously recognized in profit or loss. The revaluation deficit is recognized in profit or loss. However, the decrease shall be recognized in the revaluation surplus to the extent of any credit balance existing in the revaluation surplus in respect of that asset.

**Non-productive asset**

Fixed assets not used in operation are classified as non-productive assets in the other non-current assets - net account and are presented net of impairment.

Write-off and transfer of non-productive assets follow the provisions set forth in the Regulation of Minister of BUMN No. PER-03/MBU/03/2021 on Procedures of Write-off and Transfer of Fixed Assets of BUMN.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**r. Aset takberwujud - Beban tanggungan hak atas tanah**

Biaya pengurusan legal hak atas tanah dalam bentuk Hak Guna Usaha ("HGU"), Hak Guna Bangunan ("HGB"), dan Hak Pakai ("HP") ketika tanah diperoleh pertama kali diakui sebagai bagian dari biaya perolehan tanah pada akun "Aset Tetap" dan tidak diamortisasi. Sementara biaya pengurusan atas perpanjangan atau pembaruan legal hak atas tanah dalam bentuk HGU, HGB, dan HP diakui sebagai bagian dari akun "Beban Tanggungan Hak Atas Tanah" pada laporan posisi keuangan konsolidasian dan diamortisasi sepanjang mana yang lebih pendek antara umur hukum hak dan umur ekonomis tanah.

**s. Properti investasi**

Properti investasi merupakan tanah dan atau bangunan yang dimiliki untuk sewa operasi atau kenaikan nilai, daripada untuk digunakan atau dijual dalam kegiatan operasi normal.

Properti investasi diukur pada awalnya dengan biaya, termasuk biaya transaksi. Setelah pengakuan awal, properti investasi dinyatakan sebesar nilai wajar, yang mencerminkan kondisi pasar pada tanggal laporan. Keuntungan atau kerugian yang timbul dari perubahan nilai wajar properti investasi termasuk dalam laba rugi pada periode terjadinya, termasuk dampak pajak yang bersangkutan. Nilai wajar ditentukan berdasarkan penilaian tahunan yang dilakukan oleh penilai independen eksternal terakreditasi dengan menerapkan model penilaian yang merujuk kepada Standar Penilaian Indonesia.

Properti investasi dihentikan pengakuannya baik saat dilepas atau saat ditarik secara permanen penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomis masa depan yang diharapkan dari pelepasannya. Selisih antara hasil pelepasan bersih dan nilai tercatat aset diakui dalam laba rugi pada periode penghentian pengakuan. Dalam menentukan jumlah imbalan dari penghentian pengakuan properti investasi, Perusahaan mempertimbangkan dampak dari imbalan variabel, keberadaan komponen pembiayaan yang signifikan, imbalan non-kas, dan imbalan yang harus dibayar kepada pembeli (jika ada).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**r. Intangible assets - Deferred charges of land rights**

Legal cost of landrights in the form of HGU, HGB, and Usage Rights ("Hak Pakai" or "HP") when the land was acquired initially are recognized as part of the cost of the land under the "Fixed Assets" account and not amortized. Meanwhile, the extension or the legal renewal costs of landrights in the form of HGU, HGB, and HP were recognized as part of "Deferred Charges Landrights" account in the consolidated statement of financial position and were amortized over the shorter of the rights' legal life and land's economic life.

**s. Investment property**

Investment property represents land or building held for operating lease or for capital appreciation, rather than for use or sale in the ordinary course of business.

Investment properties are measured initially at cost, including transaction costs. Subsequent to initial recognition, investment properties are stated at fair value, which reflects market conditions at the reporting date. Gains or losses arising from changes in the fair values of investment properties are included in profit or loss in the period in which they arise, including the corresponding tax effect. Fair values are determined based on an annual valuation performed by an accredited external independent valuer applying a valuation model which refer to Indonesian Valuation Standard.

Investment properties are derecognized either when they have been disposed of or when they are permanently withdrawn from use and no future economic benefit is expected from their disposal. The difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset is recognized in profit or loss in the period of derecognition. In determining the amount of consideration from the derecognition of investment property the Company considers the effects of variable consideration, existence of a significant financing component, non-cash consideration, and consideration payable to the buyer (if any).

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**s. Properti investasi (lanjutan)**

Transfer dilakukan ke (atau dari) properti investasi hanya jika ada perubahan penggunaan. Untuk transfer dari properti investasi ke properti yang digunakan sendiri, biaya yang dianggap untuk akuntansi selanjutnya adalah nilai wajar pada tanggal perubahan penggunaan. Jika properti yang diduduki pemilik menjadi properti investasi, Perusahaan memperhitungkan properti tersebut sesuai dengan kebijakan yang tercantum dalam aset tetap sampai dengan tanggal perubahan yang digunakan.

**t. Penurunan Nilai Aset - Non Keuangan**

Pada setiap tanggal pelaporan, Grup menilai apakah terdapat indikasi suatu aset mengalami penurunan nilai. Jika terdapat indikasi tersebut atau pada saat pengujian penurunan nilai aset (yaitu aset takberwujud dengan umur manfaat tidak terbatas, aset takberwujud yang belum dapat digunakan, atau goodwill yang diperoleh dalam suatu kombinasi bisnis) diperlukan, maka Grup membuat estimasi formal jumlah terpulihkan aset tersebut.

Jumlah terpulihkan yang ditentukan untuk aset individual adalah jumlah yang lebih tinggi antara nilai wajar aset atau UPK dikurangi biaya untuk menjual dengan nilai pakainya, kecuali aset tersebut tidak menghasilkan arus kas masuk yang sebagian besar independen dari aset atau kelompok aset lain. Jika nilai tercatat aset atau UPK lebih besar daripada jumlah terpulihkannya, maka aset tersebut dipertimbangkan mengalami penurunan nilai dan nilai tercatat aset diturunkan menjadi sebesar jumlah terpulihkannya.

Grup mendasarkan perhitungan penurunan nilai pada rincian perhitungan anggaran atau prakiraan yang disusun secara terpisah untuk masing-masing UPK Grup atas aset individual yang dialokasikan. Perhitungan anggaran dan prakiraan ini secara umum mencakup periode selama lima atau sepuluh tahun sesuai dengan stabilitas arus kas perkebunan terkait. Setelah periode yang dianggarkan proyeksi arus kas diestimasi dengan melakukan ekstrapolasi proyeksi yang dianggarkan dengan menggunakan tingkat pertumbuhan jangka panjang yang tetap.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**s. Investment property (continued)**

*Transfers are made to (or from) investment property only when there is a change in use. For a transfer from investment property to owner-occupied property, the deemed cost for subsequent accounting is the fair value at the date of change in use. If owner-occupied property becomes an investment property, the Company accounts for such property in accordance with the policy stated under fixed assets up to the date of change in use.*

**t. Impairment of Non-financial Assets**

*The Group assesses at the each reporting date whether there is an indication that an asset may be impaired. If any such indication exists or when annual impairment testing for an asset (i.e. an intangible asset with an indefinite useful life, an intangible asset not yet available for use, or goodwill acquired in a business combination) is required, the Group makes an estimate of the asset's recoverable amount.*

*An asset's recoverable amount is the higher of an asset's or CGU's fair value less costs to sell and its value in use, and is determined for an individual asset, unless the asset does not generate cash inflows that are largely independent of those from other assets or groups of assets. Where the carrying amount of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, the asset is considered impaired and is written down to its recoverable amount.*

*The Group bases its impairment calculation on detailed budgets and forecast calculations which are prepared separately for each of the Group's CGUs to which the individual assets are allocated. These budgets and forecast calculations are generally covering a period of five or ten years in accordance with the stability of each estate's cash flows. Beyond the forecasted period, the estimated cash flows are determined by extrapolating the forecasted cash flows using a steady long term growth rate.*



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**t. Penurunan Nilai Aset - Non Keuangan  
(lanjutan)**

Dalam menghitung nilai pakai, estimasi arus kas masa depan neto didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas aset. Dalam menentukan nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual, digunakan harga penawaran pasar terakhir, jika tersedia. Jika tidak terdapat transaksi tersebut, Grup menggunakan model penilaian yang sesuai untuk menentukan nilai wajar aset. Perhitungan-perhitungan ini dikuatkan oleh penilaian berganda atau indikator nilai wajar yang tersedia.

Kerugian penurunan nilai dari operasi yang berkelanjutan, jika ada, diakui pada laba rugi sesuai dengan kategori biaya yang konsisten dengan fungsi dari aset yang diturunkan nilainya.

Untuk aset selain *goodwill*, penilaian dilakukan pada akhir setiap tanggal pelaporan apakah terdapat indikasi bahwa rugi penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya mungkin tidak ada lagi atau mungkin telah menurun. Jika indikasi dimaksud ditemukan, maka entitas mengestimasi jumlah terpulihkan aset atau UPK tersebut. Kerugian penurunan nilai yang telah diakui dalam tahun sebelumnya untuk aset selain *goodwill* dibalik hanya jika terdapat perubahan asumsi-asumsi yang digunakan untuk menentukan jumlah terpulihkan aset tersebut sejak rugi penurunan nilai terakhir diakui. Dalam hal ini, jumlah tercatat aset dinaikkan ke jumlah terpulihkannya. Pembalikan tersebut dibatasi sehingga jumlah tercatat aset tidak melebihi jumlah terpulihkannya maupun jumlah tercatat, neto setelah penyusutan, seandainya tidak ada rugi penurunan nilai yang telah diakui untuk aset tersebut pada periode/tahun sebelumnya. Pembalikan rugi penurunan nilai diakui pada laba rugi. Setelah pembalikan tersebut, penyusutan aset tersebut disesuaikan di periode mendatang untuk mengalokasikan jumlah tercatat aset yang direvisi, dikurangi nilai sisanya, dengan dasar yang sistematis selama sisa umur manfaatnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**t. Impairment of Non-financial Assets  
(continued)**

*In assessing the value in use, the estimated net future cash flows are discounted to their present value using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the risks specific to the asset. In determining fair value less costs to sell, recent market transactions are taken into account, if available. If no such transactions can be identified, an appropriate valuation model is used to determine the fair value of the assets. These calculations are corroborated by valuation multiples or other available fair value indicators.*

*Impairment losses of continuing operations, if any, are recognized in the profit or loss in those expense categories consistent with the functions of the impaired asset.*

*For assets excluding goodwill, an assessment is made at each reporting date as to whether there is any indication that previously recognized impairment losses may no longer exist or may have decreased. If such indication exists, the asset's or CGU's recoverable amount is estimated. A previously recognized impairment loss for an asset other than goodwill is reversed only if there has been a change in the assumptions used to determine the asset's recoverable amount since the last impairment loss was recognized. If that is the case, the carrying amount of the asset is increased to its recoverable amount. The reversal is limited so that the carrying amount of the assets does not exceed its recoverable amount, nor exceed the carrying amount that would have been determined, net of depreciation, had no impairment loss been recognized for the asset in prior periods/years. Reversal of an impairment loss is recognized in the profit or loss. After such a reversal, the depreciation charge on the said asset is adjusted in future periods to allocate the asset's revised carrying amount, less any residual value, on a systematic basis over its remaining useful life.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**u. Pengaturan Bersama**

Pengaturan bersama adalah pengaturan yang dua atau lebih pihak memiliki pengendalian bersama. Pengendalian bersama adalah persetujuan kontraktual untuk berbagi pengendalian atas suatu pengaturan, yang ada hanya ketika keputusan mengenai aktivitas relevan mensyaratkan persetujuan dengan suara bulat dari seluruh pihak yang berbagi pengendalian.

Operasi Bersama

Operasi bersama adalah salah satu jenis pengaturan bersama dimana para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan tersebut memiliki hak atas aset dan kewajiban atas liabilitas, terkait dengan pengaturan tersebut.

Grup memiliki kepemilikan dalam operasi bersama dimana Grup termasuk salah satu pihak yang memiliki pengendalian bersama atas operasi bersama (operator bersama).

Ketika entitas mengakuisisi kepentingan dalam operasi bersama yang aktivitas operasi bersamanya merupakan bisnis, kombinasi bisnis entitas tersebut, menerapkan seluruh prinsip akuntansi kombinasi bisnis. Hal ini diterapkan untuk akuisisi kepentingan awal dan kepentingan tambahan dalam operasi bersama yang aktivitas operasi bersamanya merupakan bisnis.

Sehubungan dengan kepemilikannya dalam operasi bersama, Grup mengakui:

- i. Aset, mencakup bagiannya atas setiap aset yang dimiliki bersama;
- ii. Liabilitas, mencakup bagiannya atas liabilitas yang terjadi bersama;
- iii. Pendapatan dari penjualan bagiannya atas output yang dihasilkan dari operasi bersama;
- iv. Bagiannya atas pendapatan dari penjualan output oleh operasi bersama; dan
- v. Beban, mencakup bagiannya atas setiap beban yang terjadi secara bersama-sama.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**u. Joint Arrangement**

*A joint arrangement is an arrangement over which two or more parties have joint control. Joint control is the contractually agreed sharing of control of an arrangement, which exists only when decisions about the relevant activities require unanimous consent of the parties sharing control.*

Joint Operation

*A joint operation is a type of joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the assets and obligations for the liabilities, relating to the arrangement.*

*The Group has interests in several joint operation whereby the Group includes as a party which have joint control of a joint operation (joint operator).*

*When an entity acquires an interest in a joint operation in which the activity of the joint operation constitutes a business, it shall apply, all of the principles on business combinations accounting. This applies to the acquisition of both the initial interest and additional interests in a joint operation in which the activity of the joint operation constitutes a business.*

*In relation to its interests in joint operations, the Group recognizes its:*

- i. Assets, including its share of any assets held jointly;*
- ii. Liabilities, including its share of any liabilities incurred jointly;*
- iii. Revenue from the sale of its share of the output arising from the joint operation;*
- iv. Share of the revenue from the sale of the output by the joint operation; and*
- v. Expenses, including its share of any expenses incurred jointly.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**u. Pengaturan Bersama (lanjutan)**

Operasi Bersama (lanjutan)

Ketika Grup melakukan transaksi dengan operasi bersama, di mana Grup merupakan salah satu operator bersama, maka Grup mengakui keuntungan dan kerugian yang dihasilkan dari transaksi tersebut hanya sebatas kepentingan para pihak lain dalam operasi bersama tersebut.

Ketika Grup kehilangan pengendalian bersama, Grup mengakui dan mencatat investasi yang tersisa pada nilai wajar. Perbedaan antara nilai tercatat dari entitas pengendalian bersama dahulu saat kehilangan pengendalian bersama dan nilai wajar investasi yang tersisa dan pendapatan dari pelepasan dicatat dalam laba atau rugi. Ketika investasi tersisa menunjukkan pengaruh yang signifikan, maka investasi akan dicatat sebagai investasi pada entitas asosiasi.

Ventura Bersama

Ventura bersama adalah pengaturan bersama yang mengatur bahwa para pihak yang memiliki pengendalian bersama atas pengaturan memiliki hak atas aset neto pengaturan tersebut. Investasi pada ventura bersama dicatat menggunakan metode ekuitas.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**u. Joint Arrangement (continued)**

Joint Operation (continued)

*When the Group enters into a transaction with a joint operation in which it is a joint operator, the Group shall recognize gains and losses resulting from such a transaction only to the extent of the other parties' interests in the joint operation.*

*Upon loss of joint control, the Group measures and recognizes its remaining investment at its fair value. Any difference between the carrying amount of the former jointly controlled entity upon loss of joint control and the fair value of the remaining investment and gain from disposal is recognized in profit or loss. When the remaining investment constitutes significant influence, it is accounted for as investment in an associates.*

Joint Ventures

*Joint ventures are a joint arrangement whereby the parties that have joint control of the arrangement have rights to the net assets of the arrangement. Investment in joint ventures are accounted for using the equity method.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**v. Imbalan kerja karyawan**

Perusahaan mempunyai program dana pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Pembayaran program manfaat pensiun iuran pasti diakui sebagai beban pada saat pekerja telah memberikan jasa mereka, dimana mereka memperoleh hak atas iuran. Pembayaran kepada Dana Pensiun Perkebunan ("Dapenbun") diperhitungkan sebagai pembayaran untuk program iuran pasti di mana kewajiban Perusahaan berdasarkan program tersebut setara dengan kewajiban yang timbul dalam program manfaat pensiun iuran pasti.

Grup juga mencatat penyisihan manfaat tambahan selain program dana pensiun tersebut di atas untuk memenuhi dan menutup imbalan minimum yang harus dibayar kepada karyawan-karyawan sesuai dengan Perjanjian Kerja Bersama dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tentang Cipta Kerja No. 2/2022 ("UU Cipta Kerja", (UUCK)). Penyisihan tambahan tersebut diestimasi dengan menggunakan perhitungan aktuarial metode "Projected Unit Credit".

Pengukuran kembali, terdiri atas keuntungan dan kerugian aktuarial, segera diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan pengaruh langsung didebit atau dikreditkan kepada saldo laba melalui PKL pada periode terjadinya. Pengukuran kembali tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto, yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain, terdiri dari (i) keuntungan dan kerugian aktuarial, (ii) imbal hasil atas aset program, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto; dan (iii) setiap perubahan dampak batas aset, tidak termasuk jumlah yang dimasukkan dalam bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto.

Pengukuran kembali atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto yang diakui sebagai penghasilan komprehensif lain tidak direklasifikasi ke laba rugi pada periode berikutnya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**v. Employee Benefits**

The company have defined contribution retirement plans covering all their qualified permanent employees.

Payments to defined contribution retirement benefit plans are recognised as an expense when employees have rendered service entitling them to the contributions. Payments made to Dana Pensiun Perkebunan ("Dapenbun") are accounted for as payments to defined contribution plans where the obligations of the Company under the plans are equivalent to those arising in a defined contribution retirement benefit plan.

The Group also provides additional provisions on top of the benefits provided under the above-mentioned defined contribution pension programs in order to meet and cover the minimum benefits required to be paid to the qualified employees under Collective Labor Agreement and Government Regulation in Lieu of Law No. 2/2022 (the "Cipta Kerja Law", (UUCK)). The said additional provisions are estimated using actuarial calculations using the "Projected Unit Credit" method.

Re-measurements, comprising of actuarial gains and losses, are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI in the period in which they occur. Re-measurements are not reclassified to profit or loss in subsequent periods.

Remeasurements of the net defined benefit liability (asset), which are recognized as other comprehensive income, consists of (i) actuarial gain and losses, (ii) the return on plan assets, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset); and (iii) any change in the effect of the asset ceiling, excluding amounts included in net interest on the net defined benefit liability (asset).

Remeasurements of the net defined benefit liability (asset) recognized in other comprehensive income will not be reclassified to profit or loss in the next period.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**v. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)**

Beban imbalan kerja jangka panjang lainnya ditentukan dengan metode *Projected Unit Credit* dengan metode yang disederhanakan di mana metode ini tidak mengakui pengukuran kembali dalam penghasilan komprehensif lain. Total nilai neto dari biaya jasa kini, biaya bunga neto atas liabilitas (aset) imbalan pasti neto dan pengukuran kembali liabilitas (aset) imbalan pasti neto diakui pada laba rugi tahun berjalan.

Biaya jasa lalu harus diakui sebagai beban pada saat yang lebih awal antara:

- i. ketika program Amendemen atau kurtailmen terjadi; dan
- ii. ketika entitas mengakui biaya restrukturisasi atau imbalan terminasi terkait.

Biaya jasa lalu diakui dalam laba rugi pada tanggal yang lebih awal antara tanggal amandemen atau kurtailmen program; dan Tanggal pada saat Grup mengakui biaya restrukturisasi terkait.

Bunga neto dihitung dengan menerapkan tingkat diskonto yang digunakan terhadap liabilitas imbalan kerja. Grup mengakui perubahan berikut pada kewajiban obligasi neto pada akun "Beban Pokok Penjualan" dan "Beban Umum dan Administrasi" pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian:

- i. Biaya jasa terdiri atas biaya jasa kini, biaya jasa lalu, keuntungan atau kerugian atas penyelesaian (curtailment) tidak rutin, dan
- ii. Beban atau penghasilan bunga neto.

Keuntungan atau kerugian atas kurtailmen atau penyelesaian suatu program imbalan pasti diakui ketika kurtailmen atau penyelesaian terjadi. Kurtailmen terjadi apabila salah satu dari kondisi berikut terpenuhi:

- i) menunjukkan komitmennya untuk mengurangi secara signifikan jumlah pekerja yang ditanggung oleh program; atau
- ii) mengubah ketentuan dalam program imbalan pasti yang menyebabkan bagian yang signifikan dari jasa masa depan pekerja tidak lagi memberikan imbalan atau memberikan imbalan yang lebih rendah.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**v. Employee Benefits (continued)**

The cost of providing other long-term employee benefits is determined using the *Projected Unit Credit* method using simplified method of not recognizing remeasurements in other comprehensive income. The net total of service cost, net interest on the net defined benefit liability (asset) and remeasurements of the net defined benefit liability (asset) are recognized in profit or loss for the year.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier between:

- i. the date of the plan amendment or curtailment, and
- ii. the date the Group recognizes related restructuring costs.

Past service costs are recognized in profit or loss at the earlier of the date of the plan amendment or curtailment; and the date that the Group recognizes related restructuring costs.

Net interest is calculated by applying the discount rate to the net defined benefit liability. The Group recognizes the following changes in the net defined benefit obligation under "Cost of Goods Sold" and "General and Administrative Expenses" as appropriate in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

- i. Service costs comprising current service costs, past-service costs, gains or losses on curtailments and non-routine settlements, and
- ii. Net interest expense or income.

Gains or losses on the curtailment or settlement of a defined benefit plan are recognized when the curtailment or settlement occurs. A curtailment occurs when an entity either:

- (i) is demonstrably committed to make a significant reduction in the number of employees covered by a plan; or
- (ii) amends the terms of a defined benefit plan so that a significant element of future service by current employees will no longer qualify for benefits, or will qualify only for reduced benefits.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**v. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)**

Penyelesaian program terjadi ketika Grup melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.

Imbalan jangka pendek

i) Tantiem

Penyisihan atas tantiem dibuat berdasarkan estimasi manajemen dan dibebankan pada laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian tahun berjalan. Tantiem akan dibayarkan kepada Direksi dan Komisaris setelah mendapat persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS). Selisih antara jumlah tantiem yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana tantiem tersebut disahkan oleh RUPS.

ii) Bonus

Bonus ditetapkan berdasarkan estimasi manajemen Grup dan disahkan oleh RUPS. Selisih antara jumlah bonus yang diestimasi oleh manajemen dengan jumlah yang disahkan oleh pemegang saham dibebankan atau dikreditkan pada periode dimana bonus tersebut disahkan oleh RUPS.

Imbalan jangka panjang

Imbalan kerja jangka panjang Grup meliputi:

i) Imbalan dan iuran pasti

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti dan iuran pasti untuk semua karyawan tetap yang memenuhi syarat.

Untuk tujuan pelaporan keuangan, imbalan pensiun manfaat pasti dihitung dengan menggunakan asumsi aktuarial berdasarkan metode *Projected Unit Credit* seperti yang diharuskan oleh PSAK No. 24. Untuk tujuan pendanaannya, metode aktuarial yang digunakan adalah *Projected Benefit Cost Method* dan *Attained Age Normal*.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**v. Employee Benefits (continued)**

A settlement occurs when the Group enters into a transaction that eliminates all further legal or constructive obligation for part or all of the benefits provided under a defined benefit plan.

Short term employee benefits

i) Tantiem

Provision of tantiem is based on management estimates and charged to the current period of consolidated statement of profit or loss. Tantiem will be paid to Directors and Commissioners after obtaining the approval in the General Stockholders' Meeting (GSM). The difference between the provision of tantiem that was estimated by management and the amount approved by the stockholders is recognized in the period when such tantiem is approved by GSM.

ii) Bonus

Bonus is provided based on the estimation of Group's management and approved by GSM. The difference between the total bonus estimated by management and approved by stockholders is recognized in the period when such bonus is approved by GSM.

Long-term employee benefits

Long-term employee benefits of the Group comprise of:

i) Defined benefit and contribution

The Company has defined benefit and defined contribution pension plan for all of its eligible permanent employees.

For financial reporting purposes, the defined benefit pension plan is calculated using the actuarial assumptions based on the *Projected Unit Credit* method as required by PSAK No. 24. For funding purposes, the actuarial method used is *Projected Benefit Cost Method*, and *Attained Age Normal*.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**v. Imbalan kerja karyawan (lanjutan)**

Imbalan jangka panjang (lanjutan)

i) Imbalan dan iuran pasti (lanjutan)

Jika terdapat surplus pendanaan, aset diakui pada laporan keuangan konsolidasian apabila pemulihan surplus tersebut dapat dilakukan baik melalui pembayaran kembali atau pengurangan iuran masa datang.

Untuk program pensiun iuran pasti, kontribusi yang terutang diakui sebagai beban pada usaha periode berjalan.

ii) Imbalan kerja jangka panjang lain

Grup juga memberikan imbalan kerja jangka panjang selain pensiun yang meliputi santunan hari tua, tunjangan masa persiapan pensiun, cuti berimbalan jangka panjang dan kesetiaan yang tidak didanai. Imbalan kerja jangka panjang tersebut dihitung dengan menggunakan metode *Projected Unit Credit* sesuai dengan PSAK No. 24.

iii) Imbalan kesehatan pasca kerja

Perusahaan memberikan Program Iuran Pasti Imbalan Perawatan Kesehatan Pensiun kepada karyawannya.

**w. Provisi**

Provisi diakui jika Grup memiliki kewajiban kini (baik bersifat hukum maupun bersifat konstruktif) yang akibat peristiwa masa lalu, besar kemungkinannya penyelesaian kewajiban tersebut mengakibatkan arus keluar sumber daya yang mengandung manfaat ekonomi dan estimasi yang andal mengenai jumlah kewajiban tersebut dapat dibuat.

Provisi ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan disesuaikan untuk mencerminkan estimasi terbaik yang paling kini. Jika arus keluar sumber daya untuk menyelesaikan kewajiban kemungkinan besar tidak terjadi, maka provisi dibatalkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**v. Employee Benefits (continued)**

Long-term employee benefits (continued)

i) *Defined benefit and contribution (continued)*

*Where the funding status shows a surplus, an asset is recognized in the consolidated financial statements if that surplus can be recovered through refunds or reductions in future contributions.*

*For the defined contribution pension plan, contributions payable are charged to current period operations.*

ii) *Other long-term employee benefits*

*The Group also provides long-term employment benefits other than pension which include post retirement benefits, allowance for preparation of pension, long-term compensation leave and service rewards which are unfunded. These long-term employee benefits are calculated using the Projected Unit Credit method in accordance with PSAK No. 24.*

iii) *Post-retirement healthcare benefits*

*The Company provides defined contribution Post-retirement Healthcare Benefits plan to its employees.*

**w. Provision**

*Provisions are recognized when the Group has a present obligation (legal or constructive) where, as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation and a reliable estimate can be made of the amount of the obligation.*

*Provisions are reviewed at each reporting date and adjusted to reflect the current best estimate. If it is no longer probable that an outflow of resources embodying economic benefits will be required to settle the obligation, the provision is reversed.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**x. Pendapatan dari Kontrak dengan  
Pelanggan dan Pengakuan Beban**

Perusahaan bergerak pada bidang usaha agro industri, mengusahakan perkebunan dan pengelolaan komoditas kelapa sawit, teh, karet dan kopi. Pendapatan dari kontrak dengan pelanggan diakui ketika pengendalian atas barang, terutama MKS, inti sawit, minyak inti sawit, karet, dan produk terkait lainnya dialihkan kepada pelanggan pada suatu jumlah yang mencerminkan imbalan yang diharapkan Grup sebagai imbalan atas barang tersebut. Secara umum, Grup menyimpulkan bahwa mereka bertindak sebagai prinsipal dalam pengaturan pendapatannya.

Kontrak-kontrak dengan pelanggan-pelanggan tertentu dalam segmen bisnisnya mensyaratkan imbalan variabel.

Grup menawarkan imbalan variabel berupa hak retur dan penyesuaian harga sehubungan dengan klaim kualitas, perubahan harga komoditas dan volume penjualan. Dalam menetapkan estimasi tersebut, manajemen menggunakan metode nilai ekspektasian yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis, atau metode jumlah yang paling mungkin yang dikembangkan berdasarkan pengalaman historis dengan mempertimbangkan juga pola pembelian saat ini.

Manajemen menetapkan metode estimasi untuk memastikan imbalan variabel yang kemungkinan terjadinya sangat tinggi sebagai salah satu faktor yang diperhitungkan dalam estimasi sehingga pembalikan signifikan atas jumlah pendapatan kumulatif yang telah diakui tidak akan terjadi pada saat ketidakpastian yang terkait dengan imbalan variabel tersebut terselesaikan dikemudian waktu. Sedangkan pengakuan dilakukan pada saat dokumen-dokumen pendukung telah diterima dari pelanggan-pelanggan atau pada saat besar kemungkinan bahwa penyesuaian harga akan diberikan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**x. Revenue from Contracts with Customers  
and Recognition of Expenses**

The Company is engaged in the Agro-Industry business, managing plantation and managing palm oil, tea, rubber and coffee commodities. Revenue from contracts with customers is recognized when control of the goods, primarily CPO, palm kernel, palm kernel oil, rubber, and other related products are transferred to the customers at an amount that reflects the consideration to which the Group expects to be entitled in exchange for those goods or services. The Group has generally concluded that it is the principal in its revenue arrangements.

Certain contracts with customers within the respective business segments give rise to variable considerations.

The Group estimates the variable considerations such as right of return and price adjustments arising from quality claim, changes of commodity price and sales volume, using expected value developed based on historical experience or using most likely amount developed based on historical experience taking into account also current purchasing patterns.

The management established estimation method that ensure inclusion of these variable consideration only to the extent that it is highly probable that a significant reversal in the amount of cumulative revenue recognized will not occur when the uncertainty associated with the variable consideration is subsequently resolved. Meanwhile, the recognition is made when supporting documents have been received from customers or when it is probable price adjustments will be given.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**x. Pendapatan dari Kontrak dengan Pelanggan dan Pengakuan Beban (lanjutan)**

Piutang usaha merupakan hak Grup atas sejumlah imbalan yang tidak bersyarat (yaitu, hanya berlalunya waktu yang perlu terjadi sebelum pembayaran imbalan tersebut jatuh tempo). Lihat kebijakan akuntansi aset keuangan di bagian Instrumen Keuangan mengenai pengakuan awal dan pengukuran selanjutnya.

Jika pelanggan membayar imbalan sebelum Grup mengalihkan barang atau jasa kepada pelanggan, liabilitas kontrak diakui pada saat pembayaran dilakukan atau pembayaran imbalan jatuh tempo (mana yang lebih awal). Liabilitas kontrak diakui sebagai pendapatan pada saat Grup telah memenuhi apa yang harus dilaksanakan sesuai kontrak.

**i) Penghasilan/Beban Bunga**

Untuk semua instrumen keuangan yang diukur pada biaya perolehan diamortisasi, penghasilan atau beban bunga dicatat dengan menggunakan metode SBE, yaitu suku bunga yang secara tepat mendiskontokan estimasi pembayaran atau penerimaan kas di masa datang selama perkiraan umur dari instrumen keuangan, atau jika lebih tepat, digunakan periode yang lebih singkat, untuk nilai tercatat neto dari aset keuangan.

**ii) Dividen**

Pendapatan diakui pada saat hak Grup untuk menerima pembayaran ditetapkan melalui RUPS.

**iii) Penghasilan Sewa**

Penghasilan sewa diakui dengan dasar garis lurus selama masa sewa

**iv) Beban**

Beban diakui pada saat terjadi (asas akrual).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)**

**x. Revenue from Contracts with Customers and Recognition of Expenses (continued)**

Trade receivables represent the Group's right to an amount of consideration that is unconditional (i.e., only the passage of time is required before payment of the consideration is due). Refer to accounting policies of financial assets in Financial instruments section regarding initial recognition and subsequent measurement.

If a customer pays consideration before the Group transfers goods or services to the customer, a contract liability is recognized when the payment is made or the payment is due (whichever is earlier). Contract liabilities are recognized as revenue when the Group performs under the contract.

**i) Interest Income/Expense**

For all financial instruments measured at amortized cost, interest income or expense is recorded using EIR method, which is the rate that exactly discounts the estimated future cash payments or receipts over the expected life of the financial instrument or a shorter period, where appropriate, to the net carrying value of the financial asset.

**ii) Dividends**

Revenue is recognized when the Group's right to receive the payment is established by GSM.

**iii) Rental Income**

Rental income is recognized on a straight-line basis over the lease terms.

**iv) Expenses**

Expenses are recognized when they are incurred (accrual basis).

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**y. Transaksi dan Saldo Dalam Mata Uang Asing**

Mata uang pelaporan yang digunakan pada laporan keuangan konsolidasian adalah Rupiah, yang juga merupakan mata uang fungsional Grup.

Transaksi dalam mata uang asing dicatat dalam Rupiah berdasarkan kurs yang berlaku pada saat transaksi dilakukan. Pada tanggal pelaporan, aset dan liabilitas moneter dalam mata uang asing dijabarkan sesuai dengan rata-rata kurs jual dan beli yang diterbitkan oleh Bank Indonesia pada tanggal transaksi perbankan terakhir untuk periode yang bersangkutan, dan laba atau rugi kurs yang timbul, dikreditkan atau dibebankan pada operasi periode yang bersangkutan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai tukar yang digunakan untuk 1 Dolar Amerika Serikat ("US\$") adalah sebesar Rp15.416 (31 Desember 2022: Rp15.731).

Seluruh transaksi dalam mata uang asing Grup adalah dalam Dolar AS

**z. Sewa**

Grup menilai pada insepisi kontrak bila kontrak tersebut adalah, atau mengandung, sewa. Yaitu, bila kontrak tersebut memberikan hak untuk mengendalikan penggunaan aset identifikasian selama suatu jangka waktu untuk dipertukarkan dengan imbalan.

*Sebagai Penyewa*

Grup menerapkan pendekatan pengakuan dan pengukuran tunggal untuk semua sewa, kecuali untuk sewa jangka pendek dan sewa aset bernilai rendah. Grup mengakui liabilitas sewa untuk melakukan pembayaran sewa dan aset hak-guna yang mewakili hak untuk menggunakan aset pendasar.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**y. Transactions and Balances in Foreign Currencies**

The reporting currency used in the consolidated financial statements is Indonesian Rupiah, which is also the Group functional currency

Transactions involving foreign currencies are recorded in Indonesian Rupiah at the rates of exchange prevailing at the time the transactions are made. At the reporting date, monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies are adjusted to reflect the average of the selling and buying rates of exchange prevailing at the last banking transaction date of the period, as published by Bank Indonesia, and any resulting gains or losses are credited or charged to operations of the current period.

At December 31, 2023, the rate of exchange used for United States Dollar ("US\$") 1 was Rp15,416 (December 31, 2022: Rp15,731).

All transaction in foreign currencies of the Group is denominated in US Dollar.

**z. Leases**

The Group assesses at contract inception whether a contract is, or contains, a lease. That is, if the contract conveys the right to control the use of an identified asset for a period of time in exchange for consideration.

*As Lessee*

The Group applies a single recognition and measurement approach for all leases, except for short-term leases and leases of low-value assets. The Group recognizes lease liabilities to make lease payments and right-of-use assets representing the right to use the underlying assets.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**z. Sewa (lanjutan)**

*Aset Hak Guna*

Grup mengakui aset hak-guna pada tanggal dimulainya sewa (tanggal aset dasar tersedia untuk digunakan). Aset hak-guna diukur pada biaya perolehan, dikurangi akumulasi penyusutan dan rugi penurunan nilai, dan disesuaikan untuk setiap pengukuran kembali liabilitas sewa. Biaya perolehan aset hak-guna termasuk jumlah liabilitas sewa yang diakui, biaya langsung awal yang dikeluarkan, dan pembayaran sewa yang dilakukan pada atau sebelum tanggal permulaan dikurangi setiap insentif sewa yang diterima. Aset hak-guna disusutkan dengan metode garis lurus selama masa sewa.

*Liabilitas Sewa*

Pada tanggal permulaan sewa, Grup mengakui liabilitas sewa yang diukur pada nilai kini pembayaran sewa yang harus dilakukan selama masa sewa.

Pembayaran sewa juga mencakup harga pelaksanaan dari opsi pembelian yang secara wajar pasti akan dilaksanakan oleh Grup dan pembayaran denda untuk penghentian sewa, jika masa sewa mencerminkan pelaksanaan opsi untuk mengakhiri. Pembayaran sewa variabel yang tidak bergantung pada indeks atau tarif diakui sebagai beban pada periode terjadinya peristiwa atau kondisi yang memicu terjadinya pembayaran tersebut.

Dalam menghitung nilai kini dari pembayaran sewa, Grup menggunakan suku bunga pinjaman inkremental ("SBPI") pada tanggal dimulainya sewa karena suku bunga implisit dalam sewa tidak dapat ditentukan. Setelah tanggal dimulainya, jumlah liabilitas sewa ditingkatkan untuk mencerminkan penambahan bunga dan dikurangi untuk pembayaran sewa yang dilakukan. Selain itu, nilai tercatat liabilitas sewa diukur kembali jika ada modifikasi, perubahan jangka waktu sewa, perubahan pembayaran sewa (misalnya, perubahan pembayaran masa depan yang dihasilkan dari perubahan indeks atau kurs yang digunakan untuk menentukan pembayaran sewa) atau perubahan dalam penilaian opsi untuk membeli aset yang mendasarinya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**z. Leases (continued)**

*Right-of-use of Assets*

The Group recognizes right-of-use assets at the commencement date of the lease (the date the underlying asset is available for use). Right-of-use assets are measured at cost, less any accumulated depreciation and impairment losses, and adjusted for any remeasurement of lease liabilities. The cost of right-of-use assets includes the amount of lease liabilities recognized, initial direct costs incurred, and lease payments made at or before the commencement date less any lease incentives received. Right-of-use assets are depreciated on a straight-line basis over the lease term.

*Lease Liabilities*

At the commencement date of the lease, the Group recognizes lease liabilities measured at the present value of lease payments to be made over the lease term.

The lease payments also include the exercise price of a purchase option reasonably certain to be exercised by the Group and payments of penalties for terminating the lease, if the lease term reflects exercising the option to terminate. Variable lease payments that do not depend on an index or a rate are recognized as expenses in the period in which the event or condition that triggers the payment occurs.

In calculating the present value of lease payments, the Group uses its incremental borrowing rate at the lease commencement date because the interest rate implicit in the lease is not readily determinable. After the commencement date, the amount of lease liabilities is increased to reflect the accretion of interest and reduced for the lease payments made. In addition, the carrying amount of lease liabilities is remeasured if there is a modification, a change in the lease term, a change in the lease payments (e.g., changes to future payments resulting from a change in an index or rate used to determine such lease payments) or a change in the assessment of an option to purchase the underlying asset.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**z. Sewa (lanjutan)**

*Sewa Jangka Pendek dan Bernilai Rendah*

Grup menerapkan pengecualian pengakuan sewa jangka pendek untuk sewa yang jangka waktu sewanya pendek (yaitu, sewa yang memiliki jangka waktu sewa 12 bulan atau kurang dari tanggal permulaan dan tidak memiliki opsi beli). Grup juga menerapkan pengecualian pengakuan sewa dengan aset bernilai rendah untuk sewa yang aset dasarnya dianggap bernilai rendah. Pembayaran sewa untuk sewa jangka pendek dan sewa dari aset bernilai rendah diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama masa sewa.

*Sebagai Pemberi Sewa*

Sewa yang dalam pengaturannya Grup tidak mengalihkan secara substansial seluruh risiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan suatu aset diklasifikasikan sebagai sewa operasi. Pendapatan sewa yang timbul dicatat dengan metode garis lurus selama masa sewa dan diakui sebagai bagian dari pendapatan usaha pada laba rugi karena sifatnya. Biaya langsung awal yang terjadi dalam negosiasi dan pengaturan sewa operasi ditambahkan ke jumlah tercatat dari aset sewaan dan diakui selama masa sewa atas dasar yang sama dengan pendapatan sewa. Sewa kontijensi diakui sebagai pendapatan pada periode dimana sewa kontijensi tersebut diperoleh.

**aa. Biaya Pinjaman**

Biaya pinjaman terdiri dari beban bunga dan biaya lain yang ditanggung Grup sehubungan dengan peminjaman dana. Biaya pinjaman yang dapat diatribusikan langsung dengan perolehan, pembangunan atau pembuatan aset kualifikasian dikapitalisasi sebagai bagian biaya perolehan aset tersebut. Biaya pinjaman lainnya diakui sebagai beban pada saat terjadinya. Pada tahun 2023 dan 2022, Grup tidak melakukan kapitalisasi atas biaya pinjaman.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**z. Leases (continued)**

*Short-term Leases and Leases of low-value Assets*

*The Group applies the short-term lease recognition exemption to its short-term leases (i.e., those leases that have a lease term of 12 months or less from the commencement date and do not contain a purchase option). The Group also applies the lease of low-value assets recognition exemption to leases that are considered to be low value. Lease payments on short-term leases and leases of low-value underlying assets are recognized as expense on a straight-line basis over the lease term.*

*As Lessor*

*Leases where the Group does not transfer substantially all the risks and rewards of ownership of the asset are classified as operating leases. Rental income arising is accounted for on a straight-line basis over the lease terms and is included in revenue in the profit or loss due to its operating nature. Initial direct costs incurred in negotiating and arranging an operating lease are added to the carrying amount of the leased asset and recognized over the lease term on the same basis as rental income.*

**aa. Borrowing Cost**

*Borrowing costs consist of interest expenses and other financing charges that the Group incurs in connection with the borrowing funds. Borrowing costs that are directly attributable to the acquisition, construction or production of a qualifying asset are capitalized as part of the cost of the related asset. All other borrowing costs are recognized as expenses when incurred. During 2023 dan 2022, the Group does not capitalize borrowing costs.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI MATERIAL (lanjutan)**

**ab. Biaya penelitian dan pengembangan**

Biaya penelitian dibebankan pada saat terjadinya.

Aset takberwujud yang timbul dari pengembangan (atau dari tahap pengembangan pada proyek internal) diakui, jika dan hanya jika, Grup dapat menunjukkan semua hal berikut ini:

- i) kelayakan teknis penyelesaian aset tak berwujud tersebut sehingga aset tersebut dapat digunakan atau dijual,
- ii) niat untuk menyelesaikan aset takberwujud tersebut dan menggunakannya atau menjualnya,
- iii) bagaimana aset takberwujud akan menghasilkan manfaat ekonomi masa depan,
- iv) tersedianya kecukupan sumber-sumber daya untuk menyelesaikan aset, dan
- v) kemampuan untuk mengukur secara andal pengeluaran yang terkait dengan aset takberwujud selama pengembangannya. Pada saat penyelesaian, biaya pengembangan diamortisasi selama taksiran masa manfaat ekonomis dari aset takberwujud terkait.

Keuntungan atau kerugian yang muncul dari penghentian pengakuan aset takberwujud merupakan selisih antara hasil pelepasan neto dan jumlah tercatatnya, dan diakui pada laba rugi ketika aset tersebut dihentikan pengakuannya.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING POLICIES INFORMATION (continued)**

**ab. Research and development costs**

Research costs are expensed as incurred.

An intangible asset arising from development expenditures on an individual project is recognized only when the Group can demonstrate:

- i) the technical feasibility of completing the intangible asset so that it will be available for use or sale,
- ii) its intention to complete and its ability to use or sell the asset,
- iii) how the asset will generate future economic benefits,
- iv) the availability of resources to complete the asset, and
- v) the ability to measure reliably the expenditures of the related asset during the development. Upon completion, the development costs is amortized over its estimated useful life.

Gain or loss arising from derecognition of an intangible asset is measured as the difference between the net disposal proceeds and the carrying amount of the asset, and is recognized in the profit or loss when the asset is derecognized.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**ac. Perpajakan**

Grup menyajikan kurang bayar/lebih bayar atas pajak penghasilan, (jika ada), dan pajak tangguhan sebagai bagian dari "Beban Pajak" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian.

Pajak Kini

Aset dan liabilitas pajak kini untuk periode berjalan diukur sebesar jumlah yang diharapkan dapat direstitusi dari atau dibayarkan kepada otoritas perpajakan. Tarif pajak dan peraturan pajak yang digunakan untuk menghitung jumlah tersebut adalah yang telah berlaku atau secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan di negara tempat Grup beroperasi dan menghasilkan pendapatan kena pajak.

Bunga dan denda disajikan sebagai bagian dari penghasilan atau beban operasi lain karena tidak dianggap sebagai bagian dari beban pajak penghasilan.

Pajak penghasilan kini terkait dengan pos-pos yang diakui secara langsung di ekuitas diakui dalam ekuitas dan bukan dalam laporan laba rugi. Manajemen secara berkala mengevaluasi posisi yang diambil dalam Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sehubungan dengan situasi di mana peraturan perpajakan yang berlaku tunduk pada interpretasi dan menetapkan ketentuan yang sesuai.

Penyesuaian atas pajak penghasilan kini dan tangguhan tahun sebelumnya (tidak termasuk bunga dan penalti, yang disajikan sebagai bagian dari "Beban Operasi Lainnya") disajikan sebagai bagian dari "Beban Pajak" dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian, jika ada.

Perubahan terhadap kewajiban perpajakan diakui pada saat penetapan pajak diterima atau jika Grup mengajukan keberatan, pada saat keputusan atas keberatan telah ditetapkan.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ac. Taxation**

The Group presents the underpayment/overpayment of income tax, (if any), and deferred tax as part of "Tax Expense" in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

Current Tax

Current income tax assets and liabilities for the current period are measured at the amount expected to be recovered from or paid to the taxation authority. The tax rates and tax laws used to compute the amount are those that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date in the countries where the Group operates and generates taxable income.

Interests and penalties are presented as part of other operating income or expenses since they are not considered as part of the income tax expense.

Current income tax relating to items recognized directly in equity is recognized in equity and not in the statement of profit or loss. Management periodically evaluates positions taken in the tax returns with respect to situations in which applicable tax regulations are subject to interpretation and establishes provisions where appropriate.

The adjustments in respect of current and deferred income tax of the previous years (exclusive of interests and penalties, which are presented as part of "Other Operating Expenses" account) are presented as part of "Tax Expense" account in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income, if any.

Changes to the tax obligation are recognized when tax assessment is received or if the Group appealed, when the result of the appeal has been decided.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**ac. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Tangguhan

Pajak tangguhan diakui dengan menggunakan metode liabilitas atas perbedaan temporer pada tanggal pelaporan antara dasar pengenaan pajak dari aset dan liabilitas dan jumlah tercatatnya untuk tujuan pelaporan keuangan pada tanggal pelaporan.

Liabilitas pajak tangguhan diakui untuk semua perbedaan temporer yang kena pajak, kecuali:

- i) liabilitas pajak tangguhan yang terjadi dari pengakuan awal *goodwill* atau dari aset atau liabilitas dari transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis, dan pada waktu transaksi tidak mempengaruhi laba akuntansi dan laba kena pajak/rugi pajak;
- ii) dari perbedaan temporer kena pajak atas investasi pada entitas anak, yang saat pembalikannya dapat dikendalikan dan besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat.

Aset pajak tangguhan diakui untuk seluruh perbedaan temporer yang dapat dikurangkan dan akumulasi rugi pajak belum dikompensasi, bila kemungkinan besar laba kena pajak akan tersedia sehingga perbedaan temporer dapat dikurangkan tersebut, dan rugi pajak belum dikompensasi, dapat dimanfaatkan, kecuali:

- i) jika aset pajak tangguhan timbul dari pengakuan awal aset atau liabilitas dalam transaksi yang bukan transaksi kombinasi bisnis dan tidak mempengaruhi laba akuntansi maupun laba kena pajak/rugi pajak; atau
- ii) dari perbedaan temporer yang dapat dikurangkan atas investasi pada entitas anak, aset pajak tangguhan hanya diakui bila besar kemungkinannya bahwa beda temporer itu tidak akan dibalik dalam waktu dekat dan laba kena pajak dapat dikompensasi dengan beda temporer tersebut.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ac. Taxation (continued)**

Deferred Tax

Deferred tax is provided using the liability method on temporary differences at the reporting date between the tax bases of assets and liabilities and their carrying amounts for financial reporting purposes at the reporting date.

Deferred tax liabilities are recognized for all taxable temporary differences, except:

- i) where the deferred tax liability arises from the initial recognition of goodwill or of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss;
- ii) in respect of taxable temporary differences associated with investments in subsidiaries, when the timing of the reversal of the temporary differences can be controlled and it is probable that the temporary differences will not reverse in the foreseeable future.

Deferred tax assets are recognized for all deductible temporary differences and carry forward of unused tax losses, to the extent that it is probable that taxable profits will be available against which deductible temporary differences, and the carry forward of unused tax losses can be utilized, except:

- i) where the deferred tax asset relating to the deductible temporary difference arises from the initial recognition of an asset or liability in a transaction that is not a business combination and, at the time of the transaction, affects neither the accounting profit nor taxable profit or loss; or
- ii) in respect of deductible temporary differences associated with investments in subsidiaries, deferred tax assets are recognized only to the extent that it is probable that the temporary differences will reverse in the foreseeable future and taxable profit will be available against which the temporary differences can be utilized.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**ac. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Jumlah tercatat aset pajak tangguhan ditelaah pada setiap tanggal pelaporan dan diturunkan apabila laba kena pajak mungkin tidak memadai untuk mengkompensasi sebagian atau semua manfaat aset pajak tangguhan. Aset pajak tangguhan yang tidak diakui ditinjau ulang pada setiap tanggal pelaporan dan akan diakui apabila besar kemungkinan bahwa laba kena pajak pada masa yang akan datang akan tersedia untuk pemulihannya.

Aset dan liabilitas pajak tangguhan diukur dengan menggunakan tarif pajak yang diperkirakan akan berlaku pada tahun saat aset dipulihkan atau liabilitas diselesaikan berdasarkan tarif pajak dan peraturan pajak yang telah berlaku atau yang secara substantif telah berlaku pada tanggal pelaporan.

Pajak tangguhan terkait dengan pos-pos yang diakui di luar laba rugi diakui di luar laba rugi. Item pajak tangguhan diakui sesuai dengan transaksi yang mendasarinya baik di PKL maupun secara langsung di ekuitas.

Manfaat pajak yang diperoleh sebagai bagian dari kombinasi bisnis, tetapi tidak memenuhi kriteria untuk pengakuan terpisah pada tanggal tersebut, diakui selanjutnya jika informasi baru tentang fakta dan keadaan berubah. Penyesuaian tersebut diperlakukan sebagai pengurangan *goodwill* (selama tidak melebihi *goodwill*) jika terjadi selama periode pengukuran atau diakui dalam laba rugi.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ac. Taxation (continued)**

Deferred Tax (continued)

The carrying amount of a deferred tax asset is reviewed at each reporting date and reduced to the extent that it is no longer probable that sufficient taxable profit will be available to allow all or part of the benefit of that deferred tax asset to be utilized. Unrecognized deferred tax assets are reassessed at each reporting date and are recognized to the extent that it has become probable that future taxable profit will allow the deferred tax assets to be recovered.

Deferred tax assets and liabilities are measured at the tax rates that are expected to apply to the year when the asset is realized or the liability is settled, based on tax rates and tax laws that have been enacted or substantively enacted as at the reporting date.

Deferred tax relating to items recognized outside profit or loss is recognized outside profit or loss. Deferred tax items are recognized in correlation to the underlying transaction either in OCI or directly in equity.

Tax benefits acquired as part of a business combination, but not satisfying the criteria for separate recognition at that date, are recognized subsequently if new information about facts and circumstances change. The adjustment is either treated as a reduction in goodwill (as long as it does not exceed goodwill) if it was incurred during the measurement period or recognized in profit or loss.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**ac. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Tangguhan (lanjutan)

Grup melakukan saling hapus aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan jika dan hanya jika memiliki hak yang berkekuatan hukum untuk saling hapus aset pajak kini dan liabilitas pajak kini dan aset pajak tangguhan dan liabilitas pajak tangguhan terkait dengan pajak penghasilan yang dikenakan oleh otoritas perpajakan yang sama atas baik entitas kena pajak yang sama atau entitas kena pajak yang berbeda yang bermaksud untuk menyelesaikan liabilitas dan aset pajak kini secara neto, atau untuk merealisasikan aset dan menyelesaikan liabilitas secara bersamaan, pada setiap periode masa depan di mana jumlah liabilitas atau aset pajak tangguhan yang signifikan diharapkan untuk diselesaikan atau dipulihkan.

Pajak Pertambahan Nilai

Pendapatan, beban-beban dan aset-aset diakui neto atas jumlah PPN kecuali:

- PPN yang muncul dari pembelian aset atau jasa yang tidak dapat dikreditkan, yang dalam hal ini PPN diakui sebagai bagian dari biaya perolehan aset atau sebagai bagian dari item beban-beban yang terkait; dan
- Piutang dan utang yang disajikan termasuk dengan jumlah PPN.

Jumlah PPN neto yang diajukan untuk direstitusi, atau terutang kepada, kantor pajak termasuk sebagai bagian dari aset atau liabilitas pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ac. Taxation (continued)**

Deferred Tax (continued)

The Group offsets deferred tax assets and deferred tax liabilities if and only if it has a legally enforceable right to set off current tax assets and current tax liabilities and the deferred tax assets and deferred tax liabilities relate to income taxes levied by the same taxation authority on either the same taxable entity or different taxable entities which intend either to settle current tax liabilities and assets on a net basis, or to realise the assets and settle the liabilities simultaneously, in each future period in which significant amounts of deferred tax liabilities or assets are expected to be settled or recovered.

Value Added Tax

Revenue, expenses and assets are recognized net of the amount of VAT except:

- Where the VAT incurred on a purchase of assets or services is not recoverable, in which case the VAT is recognized as part of the cost of acquisition of the asset or as part of the expense item as applicable; and
- Receivables and payables that are stated with the amount of VAT included.

The net amount of VAT which is claimed for restitution from, or payable to, the taxation authorities is included as part of assets or liabilities in the consolidated statement of financial position.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**ac. Perpajakan (lanjutan)**

Pajak Final

Sesuai peraturan perpajakan di Indonesia, pajak final dikenakan atas nilai bruto transaksi, dan tetap dikenakan walaupun atas transaksi tersebut pelaku transaksi mengalami kerugian.

Pajak final tidak termasuk dalam lingkup yang diatur oleh PSAK 46: Pajak Penghasilan.

**ad. Laba per saham**

Labanya per saham dihitung berdasarkan rata-rata tertimbang jumlah saham yang beredar selama periode yang bersangkutan.

Perusahaan tidak mempunyai efek berpotensi saham biasa yang bersifat dilutif pada tanggal 31 Desember 2023.

**ae. Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim**

Grup mempertimbangkan hal-hal terkait perubahan iklim dalam estimasi dan asumsi, jika diperlukan. Penilaian ini mencakup berbagai kemungkinan dampak terhadap Grup tersebut karena risiko fisik dan transisi. Meskipun Grup yakin model bisnis dan produknya akan tetap dapat bertahan setelah transisi ke perekonomian rendah karbon, hal-hal terkait perubahan iklim meningkatkan ketidakpastian dalam estimasi dan asumsi yang mendasari beberapa item dalam laporan keuangan. Meskipun risiko terkait perubahan iklim saat ini mungkin tidak berdampak signifikan terhadap pengukuran, Grup terus memantau dengan cermat perubahan dan perkembangan yang relevan, seperti undang-undang baru terkait perubahan iklim. Hal-hal dan pertimbangan yang paling terkena dampak langsung dari permasalahan terkait perubahan iklim adalah:

- Masa manfaat aset tetap. Ketika menelaah nilai sisa dan perkiraan masa manfaat aset, Grup mempertimbangkan hal-hal terkait perubahan iklim, seperti perundang-undangan dan peraturan terkait perubahan iklim yang mungkin membatasi penggunaan aset atau memerlukan belanja modal yang signifikan (Catatan 2q).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ac. Taxation (continued)**

Final Tax

In accordance with the tax regulation in Indonesia, final tax is applied to the gross value of transactions, even when the parties carrying the transaction recognizing losses.

Final tax is scoped out from PSAK 46: Income Tax.

**ad. Earnings per share**

Earnings per share is computed based on the weighted average number of issued and fully paid shares during the period.

The Company has no outstanding dilutive potential ordinary shares as of December 31, 2023.

**ae. Climate-related matters**

The Group considers climate-related matters in estimates and assumptions, where appropriate. This assessment includes a wide range of possible impacts on the Group due to both physical and transition risks. Even though the Group believes its business model and products will still be viable after the transition to a low-carbon economy, climate-related matters increase the uncertainty in estimates and assumptions underpinning several items in the financial statements. Even though climate-related risks might not currently have a significant impact on measurement, the Group is closely monitoring relevant changes and developments, such as new climate-related legislation. The items and considerations that are most directly impacted by climate-related matters are:

- Useful life of fixed assets. When reviewing the residual values and expected useful lives of assets, the Group considers climate-related matters, such as climate-related legislation and regulations that may restrict the use of assets or require significant capital expenditures (Note 2q).

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**2. IKHTISAR INFORMASI KEBIJAKAN AKUNTANSI  
MATERIAL (lanjutan)**

**ae. Hal-hal yang berkaitan dengan perubahan iklim (lanjutan)**

- Penurunan nilai aset non-keuangan. Nilai pakai dapat dipengaruhi dalam beberapa cara yang berbeda khususnya oleh risiko transisi, seperti undang-undang dan peraturan terkait perubahan iklim dan perubahan permintaan terhadap produk-produk Grup. Meskipun Grup telah menyimpulkan bahwa tidak ada asumsi terkait perubahan iklim yang menjadi asumsi utama dalam pengujian goodwill pada tahun 2023, Grup mempertimbangkan ekspektasi peningkatan biaya emisi, peningkatan permintaan barang yang dijual oleh UPK terkait, dan kenaikan biaya yang harus dibayar terhadap persyaratan pendauran yang lebih ketat dalam prakiraan arus kas dalam menilai jumlah nilai pakai.
- Pengukuran nilai wajar. Aset yang dicatat pada nilai wajar, Grup mempertimbangkan dampak risiko fisik dan transisi dan apakah investor akan mempertimbangkan risiko tersebut dalam penilaiannya. Grup meyakini bahwa saat ini Grup tidak terkena risiko fisik yang parah, namun meyakini bahwa investor, sampai batas tertentu, akan mempertimbangkan dampak risiko transisi dalam penilaian mereka, seperti peningkatan persyaratan efisiensi energi bangunan karena undang-undang dan peraturan terkait perubahan iklim, serta meningkatnya permintaan penyewa terhadap bangunan rendah emisi (Catatan 40).
- Liabilitas purnaoperasi. Dampak undang-undang dan peraturan terkait perubahan iklim dipertimbangkan dalam memperkirakan waktu dan biaya di masa depan dalam penghentian salah satu fasilitas manufaktur Grup (Catatan 2w).

**2. SUMMARY OF MATERIAL ACCOUNTING  
POLICIES INFORMATION (continued)**

**ae. Climate-related matters (continued)**

- *Impairment of non financial assets. The value-in-use may be impacted in several different ways by transition risk in particular, such as climate-related legislation and regulations and changes in demand for the Group's products. Even though the Group has concluded that no single climate-related assumption is a key assumption for the 2023 test of goodwill, the Group considered expectations for increased costs of emissions, increased demand for goods sold by the Group's relevant CGU, and cost increases due to stricter recycling requirements in the cash-flow forecasts in assessing value-in-use amounts.*
- *Fair value measurement. For assets carried at fair value, the Group considers the effect of physical and transition risks and whether investors would consider those risks in their valuation. The group believes it is not currently exposed to severe physical risks, but believes that investors, to some extent, would consider impacts of transition risks in their valuation, such as increasing requirements for energy efficiency of buildings due to climate-related legislation and regulations as well as tenants' increasing demands for low-emission buildings (Note 40).*
- *Decommissioning liability. The impact of climate-related legislation and regulations is considered in estimating the timing and future costs of decommissioning one of the Group's manufacturing facilities (Note 2w).*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN**

Penyusunan laporan keuangan konsolidasian Grup mengharuskan manajemen untuk membuat pertimbangan, estimasi dan asumsi yang mempengaruhi jumlah yang dilaporkan dari pendapatan, beban, aset dan liabilitas, dan pengungkapan atas liabilitas kontinjensi, pada akhir periode pelaporan.

Ketidakpastian mengenai asumsi dan estimasi tersebut dapat mengakibatkan penyesuaian material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas yang terpengaruh pada periode pelaporan berikutnya.

**Pertimbangan**

Pertimbangan berikut ini dibuat oleh manajemen dalam rangka penerapan kebijakan akuntansi Grup yang memiliki pengaruh paling signifikan atas jumlah yang diakui dalam laporan keuangan konsolidasian:

Perpajakan

Ketidakpastian atas interpretasi dari peraturan pajak yang kompleks, perubahan peraturan pajak dan jumlah dan timbulnya penghasilan kena pajak di masa depan, dapat menyebabkan penyesuaian di masa depan atas penghasilan dan beban pajak yang telah dicatat.

Pertimbangan juga dilakukan dalam menentukan penyisihan atas pajak penghasilan badan. Terdapat transaksi dan perhitungan tertentu yang penentuan pajak akhirnya adalah tidak pasti sepanjang kegiatan usaha normal.

Grup mengakui liabilitas atas pajak penghasilan badan berdasarkan estimasi apakah akan terdapat tambahan pajak penghasilan badan. Penjelasan lebih rinci mengenai pajak penghasilan diungkapkan dalam Catatan 21c.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

The preparation of the Group's consolidated financial statements requires management to make judgments, estimates and assumptions that affect the reported amounts of revenues, expenses, assets and liabilities, and the disclosures of contingent liabilities, at the end of the reporting periods.

Uncertainty about these assumptions and estimates could result in outcomes that may require material adjustments to the carrying amounts of the assets and liabilities affected in future periods.

**Judgments**

The following judgments are made by management in the process of applying the Group's accounting policies that have the most significant effects on the amounts recognized in the consolidated financial statements:

Taxes

Uncertainties exist with respect to the interpretation of complex tax regulations, changes in tax laws, and the amount and timing of future taxable income, could necessitate future adjustments to tax income and expense already recorded.

Judgment is also involved in determining the provision for corporate income tax. There are certain transactions and computation for which the ultimate tax determination is uncertain during the ordinary course of business.

The Group recognizes liabilities for expected corporate income tax issues based on estimates of whether additional corporate income tax will be due. Further details regarding taxation are disclosed in Note 21c.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI, ESTIMASI, DAN  
ASUMSI SIGNIFIKAN**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Tagihan dan Keberatan atas Hasil Pemeriksaan Pajak

Berdasarkan peraturan perpajakan yang berlaku saat ini, manajemen mempertimbangkan apakah jumlah yang tercatat dalam akun di atas dapat dipulihkan dan dikembalikan oleh Kantor Pajak. Penjelasan lebih lanjut atas akun ini diungkapkan pada Catatan 21.

Opsi pembaruan dan penghentian dalam kontrak - Grup sebagai penyewa

Grup memiliki beberapa kontrak sewa yang mencakup opsi perpanjangan dan terminasi. Grup menerapkan pertimbangan dalam mengevaluasi apakah secara wajar akan menggunakan opsi untuk memperbarui atau mengakhiri sewa. Grup mempertimbangkan semua faktor relevan yang membentuk insentif ekonomi untuk melakukan pembaruan atau penghentian. Setelah tanggal permulaan. Grup menilai kembali masa sewa jika terdapat peristiwa atau perubahan signifikan yang berada dalam kendalinya dan mempengaruhi kemampuannya untuk menjalankan atau tidak menggunakan opsi untuk memperbarui atau untuk mengakhiri.

Grup menentukan masa sewa sesuai masa sewa yang tidak dapat terbatalkan. ditambah dengan setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk memperpanjang sewa jika cukup pasti untuk mengeksekusi. atau setiap periode yang dicakup oleh opsi untuk menghentikan sewa. jika cukup pasti untuk tidak mengeksekusi opsi tersebut.

Pengungkapan lebih lanjut mengenai sewa terdapat pada Catatan 12.

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS,  
ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

**Judgments (continued)**

Claims for Tax Refund and Tax Assessments Under Appeal

Based on the tax regulations currently enacted, the management judged if the amounts recorded under the above account are recoverable and refundable by the Tax Office. Further explanations regarding this account are provided in Note 21.

Lease term of contracts with renewal and termination options - the Group as lessee

The Group has several lease contracts that include extension and termination options. The Group applies judgement in evaluating whether it is reasonably certain to exercise the option to renew or terminate the lease or not. The Group considers all relevant factors that create an economic incentive for them to exercise either the renewal or termination. After the commencement date, the Group reassesses the lease term if there is a significant event or change in circumstances that is within its control and affects its ability to exercise or not to exercise the option to renew or to terminate.

The Group determines the lease term as the non-cancellable term of the lease, together with any periods covered by an option to extend the lease if it is reasonably certain to be exercised, or any periods covered by an option to terminate the lease, if it is reasonably certain not to be exercised.

Further disclosures of leases are made in Note 12.

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI, ESTIMASI, DAN ASUMSI SIGNIFIKAN**

**Pertimbangan (lanjutan)**

Pertimbangan atas Suku Bunga Pinjaman Inkremental dari Suatu Sewa

Grup tidak dapat langsung menentukan tingkat bunga implisit dalam sewa, oleh karena itu, Grup menggunakan SBPI untuk mengukur liabilitas sewa. SBPI adalah tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup untuk meminjam dalam jangka waktu yang sama.

Dengan demikian, SBPI mencerminkan tingkat bunga yang harus dibayar oleh Grup, yang perlu diestimasi ketika tidak ada tingkat bunga yang dapat langsung diamati (seperti untuk entitas dalam Grup yang tidak melakukan transaksi pembiayaan) atau ketika tingkat bunga perlu disesuaikan untuk mencerminkan persyaratan dan kondisi sewa.

Grup menetapkan estimasi SBPI menggunakan input yang dapat diamati (seperti suku bunga pasar) jika tersedia dan diharuskan untuk membuat estimasi spesifik untuk entitas tertentu jika diperlukan.

Revaluasi tanah

Grup mengukur tanah pada jumlah revaluasi dengan perubahan pada nilai wajar diakui dalam penghasilan komprehensif lain. Nilai wajar tanah ditentukan berdasarkan bukti pasar dengan menggunakan harga yang dapat diperbandingkan dan disesuaikan terhadap faktor-faktor pasar spesifik seperti sifat, lokasi dan kondisi aset tersebut.

**Estimasi dan Asumsi**

Asumsi utama masa depan dan sumber utama estimasi ketidakpastian lain pada tanggal pelaporan yang memiliki risiko signifikan bagi penyesuaian yang material terhadap nilai tercatat aset dan liabilitas untuk tahun berikutnya diungkapkan di bawah ini. Grup mendasarkan asumsi dan estimasi pada parameter yang tersedia pada saat laporan keuangan konsolidasian disusun. Asumsi dan situasi mengenai perkembangan masa depan mungkin berubah akibat perubahan pasar atau situasi di luar kendali Grup. Perubahan tersebut dicerminkan dalam asumsi terkait pada saat terjadinya.

**3. SIGNIFICANT ACCOUNTING JUDGMENTS, ESTIMATES AND ASSUMPTIONS**

**Judgments (continued)**

Judgement of the Incremental Borrowing Rate of a Lease

The Group cannot readily determine the interest rate implicit in the lease, therefore, it uses its IBR to measure lease liabilities. The IBR is the rate of interest that the Group would have to pay to borrow over a similar term.

The IBR therefore reflects interest the Group would have to pay, which requires estimation when no observable rates are available (such as for entities within the Group that do not enter into financing transactions) or when they need to be adjusted to reflect the terms and conditions of the lease.

The Group estimates the IBR using observable inputs (such as market interest rates) when available and is required to make certain entity-specific estimates as necessary.

Revaluation of land

The Group measures land at revalued amounts with changes in fair value being recognized in other comprehensive income. Land was valued by reference to market-based evidence, using comparable prices adjusted for specific market factors such as nature, location and condition of the asset.

**Estimates and Assumptions**

The key assumptions concerning the future and other key sources of uncertainty of estimation at the reporting date that have a significant risk of causing material adjustments to the carrying amounts of assets and liabilities within the next financial year are disclosed below. The Group based its assumptions and estimates on parameters available when the consolidated financial statements were prepared. Existing circumstances and assumptions about future developments may change due to market changes or circumstances arising beyond the control of the Group. Such changes are reflected in the assumptions when they occur.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI, ESTIMASI DAN  
ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Usaha

Grup menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang usaha menggunakan pendekatan yang disederhanakan dari KKE. Matriks provisi digunakan untuk menghitung KKE untuk piutang usaha dan lain-lain. Tarif provisi didasarkan pada hari tunggakan untuk pengelompokan berbagai segmen pelanggan yang memiliki pola kerugian serupa.

Matriks provisi awalnya didasarkan pada riwayat tingkat kerugian pelanggan. Grup akan melakukan penyesuaian pengalaman kerugian historis dengan informasi berwawasan ke depan. Misalnya, jika prakiraan kondisi ekonomi yang terkait erat dengan riwayat tingkat kerugian diperkirakan akan memburuk pada tahun berikutnya yang dapat menyebabkan peningkatan jumlah gagal bayar pada sektor-sektor pelanggan beroperasi, riwayat tingkat kerugian disesuaikan. Pada setiap tanggal pelaporan, riwayat tingkat gagal bayar yang diamati diperbarui dan perubahan dalam estimasi berwawasan ke depan dianalisis.

Evaluasi atas korelasi antara tingkat gagal bayar yang diamati secara historis, prakiraan kondisi ekonomi dan KKE, adalah estimasi signifikan. Jumlah KKE sensitif terhadap perubahan keadaan dan prakiraan kondisi ekonomi. Kerugian kredit historis Grup dan perkiraan kondisi ekonomi mungkin tidak mewakili tingkat gagal bayar pelanggan aktual di masa depan.

Nilai tercatat dari piutang usaha Grup dan penyisihan untuk penurunan nilai dijelaskan lebih lanjut atas piutang usaha diungkapkan dalam Catatan 6.

Penyisihan Nilai Realisasi Neto Persediaan

Penyisihan nilai realisasi neto persediaan diestimasi berdasarkan fakta dan situasi yang tersedia, termasuk namun tidak terbatas kepada, kondisi fisik persediaan yang dimiliki, harga jual pasar, estimasi biaya penyelesaian dan estimasi biaya yang timbul untuk penjualan. Penyisihan dievaluasi kembali dan disesuaikan jika terdapat tambahan informasi yang mempengaruhi jumlah yang diestimasi. Penjelasan lebih rinci mengenai persediaan diungkapkan dalam Catatan 7.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND SIGNIFICANT  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Allowance for Impairment of Trade Receivables

The Group estimates impairment allowance for trade receivables using simplified approach of ECL. A provision matrix is used to determine ECL for trade and other receivables, where the provision rates are based on days past due for groupings of various customer segments that have similar loss patterns.

The provision matrix is initially based on the customers historical observed loss rates. The Group will adjust the historical observed loss experience with forward-looking information. For instance, if forecast economic conditions closely related to the historical observed loss are expected to deteriorate over the next year which can lead to an increased number of defaults in the sectors where customers are operating, the historical losses are adjusted accordingly. At every reporting date, the historical observed loss rates are updated and changes in the forward-looking estimates are analyzed.

The assessment of the correlation between historical observed loss rates, forecast economic conditions and ECLs, is a significant estimate. The amount of ECLs is sensitive to changes in circumstances and of forecast economic conditions. The Group's historical observed loss rate and forecast of economic conditions may not be representative of customer's actual default in the future.

The carrying amount of the Group's trade receivables and allowance for impairment detailed on trade receivables are disclosed in Note 6.

Allowance for Net Realisable Value of Inventories

Allowance for net realizable value of inventories is estimated based on the best available facts and circumstances, including but not limited to, the inventories' own physical conditions, their market selling prices, estimated costs of completion and estimated costs to be incurred for their sales. The allowance is re-evaluated and adjusted as additional information received affects the amount estimated. Further details regarding inventories are disclosed in Note 7.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Penyisihan atas Penurunan Nilai Piutang Plasma

Seperti diungkapkan dalam Catatan 2n, piutang plasma merupakan biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma. Grup menetapkan estimasi penyisihan penurunan nilai piutang plasma dengan menggunakan pendekatan umum KKE karena piutang ini mengandung komponen pembiayaan yang signifikan.

Jika belum ada peningkatan risiko kredit yang signifikan sejak awal kontrak, penyisihan didasarkan pada KKE 12 bulan. Grup menetapkan piutang dari masing-masing proyek plasma mengalami peningkatan risiko kredit yang signifikan ketika biaya pengembangan aktual per hektar melebihi biaya pengembangan per hektar yang disepakati dalam perjanjian kredit antara koperasi dan kreditur. Pada titik ini, Grup menetapkan estimasi kerugian penurunan nilai menggunakan KKE sepanjang umurnya.

Grup menghitung KKE sepanjang umurnya berdasarkan perkiraan kekurangan kas, didiskontokan dengan perkiraan SBE awal. Kekurangan kas adalah selisih antara arus kas yang menjadi hak Grup sesuai kontrak dan arus kas yang diharapkan akan diterima Grup, yang diestimasi berdasarkan pendapatan dari perkebunan plasma dikurangi biaya penjualan, pembayaran pokok dan bunga ke bank. Input utama yang digunakan untuk estimasi ini adalah harga jual TBS, hasil produksi perkebunan plasma, biaya produksi dan tingkat inflasi. Penyisihan ini dievaluasi ulang dan disesuaikan dengan tambahan informasi yang diterima pada setiap tanggal pelaporan.

Nilai tercatat atas piutang plasma Grup dan penyisihan atas KKE dan amortisasi SBE yang lebih rinci atas piutang plasma diungkapkan dalam Catatan 10.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Allowance for Impairment of Plasma Receivables

As discussed in Note 2n, plasma receivables represents disbursements made for the costs to develop plasma plantations. The Group estimates allowance for impairment of plasma receivables using general approach of ECL as these receivables contain significant financing component.

When there has not been significant increase in credit risk since origination, the allowance is based on the 12-months' ECL. The Group primarily determined a receivable from individual plasma project has significant increase in credit risk when the actual development cost per hectare is exceeding the agreed development cost per hectare as stated in the credit agreement between the cooperatives and the creditor. At this point, the Group estimates the impairment loss using lifetime ECLs.

The Group calculates lifetime ECL based on the expected cash shortfalls, discounted at an approximation of the original EIR. A cash shortfall is the difference between the cash flows that are due to the Group in accordance with the contract and the cash flows that the Group expects to receive, which is estimated based on the revenues from the plasma plantations deducted with the costs of sales, principal and interest payments to the bank. The key inputs applied for this estimation are the selling price of FFB, production yield of the plasma plantations, production costs and inflation rate. These provisions are re-evaluated and adjusted as additional information is received at each reporting date.

The carrying amount of the Group's plasma receivables and allowance for ECL and original EIR amortization detailed on plasma receivables are disclosed in Note 10.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI, ESTIMASI DAN ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Aset Pajak Tangguhan

Aset pajak tangguhan diakui atas seluruh rugi fiskal yang belum digunakan sepanjang besar kemungkinannya bahwa penghasilan kena pajak akan tersedia sehingga rugi fiskal tersebut dapat digunakan. Estimasi signifikan digunakan oleh manajemen dalam menentukan jumlah aset pajak tangguhan yang dapat diakui, berdasarkan saat penggunaan dan tingkat penghasilan kena pajak dan strategi perencanaan pajak masa depan.

Penurunan Nilai Aset Non-keuangan

Penurunan nilai terjadi pada saat nilai tercatat aset atau UPK melebihi jumlah terpulihkannya, yaitu yang lebih tinggi antara nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakainya. Nilai wajar dikurangi biaya untuk menjual dan nilai pakai diestimasi berdasarkan arus kas masa depan neto yang didiskontokan ke nilai kini dengan menggunakan tingkat diskonto sebelum pajak yang menggambarkan penilaian pasar kini dari nilai waktu uang dan risiko spesifik atas UPK terkait.

Jumlah terpulihkan paling sensitif terhadap tingkat diskonto yang digunakan untuk model arus kas neto yang didiskontokan seperti halnya dengan arus kas masuk masa depan yang diharapkan dan tingkat pertumbuhan yang digunakan untuk tujuan ekstrapolasi.

Penyusutan Aset Tetap

Biaya perolehan aset tetap, termasuk tanaman produktif, disusutkan dengan menggunakan metode garis lurus berdasarkan taksiran masa manfaat ekonomisnya. Manajemen mengestimasi masa manfaat ekonomis aset tetap antara 3 sampai dengan 50 tahun, yang merupakan umur yang secara umum diharapkan dalam industri Grup menjalankan bisnisnya. Perubahan tingkat pemakaian dan perkembangan teknologi dapat mempengaruhi masa manfaat ekonomis dan nilai sisa aset, dan karenanya beban penyusutan masa depan mungkin direvisi.

Penjelasan lebih rinci atas aset tetap diungkapkan dalam Catatan 13.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND SIGNIFICANT ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Deferred Tax Assets

Deferred tax assets are recognized for all unused tax losses to the extent that it is probable that taxable profit will be available against which the losses can be utilized. Significant management estimates are required to determine the amount of deferred tax assets that can be recognized, based upon the likely timing and the level of future taxable profits together with future tax planning strategies.

Impairment of Non-financial Assets

An impairment exists when the carrying value of an asset or CGU exceeds its recoverable amount, which is the higher of its fair value less costs to sell and its value in use. The fair value less costs to sell and the value in use are estimated based on the net future cash flows discounted to their present values using a pre-tax discount rate that reflects current market assessments of the time value of money and the specific risks to the related CGU.

The recoverable amount is most sensitive to the discount rate used for the discounted cash flow model as well as the expected net future cash inflows and the growth rate used for extrapolation purposes.

Depreciation of Fixed Assets

The costs of fixed assets, including bearer plants, are depreciated on a straight-line basis over their estimated useful lives. Management estimates the useful lives of these fixed assets to be within 3 to 50 years, which are common life expectancies applied in the industries where the Group conducts its businesses. Changes in the expected level of usage and technological development could impact the economic useful lives and the residual values of these assets, and therefore future depreciation charges could be revised.

Further details on fixed asset are disclosed in Note 13.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**3. PERTIMBANGAN AKUNTANSI, ESTIMASI DAN  
ASUMSI SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**Estimasi dan Asumsi (lanjutan)**

Program Pensiun dan Imbalan Kerja

Pengukuran liabilitas imbalan kerja Grup bergantung pada pemilihan asumsi yang digunakan oleh aktuaris independen dalam menghitung jumlah-jumlah tersebut. Asumsi tersebut termasuk antara lain, tingkat diskonto, tingkat kenaikan gaji tahunan, tingkat pengunduran diri karyawan tahunan, tingkat kecacatan, umur pensiun dan tingkat kematian. Keuntungan atau kerugian aktuarial yang timbul dari penyesuaian dan perubahan dalam asumsi-asumsi aktuarial diakui secara langsung pada laporan posisi keuangan konsolidasian dengan debit atau kredit ke saldo laba melalui PKL dalam periode terjadinya.

Sementara Grup berkeyakinan bahwa asumsi tersebut adalah wajar dan sesuai, perbedaan signifikan pada hasil aktual atau perubahan signifikan dalam asumsi yang ditetapkan Grup dapat mempengaruhi secara material liabilitas diestimasi atas pensiun dan imbalan kerja dan beban imbalan kerja neto.

Penjelasan lebih rinci atas imbalan kerja diungkapkan dalam Catatan 24.

Aset biologis

Grup mengadopsi pendekatan pendapatan menggunakan model arus kas yang didiskontokan untuk mengukur nilai wajar dari produksi tebu dan hutan tanaman. Input signifikan yang diterapkan untuk menentukan nilai wajar aset biologis ini termasuk harga jual yang diproyeksikan, tingkat produksi, tingkat diskonto, tingkat inflasi dan nilai tukar.

Jumlah perubahan dalam nilai wajar dari aset biologis ini akan berbeda jika ada perubahan pada input yang digunakan, dan akan mempengaruhi laba rugi Grup dan ekuitas. Nilai tercatat dari aset biologis Grup yang diukur pada Level 2 dalam hirarki nilai wajar dijelaskan lebih rinci pada Catatan 8. Input kunci yang diterapkan dalam penentuan nilai wajar aset biologis termasuk analisis sensitivitas, diungkapkan dan dijelaskan lebih lanjut dalam Catatan 40.

**3. JUDGMENTS, ESTIMATES AND SIGNIFICANT  
ASSUMPTIONS (continued)**

**Estimates and Assumptions (continued)**

Pension Plan and Employee Benefits

The measurement of the Group's employee benefits liability is dependent on its selection of certain assumptions used by the independent actuaries in calculating such amounts. Those assumptions include among others, discount rates, future annual salary increase, annual employee turn-over rate, disability rate, retirement age and mortality rate. Actuarial gains or losses arising from experience adjustments and changes in actuarial assumptions are recognized immediately in the consolidated statement of financial position with a corresponding debit or credit to retained earnings through OCI the the period in which they occur.

While the Group believes that its assumptions are reasonable and appropriate, significant differences in the Group's actual experiences or significant changes in the Group's assumptions may materially affect its estimated liabilities for pension and employee benefits and net employee benefits expense.

Further details on employee benefits are disclosed in Note 24.

Biological assets

The Group adopts income approach using discounted cash flow models to measure the fair value of the cane produce and timber plantations. Significant inputs applied to determine the fair value of these biological assets include the projected selling prices, production yields, discount rate, inflation rate and exchange rates.

The amount of changes in fair values of these biological assets would differ if there are changes to the inputs used, and would affect the Group's profit or loss and equity. The carrying amount of the Group's biological assets measured at Level 2 in fair value hierarchy is detailed on Note 8. The key inputs applied in the determination of fair value of biological assets including a sensitivity analysis, are disclosed and further explained in Note 40.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. KAS DAN SETARA KAS**

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
<b>Kas</b>	<b>6.341.729.928</b>	<b>6.848.636.781</b>	<b>3.406.122.726</b>	<b>Cash</b>
Bank				Banks
Rupiah				Rupiah
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u> (Catatan 36a)				<u>Government-related entities</u> (Note 36a)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.973.008.502.766	4.221.687.392.269	4.004.489.821.676	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	308.304.025.008	58.752.653.359	33.235.669.116	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	73.032.366.587	523.355.693.557	448.405.124.788	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	32.872.190.258	-	-	Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia
PT Bank Riau Kepri	13.566.494.121	14.048.945.438	483.842.743	PT Bank Riau Kepri
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	8.949.719.012	37.568.800.790	15.908.285.961	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Raya Indonesia	2.268.959.891	83.348.682.679	277.350.192.339	PT Bank Raya Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah	569.470.083	1.370.960.852	559.612.865	PT Bank Pembangunan Daerah Sulawesi Tengah
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	204.827.826	151.499.413	126.346.230	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat	103.074.352	103.136.785	103.223.412	PT Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	1.084.428	1.975.673	20.124.117	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
<u>Entitas pihak ketiga</u>				<u>Third party entities</u>
PT Bank Victoria International Tbk	11.032.749.985	10.819.575.555	10.610.603.825	PT Bank Victoria International Tbk
PT Bank UOB Indonesia	739.774.871	14.719.843.513	14.677.351.348	PT Bank UOB Indonesia
PT Bank Permata Tbk	-	21.089.467.613	21.034.549.793	PT Bank Permata Tbk
PT Bank DBS Indonesia	-	18.333.851.104	15.114.266.153	PT Bank DBS Indonesia
PT Maybank Indonesia Tbk	-	-	257.500	PT Maybank Indonesia Tbk
PT Bank Bukopin Tbk	-	-	16.465.433	PT Bank Bukopin Tbk
Dolar Amerika Serikat				United States Dollar
<u>Entitas berelasi dengan Pemerintah</u> (Catatan 36a)				<u>Government-related entities</u> (Note 36a)
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	668.797.217.593	778.940.823.526	292.063.403.358	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	1.697.794.397	3.261.980	12.836.442	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	12.453.969	20.676.197	12.366.666	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
<u>Entitas pihak ketiga</u>				<u>Third party entity</u>
PT Bank DBS Indonesia	114.224.250	-	74.813.315	PT Bank DBS Indonesia
<b>Total bank</b>	<b>3.095.274.929.397</b>	<b>5.784.317.240.303</b>	<b>5.134.299.157.080</b>	<b>Total banks</b>

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**4. KAS DAN SETARA KAS (lanjutan)**

**4. CASH AND CASH EQUIVALENTS (continued)**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Deposito berjangka Rupiah				Time deposits Rupiah
Entitas berelasi dengan Pemerintah (Catatan 36a)				Government-related entities (Note 36a)
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	56.051.527.927	4.500.000.000	404.500.000.000	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia Tbk	36.140.000.000	187.000.000.000	15.000.000.000	PT Bank Syariah Indonesia Tbk
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	-	66.100.000.000	40.000.000.000	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Mandiri Taspen (Persero) Tbk	-	65.000.000.000	-	PT Bank Mandiri Taspen (Persero) Tbk
PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk	-	40.470.825.523	15.000.000.000	PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk	-	-	50.000.000.000	PT Bank Negara Indonesia Syariah (Persero) Tbk
PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara	-	-	20.000.000.000	PT Bank Pembangunan Daerah Sumatera Utara
<b>Total deposito berjangka</b>	<b>92.191.527.927</b>	<b>363.070.825.523</b>	<b>544.500.000.000</b>	<b>Total time deposits</b>
<b>Total</b>	<b>3.193.808.187.252</b>	<b>6.154.236.702.607</b>	<b>5.682.205.279.806</b>	<b>Total</b>

Rekening di bank memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka dalam mata uang Rupiah berkisar sebagai berikut:

Accounts in banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. The annual interest rates of the time deposits in Rupiah are ranging as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Tingkat suku bunga	2% - 6.51%	2% - 6.15%	2% - 8%	Interest rate

Seluruh kas telah diasuransikan terhadap risiko kehilangan dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

The entire cash are insured, against losses with coverage amount as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Nilai pertanggungan	8.629.191.155	9.958.577.740	13.390.077.740	Blanket policies amount

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Grup.

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses on the risk faced by the Group.

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**5. KAS DAN DEPOSITO YANG DIBATASI  
PENGGUNAANNYA**

**5. RESTRICTED CASH AND TIME DEPOSIT**

		Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)				
		31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021		
Bank						Banks
Rupiah						Rupiah
	<u>Entitas berelasi dengan</u>					<u>Government-related entities</u>
	<u>Pemerintah (Catatan 36b)</u>					<u>(Note 36b)</u>
	PT Bank Mandiri					PT Bank Mandiri
	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	187.280.241.431	16.085.484.320	13.070.489.644		PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	166.031.391.629	160.208.604.830	116.551.454.905		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	-	1.904.190.510	1.904.190.508		PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
	<u>Entitas pihak ketiga</u>					<u>Third party entity</u>
	PT Bank DBS Indonesia	-	3.241.518.558	2.896.182.142		PT Bank DBS Indonesia
Deposito berjangka						Time deposits
Rupiah						Rupiah
	<u>Entitas berelasi dengan</u>					<u>Government-related entities</u>
	<u>Pemerintah (Catatan 36b)</u>					<u>(Note 36b)</u>
	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.000.000.000	-	-		PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
	<u>Entitas pihak ketiga</u>					<u>Third party entity</u>
	PT Bank DBS Indonesia	-	3.028.160.805	3.009.856.410		PT Bank DBS Indonesia
<b>Total</b>		<b>361.311.633.060</b>	<b>184.467.959.023</b>	<b>137.432.173.609</b>		<b>Total</b>

Seluruh saldo kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya merupakan kas dan deposito di bank dalam Rupiah yang ditempatkan sebagai pembayaran maupun cadangan untuk pembayaran kewajiban kepada bank dan operasional Grup dan entitas anak.

All restricted cash and time deposits are cash and deposits in banks in Rupiah which are pledged for payments and reserves for payment of obligations to banks and the operations of the Group and its subsidiaries.

Pada tanggal 31 Desember 2023, kas yang dibatasi penggunaannya merupakan rekening bank tertentu Perusahaan yang ditentukan penggunaannya sesuai dengan ketentuan pada perjanjian transformasi keuangan jangka panjang - perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*) (Catatan 23), dan deposito yang dibatasi penggunaannya, merupakan deposito yang ditempatkan oleh PT Prima Medica Nusantara (PMN), Entitas Anak, sebesar Rp8.000.000.000 di PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, yang digunakan sebagai jaminan atas utang bank jangka pendek (Catatan 17).

As of December 31, 2023, restricted cash represents certain bank accounts of the Company, which the use of the bank accounts has been determined in accordance with the long-term financial transformation agreement - the Master Amendment Agreement (MAA) (Note 23), and restricted time deposit is deposit that is placed by PT Prima Medica Nusantara (PMN), a Subsidiary, amounting to Rp8.000.000.000 in PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, and used as a collateral for short-term bank loans (Note 17).

Rekening di bank yang dibatasi penggunaannya memiliki tingkat bunga mengambang sesuai dengan tingkat penawaran pada masing-masing bank. Untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 tingkat suku bunga tahunan deposito berjangka yang dibatasi penggunaannya dalam mata uang Rupiah adalah 2,7%.

Accounts in restricted banks earn interest at floating rates based on the offered rate from each bank. For the year ended December 31, 2023 the annual interest rates of the restricted time deposits in Rupiah is 2.7%.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG USAHA**

a. Rincian piutang usaha berdasarkan pelanggan:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Pihak ketiga	175.654.324.886	226.856.652.483	145.143.627.858	Third parties
Penyisihan penurunan nilai	(35.192.564.705)	(29.818.728.689)	(23.713.498.706)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	140.461.760.181	197.037.923.794	121.430.129.152	Third parties - net
Pihak-pihak berelasi	2.539.280.574.142	2.202.553.167.167	2.649.228.438.901	Related parties
Penyisihan penurunan nilai	(32.981.122.855)	(25.822.570.253)	(25.890.011.176)	Allowance for impairment
Pihak berelasi - neto (Catatan 36c)	2.506.299.451.287	2.176.730.596.914	2.623.338.427.725	Third parties – net (Note 36c)
<b>Neto</b>	<b>2.646.761.211.468</b>	<b>2.373.768.520.708</b>	<b>2.744.768.556.877</b>	<b>Net</b>

**6. TRADE RECEIVABLES**

a. Detail of trade receivables based on customers:

b. Rincian piutang usaha berdasarkan umur:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Lancar	359.614.799.487	667.120.584.893	372.079.442.898	Current
Telah jatuh tempo:				Past due:
1 - 30 hari	329.492.226.596	293.801.557.955	1.000.851.849.182	1 - 30 days
31 - 90 hari	1.464.236.435.737	609.871.183.386	1.223.961.273.086	31 - 90 days
91 - 365 hari	399.394.112.818	807.481.662.136	134.987.687.185	91 - 365 days
Lebih dari 365 hari	162.197.324.390	51.134.831.280	62.491.814.408	More than 365 days
Sub-total	2.714.934.899.028	2.429.409.819.650	2.794.372.066.759	Sub-total
Penyisihan penurunan nilai	(68.173.687.560)	(55.641.298.942)	(49.603.509.882)	Allowance for impairment
<b>Neto</b>	<b>2.646.761.211.468</b>	<b>2.373.768.520.708</b>	<b>2.744.768.556.877</b>	<b>Net</b>

b. Detail of trade receivables based on aging schedule:

c. Rincian piutang usaha berdasarkan mata uang:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Rupiah	2.648.569.567.094	2.344.345.286.968	2.790.432.637.805	Rupiah
Dolar Amerika Serikat	66.365.331.934	85.064.532.682	3.939.428.954	US Dollar
Total	2.714.934.899.028	2.429.409.819.650	2.794.372.066.759	Total
Penyisihan penurunan nilai	(68.173.687.560)	(55.641.298.942)	(49.603.509.882)	Allowance for impairment
<b>Neto</b>	<b>2.646.761.211.468</b>	<b>2.373.768.520.708</b>	<b>2.744.768.556.877</b>	<b>Net</b>

c. Detail of trade receivables based on currencies:

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**6. PIUTANG USAHA (lanjutan)**

d. Mutasi penyisihan atas kerugian penurunan nilai:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ December 31, 2022 (As restated) (Note 46)
Saldo awal	55.641.298.942	49.603.509.882
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 34)	16.590.535.257	6.037.789.060
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 33)	(4.058.146.639)	-
<b>Saldo Akhir</b>	<b>68.173.687.560</b>	<b>55.641.298.942</b>

Piutang usaha tidak dikenakan bunga dan umumnya dikenakan syarat pembayaran selama 1 sampai dengan 90 hari.

Berdasarkan hasil penelaahan terhadap adanya penurunan nilai pada akhir periode, manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas penurunan nilai piutang usaha di atas cukup untuk menutup kerugian atas penurunan nilai piutang tersebut.

**6. TRADE RECEIVABLES (continued)**

d. Movement of allowance for impairment losses:

	31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ December 31, 2022 (As restated) (Note 46)	
Saldo awal	49.603.509.882	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 34)	6.037.789.060	Allowance for the period (Note 34)
Pemulihan tahun berjalan (Catatan 33)	-	Recovery for the period (Note 33)
<b>Saldo Akhir</b>	<b>55.641.298.942</b>	<b>Ending Balance</b>

Trade receivables are non-interest bearing, and generally on 1 to 90 days term of payment.

Based on the results of review for impairment at the end of the period, the management believes that the above allowance for impairment of trade receivables is sufficient to cover losses from impairment of such receivables.

**7. PERSEDIAAN**

**7. INVENTORIES**

Disajikan kembali (Catatan 46)/  
As Restated (Note 46)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Barang jadi:				Finished goods:
Minyak sawit	534.741.911.222	1.115.265.210.028	698.898.183.212	Crude palm oil
Inti sawit	125.355.647.016	263.600.266.389	126.131.464.660	Palm kernel
Teh	93.145.388.132	85.841.940.235	94.865.720.279	Tea
Karet	83.860.963.043	155.341.290.965	129.869.973.346	Rubber
Minyak inti sawit	53.924.266.518	78.226.713.846	94.044.774.291	Palm Kernel Oil
Tepung inti sawit	23.285.724.574	21.344.153.724	21.378.918.522	Palm Kernel Meal
Gula kristal putih	12.166.812.792	982.683.158.233	-	White Crystal Sugar
Kopi	420.483.152	8.927.668.507	1.174.556.800	Coffee
Tandan buah segar	-	10.872.644.228	4.451.920.897	Palm Oil Shells
Total barang jadi (Catatan 30)	926.901.196.449	2.722.103.046.155	1.170.815.512.007	Total finished goods (Note 30)
Pupuk dan bahan kimia	643.650.461.524	803.404.034.394	339.045.028.828	Fertilizer and chemical material
Bahan pembantu	402.240.151.920	496.654.516.875	259.432.259.201	Supporting materials
Alat kesehatan	2.907.894.250	2.310.984.144	2.130.529.248	Medical devices
Obat-obatan	3.883.315.804	951.150.820	1.157.259.329	Medicine
Total	1.979.583.019.947	4.025.423.732.388	1.772.580.588.613	Total
Penyisihan atas keusangan dan Nilai realisasi neto	(125.468.413.085)	(84.018.098.982)	(14.493.994.733)	Allowance for obsolescence and net realizable value
<b>Neto</b>	<b>1.854.114.606.862</b>	<b>3.941.405.633.406</b>	<b>1.758.086.593.880</b>	<b>Net</b>

Manajemen berkeyakinan bahwa tidak diperlukan penyisihan penurunan nilai persediaan.

Management believes that the allowance for impairment losses of inventory is not required.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**7. PERSEDIAAN (lanjutan)**

Seluruh persediaan telah diasuransikan terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya dengan nilai pertanggungan sebagai berikut:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Nilai pertanggungan	509.400.323.830	411.987.182.546	391.304.904.215	Blanket policies amount

Manajemen berpendapat bahwa jumlah pertanggungan asuransi tersebut adalah cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko yang mungkin dialami Grup.

Inventories were insured against losses from fire and other risks with coverage value, as follows:

Management believes that the insurance coverage is adequate to cover possible losses from such risk if the Group suffered losses for those risk.

Di bawah ini adalah pergerakan penyisihan atas penurunan nilai pasar dan keusangan dari persediaan - neto

Set out below is the movement in the allowance for loss from obsolescence and decline in market value of inventories - net

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Saldo awal	84.018.098.982	14.493.994.733	3.433.797.971	Beginning balances Allowance/(Recovery) for the year (Note 30)
Penyisihan/(pemulihan) tahun berjalan (Catatan 30)	41.450.314.103	69.524.104.249	11.060.196.762	
<b>Saldo akhir</b>	<b>125.468.413.085</b>	<b>84.018.098.982</b>	<b>14.493.994.733</b>	<b>Ending balances</b>

**8. ASET BIOLOGIS**

Aset biologis terdiri atas produk agrikultur yang tumbuh pada tanaman produktif.

**8. BIOLOGICAL ASSETS**

Biological assets comprise of growing agriculture product on the bearer plants.

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Tandan buah segar	432.002.281.233	440.400.995.404	496.262.025.403	Fresh fruit bunches Fresh leaves Rubber Others
Daun teh	9.866.269.491	9.935.732.864	3.192.098.853	
Karet	3.276.635.208	4.424.660.323	8.396.620.078	
Lain-lain	88.614.572	52.892.919	60.569.805	
<b>Total</b>	<b>445.233.800.504</b>	<b>454.814.281.510</b>	<b>507.911.314.139</b>	<b>Total</b>



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**8. ASET BIOLOGIS (lanjutan)**

Pergerakan saldo aset biologis adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ December 31, 2022 (As restated) (Note 46)	
Saldo awal	454.814.281.510	507.911.314.139	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan	14.905.940.686.438	19.317.012.190.283	Addition during the current year
Panen	(15.098.262.767.624)	(19.077.032.515.939)	Harvest
Keuntungan/(kerugian) atas perubahan nilai dikurangi biaya untuk menjual yang diakui pada laba rugi	182.741.600.180	(293.076.706.973)	Gain/ (loss) from changes in fair value less cost to sell recognize in profit and loss
<b>Saldo akhir</b>	<b>445.233.800.504</b>	<b>454.814.281.510</b>	<b>Net</b>

**8. BIOLOGICAL ASSETS (continued)**

The movement of biological assets are as follows:

Nilai wajar atas produk agrikultur kelapa sawit, karet dan teh ditentukan pada level 2 berdasarkan harga pasar terkait yang diterapkan terhadap estimasi volume produk.

The fair values of the palm oil and tea agricultural product are determined at level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the product.

Aset biologis Grup diukur pada nilai wajar dikurangi biaya menjual pada titik panen.

The Group's biological assets are measured at fair value less costs to sell at the point of harvest.

**Produk Agrikultur Yang Dipanen**

**Growing Agricultural Produce**

	Jumlah Panen/Total Harvest (dalam ton/in tonnage)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46) 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Tandan buah segar	7.246.879	7.666.392	7.548.699	Fresh fruit bunches

Nilai wajar atas produk agrikultur kelapa sawit dan teh ditentukan pada level 2 berdasarkan harga pasar terkait yang diterapkan terhadap estimasi volume produk.

The fair values of the palm oil and tea agricultural product are determined at level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the product.

Analisis sensitivitas naratif dari input yang digunakan dalam menentukan nilai wajar aset biologis adalah sebagai berikut:

The narrative sensitivity analysis of input used in determining the fair values of the biological assets are as follows:

Aset Biologis/ Biological Asset	Input	31 Desember 2023 December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	Sensitivitas input ke nilai wajar/ Input sensitivity to fair value
Tandan Buah Segar/ Fresh fruit bunches	Estimasi harga pasar/ Market value estimation	Rp1.728 s.d. Rp2.479	Rp1.630/Kg s.d. Rp2.928/Kg	Rp2.181/Kg s.d. Rp3.305/Kg	Kenaikan/ (penurunan) harga komoditas akan menyebabkan peningkatan/ (penurunan) nilai wajar/ An increase (decrease) in commodity prices will cause an increase/ (decrease) in fair value

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**9. PIUTANG LAIN-LAIN**

Piutang lain-lain terdiri dari pinjaman modal kerja kepada pihak berelasi dan kegiatan non-operasional perusahaan lainnya.

**a. Piutang lain-lain jangka pendek**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Pihak ketiga	287.649.597.095	455.725.074.316	195.487.463.047	Third parties
Penyisihan penurunan nilai	(93.095.654.693)	(70.276.960.497)	(66.662.470.276)	Allowance for impairment
Pihak ketiga - neto	194.553.942.402	385.448.113.819	128.824.992.771	Third parties - net
Pihak berelasi	779.118.914.214	2.259.340.527.181	1.359.238.869.896	Related parties
Penyisihan penurunan nilai	(20.207.797.637)	(12.800.525.349)	(12.489.322.717)	Allowance for impairment
Pihak berelasi – neto (Catatan 36d)	758.911.116.577	2.246.540.001.832	1.346.749.547.179	Related parties – net (Note 36d)
<b>Neto</b>	<b>953.465.058.979</b>	<b>2.631.988.115.651</b>	<b>1.475.574.539.950</b>	<b>Net</b>

Rincian mutasi penyisihan kerugian penurunan nilai piutang lain-lain jangka pendek sebagai berikut:

Detail movement of allowance for other short-term receivables impairment losses as follows:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ December 31, 2022 (As restated) (Note 46)	
Saldo awal	83.077.485.846	79.151.792.993	Beginning balance
Penyisihan tahun berjalan (Catatan 34)	30.225.966.484	3.925.692.853	Allowance for the year (Note 34)
<b>Saldo akhir</b>	<b>113.303.452.330</b>	<b>83.077.485.846</b>	<b>Ending balance</b>

**b. Piutang lain-lain jangka panjang**

**b. Other long-term receivables**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Pihak ketiga	125.102.884.401	13.925.625.676	18.643.218.093	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 36d)	9.517.783.706.946	3.797.724.505.329	3.544.562.517.554	Related parties (Note 36d)
<b>Total</b>	<b>9.642.886.591.347</b>	<b>3.811.650.131.005</b>	<b>3.563.205.735.647</b>	<b>Total</b>
Dikurangi bagian lancar (Catatan 36d)	562.008.541.944	12.916.584.000	-	Less current maturities (Note 36d)
<b>Total piutang lain-lain jangka panjang</b>	<b>9.080.878.049.403</b>	<b>3.798.733.547.005</b>	<b>3.563.205.735.647</b>	<b>Total other long-term receivables</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. PIUTANG PLASMA**

**10. PLASMA RECEIVABLES**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Piutang Plasma	992.632.278.098	983.041.838.707	897.892.887.022	Plasma Receivable
Penyisihan atas KKE dan amortisasi SBE piutang plasma	(822.729.814.343)	(759.238.819.067)	(627.823.265.899)	Allowance for ECL and EIR and amortization for plasma receivable
<b>Neto</b>	<b>169.902.463.755</b>	<b>223.803.019.640</b>	<b>270.069.621.123</b>	<b>Net</b>

Akun ini merupakan uang muka kepada petani plasma atas dana talangan untuk angsuran pinjaman petani plasma ke bank serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma yang untuk sementara dibiayai sendiri oleh Perusahaan.

*This account represents the advances to plasma farmers on toping up the loan installments of plasma farmers to the banks and the costs incurred for plasma plantation development which were temporarily self-funded by the Company.*

**Perkebunan Plasma dengan Pembiayaan Bank**

**Plasma Plantations Funded by Banks**

Pembiayaan atas pengembangan kebun plasma diperoleh dari bank dalam bentuk pinjaman lunak yang ditandatangani petani plasma yang dikordinasikan oleh beberapa Koperasi Unit Desa ("KUD") dengan PT Bank Mandiri (Persero) Tbk dimana Perusahaan bertindak sebagai penjamin atas pengembalian pinjaman tersebut.

*The financing of the plasma plantations, are provided by the banks in the form of soft loans signed by plasma farmers coordinated under several rural cooperative units ("Koperasi Unit Desa" or the "KUD") and PT Bank Mandiri (Persero) Tbk whereby the Company acts as guarantor of the loan repayments. The outstanding balance of such loans.*

Sebagai penjamin pengembalian pinjaman bank, Perusahaan memotong sampai dengan 30% dari jumlah penjualan Tandan Buah Segar ("TBS") petani plasma kepada Perusahaan. Jumlah yang dipotong tersebut diteruskan oleh Perusahaan ke bank sebagai pelunasan pinjaman petani plasma tersebut. Namun, Perusahaan tidak selalu mengumpulkan jumlah 30% tersebut.

*As guarantor of the bank loan repayments, the Company should withhold up to 30% of Fresh Fruit Bunches ("FFB") sales amounts from plasma farmers to the Company. The withheld amounts are passed on by the Company to the banks as loan repayments. However, the Company is not always able to collect the 30%.*

Selisih kurang antara potongan hasil penjualan tersebut dengan pembayaran kembali pinjaman bank yang wajib dibayarkan oleh Perusahaan sebagai penjamin pengembalian pinjaman, dicatat sebagai piutang plasma sampai pada saat penerimaan kembali dari petani plasma.

*Any shortfall between the amounts provided from the above sales and amounts to be paid to the banks, which must be paid by the Company as a guarantor of the loan repayments, is recorded as plasma receivables unit it is collected from the plasma farmers.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**10. PIUTANG PLASMA (lanjutan)**

**Perkebunan Plasma dengan Pembiayaan Bank  
(lanjutan)**

Perusahaan telah mengembangkan perkebunan plasma di provinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur dan Kalimantan Selatan dengan pembiayaan dari bank seluas 172.291 hektar.

Sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan telah mengembangkan perkebunan plasma di Kabupaten Tapanuli Selatan, Aceh Tamiang, Riau dan Kalimantan dengan pembiayaan sendiri total seluas 1.003 hektar (tidak diaudit) dan telah diserahkan kepada petani plasma. Pembiayaan perkebunan plasma diberikan oleh bank dalam bentuk pinjaman lunak yang ditandatangani oleh petani plasma.

Manajemen berpendapat bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul dari tidak tertagihnya piutang plasma tersebut.

**Perkebunan Plasma dengan Pembiayaan oleh  
Perusahaan**

Pembiayaan atas pengembangan kebun plasma diperoleh dari Perusahaan secara langsung atau disebut dengan Pola Satu Manajemen ("PSM"). Piutang ini direalisasi dengan melakukan pemotongan hasil penjualan buah plasma sebesar 30% untuk mengangsur piutang petani plasma.

**10. PLASMA RECEIVABLES (continued)**

**Plasma Plantations Funded by Banks  
(continued)**

Company has developed plasma plantations in North Sumatera, West Sumatera, Riau, West Kalimantan, East Kalimantan, and South Kalimantan with bank funding totaling 172,291 hectares.

Through December 31, 2023, the Company has developed self-funded plasma plantations in South Tapanuli, Aceh Tamiang, Riau and Kalimantan districts totaling 1,003 hectares (un-audited) and has handed over to plasma farmers. The financing of the plasma plantations, are provided by the banks in the form of soft loans signed by plasma farmers.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses from uncollectable plasma receivables.

**Plasma Plantations Funded by the Company**

The financing of the plasma plantations are provided directly by the Company. The receivable is realized by deducting 30% from the sales of plasma fruit to pay off the receivables of plasma farmers.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. INVESTASI SAHAM**

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK**

Nama Perusahaan/Company	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Biaya perolehan/ Acquisition cost	Akumulasi bagian atas laba (rugi) neto dan penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi/ Equity in net earnings (loss) and other comprehensive income of associated company	Penambahan (pengurangan)/ Increase (decrease)	Nilai tercatat/ Carrying amount
<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>					
<b>Metode Ekuitas/Equity method</b>					
a) PT Industri Nabati Lestari	49,00%	284.800.000.000	(284.800.000.000)	-	-
b) PT Kalimantan Agro Nusantara	41,07%	109.870.000.000	63.649.267.841	-	173.519.267.841
c) PT LPP Agro Nusantara	31,60%	80.000.000.000	13.762.430.005	50.000.000.000	143.762.430.005
d) PT Perkebunan Agrintara	30,50%	46.923.076.000	(46.923.076.000)	-	-
e) PT Pupuk Agro Nusantara	49,00%	28.420.000.000	(1.482.018.000)	-	26.937.982.000
f) PT Mardec Nusa Riau	40,00%	5.064.800.000	(5.064.800.000)	-	-
g) PT Bio Industri Nusantara	25,00%	1.925.000.000	7.302.616.480	-	9.227.616.480
<b>Jumlah – net/Total – net</b>		<b>557.002.876.000</b>	<b>(253.555.579.674)</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>353.447.296.326</b>
<b>Pada nilai wajar/At fair value</b>					
a) PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	15,17%	19.374.000.000	13.074.390.372	-	32.448.390.372
b) PT Padasa Enam Utama	15,00%	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000
c) PT Riset Perkebunan Nusantara	10,00%	9.663.000.000	(6.987.572.298)	-	2.675.427.702
d) PT Siak Prima Nusalima	15,00%	3.000.000.000	(3.000.000.000)	-	-
<b>Sub Total/SubTotal</b>		<b>47.037.000.000</b>	<b>3.086.818.074</b>	<b>-</b>	<b>50.123.818.074</b>
<b>Uang Muka Saham/Advances for shares stocks</b>					
PT LPP Agro Nusantara		50.000.000.000	-	(50.000.000.000)	-
Hamburg Indonesische Import Gmbh Indoham, Jerman		854.950.968	-	-	854.950.968
<b>Sub Total/Sub Total</b>		<b>50.854.950.968</b>		<b>(50.000.000.000)</b>	<b>854.950.968</b>
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses		-	(854.950.968)	-	(854.950.968)
<b>Jumlah – net/Total – net</b>		<b>-</b>	<b>(854.950.968)</b>	<b>-</b>	<b>(854.950.968)</b>
<b>Total investasi saham – neto/ Total investment in shares – net</b>		<b>654.894.826.968</b>	<b>(251.323.712.568)</b>	<b>-</b>	<b>403.571.114.400</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

Nama Perusahaan/Company	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Biaya perolehan/ Acquisition cost	Akumulasi bagian atas laba (rugi) neto dan penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi/ Equity in net earnings (loss) and other comprehensive income of associated company	Penambahan (pengurangan)/ Increase (decrease)	Nilai tercatat/ Carrying amount
<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>					
<b>Metode Ekuitas/Equity method</b>					
a) PT Industri Nabati Lestari	49,00%	284.800.000.000	(256.863.398.915)	-	27.936.601.085
b) PT Kalimantan Agro Nusantara	41,07%	109.870.000.000	33.785.049.312	-	143.655.049.312
c) PT LPP Agro Nusantara	23,35%	57.500.000.000	(53.490.210.825)	22.500.000.000	26.509.789.175
d) PT Perkebunan Agrintara	30,50%	46.923.076.000	(46.923.076.000)	-	-
e) PT Pupuk Agro Nusantara	49,00%	28.420.000.000	(1.482.018.000)	-	26.937.982.000
f) PT Mardec Nusa Riau	40,00%	5.064.800.000	(5.064.800.000)	-	-
g) PT Bio Industri Nusantara	25,00%	1.925.000.000	7.250.654.551	-	9.175.654.551
<b>Jumlah – net/Total – net</b>		<b>534.502.876.000</b>	<b>(322.787.799.877)</b>	<b>22.500.000.000</b>	<b>234.215.076.123</b>
<b>Pada nilai wajar/At fair value</b>					
a) PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	14,90%	19.374.000.000	8.938.639.809	-	28.312.639.809
b) PT Padasa Enam Utama	15,00%	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000
c) PT Riset Perkebunan Nusantara	10,00%	9.663.000.000	(1.565.219.697)	-	8.097.780.303
d) PT Siak Prima Nusalima	15,00%	3.000.000.000	(3.000.000.000)	-	-
<b>Sub Total/SubTotal</b>		<b>47.037.000.000</b>	<b>4.373.420.112</b>	<b>-</b>	<b>51.410.420.112</b>
<b>Uang Muka Saham/Advances for shares stocks</b>					
PT LPP Agro Nusantara		-	-	50.000.000.000	50.000.000.000
Hamburg Indonesische Import Gmbh Indoham, Jerman		854.950.968	-	-	854.950.968
<b>Sub Total/Sub Total</b>		<b>854.950.968</b>	<b>-</b>	<b>50.000.000.000</b>	<b>50.854.950.968</b>
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses		-	(854.950.968)	-	(854.950.968)
<b>Jumlah – net/Total – net</b>		<b>-</b>	<b>(854.950.968)</b>	<b>-</b>	<b>(854.950.968)</b>
<b>Total investasi saham – neto/ Total investment in shares – net</b>		<b>582.394.826.968</b>	<b>(319.269.330.733)</b>	<b>72.500.000.000</b>	<b>335.625.496.235</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

Nama Perusahaan/Company	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Biaya perolehan/ Acquisition cost	Akumulasi bagian atas laba (rugi) neto dan penghasilan komprehensif lain entitas asosiasi/ Equity in net earnings (loss) and other comprehensive income of associated company	Penambahan (pengurangan)/ Increase (decrease)	Nilai tercatat/ Carrying amount
<b>1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021</b>					
<b>Metode Ekuitas/Equity method</b>					
a) PT Industri Nabati Lestari	49,00%	284.800.000.000	(157.856.868.491)	-	126.943.131.509
b) PT Kalimantan Agro Nusantara	41,07%	109.870.000.000	14.192.914.502	-	124.062.914.502
c) PT LPP Agro Nusantara	23,35%	57.500.000.000	(40.166.675.167)	-	17.333.324.833
d) PT Perkebunan Agrintara	30,50%	46.923.076.000	(46.923.076.000)	-	-
e) PT Pupuk Agro Nusantara	49,00%	28.420.000.000	(514.013.520)	-	27.905.986.480
f) PT Mardec Nusa Riau	40,00%	5.064.800.000	(5.064.800.000)	-	-
g) PT Bio Industri Nusantara	25,00%	1.925.000.000	6.350.996.758	-	8.275.996.758
<b>Jumlah – net/Total – net</b>		<b>534.502.876.000</b>	<b>(229.981.521.918)</b>	<b>-</b>	<b>304.521.354.082</b>
<b>Pada nilai wajar/At fair value</b>					
a) PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	14,90%	-	412.676.880	19.374.000.000	19.786.676.880
b) PT Padasa Enam Utama	15,00%	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000
c) PT Riset Perkebunan Nusantara	10,00%	9.663.000.000	(2.056.875.460)	-	7.606.124.540
d) PT Siak Prima Nusalima	15,00%	3.000.000.000	(3.000.000.000)	-	-
<b>Sub Total/Sub Total</b>		<b>27.663.000.000</b>	<b>(4.644.198.580)</b>	<b>19.374.000.000</b>	
<b>Uang Muka Saham/Advances for shares stocks</b>					
PT LPP Agro Nusantara		-	-	-	-
Hamburg Indonesische Import Gmbh Indoham, Jerman		854.950.968	-	-	854.950.968
<b>Sub Total/Sub Total</b>		<b>854.950.968</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>854.950.968</b>
Penyisihan atas kerugian penurunan nilai/Allowance for impairment losses		-	(854.950.968)	-	(854.950.968)
<b>Jumlah – net/Total – net</b>		<b>-</b>	<b>(854.950.968)</b>	<b>-</b>	<b>(854.950.968)</b>
<b>Total investasi saham – neto/ Total investment in shares – net</b>		<b>563.020.826.968</b>	<b>(235.480.671.466)</b>	<b>19.374.000.000</b>	<b>346.914.155.502</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

Metode Ekuitas:

a. PT Industri Nabati Lestari ("INL")

Pada tahun 2017, Perusahaan melakukan investasi saham pada PT Industri Nabati Lestari ("INL") sebanyak 1.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp127.020.000.000 dan persentase kepemilikan sebesar kepemilikan saham sebesar 49,00%.

INL berkedudukan di kawasan Sei Mangkei, Sumatera Utara dan bergerak dalam bidang usaha agro industri dan agro bisnis, termasuk industri kimia dasar organik yang bersumber dari hasil pertanian dimana kegiatan usahanya meliputi pengolahan minyak kelapa sawit (MKS) menjadi barang setengah jadi dan/atau barang jadi serta produk turunannya.

INL juga melakukan kegiatan ekspor impor dan perdagangan, yang meliputi kegiatan pemasaran berbagai macam hasil produksi industri hilir hasil-hasil pertanian dan perkebunan serta melakukan kegiatan perdagangan lainnya yang berhubungan dengan kegiatan usaha Perseroan.

Pada tahun 2018, Perusahaan melakukan tambahan penyertaan modal melalui konversi piutang dan setoran tambahan modal masing-masing sebesar Rp115.000.000.000 dan Rp42.780.000.000 sehingga nilai saham Perusahaan menjadi sebesar Rp284.800.000.000.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, bagian atas rugi neto INL masing-masing sebesar Rp27.936.601.085, Rp99.006.530.424, sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

Equity Method:

a. PT Industri Nabati Lestari ("INL")

In 2017, the Company has investment in shares of stock on PT Industri Nabati Lestari ("INL") totaling 1,000 shares with value Rp127,020,000,000 representing 49.00% ownership interest.

INL is domiciled in Sei Mangke, North Sumatera and engaged in agro-industry and agro-business industry, including basic chemicals organic industry derived from agricultural products where its main business is crude palm oil (CPO) processing into semi-finished goods and/or finished goods and its derivatives.

INL also engaged in exporting, importing and trading activities, which include marketing of various downstream agricultural and plantation products, as well as other trading activities related to its business activities.

In the year 2018, PTPN IV had additional capital investment through the conversion of receivables and payment of additional of capital amounting to of Rp115,000,000,000 and Rp42,780,000,000, respectively, therefore the share portion of the Company become Rp284,800,000,000.

As of period ended December 31, 2023, and the years ended December 31, 2022, INL's share of net loss amounting to Rp27,936,601,085, Rp99,006,530,424, respectively as part of other comprehensive income on the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

Metode Ekuitas: (lanjutan)

b. PT Kalimantan Agro Nusantara ("KAN")

Pada tanggal 2 Juli 2021, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara XIII) melakukan penyertaan saham pada PT Kalimantan Agro Nusantara ("KAN") sebanyak 109.870 lembar saham dengan nilai sebesar Rp109.870.000.000 dan persentase kepemilikan sebesar kepemilikan saham sebesar 41,07%. KAN berkedudukan di Kabupaten Kutai Timur, Provinsi Kalimantan Timur dan bergerak dalam bidang usaha industri perkebunan kelapa sawit.

Pada tanggal 31 Desember 2021, Perusahaan dan PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT") menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat dimana Perusahaan menyetujui untuk menjual seluruh saham KAN kepada PKT sebanyak 109.870 lembar saham dengan beberapa persyaratan teknis. PKT harus membayar harga transaksi secara penuh kepada Perusahaan berdasarkan hasil penilaian saham oleh penilai independen yang ditunjuk oleh Perusahaan dan PKT.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, bagian atas laba neto KAN masing-masing sebesar Rp29.864.218.529, Rp19.592.134.810 dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

Equity Method: (continued)

b. PT Kalimantan Agro Nusantara ("KAN")

On July 2, 2021, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara XIII) invested 109,870 shares in PT Kalimantan Agro Nusantara ("KAN") with a value of Rp109,870,000,000 representing 41.07% of ownership interest. KAN is domiciled in Kutai Timur Regency, Kalimantan Timur Province and is engaged in the business of palm oil plantation industry.

On December 31, 2021, the Company and PT Pupuk Kalimantan Timur ("PKT") entered into a conditional share purchase agreement whereby the Company agreed to sell all 109,870 shares of KAN to PKT subject to certain technical conditions. PKT shall pay the full transaction price to the Company based on the results of the valuation of the shares by an independent appraiser appointed by the Company and PKT.

As of period ended December 31, 2023, and the year ended December 31, 2022, KAN's share of net profit Rp29,864,218,529, Rp19,592,134,810 was recorded as part of other comprehensive income on the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

Metode Ekuitas: (lanjutan)

c. PT Lembaga Pendidikan Perkebunan Agro Nusantara ("LPP-AN")

Pada tanggal 30 April 2019, berdasarkan akta Notaris No. 2, dari Notaris Trianingsih, S.H, M.Kn., Perusahaan melakukan investasi saham sebanyak 15.000 saham, dengan total sebesar Rp15.000.000.000 di PT Lembaga Pendidikan Perkebunan Agro Nusantara ("LPP-AN").

Pada tanggal 20 Juli 2020, berdasarkan akta Notaris No. 3, dari Notaris Ratri Estiningtyas, S.H, M.Kn., LPP-AN meningkatkan Modal Dasar dan Modal Disetor, yang seluruhnya (sebesar Rp212.323.000.000) disetor oleh Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan ("Perkumpulan LPP"), sehingga persentase kepemilikan saham Perusahaan di LPP-AN berubah dari 14,99% menjadi 4,82%. Selanjutnya, pada tanggal 28 Desember 2022, berdasarkan Akta No. 120, dari Notaris Hj. Riska Marissa, S.H., M.Kn., para pemegang saham LPP-AN menyetujui pengeluaran saham seri B sebanyak 100.000 saham, dengan total sebesar Rp100.000.000.000, dan sebanyak 35.000 saham, dengan total sebesar Rp35.000.000.000 diambil bagian oleh Perusahaan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan aksi korporasi (Catatan 1). Atas bergabungnya PTPN V dan PTPN VI ke Perusahaan, mengakibatkan perpindahan kepemilikan PTPN V dan PTPN VI atas LPP-AN kepada Perusahaan.

Jumlah lembar saham yang dialihkan pada tanggal penggabungan adalah sejumlah 60.000 lembar saham seri B, senilai Rp60.000.000.000, ekuivalen dengan 14,58% kepemilikan Perusahaan atas LPP-AN. Sehingga per tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki nilai penyertaan saham sebesar Rp130.000.000.000 atau ekuivalen dengan 31,60% kepemilikan pada LPP-AN. Sampai dengan tanggal penerbitan laporan keuangan, akta perubahan pemegang saham tersebut masih dalam proses.

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

Equity Method: (continued)

c. PT Lembaga Pendidikan Perkebunan Agro Nusantara ("LPP-AN")

On April 30, 2019, based on Notarial deed No. 2, from Notary Trianingsih, S.H, M.Kn., the Company invested 15,000 shares, totaling Rp15,000,000,000 in PT Lembaga Pendidikan Perkebunan Agro Nusantara ("LPP-AN").

On July 20, 2020, based on Notarial Deed No. 3, from Notary Ratri Estiningtyas, S.H., M.Kn., LPP-AN increased its Authorized Capital and Paid-up Capital, all of which (amounting to Rp212,323,000,000) was paid up by Perkumpulan Lembaga Pendidikan Perkebunan ("Perkumpulan LPP"), so that the percentage of the Company's share ownership in LPP-AN changed from 14.99% to 4.82%. Furthermore, on December 28, 2022, based on Deed No. 120, from Notary Hj. Riska Marissa, S.H., M.Kn., the shareholders of LPP-AN approved the issuance of series B shares of 100,000 shares, totaling Rp100,000,000,000, and 35,000 shares, totaling Rp35,000,000,000 were subscribed by the Company.

On December 31, 2023, the Company conducted a corporate action (Note 1). The merger of PTPN V and PTPN VI into the Company resulted in the transfer of PTPN V and PTPN VI's ownership of LPP-AN to the Company.

The number of shares transferred on the merger date was 60,000 series B shares, valued at Rp60,000,000,000, equivalent to 14.58% ownership interest in LPP-AN. Therefore, as of December 31, 2023, the Company has an investment in shares as of December 31, 2023 amounting to Rp130,000,000,000 or equivalent to 31.60% ownership interest in LPP-AN. Up to the date of issuance of the financial statements, the deed of change of shareholders is still in process. As of December 31, 2023, the Company has an investment in shares as of December 31, 2023 amounting to Rp130,000,000,000 or equivalent to 31.60% ownership interest in LPP-AN.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

Metode Ekuitas: (lanjutan)

c. PT Lembaga Pendidikan Perkebunan Agro Nusantara ("LPP-AN") (lanjutan)

Per tanggal 31 Desember 2023, nilai yang sudah disetorkan Perusahaan kepada LPP-AN adalah sebesar Rp115.000.000.000 dari keseluruhan nilai nominal investasi saham yang dicatat sebesar Rp130.000.000.000. Selisih nilai investasi saham yang telah dicatat dan nilai uang disetorkan oleh Perusahaan merupakan utang setoran modal yang dicatat sebagai bagian dari utang lain-lain pihak berelasi pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, bagian atas laba neto LPP-AN sebesar Rp67.252.640.830 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 bagian atas rugi neto LPP-AN sebesar Rp13.323.535.658 dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

d. PT Perkebunan Agriantara

Pada tahun 2003, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) melakukan investasi saham pada PT Perkebunan Agriantara ("PA"). PA berkedudukan di Jakarta dan bergerak dalam bidang usaha industri hilir karet, yang sejak tahun 2012 sudah tidak beroperasi lagi. Selanjutnya pada tanggal 10 Maret 2020, berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) pemegang saham memutuskan untuk melakukan pelelangan aset. Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian interim ini, proses lelang aset masih berlangsung.

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

Equity Method: (continued)

c. PT Lembaga Pendidikan Perkebunan Agro Nusantara ("LPP-AN") (continued)

As of December 31, 2023, the amount that has been paid by the Company to LPP-AN amounted to Rp115,000,000,000 out of the total nominal value of share investment recorded of Rp130,000,000,000. The difference between the recorded value of the investment in shares and the amount paid by the Company is paid-up capital payable which is recorded as part of other payables to related parties in the interim consolidated statements of financial position.

As of period ended December 31, 2023, LPP-AN's share of net profit amounting to Rp67,252,640,830 and the year ended December 31, 2022, LPP-AN's share of net loss amounting to Rp13,323,535,658 was recorded as part of other comprehensive income on the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

d. PT Perkebunan Agriantara

In 2003, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) has investment in PT Perkebunan Agriantara ("PA"). PA is domiciled in Jakarta and engaged in rubber production, which since 2012 has no longer operating. Furthermore, based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders (EGMS), dated March 10, 2020 the shareholders decided to auction the assets. As of the issuance date of the interim consolidated financial statements, the asset auction process is still in progress.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

Metode Ekuitas: (lanjutan)

e. PT Pupuk Agro Nusantara ("PAN")

Pada tahun 2010, Perusahaan melakukan investasi saham pada PAN sebanyak 39.174 lembar saham dengan nilai Rp39.174.000.000 dan persentase kepemilikan sebesar 34,00%. PAN berkedudukan di Medan, Sumatera Utara dan bergerak dalam bidang industri pengolahan pupuk.

Berdasarkan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PAN, yang diaktakan dalam Akta No. 2 dari Notaris Syafnil Gani, S.H., M.Hum tanggal 30 Agustus 2012, telah disepakati penurunan modal dasar dan modal disetor PAN dimana, saham Perusahaan yang semula berjumlah 39.174 lembar turun menjadi 19.720 lembar senilai Rp19.720.000.000 dan setoran modal yang telah dilakukan dikembalikan kepada Perusahaan sebesar Rp19.454.000.000.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan aksi korporasi (Catatan 1). Atas bergabungnya PTPN V ke Perusahaan, mengakibatkan perpindahan kepemilikan PTPN V atas PAN. Jumlah lembar saham yang dialihkan pada tanggal penggabungan adalah sejumlah 8.700 lembar saham seri B, senilai Rp8.700.000.000, ekuivalen dengan 15% kepemilikan pada PAN. Sehingga, per tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan memiliki nilai penyertaan saham per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp28.420.000.000 atau ekuivalen dengan 49,00% kepemilikan pada PAN.

Sesuai dengan arahan Pemegang Saham dalam RUPS RKAP 2015, terkait penyelesaian seluruh proses penjualan aset tanah maka PAN menunjuk PT Balai Lelang Indonesia sebagai pelaksana jasa lelang aset PAN, berupa tanah yang berlokasi di Jl. Pulau Saparua, Blok C3, Kawasan Industri Medan (KIM) III, Medan seluas 33.615 m<sup>2</sup>. Selanjutnya, sesuai dengan risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT Pupuk Agro Nusantara tentang Keberlanjutan Usaha PT Pupuk Agro Nusantara tanggal 3 Februari 2017, Pemegang Saham memutuskan untuk mengambil opsi likuidasi PAN.

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

Equity Method: (continued)

e. PT Pupuk Agro Nusantara ("PAN")

In 2010, the Company has investment in shares of stock on PAN totaling 39,174 shares with value Rp39,174,000,000 representing 34.00% ownership interest. PAN is domiciled in Medan, North Sumatera and engaged in fertilizer manufacturing industry.

Based on the Extraordinary General Meeting of Shareholders of PAN which it was notarized in Deed No. 2 of Syafnil Gani, S.H., M.Hum dated August 30, 2012, was approved the decrease of authorized shares and paid shares of PAN, shares of the Company decreased from 39,174 shares to 19,720 shares amounting to Rp19,720,000,000 and the capital which have contributed amounting to Rp19,454,000,000 is returned to the Company.

On December 31, 2023, the Company conducted a corporate action (Note 1). The merger of PTPN V into the Company resulted in the transfer of PTPN V's ownership of PAN to the Company. The number of shares transferred on the merger date is 8,700 series B shares, valued at Rp8,700,000,000, equivalent to 15% ownership interest in PAN. Therefore, as of December 31, 2023, the Company has an equity investment as of December 31, 2023 of Rp28,420,000,000 or equivalent to 49.00% ownership interest in PAN.

In accordance with instruction of the Shareholders in RUPS RKAP 2015, in relation to the completion of the entire process of land asset sales, PAN appointed PT Balai Lelang Indonesia as the auction services of PAN asset, in the form of land located on Jl. Saparua Island, C3 Block, Medan Industrial Estate (KIM) III, Medan area of 33,615 m<sup>2</sup>. Furthermore, in accordance with the minutes of the Extraordinary General Shareholders Meeting of PT Pupuk Agro Nusantara on Business Sustainability of PT Pupuk Agro Nusantara dated February 3, 2017, the Shareholders decided to take option for PAN liquidation.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

Metode Ekuitas: (lanjutan)

e. PT Pupuk Agro Nusantara ("PAN") (lanjutan)

Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan ini proses likuidasi PAN masih berlangsung.

f. PT Mardec Nusa Riau ("MNR")

Pada tahun 2003, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) melakukan investasi saham pada usaha patungan PT Mardec Nusa Riau ("MNR"). MNR berkedudukan di Kabupaten Kampar, Provinsi Riau dan bergerak dalam bidang usaha industri lateks pekat.

Sejak November 2011, MNR telah berhenti beroperasi.

g. PT Bio Industri Nusantara ("BIN")

Pada tahun 1999, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V sebelum peristiwa penggabungan) melakukan penyertaan saham pada PT Bio Industri Nusantara ("BIN"). BIN berkedudukan di Bandung dan bergerak dalam bidang usaha pemasaran produksi pupuk.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, bagian atas laba neto BIN masing-masing sebesar Rp51.961.929, Rp899.657.793 dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

Equity Method: (continued)

e. PT Pupuk Agro Nusantara ("PAN") (continued)

Until the date of released audited financial statement, the liquidation process are still in progress.

f. PT Mardec Nusa Riau ("MNR")

In 2003, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) has investment in Joint Investment PT Mardec Nusa Riau ("MNR"). MNR is domiciled in Kampar, Riau Province and engaged in latex production.

Since November 2011, MNR has stopped the operation.

g. PT Bio Industri Nusantara ("BIN")

In 1999, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) has an investment in PT Bio Industri Nusantara ("BIN"). BIN is domiciled in Bandung and engaged in fertilizer marketing.

As of period ended December 31, 2023, and the year ended December 31, 2022, BIN's share of net profit amounting to Rp51,961,929, Rp899,657,793, respectively, was recorded as part of other comprehensive income on the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

Metode Nilai Wajar:

a. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN")

Pada tanggal 30 November 2021, berdasarkan akta Notaris No. 13, dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, para pemegang saham telah menyetujui penggabungan PT Sarana Agro Nusantara ("SAN") dan PT ESW Nusantara Tiga ("ESW") ke PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN"), sebagai yang menerima penggabungan.

Penggabungan tersebut juga telah disetujui oleh Menteri Badan Usaha Milik Negara Republik Indonesia, melalui surat No. S-907/MBU/11/2021, tanggal 30 November 2021.

Penggabungan tersebut efektif sejak tanggal 14 Desember 2021, yang merupakan tanggal diperolehnya persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No.AHU-0072142.AH.01.02. Tahun 2021.

Berdasarkan akta penggabungan, Akta Notaris No. 15, dari Notaris Nanda Fauz Iwan, SH, M.Kn, kepemilikan saham Perusahaan di SAN dan ESW dikonversi menjadi kepemilikan saham di KPBN sebesar Rp16.152.000.000 atau ekuivalen dengan 12,65% kepemilikan.

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan melakukan aksi korporasi (Catatan 1). Atas bergabungnya PTPN V dan ke Perusahaan, mengakibatkan perpindahan kepemilikan PTPN V atas KPBN kepada Perusahaan. Jumlah lembar saham yang dialihkan pada tanggal penggabungan adalah sejumlah 3.222 lembar saham seri B, senilai Rp3.222.000.000, ekuivalen dengan 2,52% kepemilikan pada KPBN.

Sebagai dampak dari peristiwa penggabungan, Perusahaan memiliki nilai penyertaan saham per tanggal 31 Desember 2023 sebesar Rp19.374.000.000 atau ekuivalen dengan 15,17% kepemilikan pada KPBN.

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

At Fair Value:

a. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN")

On November 30, 2021, based on the notarial deed No. 13, from Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the shareholders have approved the merger of PT Sarana Agro Nusantara ("SAN") and PT ESW Nusantara Tiga ("ESW") into PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN"), as the surviving entity.

This merger has also been approved by the Minister of State-Owned Enterprises of the Republic of Indonesia, through letter No. S-907/MBU/11/2021, dated November 30, 2021.

This merger is effective as of December 14, 2021, which is the date of approval from the Minister of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia No.AHU-0072142.AH.01.02. on 2021.

Based on the deed of merger, Notarial Deed No. 15, from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., the Company's share ownership in SAN and ESW was converted into share ownership in KPBN amounting to Rp16,152,000,000 representing 12.65% ownership interest.

On December 31, 2023, the Company conducted a corporate action (Note 1). The merger of PTPN V and the Company resulted in the transfer of PTPN V's ownership of KPBN to the Company. The number of shares transferred on the merger date was 3,222 series B shares, valued at Rp3,222,000,000, equivalent to 2.52% ownership in KPBN.

As a result of the merger, the Company has an investment in shares as of December 31, 2023 amounting to Rp19,374,000,000 or equivalent to 15.17% ownership in KPBN.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

Metode Nilai Wajar: (lanjutan)

a. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN") (lanjutan)

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kenaikan nilai wajar atas investasi saham pada KPBN masing-masing sebesar Rp4.135.750.480, Rp8.525.963.012 dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

b. PT Padasa Enam Utama ("PEU")

Pada tahun 1988, Perusahaan melakukan investasi saham pada PT Padasa Enam Utama ("PEU") sebanyak 15.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp15.000.000.000 dan persentase kepemilikan sebesar 15,00%.

PEU berkedudukan di Jakarta dan bergerak di bidang usaha perkebunan dan industri kelapa sawit yang berlokasi di Teluk Dalam Provinsi Sumatera Utara dan Koto Kampar, Kalianta, Provinsi Riau.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, Perusahaan memperoleh penghasilan dividen atas pembagian laba PEU masing-masing sebesar Rp45.000.000.000 dan Rp.75.000.000.000.

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

At Fair Value: (continued)

a. PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN") (continued)

As of period ended December 31, 2023, and the years ended December 31, 2022, the fair value increase of the stock investment in KPBN amounting to Rp4,135,750,480, Rp8,525,963,012 respectively, was recorded as part of other comprehensive income on the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.

b. PT Padasa Enam Utama ("PEU")

In 1988, The Company has investment in shares of PEU totalling 15,000 shares with a total value amounted to Rp15,000,000,000 and representing 15.00% ownership interest.

PEU is domiciled in Jakarta and engaged in plantations and palm oil industry which located in Teluk Dalam, North Sumatra and Koto Kampar, Kalianta, Riau.

As of period ended December 31, 2023, and the years ended December 31, 2022, the Company received dividend income on the distribution of PEU's profit amounting to Rp45,000,000,000 and Rp75,000,000,000, respectively.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**11. INVESTASI SAHAM (lanjutan)**

Metode Nilai Wajar: (lanjutan)

c. PT Riset Perkebunan Nusantara ("RPN")

Pada tahun 2009, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) melakukan penyertaan saham pada PT Riset Perkebunan Nusantara ("RPN") sebanyak 9.663 lembar saham dengan nilai sebesar Rp9.663.000.000. RPN berkedudukan di Jakarta dan bergerak dalam bidang riset, pengembangan dan pelayanan.

Pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, penurunan nilai wajar atas investasi saham pada RPN sebesar Rp5.422.352.601 dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, kenaikan nilai wajar atas investasi saham pada RPN sebesar Rp491.655.760, dicatat sebagai bagian dari penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim.

d. PT Siak Prima Nusalima ("SPN")

Pada tahun 2005, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) melakukan penyertaan saham pada PT Siak Prima Nusalima ("SPN") sebanyak 3.000 lembar saham dengan nilai sebesar Rp3.000.000.000. SPN berkedudukan di Siak Sri Inderapura, Provinsi Riau dan bergerak dalam bidang perkebunan dan produksi kelapa sawit.

Pada periode berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dan tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, perubahan nilai wajar atas investasi saham pada SPN adalah RpNil.

**11. INVESTMENTS IN SHARES OF STOCK  
(continued)**

At Fair Value: (continued)

c. PT Riset Perkebunan Nusantara ("RPN")

*In 2009, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) invested 9.663 shares in PT Riset Perkebunan Nusantara ("RPN") with a value of Rp9,663,000,000. RPN is domiciled in Jakarta and is engaged in research, development and services.*

*As period ended December 31, 2023, the fair value decrease of the stock investment in RPN is Rp5,422,352,601 and the years ended December 31, 2022, the fair value increase of the stock investment in RPN amounting to Rp491.655.760 was recorded as part of other comprehensive income on the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income.*

d. PT Siak Prima Nusalima ("SPN")

*In 2005, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) invested 3,000 shares in PT Siak Prima Nusalima ("SPN") with a total value of Rp3,000,000,000. SPN is domiciled in Siak Sri Inderapura, Riau Province and is engaged in oil palm plantation and production.*

*As of period ending December 31, 2023, and the years ending December 31, 2022, the change in fair value of the share investment in SPN is RpNil.*



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. ASET HAK-GUNA**

Grup memiliki kontrak sewa untuk berbagai aset tanah, bangunan, dan kendaraan yang digunakan dalam operasinya. Grup dibatasi untuk menyewakan kembali aset sewaan.

Sewa kendaraan memiliki jangka waktu sewa antara 2 hingga 5 tahun, sewa tanah 10 tahun.

Grup memiliki sewa tertentu untuk peralatan kantor dengan masa sewa kurang dari 12 bulan atau dengan nilai rendah. Grup menerapkan pengecualian pengakuan untuk sewa-sewa ini dan mengakui biaya sewa berdasarkan garis lurus dalam laba rugi.

Di bawah ini adalah jumlah tercatat dari aset hak guna yang diakui pada laporan posisi keuangan konsolidasian interim Grup dan mutasinya selama tahun berjalan:

	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Amortisasi/ Amortization	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
<b>Aset Hak-Guna</b>						<b>Right-of-use Assets</b>
Kendaraan	99.167.373.619	123.555.018.106	(2.192.696.836)	(101.251.793.636)	119.277.901.253	Vehicle
Bangunan	4.703.476.510	21.540.556.337	-	(2.073.997.167)	24.170.035.680	Buildings
Lain-lain	2.461.939.914	22.490.019.927	-	(21.463.919.495)	3.488.040.346	Others
<b>Total</b>	<b>106.332.790.043</b>	<b>167.585.594.370</b>	<b>(2.192.696.836)</b>	<b>(124.789.710.298)</b>	<b>146.935.977.279</b>	<b>Total</b>
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Penambahan/ Additions	Pengurangan/ Deductions	Amortisasi/ Amortization	31 Desember 2022/ December 31, 2022	<b>Right-of-use Assets</b>
<b>Aset Hak Guna</b>						Vehicle
Kendaraan	101.941.738.514	97.034.041.228	(8.522.393.280)	(91.286.012.843)	99.167.373.619	Buildings
Hak sewa lahan	2.049.350.885	3.487.625.209	-	(833.499.584)	4.703.476.510	Land use rights
Lain-lain	1.673.517.295	3.201.886.146	-	(2.413.463.527)	2.461.939.914	Others
<b>Total</b>	<b>105.664.606.694</b>	<b>103.723.552.583</b>	<b>(8.522.393.280)</b>	<b>(94.532.975.954)</b>	<b>106.332.790.043</b>	<b>Total</b>

Mutasi jumlah tercatat liabilitas sewa:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ December 31, 2022 (As restated) (Note 46)
Saldo awal	116.699.903.833	120.891.448.894
Penambahan	167.585.594.370	103.723.552.583
Pengurangan	(2.295.777.926)	(9.701.554.972)
Penambahan bunga	19.140.976.446	17.682.972.748
Pembayaran	(151.187.230.647)	(115.896.515.420)
Sub-total	149.943.466.076	116.699.903.833
Dikurangi bagian lancar	(64.617.549.298)	(67.146.134.462)
<b>Liabilitas sewa jangka panjang</b>	<b>85.325.916.778</b>	<b>49.553.769.371</b>

Movement of lease liabilities:

Beginning balance
Addition
Disposal
Accretion of interest
Payment
Sub-total
Less current portion
<b>Long-term lease liabilities</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**12. ASET HAK GUNA (lanjutan)**

Jumlah yang diakui dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian interim:

**12. RIGHTS OF USE ASSET (continued)**

Amounts recognized in the interim consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Beban amortisasi aset hak guna (Catatan 32)	124.789.710.298	94.532.975.954	Amortization expense of right-of-use assets (Note 32)
Beban bunga atas liabilitas sewa	19.140.976.446	17.682.972.748	Interest expense on leases liabilities
Beban yang terkait dengan sewa atas aset bernilai rendah dan sewa jangka pendek	5.674.039.571	30.476.338.718	Expense relating to leases of low value assets and short-term leases
<b>Total</b>	<b>149.604.726.315</b>	<b>142.692.287.420</b>	<b>Total</b>

Analisis jatuh tempo liabilitas sewa sebagai berikut:

The analysis of the maturities of lease liabilities is as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Dalam 12 bulan mendatang	64.617.549.298	67.146.134.462	48.693.303.729	Within the next 12 months
2 tahun	85.325.916.778	49.553.769.371	72.198.145.165	2 years
Pembayaran sewa	<b>149.943.466.076</b>	<b>116.699.903.833</b>	<b>120.891.448.894</b>	Lease payments

Pada 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022 arus kas keluar untuk pembayaran sewa termasuk beban bunga adalah masing-masing sebesar Rp151.187.230.647 dan Rp115.896.515.420.

In December 31, 2023 and December 31, 2022 cash outflows for leases payment and interest expenses amounting to Rp151,187,230,647 and Rp115,896,515,420 respectively.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**

**Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**

**As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP**

**13. FIXED ASSETS**

	<b>1 Januari 2023/ January 1, 2023</b>	<b>Penambahan/ Additions</b>	<b>Pengurangan/ Deductions</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassifications</b>	<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>	
<b>Harga Perolehan/ Nilai Revaluasi</b>						<b>Acquisition Cost/ Revaluation Amount</b>
Tanaman produktif						<i>Bearer plants</i>
Tanaman belum menghasilkan	2.677.667.418.033	1.459.669.322.618	-	(695.835.133.848)	3.441.501.606.803	<i>Immature plants</i>
Tanaman menghasilkan	24.921.015.779.864	-	(565.815.050.493)	736.559.068.344	25.091.759.797.715	<i>Mature plants</i>
Bibit	132.655.851.619	135.581.410.622	(11.829.823.349)	(67.607.066.120)	188.800.372.772	<i>Seedlings</i>
Tanah	10.455.789.443.300	1.300.877.537.142	(1.106.945)	-	11.756.665.873.497	<i>Land</i>
Mesin dan peralatan	10.262.843.660.554	572.948.935.062	(35.935.090.472)	387.597.923.747	11.187.455.428.891	<i>Machinery and equipment</i>
Bangunan dan prasarana	7.300.948.173.513	298.823.171.200	(12.150.223.592)	156.692.771.249	7.744.313.892.370	<i>Building and infrastructure</i>
Kendaraan dan alat						<i>Vehicle and other</i>
pengangkutan lainnya	643.293.518.040	41.506.666.428	(707.603.600)	891.506.700	684.984.087.568	<i>transportations equipment</i>
Peralatan pertanian dan kantor	658.571.533.768	23.380.769.612	(9.415.860.604)	13.253.672.443	685.790.115.219	<i>Farming equipment and office</i>
Instalasi pembibitan	33.219.640.668	814.440.700	-	-	34.034.081.368	<i>Seedling instalations</i>
Aset tetap lainnya	42.113.400.147	-	-	-	42.113.400.147	<i>Other fixed asset</i>
Aset dalam penyelesaian	242.199.638.240	695.058.522.300	(317.182.800)	(542.950.821.498)	393.990.156.242	<i>Construction in progress</i>
Total nilai tercatat	57.370.318.057.746	4.528.660.775.684	(636.171.941.855)	(11.398.078.983)	61.251.408.812.592	<i>Total carrying amount</i>
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Tanaman produktif - menghasilkan	(8.546.510.468.825)	(986.236.153.141)	463.956.741.875	8.360.530.649	(9.060.429.349.442)	<i>Bearer plants - Mature plants</i>
Mesin dan peralatan	(5.531.549.599.112)	(530.152.916.599)	35.935.090.220	(1.445.882.168)	(6.027.213.307.659)	<i>Machinery and equipment</i>
Bangunan dan prasarana	(4.475.699.480.536)	(351.920.057.942)	12.150.223.374	-	(4.815.469.315.104)	<i>Building and infrastructure</i>
Kendaraan dan alat						<i>Vehicle and other</i>
pengangkutan lainnya	(513.731.788.707)	(54.624.340.550)	707.603.600	1.950.000	(567.646.575.657)	<i>transportations equipment</i>
Peralatan pertanian dan kantor	(550.804.618.827)	(44.565.285.663)	5.049.743.635	(1.950.000)	(590.322.110.855)	<i>Farming equipment and office</i>
Instalasi pembibitan	(24.348.771.696)	(1.594.589.739)	-	-	(25.943.361.435)	<i>Seedling instalations</i>
Aset tetap lainnya	(29.643.486.392)	(1.861.975.396)	-	-	(31.505.461.788)	<i>Other fixed asset</i>
Sub-total	(19.672.288.214.095)	(1.970.955.319.030)	517.799.402.704	6.914.648.481	(21.118.529.481.940)	<i>Sub-total</i>
Penurunan nilai aset tetap	(590.471.056.675)	(76.943.274.316)	-	-	(667.414.330.991)	<i>Impairment fixed assets</i>
<b>Nilai tercatat - neto</b>	<b>37.107.558.786.976</b>				<b>39.465.464.999.661</b>	<b>Carrying amount - net</b>
	<b>1 Januari 2022/ January 1, 2022</b>	<b>Penambahan/ Additions</b>	<b>Pengurangan/ Deductions</b>	<b>Reklasifikasi/ Reclassifications</b>	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	
<b>Harga Perolehan/ Nilai Revaluasi</b>						<b>Acquisition Cost/ Revaluation Amount</b>
Tanaman produktif						<i>Bearer plants</i>
Tanaman belum menghasilkan	2.574.495.444.839	892.056.796.351	-	(788.884.823.157)	2.677.667.418.033	<i>Immature plants</i>
Tanaman menghasilkan	24.386.673.045.818	-	(310.866.515.331)	845.209.249.377	24.921.015.779.864	<i>Mature plants</i>
Bibit	122.957.324.637	79.784.264.962	(7.441.685.065)	(62.644.052.915)	132.655.851.619	<i>Seedlings</i>
Tanah	10.667.401.289.999	-	(211.611.846.699)	-	10.455.789.443.300	<i>Land</i>
Mesin dan peralatan	9.585.715.367.555	507.328.102.692	(23.657.326.130)	193.457.516.437	10.262.843.660.554	<i>Machinery and equipment</i>
Bangunan dan prasarana	6.974.703.121.205	188.806.842.973	(32.009.822.956)	169.448.032.291	7.300.948.173.513	<i>Building and infrastructure</i>
Kendaraan dan alat						<i>Vehicle and other</i>
pengangkutan lainnya	603.089.981.933	47.542.793.069	(7.443.063.962)	103.807.000	643.293.518.040	<i>transportations equipment</i>
Peralatan pertanian dan kantor	633.872.839.882	26.327.900.852	(9.845.518.296)	8.216.311.330	658.571.533.768	<i>Farming equipment and office</i>
Instalasi pembibitan	27.113.683.984	6.105.956.684	-	-	33.219.640.668	<i>Seedling instalations</i>
Aset tetap lainnya	41.717.865.849	395.534.298	-	-	42.113.400.147	<i>Other fixed asset</i>
Aset dalam penyelesaian	200.714.837.508	430.203.715.952	(2.008.195.521)	(386.710.719.699)	242.199.638.240	<i>Construction in progress</i>
Total nilai tercatat	55.818.454.803.209	2.178.551.907.833	(604.883.973.960)	(21.804.679.336)	57.370.318.057.746	<i>Total carrying amount</i>
<b>Akumulasi penyusutan</b>						<b>Accumulated depreciation</b>
Tanaman produktif - menghasilkan	(7.678.620.924.298)	(1.129.912.739.968)	260.875.808.263	1.147.387.178	(8.546.510.468.825)	<i>Bearer plants - Mature plants</i>
Mesin dan peralatan	(5.047.680.760.000)	(507.489.294.964)	23.620.455.852	-	(5.531.549.599.112)	<i>Machinery and equipment</i>
Bangunan dan prasarana	(4.142.020.826.029)	(358.106.490.165)	22.981.953.490	1.445.882.168	(4.475.699.480.536)	<i>Building and infrastructure</i>
Kendaraan dan alat						<i>Vehicle and other</i>
pengangkutan lainnya	(467.126.330.922)	(53.393.741.730)	7.443.063.957	(654.780.012)	(513.731.788.707)	<i>transportations equipment</i>
Peralatan pertanian dan kantor	(523.518.110.206)	(37.023.014.886)	9.081.726.253	654.780.012	(550.804.618.827)	<i>Farming equipment and office</i>
Instalasi pembibitan	(22.650.085.462)	(1.698.686.234)	-	-	(24.348.771.696)	<i>Seedling instalations</i>
Aset tetap lainnya	(27.842.958.795)	(1.800.527.597)	-	-	(29.643.486.392)	<i>Other fixed asset</i>
Sub-total	(17.909.459.995.712)	(2.089.424.495.544)	324.003.007.815	2.593.269.346	(19.672.288.214.095)	<i>Sub-total</i>
Penurunan nilai aset tetap	(589.732.959.675)	(738.097.000)	-	-	(590.471.056.675)	<i>Impairment fixed assets</i>
<b>Nilai tercatat - neto</b>	<b>37.319.261.847.822</b>				<b>37.107.558.786.976</b>	<b>Carrying amount - net</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 komposisi luas areal dalam ha atas tanaman produktif - tanaman menghasilkan (TM) dan tanaman produktif - tanaman belum menghasilkan (TBM) untuk setiap jenis tanaman adalah sebagai berikut: (tidak diaudit)

	Kelapa Sawit/ Palm Oil	Karet/ Rubber	Teh/ Tea	Kopi/ Coffee	Total/ Total	
<b>Tanaman menghasilkan</b>						<b>Mature plantation</b>
31 Desember 2023	362.270	40.067	5.926	237	408.500	December 31, 2023
31 Desember 2022	368.129	44.713	5.897	236	418.975	December 31, 2022
<b>Tanaman belum Menghasilkan</b>						<b>Immature plantation</b>
31 Desember 2023	44.837	3.460	329	264	48.890	December 31, 2023
31 Desember 2022	35.283	3.120	359	266	39.028	December 31, 2022

Pada tahun 2023, penambahan aset tetap tanah sebesar Rp1.300.877.537.142 merupakan kenaikan nilai wajar tanah Perusahaan yang dicatat pada penghasilan komprehensif lain pada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian (2022 : Nil). Revaluasi atas aset tetap tanah berdasarkan pada laporan Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid dan Rekan dan Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at, Yudistira dan Rekan dengan rincian sebagai berikut:

Nama KJPP/ KJPP Name/	Nomor Laporan KJPP/ KJPP Report Number	Tanggal Laporan/ Report Date	Nilai/ Amount
KJPP Rengganis, Hamid & Rekan	00127/2.0012-00/PI/01/0005/1/IV/2024	17 April 2024/ April 17, 2024	603.997.796.498
KJPP Dasa'at, Yudistira & Rekan	00316/2.0041-03/PI/01/0379/1/IV/2024	5 April 2024/ April 5, 2024	696.879.740.644
			<b>1.300.877.537.142</b>

Pendekatan penilaian yang digunakan dalam revaluasi ini adalah pendekatan nilai sisa tanah dengan menggunakan hirarki level 2 dan 3.

Nilai wajar tanah juga ditentukan dengan menggunakan pendekatan nilai pasar. Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai wajar tanah Grup adalah sebesar Rp11.756.665.873.497. (31 Desember 2022 : Rp10.455.789.443.300)

**13. FIXED ASSETS (continued)**

As of December 31, 2023 and 2022, composition of areal in hectares (ha) of bearer plants - mature plantations and bearer plants - immature plantations for each commodities are as follows: (un-audited)

In 2023, the addition on fixed asset - land amounted to Rp1,300,877,537,142 represents the surplus revaluation on the fixed asset - land of the Company and is recognized in other comprehensive income and accumulated in equity as part of other components equity in the consolidated financial statements (2022: Nil). The revaluation for fixed assets - land is based on the valuation report from Kantor Jasa Penilai Publik Rengganis, Hamid dan Rekan and Kantor Jasa Penilai Publik Dasa'at, Yudistira dan Rekan with the following details:

The valuation approach used in the assessment of this revaluation is land residual approach using hierarchy level 2 and 3.

The fair value of fixed asset - land is also determined according to a market value approach. As of December 31, 2023, the fair value of fixed asset - land of The Group is amounted to Rp11,756,665,873,497. (December 31, 2022: Rp10,455,789,443,300)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

Pengurangan pada aset tanaman produktif dan aset tetap lainnya yang dilaporkan sebagai bagian dari nilai pada laporan laba rugi komprehensif konsolidasian pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 adalah sebagai berikut:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ December 31, 2022 (As restated) (Note 46)
Pemindahan aset tanaman produktif dan aset tetap lainnya ke kelompok aset tidak produktif	106.541.608.857	63.728.523.934
Penyisipan bibit ke tanaman produktif menghasilkan	11.829.823.349	-
Penjualan tanah	1.106.945	518.022.633
Rugi atas revaluasi tanah	-	209.192.734.513
Penjualan bibit	-	7.441.685.065
<b>Total</b>	<b>118.372.539.151</b>	<b>280.880.966.145</b>

**13. FIXED ASSETS (continued)**

The deductions in bearer-plants and other fixed assets reported as part of the value in the consolidated statements of profit or loss and other comprehensive income dated December 31, 2023 and 2022 are as follows:

Reclassification of bearer plants - mature plantation and fixed asset to non-productive assets
Nursery insertion to bearer plants - mature plantation
Sale of land
Loss on revaluation of land
Sale of nurseries
<b>Total</b>

Pada tahun 2023, Perusahaan menerima ganti rugi atas penghapusbukuan aset kepada Kementerian PUPR atas tanah di Kebun Marjandi, Kebun Gunung Bayu dan Kebun Tinjowan, sebesar Rp43.491.336.708 (2022: 83.487.178.908) (Catatan 33).

In 2023, the Company received compensation for the write-off of assets to the Ministry of PUPR for the land in Kebun Marjandi, Kebun Gunung Bayu and Kebun Tinjowan, amounted to Rp43,491,336,708 (2022: Rp83,487,178,908) (Note 33).

Pada tahun 2023 dan 2022, terdapat aset tanaman dan aset bangunan dan prasarana yang berada dalam Kerja Sama Operasional ("KSO") dengan pihak ketiga sehingga direklasifikasi ke akun aset tidak lancar lainnya – aset KSO, neto masing-masing sebesar Rp4.483.430.502 dan Rp19.211.409.990 (Catatan 16).

In 2023 and 2022, there were plant assets and building and infrastructure assets that are in Joint Operation ("KSO") with third parties so it was reclassified to other non-current asset accounts – KSO assets, net each amounting Rp4,483,430,502 and Rp19,211,409,990 (Note 16).

Pada tahun 2023, aset dalam penyelesaian merupakan mesin dan peralatan, bangunan rumah karyawan, bangunan kantor dan pabrik, dan prasarana yang diperkirakan akan selesai pada tahun 2024.

In 2023, assets under construction represents machine and equipment, employee house buildings, office and plant buildings, and infrastructures and is expected to be completed in 2024.

	Perkiraan % penyelesaian/ Estimated % of completion	Nilai tercatat/ Carrying value	Tahun perkiraan penyelesaian/ Estimated years of completion	
<b>31 Desember 2023</b>				<b>December 31, 2023</b>
Mesin dan peralatan	77%	280.412.199.881	2024	Machinery and equipment
Bangunan dan prasarana	75%	90.064.646.804	2024	Building and infrastructure
Aset tetap lainnya	75 - 90%	23.513.309.557	2024	Other fixed asset
<b>Aset dalam penyelesaian</b>		<b>393.990.156.242</b>		<b>Assets under construction</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**13. ASET TETAP (lanjutan)**

**13. FIXED ASSETS (continued)**

	Perkiraan % penyelesaian/ Estimated % of completion	Nilai tercatat/ Carrying value	Tahun perkiraan penyelesaian/ Estimated years of completion	
<b>31 Desember 2022</b>				<b>December 31, 2022</b>
Mesin dan peralatan	82%	176.247.292.335	2023	Machinery and equipment
Bangunan dan prasarana	80%	52.396.749.806	2023	Building and infrastructure
Aset tetap lainnya	75 – 90%	13.555.596.099	2023	Other fixed asset
<b>Aset dalam penyelesaian</b>		<b>242.199.638.240</b>		<b>Assets under construction</b>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 tanaman menghasilkan, bangunan, mesin dan peralatan dan kendaraan tertentu telah diasuransikan kepada PT Asuransi Jasa Tania Tbk dan PT Bosowa Asuransi terhadap risiko kebakaran dan risiko lainnya berdasarkan paket polis tertentu dengan jumlah pertanggungan masing-masing sebesar Rp9.754 Miliar dan Rp9.394 Miliar. Manajemen berpendapat bahwa nilai pertanggungan tersebut cukup untuk menutupi kemungkinan kerugian atas risiko-risiko tersebut.

On December 31, 2023 and 2022 mature plantations, certain buildings, machinery and equipment and vehicles have been insured in PT Asuransi Jasa Tania Tbk and PT Bosowa Asuransi against the risk of fire and other risks based on a policy package with the sum insured each amounting to Rp9,754 Billion and Rp9,394 Billion. Management believes that the value of coverage is sufficient to cover the possibility of loss of such risks.

Aset tetap tertentu digunakan sebagai jaminan atas liabilitas jangka panjang lainnya yang diperoleh (Catatan 23).

Certain fixed assets are used as collateral for the other long-term liabilities (Note 23).

Beban penyusutan dialokasikan sebagai berikut:

Depreciation expense is allocated to:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Beban pokok pendapatan (Catatan 30)	1.836.721.407.424	1.793.693.198.819	Cost of revenue (Note 30)
Beban pemasaran dan penjualan (Catatan 31)	3.590.462.640	1.534.984.965	Marketing and selling expenses (Note 31)
Beban umum dan administrasi (Catatan 32)	47.298.335.869	67.428.731.781	General and administrative expenses (Note 32)
Beban operasi lain (Catatan 34)	83.345.113.097	226.767.579.979	Other operating expenses (Note 34)
<b>Total</b>	<b>1.970.955.319.030</b>	<b>2.089.424.495.544</b>	<b>Total</b>

Manajemen berkeyakinan bahwa penyisihan atas kerugian penurunan nilai adalah cukup untuk menutupi kerugian yang mungkin timbul.

Management believes that the allowance for impairment losses is adequate to cover possible losses.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. PROPERTI INVESTASI**

**14. INVESTMENT PROPERTY**

	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Keuntungan/ (Kerugian) dari pengukuran ulang nilai wajar/ net gain/ (Loss) from fair value re-measurement	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
Nilai wajar:				Fair Value:
Tanah	386.652.100.000	6.609.900.000	393.262.000.000	Land
Bangunan	39.838.700.000	6.624.300.000	46.463.000.000	Building
<b>Total</b>	<b>426.490.800.000</b>	<b>13.234.200.000</b>	<b>439.725.000.000</b>	<b>Total</b>
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Keuntungan/ (Kerugian) dari pengukuran ulang nilai wajar/ net gain/ (Loss) from fair value re-measurement	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Nilai wajar:				Fair Value:
Tanah	380.236.340.000	6.415.760.000	386.652.100.000	Land
Bangunan	41.184.600.000	(1.345.900.000)	39.838.700.000	Building
<b>Total</b>	<b>421.420.940.000</b>	<b>5.069.860.000</b>	<b>426.490.800.000</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 serta 1 Januari 2022/ 31 Desember 2023, Nilai wajar properti investasi yang dicatat berdasarkan laporan penilaian KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan dan KJPP Iwan Bachron dan Rekan, yang dilakukan berdasarkan pendekatan nilai pasar untuk aset tanah dan pendekatan biaya pergantian untuk bangunan dalam penilai independen pada laporannya masing-masing dengan rincian sebagai berikut:

As of December 31, 2023 and 2022 and January 1, 2022/ December 31, 2021, the fair value of investment properties recorded based on the valuation report by KJPP Rengganis, Hamid and Partners and KJPP Iwan Bachron and Partners, respectively according to a market value approach for land assets and a replacement cost approach for buildings in independent appraisers in their respective reports with the following details:

Periode/ Period	Nama KJPP/ KJPP Name	Tanggal Laporan/ Report Date	Nilai/ Amount
31 Desember 2023/ December 31, 2023	KJPP Rengganis, Hamid dan Rekan	17 April 2024/ April 17, 2024	439.725.000.000
31 Desember 2022/ December 31, 2022	KJPP Iwan Bachron dan Rekan	20 Februari 2023/ February 20, 2023	426.490.800.000
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	KJPP Iwan Bachron dan Rekan	28 Maret 2022/ March 28, 2022	421.420.940.000

Tidak terdapat perubahan teknik penilaian selama tahun berjalan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

There were no changes in valuation techniques during the year compared with previous years.

Untuk periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, kenaikan bersih dari nilai wajar sebesar Rp13.234.200.000 (Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: Rp5.069.860.000) dicatat sebagai pendapatan selisih nilai wajar properti investasi, sebagai bagian dari pendapatan operasi lain (Catatan 33).

For the period ended on December 31, 2023, net increase of fair value is amounted to Rp13,234,200,000 (Year ended December 31, 2022: Rp5,069,860,000) recorded as surplus of fair value of investment property as part of other income (Note 33).

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**14. PROPERTI INVESTASI (lanjutan)**

Penghasilan sewa properti investasi dicatat dalam pendapatan operasi lain dalam laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain konsolidasian masing-masing sebesar Rp4.904.730.190 dan Rp5.770.893.238 untuk periode yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan 2022.

**14. INVESTMENT PROPERTY (continued)**

The rental income of investment property is recorded in other operating income in the consolidated statement of profit or loss and other comprehensive income amounting to Rp4,904,730,190 and Rp5,770,893,238 for the period then ended December 31, 2023 and 2022.

**15. BEBAN TANGGUHAN HAK ATAS TANAH**

**15. DEFERRED CHARGES LANDRIGHTS**

	<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>	<b>31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ December 31, 2022 (As restated) (Note 46)</b>	
Saldo awal	291.470.360.129	280.446.120.298	<i>Beginning balance</i>
Penambahan	71.179.780.921	26.720.336.587	<i>Addition</i>
Amortisasi	(34.685.429.961)	(15.696.096.756)	<i>Amortization</i>
<b>Saldo akhir</b>	<b>327.964.711.089</b>	<b>291.470.360.129</b>	<b><i>Ending balance</i></b>

Pada Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021, Grup memiliki beberapa HGU atas tanah seluas 508.295 ha yang tersebar di wilayah Provinsi Sumatera Utara, Provinsi Sumatera Barat, Kalimantan Barat, Provinsi Kalimantan Selatan, Provinsi Kalimantan Timur, Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, Provinsi Riau, Provinsi Jambi, dan Provinsi Sulawesi Tengah dengan jangka waktu 21 sampai dengan 36 tahun. Manajemen berkeyakinan bahwa HGU tersebut dapat diperbaharui.

In December 31, 2023, December 31, 2022, January 1, 2022/ December 31, 2021, The Group has several land utilization rights (HGU) of 508.295 ha located in several areas in North Sumatera Province, West Sumatera Province, West Kalimantan Province, South Kalimantan Province, East Kalimantan Province, Nanggroe Aceh Darussalam Province, Riau Province, Jambi Province and Central Sulawesi Province for a period of 21 until 36 years. Management believes HGU will be able to be renewed.

Manajemen berpendapat tidak terdapat masalah dengan perpanjangan HGU karena seluruh hak tersebut diperoleh secara sah dan didukung dengan bukti pemilikan yang memadai.

Management believes there is no problem with the extension of HGU since all such rights were acquired legally and supported by sufficient evidence of ownership.

HGU beserta seluruh aset yang ada di atasnya dari beberapa unit usaha dan Entitas Anak tertentu digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh (Catatan 23).

HGU and all of the assets over the land of business units and certain subsidiaries are used as collateral for the bank loan obtained (Note 23).



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**15. BEBAN TANGGUHAN HAK ATAS TANAH  
(lanjutan)**

Amortisasi beban tangguhan hak atas tanah dialokasikan sebagai berikut:

**15. DEFERRED CHARGES LANDRIGHTS  
(continued)**

The amortization of deferred landrights costs is allocated to:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Beban pokok penjualan (Catatan 30)	12.526.141.472	13.177.511.487	Cost of goods sold (Note 30)
Beban umum administrasi (Catatan 32)	22.159.288.489	2.518.585.269	General and administrative expenses (Note 32)
<b>Total</b>	<b>34.685.429.961</b>	<b>15.696.096.756</b>	<b>Total</b>

**16. ASET LANCAR DAN TIDAK LANCAR LAINNYA**

**a. Aset Lancar Lainnya**

**16. OTHER CURRENT AND NON CURRENT ASSETS**

**a. Other Current Assets**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Uang muka				Advances
Uang muka pembelian	132.753.313.205	14.183.712.000	259.026.864.516	Advance purchases
Uang muka santunan hari tua	40.658.657.401	6.826.812.658	9.154.562.350	Post-retirement benefit advances
Biaya dibayar dimuka				Prepayment
Asuransi dibayar dimuka	10.027.373.588	14.756.503.029	7.298.019.825	Prepaid insurance
Lain lain	44.185.250.467	32.624.948.113	41.043.478.089	Other
<b>Total</b>	<b>227.624.594.661</b>	<b>68.391.975.800</b>	<b>316.522.924.780</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021, aset lancar lainnya merupakan uang muka yang dibayarkan vendor, asuransi kerugian dibayar dimuka, pembelian pupuk, karyawan yang merupakan asuransi kepada karyawan, gaji karyawan dan sewa rumah karyawan, Imbalan kerja yang merupakan asuransi kepada dewan direksi dan komisaris.

In December 31, 2023, December 31, 2022 and January 1, 2022/ December 31, 2021, other current assets are mainly consists of advances that are paid to their vendors, prepaid loss insurance, fertilizer purchases, employee benefits which include employee insurance, and rent of employee housing. Compensation to employees, which includes insurance for the board of directors and commissioners.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**16. ASET LANCAR DAN TIDAK LANCAR LAINNYA  
(lanjutan)**

**b. Aset Tidak Lancar Lainnya**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Aset tidak produktif	1.253.006.236.054	1.109.093.828.127	984.795.131.441	Non-productive assets
Aset Kerja Sama Operasi	70.665.709.467	39.823.614.898	-	Joint Operation assets
Piranti lunak	19.509.914.186	45.609.846.467	39.887.126.122	Software
Beban tanggungan	9.331.972.375	10.180.886.712	14.100.643.184	Deferred charges
Lain-lain	22.774.340.190	28.123.470.710	31.136.756.662	Others
<b>Total</b>	<b>1.375.288.172.272</b>	<b>1.232.831.646.914</b>	<b>1.069.919.657.409</b>	<b>Total</b>
Akumulasi penyusutan aset tidak produktif, amortisasi beban tanggungan dan penurunan nilai aset tidak lancar lainnya	(1.281.580.033.190)	(1.147.612.908.953)	(1.017.724.487.294)	Accumulated depreciation of non-productive assets, amortization of deferred charges and impairment of other non-current assets
<b>Neto</b>	<b>93.708.139.082</b>	<b>85.218.737.961</b>	<b>52.195.170.115</b>	<b>Net</b>

Aset Tidak Produktif

Aset tidak produktif merupakan aset tetap Perusahaan dan beberapa Entitas Anak yang nilai bukunya sudah nol dan untuk sementara dicatat di dalam akun "Aset tidak lancar lainnya" menunggu persetujuan penghapusan dari Dewan Komisaris.

Aset Kerja Sama Operasi

Aset kerja sama operasi merupakan jumlah pendanaan yang telah dikeluarkan perusahaan untuk membiayai kerja sama operasi.

Beban Tanggungan

Beban tanggungan merupakan biaya pengembangan unit kerja dan pembangunan PKS beban pengembangan lahan kemitraan dan beban tanggungan lainnya.

Piranti Lunak

Piranti lunak merupakan aset tidak berwujud berupa System Application and Processing (SAP) yang digunakan oleh Perusahaan yang akan diamortisasi selama 2 sampai 5 tahun dan sistem ICBHRM, yang merupakan perangkat lunak yang digunakan oleh bagian Sumber Daya Manusia (SDM) Perusahaan.

**16. OTHER CURRENT AND NON CURRENT ASSETS  
(continued)**

**b. Other Non-current Asset**

Non-Productive Assets

Non-productive assets are fixed assets of the Company and several Subsidiaries which its book value is already nil and temporarily recorded in the account "Other non-current assets" waiting for the approval to write-off from the Board of Commissionaires.

Joint Operation Agreement Assets

The joint operation assets represent the amount of funding that has been issued by the company to finance the joint operation.

Deferred Charges

Deferred charges – costs of developing work units and building PKS, partnership and land development costs and other deferred charges.

Software

Software is an intangible asset in the form of application of System Application and Processing (SAP) to the Company which will be amortized from 2 to 5 years and ICBHRM system, which is software used by the Human Resources Department ("HRD") of the Company.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**17. UTANG BANK JANGKA PENDEK**

**17. SHORT-TERM BANK LOANS**

Kreditor/Creditor	Fasilitas Pinjaman Maksimum/ Maximum facility	Jatuh Tempo/ Maturity date	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As restated (Note 46)		
			31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 December 1, 2022 December 31, 2021
Entitas berelasi dengan Pemerintah/ Government related entities PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	8.000.000.000	Januari 2024	7.500.000.000	2.000.000.000	-

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021, berdasarkan Perjanjian Kredit Agunan Surat Berharga No. SME.MIB/SPPK.001/2023 pada tanggal 10 Januari 2023, PT Prima Medica Nusantara (Entitas Anak) mendapatkan fasilitas kredit yang bersifat Revolving-Rekening Koran dengan limit sebesar Rp8.000.000.000. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 1,50% per tahun di atas tingkat suku Bunga Deposito tertinggi yang pembayarannya dilakukan setiap tanggal 15 setiap bulan terhitung mulai tanggal 27 Januari 2023 sampai dengan tanggal 26 Januari 2024. Selanjutnya pada bulan Januari 2024, entitas anak telah melunasi fasilitas pinjaman ini.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021, pinjaman ini dijamin dengan agunan berupa deposito senilai Rp8.000.000.000 (Catatan 5).

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk

In December 31, 2023, December 31, 2022, and January 1, 2022/December 31, 2021, based on the Securities Collateral Credit Agreement No. SME.MIB/SPPK.001/2023, dated January 10, 2023, PT Prima Medica Nusantara (Subsidiary) obtained credit facility in the form of Revolving Securities Collateral Credit-Current Account with a limit of Rp8,000,000,000. This loan is subject to an interest of 1.50% per annum above the highest deposit interest rate, which is done every 15th of every month. From January 27, 2023 until January 26, 2024. Furthermore, on January 2024, the subsidiary has fully paid this loan facility.

In December 31, 2023, December 31, 2022, and January 1, 2022/ December 31, 2021, this loan is secured with collateral such as restricted time deposit amounting to Rp8.000.000.000 (Note 5).

**18. UTANG USAHA**

Utang usaha terutama timbul atas pembelian pupuk, suku cadang, bahan pendukung lainnya, serta penggunaan jasa yang dibutuhkan untuk operasi Grup, sebagai berikut:

**18. TRADE PAYABLES**

Trade payable primarily arise from purchases of fertilizer, spare parts, other materials as well as purchases of services required for the Group's operations, as follow:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			Total
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Pihak ketiga	3.185.671.230.868	2.689.980.811.727	2.032.240.124.863	
Pihak berelasi (Catatan 36e)	158.802.286.184	99.014.546.198	43.676.651.555	Third parties Related parties (Note 36e)
<b>Total</b>	<b>3.344.473.517.052</b>	<b>2.788.995.357.925</b>	<b>2.075.916.776.418</b>	<b>Total</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**18. UTANG USAHA (lanjutan)**

Analisa umur utang usaha adalah sebagai berikut:

**18. TRADE PAYABLES (continued)**

The aging analysis of trade payables is as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Lancar	490.069.069.478	1.224.715.001.519	734.094.111.673	Current Overdue: 1-30 days 31-60 days 61-90 days More than 90 days
Telah jatuh tempo:				
1 - 30 hari	767.218.876.822	816.476.667.680	489.396.074.448	
31 - 60 hari	779.106.730.809	322.226.185.648	575.099.692.427	
61 - 90 hari	656.728.194.129	43.692.212.501	28.652.137.782	
Lebih dari 90 hari	651.350.645.814	381.885.290.577	248.674.760.088	
<b>Total</b>	<b>3.344.473.517.052</b>	<b>2.788.995.357.925</b>	<b>2.075.916.776.418</b>	<b>Total</b>

**19. UTANG LAIN-LAIN**

Utang lain-lain terutama timbul dari utang dividen kepada pihak berelasi dan jasa konsultasi, sebagai berikut:

**19. OTHER PAYABLES**

Other payable primarily arise from dividend payables to related parties and consultation service, as follow:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Pihak ketiga	119.498.695.185	132.375.159.833	221.023.579.488	Third parties Related parties (Note 36f)
Pihak berelasi (Catatan 36f)	655.176.488.024	392.578.442.413	321.712.044.864	
<b>Total</b>	<b>774.675.183.209</b>	<b>524.953.602.246</b>	<b>542.735.624.352</b>	<b>Total</b>

**20. LIABILITAS KONTRAK**

Liabilitas kontrak terutama merupakan penerimaan uang muka atas penjualan produk sawit.

**20. CONTRACT LIABILITIES**

Contract liabilities mainly represent advance received from sales of palm oil products.

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Pihak berelasi (Catatan 36g)	13.999.046.536	26.915.277.152	13.491.832.747	Related parties (Note 36g) Third parties
Pihak ketiga	753.496.915.261	1.102.834.233.833	446.162.987.158	
<b>Total</b>	<b>767.495.961.797</b>	<b>1.129.749.510.985</b>	<b>459.654.819.905</b>	<b>Total</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PERPAJAKAN**

**a. Pajak dibayar di muka**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)		
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021
<b>Perusahaan:</b>			
PPN - Masukan	1.288.135.272.371	776.131.461.589	629.834.179.775
Pasal 4 (2)	-	-	196.873.444
Pasal 22	635.366.330	-	-
Pasal 23	779.879.209	-	-
<b>Entitas Anak:</b>			
PPN - Masukan	31.214.575.399	20.996.340.266	13.880.513.469
Pasal 22	-	-	32.362.732
<b>Total</b>	<b>1.320.765.093.309</b>	<b>797.127.801.855</b>	<b>643.943.929.420</b>

**Company:**  
VAT - In  
Article 4 (2)  
Article 22  
Article 22

**Subsidiaries:**  
VAT - In  
Article 22

**Total**

**b. Piutang tagihan pajak**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)		
	31 Desember 2023/ December 1, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021
<b>Perusahaan:</b>			
Pajak Penghasilan Badan:			
Tahun 2023	407.473.828.481	-	-
Tahun 2022	-	2.227.912.247	-
Tahun 2021	134.536.961	2.493.683.613	2.493.683.613
Tahun 2019	-	-	13.895.220.442
Tahun 2018	6.254.180.515	6.254.180.515	9.859.302.349
Tahun 2017	182.595.874.080	177.174.383.105	-
Tahun 2015	12.212.259.212	12.212.259.212	82.061.842.122
Tahun 2013	-	-	17.349.476.495
Tahun 2012	-	-	17.017.010.295
PPN			
Tahun 2022	-	99.606.128.397	-
Tahun 2017	193.455.281	-	-
Tahun 2013	942.340.584	942.340.584	942.340.584
Tahun 2012	9.770.869.081	9.770.869.081	9.770.869.081
Pajak Penghasilan:			
Pasal 21	686.105.727	25.902.175.354	-
Pasal 23	7.345.785.002	7.895.452.900	-
<b>Subtotal</b>	<b>627.609.234.924</b>	<b>344.479.385.008</b>	<b>153.389.744.981</b>
<b>Entitas Anak:</b>			
Pajak Penghasilan Badan:			
Tahun 2021	-	-	131.789.448
Tahun 2020	-	-	102.701.667
Tahun 2019	60.534.163	60.534.163	60.534.163
<b>Subtotal</b>	<b>60.534.163</b>	<b>60.534.163</b>	<b>295.025.278</b>
<b>Total</b>	<b>627.669.769.087</b>	<b>344.539.919.171</b>	<b>153.684.770.259</b>

**Company:**  
Corporate Income Taxes:  
Year 2023  
Year 2022  
Year 2021  
Year 2019  
Year 2018  
Year 2017  
Year 2015  
Year 2013  
Year 2012

VAT  
Year 2022  
Year 2017  
Year 2013  
Year 2012

Income Taxes:  
Article 21  
Article 23

**Subtotal**

**Subsidiaries:**  
Corporate Income Taxes:  
Year 2021  
Year 2020  
Year 2019

**Subtotal**

**Total**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**21. TAXATION (continued)**

**c. Utang pajak**

**c. Taxes payable**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)		
		31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
<b>Perusahaan:</b>				<b>Company:</b>
PPN - Keluaran	30.056.815.451	2.301.005.013	11.477.514.738	VAT - Out
Pajak Bumi dan Bangunan	265.377.840	-	169.979.252	Land and Building Tax
Pajak Penghasilan:				Income Taxes:
Pasal 4 (2)	2.603.280.293	1.499.222.541	1.396.806.421	Article 4 (2)
Pasal 21	73.411.333.337	50.117.939.704	16.205.096.018	Article 21
Pasal 22	1.762.170.489	1.262.105.767	1.474.077.956	Article 22
Pasal 23	5.256.585.366	9.937.073.333	8.658.075.185	Article 23
Pasal 25	-	93.598.572.941	44.117.248.796	Article 25
Pasal 29	7.377.544.150	170.164.119.763	860.950.646.153	Article 29
<b>Entitas anak:</b>				<b>Subsidiaries:</b>
Pajak Penghasilan:				Income Taxes:
PPN - Keluaran	2.326.258.113	1.469.788.909	6.523.102.387	VAT - Out
Pajak Bumi dan Bangunan	3.169.668	65.250.286.225	-	Land and Building Tax
Pajak Penghasilan:				Income Taxes:
Pasal 4 (2)	66.750.675	123.822.967	84.881.500	Article 4 (2)
Pasal 21	872.267.157	167.164.076	887.769.511	Article 21
Pasal 22	101.017.422	1.085.028.750	156.169.721	Article 22
Pasal 23	381.736.318	191.731.474	694.432.064	Article 23
Pasal 25	61.455.946	517.410.724	1.979.826.218	Article 25
Pasal 29	2.932.449.943	2.569.510.844	850.895.986	Article 29
<b>Total</b>	<b>127.478.212.168</b>	<b>400.254.783.031</b>	<b>955.626.521.906</b>	<b>Total</b>

**d. Beban pajak penghasilan**

**d. Income tax expenses**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
<b>Perusahaan:</b>			<b>Company:</b>
Kini	287.929.579.740	606.575.534.180	Current
Pajak periode lalu	622.781.913	12.994.593.642	Prior year income tax
Tangguhan	110.871.383.034	55.828.372.142	Deferred
<b>Total</b>	<b>399.423.744.687</b>	<b>675.398.499.964</b>	<b>Total</b>
<b>Entitas Anak:</b>			<b>Subsidiaries:</b>
Kini	2.589.360.608	2.768.313.689	Current
Tangguhan	(414.523.279)	2.368.458.991	Deferred
<b>Total</b>	<b>2.174.837.329</b>	<b>5.136.772.680</b>	<b>Total</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**d. Beban/ (manfaat) pajak penghasilan (lanjutan)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)
<b>Merging Entities:</b>		
Kini	209.119.322.279	546.114.310.460
Pajak periode lalu	3.306.809.061	2.410.573.066
Tangguhan	103.505.683.691	56.958.409.919
<b>Total</b>	<b>315.931.815.031</b>	<b>605.483.293.445</b>
<b>Total - neto</b>	<b>717.530.397.047</b>	<b>1.286.018.566.089</b>

**e. Pajak kini**

Rekonsiliasi antara laba sebelum beban pajak penghasilan dengan taksiran penghasilan kena pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal-tanggal 31 Desember 2023 dan 2022 dan tahun yang berakhir 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	1.586.880.635.228	2.855.323.059.453
Rugi sebelum pajak entitas anak	152.355.802.847	18.852.645.144
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	1.739.236.438.075	2.874.175.704.597
Ditambah/ (dikurangi)		
<b>Beda waktu:</b>		
Aset biologis	35.443.572.718	1.024.124.484
Nilai wajar persediaan	150.478.575.780	(912.324.875)
Beban penyusutan, amortisasi dan biaya tenaga kerja	(140.228.857.392)	(24.403.668.511)
Penyisihan beban manfaat karyawan	(731.488.678.335)	(287.920.218.576)
Penyisihan penurunan nilai piutang	12.888.426.526	62.027.054.648
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(1.640.722.934)	-
Amortisasi nilai wajar piutang	33.034.713.227	(3.580.295.105)
Sewa	(142.714.266)	-
Bonus	19.776.033.900	-
<b>Total beda waktu</b>	<b>(621.879.650.776)</b>	<b>(253.765.327.935)</b>

**21. TAXATION (continued)**

**d. Income tax expenses/ (benefit) (continued)**

	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)
<b>Merging Entities:</b>		
Kini	209.119.322.279	546.114.310.460
Pajak periode lalu	3.306.809.061	2.410.573.066
Tangguhan	103.505.683.691	56.958.409.919
<b>Total</b>	<b>315.931.815.031</b>	<b>605.483.293.445</b>
<b>Total - net</b>	<b>717.530.397.047</b>	<b>1.286.018.566.089</b>

**e. Current tax**

The reconciliation between profit before income tax expense with the estimated taxable income for the period end on December 31, 2023 and 2022 and year ended December 31, 2022, are as follows:

	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)
Laba sebelum beban pajak penghasilan	1.586.880.635.228	2.855.323.059.453
Rugi sebelum pajak entitas anak	152.355.802.847	18.852.645.144
Laba sebelum pajak penghasilan Perusahaan	1.739.236.438.075	2.874.175.704.597
Ditambah/ (dikurangi)		
<b>Beda waktu:</b>		
Aset biologis	35.443.572.718	1.024.124.484
Nilai wajar persediaan	150.478.575.780	(912.324.875)
Beban penyusutan, amortisasi dan biaya tenaga kerja	(140.228.857.392)	(24.403.668.511)
Penyisihan beban manfaat karyawan	(731.488.678.335)	(287.920.218.576)
Penyisihan penurunan nilai piutang	12.888.426.526	62.027.054.648
Penyisihan penurunan nilai persediaan	(1.640.722.934)	-
Amortisasi nilai wajar piutang	33.034.713.227	(3.580.295.105)
Sewa	(142.714.266)	-
Bonus	19.776.033.900	-
<b>Total beda waktu</b>	<b>(621.879.650.776)</b>	<b>(253.765.327.935)</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Pajak kini (lanjutan)**

**21. TAXATION (continued)**

**e. Current tax (continued)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
<b>Beda tetap:</b>			
Beban pensiun	47.194.635.398	39.248.935.487	<b>Permanent differences:</b>
Beban sosial Perusahaan (CSR) dan PKBL	51.183.308.406	37.596.961.812	Fair value of inventory
Sumbangan	(52.011.678.570)	20.107.221.828	Corporate Social Responsibility and PKBL
Penurunan nilai tanaman	28.258.854.683	15.414.965.828	Donation
Rugi (Laba) entitas asosiasi	26.435.857.661	99.006.530.424	Impairment of bearer plants
Penghasilan bunga yang sudah dikenakan pajak final	(23.872.609.209)	(21.424.596.577)	Loss from associated entity
Pendapatan atas pelepasan lahan yang telah dikenakan PPh Final	(43.491.336.708)	(83.487.178.908)	Interest income subjected to final tax
Beda tetap lainnya	157.716.999.004	30.288.302.922	Income from sale of land subjected to final income tax
			Other permanent differences
Total beda tetap	191.414.030.665	136.751.142.816	Total permanent differences
<b>Taksiran penghasilan kena pajak – Perusahaan</b>	<b>1.308.770.817.964</b>	<b>2.757.161.519.478</b>	<b>Estimated taxable income - Company</b>
Taksiran beban pajak penghasilan - Perusahaan	287.929.579.740	606.575.534.180	Accumulated tax losses - Company
Taksiran beban pajak penghasilan - Entitas Anak	2.589.360.608	2.768.313.689	Accumulated tax losses - Subsidiaries
Taksiran beban pajak penghasilan - Merging Entities	209.119.322.279	546.114.310.460	Accumulated tax losses - Merging Entities
<b>Taksiran beban pajak penghasilan Grup</b>	<b>499.638.262.627</b>	<b>1.155.458.158.329</b>	<b>Estimated income tax expense Group</b>
Pajak dibayar dimuka - Perusahaan			Prepaid tax - Company
Pajak penghasilan:			Income tax:
Pasal 22	288.695.250	51.896.160	Article 22
Pasal 23	34.019.218.940	1.449.794.749	Article 23
Pasal 25	420.529.924.492	577.459.403.286	Article 25
Total	454.837.838.682	578.961.094.195	Total
Pajak dibayar dimuka - Entitas Anak			Prepaid tax - Subsidiaries
Pajak penghasilan:			Income tax:
Pasal 23	427.690.360	-	Article 23
Pasal 25	240.110.949	199.163.492	Article 25
Total	667.801.309	199.163.492	Total
Pajak dibayar dimuka - Merging Entities			Prepaid tax - Merging Entities
Pajak penghasilan:			Income tax:
Pasal 22	742.199.712	1.492.028.241	Article 22
Pasal 23	6.461.718.867	5.186.611.486	Article 23
Pasal 25	442.819.876.163	399.113.542.563	Article 25
Total	450.023.794.742	405.792.182.290	Total



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**e. Pajak kini (lanjutan)**

**21. TAXATION (continued)**

**f. Current tax (continued)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Kurang (Lebih) bayar pajak badan - Perusahaan	(166.908.258.942)	27.614.439.985	<i>Under (Over) payment corporate income tax - Company</i>
Kurang (Lebih) bayar pajak badan - Entitas Anak	1.921.559.299	2.569.150.197	<i>Under (Over) payment corporate income tax - Subsidiaries</i>
Kurang (Lebih) bayar pajak badan - Merging Entities	(240.904.472.463)	140.322.128.170	<i>Under (Over) payment corporate income tax - Merging Entities</i>
<b>Kurang (Lebih) bayar pajak badan Grup</b>	<b>(405.891.172.106)</b>	<b>170.505.718.352</b>	<b><i>Under (Over) payment corporate income tax Group</i></b>
<b>Laba sebelum beban pajak Penghasilan - Grup</b>	<b>4.364.078.091.150</b>	<b>8.472.297.517.014</b>	<b><i>Income before income tax expense - Group</i></b>
Pengaruh pajak atas:			<i>Tax effects on:</i>
Beban pajak penghasilan berdasarkan tarif pajak yang berlaku	959.745.070.832	1.863.905.453.744	<i>Income tax based on tax applicable tax rates</i>
Beda tetap dan efek eliminasi	157.782.635.784	74.731.095.177	<i>Permanent difference and elimination effect</i>
Penyisihan pajak tangguhan Perusahaan	(11.880.098.622)	(42.571.614.605)	<i>Deferred tax provision of Company</i>
Penyisihan pajak tangguhan Entitas Anak	(234.667.113)	2.436.499.674	<i>Deferred tax provision of Subsidiaries</i>
Penyesuaian pajak tangguhan Perusahaan	(13.390.414.944)	15.986.453.882	<i>Adjustment on deferred tax of Company</i>
Penyesuaian pajak tangguhan Entitas Anak	(103.746.027)	3.162.198.843	<i>Adjustment on deferred tax of Subsidiaries</i>
Rugi fiskal entitas anak yang dapat dikompensasikan	(14.669.240.411)	(14.968.527.668)	<i>Compensable fiscal losses on subsidiaries</i>
Rugi fiskal tahun berjalan entitas anak tidak diakui	42.310.499.072	23.283.509.886	<i>Current year fiscal losses subsidiaries not recognized</i>
Beban pajak penghasilan merging entities tidak diakui	(405.959.232.498)	(655.351.669.552)	<i>Income tax expense merging entities not recognized</i>
Penyesuaian pajak kini tahun lalu	3.929.590.974	15.405.166.708	<i>Prior year current tax adjustment</i>
<b>Total beban pajak Penghasilan - Grup</b>	<b>717.530.397.047</b>	<b>1.286.018.566.089</b>	<b><i>Total income tax expense - Group</i></b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**21. TAXATION (continued)**

**f. Pajak tangguhan**

**e. Deferred tax**

Mutasi aset/(liabilitas) pajak tangguhan adalah sebagai berikut:

The movement of deferred tax assets/(liability) is as follows:

	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Dibebankan (dikreditkan) pada laba rugi/ credited to profit and loss	Penghasilan Komprehensif lainnya/ Adjustment to other comprehensive income	Dikreditkan pada komponen ekuitas lainnya/ Charge to to other equity component	Penyesuaian atas pajak tangguhan/ deferred tax adjustment	31 Desember 2023/ December 31, 2023	
<b>Perusahaan</b>							<b>Company</b>
<b>Aset pajak tangguhan</b>							<b>Deferred tax assets</b>
Cadangan kerugian penurunan nilai	172.695.199.617	34.973.882.784	-	14.124.602.259	-	221.793.684.660	Provision for impairment losses
Rugi fiskal yang dapat di dikompensasi	52.425.189.453	12.740.320.175	-	-	-	65.165.509.628	Compensable fiscal losses
Tanaman	13.508.742.815	(1.268.718.369)	-	-	-	12.240.024.446	Plantation
Penyisihan beban manfaat karyawan	1.468.925.298.932	(258.135.397.413)	178.748.384.572	493.765.120.969	-	1.883.303.407.060	Provision for employee benefit
Aset hak guna	3.775.269.052	(4.326.726.276)	-	-	-	(551.457.224)	Right use of assets
Nilai wajar piutang pihak berelasi	6.300.176.479	(22.219.484.153)	-	21.627.830.237	-	5.708.522.563	Fair value of due from related party
Lain-lain	23.513.728.548	(15.578.836.839)	(3.347.402.619)	-	-	4.587.489.090	Others
<b>Liabilitas pajak tangguhan</b>							<b>Deferred tax liabilities</b>
Upah, aset tetap dan tanaman menghasilkan	(760.446.174.674)	(54.590.562.825)	-	(549.794.541.081)	13.390.414.944	(1.351.440.863.636)	Wages, fixed assets and mature plantation
Nilai wajar aset biologis	(76.240.742.059)	8.170.222.502	-	(25.221.394.200)	-	(93.291.913.757)	Fair value of biological asset
Nilai wajar persediaan	(54.984.294.975)	56.269.697.976	-	(7.455.717.121)	-	(6.170.314.120)	Fair value of inventory
Nilai wajar utang pihak berelasi	(49.973.887.824)	6.384.892.791	-	-	-	(43.588.995.033)	Fair value of due from related party
Lain-lain	(20.295.000)	-	8.470.000	-	-	(11.825.000)	Others
Penurunan nilai aset pajak tangguhan	(339.506.901.039)	11.880.098.622	(18.182.433.722)	(12.534.756.921)	-	(358.343.993.060)	Impairment of deferred tax asset
<b>Total aset pajak tangguhan neto - Perusahaan</b>	<b>459.971.309.325</b>	<b>(225.700.611.025)</b>	<b>157.227.018.231</b>	<b>(65.488.855.858)</b>	<b>13.390.414.944</b>	<b>339.399.275.617</b>	<b>Total deferred tax assets net - Company</b>
<b>Entitas Anak</b>							<b>Subsidiaries</b>
Aset pajak tangguhan	877.763.750	432.920.698	94.578.432	-	68.757.735	1.474.020.615	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(31.258.107.609)	(2.189.014.089)	154.690.687	-	34.988.292	(33.257.442.719)	Deferred tax liabilities
<b>Total aset pajak tangguhan neto</b>	<b>460.849.073.075</b>	<b>(225.267.690.327)</b>	<b>157.321.596.663</b>	<b>(65.488.855.858)</b>	<b>13.459.172.679</b>	<b>340.873.296.232</b>	<b>Total deferred tax assets net</b>
<b>Total liabilitas pajak tangguhan neto</b>	<b>(31.258.107.609)</b>	<b>(2.189.014.089)</b>	<b>154.690.687</b>	<b>-</b>	<b>34.988.292</b>	<b>(33.257.442.719)</b>	<b>Total deferred tax liabilities net</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**21. TAXATION (continued)**

**f. Pajak tangguhan (lanjutan)**

**f. Deferred tax (continued)**

	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Dibebankan (dikreditkan) pada laba rugi/ credited to profit and loss	Penghasilan Korporasi lainnya/ Adjustment to other comprehensive income	Dikreditkan pada komponen ekuitas lainnya/ Charge to to other equity component	Penyesuaian atas pajak tangguhan/ deferred tax adjustment	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
<b>Perusahaan</b>							<b>Company</b>
<u>Aset pajak tangguhan</u>							<u>Deferred tax assets</u>
Cadangan kerugian penurunan nilai	123.171.473.617	49.523.726.000	-	-	-	172.695.199.617	Provision for impairment losses
Rugi fiskal yang dapat di kompensasi	218.231.178.099	(34.926.665.111)	-	-	(130.879.323.535)	52.425.189.453	Compensable fiscal losses
Tanaman	14.377.616.075	(868.873.260)	-	-	-	13.508.742.815	Plantation
Penyisihan beban manfaat karyawan	1.469.497.777.553	(133.890.073.420)	133.317.594.799	-	-	1.468.925.298.932	Provision for employee benefit
Aset hak guna	2.638.667.403	1.136.601.649	-	-	-	3.775.269.052	Right use of assets
Nilai wajar piutang pihak berelasi	7.087.841.402	(787.664.923)	-	-	-	6.300.176.479	Fair value of due from related party
Lain-lain	17.262.547.021	4.348.525.415	1.902.656.112	-	-	23.513.728.548	Others
<u>Liabilitas pajak tangguhan</u>							<u>Deferred tax liabilities</u>
Upah, aset tetap dan tanaman menghasilkan	(728.238.590.148)	(16.013.230.644)	-	-	(16.194.353.882)	(760.446.174.674)	Wages, fixed assets and mature plantation
Nilai wajar aset biologis	(83.726.712.766)	7.485.970.707	-	-	-	(76.240.742.059)	Fair value of biological asset
Nilai wajar persediaan	(39.122.955.113)	(15.861.339.862)	-	-	-	(54.984.294.975)	Fair value of inventory
Nilai wajar utang pihak berelasi	(56.398.001.271)	6.424.113.447	-	-	-	(49.973.887.824)	Fair value of due from related party
Lain-lain	(289.944.289)	67.194.289	(5.445.000)	-	207.900.000	(20.295.000)	Others
Penurunan nilai aset pajak tangguhan	(502.482.946.797)	42.571.614.605	(10.474.892.382)	-	130.879.323.535	(339.506.901.039)	Impairment of deferred tax asset
Total aset pajak tangguhan neto - Perusahaan	442.007.950.786	(90.790.101.108)	124.739.913.529	-	(15.986.453.882)	459.971.309.325	Total deferred tax assets net - Company
<b>Entitas Anak</b>							<b>Subsidiaries</b>
Aset pajak tangguhan	955.954.214	144.793.669	(222.984.133)	-	-	877.763.750	Deferred tax assets
Liabilitas pajak tangguhan	(22.658.467.295)	(5.361.280.888)	(76.160.583)	-	(3.162.198.843)	(31.258.107.609)	Deferred tax liabilities
<b>Total aset pajak tangguhan neto</b>	<b>442.963.905.000</b>	<b>(90.645.307.439)</b>	<b>124.516.929.396</b>	<b>-</b>	<b>(15.986.453.882)</b>	<b>460.849.073.075</b>	<b>Total deferred tax assets net</b>
<b>Total liabilitas pajak tangguhan neto</b>	<b>(22.658.467.295)</b>	<b>(5.361.280.888)</b>	<b>(76.160.583)</b>	<b>-</b>	<b>(3.162.198.843)</b>	<b>(31.258.107.609)</b>	<b>Total deferred tax liabilities net</b>

Pada tanggal 7 Oktober 2021, Pemerintah mengesahkan Rancangan Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (RUU HPP) menjadi UU Nomor 7 Tahun 2021 yang menetapkan, antara lain, kenaikan tarif Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dari semua 10% menjadi 11% mulai tanggal 1 April 2022 dan 12% mulai tanggal 1 Januari 2025. Selain itu, membatalkan penurunan tarif pajak penghasilan wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap dari semula turun ke 20% menjadi tetap sebesar 22% yang mulai berlaku pada tahun pajak 2022.

On October 7, 2021, the Government approved the bill for harmonization of tax regulations ("UU HPP") No. 7 Year 2021 which stipulates, among others, the increase of Value Added Tax (VAT) from previously 10% to become 11% effective on April 1, 2022 and 12% effective on January 1, 2025. In addition, revoke the reduction to the tax rates for corporate income tax payers and permanent establishments entitles from previously decrease to 20% to remain at 22% for fiscal year 2022 onwards.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**21. TAXATION (continued)**

**g. Surat Ketetapan Pajak**

**g. Tax Assesment**

<u>Perusahaan</u>			
<u>Surat Pajak/ Tax Letter</u>	<u>Nilai (Lebih)/Kurang Bayar dari Sengketa pajak terakhir/Amount of (Over)/Under Payment from Latest Tax Dispute</u>	<u>Piutang tagihan pajak/ Claims for Tax Refund</u>	<u>Status/ Status</u>
<b>Pajak Penghasilan Badan/ Corporate Income Tax</b>			
PPh Badan 2021	-	Rp134.536.961	Menunggu hasil pemeriksaan dari kantor pajak atas lebih bayar yang dilaporkan/Waiting for the result of inspection for the overpayment reported.
PPh Badan 2020	Rp3.306.809.061	-	Sudah dicatat oleh Perusahaan pada tahun 2023 sebesar Rp3.306.809.061 pada "beban pajak periode lalu" dan dibayarkan pada tanggal 9 November 2023/Has been recorded by The Company in 2023 to prior year income tax for Rp3,306,809,061 and paid on November 9, 2023.
PPh Badan 2019	-	-	Sudah dicatat oleh Perusahaan pada tahun 2022 sebesar Rp11.817.877.072 pada "beban pajak periode lalu"/Has been recorded by The Company in 2022 to prior year income tax for Rp11,817,877,072.
PPh Badan 2018	(Rp24.639.699.894)	Rp6.254.180.515	Menunggu putusan Pengadilan Pajak atas proses banding yang masih berlangsung/Waiting for the tax court's decision on the appeal process.
PPh Badan 2017	Rp374.740.432.034	-	Perusahaan mendapatkan Surat Ketetapan Pajak Nihil di tahun 2022 atas PPh Badan tahun 2017, dimana menurut Kantor Pajak Perusahaan mempunyai laba fiskal sebesar Rp374.740.432.034. Atas sengketa ini, Perusahaan masih menunggu putusan Pengadilan Pajak/The Company received Zero Tax Assessment Letter in 2022 for the Corporate Income Tax Year 2017, where according to the tax office the fiscal income of The Company is Rp374,740,432,034. Regarding this dispute, the Company is still waiting for the tax court's decision.
PPh Badan 2017	Rp171.950.518.110	Rp170.773.801.544	Pada tanggal 18 Mei 2023, Perusahaan menerima putusan keberatan, dimana Kantor Pajak mengabulkan sebagian keberatan Perusahaan sebesar Rp6.400.581.565. Sebesar Rp5.883.442.569 dibayarkan melalui kas dan sebesar Rp517.138.996 dicatat sebagai beban pajak periode lalu. Pada tanggal 10 Agustus 2023, Perusahaan telah mengajukan banding kepada Pengadilan Pajak/On May 18, 2023, the Company received an objection decision, where the Tax Office granted part of the Company's objection amounting to Rp6,400,581,565. Amounting to Rp5,883,442,569 was paid in cash and amounting to Rp517,138,996 was recorded as prior year income tax. On August 10, 2023, the Company submitted an appeal to the Tax Court.
PPh Badan 2017	Rp11.927.715.453	Rp11.822.072.536	Putusan keberatan sudah diterima oleh Perusahaan yaitu mengabulkan sebagian keberatan wajib pajak sebesar Rp11.822.072.536/The objection decision has been received by the Company, namely grating part of the taxpayer's objection amounting to Rp11,822,072,536.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**21. TAXATION (continued)**

**g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)**

**g. Tax Assesment (continued)**

Perusahaan (lanjutan)

Company (continued)

Surat Pajak/ Tax Letter	Nilai (Lebih)/Kurang Bayar dari Sengketa pajak terakhir/Amount of (Over)/Under Payment from Latest Tax Dispute	Piutang tagihan pajak/ Claims for Tax Refund	Status/ Status
<b>Pajak Penghasilan Badan (lanjutan)/ Corporate Income Tax (continued)</b>			
PPh Badan 2015	(Rp109.552.247.620)	Rp12.212.259.212	Putusan dari Mahkamah Agung (MA) sudah diterima yaitu menolak permohonan peninjauan kembali DJP. Atas lebih bayar tersebut, Perusahaan menerima SPMKP dimana sebesar: Rp27.490.406.139 dibayar melalui kas dan sisanya telah dikompensasikan pada utang pajak sebesar 1). PPh Final: Rp58.865.351, 2). PPh Pasal 21: Rp8.077.601.460, 3). PPh Pasal 22: Rp200.000, 4). PPh Pasal 23: Rp3.676.713.065, 5). PPN tahun 2013: Rp69.849.582.911, dan 6). PPN tahun 2014: Rp384.805.308. Pada tahun 2022, Perusahaan menerima pembatalan STP untuk PPN tahun 2013 dan sudah dibayar oleh DJP/The Company has received decision of judicial review, which is to reject the judicial review request from DJP. For the overpayment, the Company has received SPMKP, where Rp27,490,406,139 is paid by cash and the rest is compensated to income tax payable amounting: 1). Art Final: Rp58,865,351, 2). Art 21: Rp8,077,601,460, 3). Art 22: Rp200,000, 4). Art 23: Rp3,676,713,065, 5). VAT year 2013: Rp69,849,582,911, 6). VAT Year 2014: Rp384,805,308. In 2022, the Company has received notification for the cancellation for STP VAT Year 2013, which has been paid to the Company.
PPh Badan 2014	Rp354.570.016.540	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/Waiting for the tax court's decision.
PPh Badan 2013	(Rp17.017.010.295)	-	Putusan dari Mahkamah Agung (MA) sudah diterima yaitu menolak permohonan peninjauan kembali DJP. Atas lebih bayar tersebut, Perusahaan menerima SPMKP dimana sebesar Rp21.220.382.552 dibayar melalui kas dan sisanya telah dikompensasikan pada STP PPN tahun 2013 sebesar Rp17.349.476.495. Pada tahun 2022, Perusahaan menerima pembatalan STP untuk PPN tahun 2013 dan sudah dibayar oleh DJP/The Company has received decision of judicial review, which is to reject the judicial review request from DJP. For the overpayment, the Company has received SPMKP, where Rp21,220,382,552 is paid by cash and the rest is compensated to STP VAT Year 2013 amounting to Rp17,349,476,495. In 2022, the Company has received notification for the cancellation for STP VAT Year 2013, which has been paid to the Company.
PPh Badan 2012	(Rp18.909.219.712)	-	Menunggu putusan Mahkamah Agung/Waiting for the supreme court's decision.
PPh Badan 2011	-	-	Menunggu putusan Mahkamah Agung/Waiting for the supreme court's decision.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**21. TAXATION (continued)**

**g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)**

**g. Tax Assesment (continued)**

Perusahaan (lanjutan)

Company (continued)

Surat Pajak/ Tax Letter	Nilai (Lebih)/Kurang Bayar dari Sengketa pajak terakhir/Amount of (Over)/Under Payment from Latest Tax Dispute	Piutang tagihan pajak/ Claims for Tax Refund	Status/ Status
<b>Pajak Penghasilan/ Income Tax</b>			
PPh Pasal 23 2018	Rp11.863.809.433	-	Proses pengajuan banding kepada Pengadilan Pajak/In the process of filing an appeal to the Tax Court.
PPh Pasal 23 2017	Rp7.361.373.953	Rp7.345.785.002	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/Waiting for the tax court's decision.
PPh Pasal 23 2014	Rp3.647.972.491	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/Waiting for the tax court's decision.
PPh Pasal 22 2015	Rp1.999.927.826	-	Sudah dicatat oleh Perusahaan pada tahun 2022 sebesar Rp1.999.927.826 pada "beban pajak periode lalu"/Has been recorded by The Company in 2022 to prior year income tax for Rp1,999,927,826.
PPh Pasal 21 2017	Rp686.105.727	Rp686.105.727	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/Waiting for the tax court's decision.
PPh Pasal 21 2015	Rp1.455.744.104	-	Sudah dicatat oleh Perusahaan pada tahun 2022 sebesar Rp1.455.744.104 pada "beban pajak periode lalu"/Has been recorded by The Company in 2022 to prior year income tax for Rp1,455,744,104.
PPh Pasal 21 2014	Rp12.572.927.686	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/Waiting for the tax court's decision.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**21. TAXATION (continued)**

**g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)**

**g. Tax Assesment (continued)**

Perusahaan (lanjutan)

Company (continued)

Surat Pajak/ Tax Letter	Nilai (Lebih)/Kurang Bayar dari Sengketa pajak terakhir/Amount of (Over)/Under Payment from Latest Tax Dispute	Piutang tagihan pajak/ Claims for Tax Refund	Status/ Status
<b>Pajak Pertambahan Nilai/ Value-Added Tax</b>			
PPN 2022	-	-	Telah mendapatkan putusan dari restitusi PPN pada tahun 2022, dimana disetujui oleh kantor pajak sebesar Rp99.606.128.397. Pada tahun 2023, Perusahaan telah menerima pengembalian restitusi PPN tahun 2022, dimana sebesar Rp84.185.916.317 dibayar melalui kas, dan sisanya sebesar Rp15.420.212.080 dikompensasi kepada utang pajak PPh Badan 2017, PPN November 2017, PPN Desember 2017 dan STP PPN Desember 2017/Has received the VAT refund decision amounting Rp99,606,128,397. In 2023, the Company has received refund from the VAT refund, where amounting to Rp84,185,916,317 is paid by cash and the rest amounting to Rp15,420,212,080 is compensated to tax payable of corporate income tax year 2017, VAT November 2017, VAT December 2017 and STP VAT December 2017.
PPN 2020	Rp824.459.489	-	Sudah dicatat oleh Perusahaan pada tahun 2023 sebesar Rp824.459.489 pada "beban lain-lain"/Has been recorded by The Company in 2023 to other expense for Rp824,459,489.
PPN 2018	Rp899.928.234	-	Perusahaan sudah menerima putusan keberatan di tahun 2023, dimana pengajuan keberatan dikabulkan sebagian oleh Kantor Pajak. Perusahaan berencana untuk mengajukan banding, namun sudah melewati batas tanggal pengajuan, sehingga sudah dibebankan sebesar Rp899.928.234 pada akun "beban lain-lain"/The Company has received objection decision in 2023, where the objection was partially granted by the Tax Office. The Company plans to file an appeal, but the filing date has been passed, where the Company has recorded Rp899,928,234 as "other expense".
PPN 2017	Rp17.146.081.517	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/Waiting for the tax court's decision
PPN 2017	Rp1.784.402.487	Rp193.455.281	Perusahaan melakukan pembayaran atas SKPKB sebesar Rp1.784.402.487 pada tanggal 12 Januari 2023, dan Perusahaan mengajukan keberatan pada tanggal 26 Januari 2023. Pada tanggal 7 Desember 2023, Perusahaan mendapatkan putusan dari keberatan yaitu dikabulkan sebagian, sebesar Rp1.590.947.206/The Company made payment for the SKPKB amounting to Rp1,784,402,487 on January 12, 2023, and the Company has submitted an objection on January 26, 2023. On December 7, 2023, the Company received a decision on the objection, which was granted in part, amounting to Rp1,590,947,206.
PPN 2015	Rp3.076.510.548	-	Pada tahun 2022, keputusan banding untuk PPN bulan Desember 2015 sebesar Rp543.111.523 sudah diterima dimana Pengadilan Pajak menolak permohonan banding. Atas penolakan tersebut, telah dicatat pada "beban lain-lain" di tahun 2023. Atas putusan dari banding untuk PPN bulan Januari – November 2015 masih belum diterima/In 2022, the appeal decision for VAT December 2015 amounted to Rp543,111,523 was received, where Tax Court rejected the appeal request. Due to this rejection, the Company has recorded it as "other expense" in the year 2023. For the rest of SKPKB (January – November 2015), the company has not yet received the appeal decision yet.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**21. PERPAJAKAN (lanjutan)**

**21. TAXATION (continued)**

**g. Surat Ketetapan Pajak (lanjutan)**

**g. Tax Assesment (continued)**

Perusahaan (lanjutan)

Company (continued)

Surat Pajak/ Tax Letter	Nilai (Lebih)/Kurang Bayar dari Sengketa pajak terakhir/Amount of (Over)/Under Payment from Latest Tax Dispute	Piutang tagihan pajak/ Claims for Tax Refund	Status/ Status
<b>Pajak Pertambahan Nilai (lanjutan)/ Value-Added Tax (continued)</b>			
PPN 2014	Rp116.127.146.109	-	Menunggu putusan Pengadilan Pajak/Waiting for the tax court's decision.
PPN 2013	Rp9.312.478.616	-	Menunggu putusan Mahkamah Agung/Waiting for the supreme court's decision.
PPN Pemungut 2013	Rp48.507.408.246	-	Menunggu putusan Mahkamah Agung/Waiting for the supreme court's decision.
PPN 2013	Rp942.340.584	Rp942.340.584	Menunggu putusan Mahkamah Agung/Waiting for the supreme court's decision.
PPN 2012	-	Rp9.770.869.081	Dikompensasi untuk kurang bayar PPN masa pajak 2013 sebesar Rp9.726.028.727 dan denda bunga sebesar Rp44.840.354/Compensated for underpayment of VAT for 2013 amounting to Rp9,726,028,727 and penalties amounting to Rp44,840,354.
PPN 2009	-	-	Menunggu putusan Mahkamah Agung untuk bulan Maret, Juni dan November 2019/Waiting for the supreme court's decision for the month March, June and November 2019.
PPN 2007	-	-	Menunggu putusan Mahkamah Agung untuk bulan Januari, April, Mei, Agustus, September, Oktober dan November 2007/Waiting for the supreme court's decision for the month of January, April, May, August, September, October and November 2007.

Entitas Anak

Subsidiary

Surat Pajak/ Tax Letter	Nilai (Lebih)/Kurang Bayar dari Sengketa pajak terakhir/Amount of (Over)/Under Payment from Latest Tax Dispute	Piutang tagihan pajak/ Claims for Tax Refund	Status/ Status
<b>Pajak Penghasilan Badan/ Corporate Income Tax</b>			
PPH Badan 2019	-	Rp60.534.163	Menunggu hasil pemeriksaan dari kantor pajak atas lebih bayar yang dilaporkan/Waiting for the result of inspection for the overpayment reported.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**22. AKRUAL**

**22. ACCRUED**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)		
		31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Bonus dan Tantiem	806.757.077.492	1.705.869.016.904	1.339.226.348.480	Employee bonus and tantiem
Beban Bunga Pinjaman	86.294.629.799	120.714.443.390	121.301.493.495	Loan interest expenses
Gaji dan upah	78.652.638.933	146.667.209.848	148.847.174.645	Salary and wages
Panen dan Angkutan	11.207.033.712	6.486.803.035	4.988.060.717	Harvest and transportation fees
Jasa Professional	704.521.676	58.412.516.412	13.356.150.881	Professional fees
Lain-lain	29.613.445.826	70.400.381.798	89.610.995.175	Others
<b>Total</b>	<b>1.013.229.347.438</b>	<b>2.108.550.371.387</b>	<b>1.717.330.223.393</b>	<b>Total</b>

**23. UTANG JANGKA PANJANG**

**23. LONG-TERM DEBTS**

31 Desember 2023	Total/ Total	Bagian lancar atas utang jangka panjang tahun/ Current maturities of long-term debts	Utang jangka panjang/ Long-term debts	December 31, 2023
a) Utang bank				Bank loans (a)
- Perusahaan	23.444.326.006.264	2.657.196.407.678	20.787.129.598.586	Company -
b) Wesel bayar	2.348.834.774.951	1.545.000.000.000	803.834.774.951	Medium Term Notes (b)
c) Utang jangka Panjang lainnya	23.519.741.301	39.674.519	23.480.066.782	Other Long-term debt (c)
d) Pinjaman kepada pihak berelasi (Catatan 36i)	899.479.865.634	-	899.479.865.634	Loan from related parties (d) (Note 36i)
<b>Total</b>	<b>26.716.160.388.150</b>	<b>4.202.236.082.197</b>	<b>22.513.924.305.952</b>	<b>Total</b>
31 Desember 2022 (disajikan kembali, Catatan 46)	Total/ Total	Bagian lancar atas utang jangka panjang tahun/ Current maturities of long-term debts	Utang jangka panjang/ Long-term debts	December 31, 2022 (As restated, Note 46)
a) Utang bank				Bank loans (a)
- Perusahaan	22.089.167.083.553	2.238.863.814.419	19.850.303.269.134	Company -
- Entitas Anak	-	-	-	Subsidiaries -
b) Wesel bayar	3.013.645.777.506	605.000.000.000	2.408.645.777.506	Medium Term Notes (b)
c) Utang jangka Panjang lainnya	19.313.108.535	294.614.519	19.018.494.016	Other Long-term debt (c)
d) Pinjaman kepada pihak berelasi (Catatan 36i)	768.753.411.668	-	768.753.411.668	Loan from related parties (d) (Note 36i)
<b>Total</b>	<b>25.890.879.381.262</b>	<b>2.844.158.428.938</b>	<b>23.046.720.952.324</b>	<b>Total</b>
1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 (disajikan kembali, Catatan 46)	Total/ Total	Bagian lancar atas utang jangka panjang tahun/Current maturities of long-term debts	Utang jangka panjang/ Long-term debts	Januari 1, 2022/ December 31, 2021 (As restated, Note 46)
a) Utang bank				Bank loans (a)
- Perusahaan	24.082.229.822.923	1.822.359.491.076	22.259.870.331.847	Company -
b) Wesel bayar	3.013.317.881.323	1.390.000.000.000	1.623.317.881.323	Medium Term Notes (b)
c) Utang jangka Panjang lainnya	17.415.096.575	596.102.519	16.818.994.056	Other Long-term debt (c)
d) Pinjaman kepada pihak berelasi (Catatan 36i)	677.031.583.436	-	677.031.583.436	Loan from related parties (d) (Note 36i)
e) Utang Kepada Pemerintah Republik Indonesia	3.400.465.436	3.400.465.436	-	Debt to Government (e) of The Republic of Indonesia
<b>Total</b>	<b>27.793.394.849.693</b>	<b>3.216.356.059.031</b>	<b>24.577.038.790.662</b>	<b>Total</b>

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Utang bank**

**a. Bank Loans**

Kreditor/ <i>Creditors</i>	Fasilitas Maksimum/ <i>Maximum Facility</i>	Jatuh Tempo/ <i>Maturity date</i>	Total/ <i>Total</i>		
			31 Desember 2023/ <i>December 31, 2023</i>	31 Desember, 2022/ <i>December 31, 2022</i>	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 <i>January 1, 2022/ December 31, 2021</i>
<b>Perusahaan/ <i>Company</i></b>					
<b><u>Entitas berelasi dengan</u></b>					
<b><u>Pemerintah/ <i>Government</i></u></b>					
<b><u>related entities</u></b>					
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	12.015.845.368.333	December 2030	11.054.577.738.866	-	-
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	6.904.377.825.513	December 2030	6.352.027.599.472	-	-
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	5.417.852.744.708	December 2030	4.984.424.525.131	-	-
Lembaga Pembayaran Ekspor Indonesia	1.211.889.519.892	December 2030	1.114.938.358.300	-	-
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	476.000.000.000	December 2025	-	5.308.003.002	9.548.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	700.000.000.000	December 2025	-	222.717.002.467	248.301.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	375.000.000.000	December 2025	-	114.161.961.525	127.276.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	550.000.000.000	December 2025	-	301.129.575.765	335.721.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	493.000.000.000	December 2025	-	323.599.415.312	360.772.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	465.000.000.000	December 2025	-	259.393.851.278	289.191.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.400.000.000.000	December 2025	-	1.934.617.880.498	2.156.851.740.019
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	500.000.000.000	December 2025	-	421.572.974.611	470.000.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	669.238.000.000	December 2025	-	564.265.308.766	629.083.720.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	347.022.995.928	December 2025	-	292.591.033.304	326.201.616.169
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.190.000.000.000	December 2028	-	1.002.754.087.827	1.118.600.000.000
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	842.053.826.823	December 2028	-	709.557.073.124	791.530.597.214
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	1.446.316.450.000	December 2028	-	865.308.202.201	964.867.522.313
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	878.308.731.529	December 2028	-	817.969.364.830	877.085.224.596
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	49.850.300.000	December 2028	-	46.425.609.538	49.684.440.946
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	2.100.000.000.000	December 2028	-	1.685.029.832.020	1.878.590.000.000

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

Kreditor/ <i>Creditors</i>	Fasilitas Maksimum/ <i>Maximum Facility</i>	Jatuh Tempo/ <i>Maturity date</i>	Total/ <i>Total</i>		
			31 Desember 2023/ <i>December 31, 2023</i>	31 Desember, 2022/ <i>December 31, 2022</i>	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 <i>January 1, 2022/ December 31, 2021</i>
<b>Perusahaan (lanjutan)/ <i>Company (continued)</i></b>					
<b><u>Entitas berelasi dengan Pemerintah (lanjutan)/ Government related Entities (continued)</u></b>					
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	800.000.000.000	December 2028	-	302.283.347.549	337.006.776.486
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	500.000.000.000	December 2028	-	252.797.239.681	281.847.463.470
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	394.020.035.386	December 2028	-	366.951.057.757	387.621.159.735
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	605.000.000.000	December 2028	-	490.832.876.390	547.215.079.363
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	2.172.978.604	December 2028	-	-	1.757.086.122
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	248.201.696.532	December 2028	-	232.695.514.173	248.545.164.533
PT Bank Raya Indonesia (Persero) Tbk	500.000.000.000	December 2028	-	300.582.004.061	335.110.000.000
Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia	869.933.550.000	December 2028	-	555.627.259.911	619.962.551.250
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	600.000.000.000	December 2028	-	208.603.464.086	232.565.841.951
PT Bank Riau Kepri (Persero) Tbk	300.000.000.000	December 2028	-	180.643.495.426	201.427.664.294
<b><u>Pihak ketiga/ <i>Third party</i></u></b>					
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk	600.000.000.000	December 2028	-	525.419.281.690	585.584.840.720
PT Bank Central Asia (Persero) Tbk	750.000.000.000	December 2028	-	451.608.738.564	503.241.264.552
PT Maybank Indonesia (Persero) Tbk	1.000.000.000.000	December 2028	-	602.232.881.061	671.523.556.978
PT Bank ICBC Indonesia	200.000.000.000	December 2028	-	67.369.534.001	75.108.304.003
PT Bank ICBC Indonesia	500.000.000.000	December 2028	-	301.116.440.530	335.761.778.489
PT Bank Permata Tbk	500.000.000.000	December 2028	-	417.484.993.453	465.441.690.672
PT Bank DBS Indonesia	2.000.000.000.000	December 2028	-	1.299.737.671.335	1.449.039.147.910
PT Bank DBS Indonesia	200.000.000.000	December 2028	-	121.006.474.554	134.906.544.000
PT Bank UOB Indonesia	500.000.000.000	December 2028	-	434.117.017.413	483.984.243.039
PT Bank Victoria International Tbk	500.000.000.000	December 2028	-	210.786.819.117	234.999.793.441

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

Kreditor/ Creditors	Fasilitas Maksimum/ Maximum Facility	Jatuh Tempo/ Maturity date	Total/ Total		
			31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember, 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021
<b>Perusahaan (lanjutan)/ Company (continued)</b>					
<b>Pihak ketiga (lanjutan)/ Third party (continued)</b>					
PT Bank QNB Indonesia Tbk	500.000.000.000	December 2028	-	421.573.638.234	470.000.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	250.000.000.000	December 2028	-	163.932.418.197	182.763.412.048
Sumitomo Mitsui Banking Corp USD	390.600.000	December 2028	-	4.654.708.503.366	4.707.107.405.457
<b>Total/ Total</b>			<b>23.505.968.221.769</b>	<b>22.128.511.846.617</b>	<b>24.125.824.629.770</b>
Dikurangi biaya perolehan utang yang belum diamortisasi/ Less unamortized cost			(61.642.215.505)	(39.344.763.064)	(43.594.806.847)
<b>Neto/ Net</b>			<b>23.444.326.006.264</b>	<b>22.089.167.083.553</b>	<b>24.082.229.822.923</b>
Dikurangi bagian lancar/ Less current maturities			(2.657.196.407.678)	(2.238.863.814.419)	(1.822.359.491.076)
<b>Bagian Jangka Panjang/ Long-term Portion</b>			<b>20.787.129.598.586</b>	<b>19.850.303.269.134</b>	<b>22.259.870.331.847</b>

**Pinjaman Kredit Sindikasi Himpunan Bank Negara dalam rangka Pelunasan Fasilitas Pinjaman MAA (Repackaging)**

Pada tanggal 27 Juni 2023, telah dilakukannya penandatanganan atas Akta-Akta Acesoir Perjanjian Fasilitas Kredit, oleh:

- PT Perkebunan Nusantara III
- PT Perkebunan Nusantara IV
- PT Perkebunan Nusantara V
- PT Perkebunan Nusantara VI
- PT Perkebunan Nusantara XIII
- PT Industri Nabati Lestari
- PT Agro Sinergi Nusantara
- PT Sinergi Perkebunan Nusantara

dengan "HIMBARA Plus", yaitu:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia

Perjanjian Kredit sindikasi diperoleh dengan tujuan untuk pelunasan seluruh pinjaman fasilitas MAA yang sebelumnya terhutang dari PTPN Grup (selanjutnya disebut sebagai "Repackaging").

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

	Total/ Total		
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember, 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021
<b>Perusahaan (lanjutan)/ Company (continued)</b>			
<b>Pihak ketiga (lanjutan)/ Third party (continued)</b>			
PT Bank QNB Indonesia Tbk	-	421.573.638.234	470.000.000.000
PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk	-	163.932.418.197	182.763.412.048
Sumitomo Mitsui Banking Corp USD	-	4.654.708.503.366	4.707.107.405.457
<b>Total/ Total</b>	<b>23.505.968.221.769</b>	<b>22.128.511.846.617</b>	<b>24.125.824.629.770</b>
Dikurangi biaya perolehan utang yang belum diamortisasi/ Less unamortized cost	(61.642.215.505)	(39.344.763.064)	(43.594.806.847)
<b>Neto/ Net</b>	<b>23.444.326.006.264</b>	<b>22.089.167.083.553</b>	<b>24.082.229.822.923</b>
Dikurangi bagian lancar/ Less current maturities	(2.657.196.407.678)	(2.238.863.814.419)	(1.822.359.491.076)
<b>Bagian Jangka Panjang/ Long-term Portion</b>	<b>20.787.129.598.586</b>	<b>19.850.303.269.134</b>	<b>22.259.870.331.847</b>

**Himpunan Bank Negara's Syndicated Credit Loan in for Repayment of the MAA Loan Facility (Repackaging)**

On June 27, 2023, the Acesoir Deed of Credit Facility Agreement was signed by:

- PT Perkebunan Nusantara III
- PT Perkebunan Nusantara IV
- PT Perkebunan Nusantara V
- PT Perkebunan Nusantara VI
- PT Perkebunan Nusantara XIII
- PT Industri Nabati Lestari
- PT Agro Sinergi Nusantara
- PT Sinergi Perkebunan Nusantara

With "HIMBARA Plus", namely:

- PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
- PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
- PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
- Indonesia Eximbank

The syndicated credit agreement was obtained for the purpose of repayment of all MAA facility loans previously payable from entities that are members of the PTPN Group. (hereinafter referred to as "Repackaging").

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

Perjanjian tersebut saat ini masih berstatus *open renvoi* namun sudah berlaku efektif dengan persetujuan dari masing-masing kreditur, berdasarkan *Covernote* No. 08/Not/GW/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan No. 05/Not/GW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, yang ditanda tangan oleh Notaris Gamal Wahidin, S.H.

*Repackaging* pada Grup PTPN atas utang MAA melalui utang sindikasi dilakukan melalui skema sebagai berikut:

1. Penyaluran dari kreditur HIMBARA ke PTPN IV untuk penerusan pelunasan utang pokok dan bunga MAA PTPN IV, PTPN III, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN XI dan PTPN XII.
2. Penyaluran dari kreditur Himbara ke PTPN VII untuk penerusan pelunasan utang pokok dan bunga MAA PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN XII, dan PTPN XIV

Berdasarkan perjanjian pinjaman kredit sindikasi, Kreditur menyetujui perubahan seluruh fasilitas pinjaman perbankan Grup PTPN dengan rincian suku bunga fasilitas pinjaman adalah sebesar JIBOR+Margin% per tahun, dengan margin yang disepakati adalah sebesar 2,75%. Jangka waktu untuk seluruh fasilitas pinjaman perbankan akan jatuh tempo tahun 2030.

**Jaminan**

Berdasarkan perjanjian pinjaman kredit sindikasi, Grup PTPN turut menjaminkan sebagian aset Grup termasuk kas dan setara kas (Catatan 4), aset tetap (Catatan 13), dan sebagian persediaan (Catatan 7). Pinjaman tersebut juga mensyaratkan Grup PTPN untuk memperoleh persetujuan dari para kreditur untuk menyewakan, mengalihkan/memindahkan aset yang telah dijaminkan tersebut.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

The agreement are currently in open *renvoi* but has been effective with approval from each respective creditor. according to *Covernote* No. 08/Not/GW/VI/2023, dated June 27, 2023, and No. 05/Not/GW/VII/2023, dated July 20, 2023, signed by Gamal Wahidin, S.H.

*Repackaging* in the PTPN Group for MAA debt through syndicated debt is carried out through the following scheme:

1. Distribution from Himbara creditors to PTPN IV for the continuation of repayment of principal debt and interest on MAA PTPN IV, PTPN III, PTPN V, PTPN VI, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN XI and PTPN XIII.
2. Distribution from Himbara creditors to PTPN VII for the continuation of repayment of principal debt and interest on MAA PTPN I, PTPN II, PTPN VII, PTPN VIII, PTPN XII, and PTPN XIV

Based on the syndicated credit loan agreement, the Creditor approved changes to all PTPN Group bank loan facilities with details of the loan facility interest rate being JIBOR+Margin% per year, with an agreed margin of 2.75%. The term for all banking loan facilities will mature in 2030.

**Guarantee**

Based on the syndicated credit agreement, PTPN Group's bank loan facilities are secured by part of asset belonging to the Group, including cash and cash equivalents (Note 4), fixed assets (Note 13) and part of inventories (Note 7). The loan also requires the PTPN Business Group to obtain approval from creditors to lease, transfer/transfer the assets that have been pledged as collateral.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA))**

Pada tahun 2021, PTPN Grup telah menandatangani perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)), sehubungan dengan program transformasi keuangan jangka panjang yang terdiri dari:

- 1) Perjanjian Perubahan Induk Hijau Nomor 29, tanggal 29 Januari 2021 ("MAA Green") untuk PTPN III, PTPN IV dan PTPN V.
- 2) Perjanjian Perubahan Induk Kuning Nomor 30, tanggal 29 Januari 2021 ("MAA Yellow") untuk PTPN I, PTPN II, PTPN VI, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII dan PTPN XIV.
- 3) Perjanjian Perubahan Induk Merah Nomor 28, tanggal 29 Januari 2021 ("MAA Red") untuk PTPN VII, PTPN VIII dan PTPN IX.
- 4) Perjanjian Perubahan Induk PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) Nomor 20, tanggal 10 Oktober 2022 ("MAA PT SGN") untuk PT SGN.

Sesuai dengan ketentuan MAA, transformasi keuangan jangka panjang Perusahaan mengacu kepada perjanjian perubahan induk hijau.

Perusahaan mengkategorikan rekening-rekening yang termasuk ke dalam *Debt Service Accrual Account (DSAA)*, *Debt Service Reserved Account (DSRA)*, *Mandatory Payment Early (MPE)* dan rekening tunda sebagai kas yang dibatasi penggunaannya.

DSAA merupakan rekening giro Perusahaan yang digunakan untuk menampung pembayaran kewajiban kepada pemberi pinjaman.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA)**

In 2021, PTPN Group has signed a Master Amendment Agreement (MAA), in relation to the long-term financial transformation program, which consists of:

- 1) Master Amendment Agreement Number 29, dated January 29, 2021 ("MAA Green") for PTPN III, PTPN IV, and PTPN V.
- 2) Master Amendment Agreement Yellow Number 30, dated January 29, 2021 ("MAA Yellow") for PTPN I, PTPN II, PTPN VI, PTPN X, PTPN XI, PTPN XII and PTPN XIV.
- 3) Master Amendment Agreement Red Number 28, dated January 29, 2021 ("MAA Red") for PTPN VII, PTPN VIII, and PTPN IX.
- 4) Master Amendment Agreement PT Sinergi Gula Nusantara (PT SGN) Number 20, dated October 10, 2022 ("MAA PT SGN") for PT SGN.

In accordance with the terms of the MAA, the Company's long-term financial transformation program will refer to the MAA Green.

The company categorizes accounts that are classified as restricted cash, including *Debt Service Accrual Account (DSAA)*, *Debt Service Reserved Account (DSRA)*, *Mandatory Payment Early (MPE)* and deferred accounts.

DSAA is the Company's current account which is used to accommodate payment of obligations to lenders.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

DSRA merupakan rekening giro Perusahaan yang digunakan untuk cadangan pembayaran kewajiban kepada pemberi pinjaman.

MPE merupakan rekening giro Perusahaan yang digunakan untuk menampung alokasi dana untuk percepatan pembayaran kewajiban.

Rekening tunda merupakan rekening giro Perusahaan yang digunakan untuk menampung pembayaran kewajiban kepada perbankan yang belum teraksesi dalam MAA.

Perjanjian tersebut berlaku efektif sejak 15 Maret 2021 berdasarkan Akta No. 29 yang dibuat di hadapan Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. M.Kn., yang sejak tahun 2021, suku bunga yang dikenakan pada perjanjian pinjaman tersebut adalah sebagai berikut:

- JIBOR 1 bulan + 3,43781% berlaku sejak tanggal efektif perjanjian MAA sampai dengan tahun kelima (selama 5 tahun) perjanjian MAA.
- JIBOR 1 bulan + 3,43781% + 1% berlaku sejak tahun keenam sampai dengan tahun pengakhiran perjanjian MAA pada tanggal 31 Desember 2028 (selama 3 tahun).

Perjanjian pinjaman ini akan jatuh tempo pada tanggal 23 Desember 2025 dan dapat diperpanjang hingga tanggal 31 Desember 2028.

Perjanjian Perubahan Induk PT Sinergi Gula Nusantara dibuat dihadapan Notaris Vestina Ria Kartika, S.H. M.H., sekaligus merubah Perjanjian Perubahan Induk Kuning dan Perjanjian Perubahan Induk Merah dan berlaku efektif sejak 10 Oktober 2022. Perjanjian tersebut disusun berkenaan pelaksanaan aksi korporasi pemisahan bisnis gula *off-farm* dari PTPN II, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XIV, PT BCN, PT IGG ke PT SGN.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

DSRA is the Company's current account which is used as a reserve for payment of obligations to lenders.

MPE account is the Company's current account which is used to accommodate the allocation of funds to accelerate payment of obligations.

A deferred account is a checking account of the Company which is used to accommodate payment of obligations to banks that have not been accessed in the MAA.

The agreement have been effective since March 15, 2021 based on Notarial Deed No. 29 of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. M.Kn., which since 2021, the interest rates bears on the loan agreement are as follows:

- JIBOR 1 month + 3.43781% valid from the effective date of the MAA agreement until the fifth year (for 5 years) of the MAA
- JIBOR 1 month + 3.43781% + 1% is valid from the sixth year until the year of termination of the MAA agreement on December 31, 2028 (for 3 years)

The loan agreement will mature on December 23, 2025 and can extended until December 31, 2028.

Master Amandement Agreement of PT Sinergi Gula Nusantara made before Notary Vestina Ria Kartika, S.H. M.H., at the same time amending Master Amandement Agreement of Tranche Yellow and Master Amandement Agreement of Tranche Red and became effective on October 10, 2022. The agreement was drafted regarding the implementation of corporate actions for spin off sugar business off-farm from PTPN II, PTPN IX, PTPN X, PTPN XI, PTPN XIV, PT BCN, PT IGG to PT SGN.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

Pinjaman MAA (kecuali untuk MAA PT SGN) ini telah lunas pada tanggal 24 Juli 2023 oleh PTPN Grup melalui skema perjanjian *repackaging*.

**Jaminan**

Persediaan, Aset Tetap, dan HGU beserta seluruh aset yang ada di atasnya dari beberapa unit usaha digunakan sebagai jaminan atas fasilitas kredit yang diperoleh.

**Pembatasan-pembatasan**

Berdasarkan persyaratan-persyaratan dalam perjanjian pinjaman-pinjaman tersebut, Perusahaan diharuskan untuk memperoleh persetujuan tertulis sebelumnya dari bank sehubungan dengan, antara lain, pemberian pinjaman, memenuhi rasio-rasio tertentu, memindahtangankan barang jaminan, mengikatkan diri sebagai penjamin utang atau menjaminkan harta kekayaan Perusahaan yang telah dijaminkan.

Perjanjian pinjaman-pinjaman Perusahaan di atas mensyaratkan beberapa pembatasan, antara lain, untuk mengubah anggaran dasar, memberi dan memperoleh pinjaman baru tanpa persetujuan awal, melakukan penggabungan usaha, mengadakan penyertaan saham baru dalam perusahaan lain dan mengikatkan diri sebagai penjamin atau mengagunkan harta kekayaan.

**Kepatuhan atas Syarat-syarat Pinjaman**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Perusahaan telah memenuhi persyaratan pinjaman-pinjaman utang jangka panjang seperti disebutkan dalam perjanjian kredit.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

The MAA loan (except for MAA PT SGN) was paid off on July 24, 2023 by PTPN Group through a *repackaging* agreement scheme.

**Guarantee**

*Inventories, Fixed Assets, and HGU and all of the assets over the land of business units are used as collateral for the bank loan obtained.*

**Covenants**

*Based on the terms of the loan agreements, the Company is required to obtain prior written approval from the bank in connection with, among others, the granting of loans; comply certain ratios, handed over the collateral, bind themselves as debt guarantor or pledge the assets of the Company that have been pledged.*

*The loan agreements obtained by the Company mentioned above provide several restriction covenants, such as, change the articles of association, granting of and obtaining new loans, merge, hold new investment in another company, engage as guarantor or pledge their assets.*

**Compliance with Loan Covenants**

*As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the Company has complied with all of the covenants of the long-term bank loans as stipulated in the loan agreements.*



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**

Kredit Investasi

- a) Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 1, tanggal 20 Desember 2011, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp476.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai investasi tanaman kelapa sawit seluas 8.715 ha dan investasi non tanaman yang terletak di Kebun Batang Laping dan Kebun Timur, Kabupaten Mandailing Natal. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,75% per tahun *floating rate*, yang pembayarannya dilakukan setiap triwulan sampai dengan 31 Desember 2022. Kredit investasi ini dijamin dengan beberapa bidang tanah dengan sertifikat HGU berikut kebun atau tanaman, bangunan dan pabrik kelapa sawit yang ada di atasnya.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

- b) Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 35, tanggal 20 November 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp700.000.000.000 yang digunakan untuk *capital expenditure* tahun 2012 berupa tanaman kelapa sawit, bibit, tanam ulang, tanam baru, tanam konversi dan tanam belum menghasilkan serta investasi non tanaman. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,75% per tahun *floating rate*, yang pembayarannya dilakukan setiap triwulan sampai dengan 21 Desember 2023. Kredit investasi ini dijamin dengan beberapa bidang tanah dengan sertifikat HGU berikut kebun atau tanaman, bangunan dan pabrik kelapa sawit yang ada di atasnya.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**

Investment Credit

- a) In 2020, based on the deed of investment credit agreement No. 1, dated December 20, 2011, the Company obtained investment credit facility from Bank Mandiri with maximum credit amounted to Rp476,000,000,000, which is used for finance investments in plant oil palm area of 8,715 ha and non investment plants located in Batang Laping and Timur Estates, Mandailing Natal District. This loan bears interest at 9.75% per year floating rate, paid quarterly until December 31, 2022. The investment loan is collateralized by several land with certificate of HGU, include plantations, buildings and palm oil mill over the land.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

- b) In 2020, based on the deed of Investment credit Agreement No. 35, dated November 20, 2012, the Company obtained investment credit facility from Bank Mandiri with maximum credit amounted to Rp700,000,000,000. This credit facility is used for capital expenditure purpose during 2012 for the oil palm plantations, nursery, replanting, new plant, immature plantations and non-plantations investment. This loan bears interest at 9.75% per year floating rate, paid quarterly until December 21, 2023. The investment loan is collateralized by several land with certificate of HGU, include the estate or plantations, buildings and palm oil mill over the land.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (lanjutan)**

Kredit Investasi (lanjutan)

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

- c) Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 112, tanggal 19 Desember 2012, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit *refinancing* dari Bank Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp375.000.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan realisasi investasi yang telah dilakukan Perusahaan dengan biaya sendiri pada tahun 2011 berupa aset tanaman dan non tanaman yang belum pernah dibiayai oleh Bank. Pinjaman ini dikenakan suku bunga 9,75% per tahun *floating rate*, yang pembayarannya dilakukan setiap triwulan sejak triwulan ketiga tahun 2013 sampai dengan 31 Desember 2023. Kredit investasi *refinancing* ini dijamin dengan beberapa sertifikat HGU berikut tanaman yang telah ditanam maupun yang akan ditanam, bangunan dan pabrik kelapa sawit dan segala sesuatu yang berada di atas tanah tersebut, baik yang sekarang ada maupun akan ada dikemudian hari yang menurut ketentuan sifat dan peruntukannya dapat dianggap sebagai harta atau aset tetap.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (continued)**

Investment Credit (continued)

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

- c) In 2020, based on the deed of the investment credit agreement No. 112, dated December 19, 2012, the Company obtained a credit facility *refinancing* from Bank Mandiri with a maximum credit from Rp375,000,000,000, used for financing investment which was conducted by the Company in 2011 in the form of plantation and non plantation which has not been financed by the bank. This loan bears interest rate at 9.75% per year floating rate, paid quarterly since the third quarter of 2013 up to December 31, 2023. The investment loan *refinancing* is collateralized by several certificates of HGU, with the plants that have been planted or will be planted, buildings and plant oil palm and everything that is over the land, both at present and in the future will be that based on the terms of the nature and purposes can be considered as assets or fixed assets.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (lanjutan)**

Kredit Investasi (lanjutan)

- d) Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 144, tanggal 23 Desember 2014 yang telah di adendum dengan akta perjanjian kredit investasi No. 25 tanggal 16 September 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp493.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai rencana anggaran investasi rutin berupa aset tanaman dan non tanaman sesuai dengan RKAP perubahan tahun 2014. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,75% per tahun *floating rate*, yang pembayarannya dilakukan setiap triwulan sampai dengan 31 Desember 2025. Fasilitas kredit investasi ini dijamin dengan beberapa bidang tanah dengan sertifikat HGU.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

- e) Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 110, tanggal 23 Desember 2015, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp465.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai rencana anggaran investasi rutin dan pengembangan berupa aset tanaman dan non tanaman. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,75% per tahun *floating rate*, yang pembayarannya dilakukan setiap triwulan sampai dengan 31 Desember 2026. Fasilitas kredit ini dijamin dengan beberapa bidang tanah dengan sertifikat HGU

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (continued)**

Investment Credit (continued)

- d) In 2020, based on the deed of the investment credit agreement No. 144, dated December 23, 2014 which has been in addendum with the deed of investment credit agreement No. 25, dated September 16, 2015, the Company obtained investment credit facility from Bank Mandiri with maximum credit amounted to Rp493,000,000,000 used for finance the regular investment of assets and non plantation assets in accordance with RKAP revision in 2014. The loan bears interest at 9.75% per year floating rate, paid quarterly until December 31, 2025. The investment credit facility is collateralized by several land with certificate of HGU.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

- e) In 2020, based on the deed of the investment credit agreement No. 110, dated December 23, 2015, the Company obtained investment credit facility from Bank Mandiri with maximum credit amounted to Rp465,000,000,000, used for finance the regular investment and development of plantations and non-plantations. This loan bears interest at 9.75% per annum floating rate, paid quarterly until December 31, 2026. This facility is collateralized with several land with certificate of HGU.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (lanjutan)**

Kredit Investasi (lanjutan)

- f) Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus No. 22, tanggal 21 Desember 2018, Perusahaan, Perusahaan memperoleh Fasilitas Pinjaman Transaksi Khusus (FPTK) dari Bank Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp2.400.000.000.000 yang digunakan untuk penyelesaian utang PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) kepada Bank Mandiri dalam rangka revitalisasi lahan PTPN XIII dan restrukturisasi kredit Grup PTPN III dan entitas anak. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar:

<u>Jangka waktu/STEI</u>	<u>Suku Bunga/STEI</u>
2018 – 2021	6,00%
2022 – 2023	7,50%
2024	9,00%
2025	10,00%
2026	11,00%
2027	13,00%
2028 – 2031	14,00%

Pembayaran bunga dilakukan setiap tanggal 23 akhir triwulan takwin. Fasilitas kredit ini dijamin dengan aset tanah bangunan kantor dan tanah bangunan kebun yang seluruhnya tercatat atas nama PT Perkebunan Nusantara XIII dengan bukti kepemilikan berupa SHGB (Surat Hak Guna Bangunan) dan SHGU (Surat Hak Guna Usaha) yang akan diikat Hak Tanggungan minimal sebesar 100% dari limit kredit.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (continued)**

Investment Credit (continued)

- f) In 2020, based on the deed of special transaction loan facility No. 22 dated December 21, 2018, the Company received a Special Transaction Loan Facility (STLF) from Bank Mandiri with a maximum facility of Rp2,400,000,000,000 used to settle the loan of PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII) to Bank Mandiri in the context of PTPN XIII's land revitalization and PTPN III Group and subsidiaries' loans restructurisation. This loan bears interest at:

Interest payments are made every 23rd of the end quarter takwin. This credit facility is guaranteed with all of the office building land and plant building land assets registered in the name of PT Perkebunan Nusantara XIII with proof of ownership in the form of SHGB (Building Use Rights) and SHGU (Business Use Rights) which will be bound by a Mortgage Right of at least 100% of credit limit.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*) (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**  
(lanjutan)

Kredit Investasi (lanjutan)

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- g) Pada tahun 2014 sampai dengan 2015, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh beberapa perjanjian kredit investasi dengan total nilai sebesar Rp1.190.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit dari Bank Mandiri.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara V

- h) Pada tahun 2017, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) memperoleh beberapa perjanjian kredit investasi dengan nilai sebesar Rp1.446.316.450.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit dari Bank Mandiri.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

*Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA)* (continued)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**  
(continued)

Investment Credit (continued)

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- g) In 2014 until 2015, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several investment credit is amounting Rp1,190,000,000,000 for replanting of oil palm plantation from Mandiri.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara V

- h) In 2017, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) obtained several investment credit is amounting Rp1,446,316,450,000 for replanting of oil palm plantation from Mandiri.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*) (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**  
(lanjutan)

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan  
Nusantara VI

- i) Pada tahun 2010 sampai dengan 2015, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara VI) memperoleh beberapa Kredit Investasi dengan nilai sebesar Rp878.308.731.529 untuk pembangunan dan *replanting* kebun sawit dari Mandiri.

Pada tahun 2020 terkait dengan relaksasi pembayaran bunga pinjaman yang diberikan oleh Mandiri, Perusahaan diperkenankan untuk menangguhkan pembayaran bunga untuk periode April 2020 sampai dengan April 2021 sebesar maksimal 72,63% dari total bunga yang dikenakan tanpa dikenakan penalti atau denda keterlambatan.

Atas fasilitas kredit investasi ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

*Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA)*  
(continued)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**  
(continued)

Investment Credit – Ex PT Perkebunan  
Nusantara VI

- i) In 2010 until 2015, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara VI) obtained several Investment Credits is amounting to Rp878,308,731,529 for the development and *replanting* of oil palm plantation from Mandiri.

In 2020, in regard to relaxation of loan interest payments provided by Mandiri, the Company is permitted to defer interest payments for the period April 2020 to April 2021 with a maximum of 72.63% of the total interest charged without being subject to a penalty or late penalty.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (lanjutan)**

Kredit Investasi – Novasi ASN

- j) Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 71 dan 72 tanggal 22 Februari 2013, entitas anak, ASN memperoleh fasilitas kredit investasi Trance B dari Bank Mandiri dengan maksimum fasilitas masing-masing sebesar Rp337.727.000.000 dan Rp71.363.000.000 yang masing-masing digunakan untuk pembiayaan investasi kebun kelapa sawit berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya seluas 5.000 ha serta pembangunan PKS dengan kapasitas sebesar 30 ton TBS per jam dengan perluasan kapasitas hingga 45 ton TBS per jam. Pinjaman ini dikenakan bunga masing-masing sebesar 8,50% per tahun, yang pembayarannya dilakukan setiap triwulan sampai dengan Desember 2026. Fasilitas kredit ini dijamin dengan beberapa bidang tanah dengan sertifikat HGU, izin lokasi di Krueng Luas dan Ujung Lamie dan piutang usaha serta persediaan.

Selanjutnya, pada tahun 2021, berdasarkan ketentuan pada Perjanjian Transformasi Keuangan Jangka Panjang Perjanjian Perubahan Induk (Master Amendment Agreement (MAA)), pada tanggal 15 Maret 2021, perjanjian kredit investasi entitas anak ke bank telah dinovasi, sehingga Perusahaan telah mengambil alih utang entitas anak tersebut sebesar Rp386.243.000.000, sehingga Perusahaan akan melanjutkan hak dan kewajiban entitas anak tersebut ke bank.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (continued)**

Investment Credit – Novasi ASN

- j) In 2020, based on the Deed of Investment Credit Agreement No. 71 and 72 dated February 22, 2013, a subsidiary, ASN obtained investment credit facility Trance B from Bank Mandiri with maximum credit of each amounted to Rp337,727,000,000 and Rp71,363,000,000, respectively, used for financing the palm oil plantation estate investment include buildings, facilities and infrastructure that exists and will be exist on top of the land covering area of 5,000 ha and construction of palm oil mills with a capacity of 30 tonnes of FFB per hour with expansion capacity up to 45 tonnes FFB per hour. This loan bears interest amounting to 8.50% per annum which effectively paid quarterly until December 2026. This facility is collateralized by several land with certificates of HGU, locations permits in Krueng Luas and Ujung Lamie and trade receivables and inventories.

Furthermore, in 2021, based on the the Long-term Financial Transformation Agreement, the Master Amendment Agreement (MAA), on March 15, 2021, the investment credit agreement of the subsidiaries to the bank has been renovated, so that the Company has taken over the debt of the subsidiaries to the bank, amounting to Rp386,243,000,000, so that the Company will continue the rights and obligations of the subsidiaries to the bank.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (lanjutan)**

Kredit Investasi – Novasi ASN (lanjutan)

Selanjutnya, pada tahun 2021, Perusahaan dan entitas anak menandatangani perjanjian restrukturisasi utang yang diambil alih tersebut. Jangka waktu utang tersebut adalah 12 tahun, dengan masa *grace period* 8 tahun sejak tanggal penandatanganan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar:

Jangka waktu

2021 – 2026  
2026 – 2028

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

- k) Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 70 tanggal 22 Februari 2013, entitas anak, ASN memperoleh fasilitas kredit investasi *trance* A dari Bank Mandiri dengan maksimum fasilitas sebesar Rp296.395.000.000 yang digunakan untuk pembiayaan investasi kebun kelapa sawit berikut bangunan, sarana dan prasarana yang ada dan akan ada di atasnya seluas 3.883 ha dan membiayai sebagian biaya rehabilitasi tanaman menghasilkan seluas 2.151 ha. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 8,50% per tahun, yang pembayarannya dilakukan setiap triwulan sampai dengan Desember 2026. Fasilitas kredit ini dijamin dengan beberapa bidang tanah dengan sertifikat HGU dan piutang usaha serta persediaan.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (continued)**

Investment Credit – Novasi ASN (continued)

Furthermore, in 2021, the Company and subsidiaries signed a debt restructuring agreement. The term of the debt is 12 years, with a *grace period* of 8 years from the signing date. The interest rates of the loan are:

Suku Bunga

JIBOR + Margin  
JIBOR + Margin + 1%

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

- k) In 2020, based on the Deed of Investment Credit Agreement No. 70 dated February 22, 2013, the Subsidiary, ASN obtained *Trance A* credit investment facility from Bank Mandiri with a maximum credit limit amounted to Rp296,395,000,000, used for financing the palm oil plantation estate investment include buildings, facilities and infrastructure that exists and will exist above the land covering area of 3,883 ha and financing part of the cost of rehabilitation of immature plantation area of 2,151 ha. This loan bears interest at 8.50% per annum paid quarterly until December 2026. These credit facilities are secured by some plot with certificate of HGU and accounts receivable and inventories.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*) (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**  
(lanjutan)

Kredit Investasi – Novasi ASN (lanjutan)

- l) Selanjutnya, pada tahun 2021, berdasarkan ketentuan pada Perjanjian Transformasi keuangan jangka Panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*). pada tanggal 15 Maret 2021, perjanjian kredit investasi entitas anak ke bank telah dinovasi, sehingga Perusahaan telah mengambil alih utang entitas anak tersebut sebesar Rp282.995.000.000, sehingga Perusahaan akan melanjutkan hak dan kewajiban entitas anak tersebut ke bank.

Selanjutnya, pada tahun 2021, Perusahaan dan entitas anak menandatangani perjanjian restrukturisasi utang yang diambil alih tersebut. Jangka waktu utang tersebut adalah 12 tahun, dengan masa *grace period* 8 tahun sejak tanggal penandatanganan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar:

**Jangka waktu**

2021 – 2026  
2026 – 2028

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

*Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)*

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**  
(continued)

Investment Credit – Novasi ASN (continued)

- l) Furthermore, in 2021, based on the the Long-term Financial Transformation Agreement, the Master Amendment Agreement (MAA), on March 15, 2021, the investment credit agreement of the subsidiaries to the bank has been renovated, so that the Company has taken over the debt of the subsidiaries to the bank. amounting to Rp282,995,000,000, so that the Company will continue the rights and obligations of the subsidiaries to the bank.

Furthermore, in 2021, the Company and subsidiaries signed a debt restructuring agreement. The term of the debt is 12 years, with a grace period of 8 years from the signing date. The interest rates of the loan are:

**Suku Bunga**

JIBOR + Margin  
JIBOR + Margin + 1%

*The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (lanjutan)**

Kredit Investasi – Novasi SPN

- m) Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 111 tanggal 28 Mei 2014, entitas anak, SPN memperoleh fasilitas kredit investasi dari Bank Mandiri yang terdiri dari fasilitas kredit investasi *trance* A investasi kebun, *trance* A investasi pabrik kelapa sawit dan *trance* B investasi kebun dengan maksimum fasilitas masing-masing sebesar Rp280.075.500.000, Rp173.449.500.000 dan Rp103.035.000.000. Fasilitas kredit investasi kebun *trance* A dan B digunakan untuk pendanaan investasi pembangunan kebun kelapa sawit sementara fasilitas kredit investasi pabrik kelapa sawit *trance* A digunakan untuk membiayai pembangunan satu unit pabrik pengolahan kelapa sawit. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,75% per tahun, yang pembayarannya dilakukan setiap triwulan sampai dengan tahun 2024, termasuk tenggang waktu pembayaran angsuran masing-masing sampai dengan tanggal 31 Desember 2027, 2028, dan 2030. Fasilitas kredit ini dijamin dengan sepuluh bidang tanah dengan sertifikat HGU berikut piutang usaha dan persediaan.

Selanjutnya, pada tahun 2021, berdasarkan ketentuan pada Perjanjian Transformasi keuangan jangka Panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)), pada tanggal 15 Maret 2021, perjanjian kredit investasi entitas anak ke bank telah dinovasi, sehingga Perusahaan telah mengambil alih utang entitas anak tersebut sebesar Rp347.022.995.928, sehingga Perusahaan akan melanjutkan hak dan kewajiban entitas anak tersebut ke bank.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (continued)**

Investment Credit – Novasi SPN

- m) In 2020, based on the Deed of Investment Credit Agreement No. 111 dated May 28, 2014, a subsidiary, SPN obtained investment credit facility from Bank Mandiri consisting of investment credit facility *trance* A estate investment, *trance* A palm oil mill investment and *trance* B estate investment with a maximum limit amounted to Rp280,075,500,000, Rp173,449,500,000 and Rp103,035,000,000, respectively. The plantation investment credit facilities *trance* A and B are used for finance the oil palm plantations estate while investment credit facility *trance* A palm oil mill used to finance the building of a palm oil processing factory. This loan bears interest at 9.75% per annum, paid quarterly until 2024, including a grace period of installment payments until the date of December 31, 2027, 2028, and 2030 respectively. The credit facility is collateralized by ten plots of land with certificate of HGU and accounts receivable and inventories.

Furthermore, in 2021, based on the the Long-term Financial Transformation Agreement, the Master Amendment Agreement (MAA), on March 15, 2021, the investment credit agreement of the subsidiaries to the bank has been renovated, so that the Company has taken over the debt of the subsidiaries to the bank, amounting to Rp347,022,995,928, so that the Company will continue the rights and obligations of the subsidiaries to the bank.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (lanjutan)**

Kredit Investasi – Novasi SPN (lanjutan)

Selanjutnya, pada tahun 2021, Perusahaan dan entitas anak menandatangani perjanjian restrukturisasi utang yang diambil alih tersebut. Jangka waktu utang tersebut adalah 12 tahun, dengan masa *grace period* 8 tahun sejak tanggal penandatanganan. Pinjaman ini dikenakan suku bunga sebesar:

Jangka waktu

2021 – 2026  
2026 – 2028

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

Kredit Modal Kerja

- a) Pada tahun 2020, Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) No. 1, tanggal 23 Januari 2018, yang telah dilakukan perpanjangan jangka waktu fasilitas KMK, sesuai Addendum II (Kedua) atas Perjanjian Modal Kerja No. CRO.KP/136/KMK/2016, Perusahaan memperoleh fasilitas KMK dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan maksimum fasilitas sebesar Rp500.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,50% per tahun yang bersifat *floating rate* yang pembayaran bunganya dilakukan setiap tanggal 23 setiap tiga bulan sekali terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Maret 2021. Bunga dihitung dari saldo utang yang belum dilunasi.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (continued)**

Investment Credit – Novasi SPN (continued)

Furthermore, in 2021, the Company and subsidiaries signed a debt restructuring agreement. The term of the debt is 12 years, with a *grace period* of 8 years from the signing date. The interest rates of the loan are:

Suku Bunga

JIBOR + Margin  
JIBOR + Margin + 1%

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

Working Capital Credit Agreement

- a) In 2020, Based on the Working Capital Credit Agreement (KMK) No. 1, dated January 23, 2018, which has been extended the term of the KMK facility, pursuant to the Addendum II (second) of the Working Capital Agreement No. CRO.KP/136/KMK/2016, the Company obtained the facilities of KMK from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with maximum facility of Rp500,000,000,000 used for working capital purposes. This loan is subject to a interest of 9.50% per year which is floating rate, which is done every 23rd of every quarter from February 1, 2017 until March 31, 2021. Interest is calculated from unsettled balance of debt.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (lanjutan)**

Kredit Modal Kerja (lanjutan)

Selanjutnya, dengan efektif berlakunya MAA pada tahun 2021, fasilitas pinjaman ini mengikuti ketentuan yang ada pada perjanjian MAA tersebut. suku bunga fasilitas pinjaman Rupiah adalah sebesar JIBOR 1 bulan + 3,43781% per tahun, dan jangka waktu seluruh fasilitas pinjaman perbankan akan jatuh tempo tahun 2025, yang dapat dilakukan perpanjangan selama 3 tahun, sampai dengan tahun 2028.

Atas fasilitas kredit modal kerja ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

Kredit Modal Kerja – Eks PT Perkebunan Nusantara III

b) Pada tahun 2015, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh beberapa perjanjian kredit modal kerja dengan nilai sebesar Rp842.053.826.823 untuk digunakan dengan tujuan pembiayaan belanja modal kerja perusahaan.

Atas fasilitas kredit modal ini telah dilunasi pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”) (continued)**

Working Capital Credit Agreement (continued)

Furthermore, with the enactment of the MAA in 2021, this loan facility refers to the clause contained in the MAA agreement, the interest rate for the Rupiah loan facility is JIBOR 1 Month + 3.43781% per annum, and the term of all banking loan facilities will mature in 2025, which can be done extension for 3 years, until 2028.

The Working Capital Credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

Working Capital Credit Agreement – Ex PT Perkebunan Nusantara III

b) In 2015, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital loan is amounting to Rp842,053,826,823 for working capital expenditure financing.

The Working Capital Credit facility was paid off on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*) (lanjutan)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**  
(lanjutan)

Kredit Modal Kerja – Eks PT Perkebunan  
Nusantara VI

- c) Pada tahun 2017, Perusahaan memperoleh Kredit Modal Kerja (“KMK”) termasuk Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (“SKBDN”) senilai Rp49.850.300.000 untuk tujuan pembiayaan belanja modal kerja Perusahaan.

Pada tahun 2020 terkait dengan relaksasi pembayaran bunga pinjaman yang diberikan oleh Mandiri, Perusahaan diperkenankan untuk menangguhkan pembayaran bunga untuk periode April 2020 sampai dengan April 2021 sebesar maksimal 72,63% dari total bunga yang dikenakan tanpa dikenakan penalti atau denda keterlambatan.

Atas fasilitas kredit modal kerja ini telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

*Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA)*  
(continued)

**PT Bank Mandiri (Persero) Tbk (“Mandiri”)**  
(continued)

Working Capital Credit Agreement –  
Ex PT Perkebunan Nusantara VI

- c) In 2017, the Company obtained working capital credit facility (“KMK”), including SKBDN amounting is Rp49,850,300,000 for working capital expenditure financing.

In 2020, In regard to relaxation of loan interest payments provided by Mandiri, the Company is permitted to defer interest payments for the period April 2020 to April 2021 with a maximum of 72.63% of the total interest charged without being subject to a penalty or late penalty.

The Working Capital Credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)**

Kredit Investasi

- a) Pada tahun 2020, berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Investasi No. 102, tanggal 27 Desember 2016, Perusahaan memperoleh fasilitas kredit dari BNI dengan maksimum fasilitas sebesar Rp800.000.000.000 yang digunakan untuk membiayai rencana anggaran investasi rutin dan pengembangan berupa aset tanaman dan non tanaman. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,50% per tahun *floating rate*, yang pembayarannya dilakukan setiap bulan mulai Februari 2021 sampai dengan 26 Desember 2026. Fasilitas kredit ini dijamin dengan beberapa bidang tanah dan pabrik kelapa sawit dengan sertifikat HGU.

Selanjutnya, dengan efektif berlakunya MAA pada tahun 2021, fasilitas pinjaman ini mengikuti ketentuan yang ada pada perjanjian MAA tersebut, suku bunga fasilitas pinjaman Rupiah adalah sebesar JIBOR 1 bulan + 3,43781% per tahun, dan jangka waktu seluruh fasilitas pinjaman perbankan akan jatuh tempo tahun 2025, yang dapat dilakukan perpanjangan selama 3 tahun, sampai dengan tahun 2028.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk (“BNI”)**

Investment Credit

- a) In 2020, based on the deed of the investment credit agreement No. 102, dated December 27, 2016, the Company obtained credit facility from BNI with maximum facility amounted to Rp800,000,000,000 used for finance the regular investment and development of plantations and non-plantations. This loan bears interest at 9.50% floating rate per annum, paid in monthly begin on February 2021 up to December 26, 2026. This credit facility is collateralized with palm oil mill and several land with certificate of HGU.

Furthermore, with the enactment of the MAA in 2021, this loan facility refers to the clause contained in the MAA agreement, the interest rate for the Rupiah loan facility is JIBOR 1 Month + 3.43781% per annum, and the term of all banking loan facilities will mature in 2025, which can be done extension for 3 years, until 2028.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (lanjutan)**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- b) Pada tahun 2019, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp2.000.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2012 sampai dengan tahun 2019, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh beberapa perjanjian kredit investasi dengan total nilai sebesar Rp Rp2.100.000.000.000 untuk modal *replanting* tanaman kelapa sawit dari BNI

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara V

- b) Pada tahun 2017, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) memperoleh beberapa perjanjian kredit investasi dengan total nilai sebesar Rp500.000.000.000 untuk modal *replanting* tanaman kelapa sawit dari BNI.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (continued)**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- l) In 2019, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits is amounting Rp2,000,000,000,000 for working capital financing to for replanting of oil palm plantation.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2012 until 2019, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several investment credits is amounting Rp2,100,000,000,000 for replanting of oil palm plantation from BNI.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara V

- b) In 2017, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) obtained several investment credits is amounting Rp500,000,000,000 for replanting of oil palm plantation from BNI.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (lanjutan)**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara V (lanjutan)

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara VI

c) Pada tahun 2013, MAI, sebelumnya entitas anak, memperoleh beberapa Kredit Investasi untuk pembangunan kebun kelapa sawit dari BNI.

d) Pada tahun 2020 terkait dengan relaksasi pembayaran bunga pinjaman yang diberikan oleh BNI, MAI, sebelumnya entitas anak diperkenankan untuk menanggihkan pembayaran bunga untuk periode April 2020 sampai dengan April 2021 sebesar maksimal 72,63% dari total bunga yang dikenakan tanpa dikenakan penalti atau denda keterlambatan.

Selanjutnya, dengan efektif berlakunya *Repackaging* pada tahun 2023, fasilitas pinjaman ini mengikuti ketentuan yang ada pada perjanjian MAA tersebut, suku bunga fasilitas pinjaman Rupiah adalah sebesar JIBOR+Margin sebesar 2,75% per tahun, dan jangka waktu seluruh fasilitas pinjaman perbankan akan jatuh tempo tahun 2030. Ketentuan mengenai jaminan, persyaratan, serta janji keuangan terkait fasilitas ini mengikuti ketentuan yang ada pada perjanjian kredit sindikasi.

Pada tahun 2012, ALN, entitas anak memperoleh beberapa Kredit Investasi untuk pembangunan kebun karet dari BNI.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (continued)**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara V (continued)

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara VI

c) In 2013, MAI, previously a subsidiary, obtained several investment credit for oil palm plantation development from BNI.

e) In 2020, In regard to relaxation of loan interest payments provided by BNI, MAI is permitted to defer interest payments for the period April 2020 to April 2021 with a maximum of 72.63% of the total interest charged without being subject to a penalty or late penalty.

Furthermore, with the effective implementation of *Repackaging* in 2023, this loan facility follows the provisions in the MAA agreement, the interest rate on the Rupiah loan facility is JIBOR+Margin of 2.75% per year, and the term of all bank loan facilities will mature 2030. Provisions regarding guarantees, conditions and financial promises related to this facility follow the provisions in the syndicated credit agreement.

In 2012, ALN, a subsidiary, obtained several investment credits for rubber plantation development from BNI.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (lanjutan)**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara V

Pada tahun 2020 terkait dengan relaksasi pembayaran bunga pinjaman yang diberikan oleh BNI, Perusahaan diperkenankan untuk menangguhkan pembayaran bunga untuk periode April 2020 sampai dengan April 2021 sebesar maksimal 72,63% dari total bunga yang dikenakan tanpa dikenakan penalti atau denda keterlambatan. Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara VI) memperoleh perjanjian kredit investasi atas kedua entitas anak ini dengan total nilai Rp394.020.035.386.

- a) Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- b) Pada tahun 2018, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp605.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk ("BNI") (continued)**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara V

In 2020, regarding relaxation of loan interest payments provided by BNI, the Company is permitted to defer interest payments for the period April 2020 to April 2021 with a maximum of 72.63% of the total interest charged without being subject to a penalty or late penalty. The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara VI) obtained investment credit agreements for two subsidiaries with total amount is Rp394,020,035,386.

- a) The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI")**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- b) In 2018, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several investment credits is amounting Rp605,000,000,000 for replanting of oil palm plantation.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") (lanjutan)**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara VI

c) Pada tahun 2011, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara VI) memperoleh beberapa Kredit Investasi senilai Rp2.172.978.604 untuk pembangunan dan replanting kebun sawit dari Bank Bukopin. Pada tahun 2020, seluruh fasilitas kredit ini kemudian diambil alih oleh BRI.

Pada tahun 2020 terkait dengan relaksasi pembayaran bunga pinjaman yang diberikan oleh BRI, Perusahaan diperkenankan untuk menanggungkan pembayaran bunga untuk periode April 2020 sampai dengan Desember 2020 sebesar maksimal 75,81% dari total bunga yang dikenakan tanpa dikenakan penalti atau denda keterlambatan.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

Kredit Modal Kerja – Eks PT Perkebunan Nusantara VI

d) Pada tahun 2007 sampai dengan 2020, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara VI) memperoleh beberapa Kredit Modal Kerja senilai Rp248.201.696.532 untuk belanja modal kerja operasional dari Bank Bukopin. Pada tahun 2020, seluruh fasilitas Kredit ini kemudian diambil alih oleh BRI.

Pada tahun 2020 terkait dengan relaksasi pembayaran bunga pinjaman yang diberikan oleh BRI, Perusahaan diperkenankan untuk menanggungkan pembayaran bunga untuk periode April 2020 sampai dengan April 2021 sebesar maksimal 75,81% dari total bunga yang dikenakan tanpa dikenakan penalti atau denda keterlambatan.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") (continued)**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara VI

c) In 2011, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara VI) obtained several Investment Credits is amounting to Rp2,172,978,604 for the development and replanting of oil palm plantation from Bank Bukopin. In 2020, these credit facility was then taken over by BRI.

In 2020, In regard to relaxation of loan interest payments provided by BRI, the Company is permitted to defer interest payments for the period April 2020 to December 2020 with a maximum of 75.81% of the total interest charged without being subject to a penalty or late penalty.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

Working Capital Credit Agreement – Ex PT Perkebunan Nusantara VI

d) In 2007 until 2020, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara VI) obtained several working capital credit is amounting to Rp248,201,696,532 for operational working capital expenditure financing from Bank Bukopin. In 2020, these credit facility was then taken over by BRI.

In 2020, In regard to relaxation of loan interest payments provided by BRI, the Company is permitted to defer interest payments for the period April 2020 to April 2021 with a maximum of 75.81% of the total interest charged without being subject to a penalty or late penalty.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") (lanjutan)**

Kredit Modal Kerja – Eks PT Perkebunan Nusantara VI (lanjutan)

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") (lanjutan)**

Kredit Modal Kerja – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2020, Berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Modal Kerja (KMK) No. 1, tanggal 23 Januari 2018, yang telah dilakukan perpanjangan jangka waktu fasilitas KMK, sesuai Addendum II (Kedua) atas Perjanjian Modal Kerja No. CRO.KP/136/KMK/2016, Perusahaan memperoleh fasilitas KMK dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. dengan maksimum fasilitas sebesar Rp500.000.000.000 yang digunakan untuk modal kerja. Pinjaman ini dikenakan bunga sebesar 9,50% per tahun yang bersifat *floating rate* yang pembayaran bunganya dilakukan setiap tanggal 23 setiap tiga bulan sekali terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017 sampai dengan 31 Maret 2021. Bunga dihitung dari saldo utang yang belum dilunasi.

Selanjutnya, dengan efektif berlakunya MAA pada tahun 2021, fasilitas pinjaman ini mengikuti ketentuan yang ada pada perjanjian MAA tersebut, suku bunga fasilitas pinjaman Rupiah adalah sebesar JIBOR 1 bulan + 3,43781% per tahun, dan jangka waktu seluruh fasilitas pinjaman perbankan akan jatuh tempo tahun 2025, yang dapat dilakukan perpanjangan selama 3 tahun, sampai dengan tahun 2028.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") (continued)**

Working Capital Credit Agreement – Ex PT Perkebunan Nusantara VI (continued)

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk ("BRI") (continued)**

Working Capital Credit Agreement – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2020, Based on the Working Capital Credit Agreement (KMK) No. 1, dated January 23, 2018, which has been extended the term of the KMK facility, pursuant to the Addendum II (second) of the Working Capital Agreement No. CRO.KP/136/KMK/2016, the Company obtained the facilities of KMK from PT Bank Mandiri (Persero) Tbk with maximum facility of Rp500,000,000,000 used for working capital purposes. This loan is subject to a interest of 9.50% per year which is floating rate, which is done every 23rd of every quarter from February 1, 2017 until March 31, 2021. Interest is calculated from unsettled balance of debt.

Furthermore, with the enactment of the MAA in 2021, this loan facility refers to the clause contained in the MAA agreement, the interest rate for the Rupiah loan facility is JIBOR 1 Month + 3.43781% per annum, and the term of all banking loan facilities will mature in 2025, which can be done extension for 3 years, until 2028.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*) (lanjutan)

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)** (lanjutan)

Kredit Modal Kerja – Eks PT Perkebunan Nusantara III (lanjutan)

- a) Pada tahun 2018, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit modal kerja dengan senilai Rp500.000.000.000 untuk digunakan sebagai pembiayaan modal kerja.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”)**

Kredit Modal Kerja – Eks PT Perkebunan Nusantara V

- a) Pada tahun 2017, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) memperoleh perjanjian kredit modal kerja dengan senilai Rp869.933.550.000 untuk digunakan sebagai modal pelunasan kewajiban debitur kepada PT Bank Mandiri (Persero).

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

*Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)*

**PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk (“BRI”)** (continued)

Working Capital Credit Agreement – Ex PT Perkebunan Nusantara III (continued)

- a) In 2018, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits amounting Rp500,000,000,000 for working capital financing.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”)**

Working Capital Credit Agreement – Ex PT Perkebunan Nusantara V

- a) In 2017, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) obtained several working capital credits amounting Rp869,933,550,000 for working capital financing to repayment obligation to PT Bank Mandiri (Persero).

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*) (lanjutan)

**a. Utang bank (lanjutan)**

**PT Bank Syariah Indonesia (“BSI”)**

Kredit Modal Kerja – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2019, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit modal kerja dengan senilai Rp600.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**PT Bank Riau Kepri (Persero) Tbk**

Kredit Modal Kerja – Eks PT Perkebunan Nusantara V

- a) Pada tahun 2017, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) memperoleh perjanjian kredit modal kerja dengan senilai Rp300.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal pelunasan kewajiban debitur kepada PT Bank Mandiri (Persero).

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2018, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp600.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

*Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)*

**a. Bank Loans (continued)**

**PT Bank Syariah Indonesia (“BSI”)**

Working Capital Credit Agreement – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2019, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits amounting Rp600,000,000,000 for replanting of oil palm plantation.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT Bank Riau Kepri (Persero) Tbk**

Working Capital Credit Agreement – Ex PT Perkebunan Nusantara V

- a) In 2017, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) obtained several working capital credits amounting Rp300,000,000,000 for working capital financing to repayment obligation to PT Bank Mandiri (Persero).

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2018, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits amounting Rp600,000,000,000 for replanting of oil palm plantation.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*) (lanjutan)

**a. Utang bank (lanjutan)**

**PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (“BCA”)**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara V

- b) Pada tahun 2017, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp750.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal pelunasan kewajiban debitur kepada PT Bank Mandiri (Persero).

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**PT Maybank Indonesia (Persero) Tbk**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara V

- a) Pada tahun 2017, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp1.000.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal pelunasan kewajiban debitur kepada PT Bank Mandiri (Persero).

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”)**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2017, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp200.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit dari Bank ICBC.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

*Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)*

**a. Bank Loans (continued)**

**PT Bank Central Asia (Persero) Tbk (“BCA”)**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara V

- b) In 2017, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) obtained several working capital credits amounting Rp750,000,000,000 for working capital financing to repayment obligation to PT Bank Mandiri (Persero).

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT Maybank Indonesia (Persero) Tbk**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara V

- a) In 2017, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) obtained several working capital credits amounting Rp1,000,000,000,000 for working capital financing to repayment obligation to PT Bank Mandiri (Persero).

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT Bank ICBC Indonesia (“ICBC”)**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2017, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits amounting Rp200,000,000,000 for working capital financing for replanting of oil palm plantation from ICBC Bank.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

**Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (Master Amendment Agreement (MAA)) (lanjutan)**

**PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC") (lanjutan)**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara V

- b) Pada tahun 2017, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara V) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp500.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal pelunasan kewajiban debitur kepada PT Bank Mandiri (Persero).

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**PT Bank Permata Tbk**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2018, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp500.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**PT Bank UOB Indonesia ("UOB")**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2018, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp500.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

**Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)**

**PT Bank ICBC Indonesia ("ICBC") (continued)**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara V

- b) In 2017, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V) obtained several working capital credits amounting Rp500,000,000,000 for working capital financing to repayment obligation to PT Bank Mandiri (Persero).

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT Bank Permata Tbk**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2018, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits amounting Rp500,000,000,000 for working capital financing to for replanting of oil palm plantation.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT Bank UOB Indonesia ("UOB")**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2018, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits amounting Rp500,000,000,000 for working capital financing to for replanting of oil palm plantation.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*) (lanjutan)

**PT Bank Victoria International Tbk**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2019, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp500.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**PT Bank QNB Indonesia Tbk**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2019, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp500.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk**

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2019, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai Rp250.000.000.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

*Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)*

**PT Bank Victoria International**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2019, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits amounting Rp500,000,000,000 for working capital financing to for replanting of oil palm plantation.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT Bank QNB Indonesia Tbk**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2019, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits amounting Rp500,000,000,000 for working capital financing to for replanting of oil palm plantation.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk**

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2019, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits amounting Rp250,000,000,000 for working capital financing to for replanting of oil palm plantation.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**a. Utang bank (lanjutan)**

Transformasi keuangan jangka panjang perjanjian perubahan induk (*Master Amendment Agreement (MAA)*) (lanjutan)

Sumitomo Mitsui Banking Corp (“SMBC”)

Kredit Investasi – Eks PT Perkebunan Nusantara III

- a) Pada tahun 2019, Perusahaan (sebelumnya merupakan PT Perkebunan Nusantara III) memperoleh perjanjian kredit investasi dengan senilai USD390.600.000 untuk digunakan sebagai modal *replanting* kebun sawit.

Atas fasilitas kredit investasi ini, telah dilunasi oleh Perusahaan pada tanggal 24 Juli 2023.

**b. Wesel bayar**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**a. Bank Loans (continued)**

Long-term financial transformation program Master Amendment Agreement (MAA) (continued)

Sumitomo Mitsui Banking Corp (“SMBC”)

Investment Credit – Ex PT Perkebunan Nusantara III

- a) In 2019, the Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III) obtained several working capital credits is amounting USD390,600,000 for working capital financing to for replanting of oil palm plantation.

The investment credit facility was paid off by the Company on July 24, 2023.

**b. Medium Term Notes (MTN)**

The details of this account are as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As restated (Note 46)			Medium Term Notes
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022 31 Desember 2021/ January 1, 2022 December 31, 2021	
<b>Wesel bayar</b>				
a) MTN III Tahun 2019 Seri B	600.000.000.000	600.000.000.000	600.000.000.000	a) MTN III year 2019 Series B
b) MTN Eks PTPN V	443.834.774.951	443.645.777.506	443.317.881.323	b) MTN Ex PTPN V
c) MTN II Tahun 2018	375.000.000.000	375.000.000.000	375.000.000.000	c) MTN II year 2018
d) MTN III Tahun 2019 Seri A	300.000.000.000	300.000.000.000	300.000.000.000	d) MTN III year 2019 Series A
e) MTN Syariah Ijarah I Tahun 2018	125.000.000.000	125.000.000.000	125.000.000.000	e) MTN Syariah Ijarah I year 2018
f) MTN IV Tahun 2019	40.000.000.000	100.000.000.000	100.000.000.000	f) MTN IV year 2019
<b>Subtotal</b>	<b>1.883.834.774.951</b>	<b>1.943.645.777.506</b>	<b>1.943.317.881.323</b>	<b>Subtotal</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**b. Wesel bayar (lanjutan)**

Rincian akun ini adalah sebagai berikut:  
(lanjutan)

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**b. Medium Term Notes (MTN) (continued)**

The details of this account are as follows:  
(continued)

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022 31 Desember 2021/ January 1, 2022 December 31, 2021	
<b>Sukuk Ijarah (SI)</b>				<b>MTN Ijarah</b>
g) SI II Tahun 2019 Seri E	200.000.000.000	200.000.000.000	200.000.000.000	g) MTN Ijarah II year 2019 Series E
h) SI II Tahun 2019 Seri C	150.000.000.000	150.000.000.000	150.000.000.000	h) MTN Ijarah II year 2019 Series C
i) SI II Tahun 2019 Seri F	105.000.000.000	105.000.000.000	105.000.000.000	i) MTN Ijarah II year 2019 Series F
j) SI II Tahun 2019 Seri A	10.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	j) MTN Ijarah II year 2019 Series A
k) SI II Tahun 2019 Seri G	-	465.000.000.000	465.000.000.000	k) MTN Ijarah II year 2019 Series G
l) SI II Tahun 2019 Seri H	-	100.000.000.000	100.000.000.000	l) MTN Ijarah II year 2019 Series H
m) SI II Tahun 2019 Seri D	-	40.000.000.000	40.000.000.000	m) MTN Ijarah II year 2019 Series D
<b>Subtotal</b>	<b>465.000.000.000</b>	<b>1.070.000.000.000</b>	<b>1.070.000.000.000</b>	<b>Subtotal</b>
Total	2.348.834.774.951	3.013.645.777.506	3.013.317.881.323	Total
Dikurangi bagian lancar	(1.545.000.000.000)	(605.000.000.000)	(1.390.000.000.000)	Less current liabilities
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>803.834.774.951</b>	<b>2.408.645.777.506</b>	<b>1.623.317.881.323</b>	<b>Long-term portion</b>

**a) MTN III Tahun 2019 Seri B**

Pada tanggal 9 Mei 2019 PTPN III melakukan penawaran MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri B dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp600.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 5 tahun sampai dengan 9 Mei 2024 dengan tingkat bunga sebesar 11.25% per tahun yang dibayar secara triwulan. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI.

**a) MTN III Year 2019 Series B**

On May 9, 2019, PTPN III has made an offer of MTN III PTPN III Series B in 2019 with the *arranger* and/or the first purchaser of PT Mandiri Sekuritas along with PT Bahana Sekuritas and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent, amounting to Rp600,000,000,000. The MTN has a term of 5 years up to May 9, 2024 with an interest rate of 11.25% per annum payable on quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**b. Wesel bayar (lanjutan)**

**b) MTN Eks PTPN V**

Pada tanggal 11 November 2016, PTPN V melakukan penawaran terbatas *Medium Term Notes* (MTN) PTPN V Tahun 2016 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bank Permata Tbk sebagai Agen Pemantau, sejumlah Rp500.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 4 tahun 10 bulan sampai dengan 14 September 2021, dengan tingkat bunga sebesar 12,00% per tahun yang dibayar secara triwulanan. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI.

Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, pada tahun 2020, MTN tersebut mendapat peringkat idBBB+.

Pada tanggal 31 Desember 2021 dan 2020, seluruh fasilitas yang diperoleh oleh PTPN V dijamin oleh aset tetap tertentu milik PTPN V. Perjanjian pinjaman mencakup persyaratan-persyaratan tertentu yang mengharuskan untuk mempertahankan rasio-rasio keuangan tertentu yang dihitung berdasarkan laporan keuangan. Pada tahun 2021 sesuai dengan Akta No. 12 tanggal 9 September 2021 terjadi perubahan jatuh tempo dari tanggal 14 September 2021 menjadi tanggal 13 Juli 2026 dengan pokok pinjaman sebesar Rp445.000.000.000.

Pada tanggal 14 September 2021, PTPN V telah melunasi MTN tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 9 September 2021, PTPN V melakukan penawaran terbatas *Medium Term Notes* (MTN) PTPN V Tahun 2021 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk sebagai Agen Pemantau, sejumlah Rp445.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 4 tahun 10 bulan sampai dengan 13 Juli 2026, dengan tingkat bunga sebesar 11,25% per tahun yang dibayar secara triwulanan. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI. Berdasarkan pemeringkatan yang dilakukan oleh Pefindo, MTN tersebut mendapat peringkat idBBB+.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**b. Medium Term Notes (MTN) (continued)**

**b) MTN Ex PTPN V**

On November 11, 2016, PTPN V made a private placement of *Medium Term Notes* (MTN) PTPN V Year 2016 with the *Arranger* and/or the first purchaser as PT Mandiri Securities and PT Bank Permata Tbk as the Monitoring Agent amounting to Rp500,000,000,000. This MTN has a period of 4 years 10 months up to September 14, 2021, with an interest rate of 12.00% per annum, payable on quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI.

Based on the rating issued by Pefindo, in 2020, the MTN was rated idBBB+.

As of December 31, 2021 and 2020, all facilities obtained by PTPN V are guaranteed by certain fixed assets belonging to the PTPN V. The loan agreement includes certain conditions that require to maintain certain financial ratios which are calculated based on the financial statements. In 2021 in accordance with Deed No. 12 dated September 9, 2021, there was a change in maturity from September 14, 2021 to July 13, 2026 with a principal loan of Rp445,000,000,000.

On September 14, 2021, PTPN V has fully paid the MTN.

Further, on September 9, 2021, PTPN V made a private placement of *Medium Term Notes* (MTN) PTPN V Year 2021 with the *Arranger* and/or the first purchaser as PT Mandiri Sekuritas PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten Tbk as the Monitoring Agent amounting to Rp445,000,000,000. This MTN has a period of 4 years 10 months years up to July 13, 2026, with an interest rate of 11.25% per annum, payable on quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI. Based on the rating issued by Pefindo, the above-mentioned MTN was rated idBBB+.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**b. Wesel bayar (lanjutan)**

**c) MTN II Tahun 2018**

Pada tanggal 23 Januari 2019, PTPN III melakukan penawaran MTN II Tahun 2018 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp375.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 23 Januari 2022 dengan tingkat bunga 11% per tahun.

Berdasarkan rapat umum tanggal 23 Desember 2021, pemegang MTN menyetujui perpanjangan jangka waktu dari 23 Januari 2022 menjadi 23 Januari 2024 dan kenaikan suku bunga 11,25% per tahun. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 51 tanggal 23 Desember 2021 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI.

**d) MTN III Tahun 2019 Seri A**

Pada tanggal 9 Mei 2019, PTPN III melakukan penawaran MTN III PTPN III Tahun 2019 Seri A dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas serta PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp300.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 9 Mei 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11,00% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Berdasarkan rapat umum tanggal 18 April 2022, pemegang MTN menyetujui perpanjangan jangka waktu dari 9 Mei 2022 menjadi 9 Mei 2024. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 35 tanggal 18 April 2022 oleh notaris Leolin Jayayanti, S.H, M.Kn. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**b. Medium Term Notes (MTN) (continued)**

**c) MTN II Tahun 2018**

On January 23, 2019, PTPN III has made an offer of MTN II in 2018 with the *arranger* or the first buyer PT Mandiri Sekuritas and/or PT Bahana Sekuritas along with the PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as a monitoring agent amounting to Rp375,000,000,000. MTN has a term 3 years up to January 23, 2022 with interest rate 11%, annually.

Based on the general meeting dated December 23, 2021, The MTN holder agreed to extend the term from January 23, 2022 to January 23, 2024 and the increased interest rate of 11.25% annually. This agreement has been authorized by Deed No.51 dated December 23, 2023 by notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI.

**d) MTN III Tahun 2019 Seri A**

On May 9, 2019, PTPN III has made an offer of MTN III PTPN III Series A in 2019 with the *Arranger* and/or the first purchaser of PT Mandiri Sekuritas along with PT Bahana Sekuritas and PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent, amounting to Rp300,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to May 9, 2022 with an interest rate of 11.00% per annum payable on quarterly basis.

Based on the general meeting of MTN on April 18, 2022 has agreed of loan from May 9, 2022 to May 9, 2024. This agreement was notarized under Deed No 35, dated April 18, 2022 of notary Leolin Jayayanti, S.H, M.Kn. The MTN has been registered in KSEI.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**b. Wesel bayar (lanjutan)**

**e) MTN Syariah Ijarah I Tahun 2018**

Pada tanggal 21 Januari 2019, PTPN III melakukan penawaran MTN Syariah Ijarah I PTPN III tahun 2018 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Mandiri Sekuritas dan PT Bahana Sekuritas serta PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp125.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 23 Januari 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11,00% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Berdasarkan rapat umum tanggal 17 Januari 2022, pemegang MTN menyetujui perpanjangan jangka waktu dari 23 Januari 2022 menjadi 23 Januari 2024. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 19 tanggal 17 Januari 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. MTN ini telah didaftarkan di KSEI.

**f) MTN IV Tahun 2019**

Pada tanggal 20 November 2019 PTPN III, melakukan penawaran MTN IV PTPN III Tahun 2019 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Danareksa Sekuritas dan PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk sebagai agen pemantau sejumlah Rp100.000.000.000. MTN ini memiliki jangka waktu 5 tahun sampai dengan 20 November 2024, dengan tingkat bunga sebesar 8,75% per tahun yang dibayar secara triwulan. MTN tersebut telah didaftarkan di KSEI.

Pada tahun 2023, Perusahaan melakukan pembayaran pokok sebesar Rp60.000.000.000. Pada tanggal 31 Desember 2023, nilai MTN IV PTPN III Tahun 2019 sebesar Rp40.000.000.000.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**b. Medium Term Notes (MTN) (continued)**

**e) MTN Syariah Ijarah I Tahun 2018**

On January 21, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Syariah Ijarah I in 2018 with the Arranger and/or the first purchaser of PT Mandiri Sekuritas along with PT Bahana Sekuritas and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent, amounting to Rp125,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to January 23, 2022 with an interest rate of 11.00% per annum payable on quarterly basis.

Based on the general meeting of MTN on January 17, 2022, MTN creditor has agreed to extend the period of loan from January 23, 2022 to January 23, 2024. This agreement was notarized under Deed No 19 dated January 17, 2022, of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI.

**f) MTN IV Tahun 2019**

On November 20, 2019, PTPN III has made an offer of MTN IV PTPN III in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser of PT Danareksa Sekuritas and PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk as the Monitoring Agent, amounting to Rp100,000,000,000. The MTN has a term of 5 years up to November 20, 2024 with an interest rate of 8.75% per annum payable on quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI.

During year 2023, Company made a principal payment of Rp60,000,000,000. As of December 31, 2023, MTN IV PTPN III in 2019 is amounting to Rp40,000,000,000.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**b. Wesel bayar (lanjutan)**

**g) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri E**

Pada tanggal 23 Agustus 2019 PTPN III, melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri E Tahun 2019 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani – *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp200.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 23 Agustus 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 23 Agustus 2022 menjadi 23 Agustus 2025. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI.

**h) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri C**

Pada tanggal 22 Agustus 2019 PTPN III, melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri C Tahun 2019 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp150.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 22 Agustus 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 22 Agustus 2022 menjadi 22 Agustus 2025. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**b. Medium Term Notes (MTN) (continued)**

**g) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri E**

On August 23, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series E in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III – Custodian Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amounting to Rp200,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 23, 2022, with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 23, 2022 to August 23, 2025. This agreement was notarized under Deed No 16. dated August 10 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI.

**h) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri C**

On August 22, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series C in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - Investment Management (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Custodian Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amounting to Rp150,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 22, 2022 with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 22, 2022 to August 22, 2025. This agreement was notarized under Deed No 16. dated August 10 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**b. Wesel bayar (lanjutan)**

**i) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri F**

Pada tanggal 3 September 2019, PTPN III melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri F Tahun 2019 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp105.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 5 tahun sampai dengan 3 September 2024, dengan tingkat bunga sebesar 11,60% per tahun yang dibayar secara triwulan. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI.

**j) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri A**

Pada tanggal 21 Agustus 2019, PTPN III melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri A Tahun 2019 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp10.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 21 Agustus 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 21 Agustus 2022 menjadi 21 Agustus 2025. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**b. Medium Term Notes (MTN) (continued)**

**i) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Series F**

On September 3, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series F in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Custodian Bank: PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amounting to Rp105,000,000,000. The MTN has a term of 5 years up to September 3, 2024, with an interest rate of 11.60% per annum payable on a quarterly basis. The MTN has been registered in KSEI.

**j) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Series A**

On August 21, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series A in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Custodian Bank: PT Bank Maybank Indonesia Tbk. amounting to Rp10,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 21, 2022 with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 21, 2022 to August 21, 2025. This agreement was notarized under Deed No 16. dated August 10, 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**b. Wesel bayar (lanjutan)**

**k) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri G**

Pada tanggal 21 Agustus 2019 PTPN III, melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri G Tahun 2019 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp465.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 21 Agustus 2022, dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 21 Agustus 2022 menjadi 21 Februari 2023. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI.

Pada tanggal 7 Februari 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk tersebut.

**l) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri H**

Pada tanggal 20 Desember 2019 PTPN III, melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri H Tahun 2019 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp100.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 21 Agustus 2022 dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 21 Agustus 2022 menjadi 21 Februari 2023. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI.

Pada tanggal 7 Februari 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk tersebut.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**b. Medium Term Notes (MTN) (continued)**

**k) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri G**

On August 21, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series G in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Custodian Bank: PT Bank Maybank Indonesia Tbk amounting to Rp465,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 21, 2022, with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 21, 2022 to February 21, 2023. This agreement was notarized under Deed No. 16. dated August 10 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI.

On February 7, 2023, Company has fully paid the MTN.

**l) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Series H**

On December 20, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series H in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Custodian Bank: PT Bank Maybank Indonesia Tbk amounting to Rp100,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 21, 2022, with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 21, 2022 to February 21, 2023. This agreement was notarized under Deed No 16, dated August 10 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI.

On February 7, 2023, Company has fully paid the MTN.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**23. UTANG JANGKA PANJANG (lanjutan)**

**b. Wesel bayar (lanjutan)**

**m) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Seri D**

Pada tanggal 21 Agustus 2019 PTPN III. melakukan penawaran Sukuk Ijarah II PTPN III (Persero) Seri D Tahun 2019 dengan *arranger* dan/atau pembeli pertama PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Bank Kustodi: PT Bank Maybank Indonesia Tbk sejumlah Rp40.000.000.000. Sukuk ini memiliki jangka waktu 3 tahun sampai dengan 21 Agustus 2022. dengan tingkat bunga sebesar 11,20% per tahun yang dibayar secara triwulan.

Pada tanggal 10 Agustus 2022, telah disetujui perpanjangan jangka waktu dari 21 Agustus 2022 menjadi 21 Februari 2023. Perjanjian ini telah diaktakan dengan Akta No. 16 tanggal 10 Agustus 2022 oleh notaris Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. Sukuk tersebut telah didaftarkan di KSEI.

Pada tanggal 7 Februari 2023, Perusahaan telah melunasi Sukuk tersebut.

**c. Utang jangka panjang lainnya**

Pada tanggal 31 Desember 2023, Perusahaan mencatat utang jangka panjang lainnya merupakan kelebihan potongan angsuran piutang plasma dan piutang karyawan.

**23. LONG-TERM DEBTS (continued)**

**b. Medium Term Notes (MTN) (continued)**

**m) Sukuk Ijarah II Tahun 2019 Series D**

On August 21, 2019, PTPN III has made an offer of MTN Ijarah II PTPN III (Persero) Series D in 2019 with the Arranger and/or the first purchaser PT Permodalan Nasional Madani - *Investment Management* (PNM IM) - RDPT PNM Multisektoral III - Custodian Bank : PT Bank Maybank Indonesia Tbk amounting to Rp40,000,000,000. The MTN has a term of 3 years up to August 21, 2022 with an interest rate of 11.20% per annum payable on a quarterly basis.

On August 10, 2022 has agreed to extend the period of loan from August 21, 2022 to February 21, 2023. This agreement was notarized under Deed No. 16, dated August 10, 2022 of notary Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. The MTN has been registered in KSEI.

On February 7, 2023, Company has fully paid the MTN.

**c. Other long term debt**

On December 31, 2023, Company has recorded other long term debt is employee receivables and an excess deductions for installments of plasma receivables.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY**

Disajikan kembali (Catatan 46)/  
As Restated (Note 46)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Dana pensiun	740.781.816.355	1.149.600.861.305	730.267.284.378	Pension fund
Imbalan jangka panjang	7.789.674.928.123	7.842.570.667.082	8.308.692.069.863	Long term employee benefits
Total	8.530.456.744.478	8.992.171.528.387	9.038.959.354.241	Total
Dikurangi bagian lancar	1.096.695.789.042	871.592.727.863	1.157.369.459.120	Less current maturities
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>7.433.760.955.436</b>	<b>8.120.578.800.524</b>	<b>7.881.589.895.121</b>	<b>Long-term portion</b>

**a. Dana pensiun**

Perusahaan menyelenggarakan program pensiun manfaat pasti untuk seluruh karyawan tetap yang dikelola oleh Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. Kep-344/KMK/17/1999 tanggal 19 September 1999.

Pendanaan Dapenbun berasal dari kontribusi karyawan Perusahaan dan Perusahaan masing-masing sebesar sebesar 6,00% dan 8,36%, dari gaji dasar tahunan masing-masing karyawan pada tahun tertentu. Apabila terdapat saldo defisit antara aset dan liabilitas dana pensiun akan ditanggung oleh Perusahaan.

Nilai wajar aset dan liabilitas manfaat pensiun Perusahaan pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 1 Januari 2022/31 Desember 2021 masing-masing didasarkan pada penilaian aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Azwir Arifin dan Rekan dalam laporannya masing-masing tanggal 17 Mei 2024, 22 Februari 2023 dan 25 Maret 2022, menggunakan metode "Projected Unit Credit" dengan asumsi-asumsi utama sebagai berikut:

**a. Pension fund**

The Company provides defined benefit pensions plan for all permanent employees which is managed by Dana Pensiun Perkebunan (Dapenbun) based on the Letter of Ministry of Finance No. Kep-344/ KMK/17/1999 dated September 19, 1999.

The pension plan is funded by contribution from both its employees and the company at 6.00% and 8.36% of the annual employee basic salary at certain year. If there is deficit between the asset and the employee benefit obligation, it will be covered by the Company and certain Subsidiaries.

The fair value of plan asset and actuarial liabilities of the Company as of December 31, 2023, December 31, 2022, and January 1, 2022/December 31, 2021 are based on the valuation of an independent actuary, Actuarial Consulting Azwir Arifin dan Rekan, respectively, as presented in its report dated on May 17, 2024, February 22, 2023, and March 25, 2022, respectively, using the "Projected Unit Credit" method with main assumption as follows:

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

**a. Dana pensiun (lanjutan)**

**a. Pension fund (continued)**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021/ January 1, 2022/ December 31, 2021	
Tingkat diskonto per tahun	6,37% – 7,44%	3,40% – 7,60%	3,40% – 7,83%	Discount rate per annum
Tingkat kenaikan penghasilan dasar pensiun	2,50% – 5,00%	2,50% – 5,00%	2,50% – 5,00%	Average basic pension income increase rate
Sisa rata-rata masa kerja (tahun)	4,29 – 7,69 tahun/ years	5,15 – 10,27 tahun/ years	5,46 – 10,71 tahun/ years	Average remaining years of service (years)
Usia pension normal (tahun)				Normal pension age (years)
- Karyawan pimpinan	56	56	56	- Staff employee
- Karyawan pelaksana	55	55	55	- Non staff employee
Tingkat cacat (dari mortalita)	10,00%	10,00%	10,00%	Disability rate (from mortality)
Tingkat pengunduran diri	5,00%	5,00%	5,00%	Turnover rate
Tingkat mortalita	GAM 71 Modified	GAM 71 Modified	GAM 71 Modified	Mortality rate

**Rincian beban imbalan kerja**

**Details of employee benefits expense**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Biaya bunga	53.461.160.112	11.619.806.674	Interest costs
Biaya jasa kini	58.906.768.408	65.577.178.913	Current service cost
Biaya jasa lalu luran karyawan	(664.794.300)	-	Past service cost
	(19.461.495.793)	(23.692.177.333)	Employee contribution
<b>Total</b>	<b>92.241.638.427</b>	<b>53.504.808.254</b>	<b>Total</b>

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021/ January 1, 2022/ December 31, 2021	
Nilai kini liabilitas	4.296.896.375.024	4.276.431.543.359	4.262.369.093.729	Present value of liability
Nilai wajar aset program	(3.556.114.558.669)	(3.126.830.682.054)	(3.527.692.484.918)	Fair value of plan assets
Pelepasan entitas anak <sup>(*)</sup>	-	-	(4.409.324.433)	Disposal of subsidiary <sup>(*)</sup>
<b>Total</b>	<b>740.781.816.355</b>	<b>1.149.600.861.305</b>	<b>730.267.284.378</b>	<b>Total</b>

<sup>(\*)</sup> Merupakan pengurangan karena tidak dikonsolidasinya lagi SAN tahun 2021

<sup>(\*)</sup> Represent deduction related to deconsolidation SAN in 2021

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**a. Dana pensiun (lanjutan)**

**Mutasi saldo estimasi liabilitas imbalan  
kerja**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)	
		31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021
Saldo awal	1.149.600.861.305	730.267.284.388	1.067.017.247.292
Pembayaran iuran	(756.218.464.320)	(635.005.909.691)	(297.131.377.046)
Imbalan yang diakui pada laba rugi	92.241.638.427	53.504.808.254	86.778.973.050
Imbalan yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	255.157.780.943	1.000.834.678.354	(121.988.234.485)
Pelepasan entitas anak (*)	-	-	(4.409.324.433)
<b>Total</b>	<b>740.781.816.355</b>	<b>1.149.600.861.305</b>	<b>730.267.284.378</b>

(\*) Merupakan pengurangan karena tidak dikonsolidasinya lagi SAN tahun 2021

**Mutasi saldo nilai wajar dari aset program**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)	
		31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021
Saldo awal	(3.126.830.682.054)	(3.505.427.181.402)	(3.654.662.387.603)
Pembayaran manfaat iuran yang dibayarkan	416.643.028.346 (693.221.908.685)	398.089.283.528 (658.698.087.019)	412.541.489.161 (320.912.949.364)
Pendapatan bunga	(287.342.070.691)	(324.020.759.785)	(283.162.347.643)
Imbal hasil lainnya	134.637.074.415	963.226.062.624	318.503.710.531
Pelepasan entitas anak(*)	-	-	22.265.303.516
<b>Total</b>	<b>(3.556.114.558.669)</b>	<b>(3.126.830.682.054)</b>	<b>(3.505.427.181.402)</b>

(\*) Merupakan pengurangan karena tidak dikonsolidasinya lagi SAN tahun 2021

Pengembangan aset program dilaksanakan dan dikelola secara gabungan oleh Dapenbun. Distribusi aset program kepada masing-masing pemberi kerja dilakukan oleh Dapenbun setiap bulan secara proporsional dari nilai aset neto ditambah iuran pemberi kerja dan iuran tambahan, kemudian dikurangi dengan manfaat pensiun, pengalihan dana ke dana pensiun lain yang dibayarkan dan piutang iuran dan masing-masing pemberi kerja.

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

**a. Pension fund (continued)**

**Movements of the estimated liabilities for  
employee benefits**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)	
	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021
Saldo awal	730.267.284.388	1.067.017.247.292
Pembayaran iuran	(635.005.909.691)	(297.131.377.046)
Imbalan yang diakui pada laba rugi	53.504.808.254	86.778.973.050
Imbalan yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	1.000.834.678.354	(121.988.234.485)
Pelepasan entitas anak (*)	-	(4.409.324.433)
<b>Total</b>	<b>1.149.600.861.305</b>	<b>730.267.284.378</b>

(\*) Represent deduction related to deconsolidation SAN in 2021

**Movements of plan asset fair value**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)	
	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021
Saldo awal	(3.505.427.181.402)	(3.654.662.387.603)
Pembayaran manfaat iuran yang dibayarkan	398.089.283.528 (658.698.087.019)	412.541.489.161 (320.912.949.364)
Pendapatan bunga	(324.020.759.785)	(283.162.347.643)
Imbal hasil lainnya	963.226.062.624	318.503.710.531
Pelepasan entitas anak(*)	-	22.265.303.516
<b>Total</b>	<b>(3.126.830.682.054)</b>	<b>(3.505.427.181.402)</b>

(\*) Represent deduction related to deconsolidation SAN in 2021

The development of plan assets is implemented and managed jointly by Dapenbun. The distribution of plan assets to each employer include is performed by Dapenbun every month proportionately of the net asset value plus the employer's contribution and additional contribution, then deducted by the pension benefits, the transfer of funds to other pension funds and contribution receivables and each employer.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**a. Dana pensiun (lanjutan)**

Persentase penempatan aset program gabungan tersebut adalah sebagai berikut:

	Disajikan kembali (Catatan 46) As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Surat berharga negara	39,70%	-	-	Government securities
Obligasi	11,40%	43,04%	29,49%	Bonds
Deposito berjangka	14,50%	15,45%	10,48%	Time deposits
Tanah dan bangunan	12,20%	12,52%	11,25%	Land and buildings
Reksa Dana	8,70%	13,75%	17,18%	Mutual fund
Saham	7,00%	8,82%	31,47%	Shares
Penempatan langsung	6,20%	6,40%	-	Direct placement
Lain-lain	0,30%	0,02%	0,13%	Others

**b. Imbalan kerja jangka panjang**

Grup memberikan imbalan jasa masa kerja lainnya meliputi santunan hari tua, pemeliharaan kesehatan pensiunan, tunjangan masa persiapan pensiun, bantuan kematian, dan cuti panjang. Beban imbalan kerja karyawan dibebankan ke beban umum dan administrasi dan dikapitalisasi ke tanaman belum menghasilkan. Liabilitas imbalan jasa masa kerja lainnya Grup pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 1 Januari 2022/31 Desember 2021 didasarkan pada penilaian aktuaris independen Kantor Konsultan Aktuaria (KKA) Azwir Arifin dan Rekan dalam laporannya masing-masing tanggal 17 Mei 2024, 22 Februari 2023 dan 25 Maret 2022, dengan menggunakan metode "Projected Unit Credit". Asumsi-asumsi utama yang digunakan adalah sebagai berikut:

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

**a. Pension fund (continued)**

The percentage of placement of the combined plan assets is as follows:

	Disajikan kembali (Catatan 46) As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Surat berharga negara	39,70%	-	-	Government securities
Obligasi	11,40%	43,04%	29,49%	Bonds
Deposito berjangka	14,50%	15,45%	10,48%	Time deposits
Tanah dan bangunan	12,20%	12,52%	11,25%	Land and buildings
Reksa Dana	8,70%	13,75%	17,18%	Mutual fund
Saham	7,00%	8,82%	31,47%	Shares
Penempatan langsung	6,20%	6,40%	-	Direct placement
Lain-lain	0,30%	0,02%	0,13%	Others

**b. Long term employee benefit**

The Group provide other post-retirement benefits including post-retirement benefit, post-retirement health care benefits, preparation of retirement benefit, mortality grant, and long vacation. The provision for employee benefits are charged to general and administrative expense and capitalized to immature plantations. The Group's other post-retirement benefits liability on December 31, 2023, December 31, 2022, and January 1, 2022/December 31, 2021 is calculated by an independent actuary, Actuarial Consulting Azwir Arifin dan Rekan, as presented in its report dated on May 17, 2024, February 22, 2023, and March 25, 2022, respectively, using the "Projected Unit Credit" method. The main assumptions used are as follows:

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

**b. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)**

**b. Long term employee benefit (continued)**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021/ January 1, 2022/ December 31, 2021	
Tingkat diskonto per tahun	6,37% – 7,44%	3,40% – 7,60%	3,40% – 7,83%	<i>Discount rate per annum</i>
Tingkat kenaikan gaji pokok rata-rata	2,5% - 8%	2,5% - 9%	2,5% - 8%	<i>Average salary increase rate</i>
Sisa rata-rata masa kerja (tahun)	6,07 – 14,52 tahun years	4,68 – 23,44 tahun years	6,86 – 24,93 tahun years	<i>Average remaining years of service (years)</i>
Usia pension normal (tahun)				<i>Normal pension age (years)</i>
- Karyawan pimpinan	56 - 57	56 - 57	56	<i>- Staff employee</i>
- Karyawan pelaksana	55 - 57	55 - 57	55	<i>- Non staff employee</i>
Tingkat cacat (dari mortalita)	10,00%	10,00%	10,00%	<i>Disability rate (from mortality)</i>
Tingkat pengunduran diri	5,00% di usia 20 tahun dan menurun linear sampai dengan usia pensiun normal/ 5.00% in 20 years old and linearly decreasing to normal retirement age	5,00% di usia 20 tahun dan menurun linear sampai dengan usia pensiun normal/ 5.00% in 20 years old and linearly decreasing to normal retirement age	5,00% di usia 20 tahun dan menurun linear sampai dengan usia pensiun normal/ 5.00% in 20 years old and linearly decreasing to normal retirement age	<i>Turnover rate</i>
Tingkat mortalita	GAM 71 Modified	GAM 71 Modified	GAM 71 Modified	<i>Mortality rate</i>

**Rincian beban imbalan kerja**

**Details of employee benefits expense**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Biaya bunga	451.856.168.672	436.546.319.919	<i>Interest costs</i>
Biaya jasa kini	289.256.242.773	346.861.051.313	<i>Current service cost</i>
Biaya jasa lalu	(748.414.804.754)	(79.941.951.278)	<i>Past service cost</i>
Laba neto aktuarial	(36.837.808.486)	(8.326.290.410)	<i>Net actuarial gain</i>
Total	(44.140.201.795)	695.139.129.544	<i>Total</i>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

**b. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)**

**b. Long term employee benefit (continued)**

**Mutasi saldo estimasi liabilitas imbalan  
kerja**

**Movements of the estimated liabilities for  
employee benefits**

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)		
		31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Saldo awal	7.842.570.667.082	8.308.692.069.863	8.720.558.169.268	Beginning balance
Pembayaran imbalan	(931.464.526.321)	(1.063.219.051.598)	(1.216.840.484.956)	Benefits payments
Beban imbalan kerja yang diakui pada laba rugi	(44.140.201.795)	695.139.129.544	743.558.219.819	Employee benefits recognized at profit and loss
Beban imbalan kerja yang diakui pada penghasilan komprehensif lain	922.708.989.157	(98.041.480.727)	87.647.280.893	Employee benefits recognized at other comprehensive income
Pelepasan entitas anak <sup>(1)</sup>	-	-	(26.231.115.161)	Disposal of subsidiary <sup>(1)</sup>
<b>Total</b>	<b>7.789.674.928.123</b>	<b>7.842.570.667.082</b>	<b>8.308.692.069.863</b>	<b>Total</b>

<sup>(1)</sup> Merupakan pengurangan karena tidak dikonsolidasinya lagi SAN tahun 2021

<sup>(1)</sup> Represent deduction related to deconsolidation SAN in 2021

Analisa sensitivitas terhadap asumsi utama yang digunakan dalam menentukan kewajiban imbalan kerja adalah sebagai berikut:

Sensitivity analysis to the key assumptions used in determining employee benefits liability is as follows:

Asumsi utama	Persentase kenaikan/ (penurunan)/ Percentage increase/ (decrease)	Nilai kewajiban kini/ Present value of liability	Key assumptions
Tingkat diskonto tahunan	1%/(1%)	(746.564.871.662) / 859.697.934.856	Annual discount rate
Tingkat kenaikan gaji tahunan	1%/(1%)	255.198.025.512 / (233.893.490.761)	Future annual salary increase rate

Analisa sensitivitas di atas dihitung menggunakan metode ekstrapolasi atas pengaruh terhadap kewajiban imbalan kerja sebagai hasil dari perubahan yang beralasan atas asumsi utama yang mungkin terjadi pada tanggal pelaporan.

The sensitivity analysis above is calculated based on a method that extrapolates the impact on employee benefits liability as a result of reasonable changes in key assumptions occurring at the end of the reporting period.

Pembayaran kontribusi yang diharapkan dari kewajiban imbalan kerja pada periode mendatang adalah sebagai berikut:

Expected contribution payment of employee benefit for upcoming period are as follows:

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**24. LIABILITAS IMBALAN KERJA KARYAWAN  
(lanjutan)**

**24. EMPLOYEE BENEFITS LIABILITY (continued)**

**b. Imbalan kerja jangka panjang (lanjutan)**

**c. Long term employee benefit (continued)**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021/ January 1, 2022/ December 31, 2021	
Dalam 12 bulan mendatang	1.096.695.789.042	871.592.727.863	1.157.369.459.120	Within the next 12 months
Antara 1 sampai 5 tahun	2.457.403.428.169	2.701.062.674.289	2.360.236.914.532	Between 1 and 5 years
Antara 5 sampai 10 tahun	3.932.040.148.549	4.091.046.050.204	4.345.354.163.004	Between 5 and 10 years
Diatas 10 tahun	27.296.703.558.376	28.299.333.502.792	30.104.454.495.854	Beyond 10 years
<b>Total</b>	<b>34.782.842.924.136</b>	<b>35.963.034.955.148</b>	<b>37.967.415.032.510</b>	<b>Total</b>

**25. MODAL SAHAM**

**25. CAPITAL STOCK**

Kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut:

The share ownership of the Company is as follows:

	31 Desember 2023/December 31,2023			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/ Number of issued and fully paid shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount	
<b>Pemegang saham</b>				<b>Shareholders</b>
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna) Negara Republik Indonesia	1	0,00%	1.000.000	Preferred Stock (A Dwiwarna Share) Republic of Indonesia
Saham Biasa (Seri B) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Negara Republik Indonesia	7.801.471 593.846	92,93% 7,07%	7.801.471.000.000 593.846.000.000	Common Stock (B Shares) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Republic of Indonesia
<b>Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>8.395.318</b>	<b>100,00%</b>	<b>8.395.318.000.000</b>	<b>Number of shares issued and fully paid</b>



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Kepemilikan saham Perusahaan adalah sebagai berikut: (lanjutan)

**25. CAPITAL STOCK (continued)**

The share ownership of the Company is as follows: (continued)

31 Desember 2022/December 31, 2022			
	Jumlah saham ditempatkan dan disetor/ Number of issued and fully paid shares	Persentase kepemilikan/ Percentage of ownership	Jumlah/ Amount
<b>Pemegang saham</b>			<b>Shareholders</b>
Saham Preferen (Seri A Dwiwarna) Negara Republik Indonesia	1	0,00%	1.000.000
			Preferred Stock (A Dwiwarna Share) Republic of Indonesia
Saham Biasa (Seri B) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Negara Republik Indonesia	2.647.904 294.211	90,00% 10,00%	2.647.904.000.000 294.211.000.000
			Common Stock (B Shares) PT Perkebunan Nusantara III (Persero) Republic of Indonesia
<b>Jumlah saham ditempatkan dan disetor penuh</b>	<b>2.942.116</b>	<b>100,00%</b>	<b>2.942.116.000.000</b>
			<b>Number of shares issued and fully paid</b>

Berdasarkan keputusan para pemegang saham tanggal 5 Juni 2023, pemegang saham sepakat menetapkan penggunaan seluruh laba Perusahaan sebagai cadangan wajib untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 yang berasal dari saldo laba bersih tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 sebelum penyajian kembali sebesar Rp2.185.399.453.623.

Based on the shareholders decision dated June 5, 2023, the shareholders agreed to establish the use of the Company's profits as the capital reserve for year ended December 31, 2023 which originated from the net profit balance for the year ended December 31, 2022 before restatement amounting to Rp2,185,399,453,623.

Berdasarkan keputusan para pemegang saham tanggal 28 Juni 2022, pemegang saham sepakat menetapkan penggunaan seluruh laba Perusahaan sebagai cadangan wajib untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 yang berasal dari saldo laba bersih tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp2.154.338.672.188.

Based on the shareholders decision dated June 28, 2022, the shareholders agreed to establish the use of the Company's profits as the capital reserve for year ended December 31, 2022 which originated from the net profit balance for the year ended December 31, 2021 before restatement amounting to Rp2,154,338,672,188.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) No. 72 tahun 2014, tanggal 17 September 2014, Negara Republik Indonesia melakukan penambahan penyertaan modal pada PT Perkebunan Nusantara III (Persero), antara lain melalui pengalihan 90% saham Negara Republik Indonesia pada Perusahaan. Sesuai dengan akta No. 25 tanggal 23 Oktober 2014 dari Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notaris di Jakarta, untuk menindaklanjuti PP No. 72 tersebut, pemegang saham Perusahaan menyetujui perubahan struktur pemegang saham Perusahaan dari Negara Republik Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp2.647.904.000.000 atau sebanyak 2.647.904 saham atau 90% dari jumlah saham yang disetor.

Based on the Indonesian Government Regulation (PP) No. 72 2014, date September 17, 2014, the Republic of Indonesia to the increase in capital at PT Perkebunan Nusantara III (Persero), including through the transfer of 90% shares in the Company of the Republic of Indonesia. In accordance with the deed No. 25 dated October 23, 2014 from Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn., notary in Jakarta, to follow up on the PP 72, the shareholders approved the Company's change in the shareholder structure of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) amounting Rp2,647,904,000,000 or as much as 2,647,904 shares or 90% of the total paid-up shares.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**25. MODAL SAHAM (lanjutan)**

Atas perubahan akta ini, Perusahaan telah melaporkan ke Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai dengan surat penerimaan pemberitahuan No. AHU-08636.40.21.14, tanggal 19 November 2014.

**Pengelolaan Modal**

Tujuan utama pengelolaan modal Grup adalah untuk memastikan pemeliharaan rasio modal yang sehat untuk mendukung usaha dan memaksimalkan imbalan bagi pemegang saham.

Selain itu, Grup dipersyaratkan oleh Undang-undang Perseroan Terbatas efektif tanggal 16 Agustus 2007 untuk berkontribusi sampai dengan 20% dari modal saham ditempatkan dan disetor penuh ke dalam dana cadangan yang tidak boleh didistribusikan.

Grup mengelola struktur permodalan dan melakukan penyesuaian, berdasarkan perubahan kondisi ekonomi. Untuk memelihara dan menyesuaikan struktur permodalan, Grup dapat menyesuaikan pembayaran dividen kepada pemegang saham, imbalan modal kepada pemegang saham atau menerbitkan saham baru. Tidak ada perubahan atas tujuan, kebijakan maupun proses pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.

Kebijakan Grup adalah mempertahankan struktur permodalan yang sehat untuk mengamankan akses terhadap pendanaan pada biaya yang wajar.

**25. CAPITAL STOCK (continued)**

*Upon a change in this deed, the Company has reported to the Minister of Justice and Human Rights of the Republic of Indonesia in accordance with the letter of acceptance notification No. AHU08636.40.21.14, on November 19, 2014.*

**Capital Management**

*The primary objective of the Group's capital management is to ensure that it maintains healthy capital ratios in order to support its business and maximize shareholder value.*

*In addition, the Group is also required by the Corporate Law effective August 16, 2007 to contribute to and maintain a non-distributable reserve fund until the said reserve reaches 20% of the issued and fully paid share capital.*

*The Group manages its capital structure and makes adjustments to it, in light of changes in economic conditions. To maintain or adjust the capital structure, the Group may adjust the dividend payment to shareholders, return capital to shareholders or issue new shares. No changes were made in the objectives, policies or processes during the years ended December 31, 2023 and December 31, 2022.*

*The Group's policy is to maintain a healthy capital structure in order to secure access to finance at a reasonable cost.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. TAMBAHAN MODAL DISETOR**

Komponen ekuitas lainnya terdiri dari:

**26. ADDITIONAL PAID-IN CAPITAL**

The details of other components of equity consist of:

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
Penggabungan PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, dan PT Perkebunan Nusantara XIII ke Perusahaan	2.413.224.134.071	-	-	<i>Merger of PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI and PT Perkebunan Nusantara XIII to the Company</i>
Reklasifikasi tambahan modal disetor terkait surplus revaluasi aset tetap atas penggabungan PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara XIII ke Perusahaan	(3.747.747.112.717)	-	-	<i>Reclassification of additional paid in capital of revaluation surplus of fixed assets from merger of PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, PT Perkebunan Nusantara XIII, to the Company</i>
Pengalihan aset dan liabilitas unit bisnis sawit dan karet kepada Perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	563.173.500.109	-	-	<i>Transfer to asset and liabilities of palm and rubber business unit from PT Perkebunan Nusantara III (Persero)</i>
Selisih nilai transaksi penjualan PT Riset Perkebunan Nusantara kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	42.511.508.558	42.511.508.558	42.511.508.558	<i>Differences in values of the sales of PT Riset Perkebunan Nusantara to PT Perkebunan Nusantara III (Persero)</i>
Selisih nilai transaksi penjualan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	3.146.979.296	3.146.979.296	3.146.979.296	<i>Differences in values of the sales of PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara to PT Perkebunan Nusantara III (Persero)</i>
Pelepasan entitas anak PT Sarana Agro Nusantara Ke PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	(43.687.658.467)	(43.687.658.467)	(43.687.658.467)	<i>Disposal of subsidiary PT Sarana Agro Nusantara to PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara</i>
Nilai wajar piutang pihak berelasi	(2.509.145.101)	(2.509.145.101)	(2.509.145.101)	<i>Fair value of related party receivable</i>
<b>Total</b>	<b>(771.887.794.251)</b>	<b>(538.315.714)</b>	<b>(538.315.714)</b>	<b>Total</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)**

Penggabungan PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, dan PT Perkebunan Nusantara XIII ke Perusahaan

Pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan melakukan penggabungan dengan PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI"), dan PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII"). Pada tanggal tersebut, Perusahaan juga melakukan perubahan atas modal yang ditempatkan dan disetor pada Perusahaan. Dimana Perusahaan menerbitkan saham baru kepada Negara Republik Indonesia dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebagai berikut:

- a. Negara Republik Indonesia sebanyak 299.365 lembar saham seri B atau sebesar Rp299.635.000.000
- b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebanyak 2.696.718 lembar saham seri B atau sebesar Rp 2.696.718.000.000

Penggabungan dan perubahan modal yang ditempatkan dan disetor tersebut telah dikukuhkan melalui Akta Notaris No. 01 tanggal 1 Desember 2023 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn dan telah disetujui dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.09-0191342 tanggal Menteri 1 Desember 2023.

Pada tanggal penggabungan Penggabungan PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, dan PT Perkebunan Nusantara XIII ke Perusahaan, Grup mengakui selisih atas nilai transaksi dengan nilai buku sebagai bagian dari "tambahan modal disetor" pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**26. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL (lanjutan)**

Merger of PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, and PT Perkebunan Nusantara XIII to the Company

on December 1, 2023, the Company merged with PT Perkebunan Nusantara V ("PTPN V"), PT Perkebunan Nusantara VI ("PTPN VI"), and PT Perkebunan Nusantara XIII ("PTPN XIII"). On that date, the Company also changed the issued and fully paid capital. Where the Company issue new shares to Republic of Indonesia and PT Perkebunan Nusantara III (Persero) as follows:

- a. Republic of Indonesia totaling 299,365 series B shares or Rp299,635,000,000
- b. PT Perkebunan Nusantara III (Persero) totaling 2,696,718 series B shares or Rp2,696,718,000,000.

The merger and changes in issued and fully paid capital have been confirmed through Notarial Deed No. 01 dated December 1, 2023 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H, M.Kn and has been approved and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-AH.01.09-0191342 dated December 1, 2023.

On the date of merger PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, and PT Perkebunan Nusantara XIII to the Company, the Group recognized the difference in transaction price and book value as part of "additional paid in capital" in the consolidated statement of financial position.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**26. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)**

Penggabungan PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, dan PT Perkebunan Nusantara XIII ke Perusahaan (lanjutan)

Perhitungan selisih atas nilai transaksi yang timbul dari penambahan modal ditempatkan dan disetor pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebagai berikut:

Nama Perusahaan	Nilai buku/ Book value	Nilai konversi/ Conversion price	Selisih nilai restrukturisasi entitas sepengendali/ Difference in values entities under common control	Company Name
PT Perkebunan Nusantara V	5.825.248.586.523	1.313.322.000.000	4.511.926.586.523	PT Perkebunan Nusantara V
PT Perkebunan Nusantara VI	2.577.700.130.147	653.293.000.000	1.924.407.130.147	PT Perkebunan Nusantara VI
PT Perkebunan Nusantara XIII	(2.993.371.582.599)	1.029.738.000.000	(4.023.109.582.599)	PT Perkebunan Nusantara XIII
<b>Total</b>	<b>5.409.577.134.071</b>	<b>2.996.353.000.000</b>	<b>2.413.224.134.071</b>	<b>Total</b>
Reklasifikasi tambahan modal disetor terkait surplus revaluasi aset tetap			(3.747.747.112.717)	Reclassification of additional paid in capital of revaluation surplus of fixed assets
<b>Total</b>			<b>(1.334.522.978.646)</b>	<b>Total</b>

Pengalihan aset dan liabilitas unit bisnis sawit dan karet kepada Perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Pada tanggal 1 Desember 2023, Perusahaan menerima pemisahan tidak murni usaha Perkebunan kelapa sawit dan karet dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero). Atas aksi korporasi tersebut Perusahaan melakukan perubahan atas modal yang ditempatkan dan disetor oleh PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar sebanyak 2.456.849 lembar saham seri B atau sebesar Rp2.456.849.000.000. Nilai tersebut merupakan nilai indikatif sementara dimana nilai definitif akan ditetapkan berdasarkan nilai wajar sesuai hasil penilaian oleh penilai independen.

Perubahan modal ditempatkan atas pemisahan tidak murni bisnis kelapa sawit dan karet tersebut telah dikukuhkan melalui Akta Notaris No.06 tanggal 31 Desember 2023 dari Notaris Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. dan telah disetujui dan dicatat oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam surat keputusan No.AHU-AH.01.03-0149908 tanggal 1 Desember 2023.

**26. ADDITIONAL PAID IN CAPITAL (lanjutan)**

Merger of PT Perkebunan Nusantara V, PT Perkebunan Nusantara VI, and PT Perkebunan Nusantara XIII to the Company (continued)

The calculation of the difference in transaction value arising from addition of issued/paid up capital on December 31, 2023 is as follows:

Transfer of asset and liabilities of palm and rubber business units from PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

On December 1, 2023, the Company received a spin-off of the palm oil and rubber plantation businesses from PT Perkebunan Nusantara III (Persero). In respect to the corporate action, the Company made changes to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) issued and fully paid capital amounting to 2.456.849 series B shares or Rp2,456,849,000,000. The amount is a temporary indicative value where the definitive value will be determined based on fair value by an independent appraiser assessment result.

The change in issued capital resulting from the spin-off of the palm oil and rubber businesses has been confirmed through Notarial Deed No. 06 dated December 31, 2023 from Notary Nanda Fauz Iwan, S.H., M.Kn. and has been approved and recorded by the Ministry of Law and Human Rights of the Republic of Indonesia through decision letter No. AHU-AH.01.03-0149908 dated December 1, 2023.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**26. TAMBAHAN MODAL DISETOR (lanjutan)**

Pengalihan aset dan liabilitas unit bisnis sawit dan karet kepada Perusahaan dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) (lanjutan)

	Nilai buku/ Book value	Nilai konversi/ Conversion price	Selisih nilai restrukturisasi entitas sependangali/ Difference in values entities under common control	
Pengalihan aset dan liabilitas unit bisnis sawit dan karet kepada Perusahaan dari: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	3.078.160.905.575	2.456.849.000.000	563.173.500.109	Transfer to assets and liabilities palm and rubber business unit to the Company from: PT Perkebunan Nusantara III (Persero)

Penggabungan usaha dari PTPN V, PTPN VI, PTPN XIII dan pengalihan sebagian aset, liabilitas PTPN III setelah pemisahan tidak murni (*Spin-Off*) ke Perusahaan dicatat berdasarkan metode penyatuan kepemilikan sesuai dengan PSAK No. 38 (Revisi 2012), "Kombinasi Bisnis Entitas Sependangali".

The merger transaction of PTPN V, PTPN VI, PTPN XIII and transfer of some assets, liabilities of PTPN III after Spin-Off to the Company are recorded based on the pooling of interest method in accordance with PSAK No. 38 (Revised 2012), "Business Combination of Entities Under Common Control".

**27. PENGHASILAN KOMPREHENSIF LAIN**

Akun ini meliputi penghasilan komprehensif lain berupa surplus revaluasi tanah yang diakumulasi dalam ekuitas (Catatan 13):

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Saldo awal tahun	3.688.288.615.183	3.688.288.615.183	Beginning balance
Penambahan tahun berjalan	215.320.596.498	-	Additional of the current year
Pembalikan ekuitas <i>merging entities</i>	3.747.747.112.717	-	Reversal of merging entities
<b>Total</b>	<b>7.651.356.324.398</b>	<b>3.688.288.615.183</b>	<b>Total</b>

**27. OTHER COMPREHENSIVE INCOME**

This account includes other comprehensive income with land revaluation which is accumulated in equity (Note 13):

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**28. KEPENTINGAN NON-PENGENDALI**

Akun ini merupakan hak pemegang saham non-pengendali atas aset bersih dan bagian laba rugi bersih Entitas Anak yang dikonsolidasikan.

- a. Ekuitas neto yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)	
			1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
PT Perkebunan Nusantara I Pusat Koperasi Karyawan	(218.006.959.143)	(170.169.352.054)	(160.052.245.126)	PT Perkebunan Nusantara I Pusat Koperasi Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV Koperasi Karyawan Sei Pagar Koperasi Karyawan	(2.520.113) 2.727.328	(2.563.478) -	(2.677.339) -	PT Perkebunan Nusantara IV Koperasi Karyawan Sei Pagar Koperasi Karyawan
PT Perkebunan Nusantara XIII Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	(95.617.666) 14.147.937.918	- -	- -	PT Perkebunan Nusantara XIII Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
<b>Total</b>	<b>(203.954.431.676)</b>	<b>(170.171.915.532)</b>	<b>(160.054.922.465)</b>	<b>Total</b>

- b. Laba (rugi) bersih dan penghasilan komprehensif lain yang dapat diatribusikan kepada kepentingan non-pengendali:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Perkebunan Nusantara I Pusat Koperasi Karyawan	(42.315.499.808)	(10.117.106.928)
PT Perkebunan Nusantara IV Koperasi Karyawan Sei Pagar Koperasi Karyawan	43.364 751.098	113.861 -
PT Perkebunan Nusantara XIII Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	(16.190.020) (13.666.332.466)	- -
<b>Total</b>	<b>(55.997.227.832)</b>	<b>(10.116.993.067)</b>

**28. NON-CONTROLLING INTERESTS**

This account represents the right of non-controlling interest shareholders of net assets and net income (loss) of consolidated Subsidiaries.

- a. Net equity attributable to non-controlling interest:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)	
			1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
PT Perkebunan Nusantara I Pusat Koperasi Karyawan	(218.006.959.143)	(170.169.352.054)	(160.052.245.126)	PT Perkebunan Nusantara I Pusat Koperasi Karyawan
PT Perkebunan Nusantara IV Koperasi Karyawan Sei Pagar Koperasi Karyawan	(2.520.113) 2.727.328	(2.563.478) -	(2.677.339) -	PT Perkebunan Nusantara IV Koperasi Karyawan Sei Pagar Koperasi Karyawan
PT Perkebunan Nusantara XIII Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	(95.617.666) 14.147.937.918	- -	- -	PT Perkebunan Nusantara XIII Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu
<b>Total</b>	<b>(203.954.431.676)</b>	<b>(170.171.915.532)</b>	<b>(160.054.922.465)</b>	<b>Total</b>

- b. Net income (loss) and other comprehensive income attributable to non-controlling interests:

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022
PT Perkebunan Nusantara I Pusat Koperasi Karyawan	(42.315.499.808)	(10.117.106.928)
PT Perkebunan Nusantara IV Koperasi Karyawan Sei Pagar Koperasi Karyawan	43.364 751.098	113.861 -
PT Perkebunan Nusantara XIII Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu	(16.190.020) (13.666.332.466)	- -
<b>Total</b>	<b>(55.997.227.832)</b>	<b>(10.116.993.067)</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. PENDAPATAN**

a. Rincian pendapatan berdasarkan komoditi:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Produk kelapa sawit	27.873.190.794.191	32.171.597.241.232	Palm oil products
Produk gula kristal putih	1.388.806.893.500	30.468.100.000	Refined sugar products
Produk karet	973.404.288.544	1.157.039.507.508	Rubber products
Produk teh	315.265.430.267	288.626.453.361	Tea products
Pendapatan jasa	57.870.798.130	83.106.921.981	Service income
Produk kopi	52.833.351.266	32.738.993.597	Coffee products
Pendapatan lainnya	108.930.758.781	57.157.026.780	Other revenue
<b>Total</b>	<b>30.770.302.314.679</b>	<b>33.820.734.244.459</b>	<b>Total</b>

**29. REVENUE**

a. The details of revenue based on commodity:

b. Rincian pendapatan berdasarkan geografis:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Dalam negeri	29.359.253.308.078	32.576.234.043.634	Domestic
Luar negeri	1.411.049.006.601	1.244.500.200.825	Overseas
<b>Total</b>	<b>30.770.302.314.679</b>	<b>33.820.734.244.459</b>	<b>Total</b>

b. The details of revenue based on geographical:

c. Rincian pendapatan berdasarkan pelanggan:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Pihak ketiga	24.596.512.621.333	26.868.685.133.799	Third parties
Pihak berelasi (Catatan 36j)	6.173.789.693.346	6.952.049.110.660	Related parties (Note 36j)
<b>Total</b>	<b>30.770.302.314.679</b>	<b>33.820.734.244.459</b>	<b>Total</b>

c. The details of revenue based on customers:



The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**29. PENDAPATAN (lanjutan)**

d. Penjualan yang melebihi 10% dari jumlah pendapatan dilakukan kepada pelanggan berikut:

**29. REVENUE (continued)**

d. Sales over 10% of total net sales are made to the following customers:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
PT Industri Nabati Lestari	5.044.553.705.688	6.115.952.161.053	PT Industri Nabati Lestari
PT Intibenua Perkasatama	1.740.397.143.335	3.894.750.425.647	PT Intibenua Perkasatama
<b>Total</b>	<b>6.784.950.849.023</b>	<b>10.010.702.586.700</b>	<b>Total</b>

**30. BEBAN POKOK PENDAPATAN**

**30. COST OF REVENUE**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 Year ended December 31, 2023					
	Kelapa Sawit/ Palm Oil	Karet/ Rubber	Lainnya/ Others	Total/ Total	
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>					<b>COST OF GOODS SOLD</b>
<b>Biaya langsung</b>					<b>Direct cost</b>
Bahan baku yang digunakan	5.607.853.269.233	216.506.528.435	377.159.981.062	6.201.519.778.730	Purchases of raw material
Pemupukan dan biaya lainnya atas tanaman telah menghasilkan	4.355.842.530.849	40.868.109.935	120.368.993.591	4.517.079.634.375	Manuring and other maintenance costs of mature bearer plants
Panen dan pengangkutan	2.452.919.554.435	419.831.731.473	84.196.411.496	2.956.947.697.404	Harvesting and collecting
Biaya pengolahan	688.681.050.501	48.531.129.055	69.744.654.266	806.956.833.822	Processing costs
Perbaikan dan pemeliharaan	365.155.578.622	13.478.543.830	15.704.950.945	394.339.073.397	Repairs and maintenance
Gaji dan tunjangan karyawan	651.883.697.625	80.943.923.089	16.312.702.749	749.140.323.463	Salary and employees allowances
Perubahan nilai wajar aset biologis	186.048.627.811	7.428.413.865	(1.154.960.490)	192.322.081.186	Changes in fair value biological asset
Lain-lain	20.327.965.846	3.544.273.582	99.766.776.552	123.639.015.980	Others
<b>Total biaya langsung</b>	<b>14.328.712.274.922</b>	<b>831.132.653.264</b>	<b>782.099.510.171</b>	<b>15.941.944.438.357</b>	<b>Total direct cost</b>
<b>Biaya tidak langsung</b>					<b>Indirect cost</b>
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 13 dan 15)	1.628.044.634.457	198.245.167.325	22.957.747.114	1.849.247.548.896	Depreciation and amortization (Note 13 dan 15)
Keamanan	463.467.754.690	54.086.374.869	5.567.919.970	523.122.049.529	Security
Gaji dan tunjangan karyawan	491.972.243.406	61.958.635.891	21.690.068.231	575.620.947.528	Salary and employees allowances
Pajak bumi dan bangunan, retribusi, dan sewa tanah	249.560.954.883	27.643.917.289	5.232.593.025	282.437.465.197	Tax on land and building, retribution, and land rental
Perbaikan dan pemeliharaan	114.704.472.272	4.244.830.766	1.044.697.132	119.994.000.170	Repairs and maintenance
Biaya air dan penerangan	73.335.615.771	4.977.641.812	2.285.013.144	80.598.270.727	Water and electricity
Lain-lain (Catatan 7)	178.230.798.791	15.347.985.703	3.564.937.012	197.143.721.506	Others (Note 7)
<b>Total biaya tidak langsung</b>	<b>3.199.316.474.270</b>	<b>366.504.553.655</b>	<b>62.342.975.628</b>	<b>3.628.164.003.553</b>	<b>Total indirect cost</b>
<b>Total biaya produksi</b>	<b>17.528.028.749.192</b>	<b>1.197.637.206.919</b>	<b>844.442.485.799</b>	<b>19.570.108.441.910</b>	<b>Total production cost</b>
Persediaan barang jadi - awal (Catatan 7)	1.489.308.988.215	155.341.290.965	1.077.452.766.975	2.722.103.046.155	Finished goods - beginning (Note 7)
Persediaan barang jadi - akhir (Catatan 7)	(737.307.549.330)	(83.860.963.043)	(105.732.684.076)	(926.901.196.449)	Finished goods - ending (Note 7)
<b>Total</b>	<b>18.280.030.188.077</b>	<b>1.269.117.534.841</b>	<b>1.816.162.568.698</b>	<b>21.365.310.291.616</b>	<b>Total</b>

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**30. BEBAN POKOK PENDAPATAN (lanjutan)**

**30. COST OF REVENUE (continued)**

Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ Year ended December 31, 2022 (as restated) (Note 46)					
	Kelapa Sawit/ Palm Oil	Karet/ Rubber	Lainnya/ Others	Total/ Total	
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>					<b>COST OF GOODS SOLD</b>
<b>Biaya langsung</b>					<b>Direct cost</b>
Bahan baku yang digunakan	6.200.235.495.294	226.754.281.108	1.245.057.188.680	7.672.046.965.082	Purchases of raw material
Pemupukan dan biaya lainnya atas tanaman telah menghasilkan	4.132.929.125.228	54.396.412.834	100.677.676.066	4.288.003.214.128	Manuring and other maintenance costs of mature bearer plants
Panen dan pengangkutan	2.429.770.645.813	430.787.287.796	81.022.838.265	2.941.580.771.874	Harvesting and collecting
Biaya pengolahan	900.163.639.563	31.586.029.199	68.046.964.159	999.796.632.921	Processing costs
Perbaikan dan pemeliharaan	337.903.378.159	12.180.389.027	16.633.060.094	366.716.827.280	Repairs and maintenance
Gaji dan tunjangan karyawan	455.026.502.105	72.840.940.485	13.294.046.619	541.161.489.209	Salary and employees allowances
Perubahan nilai wajar aset biologis	(234.761.219.566)	(11.798.562.626)	6.580.107.848	(239.979.674.344)	Changes in fair value biological asset
Lain-lain	22.065.535.561	6.580.560.919	94.197.056.154	122.843.152.634	Others
<b>Total biaya langsung</b>	<b>14.243.333.102.157</b>	<b>823.327.338.742</b>	<b>1.625.508.937.885</b>	<b>16.692.169.378.784</b>	<b>Total direct cost</b>
<b>Biaya tidak langsung</b>					<b>Indirect cost</b>
Penyusutan dan amortisasi (catatan 13 dan 15)	1.582.490.336.334	197.210.188.055	27.170.185.917	1.806.870.710.306	Depreciation and amortization (note 13 dan 15)
Keamanan	404.636.733.692	55.131.799.548	4.881.604.756	464.650.137.996	Security
Gaji dan tunjangan karyawan	364.416.829.436	54.367.580.425	11.715.494.885	430.499.904.746	Salary and employees allowances
Pajak bumi dan bangunan, retribusi, dan sewa tanah	217.394.592.199	30.171.715.885	4.628.817.285	252.195.125.369	Tax on land and building, retribution, and land rental
Perbaikan dan pemeliharaan	108.997.585.282	4.834.368.621	1.038.367.792	114.870.321.695	Repairs and maintenance
Biaya air dan penerangan	101.341.588.975	5.647.471.937	1.791.322.385	108.780.383.297	Water and electricity
Lain-lain (Catatan 7)	182.074.808.066	10.253.951.420	4.053.141.003	196.381.900.489	Others (Note 7)
<b>Total biaya tidak langsung</b>	<b>2.961.352.473.984</b>	<b>357.617.075.891</b>	<b>55.278.934.023</b>	<b>3.374.248.483.898</b>	<b>Total indirect cost</b>
<b>Total biaya produksi</b>	<b>17.204.685.576.141</b>	<b>1.180.944.414.633</b>	<b>1.680.787.871.908</b>	<b>20.066.417.862.682</b>	<b>Total production cost</b>
Persediaan barang jadi – awal (catatan 7)	944.905.261.582	129.869.973.346	96.040.277.079	1.170.815.512.007	Finished goods – beginning (note 7)
Persediaan barang jadi – akhir (catatan 7)	(1.489.308.988.215)	(155.341.290.965)	(1.077.452.766.975)	(2.722.103.046.155)	Finished goods – ending (note 7)
<b>Total</b>	<b>16.660.281.849.508</b>	<b>1.155.473.097.014</b>	<b>699.375.382.012</b>	<b>18.515.130.328.534</b>	<b>Total</b>

Tidak terdapat pembelian barang dan jasa dengan transaksi melebihi 10% dari total pendapatan.

There are no purchase of goods and services with transactions more than 10% of total revenue.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**31. BEBAN PEMASARAN DAN PENJUALAN**

Rincian beban pemasaran dan penjualan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)
Jasa transportasi & pengangkutan	509.706.550.878	430.099.438.643
Biaya jasa pompa	44.606.714.050	53.780.116.398
Imbal jasa pemasaran	20.809.432.017	28.303.411.283
Biaya gudang penyimpanan	17.287.358.412	11.043.623.390
Biaya klaim	5.171.122.982	12.809.292.462
Beban penyusutan (Catatan 13)	3.590.462.640	1.534.984.965
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	23.764.318.180	28.037.593.742
<b>Total</b>	<b>624.935.959.159</b>	<b>565.608.460.883</b>

**31. MARKETING AND SELLING EXPENSES**

The details of marketing and selling expenses are as follows:

	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)
Jasa transportasi & pengangkutan	509.706.550.878	430.099.438.643
Biaya jasa pompa	44.606.714.050	53.780.116.398
Imbal jasa pemasaran	20.809.432.017	28.303.411.283
Biaya gudang penyimpanan	17.287.358.412	11.043.623.390
Biaya klaim	5.171.122.982	12.809.292.462
Beban penyusutan (Catatan 13)	3.590.462.640	1.534.984.965
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	23.764.318.180	28.037.593.742
<b>Total</b>	<b>624.935.959.159</b>	<b>565.608.460.883</b>

**32. BEBAN UMUM DAN ADMINISTRASI**

Rincian beban umum dan administrasi adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)
Bonus karyawan dan tantiem	1.217.162.598.730	2.049.946.744.600
Gaji dan tunjangan sosial	701.533.274.214	673.493.197.055
Biaya pemeliharaan	237.007.546.678	166.617.134.961
Transportasi dan perjalanan	203.312.030.417	153.184.635.107
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 12, 13, dan 15)	194.247.334.656	164.480.293.004
Beban imbalan kerja dan pensiunan	168.812.232.607	813.399.847.413
Beban jasa profesional dan konsultan	150.453.496.118	233.192.648.504
Pendidikan dan latihan	131.078.572.039	117.901.628.371
Biaya keamanan	74.631.562.137	71.373.339.211
Biaya sosial non produksi	56.477.381.743	52.291.623.684
Telepon, telex, dan pos	52.539.394.640	49.877.201.894
Biaya penelitian dan pengembangan	50.205.960.990	46.827.741.286
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	79.724.795.460	142.326.274.672
<b>Total</b>	<b>3.317.186.180.429</b>	<b>4.734.912.309.762</b>

**32. GENERAL AND ADMINISTRATIVE EXPENSES**

The details of general and administrative expenses are as follows:

	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)
Bonus karyawan dan tantiem	1.217.162.598.730	2.049.946.744.600
Gaji dan tunjangan sosial	701.533.274.214	673.493.197.055
Biaya pemeliharaan	237.007.546.678	166.617.134.961
Transportasi dan perjalanan	203.312.030.417	153.184.635.107
Penyusutan dan amortisasi (Catatan 12, 13, dan 15)	194.247.334.656	164.480.293.004
Beban imbalan kerja dan pensiunan	168.812.232.607	813.399.847.413
Beban jasa profesional dan konsultan	150.453.496.118	233.192.648.504
Pendidikan dan latihan	131.078.572.039	117.901.628.371
Biaya keamanan	74.631.562.137	71.373.339.211
Biaya sosial non produksi	56.477.381.743	52.291.623.684
Telepon, telex, dan pos	52.539.394.640	49.877.201.894
Biaya penelitian dan pengembangan	50.205.960.990	46.827.741.286
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	79.724.795.460	142.326.274.672
<b>Total</b>	<b>3.317.186.180.429</b>	<b>4.734.912.309.762</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**33. PENDAPATAN OPERASI LAIN**

Rincian pendapatan operasi lain adalah sebagai berikut:

**33. OTHER OPERATING INCOME**

The details of other operating income are as follows:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Pendapatan selisih kurs-neto	137.880.596.191	-	<i>Gain on foreign exchange rate-neto</i>
Pendapatan kerja sama operasional	85.308.648.157	73.967.535.494	<i>Operating cooperation income</i>
Pendapatan dividen	45.000.000.000	75.000.000.000	<i>Dividend income</i>
Pendapatan ganti rugi tol	43.491.336.708	343.082.016.010	<i>Toll compensation income</i>
Pendapatan klaim dan denda	54.025.370.523	49.401.414.931	<i>Income from claim and penalties</i>
Penjualan produk sampingan	41.115.568.752	47.778.002.964	<i>Sales of by-product</i>
Pendapatan atas bagi hasil gula kristal putih (GKP)	30.169.850.550	12.712.003.125	<i>Profit sharing of white crystallin sugar (GKP)</i>
Pendapatan pemberdayaan tanah	20.422.408.035	83.487.178.908	<i>Land empowerment income</i>
Pendapatan penjualan limbah	19.216.191.081	5.137.260.783	<i>Income from sales of waste</i>
Keuntungan atas revaluasi properti investasi (catatan 14)	13.234.200.000	5.069.860.000	<i>Gain from revaluation of investment properties (note 14)</i>
Pendapatan sewa atas properti investasi (catatan 14)	4.904.730.190	5.770.893.238	<i>Rent income of investment properties (note 14)</i>
Penjualan bibit	2.407.080.000	16.692.931.875	<i>Sale of seedlings</i>
Pendapatan penjualan kayu	1.230.000.000	7.221.023.950	<i>Timber sales</i>
Pemulihan kerugian penurunan nilai piutang (catatan 6)	4.058.146.639	-	<i>Reversal of impairment losses on receivable (note 6)</i>
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	175.609.901.645	137.895.145.188	<i>Others (each below Rp10 Billion)</i>
<b>Total</b>	<b>678.074.028.471</b>	<b>863.215.266.466</b>	<b>Total</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**34. BEBAN OPERASI LAIN**

Rincian beban operasi lain adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Beban penurunan nilai aset	152.138.522.528	54.928.751.231	Impairment of asset
Beban KSO	104.793.332.357	88.072.338.864	KSO charges
Penyusutan aset tetap (Catatan 13)	83.345.113.097	226.767.579.979	Depreciation of fixed asset (Note 13)
Beban pajak	69.789.390.757	44.940.207.659	Tax expense
Biaya tanggung jawab sosial dan lingkungan	61.225.411.402	43.959.864.399	Corporate social responsibility program
Beban penurunan nilai plasma (Catatan 10)	63.490.995.275	111.032.389.417	Allowance for impairment of plasma receivable (Note 10)
Penyisihan penurunan nilai piutang (Catatan 6 dan 9)	46.989.092.255	9.963.481.913	Allowance for impairment receivables (Note 6 and 9)
Gaji	28.931.449.510	6.754.263.673	Salaries
Biaya pengolahan plasma	8.900.234.050	5.936.227.880	Management fee for plasma
Beban penghapusan aset tetap	6.526.408.163	882.989.895	Write off of fixed asset
Beban bibit	4.908.309.574	12.394.778.929	Seeds expense
Rugi selisih kurs-neto		355.801.792.341	Loss foreign exchange rate-nett
Lain-lain (masing-masing di bawah Rp10 Miliar)	113.454.995.776	131.665.751.691	Others (each below Rp10 Billion)
<b>Total</b>	<b>744.493.254.744</b>	<b>1.093.100.417.871</b>	<b>Total</b>

**34. OTHER OPERATING EXPENSES**

The details of other operating expenses are as follows:

**35. PENGHASILAN DAN BEBAN KEUANGAN**

a. Rincian penghasilan keuangan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
Pinjaman lain-lain - pihak berelasi (Catatan 36)	1.274.596.847.850	970.165.306.861	Other loan-related parties (Note 36)
Jasa giro dan deposito berjangka	74.242.494.872	75.446.194.774	Interest income from cash in bank
Lain-lain	116.405.660	16.829.553.861	Others
<b>Total</b>	<b>1.348.955.748.382</b>	<b>1.062.441.055.496</b>	<b>Total</b>

**35. FINANCIAL INCOME AND COSTS**

a. The details of financial income are as follows:

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**35. PENGHASILAN DAN BEBAN KEUANGAN  
(lanjutan)**

- b. Rincian beban keuangan adalah sebagai berikut:

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,	
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)
Pinjaman bank		
- Pihak berelasi (Catatan 36m)	1.758.005.385.477	1.055.266.136.950
Pinjaman bank - Pihak ketiga	478.926.776.883	572.794.921.814
Medium Term Notes	233.505.740.349	313.662.500.000
Pinjaman lain-lain - pihak berelasi (Catatan 36m)	39.319.649.873	30.325.654.078
Liabilitas sewa	13.011.126.018	14.457.575.321
Lain-lain	43.280.815.303	7.218.797.6121
<b>Total</b>	<b>2.566.049.493.903</b>	<b>1.993.725.585.774</b>

**35. FINANCIAL INCOME AND COSTS (continued)**

- b. The details of financial costs are as follows:

Bank Loan - Related parties (Note 36m)
Bank Loan - Third parties
Medium Term Notes
Other loan-related parties (Note 36m)
Lease liabilities
Others
<b>Total</b>

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN PIHAK-PIHAK BERELASI**

Grup, melakukan transaksi dengan pihak-pihak berelasi, yaitu dengan beberapa bank yang dikendalikan oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, beberapa perusahaan perkebunan dan asosiasinya, beberapa koperasi karyawan dan pusat koperasi karyawan berupa penempatan giro, deposito dan fasilitas kredit modal kerja, pemberian pinjaman modal kerja kepada perusahaan afiliasi dan lain-lain.

Saldo-saldo signifikan dengan pihak-pihak berelasi adalah sebagai berikut:

**a. Kas dan setara kas (Catatan 4)**

Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 saldo kas dan setara kas yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 99,43%, 98,83%, dan 98,86% dari total kas dan setara kas konsolidasian.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES WITH RELATED PARTIES**

The Group, entered into trade and financial transactions with related parties, with several banks that are controlled by the Central Government or Local Government, several plantation companies and associations, some cooperatives employees and central cooperative employees, current account deposits and placements, working capital credit facility, working capital loans to affiliated companies and others.

The significant balances with the related parties are as follows:

**a. Cash and cash equivalents (Note 4)**

As of December 31, 2023, December 31, 2022 and January 1, 2022/ December 31, 2021 cash and cash equivalents balances placed on entities related to the Government represent 99.43%, 98.83%, and 98.86% of the total consolidated cash and cash equivalents, respectively.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**b. Kas dan deposito yang dibatasi  
penggunaannya (Catatan 5)**

Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022, dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 saldo kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya yang ditempatkan pada entitas berelasi dengan Pemerintah masing-masing sebesar 100,00%, 96,60% dan 95,70% dari total kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya konsolidasian.

**c. Piutang usaha (Catatan 6)**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)		
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021
PT Industri Nabati Lestari	2.442.708.009.945	2.132.734.388.137	2.605.981.852.749
PT Perkebunan Nusantara I	32.720.200.228	23.573.813.871	-
PT Mardec Nusa Riau	25.754.553.135	25.754.553.135	25.754.553.135
PT Polindo Bio Energi Pratama	12.926.695.224	-	-
BPJS Kesehatan	7.754.186.185	11.082.806.405	4.577.497.675
PT Industri Karet Nusantara	7.226.569.720	7.226.569.720	10.226.569.720
BPJS Ketenagakerjaan	3.520.423.073	846.456.467	751.353.896
Lain-Lain	6.669.936.632	1.334.579.432	1.936.611.726
<b>Total</b>	<b>2.539.280.574.142</b>	<b>2.202.553.167.167</b>	<b>2.649.228.438.901</b>
Penyisihan penurunan nilai	(32.981.122.855)	(25.822.570.253)	(25.890.011.176)
<b>Neto</b>	<b>2.506.299.451.287</b>	<b>2.176.730.596.914</b>	<b>2.623.338.427.725</b>

Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 2021, saldo piutang usaha pada entitas berelasi masing-masing sebesar 94,69%, 91,70%, dan 95,38% dari total piutang usaha konsolidasian.

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan piutang atas kompensasi atas penjualan tanah, pinjaman modal kerja, dan kegiatan non-operasional lainnya.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**b. Restricted cash and time deposit (Note 5)**

As of December 31, 2023, December 31, 2022, and January 1, 2022/ December 31, 2021 restricted cash and time deposit balances placed on entities related to the Government represent 100.00%, 96.60%, and 95.70% of the total consolidated restricted cash and time deposits, respectively.

**c. Trade receivables (Note 6)**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)		
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021
PT Industri Nabati Lestari	2.442.708.009.945	2.132.734.388.137	2.605.981.852.749
PT Perkebunan Nusantara I	32.720.200.228	23.573.813.871	-
PT Mardec Nusa Riau	25.754.553.135	25.754.553.135	25.754.553.135
PT Polindo Bio Energi Pratama	12.926.695.224	-	-
BPJS Kesehatan	7.754.186.185	11.082.806.405	4.577.497.675
PT Industri Karet Nusantara	7.226.569.720	7.226.569.720	10.226.569.720
BPJS Ketenagakerjaan	3.520.423.073	846.456.467	751.353.896
Lain-Lain	6.669.936.632	1.334.579.432	1.936.611.726
<b>Total</b>	<b>2.539.280.574.142</b>	<b>2.202.553.167.167</b>	<b>2.649.228.438.901</b>
Allowance for impairment	(32.981.122.855)	(25.822.570.253)	(25.890.011.176)
<b>Net</b>	<b>2.506.299.451.287</b>	<b>2.176.730.596.914</b>	<b>2.623.338.427.725</b>

As of December 31, 2023, December 31, 2022, and 2021, trade receivables balances to the related parties represent 94.69%, 91,70%, and 95.58% of the total consolidated trade receivables, respectively.

Other receivables from related parties represent receivable from land compensation, working capital loans, and other non-operational activities.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9)**

**d. Other receivables (Note 9)**

**Piutang lain-lain jangka pendek**

**Other short-term receivables**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
PT Perkebunan Nusantara I				PT Perkebunan Nusantara I
Eks PT Perkebunan Nusantara X	252.578.638.287	250.520.977.406	54.292.421.919	Ex PT Perkebunan Nusantara X
Eks PT Perkebunan Nusantara II	148.124.917.476	833.638.575.249	276.550.379.051	Ex PT Perkebunan Nusantara II
Eks PT Perkebunan Nusantara XI	146.216.176.246	145.307.974.235	140.594.929.976	Ex PT Perkebunan Nusantara XI
Eks PT Perkebunan Nusantara XIV	139.099.068.451	100.969.907.948	59.629.679.888	Ex PT Perkebunan Nusantara XIV
Eks PT Perkebunan Nusantara IX	13.245.872.002	12.284.189.816	935.612.077	Ex PT Perkebunan Nusantara IX
PT Perkebunan Nusantara I	1.378.246.569	800.253.769	800.253.769	PT Perkebunan Nusantara I
Eks PT Perkebunan Nusantara VII	993.649.636	956.788.885	1.150.378.089	Ex PT Perkebunan Nusantara VII
Eks PT Perkebunan Nusantara VIII	230.682.155	52.082.167.963	51.790.940.377	Ex PT Perkebunan Nusantara VIII
PT Kopkar Nusa Tiga	11.010.031.849	11.010.031.849	6.575.052.887	PT Kopkar Nusa Tiga
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	9.725.146.151	24.075.898.619	146.438.344.096	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Perkebunan Mitra Ogan	7.514.427.664	47.428.673.869	47.337.208.649	PT Perkebunan Mitra Ogan
Agrintara Batam	4.210.358.832	4.210.358.832	4.210.358.832	Agrintara Batam
Badan Keuangan Daerah Siak	3.885.786.664	3.885.786.664	3.885.786.664	Badan Keuangan Daerah Siak
PT Riset Perkebunan Nusantara	2.870.701.646	20.093.253.884	28.001.806.262	PT Riset Perkebunan Nusantara
PT BPJS Ketenagakerjaan	2.518.719.961	-	-	PT BPJS Ketenagakerjaan
PT BPJS	1.394.204.810	-	-	PT BPJS
PT Industri Nabati Lestari	-	678.476.865.123	449.705.162.390	PT Industri Nabati Lestari
PT Perkebunan Nusantara III	-	1.667.722.661	5.539.453.871	PT Perkebunan Nusantara III
PT Kalimantan Agro Nusantara	2.648.784.475	2.736.284.475	2.736.284.475	PT Kalimantan Agro Nusantara
Lain-lain	31.473.501.340	69.194.815.934	79.064.816.624	Others
<b>Total</b>	<b>779.118.914.214</b>	<b>2.259.340.527.181</b>	<b>1.359.238.869.896</b>	<b>Total</b>
Penyisihan penurunan nilai	(20.207.797.637)	(12.800.525.349)	(12.489.322.717)	Allowance for impairment
<b>Neto</b>	<b>758.911.116.577</b>	<b>2.246.540.001.832</b>	<b>1.346.749.547.179</b>	<b>Net</b>

Piutang lain-lain kepada pihak berelasi merupakan piutang atas kompensasi atas penjualan tanah, pinjaman modal kerja, dan kegiatan non-operasional lainnya.

Other receivables from related parties represent receivable from land compensation, working capital loans, and other non-operational activities.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021, saldo piutang lain-lain pada entitas berelasi masing-masing sebesar 79,60%, 85,36%, dan 91,27% dari total piutang lain-lain konsolidasian interim.

As of December 31, 2023, December 31, 2022 and January 1, 2022/ December 31, 2021, other receivables balances to the related parties represent 79.60%, 85.36%, and 91.27% of the total interim consolidated other receivables, respectively.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Piutang lain-lain jangka panjang**

**Other long-term receivables**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
PT Perkebunan Nusantara I				PT Perkebunan Nusantara I
Eks PT Perkebunan Nusantara VII	3.393.244.893.978	536.552.566.439	496.311.123.956	Ex PT Perkebunan Nusantara VII
Eks PT Perkebunan Nusantara VIII	2.344.677.563.013	655.502.979.965	606.338.471.310	Ex PT Perkebunan Nusantara VIII
Eks PT Perkebunan Nusantara XII	1.377.326.196.156	380.399.288.797	351.869.342.137	Ex PT Perkebunan Nusantara XII
Eks PT Perkebunan Nusantara IX	721.772.307.864	621.799.937.763	575.184.638.981	Ex PT Perkebunan Nusantara IX
Eks PT Perkebunan Nusantara II	706.615.007.409	739.006.700.479	683.581.197.944	Ex PT Perkebunan Nusantara II
Eks PT Perkebunan Nusantara I	411.647.691.127	330.539.901.191	307.171.717.624	Ex PT Perkebunan Nusantara I
Eks PT Perkebunan Nusantara XIV	369.473.433.505	288.128.268.626	271.564.441.325	Ex PT Perkebunan Nusantara XIV
Eks PT Perkebunan Nusantara XI	70.559.218.083	59.146.356.730	54.710.379.975	Ex PT Perkebunan Nusantara XI
PT Industri Nabati Lestari	106.904.430.101	121.538.891.971	134.521.555.913	PT Industri Nabati Lestari
PT Industri Karet Nusantara	-	17.219.426.544	15.927.969.554	PT Industri Karet Nusantara
Lain-lain	15.562.965.710	47.890.186.824	47.381.678.835	Others
<b>Total</b>	<b>9.517.783.706.946</b>	<b>3.797.724.505.329</b>	<b>3.544.562.517.554</b>	<b>Total</b>
Dikurangi bagian lancar	(562.008.541.944)	(12.916.584.000)	-	Less current maturities
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>8.955.775.165.002</b>	<b>3.784.807.921.329</b>	<b>3.544.562.517.554</b>	<b>Long-term portion</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

**PT Perkebunan Nusantara I**

Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan Nusantara I (Eks – PT Perkebunan Nusantara VII)

**Pinjaman Penerusan - *Repackaging***

Pada tahun 2023, Perusahaan dan PTPN VII, telah menandatangani *Covernote* No. 08/Not/GW/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan No. 05/Not/GW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, dengan Bank Mandiri (“Mandiri”), Bank Negara Indonesia (“BNI”), Bank Rakyat Indonesia (“BRI”), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”), yang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Himpunan Bank Negara (“HIMBARA Plus”), masing-masing sebesar Rp25.549.965.457.717 dan Rp5.601.765.066.965 yang bertujuan untuk tujuan pelunasan seluruh pinjaman fasilitas MAA (Catatan 23).

Atas pinjaman tersebut, Perusahaan meneruskannya sebagai pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks – PT Perkebunan Nusantara VII) sebesar Rp2.621.117.433.303.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga yang sama dengan bunga pinjaman yang diterima oleh Perusahaan dari HIMBARA Plus yaitu sebesar JIBOR + Margin (2,75%). Pembayaran bunga atas pinjaman ini dilakukan setiap bulannya pada tanggal 23. Jangka waktu untuk pinjaman ini adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman penerusan ini terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp2.568.695.084.636 serta piutang bunga pinjaman sebesar Rp82.628.274.067.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

**PT Perkebunan Nusantara I**

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan Nusantara I (Ex – PT Perkebunan Nusantara VII)

**Forwarding Loan Facility – *Repackaging***

In 2023, the Company and PTPN VII have signed a *Covernote* Number 08/Not/GW/VI/2023 dated June 27, 2023 and No. 05/Not/GW/VII/2023 dated July 20, 2023, with Bank Mandiri (“Mandiri”), Bank Negara Indonesia (“BNI”), Bank Rakyat Indonesia (“BRI”), Indonesia Eximbank (“LPEI”), which are collectively hereinafter referred to as Himpunan Bank Negara (“HIMBARA Plus”), amounting to Rp25,549,965,457,717 and Rp5,601,765,066,965, respectively, to repay the existing MAA debt of PTPN Group (Note 23).

For the facility above, the Company has forwarded it to PT Perkebunan Nusantara I (Ex – PT Perkebunan Nusantara VII) amounting to Rp2,621,117,433,303.

This loan bears interest at the same rate as the loan received by the Company from HIMBARA Plus, which is Margin + JIBOR (2.75%). Interest payments are made every 23rd on the end of every month. The term of this agreement is until December 31, 2030.

As of December 31, 2023 the balance of the forwarding loan facility consists of loan principal amounted to Rp2,568,695,084,636 respectively, and interest receivable amounted of Rp82,628,274,067.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

**PT Perkebunan Nusantara I (lanjutan)**

Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan Nusantara I (Eks – PT Perkebunan Nusantara VII) (lanjutan)

**Pinjaman Dana Talangan**

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, pada tahun 2021, Perusahaan (Eks – PT Perkebunan Nusantara III) memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks – PT Perkebunan Nusantara VII) senilai Rp603.039.299.232 untuk modal kerja. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali amandemen terakhir pada tanggal 23 Agustus 2021. Pinjaman ini dikenakan suku bunga oleh Perusahaan sebesar JIBOR + Margin 2,75% pada tahun 2023 dan 2022. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun 2035.

Pinjaman Jangka Panjang – PT Perkebunan Nusantara I (Eks - PT Perkebunan Nusantara VIII)

**Pinjaman Penerusan - *Repackaging***

Pada tahun 2023, Perusahaan dan PTPN VII, telah menandatangani *Covernote* No. 08/Not/GW/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan No. 05/Not/GW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, dengan Bank Mandiri (“Mandiri”), Bank Negara Indonesia (“BNI”), Bank Rakyat Indonesia (“BRI”), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”), yang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Himpunan Bank Negara (“HIMBARA Plus”), masing-masing sebesar Rp25.549.965.457.717 dan Rp5.601.765.066.965 yang bertujuan untuk tujuan pelunasan seluruh pinjaman fasilitas MAA PTPN Group (Catatan 23).

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

**PT Perkebunan Nusantara I (continued)**

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan Nusantara I (Ex – PT Perkebunan Nusantara VII) (continued)

***Bailouts Fund***

Based on the Loan Agreement, in 2021, the Company (Ex – PT Perkebunan Nusantara III) gave a loan to PT Perkebunan Nusantara I (Ex – PT Perkebunan Nusantara VII) amounted to Rp603,039,299,232 which were used for working capital purposes. The loan agreement has been amended several times, most recently on August 23, 2021. These loans bear interest at JIBOR + Margin 2.75% in 2023 and 2022. The due date of this loan agreement is on 2035.

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan Nusantara I (Ex - PT Perkebunan Nusantara VIII)

***Forwarding Loan Facility - Repackaging***

In 2023, the Company and PTPN VII have signed a *Covernote* Number 08/Not/GW/VI/2023 dated June 27, 2023 and No. 05/Not/GW/VII/2023 dated July 20, 2023, with Bank Mandiri (“Mandiri”), Bank Negara Indonesia (“BNI”), Bank Rakyat Indonesia (“BRI”), Indonesia Eximbank (“LPEI”), which are collectively hereinafter referred to as Himpunan Bank Negara (“HIMBARA Plus”), amounting to Rp25,549,965,457,717 and Rp5,601,765,066,965, respectively to repay the existing MAA debt of PTPN Group (Note 23).

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

**PT Perkebunan Nusantara I (lanjutan)**

Pinjaman Jangka Panjang – PT Perkebunan  
Nusantara I (Eks - PT Perkebunan Nusantara  
VIII) (lanjutan)

**Pinjaman Penerusan – *Repackaging*  
(lanjutan)**

Atas pinjaman tersebut, Perusahaan meneruskannya sebagai pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I, (Eks PT Perkebunan Nusantara VIII) sebesar Rp1.392.441.000.000.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga yang sama dengan bunga pinjaman yang diterima oleh Perusahaan dari HIMBARA Plus yaitu sebesar JIBOR + Margin (2,75%). Pembayaran bunga atas pinjaman ini dilakukan setiap bulannya pada tanggal 23. Jangka waktu untuk pinjaman ini adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman penerusan ini terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp1.392.440.193.760 serta piutang bunga pinjaman sebesar Rp65.607.197.671.

**Pinjaman Lain-lain**

Pinjaman ini merupakan biaya penjualan mesin pabrik, pengobatan dan transaksi lainnya, dengan saldo Rp1.456.061.620.

**Pinjaman Dana Talangan**

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, pada tahun 2021, Perusahaan (Eks – PT Perkebunan Nusantara III) memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks – PT Perkebunan Nusantara VIII) senilai Rp677.218.200.508 untuk modal kerja. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali amandemen terakhir pada tanggal 23 Agustus 2021. Pinjaman ini dikenakan suku bunga oleh Perusahaan sebesar JIBOR + Margin 2,75% pada tahun 2023 dan 2022. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun 2035.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

**PT Perkebunan Nusantara I (continued)**

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan  
Nusantara I (Ex - PT Perkebunan Nusantara  
VIII) (lanjutan)

**Forwarding Loan Facility – *Repackaging*  
(continued)**

For the facility above, the Company has forwarded it to PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara VIII) amounting to Rp1,392,441,000,000.

This loan bears interest at the same rate as the loan received by the Company from HIMBARA Plus, which is Margin + JIBOR (2.75%). Interest payments are made every 23rd on every month. The term of this agreement is until December 31, 2030.

As of December 31, 2023 the balance of the forwarding loan facility consists of loan principal amounted to Rp1,392,440,193,760 respectively, and interest receivable amounted of Rp65,607,197,671.

**Other Loans**

The loan represents cost of selling factory machine, medicine, and other transactions, amounting to Rp1,456,061,620.

**Bailouts Fund**

Based on the Loan Agreement, in 2021, the Company (Ex – PT Perkebunan Nusantara III) gave a loan to PT Perkebunan Nusantara I (Ex – PT Perkebunan Nusantara VIII) amounted to Rp677,218,200,508 which were used for working capital purposes. The loan agreement has been amended several times, most recently on August 23, 2021. These loans bear interest at JIBOR + Margin 2.75% in 2023 and 2022. The due date of this loan agreement is on 2035.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

**PT Perkebunan Nusantara I (lanjutan)**

Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan  
Nusantara I (Eks - PT Perkebunan  
Nusantara XI)

**Pinjaman Penerusan – Repackaging**

Pada tahun 2023, Perusahaan dan PTPN VII, telah menandatangani *Covernote* No. 08/Not/GW/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan No. 05/Not/GW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, dengan Bank Mandiri (“Mandiri”), Bank Negara Indonesia (“BNI”), Bank Rakyat Indonesia (“BRI”), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”), yang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Himpunan Bank Negara (“HIMBARA Plus”), masing-masing sebesar Rp25.549.965.457.717 dan Rp5.601.765.066.965 yang bertujuan untuk tujuan pelunasan seluruh pinjaman fasilitas MAA (Catatan 23).

Atas pinjaman tersebut, Perusahaan meneruskannya sebagai pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks PT Perkebunan Nusantara XI) sebesar Rp65.608.631.378.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga yang sama dengan bunga pinjaman yang diterima oleh Perusahaan dari HIMBARA Plus yaitu sebesar JIBOR + Margin (2,75%). Pembayaran bunga atas pinjaman ini dilakukan setiap bulannya pada tanggal 23. Jangka waktu untuk pinjaman ini adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman penerusan ini terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp61.672.113.492 serta piutang bunga pinjaman sebesar Rp1.483.157.911.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

**PT Perkebunan Nusantara I (continued)**

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan  
Nusantara I (Ex - PT Perkebunan Nusantara XI)

**Forwarding Loan Facility - Repackaging**

In 2023, the Company and PTPN XI have signed a *Covernote* Number 08/Not/GW/VI/2023 dated June 27, 2023 and No. 05/Not/GW/VII/2023 dated July 20, 2023, with Bank Mandiri (“Mandiri”), Bank Negara Indonesia (“BNI”), Bank Rakyat Indonesia (“BRI”), Indonesia Eximbank (“LPEI”), which are collectively hereinafter referred to as Himpunan Bank Negara (“HIMBARA Plus”), amounting to Rp25,549,965,457,717 and Rp5,601,765,066,965, respectively, to repay the existing MAA debt of PTPN Group (Note 23).

For the facility above, the Company has forwarded it to PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XI) amounting to Rp65,608,631,378.

This loan bears interest at the same rate as the loan received by the Company from HIMBARA Plus, which is Margin + JIBOR (2.75%). Interest payments are made every 23rd on the end of every month. The term of this agreement is until December 31, 2030.

As of December 31, 2023 the balance of the forwarding loan facility consists of loan principal amounted to Rp61,672,113,492 respectively, and interest receivable amounted of Rp1,483,157,911.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

**PT Perkebunan Nusantara I (lanjutan)**

Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan Nusantara I (Eks - PT Perkebunan Nusantara XI) (lanjutan)

**Pinjaman Penerusan - *Repackaging* (lanjutan)**

**Pinjaman Dana Talangan**

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, pada tahun 2021, Perusahaan (Eks – PT Perkebunan Nusantara III) memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks – PT Perkebunan Nusantara XI) senilai Rp6.035.818.140 untuk modal kerja. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali amandemen terakhir pada tanggal 23 Agustus 2021. Pinjaman ini dikenakan suku bunga oleh Perusahaan sebesar JIBOR + Margin 2,75% pada tahun 2023 dan 2022. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun 2035.

Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan Nusantara I (Eks - PT Perkebunan Nusantara XIV)

**Pinjaman Dana Talangan**

Berdasarkan Perjanjian Pinjaman, pada tahun 2018, Perusahaan (Eks – PT Perkebunan Nusantara IV) memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks – PT Perkebunan Nusantara XIV) senilai Rp20.000.000.000 untuk modal kerja. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali amandemen terakhir pada tanggal 30 Desember 2020. Pinjaman ini dikenakan suku bunga oleh Perusahaan sebesar 9,75% pada tahun 2023 dan 2022. Jangka waktu pinjaman ini adalah 67 bulan dari tanggal perjanjian.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

**PT Perkebunan Nusantara I (continued)**

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan Nusantara I (Ex - PT Perkebunan Nusantara XI) (continued)

**Forwarding Loan Facility - *Repackaging* (continued)**

**Bailouts Fund**

Based on the Loan Agreement, in 2021, the Company (Ex – PT Perkebunan Nusantara III) gave a loan to PT Perkebunan Nusantara I (Ex – PT Perkebunan Nusantara XI) amounted to Rp6,035,818,140 which were used for working capital purposes. The loan agreement has been amended several times, most recently on August 23, 2021. These loans bear interest at JIBOR + Margin 2.75% in 2023 and 2022. The due date of this loan agreement is on 2035.

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan Nusantara I (Ex - PT Perkebunan Nusantara XIV)

**Bailouts Fund**

Based on the Loan Agreement, in 2018, the Company gave a loan to PT Perkebunan Nusantara I (Eks – PT Perkebunan Nusantara XIV) amounted to Rp20,000,000,000 which were used for working capital purposes. The loan agreement has been amended several times, most recently on December 30, 2020. These loans bear interest at 9.75% in 2023 and 2022. The term of the loan is 67 months from the date of agreement.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

**PT Perkebunan Nusantara I (lanjutan)**

Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan  
Nusantara I (Eks - PT Perkebunan  
Nusantara XIV) (lanjutan)

**Pinjaman Dana Talangan (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, saldo pinjaman ini terdiri dari pokok pinjaman masing-masing sebesar Rp19.500.000.000 dan piutang bunga pinjaman masing-masing sebesar Rp10.741.249.992 dan Rp8.839.999.996.

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, pada tahun 2021, Perusahaan (Eks – PT Perkebunan Nusantara III) memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks – PT Perkebunan Nusantara XIV) senilai Rp236.164.223.636 untuk modal kerja. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali amandemen terakhir pada tanggal 23 Agustus 2021. Pinjaman ini dikenakan suku bunga oleh Perusahaan sebesar JIBOR + Margin 2,75% pada tahun 2023 dan 2022. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun 2035.

**Pinjaman Lain-Lain**

Pinjaman ini merupakan pembebanan gaji, penjualan barang, dan transaksi lainnya, dengan saldo masing-masing sebesar Rp2.662.695.429 pada tahun 2023 dan 2022.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

**PT Perkebunan Nusantara I (continued)**

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan  
Nusantara I (Ex - PT Perkebunan  
Nusantara XIV) (continued)

**Bailouts Fund (continued)**

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the balance of this loan consists of loan principal amounted to Rp19,500,000,000, respectively, and interest receivable amounted of Rp10,741,249,992 and Rp8,839,999,996.

Based on the Loan Agreement, in 2021, the Company (Ex – PT Perkebunan Nusantara III) gave a loan to PT Perkebunan Nusantara I (Ex – PT Perkebunan Nusantara XIV) amounted to Rp236,164,223,636 which were used for working capital purposes. The loan agreement has been amended several times, most recently on August 23, 2021. These loans bear interest at JIBOR + Margin 2.75% in 2023 and 2022. The due date of this loan agreement is on 2035.

**Other Loans**

The loan represents salary expense, sale of goods and other transactions, amounting to Rp2,662,695,429, in 2023 and 2022, respectively.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

**PT Perkebunan Nusantara I (lanjutan)**

**Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan  
Nusantara I**

**Pinjaman Dana Talangan**

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, pada tahun 2018, Perusahaan (Eks – PT Perkebunan Nusantara IV) memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I senilai Rp20.000.000.000 untuk modal kerja. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali amandemen terakhir pada tanggal 30 Desember 2020. Pinjaman ini dikenakan suku bunga oleh Perusahaan sebesar 9,75% pada tahun 2023 dan 2022. Jangka waktu pinjaman ini adalah 66 bulan dari tanggal perjanjian.

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, pada tahun 2021, Perusahaan (Eks – PT Perkebunan Nusantara III) memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I senilai Rp322.508.761.112 untuk modal kerja. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali amandemen terakhir pada tanggal 23 Agustus 2021. Pinjaman ini dikenakan suku bunga oleh Perusahaan sebesar JIBOR + Margin 2,75% pada tahun 2023 dan 2022. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun 2035.

**Pinjaman Dana Talangan**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, saldo pinjaman ini terdiri dari pokok pinjaman masing-masing sebesar Rp12.400.000.000 dan piutang bunga pinjaman masing-masing sebesar Rp8.323.587.737 dan Rp7.114.587.737.

**Pinjaman Lain-Lain**

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, Pinjaman ini merupakan pembebanan gaji, penjualan barang, dan transaksi lainnya, dengan saldo masing-masing sebesar masing-masing Rp11.168.417.300 dan Rp11.308.885.410.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

**PT Perkebunan Nusantara I (continued)**

**Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan  
Nusantara I**

**Bailouts Fund**

Based on the Loan Agreement, in 2018, the Company gave a loan to PT Perkebunan Nusantara I amounted to Rp20,000,000,000 which were used for working capital purposes. The loan agreement has been amended several times, most recently on December 30, 2020. These loans bear interest at 9.75% in 2023 and 2022. The term of the loan is 66 months from the date of agreement.

Based on the Loan Agreement, in 2021, the Company (Ex – PT Perkebunan Nusantara III) gave a loan to PT Perkebunan Nusantara I amounted to Rp322,508,761,112 which were used for working capital purposes. The loan agreement has been amended several times, most recently on August 23, 2021. These loans bear interest at JIBOR + Margin 2.75% in 2023 and 2022. The due date of this loan agreement is on 2035.

**Bailouts Fund**

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the balance of this loan consists of loan principal amounted to Rp12,400,000,000, respectively, and interest receivable amounted of Rp8,323,587,737 and Rp7,114,587,737.

**Other Loans**

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, The loan represents salary expense, sale of goods and other transactions, amounting to Rp11,168,417,300 and Rp11,308,885,410.



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

**PT Perkebunan Nusantara I (lanjutan)**

Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan  
Nusantara I (Eks - PT Perkebunan  
Nusantara IX)

**Pinjaman Dana Talangan**

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, pada tahun 2018 dan 2019, Perusahaan memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks - PT Perkebunan Nusantara IX) masing-masing senilai Rp5.000.000.000 dan Rp3.500.000.000 untuk modal kerja. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali amandemen terakhir pada tanggal 26 Juni 2019. Pinjaman ini dikenakan suku bunga oleh Perusahaan sebesar 9,75% pada tahun 2023 dan 2022. Jangka waktu pinjaman ini adalah 79 bulan dari tanggal perjanjian.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, saldo pinjaman ini terdiri dari pokok pinjaman masing-masing sebesar Rp4.250.000.000 dan piutang bunga pinjaman masing-masing sebesar Rp1.951.995.653.

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, pada tahun 2021, Perusahaan (Eks - PT Perkebunan Nusantara III) memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks - PT Perkebunan Nusantara IX) senilai Rp579.176.511.467 untuk modal kerja. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali amandemen terakhir pada tanggal 23 Agustus 2021. Pinjaman ini dikenakan suku bunga oleh Perusahaan sebesar JIBOR + Margin 2,75% pada tahun 2023 dan 2022. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun 2035.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

**PT Perkebunan Nusantara I (continued)**

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan  
Nusantara I (Eks - PT Perkebunan  
Nusantara IX)

**Bailouts Fund**

Based on the Loan Agreement, in 2018 and 2019, the Company gave a loan to PT Perkebunan Nusantara I (ex - PT Perkebunan Nusantara IX) amounted to Rp5,000,000,000 and Rp3,500,000,000 which were used for working capital purposes. The loan agreement has been amended several times, most recently on June 26, 2019. These loans bear interest at 9.75% in 2023 and 2022. The term of the loan is 79 months from the date of agreement.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the balance of this loan consists of loan principal amounted to Rp4,250,000,000, respectively, and interest receivable amounted to Rp1,951,995,653 respectively.

Based on the Loan Agreement, in 2021, the Company (Ex - PT Perkebunan Nusantara III) gave a loan to PT Perkebunan Nusantara I (Ex - PT Perkebunan Nusantara IX) amounted to Rp579,176,511,467 which were used for working capital purposes. The loan agreement has been amended several times, most recently on August 23, 2021. These loans bear interest at JIBOR + Margin 2.75% in 2023 and 2022. The due date of this loan agreement is on 2035.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

**PT Perkebunan Nusantara I (lanjutan)**

Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan  
Nusantara I (Eks - PT Perkebunan  
Nusantara II)

**Pinjaman Dana Talangan**

Berdasarkan Perjanjian Utang Piutang, pada tahun 2021, Perusahaan (Eks – PT Perkebunan Nusantara III) memberikan pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks – PT Perkebunan Nusantara II) senilai Rp753.428.900.531 untuk modal kerja. Perjanjian pinjaman ini telah mengalami beberapa kali amandemen terakhir pada tanggal 23 Agustus 2021. Pinjaman ini dikenakan suku bunga oleh Perusahaan sebesar JIBOR + Margin 2,75% pada tahun 2023 dan 2022. Pinjaman ini akan jatuh tempo pada tahun 2035.

Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan  
Nusantara I (Eks - PT Perkebunan  
Nusantara XII)

**Pinjaman Penerusan - Repackaging**

Pada tahun 2023, Perusahaan dan PTPN VII, telah menandatangani *Covernote* No. 08/Not/GW/VI/2023 tanggal 27 Juni 2023 dan No. 05/Not/GW/VII/2023 tanggal 20 Juli 2023, dengan Bank Mandiri (“Mandiri”), Bank Negara Indonesia (“BNI”), Bank Rakyat Indonesia (“BRI”), Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (“LPEI”), yang secara bersama-sama selanjutnya disebut sebagai Himpunan Bank Negara (“HIMBARA Plus”), masing-masing sebesar Rp25.549.965.457.717 dan Rp5.601.765.066.965 yang bertujuan untuk tujuan pelunasan seluruh pinjaman fasilitas MAA (Catatan 23).

Atas pinjaman tersebut, Perusahaan meneruskannya sebagai pinjaman kepada PT Perkebunan Nusantara I (Eks PT Perkebunan Nusantara XII) sebesar Rp902.833.741.562.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

**PT Perkebunan Nusantara I (continued)**

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan  
Nusantara I (Eks - PT Perkebunan  
Nusantara II)

**Bailouts Fund**

Based on the Loan Agreement, in 2021, the Company (Ex – PT Perkebunan Nusantara III) gave a loan to PT Perkebunan Nusantara I (Ex – PT Perkebunan Nusantara II) amounted to Rp 753,428,900,531 which were used for working capital purposes. The loan agreement has been amended several times, most recently on August 23, 2021. These loans bear interest at JIBOR + Margin 2.75% in 2023 and 2022. The due date of this loan agreement is on 2035.

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan  
Nusantara I (Eks - PT Perkebunan  
Nusantara XII)

**Forwarding Loan Facility - Repackaging**

In 2023, the Company and PTPN XI have signed a *Covernote* Number 08/Not/GW/VI/2023 dated June 27, 2023 and No. 05/Not/GW/VII/2023 dated July 20, 2023, with Bank Mandiri (“Mandiri”), Bank Negara Indonesia (“BNI”), Bank Rakyat Indonesia (“BRI”), Indonesia Eximbank (“LPEI”), which are collectively hereinafter referred to as Himpunan Bank Negara (“HIMBARA Plus”), amounting to Rp25,549,965,457,717 and Rp5,601,765,066,965, respectively, to repay the existing MAA debt of PTPN Group (Note 23).

For the facility above, the Company has forwarded it to PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XII) amounting to Rp902,833,741,562.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**d. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

**PT Perkebunan Nusantara I (lanjutan)**

Pinjaman Jangka Panjang - PT Perkebunan Nusantara I (Eks - PT Perkebunan Nusantara XII) (lanjutan)

**Pinjaman Penerusan - Repackaging (lanjutan)**

Pinjaman ini dikenakan suku bunga yang sama dengan bunga pinjaman yang diterima oleh Perusahaan dari HIMBARA Plus yaitu sebesar JIBOR + Margin (2,75%). Pembayaran bunga atas pinjaman ini dilakukan setiap bulannya pada tanggal 23. Jangka waktu untuk pinjaman ini adalah sampai dengan tanggal 31 Desember 2030.

Pada tanggal 31 Desember 2023, saldo pinjaman penerusan ini terdiri dari pokok pinjaman sebesar Rp902.417.066.730 serta piutang bunga pinjaman sebesar Rp19.107.063.736.

Pinjaman Jangka Panjang - PT Industri Nabati Lestari

**Pinjaman Penerusan**

Pada tahun 2019, Perusahaan menerima pinjaman dari PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS) (Catatan 23) dan meneruskannya sebagai pinjaman kepada PT Industri Nabati Lestari untuk modal kerja.

Pinjaman ini dikenakan suku bunga yang sama dengan bunga pinjaman yang diterima oleh Perusahaan dari PT Bank DBS Indonesia yaitu sebesar 10,08% di tahun 2019 sampai dengan tahun 2020 dan 6,99% pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2026. Pembayaran bunga atas pinjaman ini dilakukan setiap bulannya pada tanggal 23. Jangka waktu untuk pinjaman ini adalah sampai dengan tanggal 29 Mei 2025.

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**d. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

**PT Perkebunan Nusantara I (continued)**

Other Long-Term Receivable - PT Perkebunan Nusantara I (Eks - PT Perkebunan Nusantara XII)(continued)

**Forwarding Loan Facility - Repackaging (continued)**

This loan bears interest at the same rate as the loan received by the Company from HIMBARA Plus, which is Margin + JIBOR (2.75%). Interest payments are made every 23rd on the end of every month. The term of this agreement is until December 31, 2030.

As of December 31, 2023 the balance of the forwarding loan facility consists of loan principal amounted to Rp902,417,066,730 respectively, and interest receivable amounted of Rp19,107,063,736.

Other Long-Term Receivable - PT Industri Nabati Lestari

**Forwarding Loan Facility**

In 2019, the Company received a loan from PT Bank DBS Indonesia (Bank DBS) (Note 23) and forward to PT Industri Nabati Lestari for working capital purposes.

This loan bears interest at the same rate as the loan received by the Company from PT Bank DBS Indonesia, which is 10.08% in 2019 until 2020 and 6.99% in 2021 until 2026. Interest payments are made every 23<sup>rd</sup> every month. The term of this agreement is until May 29, 2025.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**e. Piutang lain-lain (Catatan 9) (lanjutan)**

**Piutang lain-lain jangka panjang (lanjutan)**

Pinjaman Jangka Panjang - PT Industri Nabati  
Lestari

**Pinjaman Penerusan**

Pinjaman ini dijamin dengan sertifikat HGB, mesin dan peralatan, persediaan, dan piutang PT Industri Nabati Lestari.

Sejak bulan Maret 2021, pinjaman ini dikenakan bunga sebesar JIBOR 1 bulan + Margin per tahun.

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, saldo pinjaman ini terdiri dari pokok pinjaman masing-masing sebesar Rp104.307.945.040 dan Rp121.006.473.565 dan piutang bunga pinjaman masing-masing sebesar Rp2.596.485.061 dan Rp532.418.406.

**e. Utang usaha (Catatan 18)**

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**e. Other receivables (Note 9) (continued)**

**Other long-term receivables (continued)**

Other Long-Term Receivable - PT Industri  
Nabati Lestari

**Forwarding Loan Facility**

This loan is guaranteed with certificates of HGB, machinery and equipment, inventories and accounts receivable of PT Industri Nabati Lestari.

Since March 2021, this loan bears interest at JIBOR 1 Month + Margin annually.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, the balance of this loan consists of loan principal amounted to Rp104,307,945,040 and Rp121,006,473,565, respectively, and interest receivable amounted of Rp2,596,485,061 and Rp532,418,406.

**e. Trade payables (Note 18)**

Disajikan kembali (Catatan 46)/  
As Restated (Note 46)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	25.531.632.335	22.118.538.432	4.243.089.333	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Riset Perkebunan Nusantara	21.923.833.675	34.500.908.458	4.226.534.863	PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Perkebunan Nusantara I	57.198.339.681	-	-	PT Perkebunan Nusantara I
PT Telkom Medan	12.384.092.607	-	-	PT Telkom Medan
Pusat Koperasi Karyawan	11.063.532.694	8.366.635.794	7.833.914.548	Pusat Koperasi Karyawan
PT Kereta Api Indonesia (Persero)	10.834.915.909	11.134.151.528	7.633.542.302	PT Kereta Api Indonesia (Persero)
PT Telekomunikasi Indonesia Tbk	4.712.734.548	9.364.427.960	5.057.488.265	PT Telekomunikasi Indonesia Tbk
PT Surveyor Indonesia	3.382.184.500	-	-	PT Surveyor Indonesia
PT Bio Industri Nusantara	2.642.475.102	-	-	PT Bio Industri Nusantara
PT Barata Indonesia	1.736.942.928	1.736.942.928	1.736.942.928	PT Barata Indonesia
PT Pertamina (Persero)	1.333.395.786	887.701.252	1.045.593.149	PT Pertamina (Persero)
Lain-lain	6.058.206.419	10.905.239.846	11.899.546.167	Others
<b>Total</b>	<b>158.802.286.184</b>	<b>99.014.546.198</b>	<b>43.676.651.555</b>	<b>Total</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**f. Utang usaha (Catatan 18) (lanjutan)**

Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021, saldo utang usaha pada entitas berelasi masing-masing sebesar Rp158.802.286.184, Rp99.014.546.198, dan Rp43.676.651.555 dari total utang usaha konsolidasian.

**f. Utang lain-lain (Catatan 19)**

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**f. Trade payables (Note 18) (continued)**

As of December 31, 2023, December 31, 2022 and January 1, 2022/ December 31, 2021, trade payables balances to the related parties represent Rp158,802,286,184, Rp99,014,546,198, and Rp43,676,651,555 of the total consolidated trade payables, respectively,

**f. Other payables (Note 19)**

Disajikan kembali (Catatan 46)/  
As Restated (Note 46)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	391.579.740.394	167.474.398.070	191.703.829.638	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Riset Perkebunan Nusantara	69.557.962.354	24.737.250.020	31.826.044.315	PT Riset Perkebunan Nusantara
PT Perkebunan Nusantara I	81.074.272.206	47.665.124.913	9.449.419.234	PT Perkebunan Nusantara I
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Niaga	32.563.059.338	68.259.542.229	34.385.389.048	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Niaga
PT Telekomunikasi Indonesia	2.390.201.770	10.694.573.763	18.720.777.582	PT Telekomunikasi Indonesia
Lain-lain	78.011.251.962	73.747.553.418	35.626.585.047	Others
<b>Total</b>	<b>655.176.488.024</b>	<b>392.578.442.413</b>	<b>321.712.044.864</b>	<b>Total</b>

Utang lain-lain kepada pihak berelasi terutama terdiri dari utang dividen, utang atas pengadaan bibit, dan utang atas saldo DSRA pinjaman repackaging.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021, saldo utang lain-lain pada entitas berelasi masing-masing sebesar 84,57%, 74,78%, dan 59,28% dari total utang lain-lain konsolidasian interim.

**g. Liabilitas kontrak (Catatan 20)**

**g. Contract liabilities (Note 20)**

Disajikan kembali (Catatan 46)/  
As Restated (Note 46)

	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022 December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021 January 1, 2022/ December 31, 2021	
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	12.611.504.446	26.649.286.616	13.325.548.126	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
Lain-lain	1.387.542.090	265.990.536	166.284.621	Others
<b>Total</b>	<b>13.999.046.536</b>	<b>26.915.277.152</b>	<b>13.491.832.747</b>	<b>Total</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**h. Pendapatan diterima dimuka**

**h. Unearned revenue**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021/ January 1, 2022/ December 31, 2021	
PT Pertamina Gas	2.150.550.000	2.442.150.000	2.587.950.000	PT Pertamina Gas
PT Pertamina Bina Medika IHC	850.107.440	1.092.995.280	1.335.883.120	PT Pertamina Bina Medika IHC
PT Perusahaan Listrik Negara	476.052.512	2.761.104.564	3.903.630.590	PT Perusahaan Listrik Negara
Lain-lain	98.824.075	729.311.076	1.206.696.293	Others
Total	3.575.534.027	7.025.560.920	9.034.160.003	Total
Dikurangi bagian lancar	(2.249.877.912)	(2.050.256.424)	(3.509.192.475)	Less current portion
<b>Bagian jangka panjang</b>	<b>1.325.656.115</b>	<b>4.975.304.496</b>	<b>5.524.967.528</b>	<b>Long-term portion</b>

**i. Pinjaman kepada pihak berelasi**

**i. Loan from related parties**

	Disajikan kembali (Catatan 46)/ As Restated (Note 46)			
	31 Desember 2023/ December 31, 2023	31 Desember 2022/ December 31, 2022	1 Januari 2022/ 31 Desember 2021/ January 1, 2022/ December 31, 2021	
PT Perkebunan Nusantara III	880.920.488.708	750.452.022.743	660.510.144.316	PT Perkebunan Nusantara III
PT Perkebunan Nusantara I	16.894.334.285	18.301.388.925	16.521.439.120	PT Perkebunan Nusantara I
Koperasi Karyawan	1.665.042.641	-	-	Cooperatives employees
<b>Total</b>	<b>899.479.865.634</b>	<b>768.753.411.668</b>	<b>677.031.583.436</b>	<b>Total</b>

Utang lain-lain jangka panjang terdiri dari pinjaman investasi dengan suku bunga sebesar 7,00% per tahun dengan jangka waktu sampai dengan tahun 2035 dan utang atas imbalan kerja kepada pemegang saham.

Other long-term debts are consist of investment facilities with interest rate of 7.00% annually with the maturity period up to 2035 and debts for employee benefits to the shareholders.

Pada tanggal 31 Desember 2023, 31 Desember 2022 dan 1 Januari 2022/ 31 Desember 2021, saldo utang lain-lain jangka panjang pada entitas berelasi sebesar 100,00% dari total utang lain-lain konsolidasian.

As of December 31, 2023, December 31, 2022 and January 1, 2022/ December 31, 2021, other long-term debts balances to the related parties represent 100.00% of the total consolidated other long-term debts.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**j. Pendapatan (Catatan 29)**

**j. Revenue (Note 29)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
PT Industri Nabati Lestari	5.044.553.705.688	6.115.952.161.053	PT Industri Nabati Lestari
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	890.681.850.568	736.430.521.546	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Niaga	141.730.393.500	361.855.400	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara Niaga
BPJS Kesehatan	66.363.989.885	24.113.983.761	BPJS Kesehatan
PT PPEN Rajawali Nusantara	17.850.000.000	-	PT PPEN Rajawali Nusantara
Industri Karet Nusantara	4.628.118.890	5.865.645.350	Industri Karet Nusantara
BPJS Ketenagakerjaan	2.866.744.141	1.837.257.090	BPJS Ketenagakerjaan
PT Kurnia Multi Komoditas	4.900.000.000	13.800.000.000	PT Kurnia Multi Komoditas
Kementerian Kesehatan	64.386.000	34.629.408.641	Kementerian Kesehatan
Indica Multi Karya	-	18.793.100.000	Indica Multi Karya
Lainnya	150.504.674	265.177.819	Others
<b>Total</b>	<b>6.173.789.693.346</b>	<b>6.952.049.110.660</b>	<b>Total</b>

**k. Beban Pemasaran dan Penjualan  
(Catatan 31)**

**k. Marketing and Selling Expenses (Note 31)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	65.416.146.067	82.083.527.681	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
PT Kereta Api Indonesia	13.870.348.407	26.048.846.270	PT Kereta Api Indonesia
<b>Total</b>	<b>79.286.494.474</b>	<b>108.132.373.951</b>	<b>Total</b>

Pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022, saldo beban pemasaran dan penjualan pada entitas berelasi masing-masing sebesar 12,69% dan 19,12% dari total beban pemasaran dan penjualan konsolidasian interim.

As of December 31, 2023 and December 31, 2022, marketing and selling expenses to the related parties represent 12.69% and 19.12% of the total interim consolidated marketing & selling expenses, respectively.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**36. SALDO DAN TRANSAKSI SIGNIFIKAN DENGAN  
PIHAK-PIHAK BERELASI (lanjutan)**

**36. SIGNIFICANT TRANSACTIONS AND BALANCES  
WITH RELATED PARTIES (continued)**

**I. Penghasilan Keuangan (Catatan 35a)**

**I. Financial Income (Note 35a)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
PT Perkebunan Nusantara I	1.199.092.232.847	829.584.692.131	PT Perkebunan Nusantara I
PT Industri Nabati Lestari	54.324.400.043	109.966.410.576	PT Industri Nabati Lestari
PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara	13.394.043.464	24.464.698.137	PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara
Lainnya	7.786.171.496	6.149.506.017	Others
<b>Total</b>	<b>1.274.596.847.850</b>	<b>970.165.306.861</b>	<b>Total</b>

**m. Beban Keuangan (Catatan 35b)**

**m. Financial Costs (Note 35b)**

	Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember/ Year ended December 31,		
	2023	2022 (disajikan kembali) (Catatan 46)/ (as restated) (Note 46)	
PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	945.038.665.942	639.129.793.095	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk
PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk	400.259.429.612	209.793.863.434	PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk	248.328.981.674	56.034.841.838	PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk
Lembaga Pembayaran Ekspor Indonesia	78.484.761.052	44.230.276.825	Lembaga Pembayaran Ekspor Indonesia
PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk	48.532.812.500	50.062.500.000	PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten (BJB) Tbk
PT Perkebunan Nusantara III (Persero)	39.319.649.873	30.306.005.572	PT Perkebunan Nusantara III (Persero)
PT Bank Raya Indonesia (Persero) Tbk	16.291.034.882	24.583.441.956	PT Bank Raya Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk	11.305.953.996	17.060.872.181	PT Bank Syariah Indonesia (Persero) Tbk
PT Bank Riau Kepri (Persero) Tbk	9.763.745.819	14.370.547.621	PT Bank Riau Kepri (Persero) Tbk
PT Perkebunan Nusantara I	-	19.648.506	PT Perkebunan Nusantara I
<b>Total</b>	<b>1.797.325.035.350</b>	<b>1.085.591.791.028</b>	<b>Total</b>



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**37. LABA PER SAHAM DASAR**

Berikut ini adalah data yang digunakan untuk perhitungan laba per saham dasar:

	<b>31 Desember 2023/ December 31, 2023</b>	<b>31 Desember 2022/ December 31, 2022</b>	
Laba tahun berjalan	3.701.843.620.839	2.185.399.453.623	<i>Income for the year</i>
Rata-rata tertimbang jumlah lembar saham yang beredar	8.395.318	2.942.116	<i>Weighted average number of shares issued</i>
<b>Laba per saham dasar</b>	<b>440.941</b>	<b>742.799</b>	<b><i>Earnings per share</i></b>

**37. EARNINGS PER SHARE**

The following is data used for calculation of earnings per share

**38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI**

**a. Pelepasan areal unit usaha**

Pada tahun 2000, Pemerintah Daerah Tingkat II Simalungun mengajukan permohonan pelepasan areal dengan luas keseluruhan 850 ha yang berada di unit usaha Bah Jambi, Marjandi, Marihat, Balimbingan, dan Bah Butong yang akan digunakan untuk pengembangan kota yang berada disekitar areal tersebut. Berdasarkan Surat Badan Pertanahan Nasional No. 540.1-268-WAKA tanggal 3 Februari 2003, areal seluas 100 ha dalam penerbitan HGU unit usaha Marjandi telah keluar dari areal Perusahaan.

**38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES**

**a. Disposal of business unit area**

In 2000, the local Government of Simalungun Level II has submitted a request to the Company to release 850 ha of estate area located at Bah Jambi, Marjandi, Marihat, Balimbingan, and Bah Butong Estates which will be used for city development surrounding the area. Based on Letter of the National Land Agency letter No. 540.1-268-WAKA dated on February 3, 2003, area totaling 100 ha in the issued HGU of Marjandi Estate has been released from Company's area.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**a. Pelepasan areal unit usaha (lanjutan)**

Berdasarkan hasil rapat internal Pemerintah Kabupaten Simalungun di Kantor Bupati Simalungun tanggal 16 November 2005 disepakati pemindahan lokasi dan status peruntukan sesuai Berita Acara Kesepakatan yang semula sebagai perluasan Kota Kecamatan Panei (pembangunan fasilitas umum) menjadi perumahan/pemukiman. Fasilitas umum dan fasilitas sosial, sesuai Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun sehingga areal objek permohonan pelepasan areal berpindah dari areal yang dikecualikan perpanjangan HGU ke areal yang berstatus hukum HGU sehingga aset lahan tersebut masih milik Perusahaan sambil menunggu izin pemegang saham dan penilaian appraisal. Proses pelepasan aset masih ditunda karena belum adanya surat persetujuan dari pemegang saham Perusahaan. Melalui surat Menteri BUMN No. S-435/MBU/2009 tanggal 22 Juni 2009, tentang penghapusbukuan areal HGU kebun. Kementerian BUMN meminta agar segera dibentuk panitia penaksir harga untuk menilai aset yang akan dilepas yang keanggotaannya terdiri dari Perusahaan. Kementerian BUMN dan Instansi lain yang dianggap perlu.

Hingga berakhirnya masa berlaku persetujuan Kementerian BUMN tersebut pada 2010, panitia penaksir harga belum terbentuk. Oleh sebab itu melalui Surat No. 04.14/X/53NI/2011 tanggal 6 Juni 2011, Perusahaan mengajukan kembali permohonan persetujuan pelepasan areal HGU atau penghapusbukuan aset Kebun Marjandi, namun belum mendapat tanggapan dari Kementerian BUMN. Untuk itu Perusahaan membuat Surat permintaan Rekomendasi Pelepasan Aset Kebun Marjandi seluas 70 Ha ditujukan ke Dewan Komisaris sesuai surat No. 04.17/X/09/I/2013 tanggal 31 Januari 2013. Permintaan tersebut telah mendapat persetujuan dari Dekom sebagaimana yang dimuat dalam Surat Dekom Perusahaan No. DK-15/IV/2013 tanggal 5 April 2013 tentang rekomendasi Pelepasan Aset Kebun Marjandi seluas 70 ha.

**38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES  
(continued)**

**a. Disposal of business unit area (continued)**

*Based on the results of internal meeting of the Simalungun Regency Government at the Kantor Bupati Simalungun on 16 November 2005, agreed the transfer the location and status of the allocation according to the Minutes of Agreement which was originally for the expansion of Panei District City (development of public facilities) into housing/settlement, public facilities and social facilities, in accordance with the Rencana Umum Tata Ruang Wilayah Kabupaten Simalungun so that the area subject to the application for area release is moved from an area that is excluded from HGU extension to an area that has the legal status of HGU so that the land assets still belong to the Company pending shareholder permission and appraisal assessment. The asset disposal process is still being postponed due to the absence of a letter of approval from the Company's shareholders. Through the letter of the Minister of State Owned Enterprise (BUMN) No. S-435/MBU/2009 dated June 22, 2009, concerning the write-off of HGU plantation areas. The Ministry of State Owned Enterprise (BUMN) requested that a price estimation committee be immediately formed to assess the assets to be disposed of whose membership consists of the Company. Ministry of State Owned Enterprise (BUMN) and other agencies deemed necessary.*

*Until the due date of the approval of the Ministry of State-Owned Enterprises in 2010, the committee has not yet formed. Therefore, in letter No. 04.14/X/53NI/2011 dated June 6, 2011, the Company resubmit the appeal to release area of HGU or write-off of asset Marjandi estate, but has not received a response from the Ministry of State-Owned Enterprises. Therefore, the Company's request the Recommendation Letter Release of Assets Marjandi Estate area of 70 ha addressed to Board of Commissioners with letter No. 04.17/X/09/I/2013 dated January 31, 2013. The request was approved by the Board of Commissioners as contained in the letter No. DK-15/IV/2013 dated April 5, 2013 about Recommendations of Disposal Assets Marjandi Estate amounted to 70 ha.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**a. Pelepasan areal unit usaha (lanjutan)**

Selanjutnya permohonan diteruskan kepada Pemegang Saham sebagaimana yang diajukan dalam Surat Perusahaan No.04.17/45/IV/2013 tanggal 29 April 2013 tentang Permohonan Persetujuan Pemindahbukuan areal Kebun Marjandi seluas 70 ha, Surat Perusahaan No. 04.01/260/IX/2013 tanggal 24 September 2013 tentang Penjelasan Tambahan atas Penghapusbukuan lahan Kebun Marjandi seluas 70 Ha dan Surat Perusahaan No. 04.01/X/22/1/2014 tanggal 20 Januari 2014 perihal Penjelasan Tambahan atas penghapusbukuan atau pemindahtanganan lahan seluas 70 Ha Kebun Marjandi yang sampai dengan tanggal pelaporan, belum ada izin penghapusbukuan dari Menteri BUMN.

Sampai dengan saat ini, Perusahaan sedang berkoordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Simalungun untuk mengulang proses pengajuan persetujuan penghapusbukuan kepada Pemegang Saham yakni Menteri BUMN dan PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

**b. Pengembangan perkebunan plasma**

Perusahaan mengadakan perjanjian kerjasama dengan beberapa KUD di provinsi Sumatera Utara untuk pengembangan perkebunan plasma. Berdasarkan perjanjian tersebut Perusahaan wajib dan berhak untuk:

1. Memasarkan hasil TBS kelapa sawit koperasi dengan syarat kualitas sesuai dengan ketentuan Pemerintah.
2. Membayar jumlah produksi TBS kebun koperasi berdasarkan hasil timbangan neto yang diterima dengan harga per Kg TBS kelapa sawit berdasarkan tahun tanam yang dikaji oleh tim pengkajian dan penetapan harga pembelian TBS kelapa sawit Pemda Sumatera Utara.
3. Mengamati teknis pelaksanaan perawatan kebun, kegiatan panen, dan transportasi TBS.

**38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES  
(continued)**

**a. Disposal of business unit area (continued)**

Furthermore, the request is forwarded to Shareholders as proposed in the Letter of Company No. 04.17/45/IV/2013 dated April 29, 2013 about Approval of Redeployment Assets Marjandi Estate amounted to 70 hectares. The Company Letter No. 04.01/260/IX/2013 dated 24 September 2013 and the Letter of the Company No. 04.01/X/22/1/2014 dated January 20, 2014 on Supplementary Explanation of Redeployment Assets Marjandi Estate amounted to 70 hectares, which is until the reporting date, the approval has not been obtained from the Ministry of State-Owned Enterprises.

Until now, the Company is still on the process of coordinating with the Simalungun Regency Government to repeat the request for asset disposal to the Shareholders, namely the Ministry of State-Owned Enterprises and PT Perkebunan Nusantara III (Persero).

**b. The development of palm oil plantation for plasma**

The Company conducted agreement with several Koperasi in Sumatera Utara for the development of palm oil plantation for plasma. Based on those agreements, Company have rights and obligations to:

1. Sells the fresh fruit bunch from plasma plantation in terms of the quality meet the requirement of government regulation.
2. Pay the fresh fruit bunch production from plasma plantation based on the weight net received with price per unit referring to year planted by Tim Pengkajian dan Penetapan Harga Pembelian TBS palm oil of North Sumatera Local Government.
3. Observe technical implementation of maintenance estate, harvesting, and FFB transportation.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**b. Pengembangan perkebunan plasma (lanjutan)**

Koperasi-koperasi wajib dan berhak untuk:

- (i) Menyerahkan lahan kepada Perusahaan untuk dikelola,
- (ii) Memasarkan hasil kebun kelapa sawit kepada Perusahaan selama satu tahun siklus tanaman,
- (iii) Membayar seluruh kewajiban terkait dana talangan yang dikeluarkan oleh Perusahaan,
- (iv) Koperasi menanggung biaya angkutan TBS dari kebun ke pabrik kelapa sawit.

Sebagaimana dijelaskan pada Catatan 10 atas catatan laporan keuangan konsolidasian, petani plasma dan piutang KKPA yang terorganisir melalui beberapa KUD telah memperoleh fasilitas kredit dari PT Bank Mandiri Tbk (Persero) untuk pengembangan areal plasma dan KKPA. Dalam hal ini Perusahaan bertindak sebagai penjamin pengembalian fasilitas kredit.

**c. Penjualan komoditi**

Perusahaan mengadakan perjanjian keagenan dengan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN"), pihak berelasi (Catatan 36), dimana Perusahaan akan menjual produk atau komoditas melalui KPBN. Imbal jasa atas penjualan komoditas adalah 0,25% dari nilai kontrak di luar PPN. Imbal jasa atas penjualan komoditi pada periode yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 adalah sebesar Rp39.985.850.958 (Tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022: Rp82.083.527.681) (Catatan 36k).

**38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

**b. The development of palm oil plantation for plasma (continued)**

The Cooperatives have rights and obligation to:

- (i) Give the land to the Company to be managed,
- (ii) Sell its production of palm oil to the Company for one year of plant-cycle,
- (iii) Pay the obligation regarding bailouts spent by the Company,
- (iv) Cooperative bears the freight cost of FFB from the estate to palm oil mill.

As stated in Note 10 to the consolidated financial statements, plasma farmer and KKPA, organized through several KUD, have obtained credit facility from PT Bank Mandiri Tbk (Persero) for the development of plasma and KKPA areal. The Company act as guarantor of credit repayment.

**c. Commodity sales**

Company entered agency agreement with PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN"), related party (Note 36), where the Company will sell its products or commodities through KPBN. Compensation for the sales of commodities is 0.25% of the contract value outside VAT. Compensation for the sales of commodities for the period ended on December 31, 2023 amounted to Rp39,985,850,958 (Year Ended December 31, 2022: Rp82,083,527,681) (Note 36k).

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**d. Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional**

Berdasarkan Akta Notaris Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. tentang Perjanjian Pemberian Dana Investasi Pemerintah Republik Indonesia kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dalam Bentuk Pinjaman Subordinasi, yang dikenakan bunga sebesar 2% pertahun dalam Rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional tanggal 28 Desember 2020, Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia setuju untuk menyediakan Dana Investasi kepada PT Perkebunan Nusantara III (Persero) sebesar Rp4.000.000.000.000 dengan pencairan pertama Dana Investasi paling lambat pada tanggal 28 Februari 2021.

Selanjutnya, berdasarkan surat nomor DKSK/SPJ-PTPNIV/11/2021 tanggal 19 April 2021, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) mengalokasikan sebesar Rp257.412.500.000 dan dikenakan bunga sebesar 2%/tahun kepada Perusahaan untuk tujuan pembiayaan belanja perkebunan dan modal pabrik. Sampai dengan tahun 2022, Perusahaan telah menerima dana sebesar Rp183.436.511.159, yang dicatat sebagai utang pihak berelasi pada laporan keuangan konsolidasian.

**38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES  
(continued)**

**d. Investment Fund Agreement by the Government of the Republic of Indonesia in the Context of National Economic Recovery Program**

Based on the Notarial Deed of Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H. regarding Investment Funds Agreement from the Government of the Republic of Indonesia to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) in the form of a Subordinated Loan, which bears interest of 2%/annum within the framework of the National Economic Recovery Program dated December 28, 2020, the Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia agreed to provide Investment Funds to PT Perkebunan Nusantara III (Persero) amounting to Rp4,000,000,000,000 with the first disbursement of the Investment Fund no later than February 28, 2021.

Furthermore, based on letter No. DKSK/SPJ-PTPNIV/11/2021 dated April 19, 2021, PT Perkebunan Nusantara III (Persero) allocated Rp257,412,500,000 and bears interest of 2%/annum to the Company for financing purposes. Until the year 2022, the Company has received funds amounting to Rp183,436,511,159, which recorded as due to related party in the consolidated financial statements.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**e. Konsorsium untuk usaha perdagangan Gula Kristal Putih ("GKP")**

Berdasarkan Surat Penjanjian Kerjasama Usaha Perdagangan Gula Kristal Putih ("GKP") antara Perusahaan dengan PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara II) tanggal 9 Juli 2021, para pihak sepakat untuk melakukan kerjasama dalam bentuk konsorsium untuk usaha perdagangan Gula Kristal Putih yang di produksi oleh pabrik gula milik PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XI) sebanyak 3.000 ton. Perusahaan, bertanggung jawab untuk menyediakan dana yang dibutuhkan untuk pembelian GKP sedangkan Perusahaan bertanggung jawab atas pembelian dan Pemasaran GKP tersebut. Perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara II) sepakat untuk membagi hasil keuntungan usaha perdagangan GKP dibagi yaitu masing-masing sebesar 50%.

Perjanjian ini telah mengalami beberapa kali amandemen, terakhir kali tanggal 3 September 2021, yang mengamandemen produsen gula kristal putih menjadi PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara X), PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XI) dan PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XII), dan PT Sinergi Gula Nusantara, dengan jumlah sesuai dengan penawaran dari PT Perkebunan Nusantara III (Persero) dengan jumlah total 69.650 ton.

Berdasarkan perjanjian konsorsium yang telah diadendum, Perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara II) sepakat untuk membagi hasil keuntungan usaha perdagangan GKP dibagi yaitu sebesar, (1) apabila sumber dana pembelian GKP seluruhnya dari perusahaan maka pembagian keuntungan sebesar 50% untuk perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara II); dan (2) apabila apabila sumber dana pembelian GKP sebagian dari Perusahaan, maka pembagian keuntungan adalah sebesar 55% untuk Perusahaan dan 45% untuk PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara II).

**38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

**e. Consortium for trading business of White Crystal Sugar ("GKP")**

*Based on the Agreement Letter for Cooperation in the Trading of White Crystal Sugar ("GKP") between the Company and PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara II) dated July 9, 2021, the parties are agree to cooperate in form of a consortium for trading business of White Crystal Sugar produced by sugar factory owned by PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XI) of 3,000 tons. The Company, is responsible for providing the funds needed to purchase GKP while the Company is responsible for purchasing and marketing the GKP. The company and PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara II) offered to share the profits of the GKP trading business, namely 50% each.*

*This agreement has been amended several times, most recently dated September 3, 2021, which amended the producer of white crystal sugar to become PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara X), PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XI) and PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XII), and PT Sinergi Gula Nusantara, with the amount according to the offer from PT Perkebunan Nusantara III (Persero) with a total of 69,650 tons.*

*Based on the consortium agreement that has been amended, the Company and PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara II) agree to share the profits from the GKP trading business, (1) if the source of funds for the purchase of GKP is entirely from the company, then the profit sharing is 50% for the company and PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara II); and (2) if the source of funds for purchasing GKP is partly from the company, then the profit sharing is 55% for the Company and 45% for PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara II).*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**e. Konsorsium untuk usaha perdagangan Gula Kristal Putih ("GKP") (lanjutan)**

Pada tahun 2023, piutang lain-lain sehubungan dengan konsorsium untuk usaha perdagangan GKP adalah sebesar Rp116.805.940.560 (2022: Rp831.684.183.657) (Catatan 9a) dan pembagian bagi hasil pada tahun 2023 adalah sebesar Rp30.169.850.550 (2022: Rp12.712.003.125) yang dicatat sebagai pendapatan konsorsium gula sebagai bagian dari pendapatan lain-lain di laporan keuangan konsolidasian (Catatan 33).

**f. Perjanjian Jual Beli Bersyarat PT Mitra Kerinci**

Pada tanggal 16 November 2022, Perusahaan ("Pembeli") dan PT Mitra Kerinci ("Penjual") menandatangani perjanjian jual beli bersyarat. Kedua belah pihak sepakat untuk melakukan jual beli unit Kebun Teh di Kabupaten Solok, Sumatera Barat seluas 1.481,16 Hektar, senilai Rp107.500.000.000. Berdasarkan perjanjian tersebut, terdapat beberapa persyaratan yang ditetapkan dan harus dipenuhi oleh para pihak terlebih dahulu sebelum melakukan transaksi jual beli.

Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian, para pihak belum dapat memenuhi persyaratan jual beli tersebut.

**g. Perjanjian Kerja Sama Operasi ("KSO") antara PTPN IV dan PTPN XIV**

Pada tanggal 24 Maret 2023, Perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIV) menandatangani perjanjian Kerja Sama Operasi ("KSO") atas pengelolaan Kebun dan Pabrik Kelapa Sawit PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIV). Dalam pelaksanaan KSO, Perusahaan membentuk organisasi manajemen KSO yang dipimpin oleh seorang Distrik Manager dari Perusahaan dan personel lainnya yang terdiri dari Perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIV).

**38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

**e. Consortium for trading business of White Crystal Sugar ("GKP") (continued)**

In 2023, other receivables recorded that is related to consortium transaction is amounted to Rp116,805,940,560 (2022: Rp831,684,183,657) (Note 9a) and the amount of profit sharing for the consortium transaction for Rp30,169,850,550 in 2023 (2022: Rp12,712,003,125) that is recorded as as profit sharing for consortium that is related to other income in the financial consolidated statement (Note 33).

**f. Conditional Sale and Purchase Agreement to PT Mitra Kerinci**

On November 16, 2022, the Company ("Buyer") and PT Mitra Kerinci ("Seller") entered into a conditional sale and purchase agreement. Both parties are prohibited from buying and selling tea plantation units in Solok Regency, West Sumatra covering an area of 1,481.16 hectares, valued at Rp107,500,000,000. Based on the agreement, there are several conditions set and must be fulfilled by the parties before proceed the sale and purchase transaction.

As of the issuance date of the consolidated financial statement, each parties have not been able to fulfill the sales and purchase agreement.

**g. Joint Operation Agreement ("JOA") PTPN IV and PTPN XIV**

On March 24, 2023, the Company and PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XIV) signed a joint operation agreement ("KSO") for the management of PT Perkebunan Nusantara I's (formerly PT Perkebunan Nusantara XIV) Plantation and Palm Oil Mill. In the implementation of KSO, the Company established KSO management organization led by a District Manager from the Company and other personnel consisting of the Company and PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XIV).

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**g. Perjanjian Kerja Sama Operasi ("KSO")  
antara PTPN IV dan PTPN XIV (lanjutan)**

Perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIV) sepakat bahwa selama jangka waktu kerjasama, PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIV) akan memperoleh kompensasi yang terdiri dari:

1. Kompensasi tetap
2. Kompensasi variabel, sebesar 15% dari laba atau rugi bersih KSO untuk PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIV) setiap tahun.

Jangka waktu KSO adalah selama sepuluh tahun dihitung dari tanggal efektif kerja sama dan dapat diperpanjang maupun berakhir selama jangka waktu KSO atau maupun sebelum jangka waktu tersebut berakhir.

**h. Handling Crude Palm Oil (CPO)**

Perusahaan mengadakan perjanjian *handling* CPO dengan PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN"), pihak berelasi untuk pemuatan dan pembongkaran CPO.

Untuk periode sebelas bulan yang berakhir pada 31 Desember 2023, biaya *handling* ke KPBN adalah sebesar Rp6.910.307.400 (2022: Rp10.077.552.940) yang dicatat sebagai biaya jasa pompa sebagai bagian dari beban pemasaran dan penjualan (Catatan 31).

**38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES  
(continued)**

**g. Joint Operation Agreement ("JOA")  
PTPN IV and PTPN XIV (continued)**

The Company and PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XIV) agreed that during the cooperation period, PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XIV) will receive compensation consisting of:

1. Fixed compensation
2. Variable compensation, amounting to 15% of JOA's net profit or loss for PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XIV) each year.

The JOA period is for ten years starting from the effective date of the cooperation and can be extended or terminated during the JOA period or before the period ends.

**h. Handling Crude Palm Oil (CPO)**

The Company entered into handling of CPO agreement with PT Kharisma Pemasaran Bersama Nusantara ("KPBN"), related party, for loading and unloading CPO.

For the eleven-month period ended December 31, 2023, handling fee to KPBN is Rp6,910,307,400 (2022: Rp10,077,552,940), which recorded as pumping fee as part of marketing and selling expense (Note 31).



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**38. KOMITMEN DAN KONTINJENSI (lanjutan)**

**i. Perjanjian Kerja Sama Operasi (“KSO”) antara Perusahaan (sebelumnya PTPN V) dan PTPN I (sebelumnya PTPN XII)**

Pada tanggal 20 Mei 2022, Perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XII) menandatangani perjanjian Kerja Sama Operasi (“KSO”) atas pengelolaan Kebun, Pabrik dan Emplasemen dengan luas 3.851,69 Ha di areal HGU Kebun Kalisat Jampit dan Kebun Blawan di Bondowoso, Jawa Timur. Perjanjian KSO tersebut akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2031.

Sesuai dengan perjanjian, PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XII) akan menyediakan kebun-kebun KSO untuk dimanfaatkan sehubungan dengan KSO, sedangkan Perusahaan akan membiayai 100% biaya investasi. Selain itu, kedua belah pihak sepakat untuk membiayai masing-masing 50% biaya eksploitasi sejak 1 Januari 2022, sampai dengan tanggal 31 Mei 2022 dan membiayai masing-masing 50% biaya eksploitasi selama KSO mengalami defisit arus kas. Selanjutnya, para pihak sepakat atas kompensasi masing-masing sebesar 70% untuk Perusahaan dan 30% untuk PT Perkebunan Nusantara I (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XII) dari laba sebelum pajak penghasilan KSO.

Untuk periode dari tanggal 1 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023, Perusahaan telah menyalurkan pendanaan untuk kebutuhan investasi tanaman belum menghasilkan sebesar Rp56.841.237.941 (2022: Rp20.612.204.907) yang dicatat sebagai aset tidak lancar lainnya (Catatan 16).

**38. COMMITMENTS AND CONTINGENCIES (continued)**

**i. Joint Operation Agreement (“JOA”) The Company (formerly PTPN V) and PTPN I (formerly PTPN XII)**

On May 20, 2022, the Company and PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XII) signed a Joint Operation Agreement (“JOA”) for the management of estate, factories and emplacements with an area of 3,851.69 Ha in the HGU area of Kalisat Jampit Gardens and Blawan Gardens in Bondowoso, East Java. The JOA will expire on December 31, 2031.

In accordance with the agreement, PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XII) will provide the JOA estates for use in connection with the JOA, while the Company will fund 100% of the investment cost. In addition, both parties agreed to finance 50%, respectively of the exploitation costs from January 1, 2022, until May 31, 2022 and finance 50%, respectively of the exploitation costs each as long as the JOA experiences a cash flow deficit. Furthermore, the parties agreed on compensation of 70% for the Company and 30% for PT Perkebunan Nusantara I (formerly PT Perkebunan Nusantara XII), respectively from the JOA's profit before income tax.

For the period from January 1, 2023 to December 31, 2023, the Company has channeled funding for investment needs for immature plantations amounting to Rp56,841,237,941 (2022: Rp20,612,204,907) which is recorded as other non-current assets (Note 16).

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**39. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM YANG SIGNIFIKAN**

**39. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS**

Entitas/ Entity	Kasus/ Case	Para Pihak/ The Parties	Objek/ Object	Status/ Status
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara III) / The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara III)	Sengketa Tanah Kebun Sarang Giting 23/Pdt.G/2022/PN Srh / Land Dispute Sarang Giting Estate 23/Pdt.G/2022/PN Srh	Perusahaan sebagai tergugat dan ahli waris Abidan Sitorus sebagai penggugat / The company as the defendant and the heirs of Abidan Sitorus as the plaintiff	Tanah 3.678 m <sup>2</sup> milik eks PTPN III Spin-Off Kebun Sarang Giting / Land 3,678 m <sup>2</sup> owned by eks PTPN III Spin-Off Sarang Giting Estate	Perkara di tingkat Pengadilan Negeri Sei Rampah telah dimenangkan oleh Perusahaan, namun penggugat mengajukan banding ke pengadilan tinggi medan / The case at the Sei Rampah District Court level was won by the Company, but the plaintiff filed an appeal to the Medan High Court
Perusahaan/ The Company	Sengketa Tanah Kebun Mandailing Natal 114/Pdt.G/2022/PN-Mdl / Land Dispute Mandailing Natal Estate 114/Pdt.G/2022/PN-Mdl	Perusahaan sebagai tergugat dan H. Khairunedi Lubis sebagai penggugat / The company as the defendant and H. Khairunedi Lubis as the plaintiff	Tanah 66 Ha milik PTPN IV Kebun Mandailing Natal / Land 66 Ha owned by PTPN IV Mandailing Natal Estate	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, areal dikuasi Perusahaan dan proses pengajuan kasasi dari H. Khairunedi Lubis dan kawan-kawan masih berlangsung / As of the issuance date of these consolidated financial statements, the area still controlled by the Company and the cassation process filed by H. Khairunedi Lubis is still ongoing.
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara V) / The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V)	Pemerintah daerah Siak telah melakukan wanprestasi kepada Perusahaan / Local Government Siak had breached to the Company	Pemerintah Daerah Siak sebagai tergugat dan Perusahaan sebagai penggugat / Local Government Siak as the defendant and the Company as the plaintiff	Uang muka kerjasama antara Perusahaan dengan Pemerintah daerah Siak untuk pembangunan kebun masyarakat sebesar Rp33.200.506.674 / advance payment between the company and the Siak local government for the development of community gardens amounts to Rp33,200,506,674	Mahkamah Agung Republik Indonesia menerbitkan Putusan No. 643/PK/PDT/2017 Putusan tersebut menerima dan mengabulkan gugatan Perusahaan dan menyatakan Pemerintah Siak telah melakukan wanprestasi Berdasarkan Perjanjian No. 5/HKM/BA/10/V/2020, piutang sebesar Rp33.200.506.674 akan dibayarkan Pemerintah Daerah Siak secara bertahap selama 8 tahun anggaran dimulai tahun 2021 sampai dengan tahun 2028. Pada tahun 2022, Pemda Siak telah membayar sebesar Rp3.885.786.664 (2021: Rp6.000.000.000). Selanjutnya, pada tahun 2022 sampai 2028 Pemda Siak akan membayar sebesar Rp3.885.786.664 pada setiap tahun anggaran / The Supreme Court of the Republic of Indonesia issued decision No. 643/PK/PDT/2017. The decision accepted and granted the Company's lawsuit and stated that the Government of Siak had breached. Based on Agreement No. 5/HKM/BA/10/V/2020, receivable amounting to Rp33,200,506,674 will be paid by the Local Government Siak in installment over 8 fiscal years starting from 2021 to 2028. In 2022, the Local Government Siak paid Rp3,885,786,664 (2021: Rp6,000,000,000). Furthermore, in 2022 to 2028 the Local Government Siak will pay Rp3,885,786,664 in each fiscal year.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**39. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM YANG  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**39. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS  
(continued)**

Entitas/ Entity	Kasus/ Case	Para Pihak/ The Parties	Objek/ Object	Status/ Status
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara V)/ The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara V)	Gugatan perdata dari Koperasi Sawit Makmur ("KOPSA M") perkara No. 99/PDT.G/2019/PN.BKN/ Civil lawsuit from Koperasi Sawit Makmur ("KOPSA M") case No. 99/PDT.G/2019/PN.BKN	KOPSA M sebagai penggugat dan Perusahaan sebagai tergugat/ KOPSA M as plaintiff and Company as defendant	Perusahaan merupakan tergugat kerugian materiil KOPSA M sebesar Rp129,980,911,500 dikarenakan ketidaksepakatan dalam pembangunan kebun pada lahan seluas 1.650 ha, yang terletak di Provinsi Riau/ The Company is a defendant to a lawsuit regarding material loss amounted to Rp129,980,911,500 due to disagreement in development estate on an area of 1,650 ha, which located at Riau Province.	KOPSA M mengajukan pencabutan permohonan Kasasi melalui Pengadilan Negeri Bangkinang pada tanggal 3 Juni 2021. Sampai dengan tanggal penyelesaian laporan ini, Perusahaan belum menerima tindak lanjut permohonan tersebut dari Mahkamah Agung/ KOPSA M filed the revocation of the Cassation application through the Bangkinang District Court on June 3, 2021. As of the completion date of this report, the Company has not yet received a follow-up on the request from the Supreme Court.
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIII)/ The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara XIII)	Sengketa Tanah Kebun Gunung Emas 18/Pdt.G/2021/PN jo. 2/PDT/2022/PT PTK jo. 2135 K/Pdt/2022 / Land Dispute Gunung Emas 18/Pdt.G/2021/PN jo. 2/PDT/2022/PT PTK jo. 2135 K/Pdt/2022	Perusahaan sebagai penggugat dan Ilu Dkk, BPN Kab. Sanggau sebagai tergugat/ The Company as the defendant and Ilu Dkk, BPN Kab. Sanggau as the plaintiff	Tanah 14,23 Ha milik eks PTPN XIII Afdeling II Kebun Gunung Emas / Land owned by eks PTPN XIII Afdeling II Gunung Emas Estate.	Eks PTPN XIII mengajukan Permohonan Peninjauan Kembali, atas Putusan MA RI Nomor 2135K/PDT/2022 tanggal 28 Juli 2022 kepada Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui Pengadilan Negeri Sanggau dengan sesuai Tanda Terima Memori Peninjauan Kembali nomor : 2/Akta Pdt.PK/2023/PN.Sag/ PTPN XIII has filed a Request for Judicial Review, against the Supreme Court of the Republic of Indonesia Decision Number 2135K/PDT/2022 dated July 28, 2022, to the Supreme Court of the Republic of Indonesia through the Sanggau District Court in accordance with the Receipt of the Review Memorandum number: 2/Akta Pdt.PK/2023/PN.Sag.
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIII)/ The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara XIII)	Sengketa Tanah Kebun Pandawa No. 1/Pdt.G/2019/PN.Tgt jo. 101/PDT/2019/PT SMR Jo. 1404/K /PDT/2020 Jo. 264 PK/PDT/2022 / Land Dispute Pandawa Estate No: 1/Pdt.G/2019/PN.Tgt jo. 101/PDT/2019/PT SMR Jo. 1404/K /PDT/2020 Jo. 264 PK/PDT/2022	PT Pucuk Jaya sebagai penggugat dan Yordan Redan dan Masyarakat Dusun Daet sebagai tergugat/ The Company as the defendant and Yordan Redan and Dusun Daet Community as the plaintiff	Tanah 165,03 Ha milik eks PTPN XIII Kebun Pandawa / Land 165.03 Ha owned by former PTPN XIII Pandawa Estate.	Sampai dengan tanggal diterbitkannya laporan keuangan konsolidasian ini, Perusahaan masih melakukan upaya mediasi. / As of the issuance date of these consolidated financial statements, the mediation process is still ongoing.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**39. TUNTUTAN DAN PERKARA HUKUM YANG  
SIGNIFIKAN (lanjutan)**

**39. SIGNIFICANT CLAIMS AND LITIGATIONS  
(continued)**

Entitas/ Entity	Kasus/ Case	Para Pihak/ The Parties	Objek/ Object	Status/ Status
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIII)/ The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara XIII)	Sengketa Kebun Longkali No. 21/Pdt.G/2022/PN Tgt / Dispute Longkali estate No. 21/Pdt.G/2022/PN Tgt	Marten dkk Sebagai Penggugat, PTPN XIII Sebagai Tergugat, dan BPN Kab. Paser Sebagai Turut Tergugat / Marten and others as Plaintiff, PTPN XIII as Defendant, and BPN Kab. Paser as Defendant	Marten dkk. mengajukan gugatan perdata Perbuatan Melawan Hukum (PMH) atas dugaan penguasaan lahan milik Marten dkk. (para penggugat) oleh PTPN XIII (selaku tergugat) yang selanjutnya dilakukan penebangan dan/atau pembinaan tanam tumbuh / pohon-pohonan tanpa adanya ganti rugi kepada Para Penggugat, dan kemudian tergugat melakukan penanaman pohon karet yang selanjutnya setelah 25 tahun dilakukan penanaman tanaman kelapa sawit di area tanah Para Penggugat tanpa menghiraukan keberatan dan protes dari Para Penggugat / Marten & others filed a civil lawsuit for Unlawful Acts (PMH) over the alleged control of land owned by Marten & others (the plaintiffs) by PTPN XIII (as the defendant) which was then carried out logging and / or destruction of planting / trees without compensation to the Plaintiffs, and then the defendant planted rubber trees further after 25 years of planting oil palm plants in the Plaintiffs' land area regardless of objections and protests of the Plaintiffs.	Menyatakan gugatan Para Pembanding (Marten CS) semula Para Penggugat tidak dapat diterima / Declaring the claim of the Claimants (Marten and others) originally the Plaintiffs inadmissible.
Perusahaan (sebelumnya PT Perkebunan Nusantara XIII)/ The Company (formerly PT Perkebunan Nusantara XIII)	Sengketa Kebun Danau Salak No. 15/G/2021/PTUN.BJM Jo.127/B/2022/PT.TUN.J KT. / Dispute Salak Lake estate No. 15/G/2021/PTUN. BJM Jo.127/B/2022/PT. TUN. JKT	H. Zulwahid dan H. Abdul Hakim selaku Para Penggugat, BPN Kab. Banjar selaku Tergugat, PTPN XIII dan PT Bank Mandiri selaku Para Tergugat Intervensi. / H. Zulwahid and H. Abdul Hakim as Plaintiffs, BPN Kab. Banjar as Defendants, PTPN XIII and PT Bank Mandiri as Intervention Defendants.	Klaim kepemilikan lahan seluas 134 Ha. /land ownership claim of 134 Ha	H. Zulwahid dan H. Abdul Hakim telah mengajukan Permohonan PK dan PTPN XIII pada tanggal 27 Maret 2023 telah menyerahkan kontra memori PK. / H. Zulwahid and H. Abdul Hakim have filed a PK Application and PTPN XIII on March 27, 2023 has submitted a counter-memory of PK.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**40. PENGUKURAN NILAI WAJAR**

Metode dan asumsi praktis berikut ini digunakan untuk mengestimasi nilai wajar untuk setiap aset maupun liabilitas Grup:

- a) Nilai tercatat instrumen keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan kurang lebih sebesar nilai wajarnya. Manajemen berpendapat bahwa nilai tercatat kas dan setara kas, piutang usaha dan lain-lain, kas yang dibatasi penggunaannya, utang usaha dan lain-lain dan biaya masih harus dibayar, mendekati nilai wajarnya karena bersifat jangka pendek. Nilai tercatat dari liabilitas jangka panjang dengan suku bunga mengambang kurang lebih sebesar nilai wajarnya karena dinilai ulang secara berkala.
- b) Setelah pengakuan awal, piutang lain-lain jangka panjang - plasma yang tidak dikenakan bunga disajikan pada biaya perolehan diamortisasi dengan metode SBE dan tingkat diskonto mengacu kepada suku bunga pinjaman pada saat ini bagi pinjaman yang serupa. Tingkat diskonto tahunan yang digunakan adalah 9,95% untuk tahun yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2023 dan 31 Desember 2022.
- c) Investasi saham biasa yang tidak memiliki kuotasi pasar dengan kepemilikan saham dibawah 20%, dicatat sebesar nilai wajar.
- d) Nilai wajar atas produk agrikultur kelapa sawit dan teh ditentukan pada Level 2 berdasarkan harga pasar terkait yang diterapkan terhadap estimasi volume produk.
- e) Nilai wajar tanah ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai.
- f) Nilai wajar properti investasi ditentukan dengan menggunakan metode perbandingan harga pasar. Hal ini berarti penilaian yang dilakukan oleh penilai didasarkan pada harga pasar aktif, yang disesuaikan secara signifikan untuk perbedaan pada sifat, lokasi dan kondisi dari tanah yang dinilai.

**40. FAIR VALUE MEASUREMENT**

The following methods and assumptions are practical to be used to estimate the fair value of each asset and liabilities of the Group:

- a) The carrying values of financial instruments presented in the statements of financial position approximate their fair values. Management believes that the carrying values of cash and cash equivalents, trade and other receivables, restricted cash, trade and other payables and accrued expenses approximate their fair values due to their short-term maturity. The carrying amounts of long-term liabilities with floating interest rates approximate their fair values as they are reassessed frequently.
- b) Subsequent to initial recognition, other long-term receivables - plasma which are non-interest bearing, were presented at amortized cost using EIR and the discount rates used is referring to current market lending rates for similar types of lending. The applied annual discount rates is 9.95% for the year ended December 31, 2023 and December 31, 2022.
- c) Ordinary shares investment that do not have market quotation below 20%, are recorded at fair value.
- d) The fair values of the oil palm and tea agricultural produce are determined at Level 2 based on the applicable market price applied to the estimated volume of the produce.
- e) The fair value of land was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the valuer are based on active market prices, significantly adjusted for difference in the nature, location or condition of the specific land.
- f) The fair value of investment property was determined by using market comparable method. This means that valuations performed by the valuer are based on active market prices, significantly adjusted for difference in the nature, location or condition of the specific land.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN**

Grup menghadapi risiko keuangan yang timbul dari kegiatan operasional dan penggunaan instrumen keuangan. Risiko keuangan utama meliputi risiko suku bunga, risiko pasar (termasuk risiko mata uang dan risiko harga komoditas), risiko kredit dan risiko likuiditas. Direksi menelaah dan menyetujui kebijakan dan prosedur untuk mengelola masing-masing risiko tersebut yang dijelaskan dengan lebih rinci sebagai berikut:

**Risiko Tingkat Suku Bunga**

Risiko tingkat suku bunga adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan instrumen keuangan Grup akan berfluktuasi karena perubahan tingkat suku bunga pasar.

Risiko tingkat suku bunga Grup terutama timbul dari utang jangka panjang. Pinjaman pada berbagai suku bunga menimbulkan risiko suku bunga atas nilai wajar kepada Grup. Tidak terdapat pinjaman Grup yang dikenakan suku bunga tetap.

Saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko suku bunga.

Analisis sensitivitas untuk risiko tingkat suku bunga

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika tingkat suku bunga Grup sebesar 10% lebih rendah/tinggi, dengan semua variabel lain konstan, laba sebelum manfaat pajak penghasilan untuk Periode yang berakhir pada tanggal tersebut adalah sebesar Rp353.132.945.076 lebih tinggi/rendah.

**Risiko Mata Uang**

Risiko mata uang merupakan risiko bahwa nilai wajar atau arus kas masa depan suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi yang disebabkan oleh perubahan nilai tukar mata uang. Risiko Grup atas fluktuasi nilai tukar mata uang terutama timbul dari penempatan kas dan setara kas dalam mata uang asing.

Saat ini, Grup tidak memiliki kebijakan lindung nilai yang formal untuk mengelola risiko mata uang.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES**

*The Group is exposed to financial risks arising from its operations and the use of financial instruments. The key financial risks include interest rate risk, market risk (including foreign currency risk and commodity price risk), credit risk and liquidity risk. The Board of Director reviews and agrees policies and procedures for the management of these risks, which are described in more detail as follows:*

**Interest Rate Risks**

*Interest rate risk is the risks that the fair value or future cash flows of the Group's financial instruments will fluctuate because of changes in market interest rates.*

*The Groups's exposure to interest rate risk mainly arises from bank loan. Loan with various interest rate inflict interest rate risk on the fair value to the Group. There is no loan at fixed rates.*

*Currently, the Group does not have a formal hedging policy for interest rate exposures.*

Sensitivity analysis for rate risk

*As of December 31, 2023, if the interest rate of the Group amounted to 10% lower/higher, with all other variables constant, the income before income tax benefit for the period then ended amounted to Rp353,132,945,076 higher/lower.*

**Currency Risk**

*Currency risk is the risk that the fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in currency exchange rates. Risk of the Group against fluctuations in currency values arises mainly from placement of cash and cash equivalent in foreign currency.*

*Currently, the Group does not have a formal hedging policy to manage currency risk.*

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**41. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Mata Uang (lanjutan)**

Analisis sensitivitas untuk risiko nilai mata uang asing

Pada tanggal 31 Desember 2023, jika nilai tukar Rupiah terhadap Dolar AS melemah/menguat sebanyak 10% dengan semua variabel konstan, laba sebelum beban pajak untuk periode yang berakhir pada tanggal tersebut sebesar Rp67.060.788.950 lebih rendah/tinggi, terutama sebagai akibat kerugian/keuntungan translasi kas dan setara kas, piutang usaha dan uang muka pelanggan dalam Dolar AS, yang secara kolektif dalam posisi aset moneter neto.

**Risiko Harga Komoditas**

Risiko harga komoditas adalah risiko dimana nilai wajar atau arus kas masa depan dari suatu instrumen keuangan akan berfluktuasi dikarenakan perubahan harga komoditas (selain yang timbul dari risiko tingkat suku bunga atau risiko mata uang asing), apakah perubahan ini disebabkan oleh faktor-faktor khusus untuk instrumen keuangan secara individu atau faktor yang mempengaruhi semua instrumen keuangan yang sama yang diperdagangkan di pasar.

Risiko harga komoditas Grup timbul dari pembelian tandan buah segar dan penjualan penjualan minyak kelapa sawit, minyak inti sawit, inti sawit dan produk teh. Harga bahan baku dan barang jadi dapat berfluktuasi secara signifikan tergantung pada situasi pasar dan faktor-faktor lain seperti cuaca, kebijakan pemerintah, tingkat permintaan dan penawaran di pasar dan lingkungan ekonomi global.

Pada saat ini, Grup tidak mempunyai kebijakan formal lindung nilai atas risiko harga komoditas.

**Risiko Kredit**

Risiko kredit yang dihadapi oleh Grup berasal dari kredit yang diberikan kepada pelanggan teh, piutang plasma dan penempatan rekening koran dan deposito pada bank.

Selain dari pengungkapan di bawah ini, Grup tidak memiliki konsentrasi risiko kredit.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES  
AND POLICIES (continued)**

**Currency Risk (continued)**

Sensitivity analysis for foreign currency risk

As of December 31, 2023, if the Rupiah exchange rate against the US Dollar weakened / strengthened by 10% with all variables constant, profit before tax expense for the period then ended amounted to Rp67,060,788,950 lower/higher, mainly as a result of cash translation losses/gains and cash equivalents, trade receivables and customer advances in US Dollars, which are collectively in a position of net monetary assets.

**Commodity Price Risk**

Commodity price risk is the risk that fair value or future cash flows of a financial instrument will fluctuate because of changes in commodity prices (other than those arising from interest rate risk or foreign currency risk), whether those changes are caused by factors specific to the individual financial instrument or factors affecting all similar financial instruments traded in the market.

The Group's exposure to commodity price risk arises from its purchase of fresh fruit bunches and sales of palm oil, palm kernel oil, palm kernel and tea products. Prices of raw material and end products may fluctuate significantly depending on the market situation and factors such as weather, government policy, level of demand and supply in the market and the global economic environment.

Currently, the Group does not have a formal hedging policy for commodity price exposures.

**Credit Risk**

The Group has credit risk arising from the credits granted to the customers of tea, plasma receivable and placement of current accounts and deposits in the banks.

Other than as disclosed below, the Group has no concentration of credit risk.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Kredit (lanjutan)**

Kas dan Setara Kas

Risiko kredit atas penempatan rekening koran dan deposito dikelola oleh manajemen sesuai dengan kebijakan Grup. Investasi atas kelebihan dana dibatasi untuk tiap-tiap bank dan kebijakan ini dievaluasi setiap tahun oleh dewan direksi. Batas tersebut ditetapkan untuk meminimalkan risiko konsentrasi kredit sehingga mengurangi kemungkinan kerugian akibat kebangkrutan bank-bank tersebut.

Piutang Usaha

Terdapat kebijakan untuk memastikan penjualan produk hanya dilakukan kepada pelanggan yang dapat dipercaya dengan rekam jejak atau sejarah kredit yang baik. Merupakan kebijakan Grup bahwa semua pelanggan yang akan melakukan pembelian secara kredit harus melalui prosedur verifikasi kredit. Untuk penjualan ekspor, Grup mensyaratkan pembayaran saat penyerahan dokumen penjualan. Grup memiliki kebijakan yang membatasi jumlah kredit untuk tiap-tiap pelanggan dan saldo piutang dipantau secara terus menerus untuk mengurangi risiko piutang tak tertagih.

Ketika pelanggan gagal melakukan pelunasan sesuai dengan syarat pembayaran, Grup akan menghubungi pelanggan untuk menindaklanjuti piutang yang telah lewat jatuh tempo. Jika pelanggan tidak melunasi piutang yang telah jatuh tempo dalam jangka waktu yang telah ditentukan, Grup akan menempuh jalur hukum. Sesuai dengan evaluasi oleh Grup, penyisihan spesifik dapat dibuat jika utang dianggap tidak tertagih. Untuk menekan risiko kredit, Grup akan menghentikan penyaluran semua produk kepada pelanggan yang terlambat dan/atau gagal bayar.

Piutang Plasma

Piutang plasma merupakan uang muka kepada petani plasma atas dana talangan untuk angsuran pinjaman petani plasma ke bank serta biaya-biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan perkebunan plasma yang untuk sementara dibiayai sendiri oleh Perusahaan, termasuk pinjaman pupuk serta sarana produksi pertanian lainnya kepada petani. Biaya-biaya ini akan ditagihkan kembali kepada petani plasma.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

**Credit Risk (continued)**

Cash and Cash Equivalents

*Credit risk arising from placements of current accounts and deposits is managed in accordance with the Group's policy. Investments of surplus funds are limited for each banks and reviewed annually by the board of directors. Such limits are set to minimize the concentration of credit risk and therefore mitigate financial loss through potential failure of the banks.*

Trade Receivables

*The Group has policies in place to ensure that sales of products are made only to creditworthy customers with proven track records or good credit history. It is the Group's policy that all customers who wish to trade on credit terms are subject to credit verification procedures. For export sales, the Group requires cash against the presentation of documents of title. The Group has policies that limit the amount of credit exposure to any particular customer and receivable balances are monitored on an ongoing basis to reduce the Group's exposure to bad debts.*

*When a customer fails to make payment within the granted credit terms, the Group will contact the customer to act on overdue receivable. If the customer does not settle the overdue receivable within a reasonable time, the Group will proceed with legal actions. Depending on the Group's assessment, specific provisions may be made if the debt is deemed uncollectible. To mitigate its credit risk, the Group will cease the supply of all products to customers in the event of late payment and/or default.*

Plasma Receivables

*Plasma receivables represent advance to plasma farmer on the bailout of farmer's installment loan from bank and costs incurred for plasma plantation development which include costs for plasma plantations temporarily self funded by the Company, including fertilizer used and other agriculture production facility to the farmers. These costs will be charged back to plasma farmers.*



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Kredit (lanjutan)**

Piutang Plasma (lanjutan)

Grup melalui pola kemitraan juga memberikan bantuan teknis kepada petani plasma untuk mempertahankan produktivitas perkebunan plasma yang merupakan bagian dari strategi Grup untuk mempererat hubungan dengan petani plasma yang diharapkan akan dapat memperlancar pelunasan piutang plasma.

Pada tanggal pelaporan, eksposur maksimum Grup terhadap risiko kredit adalah sebesar nilai tercatat masing-masing kategori aset keuangan yang disajikan pada laporan posisi keuangan konsolidasian.

**Risiko Likuiditas**

Risiko likuiditas adalah risiko dimana Grup akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban keuangan oleh karena keterbatasan dana.

Grup mengelola profil likuiditasnya untuk membiayai belanja modal dan melunasi utang yang jatuh tempo dengan menyediakan kas dan bank.

Grup secara teratur mengevaluasi proyeksi arus kas proyeksi dan aktual dan terus menerus memantau tanggal jatuh tempo aset dan liabilitas keuangan.

**41. FINANCIAL RISK MANAGEMENT OBJECTIVES AND POLICIES (continued)**

**Credit Risk (continued)**

Plasma Receivables (continued)

The Group through partnership scheme also provides technical assistance to the plasma farmers to maintain the productivity of plasma plantations as part of the Group's strategy to strengthen relationship with plasma farmers which is expected to improve the repayments of plasma receivables.

At the reporting date, the Group's maximum exposure to credit risk is represented by the carrying value of each class of financial assets presented in the consolidated statement of financial position.

**Liquidity Risk**

Liquidity risk is the risk that the Group will have difficulty in fulfilling its financial obligation due to limited availability of funds.

The Group manages its liquidity profile to be able to finance its capital expenditures and service its maturing debts by maintaining sufficient cash and bank.

The Group regularly evaluates its projected and actual cash flow information and continuously assesses the maturity date of financial assets and liabilities.

31 Desember 2023/December 31, 2023

	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Year	Di atas 5 Tahun/ More Than 5 Years	Total/ Total	
Utang bank jangka pendek	7.500.000.000	-	-	7.500.000.000	Short term debt
Utang usaha	3.344.473.517.052	-	-	3.344.473.517.052	Trade payables
Utang lain-lain	62.623.642.156	313.118.210.779	1.270.365.312.304	1.646.107.165.239	Other Payables
Akrual	1.013.229.347.438	-	-	1.013.229.347.438	Accrued
Utang bank jangka panjang	31.034.923.455.712	21.035.281.718.517	5.750.557.872.571	57.820.763.046.800	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	63.647.144.037	88.408.132.268	629.538.784	152.684.815.090	Lease liabilities
<b>Total</b>	<b>35.526.397.106.395</b>	<b>21.436.808.061.564</b>	<b>7.021.552.723.659</b>	<b>63.984.757.891.618</b>	<b>Total</b>

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**41. TUJUAN DAN KEBIJAKAN MANAJEMEN RISIKO  
KEUANGAN (lanjutan)**

**Risiko Likuiditas (lanjutan)**

31 Desember 2022/December 31, 2022

	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Year	Di atas 5 Tahun/ More Than 5 Years	Total/ Total	
Utang bank jangka pendek	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	Short term debt
Utang usaha	2.774.091.980.257	-	-	2.774.091.980.257	Trade payables
Utang lain-lain	1.113.593.495.198	335.161.370.393	4.292.828.315.674	5.741.583.181.265	Other Payables
Akrual	2.100.487.902.588	-	-	2.100.487.902.588	Accrued
Utang bank jangka panjang	4.340.315.035.570	46.809.896.260.752	12.469.493.305.513	63.619.704.601.835	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	81.709.677.186	51.161.646.958	1.259.077.568	134.130.401.712	Lease liabilities
<b>Total</b>	<b>10.412.198.090.799</b>	<b>47.196.219.278.103</b>	<b>16.763.580.698.755</b>	<b>74.371.998.067.657</b>	<b>Total</b>

31 Desember 2021/December 31, 2021

	Kurang dari 1 Tahun/ Less Than 1 Year	1 - 5 Tahun/ 1 - 5 Year	Di atas 5 Tahun/ More Than 5 Years	Total/ Total	
Utang usaha	2.100.396.222.091	-	-	2.100.396.222.091	Trade payables
Utang lain-lain	668.195.767.307	208.545.891.338	1.856.513.565.728	2.733.255.224.373	Other Payables
Akrual	1.953.598.963.067	-	-	1.953.598.963.067	Accrued
Utang bank jangka panjang	4.772.738.867.631	21.822.540.733.228	7.350.430.128.999	33.945.709.729.858	Long-term bank loans
Liabilitas sewa	79.144.598.250	50.774.398.893	-	129.918.997.143	Lease liabilities
<b>Total</b>	<b>9.574.074.418.346</b>	<b>22.081.861.023.459</b>	<b>9.206.943.694.727</b>	<b>40.862.879.136.532</b>	<b>Total</b>

**42. PERUBAHAN PADA LIABILITAS YANG TIMBUL  
DARI AKTIVITAS PENDANAAN**

Perubahan pada liabilitas yang timbul dari aktivitas pendanaan pada laporan arus kas Perusahaan adalah sebagai berikut:

**42. CHANGES IN LIABILITY ARISING FROM  
FINANCING ACTIVITIES**

Changes in liabilities arising from financing activities in the consolidated statement of cash flows are as follows:

	1 Januari 2023/ January 1, 2023	Arus Kas/ Cash Flow	Lain-lain/ Others	31 Desember 2023 December 31, 2023	
Utang bank jangka pendek	2.000.000.000	5.500.000.000	-	7.500.000.000	Short-term bank loan
Liabilitas sewa	116.699.903.833	(132.046.254.201)	165.289.816.444	149.943.466.076	Lease liabilities
Utang bank jangka panjang	25.890.879.381.262	1.010.638.601.729	(185.357.594.842)	26.716.160.388.149	Long-term debts
<b>Total liabilitas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>26.009.579.285.095</b>	<b>884.092.347.528</b>	<b>(20.067.778.398)</b>	<b>26.873.603.854.225</b>	<b>Total liabilities from financing activities</b>
	1 Januari 2022/ January 1, 2022	Arus Kas/ Cash Flow	Lain-lain/ Others	31 Desember 2022/ December 31, 2022	
Utang bank jangka pendek	-	2.000.000.000	-	2.000.000.000	Short-term bank loan
Liabilitas sewa	120.891.448.894	(96.848.102.086)	92.656.557.025	116.699.903.833	Lease liabilities
Utang bank jangka panjang	27.793.394.849.693	(2.416.267.593.498)	513.752.125.067	25.890.879.381.262	Long-term debts
Utang lain-lain pihak berelasi	321.712.044.864	35.128.646.213	35.737.751.336	392.578.442.413	Other payables related parties
<b>Total liabilitas dari aktivitas pendanaan</b>	<b>28.235.998.343.451</b>	<b>(2.475.987.049.371)</b>	<b>642.146.433.428</b>	<b>26.402.157.727.508</b>	<b>Total liabilities from financing activities</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**42. PERUBAHAN PADA LIABILITAS YANG TIMBUL DARI AKTIVITAS PENDANAAN (lanjutan)**

Kolom "lain-lain" mencakup utamanya penyesuaian atas liabilitas sewa terkait dengan penambahan aset hak-guna, penangguhan pembayaran bunga pinjaman yang dikreditkan kepada utang bank jangka panjang, dan kenaikan utang bank jangka panjang melalui amortisasi biaya perolehan pinjaman.

**43. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF**

Standar akuntansi yang telah diterbitkan sampai tanggal penerbitan laporan keuangan konsolidasian Grup namun belum berlaku efektif diungkapkan berikut ini. Manajemen bermaksud untuk menerapkan standar-standar tersebut yang dipertimbangkan relevan terhadap Grup pada saat efektif, dan dampaknya terhadap posisi dan kinerja keuangan konsolidasian Grup masih diestimasi pada tanggal 31 Mei 2024.

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024**

Pilar Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini memberikan persyaratan dan pedoman bagi entitas untuk menerapkan standar akuntansi keuangan yang benar dalam menyusun laporan keuangan bertujuan umum. Akan ada 4 (empat) standar akuntansi keuangan yang saat ini diterapkan di Indonesia, yaitu:

1. Pilar 1 Standar Akuntansi Keuangan Internasional,
2. Pilar 2 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia (PSAK),
3. Pilar 3 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Swasta/Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik, dan
4. Pilar 4 Standar Akuntansi Keuangan Indonesia untuk Entitas Mikro Kecil dan Menengah.

Standar Akuntansi Keuangan Internasional

Standar ini merupakan adopsi penuh dari *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") yang diterjemahkan kata demi kata dan tidak ada modifikasi dari Standar IFRS, termasuk tanggal efektifnya. Entitas yang memenuhi persyaratan dapat menerapkan standar ini, sejak tanggal efektif.

**42. CHANGES IN LIABILITY ARISING FROM FINANCING ACTIVITIES (continued)**

The "others" column include mostly adjustment to lease liability due to addition of right of use asset deferral of interest payment credited to long term debt, and increase in long term bank loans through amortization of loan issuance cost.

**43. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT YET EFFECTIVE**

The accounting standards that have been issued up to the date of issuance of the Group's consolidated financial statements, but not yet effective are disclosed below. The management intends to adopt these standards that are considered relevant to the Group when they become effective, and the impact to the consolidated financial position and performance of the Group is still being estimated as of May 31, 2024.

**Effective beginning on or after January 1, 2024**

Financial Accounting Standards Pillars

These standards provides requirements and guidelines for entities to apply the correct financial accounting standards in preparing general purpose financial statements. There will be 4 (four) financial accounting standards that are currently applied in Indonesia, namely:

1. Pillar 1 International Financial Accounting Standards,
2. Pillar 2 Indonesian Financial Accounting Standards (PSAK),
3. Pillar 3 Indonesian Financial Accounting Standards for Private Entities/Indonesian Financial Accounting Standards for Entities without Public Accountability, and
4. Pillar 4 Indonesian Financial Accounting Standards for Micro Small and Medium Entities.

International Financial Accounting Standard

This standard is a full-adoption of *International Financial Reporting Standards* ("IFRS") which is translated in a word-for-word basis and there is no modifications from IFRS Standards, including the effective date. Entities that meet the requirements can apply this standard, from the effective date.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**43. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH  
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF  
(lanjutan)**

**Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari  
2024 (lanjutan)**

Nomenklatur Standar Akuntansi Keuangan

Standar ini mengatur penomoran baru untuk standar akuntansi keuangan yang berlaku di Indonesia yang diterbitkan oleh DSAK IAI.

Amandemen PSAK 1: Liabilitas Jangka Panjang dengan Kovenan

Amandemen ini menentukan persyaratan untuk mengklasifikasikan suatu liabilitas sebagai jangka pendek atau jangka panjang dan menjelaskan:

- 1) hal yang dimaksud sebagai hak untuk menanggguhkan pelunasan,
- 2) hak untuk menanggguhkan pelunasan harus ada pada akhir periode pelaporan,
- 3) klasifikasi tersebut tidak dipengaruhi oleh kemungkinan entitas akan menggunakan haknya untuk menanggguhkan liabilitas, dan
- 4) hanya jika derivatif melekat pada liabilitas konversi tersebut adalah suatu instrumen ekuitas, maka syarat dan ketentuan dari suatu liabilitas konversi tidak akan berdampak pada klasifikasinya.

Selain itu, persyaratan telah diperkenalkan untuk mewajibkan pengungkapan ketika suatu kewajiban timbul dari pinjaman perjanjian diklasifikasikan sebagai tidak lancar dan hak entitas untuk menunda penyelesaian bergantung pada kepatuhan terhadap persyaratan di masa depan dalam waktu dua belas bulan.

Amandemen tersebut berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024 secara retrospektif dengan penerapan dini diperkenankan.

Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik

Amandemen PSAK 73 Sewa menetapkan persyaratan yang digunakan penjual-penyewa dalam mengukur kewajiban sewa yang timbul dalam transaksi jual beli dan sewa-balik, untuk memastikan penjual-penyewa tidak mengakui jumlah setiap keuntungan atau kerugian yang terkait dengan hak guna yang dipertahankan.

**43. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT  
YET EFFECTIVE (continued)**

**Effective beginning on or after January 1, 2024  
(continued)**

Financial Accounting Standards Nomenclature

This standard regulates the new numbering for financial accounting standards applicable in Indonesia issued by DSAK IAI.

Amendment of PSAK 1: Non-current Liabilities with Covenants

The amendments specify the requirements for classifying liabilities as current or non-current and clarify:

- 1) what is meant by a right to defer settlement,
- 2) the right to defer must exist at the end of the reporting period,
- 3) classification is not affected by the likelihood that an entity will exercise its deferral right, and
- 4) only if an embedded derivative in a convertible liability is an equity instrument would the terms and conditions of a liability will not impact its classification.

In addition, a requirement has been introduced to require disclosure when a liability arising from a loan agreement is classified as non-current and the entity's right to defer settlement is contingent on compliance with future covenants within twelve months.

The amendments are effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024 retrospectively with early adoption permitted.

The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

Amendment of PSAK 73: Lease liability in a Sale and Leaseback

The amendment to PSAK 73 Leases specifies the requirements that a seller-lessee uses in measuring the lease liability arising in a sale and leaseback transaction, to ensure the seller-lessee does not recognise any amount of the gain or loss that relates to the right-of-use it retains.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**43. STANDAR AKUNTANSI YANG TELAH  
DISAHKAN NAMUN BELUM BERLAKU EFEKTIF  
(lanjutan)**

Mulai efektif pada atau setelah tanggal 1 Januari 2024 (lanjutan)

Amandemen PSAK 73: Liabilitas Sewa dalam Jual Beli dan Sewa-balik (lanjutan)

Amandemen berlaku secara retrospektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan. Grup saat ini sedang menilai dampak dari amandemen tersebut untuk menentukan dampaknya terhadap pelaporan keuangan Grup.

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60: Pengaturan Pembiayaan Pemasok

Amandemen PSAK 2 dan PSAK 60 mengklarifikasi karakteristik pengaturan pembiayaan pemasok dan mensyaratkan pengungkapan tambahan atas pengaturan pembiayaan pemasok tersebut. Persyaratan pengungkapan dalam amandemen ini dimaksudkan untuk membantu pengguna laporan keuangan dalam memahami dampak pengaturan pembiayaan pemasok terhadap liabilitas, arus kas, dan eksposur terhadap risiko likuiditas suatu entitas.

Amandemen ini akan berlaku efektif untuk periode pelaporan tahunan yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2024. Penerapan dini diperkenankan, namun perlu diungkapkan. Amandemen tersebut diperkirakan tidak mempunyai dampak material terhadap laporan keuangan Grup.

**44. AKTIVITAS YANG TIDAK MEMPENGARUHI  
ARUS KAS**

Informasi tambahan aktivitas yang tidak mempengaruhi arus kas adalah sebagai berikut:

	<u>31 Desember 2023/ December 31, 2023</u>	<u>31 Desember 2022/ December 31, 2022</u>
Penambahan aset tetap melalui revaluasi tanah	1.300.877.537.142	-
Perubahan aset hak-guna melalui penambahan liabilitas sewa dan terminasi kontrak sewa	165.289.816.444	95.201.159.303

**43. ACCOUNTING STANDARDS ISSUED BUT NOT  
YET EFFECTIVE (continued)**

Effective beginning on or after January 1, 2024 (continued)

Amendment of PSAK 73: Lease liability in a Sale and Leaseback (continued)

The amendment applies retrospectively to annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Earlier application is permitted. The Group is currently assessing the impact of the amendment to determine the impact they will have on the Group's financial reporting.

Amendment of PSAK 2 and PSAK 60: Supplier Finance Arrangements

The amendments to PSAK 2 and PSAK 60 clarify the characteristics of supplier finance arrangements and require additional disclosure of such arrangements. The disclosure requirements in the amendments are intended to assist users of financial statements in understanding the effects of supplier finance arrangements on an entity's liabilities, cash flows and exposure to liquidity risk.

The amendments will be effective for annual reporting periods beginning on or after January 1, 2024. Early adoption is permitted, but will need to be disclosed. The amendments are not expected to have a material impact on the Group's financial statements.

**44. ACTIVITIES NOT AFFECTING CASH FLOW**

Supplementary information on non-cash activities are as follows:

Addition of fixed assets through land revaluation  
Changes of right-of-use asset through addition of lease liabilities and termination of lease contract

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN**

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara PTPN I dengan PTPN IV

Pada tanggal 27 Desember 2023, Perusahaan dan PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I") telah menandatangani perjanjian Kerja Sama Operasi ("KSO") atas pengelolaan Kebun, Pabrik Kelapa Sawit dan Pabrik Pengolahan Inti Sawit milik PTPN I termasuk optimalisasi lahan yang akan ditanami Kelapa Sawit dan lahan kebun karet yang akan dikonversi menjadi kebun kelapa sawit.

Jangka waktu KSO adalah selama 25 tahun terhitung sejak Tanggal Efektif Kerja Sama dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan tertulis para pihak selama memenuhi ketentuan yang berlaku dalam pelaksanaan optimalisasi aset tetap.

Perusahaan dan PTPN I sepakat bahwa selama jangka waktu kerjasama, terdapat bagi hasil dan imbalan dari pelaksanaan kerja sama yang dapat diterima masing-masing pihak, yaitu:

- 1) Bagi Hasil
  - Imbalan yang diterima oleh para pihak selama jangka waktu kerja sama yang berasal dari laba bersih basis Rencana Kerja Anggaran Perusahaan (RKAP) tahun berjalan dengan proporsi tertentu.
  - Bagi Hasil dibayarkan secara periodik per Triwulan di awal Triwulan berjalan.
- 2) Imbalan atas Penyediaan Aset Tetap dan Fasilitas KSO
  - Imbalan yang diterima oleh PTPN I selama jangka waktu kerja sama atas jasa penyediaan aset tetap dan seluruh fasilitas lainnya milik PTPN I yang dapat dimanfaatkan oleh Perusahaan.
  - Imbalan ini akan dibayarkan satu bulan setelah terbitnya hasil laporan keuangan *audited* masing-masing pihak.
- 3) Bagi Hasil atas Pencapaian Kerja
  - Imbalan yang diterima oleh para pihak selama jangka waktu kerja sama atas upaya penerapan *operational excellence* yang menyebabkan terjadinya kenaikan laba bersih KSO basis Laporan *Audited* KAP bila dibandingkan dengan nilai *baseline* laba bersih yang disepakati oleh para pihak.

**45. EVENT AFTER THE DATE OF REPORT**

Joint Operation Agreement ("JOA") between PTPN I and PTPN IV

On December 27, 2023, the Company and PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I") signed a joint operation agreement ("KSO") for the management of PTPN I's plantations, palm oil mills and palm kernel processing plants including the optimization of land to be planted with palm oil and rubber plantation land to be converted into oil palm plantations.

The KSO period is for 25 years starting from the effective date of the cooperation and can be extended based on the written agreement of the parties as long as it meets the applicable provisions in the implementation of fixed asset optimization.

The Company and PTPN I agreed that during the period of cooperation, there are profit sharing and rewards given to each party for the implementation of cooperation, namely:

- 1) Profit sharing
  - Benefits received by the parties during the period of cooperation derived from net profit based on the Company's Budget (RKAP) for the current year with a certain proportion.
  - Profit sharing is paid periodically per quarter at the beginning of the current quarter.
- 2) Benefits for Provision of Fixed Assets and KSO Facilities
  - Fees received by PTPN I during the period of cooperation for the provision of fixed assets and all other facilities owned by PTPN I that can be utilized by the Company.
  - The fees will be paid once in a month after the publication of the audited financial statements of each parties.
- 3) Profit sharing on Work Achievement
  - Rewards received by each parties during the period of cooperation for the efforts to implement operation excellence that causes an increase in KSO's net profit based on the KAP Audited Report when compared to the baseline value of net profit agreed by the parties.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN  
(lanjutan)**

Perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara  
PTPN I dengan PTPN IV (lanjutan)

- Nilai proporsi bagi hasil atas pencapaian kinerja adalah 75% bagi PTPN I dan 25% bagi Perusahaan dari selisih *baseline* laba bersih yang disepakati sebelumnya.
- Bagi hasil atas pencapaian kinerja hanya akan dibagikan kepada para pihak apabila telah dipenuhi syarat, yaitu:
  - a) Realisasi laba bersih KSO diatas *baseline* laba bersih yang disepakati oleh para pihak di dalam RKAP KSO dengan mengacu kepada Kajian Kelayakan KSO.
  - b) Bagi hasil para pihak yang tertunda tahun sebelumnya dan bagi hasil para pihak dalam tahun berjalan telah terpenuhi seluruhnya.
  - c) Terpenuhi saldo minimum KSO sebesar Rp300.000.000.000.

Pembentukan dan Penetapan Region Head dan  
Senior Executive Vice President (SEVP) Region  
KSO VI & VII

Pada tanggal 1 April 2024 berdasarkan surat No.DPSB/SKPTS/140/2024 sehubungan dengan perjanjian Kerja Sama Operasi (KSO) antara Perusahaan dengan PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I"). Perusahaan membentuk Regional KSO Kelapa Sawit serta melakukan perubahan struktur organisasi.

Penambahan regional KSO pada struktur organisasi tersebut sebagai berikut:

- 1) Regional 6 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 6) dan KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)
- 2) Regional 7 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 2 & 7) dan KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)
- 3) Regional 8 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 8)

**45. EVENT AFTER THE DATE OF REPORT  
(continued)**

Joint Operation Agreement ("JOA") between  
PTPN I and PTPN IV (continued)

- The value of proportion of profit sharing on performance achievement is 75% for PTPN I and 25% for the Company from the previously agreed net profit baseline difference.
- Profit sharing on performance achievement will only be distributed to the parties if the conditions have been met, namely:
  - a) KSO net profit realization above the net profit baseline agreed by the parties in the KSO Budget with the reference to the KSO Feasibility Study.
  - b) The parties' profit sharing pending from previous year and the parties' profit sharing in the current year have been fully fulfilled.
  - c) The KSO minimum balance of Rp300,000,000,000 has been fulfilled.

Establishment and Appointment of Region Head  
and Senior Executive Vice President (SEVP) of  
KSO Region VI & VII

As of April 1, 2024, pursuant to letter No.DPSB/SKPTS/140/2024 in relation to joint operation ("KSO") agreement between the Company and PT Perkebunan Nusantara I ("PTPN I"). The Company established the KSO Regional for palm oil and and made changes to the organizational structure.

The addition of regional KSOs to the organizational structure is as follows:

- 1) Regional 6 KSO, is responsible for KSO Palm Oil – Eks PTPN 1 (Regional 6) and KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)
- 2) Regional 7 KSO, is responsible for KSO Palm Oil – Eks PTPN 1 (Regional 2 & 7) and KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)
- 3) Regional 8 KSO, is responsible for KSO Palm Oil – Eks PTPN 1 (Regional 8)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**45. PERISTIWA SETELAH TANGGAL PELAPORAN  
(lanjutan)**

Pembentukan dan Penetapan Region Head dan Senior Executive Vice President (SEVP) Region KSO VI & VII (lanjutan)

Namun, pada tanggal 30 April 2024 berdasarkan surat No : DPSB/X/257/IV/2024 dan keputusan Surat Keputusan Direksi Perusahaan No.DPSB/SKPTS/149/2024 tanggal 29 April 2024 tentang perubahan hubungan struktur organisasional kerjasama operasi (KSO) yang meliputi pengelolaan kebun kelapa sawit, pabrik kelapa sawit, dan pusat penelitian inti sawit. Perusahaan melakukan perubahan atas penambahan region KSO, sebagai berikut:

- 1) Regional 1, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit Distrik Sei Meranti Tujuh, Distrik Aceh Timur (DATIM), Distrik Jawa Barat (DJABA), dan KSO eks PTPN 1 (Regional 2).
- 2) Regional 2, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 1 & 8)
- 3) Regional 6 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 6) dan KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)
- 4) Regional 7 KSO, bertanggung jawab atas KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 2) dan KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)

Pembentukan dan Penetapan Region Head dan Senior Executive Vice President (SEVP) Region KSO VI & VII

Atas pembentukan Region KSO 6 dan 7, sehubungan dengan Surat Keputusan Direksi PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No.DSDM/SKPRS/R/71/2024 tanggal 30 April 2024 dan No.DSDM/SKPRS/R/71/2024 tanggal 8 Mei 2024, tentang penempatan *Region Head* dan anggota-anggota *Senior Executive Vice President (SEVP)* pada KSO Kelapa Sawit antara Perusahaan dan PTPN I sebagai berikut:

- 1) Syahriadi Siregar sebagai *Region Head Regional 6 KSO*
- 2) T. Zein Ichwan sebagai *SEVP Operation Regional 6 KSO*
- 3) Denny Ramadhan Nasution sebagai *Region Head Regional 7 KSO*
- 4) Darmansyah Siregar sebagai *SEVP Operation Regional 7 KSO*
- 5) Bambang Eko Prasetyo sebagai *SEVP Operation Regional 7 KSO*

**45. EVENT AFTER THE DATE OF REPORT  
(continued)**

*Establishment and Appointment of Region Head and Senior Executive Vice President (SEVP) of KSO Region VI & VII (continued)*

However, as of April 30, 2024, Based on letter No : DPSB/X/257/IV/2024 and the Decree of the Company's Directors No.DPSB/SKPTS/149/2024 dated April 29, 2024 regarding changes in organizational structure for the joint operations (KSO) which included management of oil palm plantations, palm oil mills and palm kernel research centers. The company made changes to the addition of the KSO region, as follows:

- 1) *Regional 1, is responsible for KSO Kelapa Sawit Distrik Sei Meranti Tujuh, Distrik Aceh Timur (DATIM), Distrik Jawa Barat (DJABA), and KSO eks PTPN 1 (Regional 2).*
- 2) *Regional 2, is responsible for KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 1 & 8)*
- 3) *Regional 6 KSO, is responsible for KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 6) and KSO Distrik Aceh Timur (DATIM)*
- 4) *Regional 7 KSO, is responsible for KSO Kelapa Sawit – Eks PTPN 1 (Regional 2) dan KSO Distrik Jawa Barat (DJABA)*

*Establishment and Appointment of Region Head and Senior Executive Vice President (SEVP) of KSO Region VI & VII*

Regarding the establishment of KSO Regions 6 and 7, in accordance with the Decree of Directors of PT Perkebunan Nusantara III (Persero) No.DSDM/SKPRS/R/71/2024 dated April 30, 2024 and No.DSDM/SKPRS/R/71/2024 dated May 8, 2024, regarding the placement of the *Region Head* and members of the *Senior Executive Vice President (SEVP)* in the Palm Oil KSO between the Company and PTPN I as follows:

- 1) *Syahriadi Siregar as Head Regional 6 KSO*
- 2) *T. Zein Ichwan as SEVP Operation Regional 6 KSO*
- 3) *Denny Ramadhan Nasution as Region Head Regional 7 KSO*
- 4) *Darmansyah Siregar as SEVP Operation Regional 7 KSO*
- 5) *Bambang Eko Prasetyo as SEVP Business Support Regional 7 KSO*



**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**46. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN KEUANGAN**

**46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS**

	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Sebelum Penyajian Kembali/ Before Restatement	Penyajian Kembali/ Restatement	Setelah Penyajian Kembali/ After Restatement	
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b>				<b>CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</b>
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	1.622.105.796.147	4.532.130.906.460	6.154.236.702.607	Cash and cash equivalents
Kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya	108.824.032.919	75.643.926.104	184.467.959.023	Restricted cash and time deposit
Piutang usaha				Trade receivable
Pihak ketiga	38.373.187.475	158.664.736.319	197.037.923.794	Third parties
Pihak-pihak berelasi	1.263.991.748.210	912.738.848.704	2.176.730.596.914	Related parties
Persediaan - neto	1.587.662.066.744	2.353.743.566.662	3.941.405.633.406	Inventories - net
Aset biologis	116.132.681.772	338.681.599.738	454.814.281.510	Biological assets
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga	241.288.460	385.206.825.359	385.448.113.819	Third parties
Pihak-pihak berelasi	851.118.710.152	1.395.421.291.680	2.246.540.001.832	Related parties
Bagian lancar - piutang lain-lain jangka panjang	12.916.584.000	-	12.916.584.000	Current maturities of other long-term receivables
Pajak dibayar dimuka	536.058.493.391	261.069.308.464	797.127.801.855	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	12.056.615.973	56.335.359.827	68.391.975.800	Other current asset
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>6.149.481.205.243</b>	<b>10.469.636.369.317</b>	<b>16.619.117.574.560</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Piutang lain-lain jangka panjang				Other long-term receivables
Pihak ketiga	-	13.925.625.676	13.925.625.676	Third parties
Pihak-pihak berelasi	2.901.379.252.457	883.428.668.872	3.784.807.921.329	Related parties
Piutang plasma	84.202.837.989	139.600.181.651	223.803.019.640	Plasma receivables
Investasi saham	128.951.254.524	206.674.241.711	335.625.496.235	Investment in shares of stock
Aset hak-guna	33.596.636.579	72.736.153.464	106.332.790.043	Right-of-use assets
Aset tetap	12.601.853.034.086	24.505.705.752.890	37.107.558.786.976	Fixed assets
Properti investasi	426.490.800.000	-	426.490.800.000	Investment property
Beban tangguhan hak atas tanah	160.473.017.577	130.997.342.552	291.470.360.129	Deferred charges landrights
Piutang tagihan pajak	224.126.611.155	120.413.308.016	344.539.919.171	Claim for tax refund
Aset pajak tangguhan	269.253.107.416	191.595.965.659	460.849.073.075	Deferred tax assets
Aset tidak lancar lainnya	21.418.205.162	63.800.532.799	85.218.737.961	Other non-current assets
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>16.851.744.756.945</b>	<b>26.328.877.773.290</b>	<b>43.180.622.530.235</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>23.001.225.962.188</b>	<b>36.798.514.142.607</b>	<b>59.799.740.104.795</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**46. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS  
(continued)**

	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Sebelum Penyajian Kembali/ Before Restatement	Penyajian Kembali/ Restatement	Setelah Penyajian Kembali/ After Restatement	
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)</b>				<b>CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang bank jangka pendek	2.000.000.000	-	2.000.000.000	Short-term bank loan
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	1.102.154.952.634	1.587.825.859.093	2.689.980.811.727	Third parties
Pihak-pihak berelasi	36.168.912.363	62.845.633.835	99.014.546.198	Related parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak ketiga	58.289.759.969	74.085.399.864	132.375.159.833	Third parties
Pihak-pihak berelasi	223.998.771.927	168.579.670.486	392.578.442.413	Related parties
Liabilitas kontrak	417.221.081.299	712.528.429.686	1.129.749.510.985	Contract liabilities
Utang pajak	108.389.369.088	291.865.413.943	400.254.783.031	Taxes payables
Akrual	598.285.557.002	1.510.264.814.385	2.108.550.371.387	Accrued
Bagian lancar utang bank jangka panjang	523.365.261.384	2.320.793.167.554	2.844.158.428.938	Current maturities of long-term debts
Bagian lancar liabilitas sewa	21.079.688.827	46.066.445.635	67.146.134.462	Current maturities of lease liability
Bagian lancar pendapatan diterima dimuka	1.642.658.312	407.598.112	2.050.256.424	Current maturities of unearned revenue
Bagian lancar liabilitas imbalan kerja karyawan	327.381.027.992	544.211.699.871	871.592.727.863	Current maturities of employee benefit liabilities
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>3.419.977.040.797</b>	<b>7.319.474.132.464</b>	<b>10.739.451.173.261</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas sewa jangka panjang	17.874.156.871	31.679.612.500	49.553.769.371	Long-term lease liability
Liabilitas pajak tangguhan	14.959.212.479	16.298.895.130	31.258.107.609	Deferred tax liabilities
Utang jangka panjang	4.339.281.566.258	18.707.439.386.066	23.046.720.952.324	Long-term debts
Utang lain-lain jangka panjang	711.359.592.570	(711.359.592.570)	-	Other long-term debts
Liabilitas imbalan kerja karyawan Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	2.702.136.474.053	5.418.442.326.471	8.120.578.800.524	Employee benefit liabilities
	4.975.304.496	-	4.975.304.496	Unearned revenue
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>7.790.586.306.727</b>	<b>23.462.500.627.597</b>	<b>31.253.086.934.324</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>11.210.563.347.524</b>	<b>30.781.974.760.061</b>	<b>41.992.538.107.585</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**46. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS  
(continued)**

	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Sebelum Penyajian Kembali/ Before Restatement	Penyajian Kembali/ Restatement	Setelah Penyajian Kembali/ After Restatement	
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)</b>				<b>CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY (continued)</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk				Equity attributable to owners of the parent entity
Modal saham - nilai nominal				Capital stock - Rp1,000,000 par value per share
Rp1.000.000 per saham				Authorized – 11,700,000 shares
Modal dasar – 11.700.000 saham				Issued and fully paid capital stock - 2,942,116 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 2.942.116 saham	2.942.116.000.000	-	2.942.116.000.000	Additional paid in capital
Tambahan modal disetor	(22.831.993.890)	22.293.678.176	(538.315.714)	Other comprehensive income
Penghasilan komprehensif lain	3.688.288.615.183	-	3.688.288.615.183	Equity merging entities
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	5.994.245.704.370	5.994.245.704.370	Changes in fair value of financial asset
Perubahan nilai wajar aset keuangan	(12.862.769.110)	-	(12.862.769.110)	Retained earnings/ (Accumulated losses)
Saldo laba/ (Akumulasi rugi)				Appropriated
Ditentukan penggunaannya	6.025.155.909.206	-	6.025.155.909.206	Unappropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(659.031.231.193)	-	(659.031.231.193)	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	11.960.834.530.196	6.016.539.382.546	17.977.373.912.742	Equity attributable to owners of the parent entity – net
Kepentingan non-pengendali	(170.171.915.532)	-	(170.171.915.532)	Non-controlling Interests
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>11.790.662.614.664</b>	<b>6.016.539.382.546</b>	<b>17.807.201.997.210</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>23.001.225.962.188</b>	<b>36.798.514.142.607</b>	<b>59.799.740.104.795</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**46. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS  
(continued)**

	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Sebelum Penyajian Kembali/ Before Restatement	Penyajian Kembali/ Restatement	Setelah Penyajian Kembali/ After Restatement	
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN LAIN KONSOLIDASIAN</b>				<b>CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIF INCOME</b>
<b>PENDAPATAN</b>	<b>10.478.408.954.176</b>	<b>23.342.325.290.283</b>	<b>33.820.734.244.459</b>	<b>REVENUE</b>
<b>BEBAN POKOK PENDAPATAN</b>	<b>(5.502.803.613.189)</b>	<b>(13.012.326.715.345)</b>	<b>(18.515.130.328.534)</b>	<b>COST OF REVENUE</b>
<b>LABA KOTOR</b>	<b>4.975.605.340.987</b>	<b>10.329.998.574.938</b>	<b>15.305.603.915.925</b>	<b>GROSS PROFIT</b>
Keuntungan (kerugian) yang timbul dari perubahan nilai wajar aset biologis	(110.063.236.802)	(183.013.470.171)	(293.076.706.973)	Gain (loss) arising from changes in fair value of biological asset
Beban pemasaran dan penjualan	(163.195.001.370)	(402.413.459.513)	(565.608.460.883)	Marketing and selling expense
Beban umum dan administrasi	(1.613.522.785.699)	(3.121.389.524.063)	(4.734.912.309.762)	General and administrative expense
Pendapatan operasi lain	274.392.428.246	588.822.838.220	863.215.266.466	Other operating income
Beban operasi lain	(178.285.094.237)	(914.815.323.634)	(1.093.100.417.871)	Other operating expenses
<b>LABA USAHA</b>	<b>3.184.931.651.125</b>	<b>6.297.189.635.777</b>	<b>9.482.121.286.902</b>	<b>OPERATING PROFIT</b>
Bagian laba/ (rugi) entitas asosiasi	(99.006.530.424)	20.467.290.814	(78.539.239.610)	Share in loss of associate
Penghasilan keuangan	208.014.764.315	854.426.291.181	1.062.441.055.496	Finance income
Beban keuangan	(438.616.825.562)	(1.555.108.760.212)	(1.993.725.585.774)	Finance expenses
<b>LABA SEBELUM BEBAN PAJAK PENGHASILAN</b>	<b>2.855.323.059.454</b>	<b>5.616.974.457.560</b>	<b>8.472.297.517.014</b>	<b>PROFIT BEFORE INCOME TAX EXPENSE</b>
Beban pajak penghasilan	(680.535.272.645)	(605.483.293.444)	(1.286.018.566.089)	Income tax expense
<b>LABA TAHUN BERJALAN</b>	<b>2.174.787.786.809</b>	<b>5.011.491.164.116</b>	<b>7.186.278.950.925</b>	<b>PROFIT OF THE YEAR</b>
<b>Penghasilan komprehensif lain:</b>				<b>Other comprehensive income:</b>
Pos-pos yang tidak akan direklasifikasikan ke laba rugi:				Items that will not be reclassified to profit or loss:
Rugi pengukuran kembali liabilitas imbalan pasti - neto	(373.835.817.133)	(528.957.380.494)	(902.793.197.627)	Loss on re-measurement of defined benefit liability - net
Revaluasi aset tetap	-	(209.192.734.513)	(209.192.734.513)	Revaluation of fixed assets
Pajak penghasilan terkait	-	-	-	Income tax related
Nilai wajar investasi saham	2.521.013.198	(6.826.930.084)	(4.305.916.886)	Fair value of share investment
Bagian penghasilan komprehensif lain dari entitas asosiasi	-	24.501.872	24.501.872	Other comprehensive income from associated entities
Laba (rugi) aset keuangan tersedia untuk dijual - neto	-	24.750.000	24.750.000	Gain (loss) on financial asset available for sale
Pajak penghasilan terkait	82.565.783.712	107.760.996.887	190.326.780.599	Income tax related
Penghasilan komprehensif lain periode/ tahun berjalan setelah pajak	(288.749.020.223)	(637.166.796.332)	(925.915.816.555)	Other comprehensive income for the period/ year net of tax
<b>TOTAL PENGHASILAN KOMPRESIF PERIODE BERJALAN</b>	<b>1.886.038.766.586</b>	<b>4.374.324.367.784</b>	<b>6.260.363.134.370</b>	<b>TOTAL COMPREHENSIF INCOME FOR THE PERIODE</b>

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**46. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS  
(continued)**

	31 Desember 2022/ December 31, 2022			
	Sebelum Penyajian Kembali/ Before Restatement	Penyajian Kembali/ Restatement	Setelah Penyajian Kembali/ After Restatement	
<b>LAPORAN LABA RUGI DAN PENGHASILAN LAIN KONSOLIDASIAN (lanjutan)</b>				<b>CONSOLIDATED STATEMENT OF PROFIT OR LOSS AND OTHER COMPREHENSIF INCOME (continued)</b>
<b>Laba/ (Rugi) Tahun Berjalan Yang Dapat diatribusikan kepada: diatribusikan kepada:</b>				<b>Comprehensive Income/ (Loss) for the year attributable to:</b>
Pemilik entitas induk	2.185.399.453.623	5.027.062.559.886	7.212.462.013.509	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	(10.611.666.814)	(15.571.395.770)	(26.183.062.584)	Non-controlling interests
<b>Total</b>	<b>2.174.787.786.809</b>	<b>5.011.491.164.116</b>	<b>7.186.278.950.925</b>	<b>Total</b>
<b>Laba/ (Rugi) Komprehensif tahun Berjalan Yang Dapat diatribusikan kepada:</b>				<b>Comprehensive Income/ (Loss) for the year attributable to:</b>
Pemilik entitas induk	1.896.155.759.653	4.389.919.425.220	6.286.075.184.873	Owners of the parent entity
Kepentingan non-pengendali	(10.116.993.067)	(15.595.057.436)	(25.712.050.503)	Non-controlling interests
<b>Total</b>	<b>1.886.038.766.586</b>	<b>4.374.324.367.784</b>	<b>6.260.363.134.370</b>	<b>Total</b>
<b>LABA PER SAHAM DASAR YANG DAPAT DIATRIBUKASIKAN KEPADA PEMILIK ENTITAS INDUK</b>	<b>742.799</b>	<b>1.708.655</b>	<b>2.451.454</b>	<b>BASIC EARNING PER SHARE ATTRIBUTABLE TO THE OWNERS OF THE PARENT COMPANY</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)**

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)**

**46. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS  
(continued)**

	31 Desember 2021/ December 31, 2021			
	Sebelum Penyajian Kembali/ Before Restatement	Penyajian Kembali/ Restatement	Setelah Kembali/ After Restatement	
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN</b>				<b>CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION</b>
<b>ASET</b>				<b>ASSETS</b>
<b>ASET LANCAR</b>				<b>CURRENT ASSETS</b>
Kas dan setara kas	1.640.318.348.852	4.041.886.930.954	5.682.205.279.806	Cash and cash equivalents
Kas dan deposito yang dibatasi penggunaannya	73.894.721.948	63.537.451.661	137.432.173.609	Restricted cash and time deposit
Piutang usaha				Trade receivable
Pihak ketiga	22.684.314.944	98.745.814.208	121.430.129.152	Third parties
Pihak-pihak berelasi	1.456.996.908.074	1.166.341.519.651	2.623.338.427.725	Related parties
Persediaan - neto	664.641.861.929	1.093.444.731.951	1.758.086.593.880	Inventories - net
Aset biologis	113.698.025.027	394.213.289.112	507.911.314.139	Biological assets
Piutang lain-lain				Other receivables
Pihak ketiga	308.281.689	128.516.711.082	128.824.992.771	Third parties
Pihak-pihak berelasi	218.700.378.158	1.128.049.169.021	1.346.749.547.179	Related parties
Pajak dibayar dimuka	341.179.558.206	302.764.371.214	643.943.929.420	Prepaid taxes
Aset lancar lainnya	260.865.740.935	55.657.183.845	316.522.924.780	Other current asset
<b>Total Aset Lancar</b>	<b>4.793.288.139.762</b>	<b>8.473.157.172.699</b>	<b>13.266.445.312.461</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>ASET TIDAK LANCAR</b>				<b>NON-CURRENT ASSETS</b>
Piutang lain-lain jangka panjang				Other long-term receivables
Pihak ketiga	-	18.643.218.093	18.643.218.093	Third parties
Pihak-pihak berelasi	2.752.237.443.595	792.325.073.959	3.544.562.517.554	Related parties
Piutang plasma	97.730.338.679	172.339.282.444	270.069.621.123	Plasma receivables
Investasi saham	191.404.776.230	155.509.379.272	346.914.155.502	Investment in shares of stock
Aset tetap	12.339.273.978.992	24.979.987.868.830	37.319.261.847.822	Fixed assets
Properti investasi	421.420.940.000	-	421.420.940.000	Investment property
Beban tangguhan hak atas tanah	162.933.510.594	117.512.609.704	280.446.120.298	Deferred charges landrights
Piutang tagihan pajak	129.188.546.568	24.496.223.691	153.684.770.259	Claim for tax refund
Aset tidak lancar lainnya	22.386.659.984	29.808.510.131	52.195.170.115	Other non-current assets
Aset pajak tangguhan	242.207.126.619	200.756.778.381	442.963.905.000	Deferred tax assets
Aset hak-guna	37.313.567.880	68.351.038.814	105.664.606.694	Right-of-use assets
<b>Total Aset Tidak Lancar</b>	<b>16.396.096.889.141</b>	<b>26.559.729.983.319</b>	<b>42.955.826.872.460</b>	<b>Total Current Assets</b>
<b>TOTAL ASET</b>	<b>21.189.385.028.903</b>	<b>35.032.887.156.018</b>	<b>56.222.272.184.921</b>	<b>TOTAL ASSETS</b>

The original consolidated financial statements included herein are in the Indonesian language.

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**46. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS  
(continued)**

	31 Desember 2021/ December 31, 2021			
	Sebelum Penyajian Kembali/ Before Restatement	Penyajian Kembali/ Restatement	Setelah Kembali/ After Restatement	
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)</b>				<b>CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY</b>
<b>LIABILITAS</b>				<b>LIABILITIES</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PENDEK</b>				<b>CURRENT LIABILITIES</b>
Utang usaha				Trade payables
Pihak ketiga	732.555.009.854	1.299.685.115.009	2.032.240.124.863	Third parties
Pihak-pihak berelasi	23.656.513.454	20.020.138.101	43.676.651.555	Related parties
Utang lain-lain				Other payables
Pihak ketiga	50.993.799.866	170.029.779.622	221.023.579.488	Third parties
Pihak-pihak berelasi	209.500.622.905	112.211.421.959	321.712.044.864	Related parties
Liabilitas kontrak	79.443.810.611	380.211.009.294	459.654.819.905	Contract liabilities
Utang pajak	540.283.076.419	415.343.445.487	955.626.521.906	Taxes payables
Akrual	520.463.174.127	1.196.867.049.266	1.717.330.223.393	Accrued
Bagian lancar utang bank jangka panjang	436.076.742.816	2.780.279.316.215	3.216.356.059.031	Current maturities of long-term debts
Bagian lancar liabilitas sewa	8.594.554.547	40.098.749.182	48.693.303.729	Current maturities of lease liability
Bagian lancar pendapatan diterima dimuka	2.754.903.590	754.288.885	3.509.192.475	Current maturities of unearned revenue
Bagian lancar liabilitas imbalan kerja karyawan	324.519.040.280	832.850.418.840	1.157.369.459.120	Current maturities of employee benefit liabilities
<b>Total Liabilitas Jangka Pendek</b>	<b>2.928.841.248.469</b>	<b>7.248.350.731.860</b>	<b>10.177.191.980.329</b>	<b>Total Current Liabilities</b>
<b>LIABILITAS JANGKA PANJANG</b>				<b>NON-CURRENT LIABILITIES</b>
Liabilitas sewa jangka panjang	35.635.482.168	36.562.662.997	72.198.145.165	Long-term lease liability
Liabilitas pajak tangguhan	12.282.184.258	10.376.283.037	22.658.467.295	Deferred tax liabilities
Utang bank jangka panjang	4.988.782.654.858	19.588.256.135.804	24.577.038.790.662	Long-term bank debts
Utang lain-lain jangka panjang	698.990.626.289	(698.990.626.289)	-	Other long-term debts
Liabilitas imbalan kerja karyawan	2.614.704.017.185	5.266.885.877.936	7.881.589.895.121	Employee benefit liabilities
Pendapatan diterima dimuka jangka panjang	5.524.967.528	-	5.524.967.528	Unearned revenue
<b>Total Liabilitas Jangka Panjang</b>	<b>8.355.919.932.286</b>	<b>24.203.090.333.485</b>	<b>32.559.010.265.771</b>	<b>Total Non-Current Liabilities</b>
<b>TOTAL LIABILITAS</b>	<b>11.284.761.180.755</b>	<b>31.451.441.065.345</b>	<b>42.736.202.246.100</b>	<b>TOTAL LIABILITIES</b>

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
DAN ENTITAS ANAKNYA  
CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN  
KONSOLIDASIAN**  
Tanggal 31 Desember 2023 dan untuk  
Tahun yang Berakhir pada Tanggal Tersebut  
(Disajikan dalam Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

**PT PERKEBUNAN NUSANTARA IV  
AND ITS SUBSIDIARIES  
NOTES TO CONSOLIDATED  
FINANCIAL STATEMENTS**  
As of December 31, 2023 and for  
the Year Then Ended  
(Expressed in Rupiah, unless otherwise stated)

**46. PENYAJIAN KEMBALI ATAS LAPORAN  
KEUANGAN (lanjutan)**

**46. RESTATEMENT OF FINANCIAL STATEMENTS  
(continued)**

	31 Desember 2021/ December 31, 2021			
	Sebelum Penyajian Kembali/ Before Restatement	Penyajian Kembali/ Restatement	Setelah Kembali/ After Restatement	
<b>LAPORAN POSISI KEUANGAN KONSOLIDASIAN (lanjutan)</b>				<b>CONSOLIDATED STATEMENT OF FINANCIAL POSITION (continued)</b>
<b>LIABILITAS DAN EKUITAS (lanjutan)</b>				<b>LIABILITIES AND EQUITY (continued)</b>
<b>EKUITAS</b>				<b>EQUITY</b>
<b>Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk</b>				<b>Equity attributable to owners of the parent entity</b>
Modal saham - nilai nominal				Capital stock - Rp1,000,000 par value per share
Rp1.000.000 per saham				Authorized - 11,700.000 shares
Modal dasar - 11.700.000 saham				Issued and fully paid capital stock - 2,942,116 shares
Modal ditempatkan dan disetor - 2.942.116 saham	2.942.116.000.000	-	2.942.116.000.000	Additional paid in capital
Tambahan modal disetor	(22.831.993.890)	22.293.678.176	(538.315.714)	Other comprehensive income
Penghasilan komprehensif lain	3.688.288.615.183	-	3.688.288.615.183	Equity merging entities
Ekuitas <i>merging entities</i>	-	3.559.152.412.567	3.559.152.412.567	Changes in fair value of financial asset
Perubahan nilai wajar aset keuangan	-	-	(15.383.782.308)	Retained earnings/ (Accumulated losses)
Saldo laba/ (Akumulasi rugi)				Appropriated
Ditentukan penggunaannya	3.870.817.237.018	-	3.870.817.237.018	Unappropriated
Belum ditentukan penggunaannya	(413.711.087.768)	-	(398.327.305.460)	
Ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	10.064.678.770.543	3.581.446.090.743	13.646.124.861.286	Equity attributable to owners of the parent entity - net
Kepentingan non-pengendali	(160.054.922.465)	-	(160.054.922.465)	Non-controlling Interests
<b>TOTAL EKUITAS</b>	<b>9.904.623.848.078</b>	<b>3.581.446.090.743</b>	<b>13.486.069.938.821</b>	<b>TOTAL EQUITY</b>
<b>TOTAL LIABILITAS DAN EKUITAS</b>	<b>21.189.385.028.833</b>	<b>35.032.887.156.088</b>	<b>56.222.272.184.921</b>	<b>TOTAL LIABILITIES AND EQUITY</b>